



BUPATI SUMBAWA  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA  
NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SUMBAWA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 31 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumbawa Tahun 2005-2025, program pembangunan daerah dalam jangka menengah diuraikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2016-2021;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
10. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 99);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 31 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2010 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 571);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2016-2021;

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumbawa yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Kabupaten Sumbawa yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa yang selanjutnya disebut RTRW adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah daerah yang menjadi pedoman bagi penataan wilayah yang merupakan dasar dalam penyusunan program pembangunan .
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini menetapkan RPJMD tahap ketiga dari pelaksanaan RPJP Tahun 2005-2025.

#### Pasal 3

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun rencana strategis dan RKPD.

### BAB II SISTEMATIKA

#### Pasal 4

Sistematika RPJMD disusun sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
- BAB III : GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN
- BAB IV : ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
- BAB V : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
- BAB VI : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
- BAB VII : KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
- BAB VIII : INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
- BAB IX : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
- BAB X : PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

#### Pasal 5

Isi dan uraian RPJMD Tahun 2016–2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 6

- (1) Dalam rangka mewujudkan konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah, konsistensi antara RPJMD dengan RPJPD dan RTRW, dan kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan, Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD.
- (2) Bupati dalam melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

### BAB III KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 7

- (1) Semua perencanaan yang dilakukan setelah berlakunya Peraturan Daerah ini harus berpedoman pada Peraturan Daerah ini.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan yang bertentangan dan/atau tidak sesuai harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar  
pada tanggal 4 Agustus 2016

BUPATI SUMBAWA,

ttd

M. HUSNI DJIBRIL

Diundangkan di Sumbawa Besar  
pada tanggal 4 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,

ttd

RASYIDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2016 NOMOR 1

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 44 TAHUN 2016

PENJELASAN  
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA  
NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2016-2021

I. UMUM

Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan satu kesatuan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 mengamanatkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) merupakan penjabaran visi, misi dan program kerja Kepala Daerah disusun dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional).

Dalam konteks perencanaan pembangunan Kabupaten Sumbawa, rujukan utama penyusunan RPJM Daerah ini adalah dokumen visi, misi dan program kerja Bupati/Wakil Bupati Sumbawa terpilih yaitu dokumen yang disampaikan dalam Rapat Paripurna Khusus DPRD Sumbawa pada tanggal 23 Juni 2016, dengan berpedoman kepada Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 31 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumbawa 2005-2025 untuk tahap lima tahunan ke-tiga yaitu periode tahun 2016-2021.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 631A

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan satu kesatuan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 mengamanatkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran visi, misi dan program kerja Kepala Daerah disusun dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Dalam konteks perencanaan pembangunan Kabupaten Sumbawa, rujukan utama penyusunan RPJMD ini adalah dokumen visi, misi dan program kerja Bupati/Wakil Bupati Sumbawa terpilih yaitu dokumen yang disampaikan dalam Rapat Paripurna Khusus DPRD Sumbawa, dengan berpedoman kepada Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 31 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumbawa 2005-2025 untuk tahap lima tahunan ketiga yaitu periode tahun 2016-2021.

Di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 31 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumbawa 2005-2025 disebutkan bahwa prioritas pembangunan lima tahun ketiga (RPJMD Tahap III Tahun 2016-2021) diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan daerah secara menyeluruh dengan penekanan pada pengembangan proses produksi di sektor sekunder dan tersier yang didukung oleh basis-basis sektor primer daerah agribisnis yang semakin kokoh. Pesatnya perkembangan kegiatan agribisnis harus ditunjang oleh ketersediaan infrastruktur pendukung terutama dalam hal komunikasi, informasi, perdagangan dan kelistrikan.

RPJPD Kabupaten Sumbawa menggariskan bahwa, dalam tahap ketiga ini diharapkan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat telah memasuki tahap *establish*, meningkatnya kemampuan ekonomi masyarakat dan semakin berperannya sektor swasta dalam memproduksi barang dan jasa secara murah. Walaupun demikian pelayanan pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan penyediaan barang publik (*public goods*) lainnya yang tidak dapat disediakan secara murah melalui mekanisme pasar tetap dilakukan pemerintah. Demikian juga pelayanan kesehatan diarahkan pada semakin baiknya taraf kesehatan masyarakat sebagai akibat dari semakin meningkatnya kesadaran akan hidup sehat dan bersih serta semakin primanya pelayanan kesehatan, sehingga angka harapan hidup semakin meningkat, angka kematian balita, bayi dan ibu melahirkan semakin menurun, dan penyebaran penyakit menular semakin rendah. Untuk itu, penyelenggaraan pelayanan umum lainnya diharapkan semakin baik, sehingga semakin tercipta suasana yang memberikan kesempatan bagi ketenangan ibadah, meningkatnya kerukunan sosial dan semakin bergairahnya interaksi masyarakat yang penuh kekeluargaan. Seiring dengan harapan akan kemajuan tersebut, kondisi infrastruktur dasar diupayakan semakin mantap sehingga semakin memberikan kenyamanan,



keamanan, efisiensi, ekonomis dan efektivitas dalam kehidupan masyarakat. Demikian pula kesadaran akan kelestarian lingkungan hidup semakin baik, pencemaran dapat dikurangi secara signifikan serta proses produksi semakin bersahabat dengan lingkungan karena didukung oleh teknologi ramah lingkungan. Pemerintah daerah dapat memfasilitasi pengembangan pendidikan tinggi dan pusat-pusat *research and development* (R&D) yang menunjang visi daerah agribisnis berdaya saing.

Untuk dapat mewujudkan harapan-harapan tersebut, perlu disusun RPJMD Kabupaten Sumbawa 2016-2021 sebagai pedoman dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran tahunan daerah. Selain berpedoman pada RPJPD Kabupaten Sumbawa Tahun 2005-2025, penyusunan RPJMD Kabupaten Sumbawa 2016-2021 juga memperhatikan RPJMD Provinsi NTB Tahun 2013-2018 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 3 Tahun 2013 dan RPJM Nasional Tahun 2015-2019 yang diamanatkan melalui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015. Selanjutnya, RPJMD Kabupaten Sumbawa 2016-2021 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-PD), yang nantinya akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun, dan dijadikan sebagai pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Sumbawa dalam periode perencanaan tersebut.

## **1.2 Dasar Hukum Penyusunan**

Dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2016-2021, peraturan perundangan sebagai landasan hukum penyusunannya adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman

- Penyusunan dan Penerapan Stándar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  3. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
  11. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005 -2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2008 Nomor 3);
  12. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
  13. Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 2 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi NTB Tahun 2013-2018;
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 31 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sumbawa 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2010 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 571);
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 626).

### **1.3 Hubungan Antar Dokumen**

Dalam sistem perencanaan pembangunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004, hubungan antara RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut.

#### **(1) RPJMD dan RPJPD Kabupaten Sumbawa**

RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2016-2021 merupakan RPJMD Tahap Ketiga dari tahapan pelaksanaan RPJPD Kabupaten Sumbawa Tahun 2005-2025. Penyusunan RPJMD selain menjabarkan visi, misi dan program Bupati/Wakil Bupati Sumbawa terpilih, juga berpedoman pada visi, misi

dan arah kebijakan yang termuat dalam RPJPD Kabupaten Sumbawa Tahun 2005-2025.

**(2) RPJMD dan RTRW Kabupaten Sumbawa**

Penyusunan RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2016-2021 memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai pola dan struktur tata ruang di dalam RTRW Kabupaten Sumbawa sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang daerah di Kabupaten Sumbawa.

**(3) RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD)**

RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2016-2021 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Tahun 2016-2021. Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (PD) di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sumbawa.

**(4) RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**

Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2016-2021 setiap tahun dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kabupaten Sumbawa yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja PD. RKPD disusun melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Sumbawa yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, dan kabupaten.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Dokumen RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2016-2021, dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 sebagai berikut.

**BAB I      Pendahuluan**

*Memuat latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, hubungan RPJMD dengan Perencanaan lainnya, dan sistematika penyusunan RPJMD Sumbawa 2016 – 2021.*

**BAB II     Gambaran Umum Kondisi Daerah**

*Memuat evaluasi pencapaian indikator makro pembangunan daerah dan kondisi eksisting yang mencakup aspek geografis dan demografis, aspek kesejahteraan rakyat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.*

**BAB III    Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Kerangka Pendanaan**

*Menjelaskan kondisi keuangan daerah dari berbagai sumber dana dan kebijakan pemerintah daerah dalam hal pendapatan, belanja, dan pembiayaan pembangunan daerah serta kerangka rencana pendanaan program/kegiatan.*

**BAB IV     Analisis Isu-Isu Strategis**

*Memuat analisis masalah pembangunan daerah serta rumusan isu strategis.*

**BAB V Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran**

*Memuat visi, misi, tujuan dan sasaran jangka menengah daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan dan sasaran pencapaian visi dan misi.*

**BAB VI Strategi dan Arah Kebijakan**

*Memuat dan menjelaskan strategi dan kebijakan pembangunan daerah, sebagai arah bagi PD dan lembaga terkait dalam merumuskan sasaran strategis guna mencapai kinerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.*

**BAB VII Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah**

*Memuat keterkaitan antara strategi dan arah kebijakan dengan kebijakan umum dan program pembangunan daerah yang akan menjadi dasar penjabaran dalam Renstra PD.*

**BAB VIII Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan**

*Memuat indikasi rencana program prioritas yang terpilih dari kumpulan program pembangunan daerah. Untuk menjamin terlaksananya program prioritas, maka disertai pula gambaran mengenai indikasi kebutuhan pendanaannya yang bersumber dari APBD Kabupaten Sumbawa.*

**BAB IX Penetapan Indikator Kinerja Daerah**

*Memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah pada akhir periode masa jabatan, hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome.*

**BAB X Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan**

*Memuat kaidah pelaksanaan dan penegasan dalam menerapkan RPJMD serta tindak lanjut yang perlu dilaksanakan oleh PD. Program transisi untuk menjembatani kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah pada akhir masa jabatan kepala daerah.*

**1.5 Maksud dan Tujuan**

Penyusunan RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2016-2021 dimaksudkan untuk menghasilkan rumusan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan yang terarah, efektif, efisien dan terpadu yang dapat mendorong terwujudnya visi, misi dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan oleh Bupati/Wakil Bupati Sumbawa dengan memperhatikan arah RPJPD Kabupaten Sumbawa Tahun 2005-2025, serta memperhatikan berbagai aspirasi seluruh pemangku kepentingan yang ada di Kabupaten Sumbawa.

RPJMD Kabupaten Sumbawa juga dimaksudkan untuk menjadi acuan dan pedoman resmi bagi Pemerintah Kabupaten Sumbawa dalam penyusunan Rencana Strategis PD (Renstra-PD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta sekaligus merupakan acuan penentuan program daerah yang akan dibahas dalam rangkaian forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah Kabupaten Sumbawa.

Tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut.

- (1) Menjabarkan visi, misi, dan program Bupati/Wakil Bupati Sumbawa ke dalam arah kebijakan dan program pembangunan yang rinci, terarah, terukur dan dapat dilaksanakan dari tahun 2016 hingga tahun 2021;

- (2) Menyediakan satu acuan resmi bagi seluruh PD Pemerintah Kabupaten Sumbawa dalam menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dengan sumber dana APBD Kabupaten Sumbawa;
- (3) Mendorong terwujudnya koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi program pembangunan antar PD, antara Pemerintah Kabupaten Sumbawa dengan pemerintah Kabupaten/Kota lainnya, antara Pemerintah Kabupaten Sumbawa dengan Pemerintah Provinsi, serta antara Pemerintah Kabupaten Sumbawa dengan Pemerintah Pusat; dan
- (4) Menyediakan ukuran kinerja dalam mengevaluasi kinerja setiap PD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa.

## BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

### 2.1 Aspek Geografi dan Demografi

Aspek geografi dan demografi merupakan salah satu aspek kondisi kewilayahan yang mutlak diperhatikan sebagai ruang dan subyek pembangunan. Dari uraian ini diharapkan dapat terpetakan potensi dan permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan Kabupaten Sumbawa lima tahun kedepan.

#### 2.1.1 Aspek Geografis

##### 2.1.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

###### a. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Sumbawa dengan luas wilayah 11.556,44 km<sup>2</sup>, terdiri dari wilayah daratan 6.643,98 km<sup>2</sup>, dan wilayah perairan laut 4.912,46 km<sup>2</sup>. Secara administratif Kabupaten Sumbawa terbagi dalam 24 wilayah kecamatan, 157 Desa dan 8 Kelurahan, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 2.1**  
**Wilayah Administratif Pemerintahan Kabupaten Sumbawa**

No.	Kecamatan	Luas Daratan (Km <sup>2</sup> )	Desa / Kelurahan	Persentase Daratan
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1.	Lunyuk	513,74	7	7,73
2.	Orong Telu	465,97	4	7,01
3.	Alas	123,04	8	2,64
4.	Alas Barat	168,88	8	1,16
5.	Buer	137,01	6	2,66
6.	Utan	155,42	9	2,80
7.	Rhee	230,82	4	3,01
8.	Batulanteh	391,40	6	5,89
9.	Sumbawa	44,83	8*	0,66
10.	Labuhan Badas	435,89	7	6,69
11.	Unter Iwes	82,38	8	1,13
12.	Moyohilir	186,79	10	2,81
13.	Moyo Utara	90,80	6	1,37
14.	Moyohulu	311,96	12	4,70
15.	Ropang	444,48	5	6,69
16.	Lenangguar	504,32	4	7,59
17.	Lantung	167,45	4	2,52
18.	Lape	204,43	4	3,07
19.	Lopok	155,59	7	2,34
20.	Plampang	418,69	11	7,11
21.	Labangka	243,08	5	2,52
22.	Maronge	274,75	4	4,46
23.	Empang	558,55	10	8,41
24.	Tarano	333,71	8	5,02
Jumlah		6.643,98	165	100

Sumber: BPS Kabupaten Sumbawa (Sumbawa Dalam Angka 2015)

(\*) kelurahan

Peta wilayah Kabupaten Sumbawa serta batasan wilayah masing-masing kecamatan sebagai berikut.



**Gambar 2.1**  
**Peta Administrasi Kabupaten Sumbawa**

Jarak jangkauan ibu kota kecamatan terhadap ibu kota Kabupaten Sumbawa secara rata-rata adalah 44,82 Km dengan sebaran jarak terjauh dari ibu kota kabupaten 96 Km (kecamatan Tarano). Sedangkan jarak jangkauan ibu kota desa terhadap ibu kota kecamatan rata-rata 10,16 Km dengan sebaran rata-rata jarak terjauh dari ibu kota desa terhadap ibu kota kecamatan adalah 58,11 Km (desa di Kecamatan Ropang).

Batas wilayah adminisrasi Kabupaten Sumbawa sebagai berikut.

- Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Flores;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Dompu;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Sumbawa Barat.

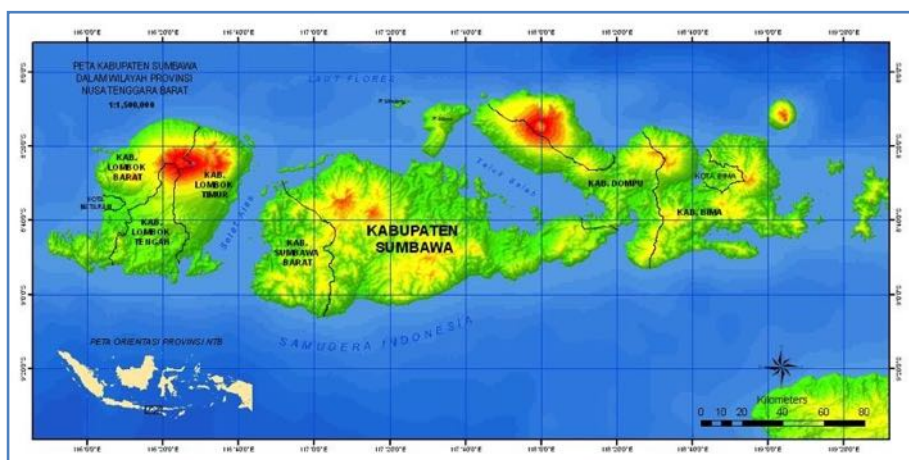
### 2.1.1.2 Letak dan Kondisi Geografis

#### a. Posisi Astronomis

Secara astronomis, Kabupaten Sumbawa berada pada posisi 116°42' – 118°22' Bujur Timur dan 8°8' – 9°7' Lintang Selatan.

#### b. Posisi Geostrategis

Kabupaten Sumbawa merupakan salah satu dari 10 (sepuluh) Kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Wilayah Kabupaten Sumbawa berada di daratan Pulau Sumbawa dan menjadi salah satu dari 5 (lima) Kabupaten/Kota di Pulau Sumbawa. Posisi geostrategis Kabupaten Sumbawa berada pada jalur lalu lintas Lombok – Bima, secara regional berada pada jalur lintas perdagangan Surabaya-Waingapu serta berada pada koridor lima Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), yang berorientasi pada Pembangunan Pariwisata dan Ketahanan Pangan Nasional.



**Gambar 2.2**  
**Peta Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat**

**c. Kondisi Geografis**

Kondisi geografis Kabupaten Sumbawa secara umum terdiri dari dataran rendah, daerah pesisir, daerah perbukitan, dan daerah pegunungan.

Secara umum karakteristik wilayah Kabupaten Sumbawa disajikan pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.2**  
**Karakteristik Wilayah Kabupaten Sumbawa**

<b>No</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>)</b>	<b>Karakteristik Wilayah</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Lunyuk	513,74	Pegunungan
2.	Orong Telu	465,97	Pegunungan
3.	Alas	123,04	Pesisir
4.	Alas Barat	168,88	Pesisir
5.	Buer	137,01	Pesisir
6.	Utan	155,42	Pesisir
7.	Rhee	230,82	Pesisir
8.	Batulanteh	391,40	Pegunungan
9.	Sumbawa	44,83	Pesisir
10.	Labuhan Badas	435,89	Pesisir
11.	Unter Iwes	82,38	Dataran
12.	Moyo Hilir	186,79	Pesisir
13.	Moyo Utara	90,80	Pesisir
14.	Moyo Hulu	311,96	Pegunungan
15.	Ropang	444,48	Pegunungan
16.	Lenangguar	504,32	Pegunungan
17.	Lantung	167,45	Pegunungan
18.	Lape	204,43	Pesisir
19.	Lopok	155,59	Pegunungan
20.	Plampang	418,69	Pesisir
21.	Labangka	243,08	Pesisir
22.	Maronge	274,75	Pesisir
23.	Empang	558,55	Pesisir
24.	Tarano	333,71	Pesisir
<b>Jumlah</b>		<b>6.643,98</b>	

*Sumber: Bahan Kongres Nasional Perumahan dan Permukiman II*

Bila di tinjau dari kondisi geografis desa, maka terdapat desa-desa yang



tergolong kedalam kategori desa terpencil, pedalaman, pegunungan dan pesisir, sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 2.3**  
**Kondisi Geografis Desa-Desa Di Kabupaten Sumbawa**

No	Desa	Kecamatan	Pedalaman	Terpencil	Pesisir	Kepulauan	Pegunungan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Jamu	Lunyuk	√	√			√
2	Padasuka	Lunyuk			√		√
3	Perung	Lunyuk			√		
4	Emang Lestari	Lunyuk			√		√
5	Senawang	Orong Telu	√	√			√
6	Kelawis	Orong Telu	√	√			√
7	Mungkin	Orong Telu	√	√			√
8	Sebeok	Orong Telu	√	√			√
9	Marente	Alas	√	√			
10	Dalam	Alas			√		
11	Pulau Bungin	Alas			√		
12	Lab. Alas	Alas			√		
13	Stowe Brang	Utan			√		
14	Lab. Bajo	Utan			√		
15	Pukat	Utan			√		
16	Motong	Utan			√		
17	Sebedo	Utan			√		
18	Bale Brang	Utan			√		
19	Batu Rotok	Batu Lanteh	√	√			√
20	Tangkampulit	Batu Lanteh	√	√			√
21	Bao Desa	Batu Lanteh	√	√			√
22	Tepal	Batu Lanteh	√	√			√
23	Batu Dulang	Batu Lanteh	√				√
24	Kelungkung	Batu Lanteh	√				√
25	Olat Rawa	Moyo Hilir			√		
26	Batu Bangka	Moyo Hilir		√	√		
27	Lab Ijuk	Moyo Hilir		√	√		
28	Sempe	Moyo Hulu	√	√			√
29	Batu Tering	Moyo Hulu					√
30	Lito	Moyo Hulu					√
31	Berang Rea	Moyo Hulu					√
32	Tatebal	Lenangguar	√		√		
33	Ledang	Lenangguar	√				
34	Telaga	Lenangguar	√				
35	Lantung	Lantung	√				
36	Sepukur	Lantung	√				
37	Ai Mual	Lantung	√				

<b>No</b>	<b>Desa</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Pedalaman</b>	<b>Terpendcil</b>	<b>Pesisir</b>	<b>Kepulauan</b>	<b>Pegunungan</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
38	Padesa	Lantung	√				
39	Ropang	Ropang	√	√			√
40	Lebangkar	Ropang	√	√	√		√
41	Lebin	Ropang	√	√			√
42	Lawin	Ropang	√	√	√		√
43	Ranan	Ropang	√	√			√
44	Lab. Kuris	Lape			√		
45	Pungkit	Lopok	√				
46	Mama	Lopok	√				
47	Lopok Beru	Lopok	√				
48	Muer	Plampang			√		
49	Teluk Santong	Plampang			√		
50	UPT. Prode Sp I	Plampang	√	√			
51	UPT. Prode Sp II	Plampang	√	√			
52	UPT. Prode Sp III	Plampang	√	√			
53	Brang Kolong	Plampang			√		
54	Usar	Plampang			√		
55	Boal	Empang			√		
56	Jotang	Empang			√		
57	Empang Atas	Empang			√		
58	Gapit	Empang			√		
59	Lab. Mapin	Alas Barat			√		
60	Lekong	Alas Barat			√		
61	Gontar	Alas Barat			√		
62	Usar Mapin	Alas Barat			√		
63	Gontar Baru	Alas Barat			√		
64	Lab. Badas	Lab. Badas			√		
65	Karang Dima	Lab. Badas			√		
66	Lab. Sumbawa	Lab. Badas			√		
67	Lab. Aji	Lab. Badas		√	√		
68	Sebotok	Lab. Badas		√	√		
69	Bugis Medang	Lab. Badas		√	√		
70	Bajo Medang	Lab. Badas		√	√		
71	Buin Beru	Buer			√		
72	Tarusa	Buer			√		
73	Lab. Burung	Buer			√		
74	Juru Mapin	Buer	√				
75	Pulau Kaung	Buer			√		
76	Labangka	Labangka			√		
77	Sekokat	Labangka			√		
78	Suka Mulya	Labangka			√		
79	Suka Damai	Labangka			√		
80	Jaya Makmur	Labangka			√		
81	Rhee	Rhee			√		
82	Luk	Rhee			√		

No	Desa	Kecamatan	Pedalaman	Terpendcil	Pesisir	Kepulauan	Pegunungan
1	2	3	4	5	6	7	8
83	Rhee Loka	Rhee			√		
84	Sampe	Rhee	√	√			
85	Pelat	Untir Iwes	√				√
86	Kerekeh	Untir Iwes	√	√			√
87	Penyaring	Moyo Utara			√		
88	Pungkit	Moyo Utara			√		
89	Kukin	Moyo Utara			√		
90	Baru Tahan	Moyo Utara			√		
91	Maronge	Maronge			√		
92	Lab. Sangoro	Maronge			√		
93	Lab. Aji	Tarano			√		
94	Lab. Bontong	Tarano			√		
95	Lab. Jambu	Tarano			√		
96	Lab. Pidang	Tarano			√		
97	Tolo - Oi	Tarano		√	√		√
98	Bantulanteh	Tarano	√	√			
99	Mata	Tarano		√	√		√
100	Brang Biji	Sumbawa			√		

Sumber: Data primer diolah

Selain itu Kabupaten Sumbawa juga terdiri dari pulau-pulau kecil baik berpenghuni ataupun tidak berpenghuni, sebagaimana tabel berikut ini.

**Tabel 2.4**  
**Pulau-Pulau Kecil Di Kabupaten Sumbawa**

No	Kecamatan/ Nama Pulau	Arti Nama	Koordinat Geografis		Keterangan
			LS	BT	
1	2	3	4	5	6
1.	Empang				
	1. Raja Kepe	Raja Setan	8°54'20"	117°57'27"	Luas 52,93 ha
2.	Labuhan Badas				
	1. Moyo		8°13'46"	117°33'54"	Ada 2 desa wisata internasional, Desa Labuhan Aji dan Sebotok
	2. Medang		8°08'23"	117°23'16"	Ada 2 Desa, Bajo Medang dan Bugis Medang
	3. Sakonci	Sekoci (Bugis)	8°07'42,4"	117°25'37,3"	Sekoci (Bugis)
3.	Lape				
	1. Tenar	Tangkai	8°33'20"	117°47'13"	Vegetasi semak, padang

No	Kecamatan/ Nama Pulau	Arti Nama	Koordinat Geografis		Keterangan
			LS	BT	
1	2	3	4	5	6
					rumput
	2. Ngali	Nama Ikan	8°31'53"	117°43'50"	Berpenghuni
	3. Dua Rea	Dua Besar	8°29'23"	117°45'44"	Terdapat bakau
	4. Dua Ode	Dua Kecil	8°29'34"	117°45'8"	Terdapat bakau
	5. Tengar	Bulir Seperti Padi			Bersemak, terdapat hutan bakau
	6. Batu	Kuris = nama desa	8°28'04"	117°40'39"	Bersemak, hutan bakau
	7. Dangar Rea	Nama Pohon	8°25'48"	117°39'18"	Kebun
	8. Liang	Gua	8°29'25"	117°39'41"	Semak, kebun.
	9. Lawang Anorawi	Pintu Barat	8°30'22"	117°37'53"	
	10. Lawang Anosiup	Pintu Timur	8°30'04"	117°38'18"	
	11. Jelopang	Sejenis Tanaman	8°29'19"	117°38'30"	
	12. Batu Putih		8°31'10"	117°38'14"	
	13. Meriam Lape		8°31'21"	117°39'42"	
	14. Rea	Ilalang (bahasa bugis)	8°31'30"	117°41'39"	
	15. Sejanggan	Ikan	8°32'44"	117°41'56"	
	16. Seroko	Semut rang-rang	8°33'43"	117°41'51"	
	17. Kele	Kelor	8°33'50"	117°42'43"	
4	LunyuK				
	1. Tanah Tanjung Lilin	Berbentuk Lilin	9°06'18"	117°3'1"	Luas; 1,070.89 ha
5	Maronge				
	1. Tapan, Gili	Pohon Ketapang	8°33'43"	117°49'14"	
	2. Panan, Gili	Memandikan	8°39'39"	117°46'40"	
	3. Kondo, Gili	Dirayu	8°39'54"	117°46'2"	
	4. Dempu	Nama Burung Kakatua			
	5. Maja				
	6. Jonga	Memandang Keatas	8°36'20"	117°46'6"	
	7. Tanjung Dewa		8°38'05"	117°46'1"	
6	Moyo Hilir				
	1. Dangar Ode		8°25'31"	117°37'57"	
7	Plampang				
	1. Santigi				
	2. Meriam Ode	Meriam Kecil	8°36'01"	117°50'23"	
	3. Meriam Rea	Meriam Besar	8°36'20"	117°50'31"	

No	Kecamatan/ Nama Pulau	Arti Nama	Koordinat Geografis		Keterangan
			LS	BT	
1	2	3	4	5	6
	4.Lampe	Pelana	8°36'32"	117°52'9"	
	5.Kebo	Kerbau	8°39'37"	117°53'14"	
	6.Lipan	Kaki Seribu	8°41'08"	117°50'40"	
	7.Baturea	Batu Besar	8°39'45"	117°49'57"	
8	Ropang				
	1.Batu Sakulit		9°03'04"	117°23'	Luas 6.00 ha
	2.Batu Samarunding		9°02'10"	117°26'25"	Luas 2,439.79 ha
	3.Senikan	Dapur	9°01'26"	117°27'47"	Luas 21.00 ha
	4.Lemurai		9°01'26"	117°27'53"	
	5.Nampar		9°01'25"	117°27'52"	
	6.Batubalong	Batu Bagus	9°01'26"	117°27'55"	
9	Tarano				
	1.Rebu	Rumput	8°38'48"	118°8'17"	
	2.Dewa	Dewa	8°39'39"	118°3'5"	
	3.Bakau	Bakau	8°41'35"	118°0'45"	
	4.Kapas	Mirip Pohon Kapas	8°41'07"	118°0'29"	
	5.Rakit	Rakit	8°38'32"	117°59'15"	
	6.Depi	Bentuknya spt tampi	8°43'28"	117°57'2"	
10	Buer				
	1.Saringit sai		8°25'46"	116°59'16"	Tdk berpenghuni
	2.Saringgit dua		8°24'47"	116°59'45"	Tdk berpenghuni
	3.Kelat		8°25'00"	117°1'23"	Tdk berpenghuni
	4.Burung		8°26'45"	117°2'12"	Tdk berpenghuni
	5.Kaung		8°27'45"	117°0'36"	Berpenghuni
11	Alas				
	1.Bungin	Pasir	8°28'39"	116°59'42"	Berpenghuni
	2.Batu Sai		8°25'59"	116°56'52"	Tdk berpenghuni
	3.Batu Dua		8°25'54"	116°57'16"	Tdk berpenghuni
	4.Panjang		8°26'34"	116°53'59"	Tdk berpenghuni lokasi wisata
12	Utan				
	1.Ayar Tawar		8°23'48"	117°2'22"	Tdk berpenghuni
	2.Temudong		8°22'45"	117°3'22"	Tdk berpenghuni
	3.Kramat		8°22'27"	117°4'36"	Tdk berpenghuni

No	Kecamatan/ Nama Pulau	Arti Nama	Koordinat Geografis		Keterangan
			LS	BT	
1	2	3	4	5	6
	4.Bedil		8°23'23"	117°4'26"	Tdk berpenghuni lokasi wisata

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Sumbawa

### 2.1.1.3 Topografi

#### a. Kemiringan lahan

Topografi Kabupaten Sumbawa yang cenderung berbukit-bukit memiliki kelerengan bervariasi antara 0 – 40 derajat. Kemiringan lahan 0-2% seluas 33,79%; kemiringan 2-15% seluas 27,96%; kemiringan 15-40% seluas 49,49% dan kemiringan >40% seluas 54,03%. Berikut adalah topografi lahan berdasarkan kelas kelerengan/ kemiringannya.

**Tabel 2.5**  
**Kemiringan Lahan Di Kabupaten Sumbawa**

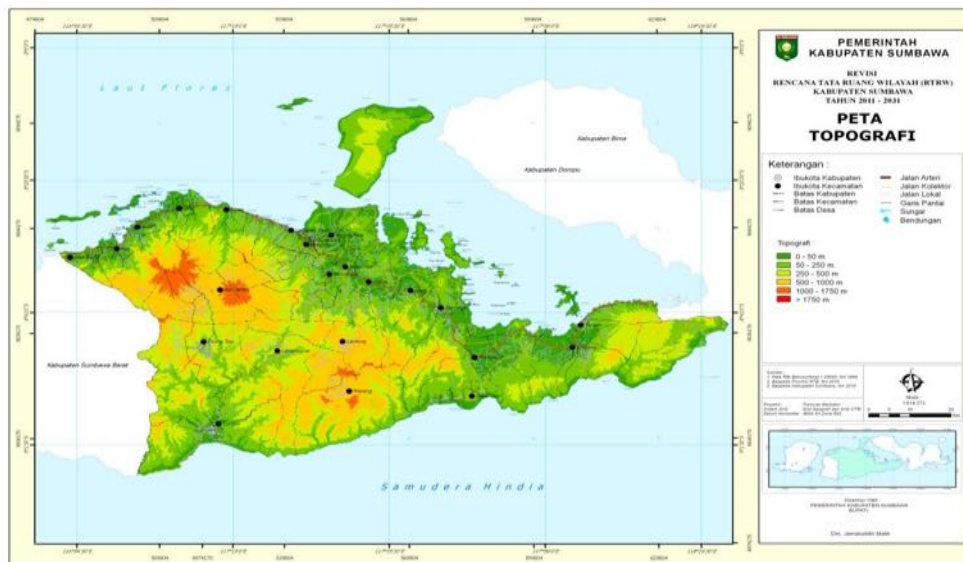
No	Kecamatan	Kemiringan Lahan					Lindung	Jumlah
		0 – 5	5 – 15	15 – 40	>40			
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Alas Barat	1.362	466	5.191	889	17.016	24.924	
2	Alas	1.248	923	1.985	203	13.609	17.968	
3	Buer							
4	Utah	850	3.379	15.227	3.381	15.788	38.625	
5	Rhee							
6	Lb. Badas	6.572	8.856	7.817	660	1.947	25.852	
7	Sumbawa	2.601	4.726	3.396	476	1.723	12.922	
8	Unter Iwis							
9	Batu Lanteh	-	-	7.844	8.203	23.088	39.135	
10	Moyo Hilir	-	19.127	3.115	306	5.211	27.759	
11	Moyo Utara							
12	Moyo Hulu	183	6.802	7.633	2.170	14.408	31.196	
13	Ropang	266	3.494	18.377	6.493	82.996	111.626	
14	Lenangguar							
15	Lantung							
16	Lunyuk	-	10.848	9.914	6.712	70.506	97.980	
17	Orong Telu							
18	Lape	3.506	12.148	6.063	7.243	7.068	36.028	
19	Lopok							
20	Maronge	7.178	4.917	4.492	712	26.049	43.348	
21	Plampang							
22	Empang	13.915	11.621	10.490	983	52.217	89.226	
23	Tarano							
24	Labangka	16.829	8.158	2.651	2.524	20.142	50.304	
<b>Prosentase (%)</b>		<b>8,43</b>	<b>14,76</b>	<b>16,11</b>	<b>6,33</b>	<b>54,38</b>	<b>100,00</b>	

Sumber: RTRW Kab Sumbawa

Kondisi topografi ini sangat berpengaruh terhadap penyediaan infrastruktur dan fasilitas publik, karena wilayah yang didominasi kemiringan lahannya >40% seperti di Kecamatan Batulanteh, Lantung, Ropang, Lenangguar dan Orong Telu, berdampak terhadap rendahnya aksesibilitas

masyarakat di wilayah tersebut dibandingkan dengan wilayah lainnya di Kabupaten Sumbawa.

Kondisi topografi Kabupaten Sumbawa digambarkan pada peta berikut ini.



**Gambar 2.3**  
**Peta Topografi Kabupaten Sumbawa**

**b. Ketinggian lahan**

Berdasarkan karakteristik topografi, daratan Kabupaten Sumbawa cenderung berbukit-bukit dengan ketinggian antara 0-1.730 meter di atas permukaan air laut (mdpal). Ketinggian 0-100 mdpal mencapai luas 26,51%; 100-500 mdpal seluas 42,31%; 500-1.000 mdpal seluas 27,69% dan >1.000 mdpal seluas 3,49%.

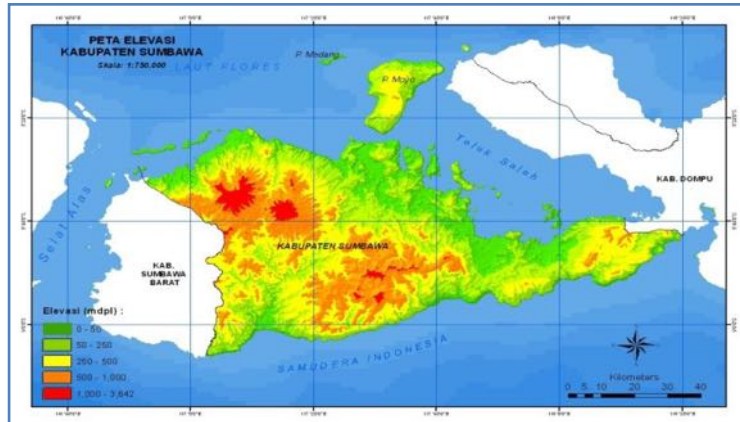
**Tabel 2.6**  
**Ketinggian Wilayah Pusat Pemerintahan Kecamatan Se-Kabupaten Sumbawa**

<b>No</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Elevasi (Meter dpal)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1	Sumbawa	15
2	Unter Iwes	35
3	Lab. Badas	7
4	Utan	20
5	Rhee	16
6	Alas	16
7	Buer	14
8	Alas Barat	6
9	Batu Lanteh	314
10	Moyo Hulu	105
11	Ropang	785
12	Lenangguar	246
13	Lantung	596
14	Lunyuk	21
15	Orong Telu	217
16	Moyo Hilir	21
17	Moyo Utara	16

No	Kecamatan	Elevasi (Meter dpl)
1	2	3
18	Lape	31
19	Lopok	47
20	Plampang	39
21	Maronge	26
22	Labangka	54
23	Empang	24
24	Tarano	23

Sumber: Bag. Pemerintahan Setda Kab. Sumbawa

Peta Elevasi Wilayah Kabupaten Sumbawa disajikan pada gambar berikut.



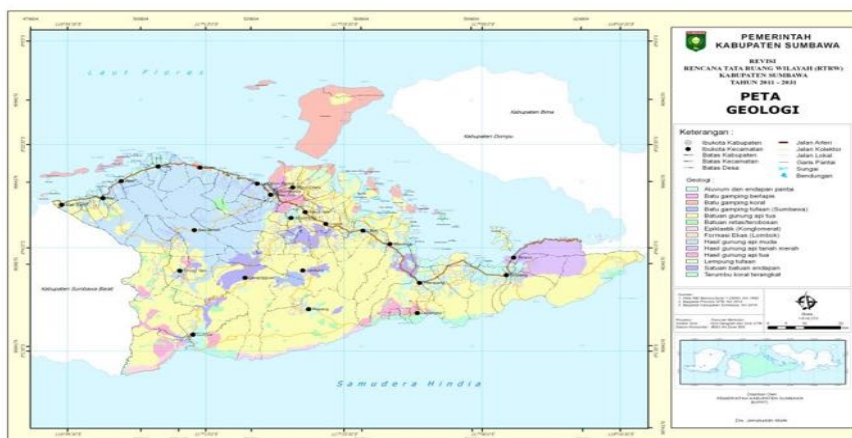
**Gambar 2.4**  
**Peta Elevasi Wilayah Kabupaten Sumbawa**

#### 2.1.1.4 Geologi

Gambaran kondisi geologi Kabupaten Sumbawa, antara lain terdiri dari struktur dan karakteristik, serta potensinya disajikan sebagai berikut.

##### a. Struktur dan karakteristik

Kabupaten Sumbawa sebagaimana sebagian wilayah Indonesia terletak dalam sabuk gunung api (*ring of fire*). Dalam Peta Tatanan Geologi dan Gunung Berapi Indonesia, Kabupaten Sumbawa tempat pertemuan 2 lempeng aktif dunia yaitu Lempeng Indo-Australia (bagian selatan) dan Lempeng Eurasia (bagian utara) (Katili, 1994). Kondisi geologis tersebut menyebabkan Kabupaten Sumbawa kaya akan deposit sumberdaya mineral sekaligus rawan terhadap bencana alam.



**Gambar 2.5**



## Peta Geologi Kabupaten Sumbawa

### b. Potensi

Berdasarkan hasil identifikasi terhadap beberapa jenis bahan galian, lokasi dan luasan serta potensi sumberdayanya baik yang sudah ditambang maupun belum, terlihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.7**  
**Potensi Sumberdaya Mineral Di Kabupaten Sumbawa**

No	Bahan Galian	Sumber Daya	Prospek Pengembangan	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Bahan Galian Industri - Sirtu - Batu Bangunan - Tanah Urug	793.000 m3 269.227.708 m3 4.577.666,70 m3	Sudah Produksi Sudah Produksi Sudah produksi	
2	Bahan Galian Keramik - Batu Lempung/ Tanah Liat - Kaolin - Gypsum	5.925.500 m3 - -	Sudah Produksi	
5	Bahan Galian Logam - Emas (Au) - Perak (Ag) - Tembaga (Cu) - Pasir Besi	42,53 metric ton 30,80 metric ton 301,57 metric ton 7.440.758,33 ton	Siap Produksi Siap Produksi Siap Produksi Siap Produksi	Sumberdaya Terukur Sumberdaya Terukur Sumberdaya Terukur Sumberdaya Terukur

Sumber: Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Sumbawa

Potensi lain seperti energi panas bumi juga terdapat di Kecamatan Maronge dengan potensi 6 Mwe untuk pemanfaatan langsung. Energi panas bumi sangat berpeluang untuk dikembangkan apalagi ketersediaannya di Indonesia sangat besar. Dari hasil survey teridentifikasi 251 lokasi yang tersebar di seluruh Indonesia. 3 (Tiga) Lokasi berada di Nusa Tenggara Barat, 1 (satu) diantaranya terdapat di Kabupaten Sumbawa di Kecamatan Maronge.



**Gambar 2.6**

### Potensi Energi Panas Bumi Di Kecamatan Maronge Kabupaten Sumbawa

Berdasarkan hasil penyelidikan energi panas bumi yang ada di Desa Maronge yang diindikasikan dengan munculnya berupa mata air panas dan umumnya bertipe bikarbonat dengan temperature 35–43°C. Estimasi temperatur reservoir berdasarkan hasil perhitungan geothermal dengan menggunakan silica mixing sekitar 102°C dengan potensi energi sebesar 6 MWe. Data teknisnya terlihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.8**

**Tingkat Penyelidikan Lapangan Panas Bumi di NTB**

Lapangan/ Daerah Panas Bumi	Tingkat Penyelidikan	Metode			Saran Penyelidikan Selanjutnya
		Geologi	Geokimia	Geofisika	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
Semalun, Lombok Timur (~ 1300 m dpl)	Survei : -Pendahuluan (Dit. Vulkanologi, 1984) - Rinci (PLN, 1993)	√ Mapping	√ Hg & CO <sub>2</sub> Survey	√ Tahanan Jenis	Survey : Head On, MT/CSAMT Pemboran dangkal (Landaian suhu)
Huu, Dompu (10 – 1000 M dpl)	Survei : -Pendahuluan (Dit. Vulkanologi, 1981) - Rinci (PLN, 1995; DIM, 2004)	√ mapping	√ Hg & CO <sub>2</sub> Survey	√ Tahanan Jenis, Gravity, Geomagnet	Survey MT/CSAMT Pemboran dangkal (Landaian suhu)
Maronge, Sumbawa ( ~ 100 m dpl)	Survei : -Pendahuluan (Dit. Geologi, 1975; Dit. Vulkanologi, 1996)	√ mapping	√ Hg & CO <sub>2</sub> Survey	√ SP	-

*Sumber: Dinas Pertambangan dan Energi Kab Sumbawa*

**Tabel 2.9**  
**Ringkasan Karakteristik Lapangan Panas Bumi Di NTB**

Lapangan/Daerah Panas Bumi	Lingkungan Geologi	Manifestasi		
		Jenis	Temperatur (° C)	Tipe Fluida
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
Semalun, Lombok Timur (~ 1300 m dpl)	Gunung api Kuarter dan kaldera, patahan- patahan/ kekar-kekar intensif.	Mata air panas, batuan ubahan	42 -62	SO <sub>4</sub> , Cl - SO <sub>4</sub> ,
Huu, Dompu (10 – 1000 M dpl)	Vulkanik Tersier (tufa dasitik & kerucut andesit), intrusi, patahan-patahan normal, graben	Mata air panas, Fumarol, batuan ubahan	37 – 82	HCO <sub>3</sub> , Cl - SO <sub>4</sub> ,
Maronge, Sumbawa ( ~ 100 m dpl)	Batuan Tersier, graben, intrusi	Mata air panas	35 – 43	HCO <sub>3</sub> , Cl.

*Sumber: Dinas Pertambangan dan Energi Kab Sumbawa*

### 2.1.1.5 Hidrologi

**a. Daerah Aliran Sungai**

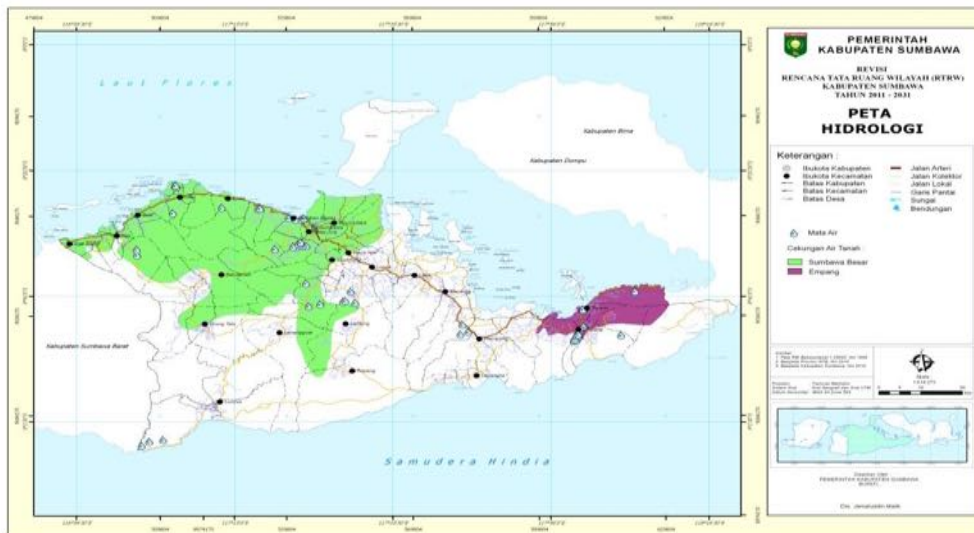
Secara hidrologis Kabupaten Sumbawa berada dalam Wilayah Sungai (WS) Sumbawa yang merupakan Wilayah Sungai Strategis Nasional. WS Sumbawa meliputi 4 Kabupaten dan 1 Kota yaitu Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima dan Kota Bima. Jumlah Daerah Aliran Sungai (DAS) di WS Sumbawa adalah 555 DAS sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai. DAS terbesar di Kabupaten Sumbawa adalah DAS Beh dan DAS Moyo.

**Tabel 2.10**  
**Sub Satuan Wilayah Sungai Di Kabupaten Sumbawa**

No	Kecamatan	Sub Satuan Wilayah Sungai (SSWS)	Luas (Km <sup>2</sup> )	Ketersediaan Air (Juta M <sup>3</sup> )
1	2	3	4	5
1	Lape/Lopok	Bako	754	453
2	Lunyuk	Beh	2.255	2.189
3	Moyo Hulu	Moyo Hulu	956	290
4	Plampang/Empang	Ampang	1.059	399
5	Labuan badas	Pulau Moyo	454	214
6	Alas/Alas Barat	Rea	1.049	415
7	Utam/Rhee	Rhee	1.335	437

Sumber: Balai Informasi Sumber Daya Air Dinas PU Prov. NTB.

Kondisi hidrologi Kabupaten Sumbawa tergambar sebagai berikut.



**Gambar 2.7**  
**Peta Hidrologi Kabupaten Sumbawa**

**b. Sungai, Mata Air dan Debit Aliran**

Sungai-sungai di Kabupaten Sumbawa disajikan pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.11**  
**Sungai Di Kabupaten Sumbawa**

<b>No</b>	<b>Nama Sungai</b>	<b>Panjang (Km)</b>	<b>No</b>	<b>Nama Sungai</b>	<b>Panjang (Km)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1	Brang Biji	50.000	25	Brang Moyo	45.000
2	Brang	38.000	26	Brang Pongal	30.000
3	Brang Pelat	23.000	27	Brang Pulit	25.000
4	Brang Pasiri	23.000	28	Brang Beh	90.000
5	Brang	15.000	29	Brang Batu	33.000
6	Brang Kanar	10.000	30	Brang Sepang	20.000
7	Brang Kanar	12.000	31	Brang Telong	23.000
8	Brang	12.000	32	Brang Liang	28.000
9	Brang Rhee	40.000	33	Brang Mamak	45.000
10	Brang Pernang	40.000	34	Brang Maronge	20.000
11	Brang Ai Putih	43.000	35	Brang Tiu Kulit	38.000
12	Brang Samonte	40.000	36	Brang Ai Bua	20.000
13	Brang Utan	45.000	37	Brang Setiang	23.000
14	Brang Ode	28.000	38	Brang Pemasar	15.000
15	Brang Mapin	20.000	39	Brang Sebekil	35.000
16	Brang Moyo	35.000	40	Brang Rinti	38.000
17	Brang Tubang	15.000	41	Brang Pasan	15.000
18	Brang Setongo	23.000	42	Brang Labangka	54.000
19	Kokar Ai Keling	10.000	43	Brang Kesaming	25.000
20	Kokar Pompong	18.000	44	Brang Gapit	32.000
21	Brang Lantung	35.000	45	Brang Boal	32.000
22	Brang Sebasang	38.000	46	Brang Tolo Oi	32.000
23	Brang Lito	25.000	47	Brang Tiram	15.000
24	Brang Pulas	45.000	48	Brang Lamenta	16.000
			49	Brang Kaswangi	26.000

Sumber: RTRW Kab. Sumbawa

**c. Potensi Mata Air dan Debit Alirannya**

Potensi Mata Air dan debit alirannya di Kabupaten Sumbawa secara rinci terlihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.12**  
**Potensi Mata Air Dan Debit Alirannya Di Kabupaten Sumbawa**

No	Nama	Lokasi	Kecamatan	Koordinat		Debit (L/Dt)	Pemanfaatan
				LS	BT		
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
1	Tebil	Suka Maju	Lunyuk	9°04'4,04"	117°05'7,36"	7,34	Irigasi Ladang
2	Sepang	Suka Maju	Lunyuk	9°05'3,43"	117°02'9,38"	15,88	-
3	Buin Bontong	Suka Maju	Lunyuk	9°04'6,60"	117°02'9,36"	0,72	-
4	Sampar Goal	Suka Maju	Lunyuk	9°03'5,50"	117°06'2,45"	0,46	-
5	Ai Lompa	Labuhan Aji	Tarano	8°45'8,91"	117°00'2,12"	4,21	Mandi Umum
6	Ai Bembe	Labuhan Aji	Tarano	8°43'3,09"	118°00'1,97"	7,34	Mandi Umum
7	Buin Putang	Labuhan Aji	Tarano	8°43'0,95"	118°00'1,25"	0,59	-
8	Pak Acok	Labuhan Aji	Tarano	8°43'2,12"	118°00'0,38"	20,00	Sawah Kebun
9	Reban Bidang	Lab. Jambu	Tarano	8°40'1,68"	118°06'8,81"	6,19	Sawah Air Bersih
10	Buin Padak	Pelat	Unter Iwes	8°32'8,61"	117°22'5,88"	1,43	Air Bersih
11	Buin Jeringo	Pelat	Unter Iwes	8°32'8,61"	117°22'5,88"	0,25	Air Bersih
12	Tiu Tiris	Pelat	Unter Iwes	8°32'8,91"	117°22'9,60"	0,40	Air Bersih
13	Tiu Kesung I	Pelat	Unter Iwes	8°32'6,17"	117°23'4,63"	0,36	Air Bersih
14	Tiu Kesung II	Pelat	Unter Iwes	8°32'4,39"	117°23'2,29"	0,14	Air Bersih
15	H. Muh. Said	Pelat	Unter Iwes	8°32'9,75"	117°23'0,35"	1,00	Air Bersih
16	Ai Pancar Soat I	Kerekeh	Unter Iwes	8°32'1,59"	117°23'5,94"	0,47	Irigasi Sawah
17	Ai Pancar Soat II	Kerekeh	Unter Iwes	8°32'1,81"	117°23'5,94"	5057	Irigasi Sawah
18	Ai Pancar Soat III	Kerekeh	Unter Iwes	8°32'1,44"	117°23'5,00"	0,26	Irigasi Sawah
19	Pancor Selaki I	Kerekeh	Unter Iwes	8°32'1,87"	117°23'5,01"	0,33	Irigasi Sawah
20	Pancor Selaki II	Kerekeh	Unter Iwes	8°32'1,78"	117°23'5,51"	251	Irigasi Sawah
21	Pancor Selaki III	Kerekeh	Unter Iwes	8°32'2,89"	117°23'2,75"	918	Irigasi Sawah

No	Nama	Lokasi	Kecamatan	Koordinat		Debit (L/Dt)	Pemanfaatan
				LS	BT		
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
22	Bako	Jorok	Unter Iwes	8°32'7,79"	117°23'8,14"	1	Air Bersih, rekreasi
23	Kokar Bua	Jorok	Unter Iwes	8°32'7,21"	117°20'2,16"	2,11	Sawah, rekreasi, air bersih
24	Bukit Smongkat	Klungkung	Batulanteh	8°32'2,90"	117°23'8,84"	0,89	Air Bersih, Baku Air Minum
25	Ai Maya	Lab. Sumbawa	Labuhan Badas	8°28'4,47"	117°22'9,05"	21,49	Air Bersih
26	Sumer Payung	Karang Dima	Labuhan Badas	8°28'4,46"	117°22'9,05"	6,33	Irigasi Sawah, Air Bersih
27	Karantina Badas	Karang Dima	Labuhan Badas	8°28'4,46"	117°22'0,07"	5,21	Air Bersih
28	Badas	Labuhan Badas	Labuhan Badas	8°28'1,05"	117°23'9,20"	61,32	Rekreasi, Air Bersih
29	Ai Panan	Luk	Rhee	8°26'7,35"	117°18'0,60"	0,17	Rekreasi, Air Bersih
30	Ai Mas	Luk	Rhee	8°26'7,15"	117°18'3,26"	42,19	Rekreasi, Air Bersih
31	Ai Lenang	Luk	Rhee	8°26'8,06"	117°18'2,59"	19,44	Air Bersih
32	Ai Puntti	Utan	Utan	8°26'5,23"	117°13'3,41"	3,15	Irigasi Kebun, Air Bersih
33	Beringin Sila	Rhee Beru	Rhee	8°27'1,42"	117°07'0"	344,68	Irigasi Sawah, Air Bersih
34	Ai Muncar	Montong	Utan	8°23'1,09"	117°07'4,91"	36	Irigasi Sawah
35	Ai Berengeng	Montong	Utan	8°22'9,09"	117°02'3,61"	1,23	-
36	Ai Surik	Montong	Utan	8°23'0,34"	117°02'2,41"	5,16	PDAM
37	Seketok	Merente Beru	Alas	8°33'3,50"	117°02'2,88"	42,01	PDAM, Irigasi Kebun
38	Sebra	Merente Beru	Alas	8°34'2,72"	117°02'3,47"	174,37	Irigasi Kebun, Air

No	Nama	Lokasi	Kecamatan	Koordinat		Debit (L/Dt)	Pemanfaatan
				LS	BT		
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
							Bersih
39	Delap	Merente Beru	Alas	8°34'2,60"	117°02'3,40"	313,58	Irigasi Kebun, Air Kemasan
40	Ai Lenek	Karang Dima	Labuhan Badas	8°28'2,60"	117°23'6,18"	30,49	Irigasi Kebun, Air Bersih
41	Ai Muall	Batu Tering	Moyo Hulu	8°42'2,68"	117°26'0,86"	18,66	Air Bersih
42	Ai Bulu	Semamung	Moyo Hulu	8°38'8,50"	117°24'2,44"	2,53	Rekreasi, Air Bersih
43	Ai Mata	Lito	Moyo Hulu	8°40'2,08"	117°30'0,13"	1,36	Irigasi Kebun, Air Bersih
44	Patani	Lito	Moyo Hulu	8°41'8,3"	117°29'0,4"	5,98	Air Bersih
45	Pada	Lito	Moyo Hulu	8°41'8,95"	117°29'3,19"	0,25	Irigasi Kebun
46	Ai Muall	Lito	Moyo Hulu	8°42'0,08"	117°30'6,10"	19,53	Air Bersih, Rekreasi
47	Buin Getih	Plampang	Plampang	8°45'6,07"	117°44'4,99"	1,11	Irigasi Kebun, Rekreasi
48	Sangar	Lamenta	Empang	8°47'4,62"	117°59'6,23"	0,22	Irigasi Kebun
49	Ai Pakat	Lamenta	Empang	8°47'4,62"	117°59'6,23"	14,96	Irigasi Kebun
50	Ai Cente	Lamenta	Empang	8°48'0,57"	117°59'2,81"	10,04	Irigasi Kebun
51	Ai Bua	Lamenta	Empang	8°47'3,33"	117°59'4,93"	0,22	Irigasi Kebun
52	Ai Manggadar I	Lamenta	Empang	8°47'8,95"	117°59'1,47"	1	Irigasi Kebun
53	Ai Manggadar II	Lamenta	Empang	8°47'8,98"	117°59'0,40"	2,93	Irigasi Kebun
54	Ai Manggadar III	Lamenta	Empang	8°47'9,04"	117°59'0,89"	6,73	Irigasi Sawah, Kebun
55	Ai Nyir I	Lamenta	Empang	8°48'1,11"	117°58'9,30"	17,82	Irigasi Sawah,

No	Nama	Lokasi	Kecamatan	Koordinat		Debit (L/Dt)	Pemanfaatan
				LS	BT		
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
							Kebun
56	Ai Nyir II	Lamenta	Empang	8°48'2,49"	117°58'9,89"	1,03	Irigasi Sawah, Kebun
57	Ai Nyir III	Lamenta	Empang	8°48'3,22"	117°58'9,19"	0	Rekreasi, Pemandian Umum
58	Buin Batu I	Lamenta	Empang	8°47'1,47"	117°59'5,16"	0,37	Rekreasi, Pemandian Umum
59	Buin Batu II	Lamenta	Empang	8°47'1,54"	117°59'5,07"	0,66	Rekreasi, Pemandian Umum
60	Buin Batu III	Lamenta	Empang	8°47'1,50"	117°59'5,80"	1,78	Kebun
61	Ai Maja	Lamenta	Empang	8°47'4,04"	117°59'2,35"	0,89	Irigasi Kebun, Air Bersih
62	Ai Maja I	Muna	Empang	8°45'9,72"	116°52'9,00"	1,72	Kebun
63	Ai Maja II	Muna	Empang	8°45'6,83"	116°52'8,70"	1,52	Sawah
64	Ai Banyu	Muna	Empang	8°46'3,23"	116°52'9,89"	0,72	Kebun
65	Ai Mual	Belo	Plampang	8°51'7,10"	116°50'8,12"	64,87	Kebun
66	Ai Palman I	Sejari	Plampang	8°46'7,62"	117°45'2,44"	61,38	Kebun
67	Ai Palman II	Sejari	Plampang	8°47'1,62"	117°44'2,44"	29,31	PDAM
68	Ai Buas	Labuhan Aji	Empang	8°47'3,08"	118°05'0,5"	1,33	Irigasi Sawah
69	Ai Kawat	Semamung	Moyo Hulu	8°42'6,02"	117°24'5,99"	21,24	-
70	Ai Tebal	Belo	Plampang	8°42'5,06"	117°50'9,00"	1,34	-
71	Pola Mata	Belo	Plampang	8°52'9,70"	116°47'6,61"	3,38	-
72	Ai Liang Batu Jaran	Bangkong	Moyo Hulu	-	-	10	Air Bersih



No	Nama	Lokasi	Kecamatan	Koordinat		Debit (L/Dt)	Pemanfaatan
				LS	BT		
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
73	Ai Laboran	Moyo Hulu	Moyo Hulu	-	-	10	Air Bersih
74	Ai Pamulung	Pamulung	Labuhan Badas	-	-	11,5	Air Bersih
75	Ai Patelap	Bangkong	Moyo Hulu	-	-	0,5	-
76	Ai Nyer Gading	Lenangguar	Lenangguar	-	-	-	-
77	Ai Setoyang 1	Lenangguar	Lenangguar	-	-	-	-
78	Ai Setoyang 2	Lenangguar	Lenangguar	-	-	-	-
79	Ai Putik	Lenangguar	Lenangguar	-	-	-	-
80	Setodok	Lenangguar	Lenangguar	-	-	-	-
81	Sedado	Lenangguar	Lenangguar	-	-	-	-
82	Buin Baruas	Lenangguar	Lenangguar	-	-	-	-
83	Ai Kumang	Lenangguar	Lenangguar	-	-	-	-
84	Ai Senikan	Lenangguar	Lenangguar	-	-	-	-
85	Ai Tumang	Lenangguar	Lenangguar	-	-	-	-
86	Ai Panyaka	Lenangguar	Lenangguar	-	-	-	-
87	Ai Uma Sempit	Lenangguar	Lenangguar	-	-	-	-
88	Kuang Nangka	Lenangguar	Lenangguar	-	-	-	-
89	Orong Bia	Lenangguar	Lenangguar	-	-	-	-
90	Keban Kokar	Lenangguar	Lenangguar	-	-	-	-
91	Lenang Belo	Lenangguar	Lenangguar	-	-	-	-
92	Kokar Treng	Lenangguar	Lenangguar	-	-	-	-
93	Sering Ode	Lenangguar	Lenangguar	-	-	-	-
94	Labukat	Lenangguar	Lenangguar	-	-	-	-
95	Kuang Batang	Lenangguar	Lenangguar	-	-	-	-

No	Nama	Lokasi	Kecamatan	Koordinat		Debit (L/Dt)	Pemanfaatan
				LS	BT		
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
96	Lekong Sane	Lenangguar	Lenangguar	-	-	-	-
97	Kenali	Lenangguar	Lenangguar	-	-	-	-
98	Ara Rawang	Lenangguar	Lenangguar	-	-	-	-
99	Kokar Susin	Lenangguar	Lenangguar	-	-	-	-
100	Buin Kuang Jeringo Beru	Lenangguar	Lenangguar	-	-	-	-
101	Kokar Setempir	Lenangguar	Lenangguar	-	-	-	-
102	Ai Senokeling	Lenangguar	Lenangguar	-	-	-	-
103	Ai Setadok	Lenangguar	Lenangguar	-	-	-	-
104	Pamosa	Lenangguar	Lenangguar	-	-	-	-
105	Ai Nyer Sapuin	Lenangguar	Lenangguar	-	-	-	-
106	Uma Baloang	Lenangguar	Lenangguar	-	-	-	-
107	Ai Litong	Lenangguar	Lenangguar	-	-	-	-
108	Pamosa 2	Lenangguar	Lenangguar	-	-	-	-
109	Uma Ramung	Lenangguar	Lenangguar	-	-	-	-
110	Gunung Setia/ Ai Beru	Lenangguar	Lenangguar	-	-	-	-
111	Ai Sangar	Kuken	Moyo Utara	-	-	-	-
112	Buin Bater	Penyaring	Moyo Utara	-	-	-	Air Bersih
113	Ai Beta	Kukin	Moyo Utara	-	-	-	Air Bersih
114	Ai Tawar	Ai Bari	Moyo Utara	-	-	-	Air Bersih
115	Ai Loang	Penyaring	Moyo Utara	-	-	-	Air Bersih
116	Kokar Dalam	Moyo Utara	Moyo Utara	-	-	-	Air Bersih

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Lokasi</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Koordinat</b>		<b>Debit (L/Dt)</b>	<b>Pemanfaatan</b>
				<b>LS</b>	<b>BT</b>		
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
117	Ai Mual	Labuhan Sumbawa	Labuhan Badas	-	-	-	Kolam/ Perikanan
118	Ai Temo	Meno	Moyo Utara	-	-	-	Air Bersih
119	Ai Lemar	Wonogiri	Moyo Utara	-	-	-	Air Bersih
120	Ai Cente	Wonogiri	Moyo Utara	-	-	-	Air Bersih

*Sumber: BPM-LH Kab. Sumbawa*

Potensi sumberdaya energi air teridentifikasi sebagai berikut.

**Tabel 2.13**  
**Potensi Sumberdaya Energi Air Di Kabupaten Sumbawa**

<b>No</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Sungai/ Bendungan</b>	<b>Volume (m<sup>3</sup>)</b>	<b>Debit (m<sup>3</sup>/dtk)</b>	<b>Head (m)</b>	<b>Energi (MWh/Thn)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1	Lunyuk	Brang Beh	-	70,3	2	7.249.527
2	Alas	Brang Ode (marente)	-	3,27	2	337.211
3	Moyo Hulu	Bendungan Batu Bulan	46,5 Juta	1,635	38,5	8.377.170
4	Lape Lopok	Bendungan Mamak	32,5 juta	1,490	41,5	4.600.560
5	Plampang	Bendungan Tiu Kulit	10,8 juta	408	31,7	2.451.740
6	Empang	Bendungan Gapit	10,3 juta	380	29	1.001.840

*Sumber: Dinas Pertambangan dan Energi Kab Sumbawa*

#### **2.1.1.6 Klimatologi**

Daerah Kabupaten Sumbawa merupakan daerah beriklim tropis yang dipengaruhi oleh musim hujan dan musim kemarau. Pada tahun 2014 temperatur maksimum mencapai 35,5°C yang terjadi pada bulan Oktober dan temperatur minimum 20,7°C yang terjadi pada bulan Agustus. Rata-rata kelembaban udara tertinggi selama tahun 2015 mencapai 85 persen pada bulan Pebruari dan terendah mencapai 67 persen pada bulan September dan Oktober, serta tekanan udara maksimum 1.014,1 mb dan minimum 1.009,7 mb.

Iklim di Kabupaten Sumbawa dipengaruhi oleh fenomena El-Nino dan La-Nina dari Samudera Pasifik, terlihat dari banyaknya hari hujan dan curah hujan yang terjadi sepanjang tahun. Pada tahun 2014 tercatat jumlah hari hujan sebanyak 77 hari, lebih sedikit dibandingkan dengan tahun 2013 yaitu sebanyak 104 hari. dengan hari hujan terbanyak terjadi pada bulan Januari selama 17 hari.

Selama 5 tahun terakhir, temperatur maksimum pada tahun 2011 terjadi pada bulan Oktober yang mencapai 36,6°C dan temperatur minimum terjadi pada bulan Januari sebesar 32,0°C, sementara pada tahun 2015 (sampai bulan Oktober 2015) temperatur maksimum mencapai 37,2°C yang terjadi pada bulan Oktober dan temperatur minimum pada bulan Agustus sebesar 17,7°C. Demikian pula dengan rata-rata kelembaban, tekanan udara dan jumlah hari hujan sebagaimana tabel berikut.

**Tabel 2.14**  
**Kondisi Iklim Dan Curah Hujan Tahun 2011-2015**  
**Di Kabupaten Sumbawa**

<b>Uraian/Tahun</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
Temperatur Maksimum (°C)	36,6	37,4	37,1	38,4	35,5
Temperatur Minimum (°C)	32,0	17,0	18,6	19,0	20,7
Rata-rata Kelembaban Udara Tertinggi (%)	89	89	89	86	85
Rata-rata Kelembaban	70	67	67	65	67

<b>Uraian/Tahun</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
Udara Terendah (%)					
Tekanan Udara Maksimum (mb)	1.011,1	1.013,4	1.011,9	1.012,9	1.014,1
Tekanan Udara Minimum (mb)	1.006,5	1.008,0	1.007,7	1.008,4	1.009,7
Jumlah Hari Hujan (hari)	148	127	104	77	-

*Sumber: Sumbawa Dalam Angka 2011-2014 dan BMKG, 2015.*

Potensi sumberdaya angin di Kabupaten Sumbawa juga cukup memadai untuk pembangkit listrik skala kecil terutama pada 6 kecamatan yakni Alas Barat (376.177 watt), Labuhan Badas (612.541 watt), Labangka (525.177 watt), Empang (376.177 watt), Plampang (313.621 watt) dan Lape (258.415 watt).

Potensi sumberdaya energi angin teridentifikasi di Kabupaten Sumbawa sebagai berikut.

**Tabel 2.15**  
**Potensi Sumberdaya Energi Angin Di Kabupaten Sumbawa**

<b>No</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Kecepatan Angin (knots)</b>	<b>Daya (watt)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Alas Barat	17	376,177
2	Labuhan Alas	20	612,541
3	Lape	15	258,415
4	Plampang	16	313,621
5	Labangka	19	525,177
6	Empang	17	376,177

*Sumber: Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Sumbawa*

Potensi sumberdaya energi surya teridentifikasi di Kabupaten Sumbawa sebagai berikut.

**Tabel 2.16**  
**Potensi Sumberdaya Energi Surya Di Kabupaten Sumbawa**

<b>No</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Desa</b>	<b>Energi (MWh/Th)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Batulanteh	Baturotok, Tepal, Baodesa	3.125,20
2	Moyo Hilir	Penyaring	2.212,56
3	Moyo Hulu	Mokong	5.254,20

*Sumber: Dinas Pertambangan dan Energi Kab Sumbawa*

#### **2.1.1.7 Penggunaan Lahan**

Merujuk kepada Rencana Tata Ruang Wilayah, tata guna lahan terbagi ke dalam dua klasifikasi besar yaitu kawasan budidaya dan kawasan lindung.

##### **a. Kawasan Budidaya**

Penggunaan lahan di Kawasan Budidaya di Kabupaten Sumbawa terbagi dalam beberapa kategori penggunaan, meliputi: 1). lahan sawah, terdiri dari: lahan irigasi teknis, lahan tadah hujan, rawa pasang surut dan dan rawa lebak; 2). lahan pertanian bukan sawah, terdiri dari: tegal/ kebun, ladang/huma, perkebunan, ditanami pohon/hutan rakyat, padang pengembalaan/padang rumput, sementara tidak diusahakan, lainnya (tambak, kolam, empang, hutan



b. kawasan perlindungan setempat;

Kawasan perlindungan setempat di Kabupaten Sumbawa adalah seluas 29.398,37 Ha meliputi :

- a. *kawasan sempadan sungai* diarahkan untuk pengelolaan sungai bersama dari hulu sampai hilir sungai untuk memanfaatkan potensi sungai maupun melindungi sungai dari kegiatan yang dapat mengganggu atau merusak bantaran, tanggul sungai, kualitas air sungai, dasar sungai, mengamankan aliran sungai dan mencegah terjadinya bahaya banjir terutama pada daerah aliran sungai-sungai besar yaitu DAS Rhee, DAS Ampang, DAS Bako, DAS Beh, DAS Moyo Hulu dan DAS Pulau Moyo;
  - b. *kawasan sekitar danau atau waduk* diarahkan ke seluruh kawasan sekitar danau dan waduk yang tersebar di Kabupaten Sumbawa meliputi Bendungan Batu Bulan di Kecamatan Moyo Hulu, Bendungan Mamak di Kecamatan Lopok, Bendungan Tiu Kulit di Kecamatan Plampang, Bendungan Gapit di Kecamatan Empang, dan Bendungan Plara di Kecamatan Lunyuk;
  - c. *kawasan mata air* yang tersebar di seluruh kecamatan, dan dimanfaatkan oleh masyarakat untuk keperluan pemenuhan air minum dan irigasi; dan
  - d. *kawasan sempadan pantai* berlokasi di seluruh kecamatan kecuali Kecamatan Batu Lanteh, Kecamatan Orong Telu, Kecamatan Lenangguar, Kecamatan Moyo Hulu, Kecamatan Unter Iwes, dan Kecamatan Lantung.
  - e. *Kawasan ekosistem mangrove* ditetapkan di wilayah Pulau Rakit, Pulau Ngali, Pulau Liang, Pulau Medang, pesisir Teluk Saleh, Pulau Panjang, pesisir utara Sumbawa dan pesisir selatan Sumbawa.
  - f. *Kawasan Ruang Terbuka Hijau* seluas 30 % (tiga puluh per seratus) dari luas perkotaan Kabupaten Sumbawa
- c. *Kawasan cagar budaya* seluas 4.874,5 Ha
- d. kawasan lindung geologi.

Kawasan lindung geologi di Kabupaten Sumbawa meliputi kawasan cagar alam geologi berupa:

- a. *kawasan cagar alam geologi* yang berupa keunikan bentang alam di kawasan Puncak Ngengas Selalu Legini;
- b. *kawasan rawan bencana geologi* yaitu :
  1. *kawasan rawan bencana banjir* meliputi Kecamatan Sumbawa, Kecamatan Moyo Hilir, Kecamatan Moyo Utara, Kecamatan Lunyuk, Kecamatan Rhee, Kecamatan Alas Barat, Kecamatan Buer, Kecamatan Labuhan Badas, Kecamatan Unter Iwes, Kecamatan Plampang, Kecamatan Ropang, Kecamatan Lape, Kecamatan Lopok, Kecamatan Alas dan Kecamatan Empang;
  2. *kawasan rawan bencana longsor* meliputi Kecamatan Batu Lanteh, Kecamatan Orong Telu, Kecamatan Ropang, Kecamatan Lenangguar, Kecamatan Lantung, Kecamatan Alas, Kecamatan Lunyuk, Kecamatan Labangka, dan Kecamatan Empang;

3. *kawasan rawan bencana tsunami* yang berlokasi di hampir sepanjang pantai selatan Sumbawa dan pantai utara Sumbawa; dan
4. *kawasan rawan bencana gempa bumi* yang berlokasi di hampir diseluruh wilayah Kabupaten mengingat lokasi berada pada daerah patahan dan berbatasan dengan Samudra Hindia.

### 2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

Pengembangan Wilayah di Kabupaten Sumbawa diarahkan sesuai dengan kondisi topografi, hidrologi, dan klimatologi wilayah sebagaimana di atur dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa 2011-2031. Merujuk pada peraturan daerah tersebut potensi pengembangan wilayah dibagi ke dalam dua kelompok besar pola ruang yaitu kawasan lindung dan budidaya. Kawasan lindung diarahkan pada preservasi ruang yang dimanfaatkan dalam rangka mempertahankan ruang wilayah dalam rangka keberlanjutan/ kelestarian lingkungan hidup, sementara Kawasan Budidaya diarahkan pada pemanfaatan ruang dalam rangka akselerasi sektor-sektor pembangunan daerah.

Potensi pemanfaatan ruang untuk kawasan budidaya disajikan pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.18**  
**Arahan Pengembangan Kawasan Budidaya**  
**Dalam RTRW Kabupaten Sumbawa**

<b>No</b>	<b>Jenis Kawasan</b>	<b>Lokasi</b>	<b>Luas (Ha)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Kawasan hutan produksi tetap	Ngali RTK 12	1.135,10
		Serading RTK 36	826,00
		Pusuk Pao RTK 38	2.072,30
		Buen Sowai RTK 57	3.813,90
		Selalu Legini RTK 59	5.415,00
		Klongkang P. Ngengas RTK 60	976,06
		Batulanteh RTK 61	1.891,40
		Dodo Jaran Pusang RTK 64	12.571,10
		Ampang Kampaja RTK 70	11.113,00
		Olat Lake/Olat Cabe RTK 78	3.451,78
		Gili Ngara/Olat Puna RTK 79	2,617,80
		P. Rai Rakit Kwangko RTK 80	4.745,31
		Samoko Lito RTK 89	251,50
2.	Kawasan Peruntukan Perikanan, Kelautan, Pesisir dan Pulau Pulau Kecil	Kawasan Alas dan pantai utara Kabupaten Sumbawa dan sekitarnya, sebagai kawasan penangkapan ikan, budidaya laut, budidaya tambak, pertambangan, cagar wisata, konservasi terumbu karang dan lamun, perlindungan cagar alam dan pelabuhan.	
3.	Kawasan peruntukan pertanian	Kawasan pertanian lahan sawah beririgasi dan beririgasi teknis	17,714,00
		Kawasan pertanian lahan sawah beririgasi dan beririgasi setengah teknis	8.839,00

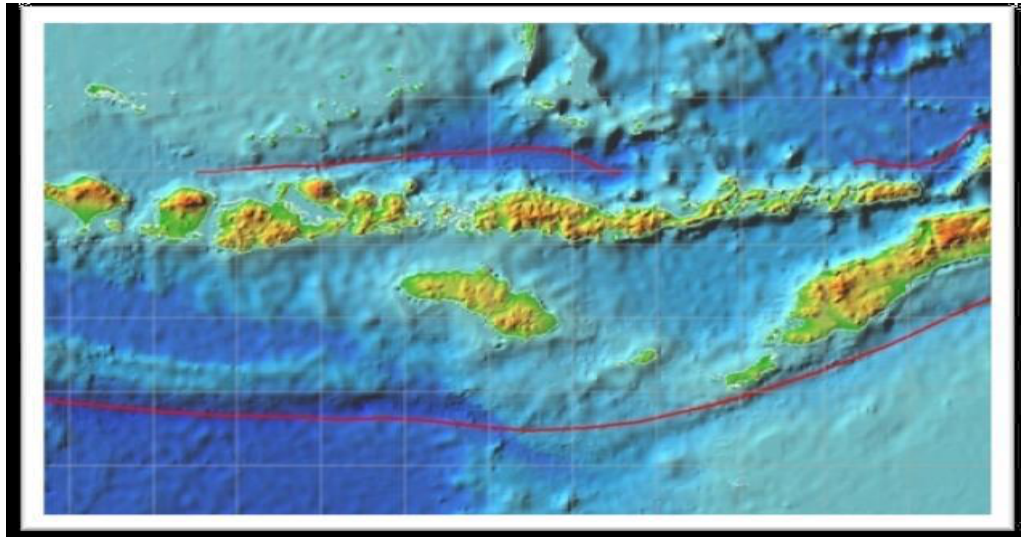


No	Jenis Kawasan	Lokasi	Luas (Ha)
1	2	3	4
		Kawasan pertanian lahan sawah beririgasi dan beririgasi sederhana	4,602,00
		Kawasan pertanian lahan sawah beririgasi non PU	4.397,00
		Kawasan pertanian lahan sawah tadah hujan	7.627,00
		Kawasan pertanian tanaman pangan lahan kering tersebar di seluruh kecamatan	23.785,00
		Kawasan pertanian tanaman hortikultura semusim tersebar di seluruh kecamatan	91.905,00
4.	Kawasan peruntukan perkebunan	Perkebunan dikembangkan di Kawasan Industri Masyarakat Perkebunan (KIM-Bun); Rhee dengan tanaman unggulan kelapa, jambu mete. Batulanteh dengan tanaman unggulan kopi.	
		Komoditi unggulan jambu mete di KIM-Bun; Utan – Rhee.	
		Komoditi kelapa di KIM-Bun Sumbawa.	
		Komoditi kopi di KIM-Bun Batulanteh.	
		Komoditi kemiri di KIM-Bun Batulanteh.	
		Kawasan perkebunan dikembangkan agroindustri hasil tanaman perkebunan dan tanaman komoditi unggulan.	
5.	Kawasan peruntukan pertambangan	WUP operasi produksi di P. Sumbawa.	100.536,29
		Zona-zona tertentu yang dinyatakan layak berdasarkan hasil kajian teknis, ekonomi dan lingkungan.	
6.	Kawasan peruntukan peternakan	WUP operasi produksi di P. Sumbawa	100.536,29
		Zona-zona tertentu yang dinyatakan layak berdasarkan hasil kajian teknis, ekonomi dan lingkungan	

Sumber: RTRW Kab. Sumbawa

### 2.1.3 Wilayah Rawan Bencana

Kabupaten Sumbawa memiliki ancaman bencana kegempaan yang cukup tinggi dan tsunami terutama di wilayah pesisir bagian Selatan, dikarenakan posisi Pulau Sumbawa diapit oleh dua lempeng tektonik (utara dan selatan) yang pergerakannya dapat menimbulkan gempa, yang pada skala dan kedalaman tertentu dapat menyebabkan tsunami. Kawasan rawan *tsunami* terletak pada kawasan pesisir bagian utara dan selatan yaitu Alas, Utan, Badas, Sumbawa Besar, Prajak, Labuhan Moyo Hilir, Empang dan Plampang bagian Selatan, Lunyuk dan Teluk Panas, Plampang.



**Gambar 2.9**  
**Peta Lempeng Tektonik**

Pada musim hujan, ancaman banjir terjadi wilayah dengan *catchment* area besar dengan kondisi DAS yang mulai terganggu seperti sepanjang Brang Moyo, Brang Beh di Lunyuk, Brang Labuhan Mapin di Alas, Brang Utan, Brang Buer, dan Brang Muir. Ancaman terhadap permukiman penduduk di sepanjang tebing sungai juga menjadi permasalahan tersendiri pada saat musim hujan.

Ancaman kekeringan juga berpeluang terjadi pada banyak titik di Kabupaten Sumbawa terutama pada wilayah lumbung pangan di Kecamatan Labangka, Lunyuk, Moyo Hilir, Moyo Utara, Utan, Alas dan Alas Barat.

Bencana alam lainnya yang perlu diwaspadai adalah bencana abrasi pantai terutama dirasakan di wilayah permukiman padat penduduk di pesisir pantai labuhan Kecamatan Labuhan Sumbawa. Sedangkan ancaman angin topan terkadang menerjang beberapa wilayah permukiman terbuka seperti wilayah Pulau Kaung, Pulau Bungin, dan wilayah pesisir sepanjang pantai sebelah utara Kabupaten Sumbawa. Kawasan-kawasan rawan tanah longsor, banjir, *tsunami*, angin topan, dan gelombang pasang, terlihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.19**  
**Kawasan Rawan Bencana Di Kabupaten Sumbawa**

<b>Lokasi</b>	<b>Kawasan Rawan Bencana</b>
<b>1</b>	<b>2</b>
Rawan Tanah Longsor Tipe A	Kawasan sekitar Alas, Semongkat, Lenangguar dan Empang
Rawan Tanah Longsor Tipe B	Jalur jalan Orong Telu-Ropang-Lunyuk-Jalur ke Sumbawa Barat dan pada desadesa di Kecamatan Batu Lanteh
Kawasan Rawan banjir	Sepanjang Brang Moyo di daerah Poto Tengke Moyo Hilir, Brang Beh di Lunyuk, Brang Labuhan Mapin di Alas, Brang Utan di Utan Rhee, Brang Muir di Plampang, Empang, Moyo Hulu, Ropang dan Lape Lopok
Kawasan Rawan <i>Tsunami</i>	Kawasan pesisir bagian utara dan selatan yaitu Alas, Utan, Badas, Sumbawa Besar, Prajak, Labuhan Moyo Hilir, Empang dan Plampang bagian selatan, Lunyuk dan Teluk Panas, Plampang
Kawasan Rawan Angin Topan	Kecamatan Alas dsk, Unter Iwes dsk, Empang-Tarano dsk
Kawasan Rawan	Pantai bagian utara dan selatan yaitu Alas, Utan, Badas,

<b>Lokasi</b>	<b>Kawasan Rawan Bencana</b>
<b>1</b>	<b>2</b>
Gelombang Pasang	Sumbawa Besar, Prajak, Labuhan Moyo Hilir, Empang dan Plampang bagian selatan, Lunyuk dan Teluk Panas, Plampang

*Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Kab Sumbawa*

Kejadian bencana di Kabupaten Sumbawa dalam kurun waktu 2004 – 2015 berdasarkan data yang tercatat dapat dijabarkan sebagai berikut:

1) Gempa bumi dan Tsunami

Tsunami yang diawali oleh gempa bumi berkekuatan 8,2 Skala Richter ini terjadi di lepas pantai selatan Kepulauan Sunda Kecil (mencakup pulau Bali, Lombok, Sumbawa, Sumba, Flores, Timor, Alor dan pulau-pulau kecil sekitarnya) pada tgl 19 Agustus 1977. Total korban meninggal diperkirakan mencapai 107 jiwa di seluruh wilayah Kepulauan Sunda Kecil dan lebih dari 500 kapal mengalami kerusakan atau hilang. Goncangan gempa terasa hingga ke Perth, Australia, yang terletak lebih dari 2.000 km disebelah selatan pusat gempa. Khusus daerah Kab. Sumbawa, tsunami melanda Dusun Ai Ketapang, Kecamatan Lunyuk dengan korban 64 orang meninggal dan 171 luka-luka. Selain gempa ini, dalam kurun waktu 10 tahun terakhir juga sering terjadi gempa-gempa kecil yang tidak menimbulkan korban atau kerusakan.

2) Kekeringan

Bencana Kekeringan sering terjadi di Kabupaten Sumbawa. Sejarah mencatat selama kurun waktu 10 tahun terakhir, terjadi 41 kali kejadian kekeringan dengan kerugian yang cukup banyak. Lokasi kejadian kekeringan ini di beberapa wilayah di Kabupaten Sumbawa.

3) Banjir dan Banjir Bandang

Bencana banjir telah terjadi sebanyak 45 kali kejadian. Bencana banjir yang diikuti banjir bandang terjadi pada tahun 2006, 2011 dan terakhir tahun 2015. Banjir bandang terakhir terjadi tgl 20 Februari 2015, yang melanda 5 (lima) desa dengan korban terdampak lebih dari 1200 KK. Kerusakan terparah terjadi di Desa Labuan Jambu, dimana lebih dari 400 rumah terendam dan 6 unit rumah hanyut. Selain itu, 35 ha sawah dan 15 ha ladang jagung terendam yang mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi masyarakat.

4) Cuaca Ekstrim/Angin Puting Beliung

Bencana cuaca ekstrim/angin puting beliung di Kabupaten Sumbawa terjadi sebanyak 17 kali kejadian. Tidak ada catatan khusus mengenai korban dan kerugian akibat bencana ini.

5) Gelombang Pasang (Ekstrim) dan Abrasi

Berdasarkan catatan BPBD, Gelombang Ekstrim dan Abrasi terjadi sebanyak 6 (Enam) kali Kecamatan Labuan Badas, Utan Rhee dan Moyo Utara.

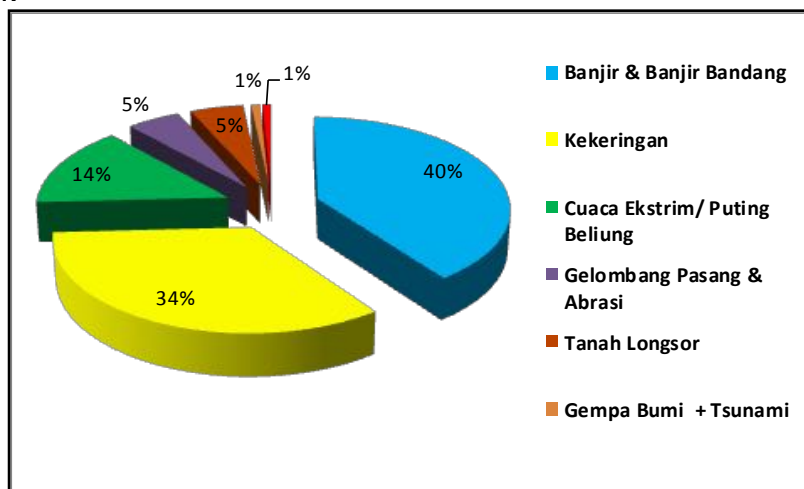
6) Tanah Longsor

Bencana tanah longsor di Kabupaten Sumbawa terjadi sebanyak 6 kali kejadian. Lokasi kejadian kekeringan ini di beberapa wilayah di Kabupaten Sumbawa.

## 7) Konflik Sosial

Konflik sosial berlatar belakang SARA yang diawali oleh kecelakaan lalu lintas ini terjadi pada tanggal 22 Januari 2013 dan mengakibatkan lebih dari 2.000 orang harus mengungsi.

Berdasarkan data DIBI tahun 2004 – 2015 dan Catatan BPBD, persentase kejadian bencana di Kabupaten Sumbawa dari yang terbesar sampai yang terkecil adalah bencana banjir sebesar 40%, Kekeringan 34%, Cuaca Ekstrim 14%, Tanah Longsor dan Gelombang Ekstrim masing-masing 5% serta Tsunami dan Konflik Sosial masing-masing 1%. Proporsi selengkapnya masing-masing jenis bencana di Kabupaten Sumbawa dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



**Gambar 0-1. Persentase Jumlah Kejadian Bencana di Kab. Sumbawa (2004 – 2015)**

## 2.1.4 Aspek Demografi

### 2.1.4.1 Jumlah Penduduk, Sex Rasio dan Kepadatan Penduduk

Berdasarkan angka proyeksi dari Badan Pusat Statistik terdata jumlah penduduk di Kabupaten Sumbawa pada tahun 2014 sebesar 436.599 jiwa, terdiri dari laki-laki 222.728 jiwa (51,01%) dan perempuan 213.871 jiwa (48,99%), dengan sex rasio sebesar 104. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.20  
Jumlah, Sex Rasio Dan Kepadatan Penduduk Tahun 2010-2014  
Di Kabupaten Sumbawa**

No	Kecamatan	Penduduk (Jiwa)			Sex Rasio	Kepada tan (Jiwa/ Km <sup>2</sup> )
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Lunvuk	10.096	9.514	19.610	106	38
2.	Orong Telu	2.472	2.251	4.723	110	10
3.	Alas	14.609	14.293	28.902	102	235
4.	Alas Barat	9.787	9.431	19.218	104	114
5.	Buer	7.001	6.983	13.984	100	102
6.	Utan	14.991	14.693	29.684	102	191
7.	Rhee	3.726	3.432	7.158	109	31
8.	Batulanteh	5.398	4.945	10.343	109	26
9.	Sumbawa	30.138	29.355	59.493	103	1.327

No	Kecamatan	Penduduk (Jiwa)			Sex Rasio	Kepada tan (Jiwa/Km <sup>2</sup> )
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
10.	Lab. Badas	16.068	15.864	31.932	101	73
11.	Unter Iwes	9.824	9.288	19.112	106	232
12.	Moyohilir	11.812	11.464	23.276	103	125
13.	Moyo Utara	4.833	4.673	9.506	103	105
14.	Moyohulu	10.562	9.953	20.515	106	66
15.	Ropang	2.693	2.415	5.108	112	11
16.	Lenangguar	3.368	3.052	6.420	110	13
17.	Lantung	1.443	1.394	2.837	104	17
18.	Lape	8.692	8.233	16.925	106	83
19.	Lopok	9.287	9.109	18.396	102	118
20.	Plampang	15.531	14.773	30.304	105	72
21.	Labangka	5.481	5.138	10.619	107	44
22.	Maronge	5.275	4.881	10.156	108	37
23.	Empang	11.468	10.848	22.316	106	40
24.	Tarano	8.173	7.889	16.062	104	48
<b>Jumlah Th. 2014</b>		<b>222.728</b>	<b>213.871</b>	<b>436.599</b>	<b>104</b>	<b>66</b>
<b>Jumlah Th. 2013</b>		<b>220.206</b>	<b>211.718</b>	<b>431.924</b>	<b>104</b>	<b>65</b>
<b>Jumlah Th. 2012</b>		<b>217.679</b>	<b>209.440</b>	<b>427.119</b>	<b>104</b>	<b>64</b>
<b>Jumlah Th. 2011</b>		<b>215.169</b>	<b>207.023</b>	<b>422.192</b>	<b>104</b>	<b>64</b>
<b>Jumlah Th. 2010</b>		<b>212.185</b>	<b>203.604</b>	<b>415.789</b>	<b>104</b>	<b>63</b>

Sumber: BPS Kab. Sumbawa (data diolah)

#### 2.1.4.2 Pertumbuhan Penduduk

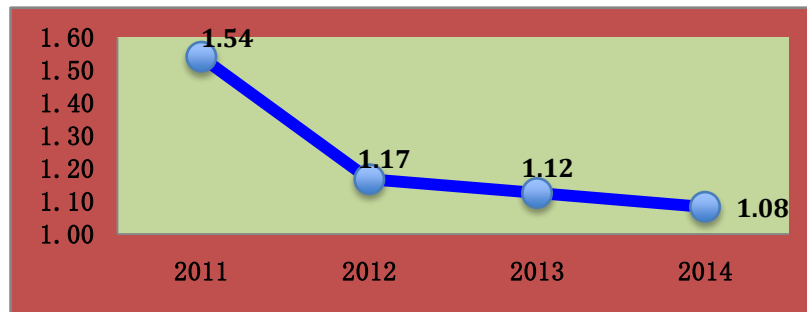
Pada rentang waktu 5 (lima) tahun terakhir, yakni dari tahun 2010-2014, penduduk Kabupaten Sumbawa terus mengalami peningkatan dari 415.789 jiwa pada tahun 2010 menjadi 436.599 jiwa pada tahun 2014, dengan laju pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 1,23%.

**Tabel 2.21**  
**Pertumbuhan Penduduk Tahun 2011-2014 Di Kabupaten Sumbawa**

Uraian	Tahun				
	2010	2011	2012	2013	2014
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
Laki-Laki	212.185	215.169	217.679	220.206	222.728
Perempuan	203.604	207.023	209.440	211.718	213.871
<b>Jumlah</b>	<b>415.789</b>	<b>422.192</b>	<b>427.119</b>	<b>431.924</b>	<b>436.599</b>
<b>Pertumbuhan (%)</b>	-	<b>1,54</b>	<b>1,17</b>	<b>1,12</b>	<b>1,08</b>

Sumber: BPS Kab. Sumbawa (data diolah)

Dari Tabel di atas, meskipun jumlah penduduk setiap tahun bertambah, namun laju pertumbuhannya menunjukkan kecenderungan menurun sebagaimana tergambar berikut ini.



**Gambar 2.10**  
**Laju Pertumbuhan Penduduk (%) Tahun 2011-2014 Di Kabupaten Sumbawa**

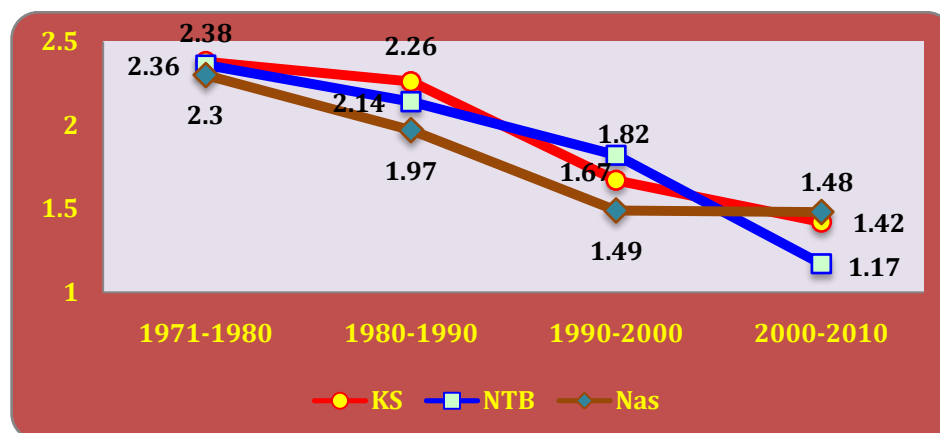
Begitu pula halnya dengan menggunakan data hasil sensus penduduk yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali (sejak tahun 1980), laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Sumbawa juga menunjukkan tren penurunan. Berdasarkan Sensus Penduduk Tahun 2010, jumlah dan tingkat pertumbuhan penduduk Kabupaten Sumbawa (KS) serta perbandingannya dengan Provinsi NTB dan Nasional disajikan pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.22**  
**Laju Pertumbuhan Tahunan Penduduk Kabupaten Sumbawa Berdasarkan Hasil Sensus Penduduk**

Jenis Kelamin/ Uraian	Sensus Penduduk				
	1971	1980	1990	2000	2010
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
Laki-Laki	98.014	123.325	152.871	183.511	212.185
Perempuan	95.107	121.058	152.660	177.068	203.604
<b>Jumlah</b>	<b>193.121</b>	<b>244.383</b>	<b>305.531</b>	<b>360.579</b>	<b>415.789</b>
<b>Pertumb. Pddk KS (%)</b>	-	<b>2,38</b>	<b>2,26</b>	<b>1,67</b>	<b>1,42</b>
<b>Pertumb. Pddk NTB (%)</b>	-	<b>2,36</b>	<b>2,14</b>	<b>1,82</b>	<b>1,17</b>
<b>Pertumb. Pddk Nas (%)</b>	-	<b>2,3</b>	<b>1,97</b>	<b>1,49</b>	<b>1,48</b>

*Sumber: Data Sensus Penduduk, Diolah dari BPS Sbw, BPS NTB dan BPS Pusat.*

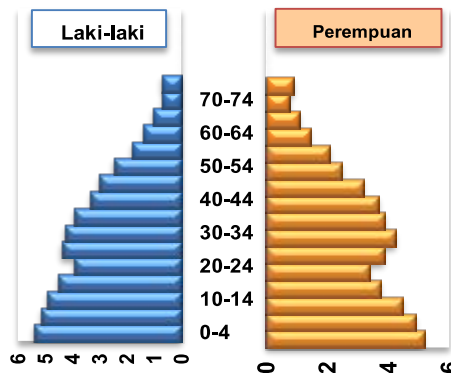
Penurunan yang paling tajam terjadi di tingkat Provinsi NTB antara periode 2000-2010 yakni 1,17% per tahun dibandingkan KS (1,42%) dan Nasional (1,48%). Karakteristik penurunan laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Sumbawa, Provinsi NTB dan Nasional terlihat pada gambar berikut ini.



**Gambar 2.11**  
**Laju Pertumbuhan Tahunan Penduduk Kabupaten Sumbawa, Provinsi NTB dan Nasional Berdasarkan Hasil Sensus Penduduk**

### 2.1.4.3 Struktur Dan Komposisi Penduduk

Pada tahun 2014, penduduk Kabupaten Sumbawa masih didominasi oleh kelompok umur 0-4 tahun, yaitu sebanyak 45.760 jiwa dengan komposisi penduduk laki-laki masih lebih banyak dari perempuan. Struktur penduduk Kabupaten Sumbawa ditunjukkan pada piramida berikut ini.



**Gambar 2.12**  
**Struktur Penduduk Tahun 2014 Di Kabupaten Sumbawa**

Struktur penduduk Kabupaten Sumbawa dari tahun 2010 s/d 2014 menunjukkan trend positif, dengan menurunnya persentase penduduk usia non produktif (usia 0-14 tahun dan usia diatas 64 tahun), dan semakin meningkatnya persentase penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun), sebagaimana tabel berikut ini.

**Tabel 2.23**  
**Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur Tahun 2010-2014**  
**Di Kabupaten Sumbawa**

No	Kelompok Umur	Persentase				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
1	0 – 4 Tahun	10,89	10,84	10,74	10,63	10,48
2	5 – 9 Tahun	10,03	9,98	9,95	9,96	9,97
3	10 – 14 Tahun	9,53	9,43	9,32	9,20	9,11
4	15 – 19 Tahun	8,42	8,35	8,29	8,24	8,17
5	20 – 24 Tahun	7,92	7,85	7,79	7,73	7,67
6	25 – 29 Tahun	8,42	8,33	8,23	8,12	8,03
7	30 – 34 Tahun	8,63	8,57	8,52	8,47	8,41
8	35 – 39 Tahun	7,59	7,63	7,64	7,65	7,65
9	40 – 44 Tahun	6,89	6,99	7,09	7,19	7,27
10	45 – 49 Tahun	5,96	6,03	6,12	6,21	6,31
11	50 – 54 Tahun	4,56	4,66	4,74	4,81	4,88
12	55 – 59 Tahun	3,62	3,73	3,86	3,99	4,11
13	60 – 64 Tahun	2,63	2,66	2,70	2,76	2,82
14	65 – 69 Tahun	1,97	2,00	2,03	2,08	2,13
15	70 – 74 Tahun	1,38	1,39	1,40	1,40	1,41
16	> 75 Tahun	1,57	1,57	1,57	1,58	1,59
17	Jumlah	100	100	100	100	100

Sumber: BPS Kab. Sumbawa

## 2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

### 2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Tingkat kesejahteraan dan pemerataan ekonomi terlihat dari indikator pertumbuhan PDRB, laju inflasi, PDRB per kapita, indeks gini, pemerataan pendapatan versi Bank Dunia, Indeks Ketimpangan Williamson (indeks ketimpangan regional), persentase penduduk di atas garis kemiskinan, serta angka kriminalitas yang tertangani. Berikut ini disajikan secara berturut-turut indikator kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dimaksud.

#### 2.2.1.1 Produk Domestik Regional Bruto dan Pertumbuhan Ekonomi

##### a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB menggambarkan kemampuan daerah dalam mengelola sumber daya alam dan faktor-faktor produksi lainnya dalam menciptakan nilai tambah. PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang diciptakan dari seluruh aktivitas perekonomian di suatu daerah. Nilai PDRB ini akan menggambarkan kinerja perekonomian daerah secara makro. Adapun nilai PDRB atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan tahun 2010 Kabupaten Sumbawa dari rentang tahun 2011 – 2014, sebagai berikut.

**Tabel 2.24**  
**PDRB dan Laju Pertumbuhan PDRB Tahun 2011 – 2014**  
**ADH Berlaku dan ADH Konstan 2010 Di Kabupaten Sumbawa**

Tahun	PDRB ADH (Juta Rp.)		Laju Pertumbuhan (%)	
	Berlaku	Konstan (2010)	Berlaku	Konstan (2010)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
2010	6.175.915,69	6.175.915,69	14,87	5,92*)
2011	6.805.883,27	6.606.354,56	10,20	6,97
2012	7.410.211,83	7.046.786,98	8,88	6,67
2013*	8.051.795,94	7.501.177,70	8,66	6,45
2014**	9.129.448,86	8.001.095,66	13,38	6,66

Sumber: BPS Kabupaten Sumbawa (PDRB tahun 2014)

\*) Laju pertumbuhan menggunakan tahun dasar 2000.

Kondisi perekonomian Kabupaten Sumbawa terus tumbuh dan berkembang, terlihat dari peningkatan PDRB ADH Berlaku dari Rp6,175 trilyun pada tahun 2010 menjadi Rp9,129 Trilyun pada tahun 2014 dengan rata-rata laju pertumbuhan pertahun sebesar 10,28%. Demikian pula dengan PDRB ADH Konstan 2010 dari Rp6,175 Trilyun pada tahun 2010 menjadi Rp8,001 Trilyun pada tahun 2014 dengan rata-rata laju pertumbuhan pertahun sebesar 6,69%.

PDRB Kabupaten Sumbawa atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan (2010) serta kontribusi berdasarkan lapangan usaha periode tahun 2011-2014 disajikan sebagai berikut.



**Tabel 2.25**  
**Nilai dan Distribusi Persentase (*Share*) PDRB Tahun 2010 – 2014 Menurut Lapangan Usaha**  
**Atas Dasar Harga Berlaku Di Kabupaten Sumbawa**

No	Lapangan Usaha	2010		2011		2012		2013*		2014**	
		(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.471.911,37	40,03	2.683.878,01	39,43	2.896.393,05	39,09	3.125.748,14	38,82	3.484.887,12	38,17
2	Pertambangan dan Penggalian	199.142,41	3,22	212.378,69	3,12	227.719,14	3,07	245.864,44	3,05	309.004,37	3,38
3	Industri Pengolahan	156.065,50	2,53	161.801,70	2,38	170.241,86	2,30	179.107,82	2,22	189.424,71	2,07
4	Pengadaan Listrik dan Gas	4.062,51	0,07	4.331,97	0,06	5.072,15	0,07	5.105,20	0,06	6.061,00	0,07
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3.452,17	0,06	3.717,09	0,05	4.143,90	0,06	4.588,91	0,06	5.374,02	0,06
6	Konstruksi	880.753,48	14,26	939.945,27	13,81	983.715,61	13,28	1.052.247,40	13,07	1.170.266,19	12,82
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	848.906,16	13,75	981.033,87	14,41	1.097.360,41	14,81	1.214.368,50	15,08	1.412.597,86	15,47
8	Transportasi dan Pergudangan	252.482,83	4,09	269.205,68	3,96	289.661,37	3,91	318.130,74	3,95	356.887,49	3,91
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	72.800,55	1,18	81.605,55	1,20	91.823,94	1,24	109.024,55	1,35	133.133,38	1,46
10	Informasi dan Komunikasi	77.410,40	1,25	84.590,18	1,24	96.345,50	1,30	105.372,60	1,31	116.290,15	1,27
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	178.361,75	2,89	212.463,20	3,12	260.265,56	3,51	292.096,80	3,63	333.197,28	3,65
12	Real Estat	130.669,25	2,12	146.155,89	2,15	161.598,99	2,18	180.217,52	2,24	199.458,47	2,18

No	Lapangan Usaha	2010		2011		2012		2013*		2014**	
		(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>
13	Jasa Perusahaan	14.120,19	0,23	15.455,56	0,23	16.794,35	0,23	18.590,17	0,23	21.293,30	0,23
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	426.188,54	6,90	488.327,26	7,18	534.217,57	7,21	574.994,91	7,14	686.920,70	7,52
15	Jasa Pendidikan	276.457,63	4,48	321.871,89	4,73	359.238,75	4,85	393.062,77	4,88	448.676,92	4,91
16	Jasa Kesehatan	79.186,04	1,28	85.564,16	1,26	91.720,12	1,24	99.975,50	1,24	108.015,66	1,18
17	Jasa lainnya	103.944,91	1,68	113.557,30	1,67	123.899,56	1,67	133.299,97	1,66	147.960,24	1,62
	<b>PDRB</b>	<b>6.175.915,69</b>	<b>100</b>	<b>6.805.883,27</b>	<b>100</b>	<b>7.410.211,83</b>	<b>100</b>	<b>8.051.795,94</b>	<b>100</b>	<b>9.129.448,86</b>	<b>100</b>

Sumber: BPS Kabupaten Sumbawa (PDRB tahun 2014)

\*) Angka Sementara

\*\*\*) Angka Sangat Sementara

**Tabel 2.26**  
**Nilai dan Distribusi Persentase (*Share*) PDRB Tahun 2010 – 2014 Menurut Lapangan Usaha**  
**Atas Dasar Harga Konstan 2010 Di Kabupaten Sumbawa**

<b>No</b>	<b>Lapangan Usaha</b>	<b>2010</b>		<b>2011</b>		<b>2012</b>		<b>2013*</b>		<b>2014**</b>	
		<b>(Rp)</b>	<b>%</b>	<b>(Rp)</b>	<b>%</b>	<b>(Rp)</b>	<b>%</b>	<b>(Rp)</b>	<b>%</b>	<b>(Rp)</b>	<b>%</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.471.911,37	40,03	2.651.398,79	40,13	2.843.374,50	40,35	3.021.693,93	40,28	3.213.218,09	40,16
2	Pertambangan dan Penggalian	199.142,41	3,22	209.600,64	3,17	221.614,75	3,14	236.027,80	3,15	251.975,06	3,15
3	Industri Pengolahan	156.065,50	2,53	161.079,43	2,44	168.254,85	2,39	176.080,39	2,35	185.108,28	2,31
4	Pengadaan Listrik dan Gas	4.062,51	0,07	4.788,94	0,07	5.488,67	0,08	6.538,45	0,09	7.695,65	0,10
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3.452,17	0,06	3.654,77	0,06	3.832,10	0,05	4.023,70	0,05	4.366,70	0,05
6	Konstruksi	880.753,48	14,26	932.603,51	14,12	968.881,78	13,75	1.026.249,27	13,68	1.090.429,10	13,63
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	848.906,16	13,75	925.023,10	14,00	1.007.658,26	14,30	1.095.105,51	14,60	1.189.136,77	14,86
8	Transportasi dan Pergudangan	252.482,83	4,09	264.620,01	4,01	278.286,96	3,95	293.326,91	3,91	306.474,29	3,83
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	72.800,55	1,18	77.046,85	1,17	82.042,14	1,16	87.606,13	1,17	93.635,22	1,17
10	Informasi dan Komunikasi	77.410,40	1,25	84.821,74	1,28	96.351,06	1,37	104.750,19	1,40	115.188,58	1,44
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	178.361,75	2,89	203.161,04	3,08	229.589,37	3,26	248.523,98	3,31	270.538,14	3,38
12	Real Estat	130.669,25	2,12	138.173,53	2,09	144.206,07	2,05	152.007,61	2,03	160.884,32	2,01
13	Jasa Perusahaan	14.120,19	0,23	15.230,75	0,23	16.178,10	0,23	17.194,08	0,23	18.366,32	0,23

No	Lapangan Usaha	2010		2011		2012		2013*		2014**	
		(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	426.188,54	6,90	441.152,80	6,68	454.226,56	6,45	468.338,07	6,24	484.375,85	6,05
15	Jasa Pendidikan	276.457,63	4,48	298.189,79	4,51	318.685,35	4,52	341.009,60	4,55	370.828,60	4,63
16	Jasa Kesehatan	79.186,04	1,28	83.361,78	1,26	87.679,05	1,24	94.507,26	1,26	101.126,73	1,26
17	Jasa lainnya	103.944,91	1,68	112.447,11	1,70	120.437,41	1,71	128.194,83	1,71	137.747,96	1,72
	PDRB	6.175.915,69	100	6.606.354,58	100	7.046.786,98	100	7.501.177,71	100	8.001.095,66	100

Sumber: BPS Kabupaten Sumbawa (PDRB tahun 2014)

\*) Angka Sementara

\*\*\*) Angka Sangat Sementara

**Tabel 2.27**  
**Perkembangan Distribusi Persentase (*Share*) PDRB Tahun 2010-2014 Menurut Lapangan Usaha**  
**Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan 2010 (Hk) Di Kabupaten Sumbawa**

No	Lapangan Usaha	2010		2011		2012		2013*		2014**	
		Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	40,03	40,03	39,43	40,13	39,09	40,35	38,82	40,28	38,17	40,16
2	Pertambangan dan Penggalian	3,22	3,22	3,12	3,17	3,07	3,14	3,05	3,15	3,38	3,15
3	Industri Pengolahan	2,53	2,53	2,38	2,44	2,30	2,39	2,22	2,35	2,07	2,31
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,07	0,07	0,06	0,07	0,07	0,08	0,06	0,09	0,07	0,10

No	Lapangan Usaha	2010		2011		2012		2013*		2014**	
		Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,06	0,06	0,05	0,06	0,06	0,05	0,06	0,05	0,06	0,05
6	Konstruksi	14,26	14,26	13,81	14,12	13,28	13,75	13,07	13,68	12,82	13,63
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	13,75	13,75	14,41	14,00	14,81	14,30	15,08	14,60	15,47	14,86
8	Transportasi dan Pergudangan	4,09	4,09	3,96	4,01	3,91	3,95	3,95	3,91	3,91	3,83
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,18	1,18	1,20	1,17	1,24	1,16	1,35	1,17	1,46	1,17
10	Informasi dan Komunikasi	1,25	1,25	1,24	1,28	1,30	1,37	1,31	1,40	1,27	1,44
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,89	2,89	3,12	3,08	3,51	3,26	3,63	3,31	3,65	3,38
12	Real Estat	2,12	2,12	2,15	2,09	2,18	2,05	2,24	2,03	2,18	2,01
13	Jasa Perusahaan	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,90	6,90	7,18	6,68	7,21	6,45	7,14	6,24	7,52	6,05
15	Jasa Pendidikan	4,48	4,48	4,73	4,51	4,85	4,52	4,88	4,55	4,91	4,63
16	Jasa Kesehatan	1,28	1,28	1,26	1,26	1,24	1,24	1,24	1,26	1,18	1,26
17	Jasa lainnya	1,68	1,68	1,67	1,70	1,67	1,71	1,66	1,71	1,62	1,72
	<b>PDRB</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Sumber: BPS Kabupaten Sumbawa (PDRB tahun 2014)

\*) Angka Sementara

\*\*\*) Angka Sangat Sementara

Berdasarkan struktur perekonomian Kabupaten Sumbawa selama periode 2010-2014, maka sektor penyumbang PDRB terbesar di Kabupaten Sumbawa adalah kategori pertanian, konstruksi, dan industri perdagangan. Selain itu, sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib serta jasa pendidikan juga memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap PDRB Kabupaten Sumbawa.

#### **b. Laju Pertumbuhan PDRB**

Dalam kurun waktu tahun 2011-2014, laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Sumbawa berada diatas 6% per tahun. Pada tahun 2014, pertumbuhan PDRB atas dasar harga berlaku sebesar 13,38%, dan atas dasar harga konstan 2010 sebesar 6,66%. Sumber pertumbuhan PDRB Kabupaten Sumbawa atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan 2010 menurut lapangan usaha, terlihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.28**

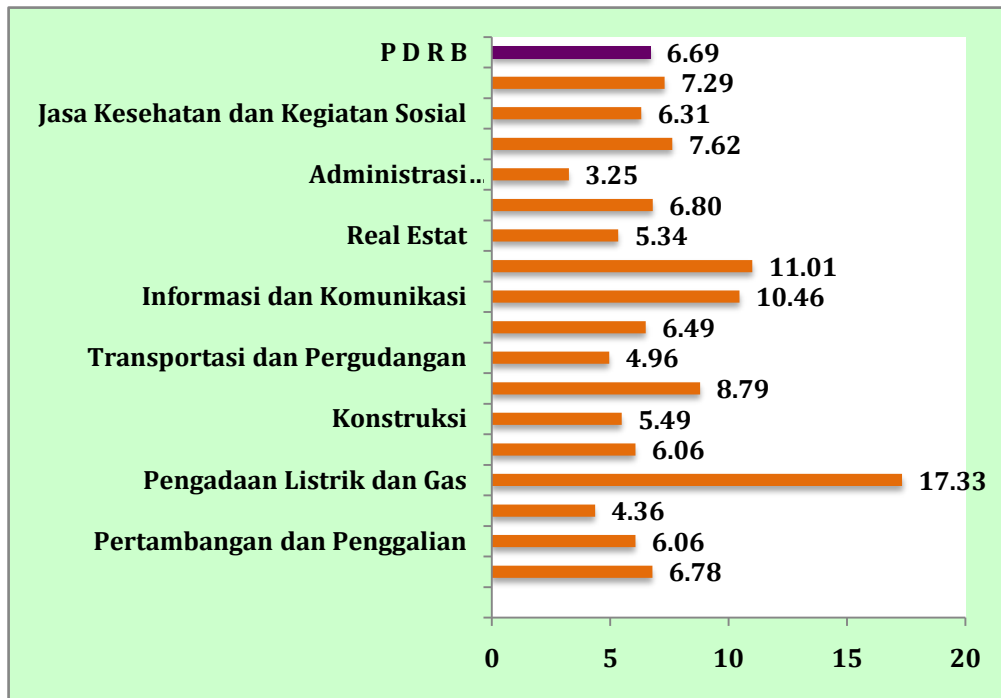
**Laju Pertumbuhan PDRB Tahun 2011-2014 Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan 2010 (Hk) Di Kabupaten Sumbawa**

No	Lapangan Usaha	Pertumbuhan									
		2010*)		2011		2012		2013*		2014**	
		Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-	-	8,58	7,26	7,92	7,24	7,92	6,27	11,49	6,34
2	Pertambangan dan Penggalian	-	-	6,65	5,25	7,22	5,73	7,97	6,50	25,68	6,76
3	Industri Pengolahan	-	-	3,68	3,21	5,22	4,45	5,21	4,65	5,76	5,13
4	Pengad. Listrik & Gas	-	-	6,63	17,88	17,09	14,61	0,65	19,13	18,72	17,70
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	-	-	7,67	5,87	11,48	4,85	10,74	5,00	17,11	8,52
6	Konstruksi	-	-	6,72	5,89	4,66	3,89	6,97	5,92	11,22	6,25
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-	-	15,56	8,97	11,86	8,93	10,66	8,68	16,32	8,59
8	Transportasi dan Pergudangan	-	-	6,62	4,81	7,60	5,16	9,83	5,40	12,18	4,48
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-	-	12,09	5,83	12,52	6,48	18,73	6,78	22,11	6,88
10	Informasi & Komunikasi	-	-	9,27	9,57	13,90	13,59	9,37	8,72	10,36	9,97
11	Jasa Keuangan & Asuransi	-	-	19,12	13,90	22,50	13,01	12,23	8,25	14,07	8,86
12	Real Estat	-	-	11,85	5,74	10,57	4,37	11,52	5,41	10,68	5,84
13	Jasa Perusahaan	-	-	9,46	7,87	8,66	6,22	10,69	6,28	14,54	6,82
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-	-	14,58	3,51	9,40	2,96	7,63	3,11	19,47	3,42
15	Jasa Pendidikan	-	-	16,43	7,86	11,61	6,87	9,42	7,01	14,15	8,74
16	Jasa Kesehatan	-	-	8,05	5,27	7,19	5,18	9,00	7,79	8,04	7,00
17	Jasa lainnya	-	-	9,25	8,18	9,11	7,11	7,59	6,44	11,00	7,45
	<b>PDRB</b>	14,87	5,92	<b>10,20</b>	<b>6,97</b>	<b>8,88</b>	<b>6,67</b>	<b>8,66</b>	<b>6,45</b>	<b>13,38</b>	<b>6,66</b>

Sumber: BPS Kabupaten Sumbawa (PDRB tahun 2014)

\*) Laju Pertumbuhan pada tahun 2010 masih menggunakan perhitungan tahun dasar 2000, dengan 9 sektor lapangan usaha, dengan perubahan menjadi 18 kategori lapangan usaha pada tahun selanjutnya.

Bila data tabel diatas dirata-ratakan, maka rata-rata laju pertumbuhan riil PDRB (atas dasar harga konstan 2010) per tahun, tergambar sebagai berikut.



**Gambar 2.13**  
**Rata-rata Pertumbuhan PDRB Riil Menurut Lapangan Usaha**  
**Selama Tahun 2011-2014 Di Kabupaten Sumbawa**

Kategori yang memiliki rata-rata pertumbuhan tertinggi adalah kategori pengadaan listrik dan gas, yaitu sebesar 17,33%, diikuti oleh kategori jasa keuangan dan asuransi sebesar 11,01%, dan kategori informasi dan komunikasi sebesar 10,46%. Sementara kategori yang dominan memberikan *share* pada struktur perekonomian di Kabupaten Sumbawa yaitu kategori pertanian, kehutanan dan perikanan memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 6,78%. Untuk 9 kategori yang mempunyai rata-rata laju pertumbuhan dibawah rata-rata laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumbawa, adalah kategori pertambangan dan penggalian sebesar 6,06%, kategori Industri pengolahan sebesar 4,36%, kategori pengadaan air, pengolahan sampah, limbah dan daur ulang sebesar 6,06%, kategori konstruksi sebesar 5,49%, kategori transportasi dan pergudangan sebesar 4,96%, kategori penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 6,50%, kategori real estat sebesar 5,34%, kategori administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar 3,25%, dan kategori jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 6,31%.

Meskipun pertumbuhan tertinggi terjadi pada kategori pengadaan listrik dan gas, namun kategori tersebut bukan merupakan sumber pertumbuhan utama (*source of growth*). Kategori ini justru hanya menyumbang sebesar 0,01% terhadap pembentukan laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Sumbawa tahun 2014. Sumber pertumbuhan utama PDRB Kabupaten Sumbawa tahun 2014 disumbang oleh kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 2,67%, diikuti oleh kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 0,99%, serta kategori konstruksi sebesar 0,91%.

Secara sektoral, kategori pertanian, kehutanan dan perikanan memberikan kontribusi terhadap PDRB ADH berlaku tahun 2014 sebesar 38,17%. Kontribusi terbesar pada kategori ini disumbangkan oleh sub kategori

tanaman pangan sebesar 46,31% dari seluruh nilai tambah pertanian. Sementara untuk laju pertumbuhan ekonomi yang terbesar berasal dari sub kategori peternakan dengan laju pertumbuhan sebesar 8,30%. Selain ditopang oleh sub kategori pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian, kategori ini juga ditopang oleh sub kategori perikanan dengan kontribusi sebesar 23,37% dan laju pertumbuhan sebesar 5,77%, sementara sub kategori kehutanan dan penebangan kayu hanya memberikan *share* sebesar 0,31%.

### 2.2.1.2 Inflasi

Laju inflasi merupakan ukuran yang dapat menggambarkan kenaikan/penurunan harga dari sekelompok barang dan jasa yang berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak akan membawa dampak yang berarti terhadap kesejahteraan masyarakat jika tingkat harga meningkat lebih tinggi. Dengan berkembangnya perekonomian berarti semua komponen nilai tambah, termasuk upah dan gaji mengalami kenaikan. Bila dilain pihak perubahan harga barang kebutuhan (inflasi) relatif stabil, maka akan terjadi kenaikan daya beli masyarakat. Dengan demikian perbaikan kesejahteraan masyarakat akan terwujud. Inflasi yang biasanya digunakan hingga tingkat nasional adalah tingkat perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK) yang dihitung secara sampel di beberapa kota di Indonesia yang mencakup 283-397 komoditas dan dihitung berdasarkan pola konsumsi hasil Survei Biaya Hidup (SBH), dimana untuk Pulau Sumbawa diwakili oleh IHK Kota Bima.

Sementara itu, untuk melihat seberapa jauh terjadinya perubahan harga di tingkat kabupaten, indikator yang digunakan adalah tingkat perubahan Indeks Harga Implisit (IHI) PDRB. Tingkat perubahan indeks harga implisit menggambarkan tingkat perubahan harga umum (inflasi) seluruh komoditi baik barang maupun jasa dari seluruh kegiatan ekonomi mulai dari sektor/lapangan usaha pertanian sampai dengan lapangan usaha jasa-jasa yang terjadi di suatu wilayah dalam kurun waktu satu tahun. Angka inflasi disajikan hanya pada tingkat Provinsi. Selengkapnya perkembangan inflasi Provinsi NTB terlihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.29**  
**Nilai Inflasi Rata-Rata Provinsi Nusa Tenggara Barat Dan Inflasi PDRB Kabupaten Sumbawa Tahun 2011-2014**

Uraian	Tahun					Rata-Rata
	2010	2011	2012	2013	2014	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
Inflasi Prov. NTB	10,08	6,55	3,99	9,51	7,23	7,47
Inflasi PDRB Kab. Sumbawa	0 (Tahun Dasar)	3,02	2,07	2,08	6,30	3,37

*Sumber: BPS (Statistik Daerah Provinsi NTB, 2015; dan PDRB Kab. Sumbawa Menurut Pengeluaran, 2015), Data Diolah.*

Mencermati perkembangan inflasi selama 2011 – 2014 (khususnya data inflasi Provinsi NTB), tampak bahwa tahun 2010 merupakan nilai inflasi tertinggi, yaitu sebesar 10,08 persen jauh lebih besar dibanding tahun 2011 senilai 6,55 persen dan tahun 2012 senilai 3,99 persen, sedangkan pada tahun 2013 kembali meningkat sebesar 9,51 persen, dan pada tahun 2014 inflasi sedikit lebih baik dari tahun 2013, yaitu sebesar 7,23 persen. Sementara itu, tingkat perubahan harga implisit PDRB Kabupaten Sumbawa tertinggi di tahun 2014 sebesar 6,30 persen, sedangkan dari tahun 2011-2013 relatif stabil.

**Tabel 2.30**



**Pertumbuhan Implisit (Indeks Harga) Penggunaan Konsumsi Akhir  
Rumah Tangga Tahun 2011—2014 Di Kabupaten Sumbawa**

<b>No.</b>	<b>Kelompok Konsumsi</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1	Makanan, Minuman, dan Rokok	9,23	3,93	1,5	6,26
2	Pakaian dan Alas Kaki	5,52	3,06	2,76	3,99
3	Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	4,46	2,48	5,92	4,81
4	Kesehatan & Pendidikan	5,26	6,72	4,1	2,51
5	Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	2,48	3,55	9,18	5,49
6	Hotel & Restoran	1,37	12,58	5,39	4,65
7	Lainnya	1,36	9,58	7,00	4,86
	<b>Rata-rata</b>	<b>4,24</b>	<b>5,99</b>	<b>5,12</b>	<b>4,65</b>
	<b>IHI PDRB</b>	<b>3,02</b>	<b>2,07</b>	<b>2,08</b>	<b>6,30</b>

*Sumber: BPS (PDRB Tahun 2011-2014 Kab. Sumbawa Menurut Pengeluaran)*

Dari sisi penggunaan konsumsi akhir rumah tangga, tingkat perubahan harga implisit sebagaimana tercantum dalam Tabel diatas, menunjukkan peningkatan yang relatif stabil setiap tahunnya. Pertumbuhan IHI relatif tinggi terjadi pada tahun 2012, yaitu rata-rata 5,99 persen. Namun pada tahun-tahun berikutnya relatif stabil. Penyumbang terbesar terhadap tingginya perubahan harga implisit pada tahun 2012 adalah kelompok konsumsi hotel dan restoran, serta kelompok konsumsi lainnya.

Bila dibandingkan dengan tahun 2011, perubahan harga implisit pada kelompok konsumsi makanan pada tahun 2012-2014 relatif stabil (peningkatan terbesar tahun 2011 sebesar 9,23 persen). Untuk konsumsi pakaian dan alas kaki; perumahan, perkakas, perlengkapan dan penyelenggaraan rumah tangga; serta kelompok konsumsi kesehatan dan pendidikan, perubahan harga implisit juga relatif stabil bila dibandingkan dengan tahun 2011. Sementara untuk kelompok konsumsi transportasi, komunikasi, rekreasi, dan budaya; kelompok konsumsi hotel dan restoran; serta kelompok konsumsi lainnya, terjadi perubahan harga implisit yang cukup signifikan dari tahun 2011. Pada kelompok konsumsi transportasi, komunikasi, rekreasi, dan budaya terjadi peningkatan perubahan harga implisit yang cukup tinggi pada tahun 2013 yaitu sebesar 9,18 persen bila dibandingkan dengan tahun 2011 sebesar 2,48 persen. Begitu pula untuk kelompok konsumsi hotel dan restoran, terjadi perubahan harga implisit yang tinggi pada tahun 2012 sebesar 12,58 persen dibandingkan dengan tahun 2011 sebesar 1,37 persen. Sedangkan untuk kelompok konsumsi lainnya juga terjadi perubahan harga implisit yang signifikan pada tahun 2012 sebesar 9,58 persen dibandingkan dengan tahun 2011 yang hanya sebesar 1,36 persen.

### **2.2.1.3 PDRB Per Kapita**

PDRB Per kapita merupakan indikator dalam mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat secara makro. Semakin tinggi PDRB per kapita penduduk berarti semakin tinggi tingkat kesejahteraannya, sebaliknya penurunan PDRB per kapita pada suatu daerah menggambarkan penurunan tingkat kesejahteraan. PDRB per kapita Kabupaten Sumbawa terus mengalami peningkatan sejalan dengan berkembangnya produksi yang telah dihasilkan, hal ini terlihat dari pertumbuhan PDRB perkapita ADH berlaku dari Rp16,12 juta

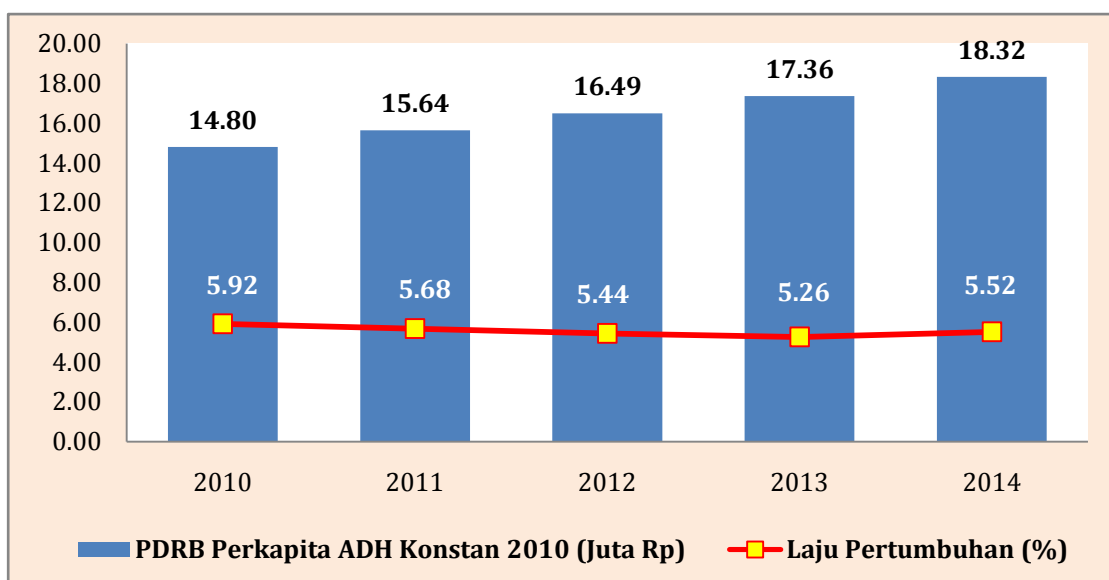
pada tahun 2011 menjadi Rp20,91 juta pada tahun 2014. Demikian pula dengan PDRB perkapita ADH Konstan 2010, pada tahun 2011 sebesar Rp15,64 juta menjadi Rp18,32 juta pada tahun 2014, sebagaimana terlihat dari laju peningkatan PDRB perkapita ADH Konstan pada tahun 2014 sebesar 5,52% dengan rata-rata pertumbuhan pertahun sebesar 5,47% sebagaimana tergambar sebagai berikut.

**Tabel 2.31**  
**Pertumbuhan PDRB Perkapita Tahun 2010 - 2014**  
**Di Kabupaten Sumbawa**

Uraian	Tahun				
	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
PDRB perkapita (Ribu Rp)					
- ADHB	14.807	16.120	17.349	18.642	20.910
- ADHK 2010	14.807	15.648	16.498	17.367	18.326
Pertumbuhan PDRB perkapita ADHK 2010	5,92*)	5,68	5,44	5,26	5,52

Sumber: BPS (PDRB Tahun 2010-2014 Kab. Sumbawa Menurut Pengeluaran)

\*) Pertumbuhan PDRB perkapita ADHK pada tahun 2010 menggunakan dasar perhitungan tahun 2000



**Gambar 2.14**  
**PDRB Per Kapita dan Pertumbuhan PDRB Per Kapita**  
**Tahun 2010 -2014 Di Kabupaten Sumbawa**

#### 2.2.1.4 Angka Kemiskinan dan Garis Kemiskinan

BPS mengartikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makanan maupun non-makanan. Pendekatan kemiskinan ini dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar baik makanan maupun non makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Inti dari model ini adalah membandingkan tingkat konsumsi penduduk dengan garis kemiskinan (GK) yaitu jumlah rupiah untuk konsumsi per orang per bulan.

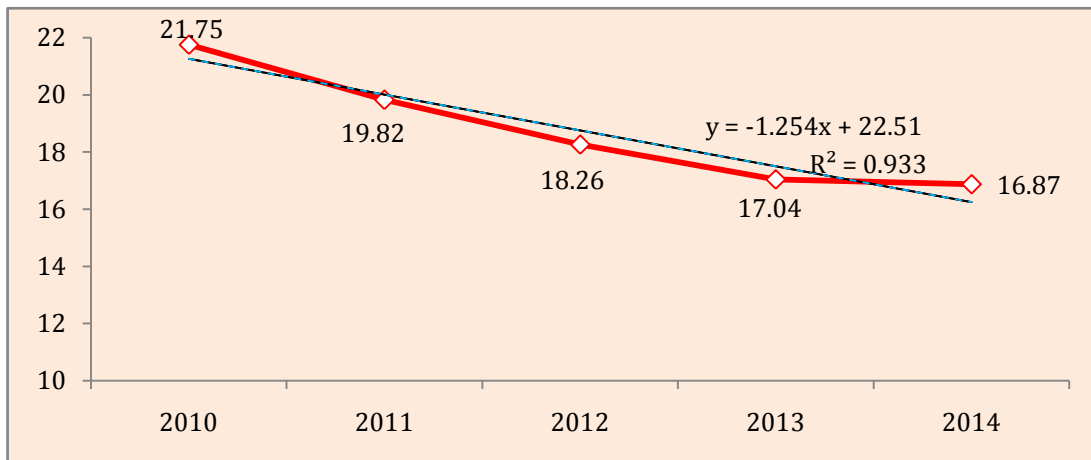
Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan (GK). Adapun tingkat

kemiskinan di Kabupaten Sumbawa menunjukkan tren yang menurun, yakni dari 90.434 Jiwa (21,75% dari jumlah penduduk) pada tahun 2010 menurun menjadi 73.858 jiwa (16,87% dari jumlah Penduduk) pada tahun 2014, dengan rata-rata penurunan sebesar 1,22% per tahun. Penurunan angka kemiskinan ini mengindikasikan bahwa sejumlah penduduk miskin telah mampu keluar dari kemiskinannya.

**Tabel 2.32**  
**Persentase Penduduk Miskin Dan Garis Kemiskinan Tahun 2010-2014**  
**Di Kabupaten Sumbawa**

<b>Tahun</b>	<b>Persentase Penduduk Miskin (%)</b>	<b>Garis Kemiskinan (Rp)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
2010	21.75	221.935
2011	19.82	233.479
2012	18.26	246.097
2013	17.04	259.474
2014	16.87	268.326

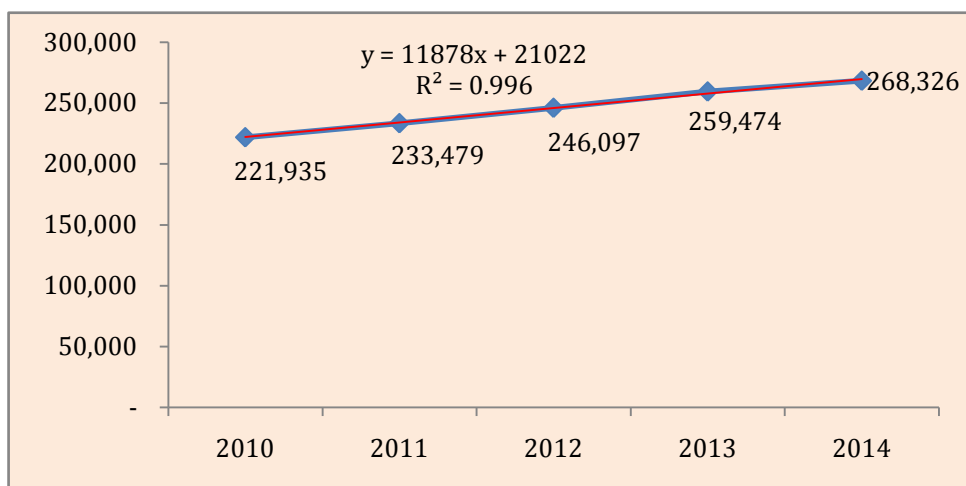
*Sumber: BPS Kabupaten Sumbawa*



**Gambar 2.15**  
**Tren Penurunan Kemiskinan Tahun 2010-2014**  
**Di Kabupaten Sumbawa**

Garis Kemiskinan terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. GKM merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. GKNM adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan.

Garis Kemiskinan di Kabupaten Sumbawa menunjukkan tren meningkat dengan peningkatan rata-rata per tahun sebesar 4,86 persen. Gambaran peningkatan garis kemiskinan di Kabupaten Sumbawa tergambar sebagai berikut.



**Gambar 2.16**  
**Garis Kemiskinan Tahun 2010-2014 Di Kabupaten Sumbawa**

## 2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

### 2.2.2.1 Angka Melek Huruf

Dalam metodologi perhitungan Indeks Pembangunan Manusia, Angka Melek Huruf (AMH) dulunya menjadi salah satu variabel yang menentukan, namun dalam perhitungan terbaru tidak lagi digunakan. Peningkatan Angka Melek Huruf (AMH) di Kabupaten Sumbawa dari tahun ke tahun cenderung tidak terlalu besar. Tahun 2014 masih ada masyarakat Kabupaten Sumbawa yang buta huruf sebanyak 7,45%. Masih adanya penduduk lanjut usia yang belum bisa membaca dan menulis dan tidak dapat ditingkatkan lagi karena faktor usia, menjadi salah satu penyebab tidak begitu signifikannya peningkatan AMH di Kabupaten Sumbawa. Bila dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Angka Melek Huruf di Kabupaten Sumbawa menempati urutan ke 4 dari 10 Kabupaten/Kota, sebagaimana tabel berikut ini.

**Tabel 2.33**  
**Angka Melek Huruf Tahun 2014 Di Kabupaten/Kota Se-Provinsi Nusa Tenggara Barat (Penduduk Usia 10 Tahun Keatas)**

No	Kabupaten/Kota	Kemampuan Membaca dan Menulis		Total
		Melek Huruf	Buta Huruf	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1	Lombok Barat	84,32	15,68	100
2	Lombok Tengah	81,18	18,82	100
3	Lombok Timur	90,77	9,23	100
<b>4</b>	<b>Sumbawa</b>	<b>92,55</b>	<b>7,45</b>	<b>100</b>
5	Dompu	90,94	9,06	100
6	Bima	91,70	8,30	100
7	Sumbawa Barat	95,11	4,89	100
8	Lombok Utara	83,12	16,88	100
9	Kota Mataram	94,19	5,81	100
10	Kota Bima	96,84	3,16	100
<b>11</b>	<b>NTB</b>	<b>88,64</b>	<b>11,36</b>	<b>100</b>

Sumber: BPS Kabupaten Sumbawa, 2015

### 2.2.2.2 Angka Rata-rata Lama Sekolah

Indikator rata-rata lama sekolah (RLS) merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi nilai IPM. Lamanya bersekolah merupakan ukuran

akumulasi investasi pendidikan individu. Hingga tahun 2014, RLS di Kabupaten Sumbawa mencapai 7,31 tahun.

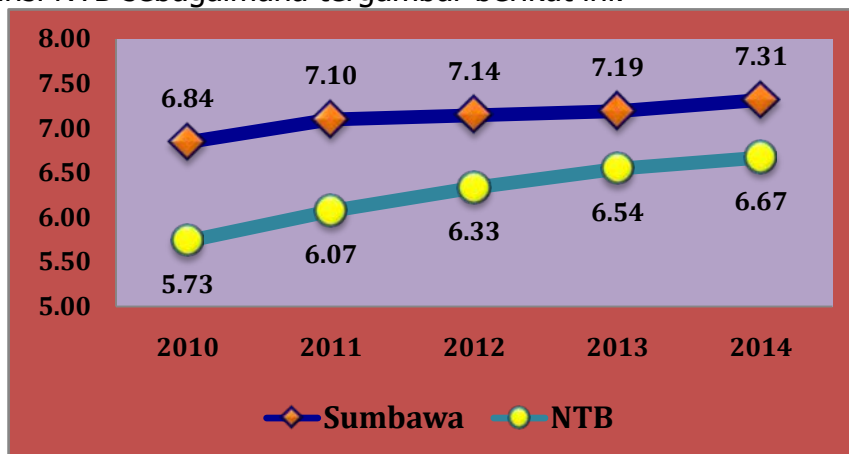
Banyak faktor yang menjadi penyebab masih rendahnya RLS ini, baik dari aspek kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan, juga karena faktor aksesibilitas. Rendahnya aksesibilitas terhadap pendidikan termasuk ketersediaan lembaga pendidikan formal terutama pendidikan menengah belum tersedia merata di seluruh pelosok wilayah Kabupaten Sumbawa. Hasil perhitungan Angka Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Sumbawa dan perbandingannya dengan Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat selama tahun 2010-2014, disajikan dalam tabel berikut.

**Tabel 2.34**  
**Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2010 – 2014 Di Kabupaten/Kota Se-Provinsi Nusa Tenggara Barat**

No	Provinsi/Kabupaten	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
1	Lombok Barat	4,72	4,98	5,15	5,38	5,63
2	Lombok Tengah	4,55	4,96	5,20	5,36	5,52
3	Lombok Timur	5,14	5,61	5,78	5,94	6,06
<b>4</b>	<b>Sumbawa</b>	<b>6,84</b>	<b>7,10</b>	<b>7,14</b>	<b>7,19</b>	<b>7,31</b>
5	Dompu	7,00	7,06	7,35	7,40	7,45
6	Bima	6,55	6,74	6,93	7,12	7,29
7	Sumbawa Barat	6,75	6,94	7,14	7,28	7,44
8	Lombok Utara	4,23	4,43	4,63	4,89	4,97
9	Kota Mataram	8,15	8,47	8,61	9,04	9,04
10	Kota Bima	9,12	9,14	9,30	9,46	9,58
<b>11</b>	<b>Nusa Tenggara Barat</b>	<b>5,73</b>	<b>6,07</b>	<b>6,33</b>	<b>6,54</b>	<b>6,67</b>

Sumber: BPS Kabupaten Sumbawa, 2015

Kondisi Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Sumbawa menempati urutan ke-5 dari 10 Kabupaten/Kota se-Provinsi NTB, dan lebih tinggi dari rata-rata Provinsi NTB sebagaimana tergambar berikut ini.



**Gambar 2.17**  
**Perkembangan Angka Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2010 – 2014 Di Kabupaten Sumbawa**

### 2.2.2.3 Angka Harapan Lama Sekolah

Selain Angka Rata-rata Lama Sekolah, Angka Harapan Lama Sekolah merupakan salah satu indikator di dalam IPM yang mendeskripsikan kondisi

pendidikan, menggantikan Angka Melek Huruf. Harapan lama sekolah mencerminkan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Angka Harapan Lama Sekolah dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang.

Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Sumbawa dan perbandingannya dengan Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat selama tahun 2010-2014, disajikan pada tabel berikut ini.

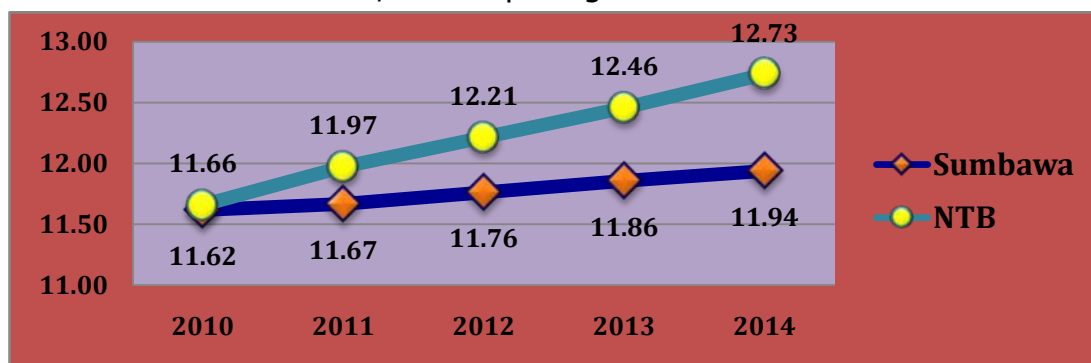
**Tabel 2.35**  
**Angka Harapan Lama Sekolah Tahun 2010 – 2014 Di Kabupaten/Kota Se-Provinsi Nusa Tenggara Barat**

No	Provinsi/Kabupaten	Angka Harapan Lama Sekolah (Tahun)				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
1	Lombok Barat	11,45	11,87	11,90	11,93	12,09
2	Lombok Tengah	11,54	11,56	11,82	12,08	12,36
3	Lombok Timur	11,82	12,04	12,47	12,77	13,10
<b>4</b>	<b>Sumbawa</b>	<b>11,62</b>	<b>11,67</b>	<b>11,76</b>	<b>11,86</b>	<b>11,94</b>
5	Dompu	12,26	12,45	12,64	12,96	13,16
6	Bima	11,72	11,77	11,81	12,45	12,70
7	Sumbawa Barat	13,06	13,12	13,18	13,20	13,21
8	Lombok Utara	10,66	11,05	11,46	11,87	12,31
9	Kota Mataram	14,31	14,61	14,77	14,82	15,27
10	Kota Bima	14,22	14,44	14,65	14,70	14,92
<b>11</b>	<b>Nusa Tenggara Barat</b>	<b>11,66</b>	<b>11,97</b>	<b>12,21</b>	<b>12,46</b>	<b>12,73</b>

Sumber: BPS Kabupaten Sumbawa, 2015

Tabel di atas menggambarkan bahwa Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Sumbawa menempati urutan terakhir dari 10 Kabupaten/Kota se-Provinsi NTB, dan tentunya berada di bawah rata-rata Provinsi NTB. Bila dilihat dari sisi pertumbuhan, Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Sumbawa hanya tumbuh rata-rata 0,68 persen per tahun jauh lebih kecil bila dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan Angka Harapan Lama Sekolah Provinsi NTB sebesar 2,22 persen per tahun.

Gambaran perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Sumbawa dan Provinsi NTB, terlihat pada gambar berikut ini.



**Gambar 2.18**  
**Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah Tahun 2010 – 2014 Di Kabupaten Sumbawa**

#### 2.2.2.4 Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah jumlah siswa pada jenjang pendidikan tertentu tanpa memperhitungkan usia sebagai persentase dengan

penduduk usia sekolah yang sesuai dalam satu tahun ajaran. APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan dan merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

**Tabel 2.36**  
**APK Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2014 Di**  
**Kabupaten/Kota Se-Provinsi Nusa Tenggara Barat**

No	Kab/Kota	APK SD (%)			APK SLTP (%)			APK SLTA (%)		
		L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
1	Lombok Barat	103,89	108,18	105,91	93,14	97,74	95,22	67,57	57,98	62,11
2	Lombok Tengah	109,72	110,57	110,12	92,18	102,70	97,10	71,09	54,67	62,46
3	Lombok Timur	103,39	108,06	105,57	96,16	85,53	90,21	80,31	93,04	86,20
<b>4</b>	<b>Sumbawa</b>	<b>112,03</b>	<b>111,28</b>	<b>111,71</b>	<b>88,12</b>	<b>92,96</b>	<b>90,46</b>	<b>70,81</b>	<b>83,46</b>	<b>77,60</b>
5	Dompu	107,95	105,26	106,72	93,06	101,55	96,72	82,60	83,73	83,11
6	Bima	124,08	118,59	121,40	86,19	75,61	80,97	88,34	114,32	100,82
7	Sumbawa Barat	109,45	111,54	110,42	81,96	91,11	86,82	96,04	68,28	83,21
8	Lombok Utara	106,75	104,88	105,83	89,95	92,42	91,08	72,80	63,03	67,72
9	Kota Mataram	105,44	105,93	105,67	91,04	112,78	101,87	72,63	74,72	73,75
10	Kota Bima	115,95	106,02	111,45	84,95	108,74	97,27	94,48	94,45	94,47
<b>11</b>	<b>NTB</b>	<b>108,70</b>	<b>109,53</b>	<b>109,08</b>	<b>91,59</b>	<b>93,29</b>	<b>92,44</b>	<b>76,89</b>	<b>76,48</b>	<b>76,68</b>

Sumber: BPS Kabupaten Sumbawa, 2015

Berdasarkan tabel diatas, dari 10 Kabupaten/Kota di Provinsi NTB, APK jenjang pendidikan SD di Kabupaten Sumbawa menempati urutan ke-2 setelah Kabupaten Bima. Tingginya APK SD tersebut mengindikasikan bahwa masih terdapat siswa usia di bawah 7 tahun dan/atau di atas 12 tahun yang menempuh pendidikan di tingkat SD. Pada jenjang pendidikan SLTP dan SLTA, APK di Kabupaten Sumbawa masih di bawah 100 dan secara berturut-turut menempati urutan ke 7 dan ke 6. Masih rendahnya APK jenjang pendidikan SLTP dan SLTA ini mengindikasikan bahwa masih terdapat penduduk pada usia jenjang pendidikan SLTP (13 – 15 tahun) dan penduduk pada usia jenjang pendidikan SLTA (16 – 18 tahun) yang belum menempuh pendidikan pada jenjang SLTP atau SLTA.

### 2.2.2.5 Angka Pendidikan Yang Ditamatkan

Angka pendidikan yang ditamatkan merupakan perbandingan jumlah penduduk yang menyelesaikan pendidikan pada jenjang tertentu terhadap total jumlah penduduk. Berdasarkan data BPS, penduduk Kabupaten/Kota se-Provinsi NTB paling banyak menyelesaikan pendidikan tertinggi pada jenjang SD sederajat. Sebanyak 32,82 persen penduduk Kabupaten Sumbawa berpendidikan tertinggi SD sederajat, masih lebih tinggi dari rata-rata Provinsi NTB sebesar 28,12 persen. Sedangkan untuk jenjang pendidikan D I sampai dengan S2/S3, Angka Pendidikan Yang Ditamatkan di Kabupaten Sumbawa masih di bawah rata-rata Provinsi NTB.

**Tabel 2.37**  
**Angka Pendidikan Yang Ditamatkan Penduduk Usia 10 Tahun Keatas**  
**Sampai Tahun 2014 Di Kabupaten/Kota Se-Provinsi NTB**

No	Kab/Kota	Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan (%)							Total
		Tdk/Blm Tamat	SD	SLTP	SLTA	DI - DII I	DIV/S 1	S2/S 3	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
1	Lombok Barat	28,02	28,96	18,04	19,66	1,57	3,63	0,11	100
2	Lombok Tengah	27,28	29,93	20,02	18,63	0,71	3,35	0,09	100
3	Lombok Timur	28,78	31,20	18,05	16,87	1,40	3,63	0,07	100
<b>4</b>	<b>Sumbawa</b>	<b>21,02</b>	<b>32,82</b>	<b>19,96</b>	<b>19,75</b>	<b>1,49</b>	<b>4,86</b>	<b>0,09</b>	<b>100</b>
5	Dompus	27,11	22,90	17,79	23,49	1,64	7,04	0,03	100
6	Bima	28,23	24,58	17,16	22,67	1,35	5,94	0,07	100
7	Sumbawa Barat	21,78	32,85	16,59	22,23	1,40	4,92	0,23	100
8	Lombok Utara	29,28	31,33	18,90	16,79	0,86	2,83	-	100
9	Kota Matrm	15,46	19,21	16,12	33,86	3,81	10,03	1,50	100
10	Kota Bima	19,00	17,11	15,01	35,28	2,31	10,84	0,45	100
<b>11</b>	<b>NTB</b>	<b>25,65</b>	<b>28,12</b>	<b>18,18</b>	<b>21,24</b>	<b>1,57</b>	<b>5,00</b>	<b>0,24</b>	<b>100</b>

Sumber: BPS Kabupaten Sumbawa, 2015

#### 2.2.2.6 Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah jumlah siswa dari kelompok usia resmi untuk jenjang pendidikan tertentu dinyatakan sebagai persentase dari populasi yang sesuai. APM menunjukkan tingkat partisipasi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan tertentu, yang merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan.

**Tabel 2.38**  
**APM Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2014**  
**Di Kabupaten/Kota Se-Provinsi Nusa Tenggara Barat**

No	Kab/Kota	APM SD (%)			APM SLTP (%)			APM SLTA (%)		
		L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
1	Lombok Barat	96,73	99,29	97,94	80,97	82,41	81,62	58,14	49,96	53,48
2	Lombok Tengah	98,49	98,19	98,35	81,71	89,25	85,24	56,11	46,16	50,88
3	Lombok Timur	96,59	98,21	97,34	83,14	80,90	81,88	66,29	70,57	68,27
<b>4</b>	<b>Sumbawa</b>	<b>97,93</b>	<b>98,61</b>	<b>98,22</b>	<b>79,79</b>	<b>85,02</b>	<b>82,32</b>	<b>62,65</b>	<b>76,38</b>	<b>70,02</b>
5	Dompus	97,87	96,68	97,33	86,87	94,12	90,00	72,60	81,42	76,57
6	Bima	95,68	98,78	97,19	79,71	72,07	75,94	74,25	83,52	78,51



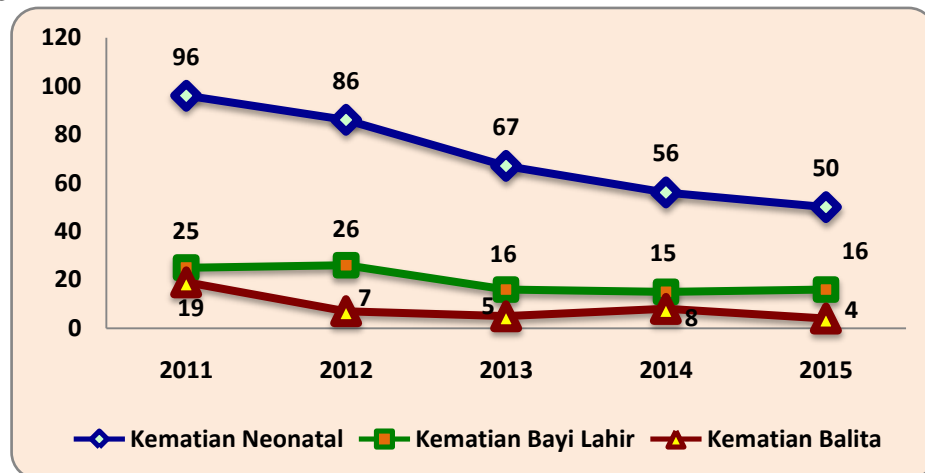
No	Kab/Kota	APM SD (%)			APM SLTP (%)			APM SLTA (%)		
		L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Sumbawa Barat	96,48	98,18	97,27	72,25	85,63	79,36	73,08	61,62	67,79
8	Lombok Utara	96,71	95,95	96,34	77,06	78,96	77,93	54,18	55,11	54,66
9	Kota Mataram	97,28	99,23	98,18	76,79	91,81	84,27	63,27	68,47	66,07
10	Kota Bima	99,71	89,67	95,17	82,61	85,32	84,01	81,72	78,69	80,27
<b>11</b>	<b>NTB</b>	<b>97,22</b>	<b>98,07</b>	<b>97,62</b>	<b>81,16</b>	<b>83,43</b>	<b>82,29</b>	<b>64,28</b>	<b>63,95</b>	<b>64,11</b>

Sumber: BPS Kabupaten Sumbawa, 2015

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa APM seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi NTB masih berada dibawah 100. Ini menunjukkan bahwa masih terdapat penduduk usia sekolah jenjang pendidikan dasar dan menengah yang belum mengenyam pendidikan formal. APM jenjang pendidikan dasar dan menengah di Kabupaten Sumbawa masih lebih tinggi dari rata-rata provinsi NTB. Terdapat 1,78 persen penduduk usia 7 – 12 tahun, 7,68 persen penduduk usia 13 – 15 tahun, dan 29,98 persen penduduk usia 16 – 18 tahun di Kabupaten Sumbawa yang belum mengenyam pendidikan pada masing-masing jenjang pendidikan SD, SLTP dan SLTA sederajat, namun angka ini masih lebih baik dari rata-rata Provinsi NTB.

#### 2.2.2.7 Angka Kelangsungan Hidup Bayi

Angka Kematian Bayi (AKB) menunjukkan jumlah bayi meninggal dalam usia kurang satu tahun tiap 1.000 kelahiran hidup dalam kurun waktu satu tahun. Jumlah kasus kematian bayi di Kabupaten Sumbawa tergambar sebagai berikut.



**Gambar 2.19**  
**Jumlah Kasus Kematian Neonatal, Bayi Dan Balita Tahun 2011-2015 Di Kabupaten Sumbawa**

Adapun penyebab kematian Neonatus, Bayi Lahir dan Balita dalam rentang waktu 5 tahun terakhir dari tahun 2011-2015, sebagai berikut.

**Tabel 2.39**  
**Jumlah Kasus Kematian Bayi Beserta Penyebabnya Tahun 2011-2015**  
**Di Kabupaten Sumbawa**

No	Penyebab	T a h u n				
		2011	2012	2013	2014	2015
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
<b>Kematian Neonatal</b>						
1	BLLR (Berat Bayi Lahir Rendah)	34	38	34	20	20
2	Tetanus Neonatus	1	0	0	1	1
3	Asfiksia	19	21	16	16	15
4	Infeksi	2	4	3	1	1
5	Cacat Bawaan	16	6	6	10	5
6	Lain-lain	24	17	8	8	8
	<b>Total</b>	<b>96</b>	<b>86</b>	<b>67</b>	<b>56</b>	<b>50</b>
<b>Kematian Bayi Lahir</b>						
1	ISPA	20	7	3	4	6
2	Diare/Disentri	2	2	1	5	0
3	Kelainan Saluran Pencernaan	0	0	0	0	0
4	Tetanus	0	0	0	0	0
5	Kelainan Syaraf	0	0	0	0	0
6	Lain-lain	3	17	12	6	10
	<b>Total</b>	<b>25</b>	<b>26</b>	<b>16</b>	<b>15</b>	<b>16</b>
<b>Kematian Balita</b>						
1	ISPA	3	3	0	0	0
2	Diare/Disentri	4	0	0	0	0
3	Kelainan Saluran Pencernaan	0	0	0	0	0
4	Tetanus	0	0	0	0	1
5	Infeksi SSP/Meningitis	2	0	0	0	0
6	Demam Berdarah	2	1	0	0	1
7	Kelainan Syaraf	0	0	0	0	0
8	Gizi Buruk	3	0	0	0	0
9	Campak	2	0	0	0	0
10	Lain-lain	3	3	5	8	2
	<b>Total</b>	<b>19</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>4</b>

*Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa*

Pada kematian neonatal dalam rentang waktu 5 (lima) tahun terjadi penurunan kasus dari 96 kasus pada tahun 2011 menjadi 50 kasus pada tahun 2015 atau mengalami penurunan kasus rata-rata pertahun sebesar 14,91%. Pada kematian bayi lahir dalam rentang waktu 5 (lima) tahun terjadi penurunan kasus dari 25 kasus pada tahun 2011 menjadi 16 kasus pada tahun 2015 atau mengalami penurunan rata-rata pertahun sebesar 8,51%. Kasus kematian Balita juga mengalami penurunan dari 19 kasus pada tahun 2011 menjadi 4 kasus pada tahun 2015 dengan penurunan kasus rata-rata pertahun sebesar 20,43%.

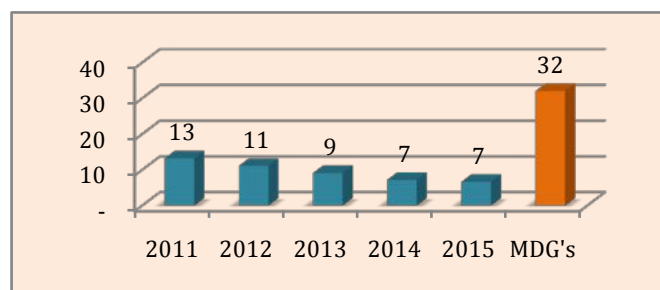
Berdasarkan jumlah kasus kematian bayi tersebut, maka angka kelangsungan hidup bayi terlihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.40**  
**Angka Kelangsungan Hidup Bayi Tahun 2011-2015**  
**Di Kabupaten Sumbawa**

No	Uraian	Tahun					
		2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Jumlah Kelahiran Hidup	9.188	10.122	9.143	9.957	10.015	
2	Jumlah Bayi Meninggal < 1 tahun	121	112	83	71	66	
3	AKB	13	11	9	7	7	
4	AKHB	987	989	991	993	993	
5	Target AKB MDG's						32

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Sumbawa

Gambaran perkembangan angka kematian bayi terhadap target *Millenium Development Goals (MDG's)* tergambar sebagai berikut.



**Gambar 2.20**  
**Angka Kematian Bayi Tahun 2011-2015 Di Kabupaten Sumbawa**

### 2.2.2.8 Angka Kematian Ibu (AKI)

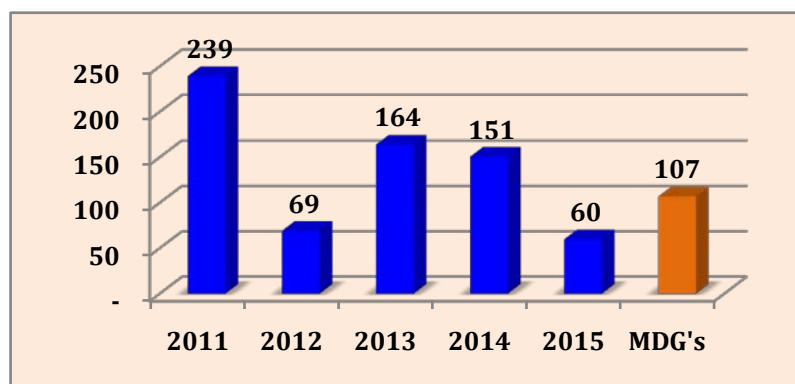
Angka Kematian Ibu merupakan jumlah kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup dalam kurun waktu satu tahun. AKI di Kabupaten Sumbawa beserta penyebabnya tergambar sebagai berikut. Secara rinci angka kematian ibu yang terjadi di Kabupaten Sumbawa selama tahun 2011-2015 disajikan sebagai berikut.

**Tabel 2.41**  
**Angka Kematian Ibu Tahun 2011-2015 Di Kabupaten Sumbawa**

No	Uraian	Tahun					
		2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Jumlah Kelahiran Hidup	9.188	10.122	9.143	9.957	10.015	
2	Jumlah Ibu Meninggal saat Melahirkan hingga Nifas	22	7	15	15	6	
3	AKI	239	69	164	151	60	
5	Target AKI MDG's						107

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Sumbawa

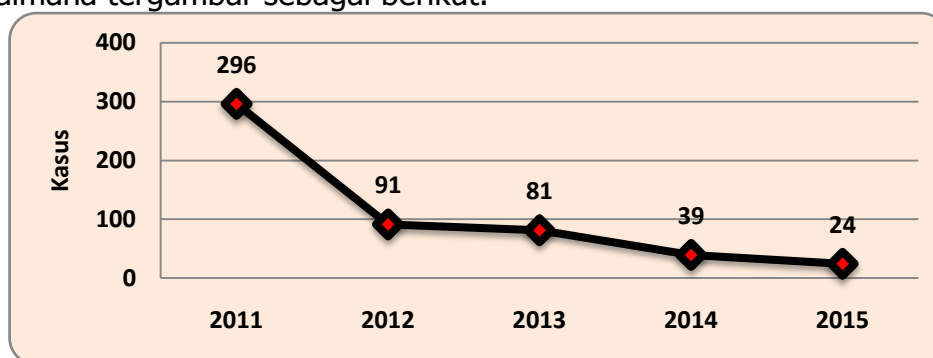
Gambaran perkembangan angka kematian ibu terhadap target *Millenium Development Goals (MDG's)* tergambar sebagai berikut.



**Gambar 2.21**  
**Angka Kematian Ibu Tahun 2011-2015 Di Kabupaten Sumbawa**

### 2.2.2.9 Gizi Buruk

Kasus gizi buruk di Kabupaten Sumbawa menunjukkan tren penurunan, yakni dari 296 kasus pada tahun 2011 menurun menjadi 24 kasus pada tahun 2015 dengan rata-rata penurunan kasus per tahun sebesar 42,64%, sebagaimana tergambar sebagai berikut.



**Gambar 2.22**  
**Kasus Gizi Buruk Tahun 2011-2015 Di Kabupaten Sumbawa**

### 2.2.2.10 Angka Usia Harapan Hidup

Angka usia harapan hidup merupakan angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur. Idealnya angka harapan hidup dihitung berdasarkan angka kematian menurut umur (*Age Specific Death Rate/ASDR*) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahun-tahun sehingga dimungkinkan dibuat tabel kematian. Tetapi karena sistem registrasi penduduk di Indonesia belum berjalan dengan baik maka untuk menghitung angka harapan hidup digunakan angka yang diterbitkan BPS.

Angka Usia Harapan Hidup Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten lainnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat, terlihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.42**  
**Angka Usia Harapan Hidup Tahun 2010-2014 Di Kabupaten/Kota Se-Provinsi Nusa Tenggara Barat**

No	Provinsi/Kabupaten	Angka Usia Harapan Hidup (Tahun)				
		2010	2011	2012	2013	2014
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1	Lombok Barat	63,41	63,73	64,04	64,36	64,50
2	Lombok Tengah	63,42	63,72	64,00	64,30	64,45
3	Lombok Timur	63,03	63,32	63,61	63,90	64,04
<b>4</b>	<b>Sumbawa</b>	<b>64,63</b>	<b>64,96</b>	<b>65,25</b>	<b>65,58</b>	<b>65,72</b>

5	Dompu	64,03	64,33	64,62	64,92	65,06
6	Bima	63,53	63,82	64,10	64,42	64,56
7	Sumbawa Barat	64,80	65,10	65,39	65,69	65,85
8	Lombok Utara	64,13	64,45	64,74	65,04	65,19
9	Kota Mataram	69,16	69,45	69,73	70,03	70,18
10	Kota Bima	67,99	68,29	68,58	68,88	69,03
<b>11</b>	<b>Nusa Tenggara Barat</b>	<b>63,82</b>	<b>64,13</b>	<b>64,43</b>	<b>64,74</b>	<b>64,90</b>

Sumber: BPS Kabupaten Sumbawa, 2015

### 2.2.2.11 Persentase Penduduk Yang Memiliki Lahan

Persentase jumlah penduduk yang memiliki lahan adalah perbandingan jumlah penduduk yang memiliki lahan terhadap jumlah penduduk dikali 100. Persentase jumlah penduduk yang memiliki lahan di Kabupaten Sumbawa, terdata pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.43**  
**Persentase Kepemilikan Lahan Tahun 2014 Di Kabupaten Sumbawa**

No	Kecamatan	Luas Tanah (km <sup>2</sup> )	Jumlah penduduk	Jumlah penduduk yang memiliki tanah	Persentase penduduk memiliki tanah
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1	Lunyuk	513,74	19.610	4.184	21,34
2	Orong Telu	465,97	4.723	114	2,41
3	Alas	123,04	28.902	6.094	21,09
4	Alas Barat	168,88	19.218	3.752	19,52
5	Buer	137,01	13.984	2.338	16,72
6	Utan	155,42	29.684	6.174	20,80
7	Rhee	230,82	7.158	1.487	20,77
8	Batulanteh	391,40	10.343	508	4,91
9	Sumbawa	44,83	59.493	17.411	29,27
10	Labuhan Badas	435,89	31.932	6.360	19,92
11	Unter Iwes	82,38	19.112	4.238	22,17
12	Moyo Hilir	186,79	23.276	4.554	19,57
13	Moyo Utara	90,80	9.506	3.474	36,55
14	Moyo Hulu	311,96	20.515	2.544	12,40
15	Ropang	444,48	5.108	115	2,25
16	Lenangguar	504,32	6.420	728	11,34
17	Lantung	167,45	2.837	401	14,13
18	Lape	204,43	16.925	4.082	24,12
19	Lopok	155,59	18.396	3.759	20,43
20	Plampang	418,69	30.304	12.148	40,09
21	Labangka	243,08	10.619	1.626	15,31
22	Maronge	274,75	10.156	4.819	47,45
23	Empang	558,55	22.316	14.178	63,53
24	Tarano	333,71	16.062	2.493	15,52

Sumber: BPS (Sumbawa Dalam Angka, 2015)

### 2.2.2.12 Rasio Penduduk Yang Bekerja

Rasio penduduk yang bekerja adalah perbandingan penduduk yang bekerja terhadap jumlah penduduk. Penduduk yang bekerja di Kabupaten Sumbawa mengalami peningkatan dari 197.183 jiwa pada tahun 2010 menjadi

209.615 jiwa pada tahun 2014. Bila dibandingkan dengan peningkatan jumlah penduduk, terjadi peningkatan rasio penduduk yang bekerja pada tahun 2012 dan tahun 2013, dan mengalami sedikit penurunan di tahun 2014 sebagaimana tabel berikut ini.

**Tabel 2.44**  
**Rasio Penduduk Yang Bekerja Tahun 2010-2014**  
**Di Kabupaten Sumbawa**

No	Uraian	Tahun				
		2010	2011	2012	2013	2014
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1	Penduduk Yang Bekerja	197.183	186.862	205.688	208.585	209.615
2	Jumlah Penduduk	415.789	422.192	427.119	431.924	436.599
3	Rasio Penduduk Yang Berkerja	47,42	44,26	48,16	48,29	48,01

*Sumber: BPS Kabupaten Sumbawa (Data diolah)*

### 2.2.3 Seni Budaya Dan Olah Raga

Keberadaan lembaga seni budaya di Kabupaten Sumbawa masih rendah, setidaknya tergambar dari rasio lembaga seni budaya hanya berkisar 1 – 2 lembaga per 10.000 penduduk. Sementara keberadaan klub dan gedung olah raga menunjukkan tren kenaikan sebagaimana tabel berikut ini.

**Tabel 2.45**  
**Kelembagaan Seni Budaya Dan Olah Raga Tahun 2010 – 2015**  
**Di Kabupaten Sumbawa**

No	Uraian	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
1	Grup Kesenian/ Sanggar Seni	52	45	70	80	83	83
2	Gedung Kesenian	1	1	1	1	1	1
3	Klub Olahraga	674	674	676	871	895	909
4	Gedung Olahraga	7	7	13	17	37	40
5	Rasio Grup Kesenian/10.000 Penduduk	1,25	1,07	1,65	1,88	1,90	1,88
6	Rasio Gedung Kesenian/10.000 Penduduk	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
7	Rasio Klub Olahraga/10.000 Penduduk	16,21	16,05	15,98	20,44	20,50	20,61
8	Rasio Gedung Olahraga/10.000 Penduduk	0,17	0,17	0,31	0,40	0,86	0,91

*Sumber: Dinas Pemuda Olah Raga Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Sumbawa*

### 2.3 Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Indikator variabel aspek pelayanan umum terdiri dari fokus layanan sesuai dengan urusan pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 9 ayat (1) disebutkan bahwa urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Dari ke tiga urusan pemerintahan tersebut, urusan pemerintahan absolut sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Urusan pemerintahan konkuren merupakan urusan yang dibagi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Sementara Urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Sebagai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, urusan pemerintahan konkuren terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.

### **2.3.1 Fokus Urusan Wajib**

Urusan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan wajib pemerintah kabupaten sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

#### **2.3.1.1 Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pada Pasal 12 ayat (1) menyebutkan bahwa Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebanyak 6 (enam) urusan, meliputi urusan wajib pendidikan; urusan wajib kesehatan; urusan wajib pekerjaan umum dan penataan ruang; urusan wajib perumahan rakyat dan kawasan permukiman; urusan wajib ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; serta urusan wajib sosial.

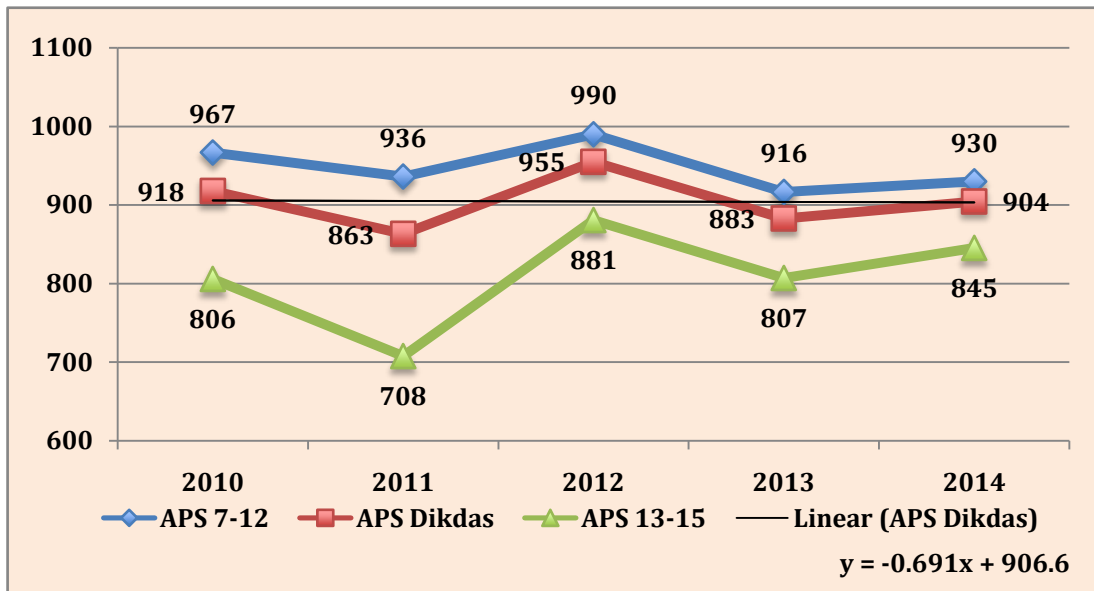
#### **1. Urusan Wajib Pendidikan**

Urusan wajib pendidikan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten adalah pendidikan pra sekolah dan pendidikan dasar. Pendidikan menengah yang semula menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Gambaran kinerja historis layanan urusan wajib pendidikan dasar dan menengah sesuai dengan indikatornya disajikan sebagai berikut.

#### ***Pendidikan Dasar***

##### **a. Angka Partisipasi Sekolah (APS) jenjang pendidikan dasar**

APS pendidikan dasar adalah jumlah murid kelompok usia pendidikan dasar (7-12 tahun dan 13-15 tahun) yang masih menempuh pendidikan dasar per 1.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar. Perkembangan APS jenjang pendidikan dasar di Kabupaten Sumbawa menunjukkan angka yang fluktuatif setiap tahun dengan kecenderungan (tren) yang menurun, meskipun jumlah penduduk usia 7-15 tahun menunjukkan tren meningkat. Secara keseluruhan APS jenjang pendidikan dasar tahun 2014 mengalami penurunan 14 poin dari tahun 2010, yaitu dari 918 siswa usia 7-15 tahun per 1.000 penduduk usia 7-15 tahun di tahun 2010, menurun menjadi 904 siswa usia 7-15 tahun per 1.000 penduduk usia 7-15 pada tahun 2014.



**Gambar 2.23**  
**Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah Jenjang Pendidikan Dasar Selama Tahun 2010-2014 Di Kabupaten Sumbawa**

Perkembangan APS pendidikan dasar selengkapnya terinci pada tabel berikut ini.

**Tabel. 2.46**  
**Angka Partisipasi Sekolah Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2010-2014 Di Kabupaten Sumbawa**

No	Jenjang Pendidikan	Tahun Ajaran				
		2010/ 2011	2011/ 2012	2012/ 2013	2013/ 2014	2014/ 2015
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>1</b>	<b>SD / MI</b>					
1.1	Jumlah murid usia 7-12 tahun	46.380	47.000	49.927	49.807	51.684
1.2	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	47.982	50.216	50.445	54.355	55.589
1.3	APS 7-12	967	936	990	916	930
<b>2</b>	<b>SMP / MTs</b>					
2.1	Jumlah murid usia 13-15 tahun	16.893	16.676	20.956	19.470	20.062
2.2	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	20.969	23.558	23.793	24.131	23.739
2.3	APS 13-15	806	708	881	807	845
<b>3</b>	<b>APS Jenjang Dikdas</b>	<b>918</b>	<b>863</b>	<b>955</b>	<b>883</b>	<b>904</b>

Sumber: Dinas Pendidikan Nasional Kab. Sumbawa (Profil Pendidikan Kab. Sumbawa, beberapa tahun terbitan)

**b. Rasio ketersediaan sekolah jenjang pendidikan dasar**

Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah jenjang tertentu per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan tertentu yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk pada usia jenjang pendidikan tertentu. Semakin besar jumlah



penduduk usia sekolah, semakin besar pula upaya penyediaan sekolah untuk menampung penduduk tersebut.

Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah jenjang pendidikan dasar tahun 2010-2014 di Kabupaten Sumbawa, disajikan pada tabel berikut ini.

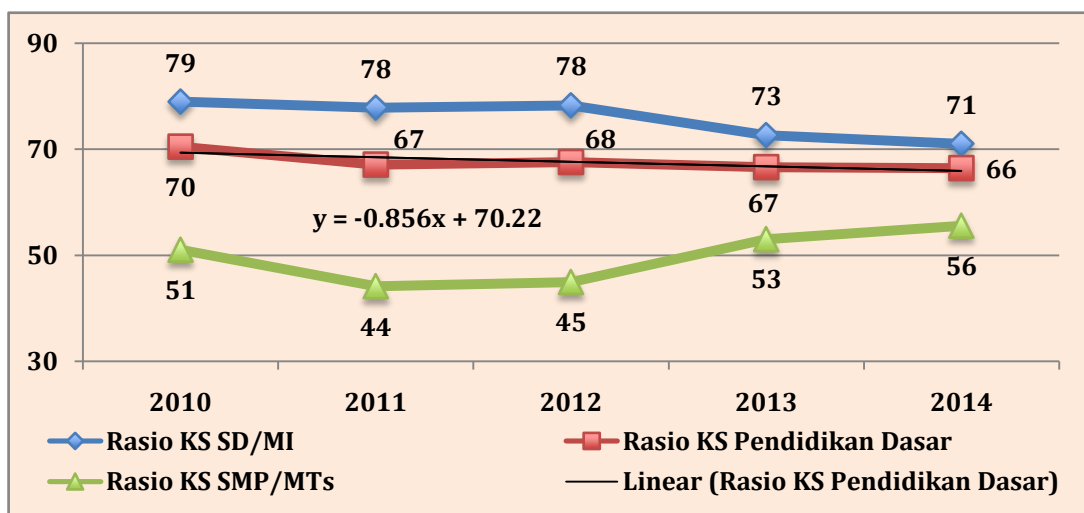
**Tabel. 2.47**  
**Rasio Ketersediaan Sekolah Jenjang Pendidikan Dasar**  
**Tahun 2010-2014 Di Kabupaten Sumbawa**

No	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2010	2011	2012	2013	2014
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
<b>1</b>	<b>SD/MI</b>					
1.1	Jumlah gedung sekolah	379	391	395	395	395
1.2	Jumlah penduduk kelompok usia 7 - 12 tahun	47.982	50.216	50.445	54.355	55.589
1.3	Rasio	79	78	78	73	71
<b>2</b>	<b>SMP/MTs</b>					
2.1	Jumlah gedung sekolah	107	104	107	128	132
2.2	Jumlah penduduk kelompok usia 13 - 15 tahun	20.969	23.558	23.793	24.131	23.739
2.3	Rasio	51	44	45	53	56
<b>3</b>	<b>Rasio Sekolah Jenj. Dikdas</b>	<b>70</b>	<b>67</b>	<b>68</b>	<b>67</b>	<b>66</b>

*Sumber: Dinas Pendidikan Nasional Kab. Sumbawa (Profil Pendidikan Kab. Sumbawa, beberapa tahun terbitan)*

Rasio ketersediaan sekolah jenjang pendidikan dasar di Kabupaten Sumbawa menunjukkan penurunan dalam lima tahun terakhir. Secara keseluruhan, rasio ketersediaan sekolah pendidikan dasar tahun 2014 sebesar 66 sekolah per 10.000 penduduk usia sekolah 7-15 tahun, menurun 4 poin dari tahun 2010 sebesar 70 sekolah per 10.000 penduduk usia sekolah 7-15 tahun. Jenjang SMP/MTs memberikan kontribusi terbesar terhadap rendahnya rasio ketersediaan sekolah jenjang pendidikan dasar meskipun dalam lima tahun terakhir mengalami peningkatan, namun sampai dengan tahun 2014 rasio ketersediaan sekolah jenjang SMP/MTs hanya sebesar 56 sekolah per 10.000 penduduk usia sekolah 13-15 tahun, dimana masih lebih rendah dari rasio ketersediaan sekolah jenjang SD/MI sebesar 71 sekolah per 10.000 penduduk usia sekolah 7-12 tahun.

Perkembangan rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah jenjang pendidikan dasar tergambar sebagai berikut.



**Gambar 2.24**  
**Perkembangan Rasio Ketersediaan Sekolah Jenjang Pendidikan Dasar Selama Tahun 2010-2014 Di Kabupaten Sumbawa**

Rasio ketersediaan sekolah jenjang pendidikan dasar per kecamatan di Kabupaten Sumbawa disajikan pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.48**  
**Rasio Ketersediaan Sekolah Jenjang Pendidikan Dasar Per Kecamatan Tahun 2014 Di Kabupaten Sumbawa**

No	Kecamatan	SD / MI			SMP / MTs		
		Jumlah Gedung Sekolah	Jml Pddk Usia 7-12 Thn	Rasio (Per 10.000 Penduduk)	Jumlah Gedung Sekolah	Jml Pddk Usia 13-15 Thn	Rasio (Per 10.000 Penduduk)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Lunyuk	21	2.744	77	9	1.122	80
2	Orong Telu	11	854	129	3	327	92
3	Alas	20	3.822	52	7	1.769	40
4	Alas barat	16	2.686	60	4	1.072	37
5	Buer	11	1.993	55	5	622	80
6	Utan	23	3.976	58	7	1.589	44
7	Rhee	7	1.336	52	2	486	41
8	Batulanteh	18	1.465	123	7	532	132
9	Sumbawa	26	5.837	45	6	3.244	18
10	Lab. Badas	28	3.608	78	8	1.746	46
11	Unter Iwes	18	2.460	73	8	1.088	74
12	Moyohilir	26	2.498	104	8	1.129	71
13	Moyo Utara	12	1.134	106	3	497	60
14	Moyohulu	23	2.191	105	8	1.024	78
15	Ropang	7	591	118	3	156	192
16	Lenangguar	11	809	136	3	275	109
17	Lantung	3	388	77	2	110	182
18	Lape	15	2.326	64	5	863	58
19	Lopok	18	2.388	75	4	990	40
20	Plampang	27	3.831	70	11	1.584	69
21	Labangka	7	1.642	43	4	619	65
22	Maronge	6	1.324	45	3	601	50

No	Kecamatan	SD / MI			SMP / MTs		
		Jumlah Gedung Sekolah	Jml Pddk Usia 7-12 Thn	Rasio (Per 10.000 Penduduk)	Jumlah Gedung Sekolah	Jml Pddk Usia 13-15 Thn	Rasio (Per 10.000 Penduduk)
1	2	3	4	5	6	7	8
23	Empang	19	3.080	62	6	1.374	44
24	Tarano	21	2.606	81	6	920	65
<b>Jumlah</b>		<b>394</b>	<b>55.589</b>	<b>71</b>	<b>132</b>	<b>23.739</b>	<b>56</b>

Sumber: Dinas Pendidikan Nasional Kab. Sumbawa (Profil Pendidikan Kab. Sumbawa, 2014)

### c. Rasio guru terhadap murid jenjang pendidikan dasar

Rasio guru/murid disebut juga sebagai rasio guru per sepuluh ribu siswa (R-G/S), yang menunjukkan jumlah guru yang tersedia untuk setiap sepuluh ribu siswa pada jenjang pendidikan tertentu. Angka tersebut dipergunakan untuk mengetahui rata-rata ketersediaan guru yang dapat melayani siswa di suatu sekolah. Untuk Kabupaten Sumbawa, disajikan pada tabel berikut.

**Tabel. 2.49**  
**Rasio Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar**  
**Di Kabupaten Sumbawa**

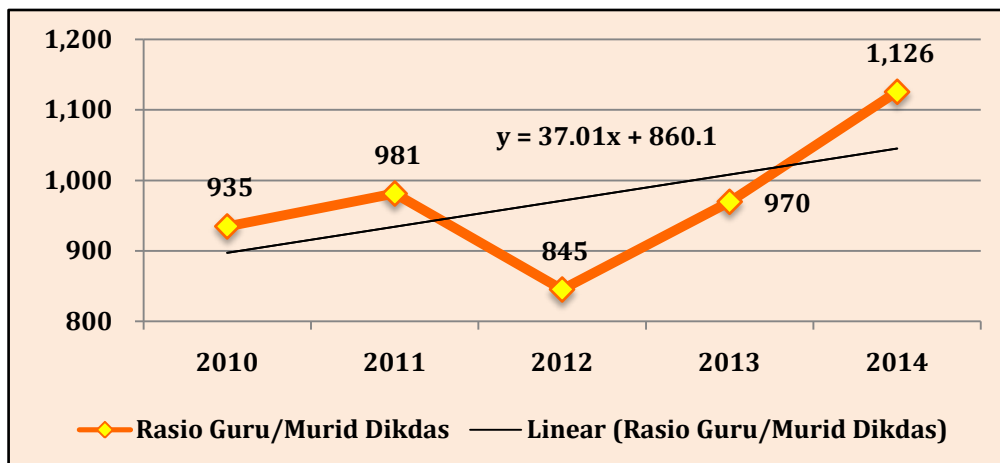
No	Uraian	Tahun Ajaran				
		2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014	2014/2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>SD / MI</b>					
1.1	Jumlah Guru	4.999	5.347	4.548	5.356	6.161
1.2	Jumlah murid	53.143	53.750	54.765	53.883	55.114
1.3	Rasio	941	995	830	994	1.118
<b>2</b>	<b>SMP / MTs</b>					
2.1	Jumlah guru	2.016	2.109	2.307	2.151	2.668
2.2	Jumlah murid	21.911	22.240	26.352	23.545	23.326
2.3	Rasio	920	948	875	914	1.144
<b>3</b>	<b>Rasio Guru/Murid Jenj. Dikdas</b>	<b>935</b>	<b>981</b>	<b>845</b>	<b>970</b>	<b>1.126</b>

Sumber: Dinas Pendidikan Nasional Kab. Sumbawa (Profil Pendidikan Kab. Sumbawa, beberapa tahun terbitan)

Rasio guru terhadap murid pada jenjang pendidikan dasar, baik tingkat SD/MI maupun SMP/MTs, menunjukkan tren peningkatan. Pada tingkat SD/MI, rasio guru/murid tahun 2010 sebesar 941 guru per 10.000 siswa SD/MI, mengalami peningkatan sebesar 177 poin di tahun 2014 menjadi 1.118 guru per 10.000 siswa SD/MI. Begitu pula pada tingkat SMP/MTs, rasio guru/murid pada tahun 2010 sebesar 920 guru per 10.000 siswa SMP/MTs, meningkat sebesar 224 poin di tahun 2014 menjadi 1.144 guru per 10.000 siswa SMP/MTs.

Secara keseluruhan untuk jenjang pendidikan dasar (tingkat SD/MI dan SMP/MTs), rasio guru terhadap murid juga menunjukkan tren peningkatan. Pada tahun 2010, rasio guru/murid jenjang pendidikan dasar sebesar 935 guru per 10.000 siswa jenjang pendidikan dasar, meningkat signifikan sebesar 191

poin di tahun 2014 menjadi 1.126 guru per 10.000 siswa jenjang pendidikan dasar, sebagaimana tergambar sebagai berikut.



**Gambar 2.25**

**Perkembangan Rasio Guru terhadap Murid Pada Jenjang Pendidikan Dasar Selama Tahun 2010-2014 Di Kabupaten Sumbawa**

Rasio Guru per 10.000 murid jenjang pendidikan dasar berdasarkan kecamatan disajikan pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.50**

**Rasio Guru Per 10.000 Murid Berdasarkan Kecamatan Tahun 2014 Di Kabupaten Sumbawa**

No	Kecamatan	SD / MI			SMP / MTs		
		Jumlah Guru	Jumlah Murid	Rasio (Per 10.000 Murid)	Jumlah Guru	Jumlah Murid	Rasio (Per 10.000 Murid)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Lunyuk	261	2.717	961	182	1.359	1.339
2	Orong Telu	101	782	1.292	47	273	1.722
3	Alas	297	3.856	770	115	1.811	635
4	Alas barat	256	2.290	1.118	139	919	1.513
5	Buer	162	1.672	969	120	760	1.579
6	Utah	303	3.823	793	171	1.947	878
7	Rhee	74	1.033	716	45	348	1.293
8	Batulanteh	185	1.493	1.239	78	566	1.378
9	Sumbawa	725	6.677	1.086	344	2.484	1.385
10	Labuhan Badas	530	3.763	1.408	181	1.538	1.177
11	Unter Iwes	348	2.599	1.339	182	1.254	1.451
12	Moyohilir	389	2.628	1.480	145	1.171	1.238
13	Moyo Utara	171	1.066	1.604	61	557	1.095
14	Moyohulu	327	2.724	1.200	119	948	1.255
15	Ropang	83	641	1.295	29	177	1.638
16	Lenangguar	98	1.011	969	43	259	1.660
17	Lantung	51	342	1.491	15	110	1.364
18	Lape	259	2.297	1.128	120	889	1.350
19	Lopok	225	2.363	952	83	925	897
20	Plampang	428	3.682	1.162	98	1.239	791
21	Labangka	127	1.348	942	92	715	1.287

No	Kecamatan	SD / MI			SMP / MTs		
		Jumlah Guru	Jumlah Murid	Rasio (Per 10.000 Murid)	Jumlah Guru	Jumlah Murid	Rasio (Per 10.000 Murid)
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
22	Maronge	87	1.188	732	38	492	772
23	Empang	399	3.102	1.286	162	1.657	978
24	Tarano	275	2.017	1.363	59	837	705
<b>Jumlah</b>		<b>6.161</b>	<b>55.114</b>	<b>1.118</b>	<b>2.668</b>	<b>23.326</b>	<b>1.144</b>

Sumber: Dinas Pendidikan Nasional Kab. Sumbawa (Profil Pendidikan Kab. Sumbawa, 2014)

#### d. Kualifikasi guru jenjang pendidikan dasar

Gambaran kualifikasi guru jenjang pendidikan dasar berdasarkan pendidikan formalnya terlihat pada tabel berikut ini. Bila dibandingkan dengan jumlah guru pada jenjang pendidikan dasar, terlihat bahwa masih terdapat cukup banyak guru yang belum memenuhi kualifikasi pendidikan DIV atau S1.

**Tabel 2.51**  
**Kualifikasi Guru Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2010-2014**  
**Di Kabupaten Sumbawa**

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah Guru Berdasarkan Kualifikasi				
		2010	2011	2012	2013	2014
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1	SD/MI					
1.1	Pendidikan DIV / S1	1.140	1.517	2.880	1.640	2.445
1.2	Pendidikan S2 / S3	7	7	10	10	10
2	SMP/MTs					
2.1	Pendidikan DIV / S1	1.645	1.537	2.168	1.827	2.344
2.2	Pendidikan S2 / S3	5	4	12	12	4

Sumber: Dinas Pendidikan Nasional Kab. Sumbawa (Profil Pendidikan Kab. Sumbawa, beberapa tahun terbitan)

#### e. Angka Putus Sekolah (Drop Out) jenjang pendidikan dasar

Angka drop out menunjukkan jumlah siswa yang putus sekolah sebelum lulus pada jenjang pendidikan tertentu untuk setiap 1.000 siswa di suatu daerah. Semakin kecil nilainya semakin baik, berarti putus sekolah semakin kecil. Angka putus sekolah pada jenjang pendidikan dasar di Kabupaten Sumbawa tahun 2010-2014 terlihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.52**  
**Persentase (%) Siswa Putus Sekolah Jenjang Pendidikan Dasar**  
**Tahun 2010-2014 Di Kabupaten Sumbawa**

No	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2010	2011	2012	2013	2014
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1	SD/MI					
1.1	Siswa Putus Sekolah	63	48	54	91	0
1.2	Angka Putus Sekolah	1,19	0,89	0,99	1,69	0,00
2	SMP/MTs					
2.1	Siswa Putus Sekolah	123	184	126	23	0
2.2	Angka Putus Sekolah	5,61	8,27	4,78	0,98	0,00

Sumber: Dinas Pendidikan Nasional Kab. Sumbawa (Profil Pendidikan Kab. Sumbawa, beberapa tahun terbitan)

**f. Tingkat kerusakan ruang kelas jenjang pendidikan dasar**

Tingkat kerusakan ruang kelas jenjang pendidikan SD/MI masih cukup besar (sekitar 25%), sedangkan pada jenjang SMP/MTs relatif lebih sedikit (dibawah 10%), sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.53**

**Kondisi Ruang Kelas Jenjang Pendidikan Dasar Sampai Dengan Tahun Ajaran 2014/2015 Di Kabupaten Sumbawa**

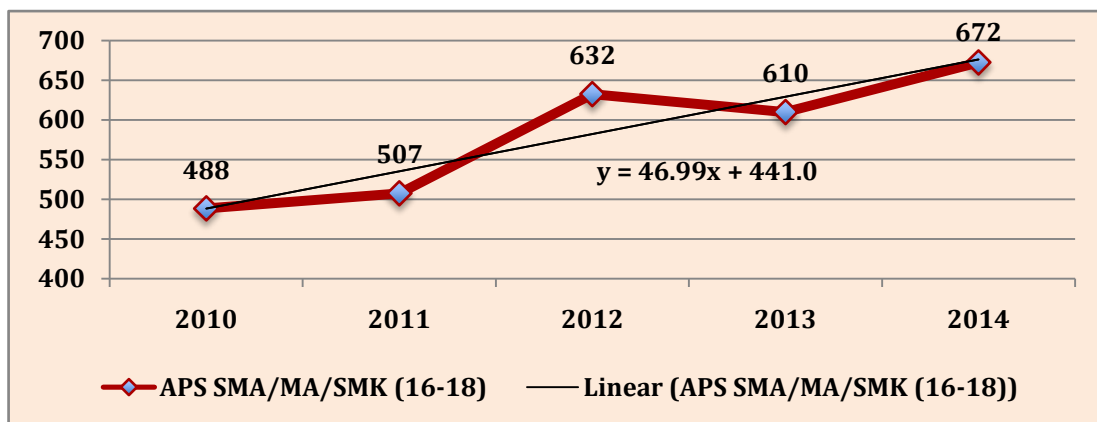
No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah Ruang Kelas	Kondisi Ruang Kelas		
			Baik	R. Ringan	R. Berat
1	2	3	4	5	6
1.	SD/MI	2.320	1.757	270	293
1.1	Persentase (%)		75,73	11,64	12,63
2.	SMP/MTs	715	656	54	5
2.1	Persentase (%)		91,75	7,55	0,70

Sumber: Dinas Pendidikan Nasional Kab. Sumbawa (Profil Pendidikan Kab. Sumbawa, 2014)

**Pendidikan Menengah**

**a. Angka Partisipasi Sekolah (APS) jenjang pendidikan menengah**

APS jenjang pendidikan menengah di Kabupaten Sumbawa menunjukkan peningkatan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014. Meskipun sempat mengalami penurunan di tahun 2013, namun secara keseluruhan APS jenjang pendidikan menengah menunjukkan tren yang meningkat, sebagaimana gambar berikut ini.



**Gambar 2.26**

**Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah Jenjang Pendidikan Menengah Selama Tahun 2010-2014 Di Kabupaten Sumbawa**

Pada tahun 2014, APS jenjang pendidikan menengah sebesar 672 siswa usia 16-18 tahun yang bersekolah per 1.000 penduduk usia 16-18 tahun, meningkat signifikan 184 poin dari tahun 2010 sebesar 488 siswa usia 16-18 tahun yang bersekolah per 1.000 penduduk usia 16-18 tahun.

Perkembangan angka partisipasi sekolah pada jenjang pendidikan menengah di Kabupaten Sumbawa selama kurun waktu lima tahun terakhir, selengkapnya terlihat pada tabel berikut ini.

**Tabel. 2.54**  
**Angka Partisipasi Sekolah Jenjang Pendidikan Menengah**  
**Tahun 2010-2014 Di Kabupaten Sumbawa**

No	Jenjang Pendidikan	Tahun Ajaran				
		2010/ 2011	2011/ 2012	2012/ 2013	2013/ 2014	2014/ 2015
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1	SMA / MA / SMK					
1.1	Jumlah murid usia 16-18 tahun	10.187	10.445	13.082	13.268	14.367
1.2	Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun	20.857	20.582	20.685	21.759	21.371
<b>1.3</b>	<b>APS SMA/MA/SMK (16-18)</b>	<b>488</b>	<b>507</b>	<b>632</b>	<b>610</b>	<b>672</b>

*Sumber: Dinas Pendidikan Nasional Kab. Sumbawa (Profil Pendidikan Kab. Sumbawa, beberapa tahun terbitan)*

**b. Rasio ketersediaan sekolah jenjang pendidikan menengah**

Ketersediaan sekolah dalam menampung penduduk usia 16-18 tahun belum sebanding dengan pertumbuhan penduduk usia sekolah jenjang pendidikan menengah. Rasio ketersediaan sekolah jenjang pendidikan menengah menunjukkan stagnasi sejak tahun 2011 bahkan cenderung menurun, sementara jumlah penduduk usia 16-18 tahun mengalami kecenderungan meningkat dengan laju rata-rata 0,65% per tahun, sebagaimana tabel berikut ini.

**Tabel. 2.55**  
**Rasio Ketersediaan Sekolah Jenjang Pendidikan Menengah**  
**Tahun 2011-2014 Di Kabupaten Sumbawa**

No	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2010	2011	2012	2013	2014
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1	SMA / MA / SMK					
1.1	Jumlah gedung sekolah	47	55	56	56	56
1.2	Jumlah penduduk usia 16-18 tahun	20.857	20.582	20.685	21.759	21.371
<b>1.3</b>	<b>Rasio Sekolah Jenj. Dikmen</b>	<b>23</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>26</b>	<b>26</b>

*Sumber: Dinas Pendidikan Nasional Kab. Sumbawa (Profil Pendidikan Kab. Sumbawa, beberapa tahun terbitan)*

Rasio ketersediaan sekolah jenjang pendidikan menengah per kecamatan di Kabupaten Sumbawa disajikan pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.56**  
**Rasio Ketersediaan Sekolah Jenjang Pendidikan Menengah**  
**Per Kecamatan Tahun 2014 Di Kabupaten Sumbawa**

No	Kecamatan	Jumlah Gedung Sekolah	Jml Pddk Usia 16-18 Thn	Rasio (Per 10.000 Penduduk)
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1	Lunyuk	3	888	34
2	Orong Telu	1	271	37
3	Alas	4	1.579	25
4	Alas barat	4	806	50

No	Kecamatan	Jumlah Gedung Sekolah	Jml Pddk Usia 16-18 Thn	Rasio (Per 10.000 Penduduk)
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
5	Buer	1	825	12
6	Utan	4	1.471	27
7	Rhee	-	318	-
8	Batulanteh	3	405	74
9	Sumbawa	11	3.250	34
10	Labuhan Badas	3	1.683	18
11	Unter Iwes	4	1.079	37
12	Moyohilir	2	994	20
13	Moyo Utara	1	480	21
14	Moyohulu	2	863	23
15	Ropang	-	143	-
16	Lenangguar	1	274	36
17	Lantung	-	62	-
18	Lape	1	741	13
19	Lopok	1	826	12
20	Plampang	3	1.572	19
21	Labangka	2	531	38
22	Maronge	1	433	23
23	Empang	3	1.036	29
24	Tarano	1	841	12
<b>Jumlah</b>		<b>56</b>	<b>21.371</b>	<b>26</b>

Sumber: Dinas Pendidikan Nasional Kab. Sumbawa (Profil Pendidikan Kab. Sumbawa, 2014)

### c. Rasio guru terhadap murid jenjang pendidikan menengah

Dalam rentang waktu tahun 2010-2014, terjadi peningkatan jumlah guru dari 1.446 guru pada tahun 2010 meningkat menjadi 1.679 guru pada tahun 2014. Disisi lain, jumlah murid jenjang pendidikan menengah juga mengalami peningkatan dari 15.114 siswa pada tahun 2010 meningkat menjadi 18.452 siswa pada tahun 2014. Namun demikian, rasio jumlah guru terhadap jumlah murid pada jenjang pendidikan menengah menunjukkan kecenderungan menurun. Hal ini disebabkan karena rata-rata laju pertumbuhan jumlah guru (4,28%) lebih kecil dibandingkan dengan rata-rata laju pertumbuhan jumlah siswa sebesar 5,21%, sebagaimana terlihat dalam pada tabel berikut ini.

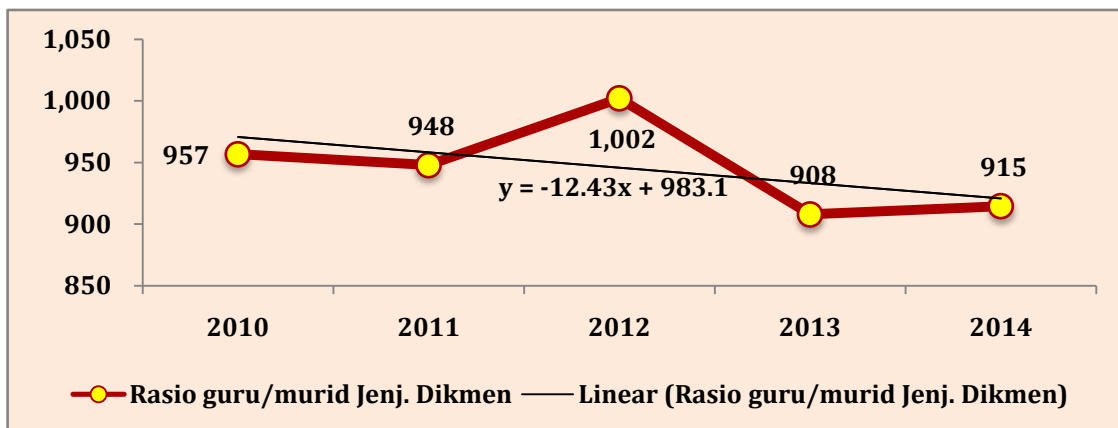
**Tabel 2.57**  
**Rasio Guru Terhadap Murid Jenjang Pendidikan Menengah Di Kabupaten Sumbawa**

No	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2010/ 2011	2011/ 2012	2012/ 2013	2013/ 2014	2014/ 2015
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1	SMA / MA / SMK					
1.1	Jumlah guru	1.446	1.445	1.718	1.572	1.679
1.2	Jumlah murid	15.114	15.244	17.145	17.314	18.359
<b>1.3</b>	<b>Rasio guru/murid Jenj. Dikmen</b>	<b>957</b>	<b>948</b>	<b>1.002</b>	<b>908</b>	<b>915</b>

Sumber: Dinas Pendidikan Nasional Kab. Sumbawa (Profil Pendidikan Kab. Sumbawa, beberapa tahun terbitan)



Gambaran penurunan rasio guru terhadap murid pada jenjang pendidikan menengah di Kabupaten Sumbawa terlihat pada gambar berikut ini.



**Gambar 2.27**  
**Rasio Guru terhadap Murid Jenjang Pendidikan Menengah Tahun 2010-2014 Di Kabupaten Sumbawa**

Untuk melihat tingkat ketersebaran guru di Kabupaten Sumbawa, dapat dilihat dari rasio guru di semua kecamatan.

Rasio Guru per 10.000 murid jenjang pendidikan menengah berdasarkan kecamatan disajikan pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.58**  
**Rasio Ketersediaan Guru Terhadap Murid Jenjang Pendidikan Menengah Tahun 2014 Di Kabupaten Sumbawa**

No	Kecamatan	Jumlah Guru	Jumlah Murid	Rasio (Per 10.000 Murid)
1	2	3	4	5
1	Lunyuk	96	664	1.446
2	Orong Telu	19	133	1.429
3	Alas	147	1.723	853
4	Alas barat	92	685	1.343
5	Buer	27	207	1.304
6	Utan	89	833	1.068
7	Rhee	-	-	-
8	Batulanteh	44	202	2.178
9	Sumbawa	381	4.570	834
10	Labuhan Badas	69	798	865
11	Unter Iwes	130	1.949	667
12	Moyohilir	49	472	1.038
13	Moyo Utara	52	369	1.409
14	Moyohulu	64	735	871
15	Ropang	-	-	-
16	Lenangguar	22	161	1.366
17	Lantung	-	-	-
18	Lape	45	755	596
19	Lopok	56	433	1.293
20	Plampang	110	1.464	751
21	Labangka	28	245	1.143
22	Maronge	36	220	1.636
23	Empang	94	1.259	747

No	Kecamatan	Jumlah Guru	Jumlah Murid	Rasio (Per 10.000 Murid)
1	2	3	4	5
24	Tarano	29	482	602
	<b>Jumlah</b>	<b>1.679</b>	<b>18.359</b>	<b>915</b>

Sumber: Dinas Pendidikan Nasional Kab. Sumbawa (Profil Pendidikan Kab. Sumbawa, 2014)

#### d. Kualifikasi guru jenjang pendidikan menengah

Sebagaimana halnya pada jenjang pendidikan dasar, kualifikasi guru pada jenjang pendidikan menengah juga masih ditemukan guru yang belum memenuhi kualifikasi pendidikan DIV atau S1. Namun secara persentase sudah dibawah 10%. Gambaran kualifikasi guru pada jenjang pendidikan menengah berdasarkan pendidikan formalnya selama tahun 2010-2014 di Kabupaten Sumbawa terlihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.59**  
**Kualifikasi Guru Jenjang Pendidikan Menengah Tahun 2010-2014 Di Kabupaten Sumbawa**

No	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
1	SMA/MA/SMK					
1.1	Pendidikan DIV / S1	1.312	1.143	1.669	1.436	1.549
1.2	Pendidikan S2 / S3	14	10	13	13	13

Sumber: Dinas Pendidikan Nasional Kab. Sumbawa (Profil Pendidikan Kab. Sumbawa, beberapa tahun terbitan)

#### e. Angka Putus Sekolah (Drop Out) jenjang pendidikan menengah

Angka putus sekolah jenjang pendidikan menengah di Kabupaten Sumbawa cukup tinggi, dimana dalam lima tahun terakhir tercatat rata-rata 12 siswa putus sekolah per 1.000 murid jenjang pendidikan menengah. Angka putus sekolah pada jenjang pendidikan menengah di Kabupaten Sumbawa tahun 2010-2014 terlihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.60**  
**Persentase Siswa Putus Sekolah Jenjang Pendidikan Menengah Tahun 2010-2014 Di Kabupaten Sumbawa**

No	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
1	SMA/MA/SMK					
1.1	Siswa Putus Sekolah	235	307	119	182	121
1.2	Angka Putus Sekolah	15,55	20,14	6,94	10,51	6,59

Sumber: Dinas Pendidikan Nasional Kab. Sumbawa (Profil Pendidikan Kab. Sumbawa, beberapa tahun terbitan)

#### f. Tingkat kerusakan ruang kelas jenjang pendidikan menengah

Meskipun didominasi oleh kondisi rusak ringan, secara keseluruhan tingkat kerusakan ruang kelas jenjang pendidikan menengah masih cukup tinggi (diatas 10%), sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.61**  
**Kondisi Ruang Kelas Jenjang Pendidikan Menengah Sampai Dengan Tahun 2014 Di Kabupaten Sumbawa**

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah Ruang Kelas	Ruang Kelas menurut Kondisi		
			Baik	R. Ringan	R. Berat
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1.	SMA/MA/SMK	398	354	43	1
1.1	Persentase (%)		88,88	10,87	0,25

*Sumber: Dinas Pendidikan Nasional Kab. Sumbawa (Profil Pendidikan Kab. Sumbawa, 2014)*

## 2. Urusan Wajib Kesehatan

Salah satu dimensi yang menentukan kualitas sumber daya manusia adalah kesehatan. Kesehatan yang merupakan hak dasar setiap manusia diharapkan dapat terpenuhi secara merata dan terus meningkat dari waktu ke waktu. Untuk mencapai hal tersebut, tentunya pembangunan kesehatan tidak hanya menitikberatkan pada masalah kuratif saja, namun juga pada aspek preventif dan promotif yang lebih menekankan pada pembangunan bidang kesehatan baik manusia, lingkungan, epidemiologi dan aspek-aspek lainnya.

Penyediaan fasilitas dan tenaga kesehatan merupakan bagian dari program pembangunan kesehatan. Ketersediaan fasilitas dan tenaga kesehatan berhubungan dengan kemudahan penduduk dalam mengakses layanan kesehatan.

### a. Rasio pos pelayanan terpadu (posyandu) per satuan balita

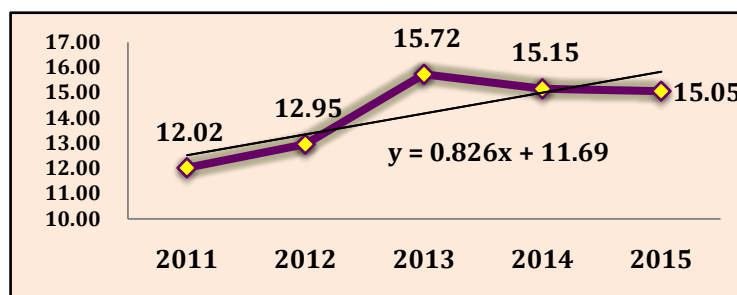
Strategi dalam upaya pemenuhan pelayanan kesehatan dasar yang dapat dilakukan pada Posyandu adalah pemeliharaan dan perawatan kesejahteraan ibu dan anak-anak sejak usia dini. Perkembangan rasio posyandu per satuan balita di Kabupaten Sumbawa disajikan sebagai berikut.

**Tabel 2.62**  
**Rasio Posyandu Tahun 2011-2015 Di Kabupaten Sumbawa**

No	Uraian	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1	Jumlah Posyandu	624	647	647	700	700
2	Jumlah Balita	51.923	49.956	41.149	46.207	46.502
3	Rasio Posyandu	12,02	12,95	15,72	15,15	15,05

*Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Sumbawa*

Rasio posyandu per satuan balita pada tahun 2013 sebesar 15,72 poin (*setiap 1.000 balita dilayani pada sekitar 15-16 posyandu*), dan mengalami penurunan efektifitas pada tahun 2014 dan tahun 2015 yang ditandai dengan menurunnya nilai rasio posyandu per satuan balita menjadi 15,15 poin di tahun 2014 dan 15,05 di tahun 2015. Namun demikian, dalam kurun waktu 2011-2015, terjadi peningkatan rasio posyandu per satuan balita dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,76% per tahun.



**Gambar 2.28**  
**Perkembangan Rasio Posyandu Per Satuan Balita**  
**Tahun 2011-2015 Di Kabupaten Sumbawa**

**b. Rasio puskesmas, Klinik dan puskesmas pembantu (pustu)**

Kemandirian masyarakat dalam menjaga kesehatan perlu diimbangi ketersediaan dan keterjangkauan terhadap sarana layanan kesehatan. Berdasarkan data rasio puskesmas, klinik dan puskesmas pembantu selama tahun 2011-2015 cenderung stabil, sedangkan dari segi cakupan (puskesmas dan pustu) mengalami peningkatan dari tahun 2011. Cakupan Puskesmas pada tahun 2011 sebesar 100% meningkat di tahun 2012-2015 menjadi 104,17%, dan cakupan pustu dari 16,56% di tahun 2011 meningkat menjadi 25,48% di tahun 2015. Rasio Puskesmas, Klinik dan Puskesmas Pembantu per satuan penduduk serta cakupannya selama tahun 2011-2015 di Kabupaten Sumbawa terlihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.63**  
**Jumlah Puskesmas, Poliklinik Dan Puskesmas Pembantu (Pustu)**  
**Tahun 2011-2015 Di Kabupaten Sumbawa**

No	Uraian	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1	Jumlah Puskesmas	24	25	25	25	25
2	Jumlah klinik	26	42	42	40	40
3	Jumlah Pustu	93	93	93	94	93
4	Jumlah Penduduk	422.192	427.119	431.924	436.599	441.102
5	Jumlah Kecamatan	24	24	24	24	24
6	Jumlah Desa	157	157	157	157	157
Cakupan Layanan:						
7	Cakupan Puskesmas	100,00	104,17	104,17	104,17	104,17
8	Cakupan Pustu	16,56	26,75	26,75	25,48	25,48
Rasio Per Satuan Penduduk:						
9	Rasio Puskesmas	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
10	Rasio klinik	0,06	0,10	0,10	0,09	0,09
11	Rasio Pustu	0,22	0,22	0,22	0,22	0,21

Sumber: BPS Kab. Sumbawa (Sumbawa dalam Angka, 2015) dan Dinas Kesehatan Kab. Sumbawa

**c. Rasio rumah sakit per satuan penduduk**

Perkembangan jumlah dan rasio rumah sakit per jumlah penduduk di Kabupaten Sumbawa terlihat pada tabel berikut ini.

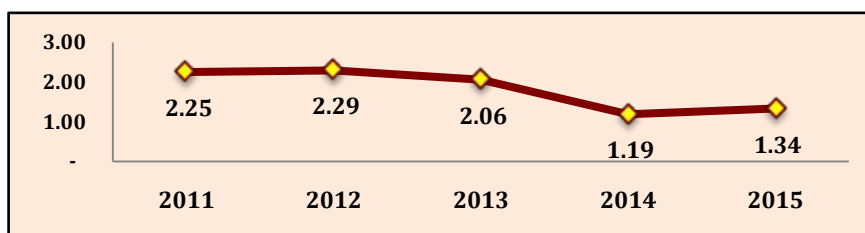
**Tabel 2.64**  
**Jumlah Dan Rasio Rumah Sakit Per Jumlah Penduduk**  
**Tahun 2011-2015 Di Kabupaten Sumbawa**

No	Uraian	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1.	Jumlah RSU (Pemerintah)	-	1	1	1	1
2.	Jumlah Rumah Sakit Jiwa/ Paru dan penyakit khusus lainnya milik pemerintah	-	-	-	-	-
3.	Jumlah RS AD/AU/AL/POLRI	-	-	-	-	-
4.	Jumlah RS Daerah	1	1	1	1	1
5.	Jumlah Seluruh Rumah Sakit	1	2	2	2	2
6.	Jumlah Penduduk	422.192	427.119	431.924	436.599	441.102
7.	Rasio	0,024	0,047	0,046	0,046	0,045

*Sumber: BPS Kab. Sumbawa (Sumbawa dalam Angka, 2015)*

**d. Rasio dokter per satuan penduduk**

Ketersediaan tenaga kesehatan yang berkualitas juga menjadi penunjang dalam peningkatan mutu layanan kesehatan masyarakat. Idealnya satu orang dokter melayani 2.500 penduduk. Rasio dokter per jumlah penduduk menunjukkan tingkat pelayanan yang dapat diberikan oleh dokter dibandingkan jumlah penduduk yang ada. Pada Tahun 2015 rasio dokter per jumlah penduduk di Kabupaten Sumbawa sebesar 1,34 per 10.000 penduduk mengalami penurunan 0,91 poin dari tahun 2011 sebesar 2,25 dokter per 10.000 penduduk.



**Gambar 2.29**  
**Perkembangan Rasio Dokter Per Satuan Penduduk**  
**Tahun 2011-2015 Di Kabupaten Sumbawa**

Gambar diatas memperlihatkan penurunan yang terjadi terhadap ketersediaan dokter dalam menangani masalah kesehatan penduduk Kabupaten Sumbawa. Dari 59 dokter yang tersedia tahun 2015 di Kabupaten Sumbawa, menunjukkan bahwa setiap dokter menangani rata-rata 7.500 penduduk, sementara idealnya satu dokter melayani 2.500 penduduk. Rasio ketersediaan dokter per 10.000 penduduk di Kabupaten Sumbawa selama tahun 2011-2015 terlihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.65**  
**Rasio Dokter Tahun 2011-2015 Di Kabupaten Sumbawa**

No	Uraian	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1	Jumlah Dokter	95	98	89	52	59
2	Jumlah Penduduk	422.192	427.119	431.924	436.599	441.102
3	Rasio	2,25	2,29	2,06	1,19	1,34

*Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Sumbawa*

**e. Rasio tenaga medis per satuan penduduk**

Untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, dokter perlu ditunjang tenaga medis dalam penanganan masalah kesehatan. Berbeda dengan rasio ketersediaan dokter, selama tahun 2011-2015 perkembangan rasio ketersediaan tenaga medis di Kabupaten Sumbawa mengalami peningkatan. Rasio tenaga medis tahun 2015 mengalami peningkatan 1,02 poin dari tahun 2011.

Perkembangan jumlah tenaga medis selengkapnya sebagai berikut.

**Tabel 2.66**  
**Rasio Tenaga Medis Tahun 2011-2015 Di Kabupaten Sumbawa**

No	Uraian	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1	Jumlah Tenaga Medis	634	737	812	677	1.110
2	Jumlah Penduduk	422.192	427.119	431.924	436.599	441.102
3	Rasio	1,50	1,73	1,88	1,55	2,52

*Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Sumbawa*

**3. Urusan Wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

**a. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap**

Kondisi jalan dalam kondisi mantap di Kabupaten Sumbawa mengalami peningkatan selama kurun waktu 5 tahun terakhir (2011-2015). Tahun 2015 persentase jalan kondisi mantap hampir mencapai 61%, sedangkan untuk jalan kondisi tidak mantap sebesar 11% dan jalan dalam kondisi kritis sebesar 28%. Selengkapnya perkembangan status dan panjang jalan Kabupaten dapat dilihat pada tabel berikut ini.

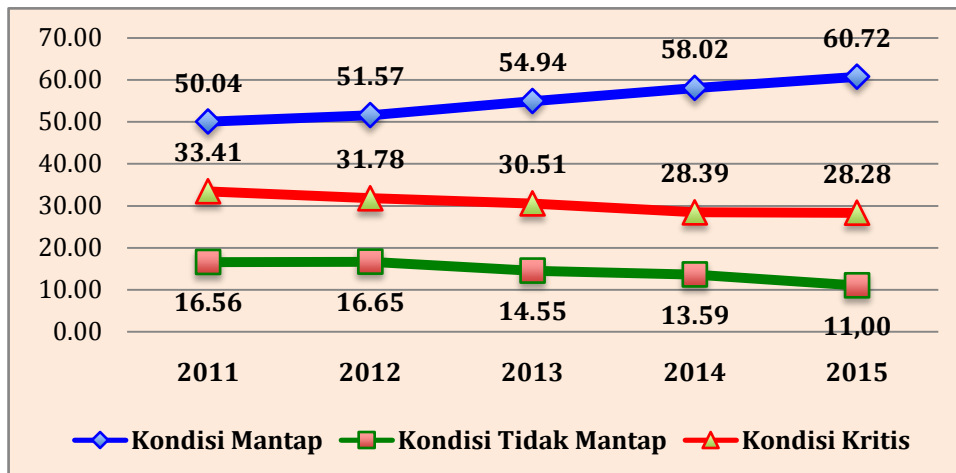
**Tabel 2.67**  
**Panjang Jalan Berdasarkan Kondisi Tahun 2011-2015 Di Kabupaten Sumbawa**

No	Kondisi Jalan	Panjang Jalan (km)				
		2011	2012	2013	2014	2015
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1	Kondisi Mantap	476,12	490,72	522,75	552,03	577,75
2	Kondisi Tidak Mantap	157,53	158,43	138,43	129,33	104,72
3	Kondisi Kritis	317,86	302,36	290,33	270,15	269,04
4	Panjang Jalan Kabupaten	951,51	951,51	951,51	951,51	951,51

*Sumber: Dinas PU Kabupaten Sumbawa*

Proporsi panjang jalan berdasarkan kemantapan menggambarkan kualitas jalan. Jika dilihat dari proporsi panjang jalan kabupaten berdasarkan kemantapannya, terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Berikut gambaran perkembangan proporsi panjang jalan Kabupaten Sumbawa

berdasarkan kondisi kemantapan jalan.



**Gambar 2.30**  
**Perkembangan Proporsi Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap, Tidak Mantap Dan Kritis Selama Tahun 2011-2015 Di Kabupaten Sumbawa**

**b. Rasio jaringan irigasi**

Rasio Jaringan Irigasi adalah perbandingan panjang jaringan irigasi terhadap luas lahan budidaya. Panjang jaringan irigasi meliputi jaringan primer, sekunder, tersier. Adapun jumlah daerah irigasi teknis sampai dengan tahun 2015 sebanyak 25 daerah irigasi dengan luas baku mencapai 17.261 Ha, dan luas irigasi 8.362 Ha, dengan panjang saluran induk 74.122 meter dan saluran sekunder 192.011 meter.

**Tabel 2.68**  
**Rasio Jaringan Irigasi Tahun 2011-2015 Di Kabupaten Sumbawa**

No	Jaringan Irigasi	Panjang Jaringan				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1.	Jaringan primer	31.640	31.640	31.640	74.122	74.122
2.	Jaringan Sekunder	180.237	180.237	180.237	192.011	192.011
3.	Jaringan Tersier	NA	NA	NA	NA	NA
4.	Luas lahan budidaya	11.228	11.228	11.228	17.261	17.261
5.	Rasio JI	18,9	18,9	18,9	15,4	15,4

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kab. Sumbawa, NA = data belum tersedia

**c. Rasio tempat ibadah per satuan penduduk**

Penduduk Kabupaten Sumbawa mayoritas beragama Islam (95,36%), diikuti Hindu (3,25%), Kristen (1,17%), Budha (0,1%), Konghutu (0,03%) dan sisanya menganut aliran kepercayaan. Rasio tempat ibadah berdasarkan pemeluk masing-masing agama terlihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.69**  
**Rasio Tempat Ibadah Di Kabupaten Sumbawa**

No	Rumah Ibadah	Tahun 2012			Tahun 2015		
		Jumlah (Unit)	Jumlah Pemeluk	Rasio	Jumlah (Unit)	Jumlah Pemeluk	Rasio
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Masjid	493	407.612	827	497	420.644	846
2	Gereja	5	5.149	1.030	5	5.158	1.032

No	Rumah Ibadah	Tahun 2012			Tahun 2015		
		Jumlah (Unit)	Jumlah Pemeluk	Rasio	Jumlah (Unit)	Jumlah Pemeluk	Rasio
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
3	Pura	37	13.120	355	37	14.353	388
4	Wihara	1	486	486	1	435	435
5	Klenteng	1	13	13	1	13	13

Sumber: BPS (Daerah Dalam Angka, 2015) dan Kantor Kemenag Kab. Sumbawa

Sementara rasio tempat ibadah per satuan penduduk di Kabupaten Sumbawa, terlihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.70**

**Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk Di Kabupaten Sumbawa**

No	Uraian	Tahun	
		2012	2015
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Jumlah tempat ibadah	537	541
2	Jumlah penduduk	427.119	441.102
3	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	1,26	1,23

Sumber: BPS (Daerah Dalam Angka, 2013-2015)

**d. Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB**

Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Ruang terbuka hijau kota merupakan bagian dari ruang-ruang terbuka (*open spaces*) suatu wilayah perkotaan yang diisi oleh tumbuhan, tanaman dan vegetasi guna mendukung manfaat langsung dan/atau tidak langsung yang dihasilkannya, seperti keamanan, kenyamanan, kesejahteraan dan keindahan kawasan/wilayah. Ruang terbuka hijau publik di Kabupaten Sumbawa pada tahun 2015 seluruhnya seluas 99.686,90 m<sup>2</sup> yang tersebar di 36 lokasi. Secara rinci disajikan sebagai berikut.

**Tabel 2.71**

**Ruang Terbuka Hijau Publik Tahun 2015 Di Kabupaten Sumbawa**

No	Nama Ruang Terbuka Hijau	Luas (m <sup>2</sup> )				
		2011	2012	2013	2014	2015
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1	Hutan Kota Olat Rarang	11.431,00	11.431,00	11.431,00	11.431,00	11.431,00
2	Hutan Kota Wisma Daerah	10.150,00	10.150,00	10.150,00	10.150,00	10.150,00
3	Taman Kota Depan Asrama Lama	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00
4	Taman Kota Depan PLN I	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00
5	Taman Kota Depan PLN II	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
6	Taman Kota Jam Gadang	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00
7	Taman Kota	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00



No	Nama Ruang Terbuka Hijau	Luas (m <sup>2</sup> )				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
	Labuhan Sumbawa I					
8	Taman Kota Labuhan Sumbawa II	586,25	586,25	586,25	586,25	586,25
9	Taman Kota Labuhan Sumbawa III	1.551,00	1.551,00	1.551,00	1.551,00	1.551,00
10	Taman Kota Lawang Desa	665,00	665,00	665,00	665,00	665,00
11	Taman Kota Patung Karaci	108,00	108,00	108,00	108,00	108,00
12	Taman Kota Patung Kerbau	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
13	Taman Kota Patung Kuda	17,70	17,70	17,70	17,70	17,70
14	Taman Kota Patung Menjangan	94,50	94,50	94,50	94,50	94,50
15	Taman Samping Kantor Bupati	322,44	322,44	322,44	322,44	322,44
16	Taman Kota Simpang Sernu	90,57	90,57	90,57	90,57	90,57
17	Taman Kota Simpang Dam Aji	238,74	238,74	238,74	238,74	238,74
18	Taman Kota Tugu Adipura	112,74	112,74	112,74	112,74	112,74
19	Taman Kota Tugu Lilin	719,60	719,60	719,60	719,60	719,60
20	Taman Kota Ujung Jembatan Brang Biji	123,50	123,50	123,50	123,50	123,50
21	Taman Kota Bugis	2.228,00	2.228,00	2.228,00	2.228,00	2.228,00
22	Taman Kota Lapangan Pahlawan	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
23	Taman Kota Bantaran Sungai Kampung Mande I	1.034,00	1.034,00	1.034,00	1.034,00	1.034,00
24	Taman Kota Median Jalan Depan Kantor Bupati	525,00	525,00	525,00	525,00	525,00
25	Taman Kota Bantaran Sungai Kampung Mande II	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
26	Taman Kota Simpang Tano	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00
27	Taman Simpang Seroja	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14
28	Taman Kota	461,20	461,20	461,20	461,20	461,20

No	Nama Ruang Terbuka Hijau	Luas (m <sup>2</sup> )				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
8	Simpang Boak					
29	Taman Kota Simpang Moyo	206,87	206,87	206,87	206,87	206,87
30	Hutan Kota Simpang Moyo	1.572,86	1.572,86	1.572,86	1.572,86	1.572,86
31	Taman Pantai Goa	506,16	506,16	506,16	506,16	506,16
32	Taman Jembatan Cendrawasih	362,20	362,20	362,20	362,20	362,20
33	Taman Kota Lapangan Kerato	-	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
34	Taman Unter Ketimis	-	-	6.348,00	6.348,00	6.348,00
35	Taman Kota Jalan Mangga	-	-	5.491,43	5.491,43	5.491,43
36	RTH Genang Genis	-	-	-	5.000,00	5.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>41.847,47</b>	<b>82.847,47</b>	<b>94.686,90</b>	<b>99.686,90</b>	<b>99.686,90</b>

Sumber: BPM-LH Kabupaten Sumbawa

Rasio ruang terbuka hijau (khusus RTH Publik) terhadap total luas wilayah sampai dengan tahun 2015 hanya sebesar 15,00%. Rendahnya angka rasio ini disebabkan karena ruang terbuka hijau privat tidak terdata luasnya.

**Tabel 2.72**

**Rasio Ruang Terbuka Hijau Tahun 2011-2015 Di Kabupaten Sumbawa**

No	Uraian	Luas (Ha)				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1	Ruang terbuka hijau (m <sup>2</sup> )	41.847,47	82.847,47	94.686,90	99.689,90	99.686,90
2	Luas wilayah (Ha)	6.643,98	6.643,98	6.643,98	6.643,98	6.643,98
3	Rasio (%)	6,30	12,47	14,25	15,00	15,00

Sumber: BPM-LH Kabupaten Sumbawa

**e. Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan**

Izin mendirikan bangunan gedung adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah kabupaten/kota kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan di Kabupaten Sumbawa, terlihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.73**  
**Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan**  
**Tahun 2011-2015 Di Kabupaten Sumbawa**

<b>No</b>	<b>Uraian</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1	Jumlah Bangunan Ber-IMB	989	1.176	1.551	1.830	2.290
2	Jumlah Bangunan	102.845	104.119	105.219	106.406	114.889
3	Rasio Bangunan Ber-IMB	0,96%	1,13%	1,47%	1,72%	1,99%

*Sumber: KPPT Kab. Sumbawa*

**f. Persentase penduduk berakses air minum**

Jumlah penduduk yang berakses air minum di Kabupaten Sumbawa terlihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.74**  
**Proporsi Jumlah Penduduk Yang Mendapatkan Akses Air Minum**  
**Tahun 2011-2015 Di Kabupaten Sumbawa**

<b>No</b>	<b>Uraian</b>	<b>Tahun</b>				
		<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1.	Jumlah penduduk yang berakses air minum	269.912	289.196	312.964	323.416	334.964
2.	Jumlah penduduk	422.192	427.119	431.924	436.599	441.102
3.	Persentase penduduk berakses air minum	63,93	67,71	72,46	74,08	75,94

*Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kab. Sumbawa*

**4. Urusan Wajib Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman**

**a. Rasio rumah layak huni**

Rasio rumah layak huni adalah perbandingan jumlah rumah layak huni dengan jumlah penduduk, menggambarkan kondisi rumah penduduk yang memenuhi kriteria layak huni. Rasio rumah layak huni di Kabupaten Sumbawa dari tahun 2012-2015 menunjukkan rasio yang tetap sebesar 0,20 Hal ini terjadi karena penanganan rumah layak huni belum sebanding dengan peningkatan jumlah penduduk.

**Tabel 2.75**  
**Rasio Rumah Layak Huni Tahun 2011-2015 Di Kabupaten Sumbawa**

<b>No</b>	<b>Uraian</b>	<b>Tahun</b>				
		<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1.	Rumah layak huni	82.276	83.496	85.486	88.137	89.121
2.	Jumlah penduduk	422.192	427.119	431.924	436.599	441.102
3.	Rasio rumah layak huni	0,19	0,20	0,20	0,20	0,20

*Sumber: BPM-PD Kabupaten Sumbawa*

**b. Persentase rumah tangga berakses air bersih**

Dari 123.414 unit rumah di Kabupaten Sumbawa, sebanyak 94.531 yang telah menggunakan akses air bersih (76,60%). Gambaran umumnya disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 2.76**  
**Persentase Rumah Tangga Dengan Akses Air Bersih Tahun 2015**

No	Kecamatan	Jumlah Rumah Tangga	Rumah Tangga Dengan Akses Air Bersih	
			Jumlah	%
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1	Tarano	4.385	2.979	67,94
2	Empang	6.322	5.189	82,08
3	Plampang	7.646	4.846	63,38
4	Labangka	3.262	2.145	65,76
5	Maronge	2.849	1.944	68,23
6	Lape	4.655	3.457	74,26
7	Lopok	5.324	3.867	72,63
8	Moyo Hilir	6.556	4.802	73,25
9	Moyo Utara	2.699	2.210	81,88
10	Moyo Hulu	6.403	4.197	65,55
11	Ropang	1.548	1.108	71,58
12	Lenangguar	1.904	1.376	72,27
13	Lantung	970	788	81,24
14	Lunyuk	5.411	3.463	64,00
15	Orong Telu	1.234	901	73,01
16	Batu Lanteh	3.181	2.349	73,84
17	Unter Iwes	5.464	4.493	82,23
18	Sumbawa	16.904	16.588	98,13
19	Lab. Badas	8.498	6.352	74,75
20	Rhee	2.003	1.669	83,33
21	Utan	8.578	5.859	68,30
22	Buer	4.049	2.746	67,82
23	Alas	8.074	6.746	83,55
24	Alas Barat	5.495	4.457	81,11
<b>Jumlah Kabupaten</b>		<b>123.414</b>	<b>94.531</b>	<b>76,60</b>

*Sumber: Dinas PU Kab. Sumbawa, 2015*

**c. Persentase rumah tinggal bersanitasi**

Rumah tinggal berakses sanitasi sekurang-kurangnya mempunyai akses untuk memperoleh layanan sanitasi seperti fasilitas air bersih, pembuangan tinja, pembuangan air limbah (air bekas), dan tempat pembuangan sampah.

**Tabel 2.77**  
**Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Tahun 2015**  
**Di Kabupaten Sumbawa**

No	Kecamatan	Jumlah Rumah Tangga	Rumah Tangga Dengan Akses Sanitasi Layak	
			Jumlah	%
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1	Tarano	4.385	2.563	58,45
2	Empang	6.322	4.025	63,67
3	Plampang	7.646	3.878	50,72
4	Labangka	3.262	1.945	59,63
5	Maronge	2.849	1.519	53,32

No	Kecamatan	Jumlah Rumah Tangga	Rumah Tangga Dengan Akses Sanitasi Layak	
			Jumlah	%
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
6	Lape	4.655	2.930	62,94
7	Lopok	5.324	4.054	76,15
8	Moyo Hilir	6.556	4.564	69,62
9	Moyo Utara	2.699	2.221	82,29
10	Moyo Hulu	6.403	4.599	71,83
11	Ropang	1.548	906	58,53
12	Lenangguar	1.904	1.295	68,01
13	Lantung	970	507	52,27
14	Lunyuk	5.411	3.176	58,70
15	Orong Telu	1.234	551	44,65
16	Batu Lanteh	3.181	1.739	54,67
17	Unter Iwes	5.464	3.994	73,10
18	Sumbawa	16.904	12.566	74,34
19	Lab. Badas	8.498	4.092	48,15
20	Rhee	2.003	1.206	60,21
21	Utan	8.578	5.555	64,76
22	Buer	4.049	2.666	65,84
23	Alas	8.074	5.598	69,33
24	Alas Barat	5.495	2.949	53,67
<b>Jumlah Kabupaten</b>		<b>123.414</b>	<b>79.098</b>	<b>64,09</b>

Sumber: Dinas PU Kab. Sumbawa, 2015

#### d. Rumah tangga pengguna listrik

Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik merupakan proporsi jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik sebagai daya penerangan terhadap jumlah rumah tangga. Dalam hal ini Kabupaten Sumbawa terus mengalami peningkatan setiap tahun. Pada tahun 2010 persentase rumah tangga menggunakan listrik sebesar 63,36% meningkat menjadi 97,14% pada tahun 2014. Perkembangan persentase rumah tangga yang menggunakan listrik tahun 2010-2014 selengkapanya sebagai berikut.

**Tabel 2.78**  
**Rumah Tangga Pengguna Listrik Tahun 2010-2014**  
**Di Kabupaten Sumbawa**

No	Uraian	Tahun				
		2010	2011	2012	2013	2014
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1	Jumlah rumah tangga pengguna listrik	69.022	82.651	91.337	98.318	110.533
2	Jumlah seluruh rumah tangga	108.938	110.030	111.314	112.567	113.784
3	Rumah tangga pengguna listrik (%)	63,36	75,12	82,05	87,34	97,14

Sumber: BPS (Sumbawa Dalam Angka beberapa tahun terbitan)

## 5. Urusan Wajib Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

### a. Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk

Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dapat dilihat melalui rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk, dimana tahun 2015 rasionya mengalami penurunan menjadi sebesar 3,49, artinya terdapat sekitar 3-4 anggota Pol PP dalam setiap 10.000 penduduk. Perkembangan selengkapnya terlihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.79**  
**Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Tahun 2011-2015**  
**Di Kabupaten Sumbawa**

No	Uraian	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1.	Jumlah polisi pamong praja	173	156	159	154	154
2.	Jumlah penduduk	422.192	427.119	431.924	436.599	441.102
3.	Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk	4,10	3,65	3,68	3,53	3,49

Sumber: Kantor Satpol PP Kab. Sumbawa

### b. Rasio jumlah linmas per 10.000 penduduk

Jumlah linmas bertambah sebanyak 444 linmas dari 1.950 linmas pada tahun 2011 menjadi 2.394 linmas pada tahun 2015. Perkembangan rasio linmas selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.80**  
**Rasio Jumlah Linmas Tahun 2011-2015 Di Kabupaten Sumbawa**

No	Uraian	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1.	Jumlah Linmas	1.950	2.012	2.432	2.394	2.394
2.	Jumlah penduduk	422.192	427.119	431.924	436.599	441.102
3.	Rasio jumlah Linmas per 10.000 penduduk	46,19	47,11	56,31	54,83	54,27

Sumber: Kantor Satpol PP Kab. Sumbawa

## 6. Urusan Wajib Sosial

Masalah perlindungan dan kesejahteraan sosial merupakan permasalahan yang serius dan perlu disikapi karena menyangkut pembangunan sumberdaya manusia untuk meningkatkan taraf kesejahteraan sosial masyarakat.

### a. Sarana sosial

Ketersediaan prasarana sosial sebagai potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) merupakan dukungan dalam mengatasi permasalahan PMKS agar bisa memenuhi kebutuhan secara layak. Jumlah prasarana sosial di Kabupaten Sumbawa terlihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.81**  
**Jumlah Prasarana Sosial Tahun 2011-2015 Di Kabupaten Sumbawa**

No	Sarana Sosial	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
1	Panti Jompo	1	1	1	1	1
2	Panti Asuhan	19	19	19	19	19
3	Rumah Singgah	1	1	1	1	1

*Sumber: Dinas Sosial Kab. Sumbawa*

**b. PMKS yang memperoleh bantuan sosial**

Perkembangan jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial di Kabupaten Sumbawa dapat dilihat melalui tabel berikut.

**Tabel 2.82**  
**PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial Tahun 2011-2015**  
**Di Kabupaten Sumbawa**

No	Uraian	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
1	Jumlah PMKS yang diberikan bantuan	16.285	17.944	15.624	10.741	14.929
2	Jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan	76.463	71.169	79.039	29.582	29.737
3	PMKS yang memperoleh bantuan sosial	21,3%	25,2%	19,8%	36,3%	50,2%

*Sumber: Dinas Sosial Kab. Sumbawa dan Sistem Informasi Pembangunan Daerah*

**c. Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial**

Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) hingga tahun 2015 menunjukkan peningkatan sebesar 15,2% dibandingkan tahun sebelumnya, dimana tahun 2014 penanganan PMKS terlaksana sebesar 36,2% atau sebanyak 10.717 jiwa PMKS dari 29.582 PMKS yang ada. Penanganan terhadap PMKS selengkapnyanya dapat dilihat melalui tabel berikut.

**Tabel 2.83**  
**Penanganan PMKS Tahun 2011-2015 Di Kabupaten Sumbawa**

No	Uraian	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
1	Jumlah PMKS yang tertangani	16.285	19.064	15.751	10.717	15.289
2	Jumlah PMKS yang ada	76.463	71.169	79.039	29.582	29.737
3	Penanganan PMKS	21,3%	26,8%	19,9%	36,2%	51,4%

*Sumber: Dinas Sosial Kab. Sumbawa*

**2.3.1.2 Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**  
**1. Urusan Wajib Tenaga Kerja**

Penduduk yang dikategorikan sebagai penduduk usia kerja adalah penduduk yang berumur 15 tahun keatas. Penduduk usia kerja terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja merupakan bagian penduduk yang sedang bekerja dan siap masuk pasar kerja, atau dapat dikatakan sebagai pekerja dan merupakan potensi penduduk yang akan masuk pasar kerja. Sedangkan, bukan angkatan kerja adalah bagian dari tenaga kerja

yang tidak bekerja ataupun mencari kerja. Angkatan kerja terdiri dari penduduk yang bekerja dan pengangguran. Penduduk usia kerja di Kabupaten Sumbawa mengalami peningkatan dari 315.151 jiwa di tahun 2010 menjadi 308.043 jiwa pada tahun 2014. Secara umum kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Sumbawa disajikan pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.84**  
**Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Menurut Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja Tahun 2010-2014 Di Kabupaten Sumbawa**

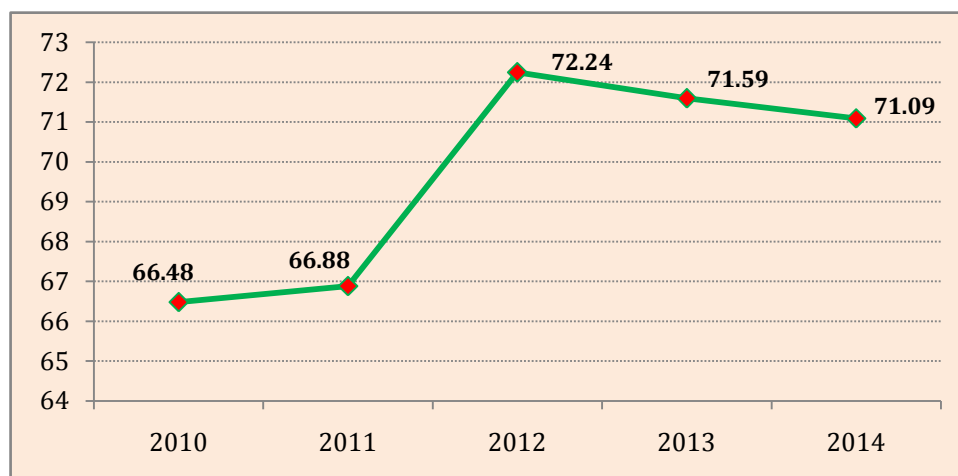
Indikator	Tahun				
	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
Penduduk Usia Kerja	315.151	294.998	299.423	303.670	308.043
Bekerja	197.183	186.862	205.688	208.585	209.615
Pengangguran	12.327	10.419	10.627	8.835	9.361
Total Angkatan Kerja	209.510	197.281	216.315	217.400	218.976
Bukan Angkatan Kerja	105.641	97.717	83.108	86.270	89.067
TPAK (%)	66,48	66,88	72,24	71,59	71,09
TPT (%)	5,88	5,28	4,91	4,06	4,27

Sumber: BPS (Survei Angkatan Kerja Nasional 2014)

#### a. Angkatan kerja

Jumlah angkatan kerja di Kabupaten Sumbawa meningkat dari 209.510 jiwa di tahun 2010 menjadi 218.976 jiwa pada tahun 2014. Untuk melihat besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi disuatu wilayah dapat dilihat dari Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Peningkatan total angkatan kerja di Kabupaten Sumbawa diikuti pula dengan meningkatnya TPAK. Pada tahun 2014 TPAK di Kabupaten Sumbawa mencapai 71,09% dari 66,48% pada tahun 2010. TPAK ini berada diatas rata-rata TPAK Provinsi NTB sebesar 66,63%. Meskipun TPAK di Kabupaten Sumbawa mengalami peningkatan dari tahun 2011, namun terjadi tren penurunan sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2014.

Gambaran perkembangan TPAK di Kabupaten Sumbawa terlihat pada gambar berikut ini.



**Gambar 2.30**  
**Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tahun 2010-2014**

#### b. Produktivitas kerja

Secara praktis, produktivitas pekerja dapat diukur menggunakan data



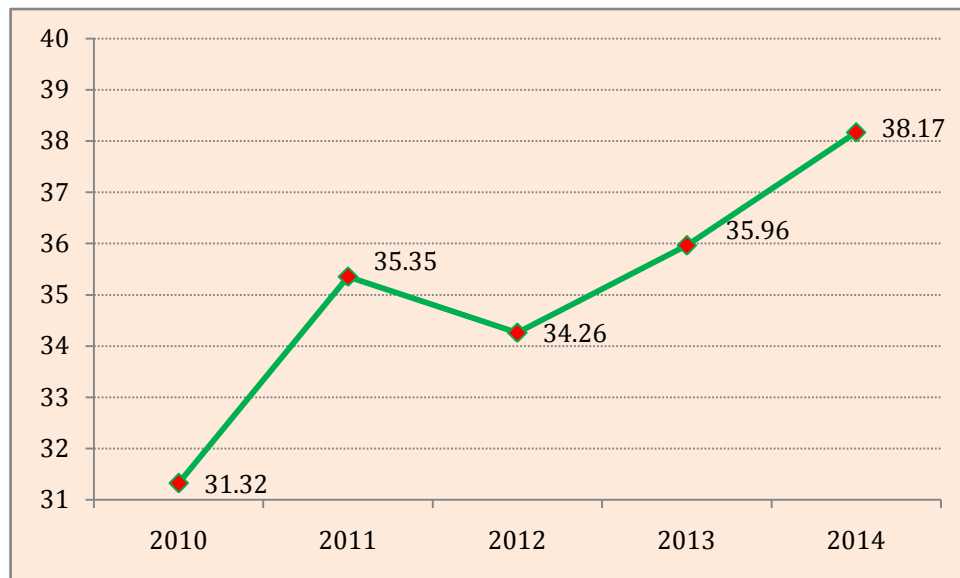
nilai tambah suatu daerah, yaitu PDRB dengan jumlah pekerja. Rasio dari kedua data tersebut menunjukkan produktivitas tenaga kerja. Produktivitas tenaga kerja di Kabupaten Sumbawa ditunjukkan oleh meningkatnya angka rasio produktivitas kerja dari 31,32 pada tahun 2010 menjadi 38,17 pada tahun 2014, sebagaimana tabel berikut ini.

**Tabel 2.85**  
**Produktivitas Kerja Tahun 2010-2014 Di Kabupaten Sumbawa**

Indikator	Tahun				
	2010	2011	2012	2013	2014
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
PDRB	6.175.916	6.606.355	7.046.787	7.501.178	8.001.096
Jumlah pekerja	197.183	186.862	205.688	208.585	209.615
Produktivitas kerja	31,32	35,35	34,26	35,96	38,17

*Sumber: BPS (PDRB Kab. Sumbawa Menurut Lapangan Usaha, 2015 dan Survei Angkatan Kerja Nasional 2014)*

Perkembangan produktivitas kerja di kabupaten sumbawa selama tahun 2010-2014 tergambar sebagai berikut.

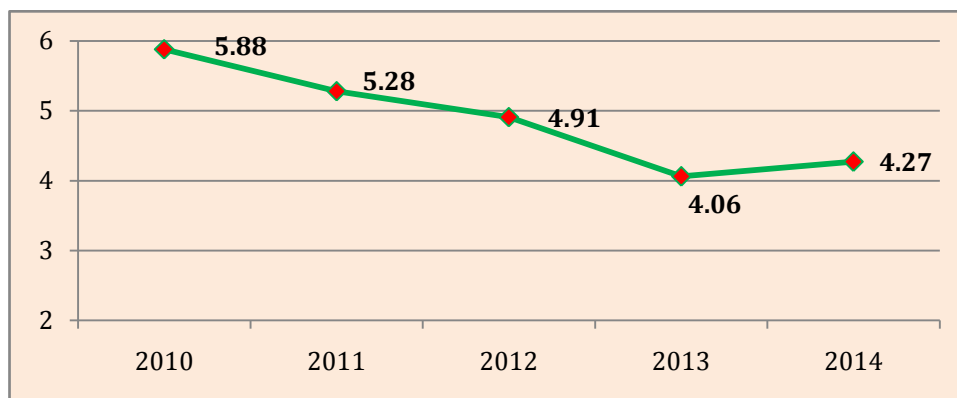


**Gambar 2.31**  
**Perkembangan Rasio Produktivitas Tenaga Kerja Selama Tahun 2010-2014 Di Kabupaten Sumbawa**

### c. Pengangguran

Pengangguran adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja (15 sampai 64 tahun) yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya. Untuk mengukur tingkat pengangguran pada suatu wilayah dapat dilihat dari angka tingkat pengangguran terbuka (TPT).

Gejala penurunan terhadap TPAK berdampak terhadap kondisi pengangguran Hal ini terlihat dari tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang meningkat 0,21% dari 4,06% di tahun 2013 menjadi 4,27% pada tahun 2014. Meningkatnya TPT berdampak pada semakin besarnya upaya peningkatan peluang/kesempatan kerja. Perkembangan kondisi TPT di Kabupaten Sumbawa tergambar sebagai berikut.



**Gambar 2.32**  
**Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka**  
**Selama Tahun 2010-2014 Di Kabupaten Sumbawa**

Demikian pula dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dengan penurunan poin sebesar 1,61 dari 5,88% TPT pada tahun 2010 menjadi 4,27% pada tahun 2014. Besaran TPT ini masih lebih baik bila dibandingkan dengan rata-rata capaian Provinsi NTB sebesar 5,75%.

## 2. Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan Dan Pelindungan Anak

Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bertujuan untuk mengupayakan dan mengkondisikan situasi serta proses kehidupan yang kondusif dalam mewujudkan kepekaan terhadap terjadinya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Terkait dengan kasus-kasus yang telah ditangani melalui Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) diantaranya kasus *trafficking*, kasus pemerkosaan dan kasus kekerasan dalam rumahtangga, dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir telah terjadi penurunan jumlah kasus sebesar 81,31% dari 198 kasus pada tahun 2011 menjadi 37 kasus pada tahun 2015 dengan penurunan rata-rata kasus pertahun sebesar 33,99%.

### a. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah

Gambaran pemberdayaan perempuan di Kabupaten Sumbawa, dapat diukur dari proporsi perempuan dalam birokrasi pemerintahan. Proporsi perempuan di lembaga pemerintah pada tahun 2011 sebesar 4,09% meningkat menjadi 4,70% pada tahun 2015 atau tumbuh sebesar 14,97% dengan rata-rata pertumbuhan pertahun sebesar 3,78%.

**Tabel 2.86**  
**Persentase Partisipasi Perempuan Pada Lembaga Pemerintah**  
**Tahun 2011-2015 Di Kabupaten Sumbawa**

No	Uraian	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1	Jumlah perempuan yang menempati jabatan eselon II	1	1	1	1	1
2	Jumlah perempuan yang menempati jabatan eselon III	17	19	20	20	20
3	Jumlah perempuan yang menempati jabatan eselon IV	187	210	220	221	225
4	Jumlah pekerja perempuan	4.990	4.921	4.881	5.052	5.234
5	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	4,09	4,67	4,94	4,79	4,70

Sumber: BKPP dan BPS Kab. Sumbawa

### b. Partisipasi perempuan di lembaga swasta

Selain proporsi perempuan di lembaga pemerintah, gambaran pemberdayaan perempuan dapat diukur dari proporsi perempuan di lembaga swasta. Proporsi perempuan di lembaga swasta pada tahun 2011 sebesar 26,25% menurun menjadi 24,46% pada tahun 2015 atau menurun rata-rata - 1,74% per tahun.

**Tabel 2.87**  
**Persentase Partisipasi Perempuan Pada Lembaga Swasta**  
**Tahun 2011-2015 Di Kabupaten Sumbawa**

No	Uraian	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1	Jumlah perempuan yang bekerja di lembaga swasta	1.310	1.310	1.280	1.280	1.280
2	Jumlah pekerja perempuan	4.990	4.921	4.881	5.052	5.234
3	Persentase pekerja perempuan di lembaga swasta	26,25	26,62	26,22	25,34	24,46

Sumber: BKPP dan BPS Kab. Sumbawa

### c. Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Rasio Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah jumlah KDRT yang dilaporkan dalam periode 1 (satu) tahun per 1.000 rumah tangga, Gambaran Perkembangan Rasio KDRT di Kabupaten sebagai berikut.

**Tabel 2.88**  
**Rasio KDRT Tahun 2011-2014 Di Kabupaten Sumbawa**

No	Uraian	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1	Jumlah KDRT	198	134	89	65	74
2	Jumlah Rumah Tangga	103.089	105.592	108.863	120.216	111.972
3	Rasio KDRT	0,19	0,13	0,08	0,05	0,07

Sumber: BKBPP Kabupaten Sumbawa

### 3. Urusan Wajib Pangan

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan wajib pangan dapat dilihat dari indikator ketersediaan pangan utama, dalam hal ini ketersediaan beras yang menjadi makanan pokok masyarakat Kabupaten Sumbawa. Standar kebutuhan pangan utama masyarakat adalah 130 Kg/Kapita/tahun, maka kebutuhan beras dan pemenuhannya per tahun di Kabupaten Sumbawa disajikan sebagai berikut.

**Tabel 2.89**  
**Kebutuhan Standar Beras Dan Kemampuan Pemenuhan Beras**  
**Untuk Konsumsi Penduduk Di Kabupaten Sumbawa**

No	Uraian	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1	Jumlah Penduduk	422.192	427.119	431.924	436.599	441.102
2	Produksi GKG	390.940	418.489	477.777	449.223	497.351

No	Uraian	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
	(ton)					
3	Produksi Beras (ton)	246.292,20	263.648,07	300.999,51	283.010,49	313.331,13
4	Produksi Beras (kg)	246.292.200	263.648.070	300.999.510	283.010.490	313.331.130
5	Kebutuhan beras penduduk	54.884.960	55.525.470	56.150.120	56.757.870	57.343.260
6	Cadangan beras 6%	14.777.532	15.818.884,20	18.059.970,60	16.980.629,40	18.799.867,80
7	Jumlah kebutuhan + cadangan	69.662.492	71.344.354,20	74.210.090,60	73.738.499,40	76.143.127,80
8	Surplus/(Defisit) (kg)	176.629.708	192.303.715,80	226.789.419,40	209.271.990,60	237.188.002,20

Sumber : Dinas Pertanian Kab. Sumbawa, 2015

Analisis mengenai standar kebutuhan bahan pokok beras tersebut menggunakan asumsi bahwa produksi beras setara dengan 63% dari produksi gabah kering giling, sedangkan kebutuhan beras per kapita per tahun adalah sebesar 140 kg. Dengan demikian, maka secara kuantitatif, produksi pangan utama masyarakat di Kabupaten Sumbawa mengalami surplus, sehingga Kabupaten Sumbawa selama ini telah menjadi penyangga pangan bagi daerah-daerah lain di NTB, NTT maupun Bali.

**Tabel 2.90**  
**Pola Pangan Harapan dan Ketersediaan Energi Dari Bahan makanan Di Kabupaten Sumbawa**

No	Indikator	Tahun			
		2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
1	Pola Pangan Harapan (PPH)	N/A	77,56	82,10	82,30
2	Ketersediaan Energi (Kalori/Kapita/hari)	N/A	3.675,38	4.353,33	4.410,01
3	Ketersediaan Protein (gr/kapita/hari)	N/A	118,05	176,38	197,90

Sumber: Kantor Ketahanan Pangan Kab. Sumbawa 2015

#### 4. Urusan Wajib Pertanahan

Jumlah aset tanah milik Pemerintah Kabupaten Sumbawa yang telah terbit sertifikatnya sampai dengan tahun 2015 sebanyak 523 sertifikat dari 1.161 obyek aset tanah yang diajukan, atau baru mencapai 45,05%.

Rasio penerbitan sertifikat tanah Pemerintah Kabupaten Sumbawa terhadap jumlah pengajuan disajikan pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.91**  
**Rasio Penerbitan Sertipikat Terhadap Jumlah Pengajuan Sertipikat Selama Tahun 2008-2015 Di Kabupaten Sumbawa**

No	Uraian	Pengajuan	Terbit	Blm Terbit	Rasio
1	2	3	4	5 = 3-4	6 = 4/3
1	S/D 2007	734	345	389	47,00
2	S/D 2008	748	354	394	47,33

No	Uraian	Pengajuan	Terbit	Blm Terbit	Rasio
1	2	3	4	5 = 3-4	6 = 4/3
3	S/D 2009	798	381	417	47,74
4	S/D 2010	824	386	438	46,84
5	S/D 2011	873	418	455	47,88
6	S/D 2012	949	467	482	49,21
7	S/D 2013	1.012	522	490	51,58
8	S/D 2014	1.013	523	490	51,63
9	S/D 2015	1.161	523	638	45,05

Sumber: Bagian Asset Sekretariat Daerah Kab. Sumbawa

## 5. Urusan Wajib Lingkungan Hidup

### a. Rasio tempat pembuangan sampah per satuan penduduk

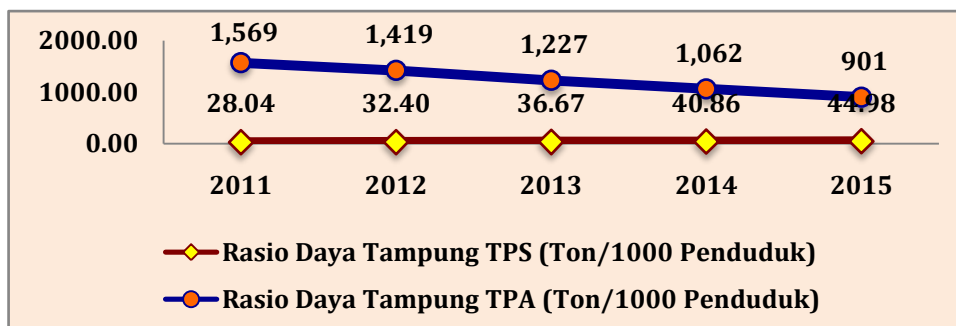
Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) dan tempat pembuangan akhir (TPA) per satuan penduduk adalah jumlah daya tampung tempat pembuangan sampah per 1.000 jumlah penduduk. Perkembangan rasio TPS dan TPA terhadap jumlah penduduk sebagai gambaran pelayanan persampahan di Kabupaten Sumbawa.

**Tabel 2.92**  
**Rasio Tempat Pembuangan Sampah Terhadap Jumlah Penduduk**  
**Tahun 2011-2015 Di Kabupaten Sumbawa**

No	Uraian	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1	Jumlah TPS (unit)	17	48	93	138	163
2	Jumlah Daya Tampung TPS (ton)	11.840	13.840	15.840	17.840	19.840
3	Jumlah TPA (buah)	2	2	2	2	2
4	Jumlah Daya Tampung TPA (ton)	662.40	606.16	529.92	463.68	397.44
		0	0	0	0	0
5	Jumlah Penduduk	422.19	427.11	431.92	436.59	441.10
		2	9	4	9	2
6	Rasio Daya Tampung TPS (Ton/1.000 Penduduk)	28,04	32,40	36,67	40,86	44,98
7	Rasio Daya Tampung TPA (Ton/1.000 Penduduk)	1.569	1.419	1.227	1.062	901

Sumber: BPM-LH Kabupaten Sumbawa

Gambaran perkembangan rasio daya tampung TPS dan TPA per satuan penduduk selama tahun 2011-2015 tergambar sebagai berikut.



**Gambar 2.33**  
**Perkembangan Rasio Daya Tampung TPS dan TPA Per 1000 Jumlah Penduduk Selama Tahun 2011-2015 Di Kabupaten Sumbawa**

### b. Persentase penanganan sampah

Untuk mengatasi produksi sampah, terdapat fasilitas dan sarana persampahan seperti truck sampah yang terdiri dari Amroll truck 6 unit dan Dump truck 13 unit dari 12 unit pada tahun 2011 dan grobak sampah sebanyak 31 unit dari 2 unit pada tahun 2012. Jumlah TPS mini dari 12 buah pada tahun 2011 menjadi 132 buah pada tahun 2015 atau meningkat sebanyak 120 buah. Demikian pula dengan Kontainer sampah dari 5 unit pada tahun 2011 menjadi 31 unit pada tahun 2015 atau meningkat sebanyak 26 unit dalam rentang waktu 5 (tahun terakhir).

**Tabel 2.93**  
**Persentase Penanganan Sampah Tahun 2011-2015**  
**Di Kabupaten Sumbawa**

No	Uraian	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1	Jumlah Truk Sampah:					
	- Dump Truck Sampah	12	12	13	13	13
	- Amroll Truck Sampah	6	6	6	6	6
2	Jumlah Grobak Sampah	-	2	6	6	31
3	Jumlah TPS (unit):					
	- TPS Mini	12	32	72	112	132
	- Kontainer Sampah	5	16	21	26	31
3	Jumlah sampah yang ditangani (ton)	50,76	51,84	54,00	55,80	64,03
4	Jumlah volume produksi sampah (ton)	344,90	347,00	349,40	354,72	398,81
5	Persentase penanganan sampah	14,72	14,94	15,46	15,73	16,06

Sumber: BPM-LH Kab. Sumbawa

Pengelolaan manajemen persampahan di Kabupaten Sumbawa menggunakan sistem *Controlled Landfill* dan sistem *Open Dumping*. Sistem *Controlled Landfill* (sistem urug terkendali) dilakukan dengan cara membuat lapisan timbunan sampah dan lapisan tanah secara berselang-seling (TPA Raberas dengan luasan  $\pm$  6 Ha dan kapasitas volumenya  $\pm$  4 Ha). Sedangkan sistem *Open Damping* (sistem urug terbuka) yang masih digunakan di TPA Desa Lekong Kecamatan Alas Barat dengan luasan  $\pm$  2,5 Ha dan kapasitas volumenya sebesar  $\pm$  1,5 Ha, merupakan sistem pembuangan sampah di lahan tanah lapang tanpa ada pengelolaan lebih lanjut, sistem ini tidak ramah lingkungan dan tidak efektif menangani volume sampah yang menggunung dari hari ke hari.

### 6. Urusan Wajib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan kependudukan dan catatan sipil dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut.

#### a. Perkembangan penduduk

Perkembangan populasi penduduk di suatu daerah akan memberikan gambaran tentang bertambah atau berkurangnya jumlah penduduk yang mendiami daerah itu terhadap tahun sebelumnya. Populasi penduduk akan bertambah bila jumlah kelahiran dan perpindahan penduduk dari daerah lain lebih besar dari jumlah kematian dan perpindahan penduduk ke daerah lainnya. Berikut ini disajikan populasi penduduk Kabupaten Sumbawa menurut kelompok umur dalam beberapa tahun terakhir.

**Tabel 2.94**  
**Perkembangan Populasi Penduduk Kabupaten Sumbawa Menurut**  
**Kelompok Umur**

No	Kelompok Umur	Tahun				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>Jumlah Laki-Laki:</b>	<b>212.185</b>	<b>215.169</b>	<b>217.679</b>	<b>220.206</b>	<b>222.728</b>
1	Muda (0-14)	64.742	65.176	65.424	65.645	65.863
2	Produktif (15-64)	137.797	140.074	142.138	144.225	146.278
3	Tua (Lebih 64 tahun)	9.646	9.919	10.117	10.336	10.587
<b>II</b>	<b>Jumlah Perempuan:</b>	<b>203.604</b>	<b>207.023</b>	<b>209.440</b>	<b>211.718</b>	<b>213.871</b>
1	Muda (0-14)	61.812	62.496	62.776	63.010	63.202
2	Produktif (15-64)	131.139	133.523	135.414	137.198	138.887
3	Tua (Lebih 64 tahun)	10.653	11.004	11.250	11.510	11.782
<b>III</b>	<b>Jumlah penduduk</b>	<b>415.789</b>	<b>422.192</b>	<b>427.119</b>	<b>431.924</b>	<b>436.599</b>
<b>IV</b>	<b>Pertumbuhan penduduk</b>	<b>0,80</b>	<b>1,54</b>	<b>1,17</b>	<b>1,12</b>	<b>1,08</b>

Sumber: Daerah Dalam Angka. BPS Kab. Sumbawa (Beberapa tahun terbitan)

**b. Penduduk Terdaftar Pada Catatan Sipil**

Indikator untuk menggambarkan tertib administrasi kependudukan di Kabupaten Sumbawa, diantaranya adalah mengenai jumlah KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Akta Nikah yang telah dikeluarkan. Secara berturut-turut gambaran pelayanan penerbitan KTP dan akta-akta kependudukan disajikan sebagai berikut.

**Tabel 2.95**  
**Jumlah KTP Yang Dikeluarkan di Kabupaten Sumbawa per Tahun**

No	Uraian	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1	KTP yang terbit per tahun	45.000	58.749	5.229	10.902	10.263
2	Kumulatif KTP yg diterbitkan	160.990	219.739	224.968	235.870	246.133
3	Jumlah Penduduk	422.192	427.119	431.924	436.599	441.102
4	Rasio KTP dikeluarkan per tahun terhadap penduduk	10,66	13,75	1,21	2,50	2,33
5	Rasio kumulatif KTP terbit terhadap penduduk	38,13	51,45	52,09	54,02	55,80

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Sumbawa

**c. Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk**

Rasio penduduk ber-KTP adalah perbandingan jumlah penduduk usia 17 tahun ke atas yang ber-KTP terhadap jumlah penduduk usia 17 tahun ke atas atau telah menikah. Berdasarkan data administrasi kependudukan di Kabupaten Sumbawa pada tahun 2015 jumlah KTP yang telah diterbitkan sebanyak 226.965 KTP atau 58,16% dari penduduk wajib KTP (jumlah penduduk >17

tahun atau telah menikah) sejumlah 390.211 jiwa. Berikut perkembangan rasio penduduk berKTP per satuan penduduk selama tahun 2011-2015.

**Tabel 2.96**  
**Rasio Penduduk berKTP Per Satuan Penduduk Tahun 2011-2015**  
**Di Kabupaten Sumbawa**

No	Uraian	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1	Jumlah penduduk yang memiliki KTP	160.990	219.739	224.968	235.870	226.965
2	Jumlah penduduk >17 thn atau telah menikah	347.032	371.955	375.687	413.155	390.211
3	Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk	0,4639	0,5908	0,5988	0,5709	0,5816

*Sumber: Profil Perkembangan Kependudukan Kab. Sumbawa (dalam beberapa tahun)*

Selain KTP, ketertiban administrasi kependudukan juga dapat dilihat dari akta kependudukan yang telah dikeluarkan dan dimiliki oleh penduduk di Kabupaten Sumbawa. Gambaran umum akta yang dikeluarkan di Kabupaten Sumbawa sebagai berikut.

**Tabel 2.97**  
**Jumlah Akta Kependudukan Yang Dikeluarkan**  
**Di Kabupaten Sumbawa**

No	Akta Yang Dikeluarkan	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1	Perkawinan	188	209	81	119	128
2	Kelahiran	24.850	8.568	3.292	16.202	16.547
3	Kematian	17	35	35	33	60
4	Perceraian	4	4	1	2	13
5	Jumlah Penduduk	422.192	427.119	431.924	436.599	441.102
6	Rasio akta perkawinan	0,45	0,49	0,19	0,27	0,29
7	Rasio Akta kelahiran	58,86	20,06	7,62	37,11	37,51
8	Rasio Akta kematian	0,0403	0,0819	0,0810	0,0756	0,1360
9	Rasio Akta Perceraian	0,0095	0,0094	0,0023	0,0046	0,0295

*Sumber: BPS Kab. Sumbawa (Daerah Dalam Angka, beberapa tahun terbitan)*

Data tersebut menunjukkan bahwa tertib administrasi kependudukan belum berjalan secara optimal di Kabupaten Sumbawa. Akta yang lebih dominan dikeluarkan hanya berupa Akta Kelahiran, hal itupun proporsinya masih sangat rendah. Sementara akta-akta lainnya belum dapat berlangsung secara baik. Hal tersebut dapat terjadi karena masyarakat tidak melaporkan tentang perkawinan, kematian, maupun perceraian yang terjadi.

## **7. Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Secara lugas pemberdayaan masyarakat diartikan sebagai suatu proses yang membangun manusia atau masyarakat melalui pengembangan kemampuan masyarakat, perubahan perilaku masyarakat, dan pengorganisasian masyarakat. Dari definisi tersebut terlihat ada 3 tujuan utama



dalam pemberdayaan masyarakat yaitu mengembangkan kemampuan masyarakat, mengubah perilaku masyarakat, dan mengorganisir diri masyarakat.

**a. Kelompok binaan LPM**

Secara organisatoris, dalam implementasinya di kecamatan/kelurahan/desa terdapat Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) serta kelompok-kelompok binaannya masing-masing. Perkembangan kelompok binaan LPM di Kabupaten Sumbawa dari tahun 2011 sampai 2015 disajikan sebagai berikut.

**Tabel 2.98**  
**Kelompok Binaan LPM Berdasarkan Kecamatan Tahun 2011-2015**  
**Di Kabupaten Sumbawa**

No	Kecamatan	2011			2012			2013			2014			2015		
		Jlh LPM	Jlh Klip Binaan	Rata-rata LPM	Jlh LPM	Jlh Klip Binaan	Rata-rata LPM	Jlh LPM	Jlh Klip Binaan	Rata-rata LPM	Jlh LPM	Jlh Klip Binaan	Rata-rata LPM	Jlh LPM	Jlh Klip Binaan	Rata-rata LPM
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5=4/3</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8=7/6</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11=10/9</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14=13/12</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17=16/15</b>
1	Alas Barat	8	5	0.63	8	5	0.63	8	5	0.63	8	5	0.63	8	5	0.63
2	Alas	8	5	0.63	8	5	0.63	8	5	0.63	8	5	0.63	8	5	0.63
3	Buer	6	5	0.83	6	5	0.83	6	5	0.83	6	5	0.83	6	5	0.83
4	Utang	9	5	0.56	9	5	0.56	9	5	0.56	9	5	0.56	9	5	0.56
5	Rhee	4	5	1.25	4	5	1.25	4	5	1.25	4	5	1.25	4	5	1.25
6	Lab. Badas	7	5	0.71	7	5	0.71	7	5	0.71	7	5	0.71	7	5	0.71
7	Sumbawa	8	5	0.63	8	5	0.63	8	5	0.63	8	5	0.63	8	5	0.63
8	Unter Iwes	8	5	0.63	8	5	0.63	8	5	0.63	8	5	0.63	8	5	0.63
9	Batulanteh	6	5	0.83	6	5	0.83	6	5	0.83	6	5	0.83	6	5	0.83
10	Moyohulu	12	5	0.42	12	5	0.42	12	5	0.42	12	5	0.42	12	5	0.42
11	Lenangguar	4	5	1.25	4	5	1.25	4	5	1.25	4	5	1.25	4	5	1.25
12	Lantung	4	5	1.25	4	5	1.25	4	5	1.25	4	5	1.25	4	5	1.25
13	Ropang	5	5	1.00	5	5	1.00	5	5	1.00	5	5	1.00	5	5	1.00
14	Orong Telu	4	5	1.25	4	5	1.25	4	5	1.25	4	5	1.25	4	5	1.25
15	Lunyuk	7	5	0.71	7	5	0.71	7	5	0.71	7	5	0.71	7	5	0.71
16	Moyo Hilir	10	5	0.50	10	5	0.50	10	5	0.50	10	5	0.50	10	5	0.50
17	Moyo Utara	6	5	0.83	6	5	0.83	6	5	0.83	6	5	0.83	6	5	0.83
18	Lopok	7	5	0.71	7	5	0.71	7	5	0.71	7	5	0.71	7	5	0.71
19	Lape	4	5	1.25	4	5	1.25	4	5	1.25	4	5	1.25	4	5	1.25
20	Maronge	4	5	1.25	4	5	1.25	4	5	1.25	4	5	1.25	4	5	1.25
21	Palampang	11	5	0.45	11	5	0.45	11	5	0.45	11	5	0.45	11	5	0.45
22	Labangka	5	5	1.00	5	5	1.00	5	5	1.00	5	5	1.00	5	5	1.00
23	Empang	10	5	0.50	10	5	0.50	10	5	0.50	10	5	0.50	10	5	0.50
24	Tarano	8	5	0.63	8	5	0.63	8	5	0.63	8	5	0.63	8	5	0.63
	Jumlah	165	120	19.69	165	120	19.69	165	120	19.69	165	120	19.69	165	120	19.69

Sumber: BPM-PD Kab. Sumbawa (beberapa tahun terbitan)

**b. Jumlah LSM Yang Aktif**

Sebagai organisasi non pemerintah, Lembaga swadaya masyarakat (LSM) adalah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya. Berdasarkan Undang-undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan, maka secara umum organisasi non pemerintah di Indonesia berbentuk yayasan. Keberadaan LSM di Kabupaten Sumbawa sepanjang tahun 2011-2015 disajikan sebagai berikut.

**Tabel 2.99**  
**Jumlah LSM Di Kabupaten Sumbawa (2011-2015)**

No	Uraian	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1.	Jumlah LSM Terdaftar	7	9	9	9	11
2.	Jumlah LSM Tidak Aktif	0	0	0	0	0
<b>3.</b>	<b>Jumlah LSM Aktif (1 - 2)</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>11</b>

*Sumber: Kesbangpoldagri Kab. Sumbawa*

### **8. Urusan Wajib Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Pengendalian kuantitas penduduk yang dilaksanakan melalui program Keluarga Berencana (KB) berkontribusi signifikan di dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia menuju keluarga kecil sejahtera. Upaya ini menjadi sangat penting mengingat jumlah penduduk yang besar dengan kualitas rendah akan menjadi beban pembangunan, sebaliknya penduduk besar dengan kualitas baik akan menjadi modal pembangunan.

#### **a. Rata-rata jumlah anak per keluarga**

Salah satu indikator keberhasilan keluarga berencana adalah penurunan rata-rata jumlah anak perkeluarga. Hingga tahun 2014, rata-rata jumlah anak perkeluarga di Kabupaten Sumbawa sekitar 2 anak.

**Tabel 2.100**  
**Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga Tahun 2011-2014**  
**Di Kabupaten Sumbawa**

No	Uraian	Tahun			
		2011	2012	2013	2014
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1	Jumlah anak	196.108	196.859	197.648	198.216
2	Jumlah keluarga	115.857	119.378	119.459	125.915
3	Rata-rata jumlah anak per keluarga	1,69	1,65	1,65	1,57

*Sumber: BPS dan BKBPP Kab. Sumbawa (Data diolah)*

#### **b. Rasio akseptor KB**

Besarnya angka partisipasi KB (akseptor) menunjukkan adanya pengendalian jumlah penduduk. Rasio akseptor KB selama tahun 2011-2014 di Kabupaten Sumbawa terlihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.101**  
**Rasio Akseptor KB Tahun 2011-2015 Di Kabupaten Sumbawa**

No	Uraian	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1	Jumlah akseptor KB aktif	63.613	64.037	67.151	70.085	68.414
2	Jumlah pasangan usia subur	88.000	89.229	90.282	93.001	88.357
3	Rasio akseptor KB	723	718	744	754	774

*Sumber: BKBPP Kabupaten Sumbawa*

Partisipasi masyarakat terhadap KB tahun 2011-2015 menunjukkan peningkatan dari 63.613 akseptor pada tahun 2011 menjadi 68.414 akseptor di tahun 2015 dengan laju pertumbuhan rata-rata 1,88% per tahun. Begitu pula dengan pasangan usia subur juga mengalami peningkatan dari 88.000 PUS di tahun 2011 menjadi 88.357 PUS di tahun 2015, dengan pertumbuhan rata-rata 0,15% pertahun. Tingginya pertumbuhan jumlah akseptor dibanding pertumbuhan PUS, mengakibatkan rasio akseptor KB meningkat dari 723 di tahun 2011 menjadi 774 di tahun 2015 dengan pertumbuhan rata-rata 1,75% per tahun. Ini berarti bahwa pada tahun 2015 terdapat 774 PUS yang menjadi akseptor KB per 1.000 pasangan usia subur (PUS). Perkembangan rasio akseptor KB selama lima tahun terakhir tergambar sebagai berikut.



**Gambar 2.34**  
**Perkembangan Rasio Akseptor KB Selama Tahun 2011-2015**  
**Di Kabupaten Sumbawa**

## 9. Urusan Wajib Perhubungan

### a. Jumlah arus penumpang angkutan umum

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan jumlah arus penumpang dan arus barang di Kabupaten Sumbawa disajikan sebagai berikut.

**Tabel 2.102**  
**Jumlah Arus Penumpang dan Arus Barang Tahun 2011-2015**  
**Di Kabupaten Sumbawa**

No	Uraian	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1	Jumlah arus penumpang	679.680	518.400	630.720	700.570	492.948
2	Jumlah arus barang (darat, laut, udara)	323.625.438	362.422.832	391.343.212	434.255.221	1.172.249.960

Sumber: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Sumbawa

### b. Rasio ijin trayek

Perizinan dibidang perhubungan diperlukan untuk menjaga keselamatan dan keamanan dengan cara memberikan ijin operasi dan ijin trayek kendaraan umum. Ijin trayek merupakan salah satu bentuk pengaturan yang menjadi layanan pemerintah daerah agar tidak terjadi ketidakteraturan dalam transportasi arus barang, jasa, orang dan uang. Pada tahun 2015 sebanyak 203

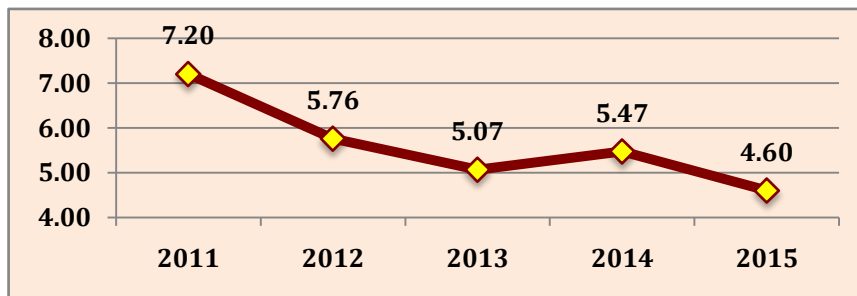
ijin trayek yang dikeluarkan, terjadi peningkatan yang signifikan dari tahun sebelumnya, sebanyak 166 ijin. Perkembangan rasio ijin trayek per 10.000 penduduk di Kabupaten Sumbawa selengkapnya sebagai berikut.

**Tabel 2.103**  
**Rasio Ijin Trayek Tahun 2011-2015 Di Kabupaten Sumbawa**

No	Uraian	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1.	Ijin trayek perkotaan	76	60	55	58	42
2.	Ijin trayek perdesaan	228	186	164	181	161
3.	Jumlah ijin trayek	304	246	219	239	203
4.	Jumlah penduduk	422.192	427.119	431.924	436.599	441.102
5.	Rasio ijin trayek/10.000 penduduk	7,20	5,76	5,07	5,47	4,60

*Sumber: Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumbawa*

Dari tabel diatas terlihat fluktuasi rasio izin trayek per 10.000 penduduk di Kabupaten Sumbawa sebagaimana tergambar berikut ini.



**Gambar 2.35**  
**Perkembangan Rasio Ijin Trayek Selama Tahun 2011-2015 Di Kabupaten Sumbawa**

### c. Jumlah uji kir angkutan umum

Uji kir angkutan umum merupakan pengujian setiap angkutan umum yang akan dioperasikan di jalan agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Pengujian dimaksud meliputi uji tipe yaitu pengujian fisik untuk pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan yang dilakukan terhadap landasan kendaraan bermotor dan kendaraan bermotor dalam keadaan lengkap dan penelitian rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor yang dilakukan terhadap rumah-rumah, bak muatan, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan bermotor yang dimodifikasi tipenya.

Uji Kir ini dilakukan secara berkala untuk mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan, meliputi pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan bermotor dan pengesahan hasil uji. Di Kabupaten Sumbawa, Uji Kir dilakukan di UPT Dinas Perhubungan, dan berdasarkan data yang ada menunjukkan perkembangan positif dari tahun ke tahun. Hal tersebut disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 2.104**  
**Jumlah Uji Kir Angkutan Umum Tahun 2011-2015**  
**Di Kabupaten Sumbawa**

No	Jenis Kendaraan	Jumlah Uji Kir (Unit)				
		2011	2012	2013	2014	2015
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1	Mobil Bus	606	626	639	520	504
2	Mobil Barang	1.811	1.977	2.259	2.242	3.603
3	Kendaraan lainnya	-	-	-	-	-
4	Jumlah	2.417	2.603	2.898	2.762	4.107

*Sumber: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Sumbawa*

**d. Perkembangan sarana angkutan umum**

Gambaran umum ketersediaan sarana angkutan darat di Kabupaten Sumbawa dalam beberapa tahun terakhir disajikan sebagai berikut.

**Tabel 2.105**  
**Perkembangan Sarana Angkutan Darat di Kabupaten Sumbawa**

No	Sarana Angkutan Darat	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1	Angkutan Kota Antar Provinsi (AKAP)	4	4	4	4	4
2	Angkutan Kota	76	60	55	58	42
3	Angkutan Pedesaan	228	186	164	181	161
4	Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP)	68	66	66	34	34
5	Angkutan Tradisional	720	676	875	797	700

*Sumber: Sumbawa dalam Angka, BPS (Beberapa tahun terbitan)*

**e. Ketersediaan terminal dan shelter**

Gambaran umum ketersediaan terminal dan shelter angkutan darat di Kabupaten Sumbawa dalam beberapa tahun terakhir disajikan sebagai berikut.

**Tabel 2.106**  
**Ketersediaan Terminal Angkutan Darat di Kabupaten Sumbawa**

No	Sarana Angkutan Darat	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1	Terminal Type A	1	1	1	1	1
2	Terminal Type B	1	1	1	1	1
3	Terminal Type C	2	2	2	1	1
4	Shelter	4	4	4	1	1

*Sumber: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Sumbawa*

Hingga saat ini di Kabupaten Sumbawa terdapat 4 buah terminal dengan 1 buah shelter. Jumlah tersebut dipandang belum memadai untuk melayani semakin tingginya kebutuhan masyarakat akan layanan kelancaran akses transportasi serta jumlah arus penumpang dan barang yang cenderung linear dengan perkembangan jumlah alat angkutan. Selanjutnya mengenai rasio terminal terhadap angkutan umum disajikan sebagai berikut.

**Tabel 2.107**  
**Rasio Terminal Terhadap Jumlah Angkutan Penumpang**  
**Di Kabupaten Sumbawa**

No	Uraian	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1	Jumlah AKAP	29	4	4	4	4
2	Terminal kelas A	1	1	1	1	1
3	Rasio Term A thdp AKAP	0,03	0,25	0,25	0,25	0,25
4	Jumlah AKDP	98	51	50	55	34
5	Terminal kelas B	1	1	1	1	1
6	Rasio Term B thdp AKDP	0,02	0,04	0,04	0,04	0,06
7	Jumlah angkutan kota dan perdesaan	345	236	236	219	203
8	Terminal kelas C dan shelter	6	6	6	2	2
9	Rasio Term C dan Shelter terhadap Angkot dan Angdes	0,02	0,03	0,03	0,01	0,01

*Sumber: Dinas Perhubungan Kab. Sumbawa, (Data diolah)*

#### **f. Perhubungan laut dan udara**

Menyangkut perhubungan laut, untuk memperlancar arus aksesibilitas antar daerah, di Kabupaten Sumbawa terdapat pelabuhan yang cukup ramai yaitu Pelabuhan Badas, Pelabuhan Alas, penyeberangan muara kali di Kecamatan Labuhan Badas, penyeberangan ke Pulau Moyo, dan lain-lain. Hubungannya dengan perhubungan laut ini terdapat pelabuhan pendaratan ikan yang menjadi sarana bagi arus ikan oleh nelayan.

Menyangkut perhubungan udara, Bandar udara di Kabupaten Sumbawa terdapat 1 buah yaitu Bandar Udara Sultan Muhammad Kaharuddin, yang hingga saat ini melayani penumpang domestik dengan route Sumbawa-Mataram. Sarana perhubungan udara di Kabupaten Sumbawa lebih bersifat sekunder. Selain itu di Kabupaten Sumbawa terdapat pula 1 bandar udara perintis.

### **10. Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika**

#### **a. Jumlah surat kabar nasional/lokal**

Surat kabar merupakan komunikasi massa yang diterbitkan secara berkala dan bersenyawa dengan kemajuan teknologi pada masanya dalam menyajikan tulisan berupa berita, *feature*, pendapat, cerita rekaan (fiksi), dan bentuk karangan yang lain. Surat kabar yang dapat diakses masyarakat dan beredar di Kabupaten Sumbawa adalah surat kabar nasional dan surat kabar terbitan lokal. Jumlah surat kabar nasional/lokal adalah banyaknya jenis surat kabar terbitan nasional atau terbitan lokal yang masuk ke daerah. Secara umum surat kabar yang beredar di Kabupaten Sumbawa disajikan sebagai berikut.

**Tabel 2.108**  
**Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal Kabupaten Sumbawa**

No	Uraian	Tahun	
		2011	2015
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>7</b>
1	Jumlah jenis surat kabar terbitan nasional	3	11
2	Jumlah jenis surat kabar terbitan regional	3	1
3	Jumlah jenis surat kabar terbitan lokal	5	2
4	Total jenis surat kabar (1+2+3)	11	14

*Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa*

Semakin banyak jumlah jenis surat kabar terbitan nasional/lokal di daerah menggambarkan semakin besar ketersediaan fasilitas jaringan komunikasi masa berupa media cetak sebagai pelayanan penunjang dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah.

**b. Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal**

Akses informasi yang diperoleh masyarakat dari media massa elektronik, radio dan televisi di Kabupaten Sumbawa cukup memadai. Siaran radio yang dapat diakses selama ini seperti RRI, RPD dan siaran radio FM tetap lancar setiap hari. Demikian pula dengan siaran televisi. Jumlah radio penyiaran dan televisi lokal yang terakses di Kabupaten Sumbawa pada tahun 2015 sebanyak 5 siaran, yaitu 4 siaran radio lokal dan 1 siaran TV lokal.

**c. Persentase Wilayah terjangkau jaringan telekomunikasi**

Dari 24 kecamatan di Kabupaten Sumbawa, terdapat 2 kecamatan (8,33%) yang belum terjangkau jaringan telekomunikasi, yaitu Kecamatan Batu Lanteh dan Kecamatan Ropang. Salah satu penyebab belum terjangkau kedua kecamatan tersebut karena keterjangkauan wilayah yang relatif sulit disamping jumlah konsumen yang dilayani tidak sebanding dengan nilai investasinya.

**11. Urusan Wajib Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah**

**a. Persentase koperasi aktif**

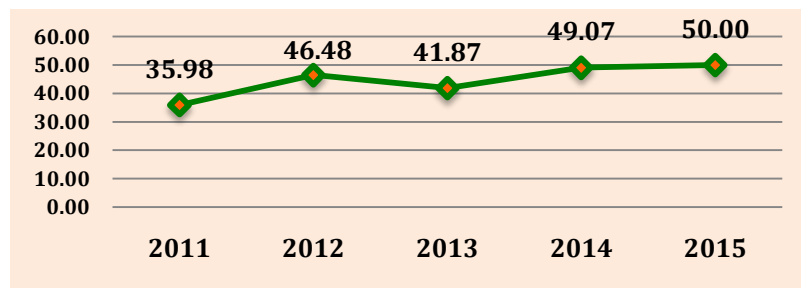
Koperasi Aktif adalah koperasi yang dalam dua tahun terakhir mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) atau koperasi yang dalam tahun terakhir melakukan kegiatan usaha. Kondisi perkembangan Koperasi di Kabupaten Sumbawa hingga tahun 2015 mengalami peningkatan. Indikasinya adalah meningkatnya persentase koperasi aktif menjadi 50% dari 49,07% pada tahun 2014, atau secara kuantitatif mengalami peningkatan sebanyak 7 unit menjadi 191 unit di tahun 2015. Berikut gambaran selengkapnya kondisi koperasi di kabupaten sumbawa.

**Tabel 2.109**  
**Persentase Koperasi Aktif Tahun 2011-2015 Di Kabupaten Sumbawa**

No	Uraian	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1	Jumlah koperasi aktif	127	165	152	184	191
2	Jumlah koperasi	353	355	363	375	382
3	Persentase koperasi aktif	35,98	46,48	41,87	49,07	50,00

*Sumber: Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa*

Dari tabel diatas terlihat peningkatan persentase koperasi aktif di Kabupaten Sumbawa sebagaimana tergambar berikut ini.



**Gambar 2.36**  
**Perkembangan Persentase Koperasi Aktif Selama Tahun 2011-2015 Di Kabupaten Sumbawa**

**b. Jumlah UKM non BPR/LKM**

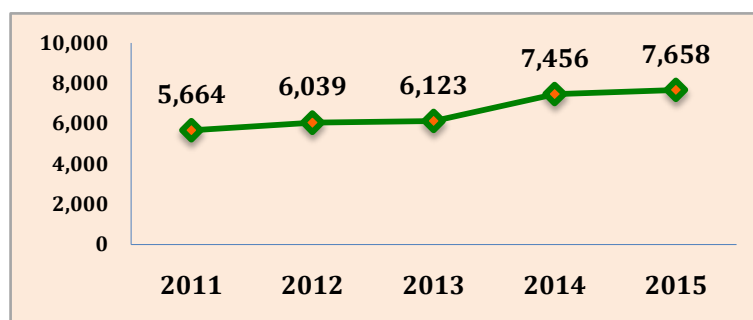
Usaha kecil menengah adalah peluang usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dikerjakan secara mandiri namun memerlukan akses permodalan dalam pengembangan usaha. Jumlah UKM non BPR di Kabupaten Sumbawa menunjukkan perkembangan yang positif. Pada tahun 2014 berjumlah 7.456 bertambah sebesar 1,03% menjadi 7.658 pada tahun 2015. Ini menunjukkan semakin besarnya kapasitas pelayanan pendukung yang dimiliki daerah dalam meningkatkan ekonomi daerah melalui UKM.

**Tabel 2.110**  
**Jumlah UKM non BPR/LKM Tahun 2011-2015 Di Kabupaten Sumbawa**

No	Uraian	UKM/BPR/LKM (Unit)				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1	Jumlah seluruh UKM	5.846	6.224	6.317	7.678	7.822
2	Jumlah BPR/LKM	182	185	194	222	164
3	Jumlah UKM non BPR/LKM	5.664	6.039	6.123	7.456	7.658

Sumber: Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa

Dari tabel diatas terlihat peningkatan jumlah UKM non BPR/LKM di Kabupaten Sumbawa sebagaimana tergambar berikut ini.



**Gambar 2.37**  
**Perkembangan Jumlah UKM non BPR/LKM Selama Tahun 2011-2015 Di Kabupaten Sumbawa**

**c. Jumlah BPR/LKM**

BPR adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR. Sedangkan Lembaga keuangan mikro (LKM) adalah lembaga yang menyediakan jasa penyimpanan (*deposits*), kredit (*loan*), pembayaran sebagai transaksi jasa



(*payment service*) serta *money transfer* yang ditujukan bagi masyarakat miskin dan pengusaha kecil. LKM memiliki fungsi sebagai lembaga yang memberikan berbagai jasa keuangan bagi masyarakat miskin dan pengusaha kecil.

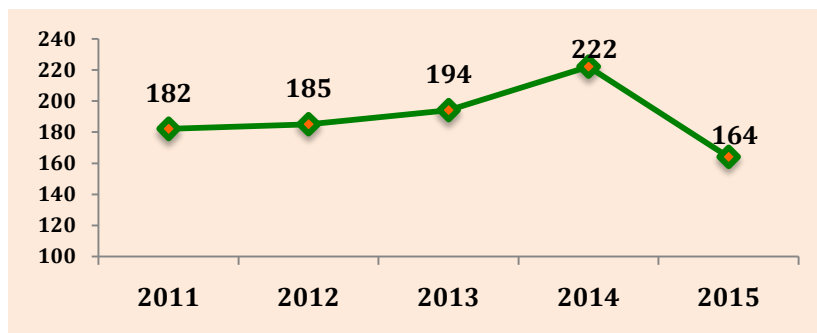
Perkembangan jumlah BPR/LKM pada tahun 2015 cenderung mengalami penurunan yang cukup signifikan dari tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2014 berjumlah 222 unit menjadi 164 unit di tahun 2015. Hal ini menunjukkan semakin rendahnya kapasitas pelayanan pendukung yang dimiliki daerah dalam mendukung pendanaan UKM melalui BPR/LKM.

**Tabel 2.111**  
**Jumlah BPR/LKM Tahun 2011-2015 Di Kabupaten Sumbawa**

No	Uraian	BPR/LKM (Unit)				
		2011	2012	2013	2014	2015
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
1	Jumlah BPR	43	46	46	46	46
2	Jumlah LKM	139	139	148	176	118
3	Jumlah BPR dan LKM	182	185	194	222	164

*Sumber: Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa*

Dari tabel diatas terlihat penurunan jumlah BPR/LKM di Kabupaten Sumbawa sebagaimana tergambar berikut ini.



**Gambar 2.38**  
**Perkembangan Jumlah BPR/LKM Selama Tahun 2011-2015**  
**Di Kabupaten Sumbawa**

## 12. Urusan Wajib Penanaman Modal

### a. Jumlah investor berskala nasional

Kondisi iklim investasi di Kabupaten Sumbawa cukup baik. Hal ini terlihat dari jumlah perusahaan yang bergerak di Penanaman Modal Asing (PMA) yakni dari 7 perusahaan yang berinvestasi pada tahun 2011, meningkat menjadi 9 perusahaan pada tahun 2015. Sementara untuk investor dibidang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dari 10.654 pada tahun 2011 meningkat menjadi 11.013 investor pada tahun 2015.

**Tabel 2.112**  
**Jumlah Investor PMDN/PMA Tahun 2011-2015**  
**Kabupaten Sumbawa**

Tahun	Uraian	PMDN	PMA	Total
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
2011	Jumlah Investor	10.654	7	10.661
2012	Jumlah Investor	10.832	7	10.839
2013	Jumlah Investor	10.682	8	10.690

<b>Tahun</b>	<b>Uraian</b>	<b>PMDN</b>	<b>PMA</b>	<b>Total</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
2014	Jumlah Investor	11.007	9	11.016
2015	Jumlah Investor	11.013	9	11.022

Sumber: BPM-LH Kabupaten Sumbawa

Total nilai proyek yang telah terealisasi di Kabupaten Sumbawa hingga 2015 untuk PMA sebesar US\$24.571.131,- dan untuk PMDN sebesar Rp1.057.364.489.258,- dengan jumlah proyek sebanyak 11.022, mengalami peningkatan dari tahun 2011, dimana realisasi nilai proyek PMA sebesar US\$14.600.442,- dan PMDN sebesar Rp820.907.559.456,- dengan jumlah realisasi proyek sebanyak 10.661. Selengkapnya perkembangan jumlah nilai investasi di kabupaten sumbawa terlihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.113**  
**Nilai Rencana Dan Realisasi Investasi Tahun 2011-2015**  
**Di Kabupaten Sumbawa (Milyar Rupiah)**

<b>Tahun</b>	<b>PMA</b>		<b>PMDN</b>	
	<b>Jumlah Proyek</b>	<b>Nilai Investasi</b>	<b>Jumlah Proyek</b>	<b>Nilai Investasi</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
2011	7	14.600.442	10.654	820.907.559.456
2012	7	14.600.442	10.834	1.111.351.463.736
2013	8	19.865.518	10.683	909.194.614.272
2014	8	19.865.518	11.007	978.034.173.778
2015	9	24.571.131	11.013	1.057.364.489.258

Sumber: BPM-LH Kab. Sumbawa

Investasi tersebut terealisasi pada beberapa sektor usaha seperti sektor perikanan, peternakan, kehutanan dan perkebunan, pariwisata, pertanian, perindustrian dan perdagangan, serta pertambangan.

#### **b. Rasio daya serap tenaga kerja**

Secara umum bilamana investasi meningkat, maka daya serap tenaga kerja akan meningkat pula, karena peningkatan investasi cenderung akan membuka tambahan lapangan kerja sehingga secara tak langsung akan membutuhkan tenaga kerja baru. Daya serap tenaga kerja secara umum dimaknai sebagai kemampuan penyerapan tenaga kerja dalam setiap satu satuan investasi yang ditanam pada suatu usaha. Untuk tahun 2015, daya serap tenaga kerja di Kabupaten Sumbawa disajikan sebagai berikut.

**Tabel 2.114**  
**Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Kabupaten Sumbawa (2015)**

<b>No</b>	<b>Uraian</b>	<b>Jumlah</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1	Jumlah tenaga kerja yang berkerja pada perusahaan PMA/PMDN	45.835
2	Jumlah seluruh PMA/PMDN	10.661
	<b>Rasio daya serap tenaga kerja</b>	<b>4,30</b>

Sumber: BPM-LH Kab. Sumbawa, 2015 ( Data diolah)

### 13. Urusan Wajib Kepemudaan dan Olah Raga

Dalam rangka meningkatkan prestasi olahraga masyarakat, keberadaan sarana dan prasarana olahraga sangat menentukan pengembangan kemampuan prestasi pemuda dibidang olah raga. Gedung olah raga mengalami peningkatan sebanyak 27 buah atau tumbuh sebesar 207,69% dari tahun 2011, dimana pada tahun 2011 terdapat sebanyak 13 buah gedung dan pada tahun 2015 terdapat 40 gedung olah raga. Demikian pula dengan jumlah lapangan olah raga terjadi peningkatan sebanyak 104 buah atau tumbuh sebesar 53,61% dibandingkan tahun 2011, dimana pada tahun 2011 terdapat 194 lapangan olah raga meningkat di tahun 2015 menjadi 298 buah. Keberadaan klub olahraga hingga saat ini berjumlah 906 klub dari 674 klub pada tahun 2011, sehingga dalam rentang waktu 5 (lima) tahun terakhir terjadi peningkatan jumlah klub olahraga sebanyak 232 klub atau tumbuh sebesar 34,42%.

### 14. Urusan Wajib Statistik

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan kondisi statistik daerah dapat dilihat dari ketersediaan dokumen statistik daerah. Dokumen statistik tersebut sangat diperlukan dalam rangka memenuhi kebutuhan perencanaan, perumusan kebijakan strategis daerah, serta bahan untuk evaluasi kinerja pelaksanaan pembangunan daerah. Berikut ini adalah ketersediaan dokumen statistik di Kabupaten Sumbawa dalam kurun waktu tahun 2011-2015 sebagai berikut.

**Tabel 2.115**  
**Ketersediaan Dokumen Statistik Di Kabupaten Sumbawa**

No	Dokumen	2011		2012		2013		2014		2015	
		Ada	Tidak ada	Ada	Tidak ada	Ada	Tidak ada	Ada	Tidak ada	Ada	Tidak ada
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Daerah Dalam Angka (DDA)	√		√		√		√		√	
2	Kecamatan Dalam Angka	√		√		√		√		√	
3	PDRB Kabupaten Sumbawa	√		√		√		√		√	
4	PDRB Kecamatan	√		√		√			x		x
5	Profil Daerah	√		√		√		√		√	
6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	√		√		√		√		√	
7	Indeks Gini Rasio		x		x		x		x		x
8	Indeks Williamson		x		x		x		x		x

No	Dokumen	2011		2012		2013		2014		2015	
		Ada	Tidak ada	Ada	Tidak ada	Ada	Tidak ada	Ada	Tidak ada	Ada	Tidak ada
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Indeks Harga Konsumen	√		√		√		√		√	
10	Indeks Kepuasan Masyarakat		x		x		x		x		x
11	Indeks Pelayanan Minimum		x		x		x		x		x
12	Indeks Pelayanan Publik		x		x		x		x		x
13	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	√		√		√		√		√	
14	Sumberdaya Alam Spasial Kabupaten Sumbawa	√		√		√		√		√	

Sumber: Bappeda Kab. Sumbawa

#### 15. Urusan Wajib Persandian

Jumlah tenaga fungsional persandian hingga tahun 2015 berjumlah 1 orang. Jumlah ini masih sangat kurang dibanding dengan semakin tingginya beban kerja birokrasi. Begitu pula halnya dengan ketersediaan sarana dan prasarana persandian masih belum memadai.

#### 16. Urusan Wajib Kebudayaan

Sanggar seni hingga saat ini tercatat sebanyak 104 sanggar seni dari 45 sanggar seni yang ada pada tahun 2011, sehingga terjadi penambahan sebanyak 59 sanggar seni selama lima tahun terakhir atau tumbuh rata-rata pertahun sebesar 24,72% sanggar seni. Hal ini mengindikasikan geliat berkesenian terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun di Kabupaten Sumbawa. Adapun event budaya yang rutin diselenggarakan setiap tahun seperti seperti Pekan Budaya Samawa, Festival Ponan, Festival Samba, Pertunjukan Seni dan Budaya Hari Kemerdekaan dan Hari Besar Nasional, Festival Kolaboratif Dewan Kesenian Sumbawa, dan Festival Samawa Malanti Budaya di Kecamatan Plampang serta Festival Moyo yang merupakan agenda tahunan yang semakin berkembang serta keikutsertaan Kabupaten Sumbawa dalam Misi Kesenian ke Luar Daerah.

Potensi lainnya yang terkait dengan kebudayaan di kabupaten Sumbawa adalah keberadaan cagar Budaya yang sampai dengan tahun 2015 berjumlah 42 buah, seperti pada tabel berikut.

**Tabel 2.116**  
**Jumlah Cagar Budaya di Kabupaten Sumbawa Tahun 2015**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Lokasi</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1	Makam Sampar	Kel. Seketeng Kec. Sumbawa
2	Istana Dalam Loka	Kel. Seketeng Kec. Sumbawa
3	Istana Baru/Wisma Praja	Kel. Brang Bara Kec. Sumbawa
4	Bala Kuning	Kel. Seketeng Kec. Sumbawa
5	Batu Bertulis	Kel. Seketeng Kec. Sumbawa
6	Bala Datu Ranga	Kel. Pekat Kec. Sumbawa
7	Makam Karongkeng	Desa Karongkeng Kec. Tarano
8	Ai Renung	Desa Batu Tering Kec. Moyo Hulu
9	Lutuk Batu Peti	Desa Kuang Amo Kec. Moyo Hulu
10	Tarakin	Desa Kuang Amo Kec. Moyo Hulu
11	Raboran	Desa Sebasang Kec. Moyo Hulu
12	Makam Ponan	Desa Poto Kec. Moyo Hilir
13	Makam Lala Bunte	Desa Pemasar Kec. Maronge
14	Temang Dongan	Desa Pungkit Kec. Lopok
15	Batu Tata	Desa Punik Kec. Batu Lanteh
16	Batu Bergores	Desa Tepal Kec. Batu Lanteh
17	Patung Batu	Kec. Ropang
18	Kuber Tana Belo	Desa Olat Rawa Kec. Moyo Hilir
19	Batu Masjid	Desa Olat Rawa Kec. Moyo Hilir
20	Lakemudi	Desa Ngeru Kec. Moyo Hilir
21	Makam Lala Bulan	Desa Batu Bulan Kec. Moyo Hulu
22	Kuber Peti	Desa Poto Kec. Moyo Hilir
23	Batu Tempayan	Desa Mata Kec. Tarano
24	Keramat Endagu	Desa Lab. Jambu Kec. Tarano
25	Bala Dea Imam	Desa Empang Atas Kec. Empang
26	Batu Gong	Desa Pukat Kec. Utan
27	Makam Orong Bawa	Desa Orong Bawa Kec. Utan
28	Makam Faqih Ismail	Desa Motong Kec. Utan
29	Keramat Mampis	Desa Luar Kec. Alas
30	Lesung Batu	Desa Brangkolong Kec. Plampang
31	Batu Tapak Kaki	Desa Tangkan Pulit Kec. Moyo Hulu
32	Sampar Rhee	Dusun Kalimango Kec. Moyo Hulu
33	Makam Pua Bongan	Desa Labuhan Burung Kec. Buer
34	Liang Nemunri	Desa Dalam Kec. Alas
35	Makam Dea Busing	Kec. Lape
36	Batu Pemanto	Mate Mega Kec. Alas
37	Makam Datu Puti Geti	Kel. Brang Biji Kec. Sumbawa
38	Patung Kebo	Desa Jamu Kec. Lunyuk
39	Buin Ai Awak	Kel. Seketeng Kec. Sumbawa
40	Batu Nong	Desa Lekong Kec. Alas Barat
41	Makam Keramat	Labu Bua Kec. Utan
42	Bala Datu Alas	Desa Dalam Kec. Alas

*Sumber: Disporabudpar Kab. Sumbawa*

### **17. Urusan Wajib Perpustakaan**

Gambaran perkembangan ketersediaan perpustakaan, koleksi buku dan pengunjung perpustakaan di Kabupaten Sumbawa dalam 5 tahun terakhir

dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.117**  
**Jumlah Perpustakaan Tahun 2011-2015 Di Kabupaten Sumbawa**

No	Uraian	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1.	Jumlah Perpustakaan milik Pemerintah Daerah	1	1	1	1	1
2.	Jumlah Perpustakaan milik non pmda	1	1	1	1	2
3.	Total Perpustakaan (1+2)	2	2	2	2	3

*Sumber: Kantor Arpusda Kab. Sumbawa*

Banyaknya jumlah perpustakaan akan menggambarkan kapasitas yang dimiliki oleh daerah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat umum dalam memberikan bahan pustaka kepada masyarakat pengguna perpustakaan, dalam rangka meningkatkan mutu kehidupan masyarakat serta sebagai penunjang kelangsungan pelayanan pendidikan.

Penyediaan perpustakaan di kecamatan pada dasarnya adalah salah satu upaya dalam rangka menunjang peningkatan akses masyarakat dalam memenuhi rasa ingin tahunya, yang dalam prosesnya juga akan membantu mensukseskan program peningkatan minat baca masyarakat. Gambaran ketersediaan perpustakaan pada masing-masing kecamatan di Kabupaten Sumbawa disajikan sebagai berikut.

**Tabel 2.118**  
**Jumlah Perpustakaan Tahun 2011 – 2015 Di Kabupaten Sumbawa**

No	Kecamatan	Jumlah Perpustakaan/Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1	Sumbawa	42	42	42	44	47
2	Unter Iwes	21	24	24	24	28
3	Moyo Utara	12	13	14	15	15
4	Moyo Hilir	24	27	27	27	31
5	Lape	16	16	16	16	22
6	Lopok	17	18	18	18	21
7	Maronge	15	15	15	15	17
8	Plampang	25	27	27	29	32
9	Labangka	15	16	18	18	19
10	Empang	18	21	21	21	27
11	Moyo Hulu	22	25	25	25	32
12	Lenangguar	13	13	13	13	14
13	Lunyuk	14	15	15	15	23
14	Rhee	11	11	11	11	12
15	Utan	20	22	22	22	26
16	Alas	20	22	23	24	30
17	Alas Barat	17	19	19	19	25
18	Buer	14	15	15	15	20
19	Labuhan Badas	14	18	18	18	20
20	Batu Lanteh	8	8	8	10	17
21	Tarano	12	14	14	14	15
22	Ropang	1	3	3	3	4

No	Kecamatan	Jumlah Perpustakaan/Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
23	Orong Telu	1	2	2	2	5
<b>Jumlah</b>		<b>372</b>	<b>406</b>	<b>410</b>	<b>418</b>	<b>502</b>

Sumber : Kantor Arpusda Kab. Sumbawa.

Gambaran layanan Perpustakaan Daerah Kabupaten Sumbawa menyangkut koleksi buku dan pengunjung selama beberapa tahun terakhir dapat disajikan sebagai berikut.

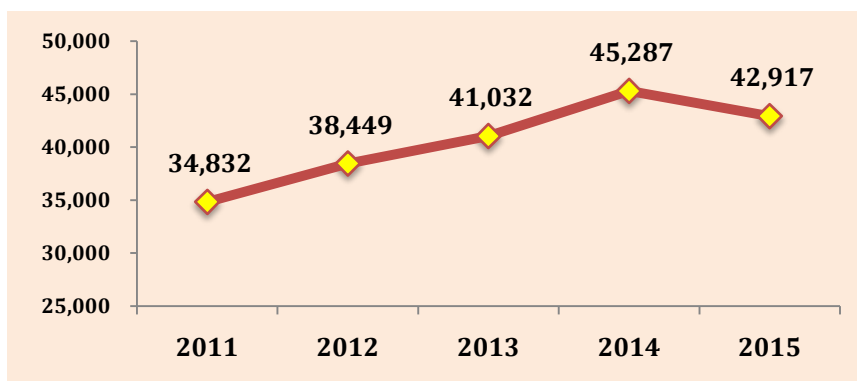
**Tabel 2.119**  
**Koleksi Buku Dan Pengunjung Perpustakaan Daerah**  
**Tahun 2011-2015 Di Kabupaten Sumbawa**

No	Uraian	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1.	Jumlah koleksi buku (eksp)	82.785	29.801	32.773	35.023	38.998
2.	Jumlah pengunjung (orang)	34.832	38.449	41.032	45.285	42.917

Sumber: Kantor Arpusda Kab. Sumbawa

Meningkatnya jumlah koleksi buku dan pengunjung perpustakaan daerah Kabupaten Sumbawa menunjukkan ekspektasi positif bagi upaya peningkatan minat baca masyarakat dan pada muaranya akan meningkatkan kualitas SDM Kabupaten Sumbawa. Kendala yang dihadapi selama ini terletak pada sarana prasarana layanan (kantor, ruang baca, komputer, dan penunjang lainnya, sarana mobilitas layanan) yang masih kurang memadai dan membutuhkan perhatian serius pada masa mendatang.

Perkembangan pengunjung perpustakaan selama tahun 2011-2015 di Kabupaten Sumbawa, tergambar sebagai berikut.



**Gambar 2.39**  
**Perkembangan Jumlah Pengunjung Perpustakaan**  
**Selama Tahun 2011-2015 Di Kabupaten Sumbawa**

## 18. Urusan Wajib Kearsipan

Gambaran umum kondisi daerah terkait penyelenggaraan urusan kearsipan di Kabupaten Sumbawa terlihat pada penerapan pengelolaan arsip secara baku dan ketersediaan SDM pengelola kearsipan (arsiparis).

### a. Penerapan pengelolaan arsip secara baku

Arsip merupakan dokumen yang berisi data/informasi beberapa tahun ke belakang. Keberadaan arsip sesungguhnya teramat sangat penting untuk

mengingatkan peristiwa/kejadian/kronologis pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan arsip secara baku. Pada jajaran pemerintahan daerah pengelolaan arsip secara baku dilaksanakan oleh masing-masing SKPD dan kumpulan arsip yang dipandang penting namun karena keterbatasan sarana penyimpanan di SKPD di sediakan lembaga Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah. Gambaran umum pengelolaan arsip secara baku di Kabupaten Sumbawa disajikan sebagai berikut.

**Tabel 2.120**  
**Pengelolaan Arsip Secara Baku Di Kabupaten Sumbawa**

No	Uraian	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1	Jumlah SKPD Yang Menerapkan Arsip Secara Baku	3	3	4	5	5
2	Jumlah SKPD di Kabupaten Sumbawa	56	56	56	56	56
3	Persentase SKPD Yang Menerapkan Arsip Secara Baku di Kabupaten Sumbawa	5,4	5,4	7,1	8,9	8,9

*Sumber: Kantor Arpusda Kab. Sumbawa, 2015.*

#### **b. Ketersediaan SDM pengelola kearsipan (arsiparis)**

Pengelolaan arsip secara terpadu memerlukan teknik/cara yang baik, benar dan dilakukan secara terintegrasi. Untuk itu harus dilakukan oleh tenaga-tenaga yang secara khusus dilatih untuk menjadi arsiparis. Ketersediaan arsiparis di Kabupaten Sumbawa digambarkan sebagai berikut.

**Tabel 2.221**  
**Pengelola Arsip Secara Terpadu Di Kabupaten Sumbawa**

No	Uraian	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1	Jumlah pengelola arsip terpadu yang diperlukan	-	-	78	78	90
2	Jumlah pengelola arsip terpadu terlatih	12	20	20	20	20
3	Persentase pengelola arsip terpadu terlatih	-	-	25,64	25,64	22,22

*Sumber: Kantor Arpusda Kab. Sumbawa, 2015.*

### **2.3.2 Fokus Urusan Pilihan**

#### **2.3.2.1 Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan**

##### **a. Potensi lahan dan pemanfaatan potensi lahan**

Gambaran umum penyelenggaraan urusan kelautan dan perikanan di Kabupaten Sumbawa diantaranya dapat dilihat dari tingkat pemanfaatan potensi lahan, baik untuk perikanan laut, perairan umum, perairan air tawar dan air payau, seperti disajikan sebagai berikut.



**Tabel 2.222**  
**Potensi Dan Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan Tahun 2015**  
**Di Kabupaten Sumbawa**

No	Sumber Daya	Potensi		Dimanfaatkan			
		Luas (Ha)	Prod (ton)	Luas (Ha)	%	Prod (ton)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Perikanan Laut						
	a. Perikanan Tangkap						
	1. P. Pantai	677.600	24.864	677.600	100	38.021,60	152,92
	2. P. Lepas Pantai	900.000	30.789	562.554,48	62,51	9.122,21	29,63
	3. Z E E	7.400.000	203.390	37.435,18	0,51	991,12	0,49
	<b>Jumlah</b>	<b>8.977.600</b>	<b>259.043</b>	<b>1.277.589,66</b>	<b>14,23</b>	<b>48.134,93</b>	<b>18,58</b>
	b. Perikanan Budidaya						
	1. Budidaya Rumput Laut	14.950	897.000	9.710,41	64,95	364.919,30	40,68
	2. Budidaya Kerapu	1.200	15.080	287,54	23,96	351,10	2,33
	3. Budidaya Mutiara	5.700	13,40	2.181	38,26	1,11	8,28
	<b>Jumlah</b>	<b>21.850</b>	<b>912.093,40</b>	<b>12.178,95</b>	<b>55,74</b>	<b>365.271,51</b>	<b>40,05</b>
II	Perairan Umum						
	1. Waduk Dam	1.074,31	1.611,47	753,18	70,11	1.668,70	103,55
	2. Sungai	900	900	821,76	91,31	398,90	44,32
	3. Laguna	50	50	24	48,00	29,83	59,66
	<b>Jumlah</b>	<b>2.024,31</b>	<b>2.561,47</b>	<b>1.598,94</b>	<b>78,99</b>	<b>2.097,43</b>	<b>81,88</b>
III	Perairan Air Tawar						
	1. Kolam	1.464	5.856	291,60	19,92	1.708,95	29,18
	2. Sawah/mina Padi	398,2	398,20	6,83	1,72	9,20	2,31
	3. Kerambah/KJA	406,20	812	22	5,42	109,30	13,46
	<b>Jumlah</b>	<b>2.268,40</b>	<b>7.066,20</b>	<b>320,43</b>	<b>14,13</b>	<b>1.827,45</b>	<b>25,86</b>
IV	Perairan Air Payau						
	1. Tambak	10.375	140.000	3.516,50	33,89	75.257,95	53,76
	<b>Jumlah</b>	<b>10.375</b>	<b>140.000</b>	<b>3.516,50</b>	<b>33,89</b>	<b>75.257,95</b>	<b>53,76</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>9.014.117,71</b>	<b>1.320.764,07</b>	<b>1.295.204,48</b>	<b>14,37</b>	<b>492.589,27</b>	<b>37,30</b>

*Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa 2015*

Pada tahun 2015 pemanfaatan lahan untuk pembangunan urusan kelautan dan perikanan secara kumulatif baru mencapai 14,37% dari luas lahan potensinya. Ini menunjukkan bahwa peluang pengembangan sangat terbuka di masa yang akan datang. Gambaran pemanfaatan sumberdaya lahan perikanan beberapa tahun terakhir disajikan sebagai berikut.

**Tabel 2.223**  
**Potensi Dan Pemanfaatan Sumberdaya Lahan Perikanan**  
**Tahun 2011-2015 Di Kabupaten Sumbawa**

No	Sumber Daya	Luas Potensi (Ha)	Pemanfaatan (Ha)				
			2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Perikanan Laut						
	a. Perikanan Tangkap	8.977.600	964.322	967.189	967.300,00	1.277.589,66	1.371.569,66
	b. Perikanan Budidaya	21.850	9.510	9.677	12.000,41	12.178,95	12.566,70
II	Perairan	2.024,31	1.523	1.559,1	2.313,00	1.598,94	1.608,94

	Umum			2			
II	Perairan Air Tawar	2.268,40	144,67	153,27	196,02	320,43	328,77
I	Perairan Air Payau	10.375	2.807,30	2.868,41	3.016,50	3.516,50	3.601,50
	<b>TOTAL</b>	<b>9.014.117,71</b>	<b>975.355</b>	<b>981.446,8</b>	<b>984.825,83</b>	<b>1.295.204,48</b>	<b>1.389.675,57</b>

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa 2015

### b. Produksi Perikanan

Produksi perikanan yang paling dominan di Kabupaten Sumbawa adalah perikanan tangkap. Gambaran tingkat produksi perikanan di Kabupaten Sumbawa setiap tahunnya pada beberapa tahun terakhir disajikan sebagai berikut.

**Tabel 2.224**  
**Potensi Dan Produksi Perikanan Tahun 2011-2015**  
**Di Kabupaten Sumbawa**

No	Sumber Daya	Potensi (Ton)	Produksi (Ton)				
			2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Perikanan Tangkap	408.670,67	45.373,18	46.554,00	48.649,00	50.232,36	52.234,29
2	Perikanan Budidaya	912.043,40	131.904,99	195.225,20	312.176,65	442.356,91	683.892,96
	<b>Total</b>	<b>1.320.764,07</b>	<b>177.279,02</b>	<b>241.779,20</b>	<b>360.825,65</b>	<b>492.599,27</b>	<b>736.127,24</b>

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa 2015

Produksi perikanan Kabupaten Sumbawa merupakan salah satu dari 10 Kabupaten/kota di NTB sejak Tahun 2011–2015 yang memberikan kontribusi cukup besar, yaitu rata-rata 37,56%.

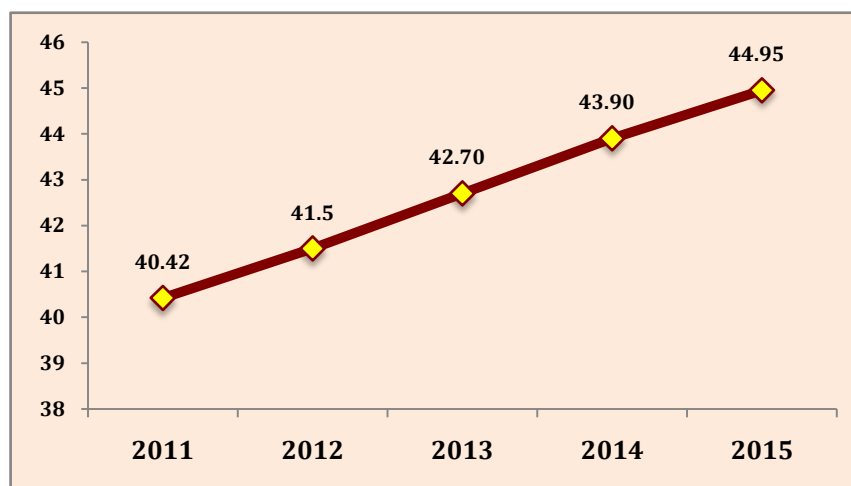
**Tabel 2.225**  
**Produksi Perikanan Kabupaten Sumbawa Terhadap Provinsi NTB**  
**Tahun 2011-2015**

Tahun	Kab. Sumbawa	Provinsi NTB	Proporsi (%)	Growth KS (%)	Growth NTB (%)
1	2	3	4	5	6
2011	177.279,02	589.566,96	30,07	-	-
2012	241.779,20	683.208,68	35,39	36,38	15,88
2013	360.825,65	886.135,45	40,72	49,24	29,70
2014	492.599,27	1.117.855,66	44,07	36,52	26,15
2015	736.127,24	NA	-	49,44	-
Rata-Rata	401.722,08	819.191,69	37,56	42,89	23,91

Sumber: DDA NTB dan DDA Kab. Sumbawa, 2015

### c. Konsumsi Ikan

Sebagai penyedia bahan pangan untuk memenuhi protein hewani masyarakat, konsumsi ikan di Kabupaten Sumbawa mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Tingkat konsumsi ikan per kapita pada tahun 2011 mencapai 40,42 kg/kapita, meningkat menjadi 44,95 kg/kapita pada tahun 2015 dengan pertumbuhan sebesar 11,21%.



**Gambar 2.40**  
**Perkembangan Konsumsi Ikan (kg/kapita)**  
**Tahun 2011-2015 Di Kabupaten Sumbawa**

Hal ini menggambarkan bahwa produk perikanan untuk dikonsumsi tersedia cukup, baik yang berasal dari kegiatan penangkapan ikan maupun budidaya. Selain itu, peningkatan capaian rata-rata konsumsi ikan per kapita tersebut juga menggambarkan bahwa pelaksanaan kebijakan dan kampanye Gemar Makan Ikan memberikan hasil yang signifikan.

#### **d. Cakupan pembinaan kelompok nelayan**

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan cakupan pembinaan kelompok budidaya rumput laut dan kelompok nelayan, secara berturut-turut disajikan sebagai berikut.

**Tabel 2.226**

**Jumlah Kelompok Budidaya Rumput Laut Per Kecamatan Tahun 2015**

<b>No</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Jumlah Kelompok</b>	<b>Jumlah Pembudidaya</b>	<b>Jumlah Kelompok Penerima Bantuan</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1	Alas Barat	24	289	4
2	Buer	27	112	12
3	Lab. Badas	21	388	1
2	Moyo Hilir	20	379	3
3	Lape	18	273	3
4	Plampang	19	315	4
5	Maronge	13	226	3
6	Tarano	35	352	3
7	Alas	1	30	0
8	Utan	2	45	0
9	Moyo Utara	2	20	1
10	Rhee	1	10	0
	<b>Total</b>	<b>183</b>	<b>2.439</b>	<b>34</b>

*Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Sumbawa, 2015*

**Tabel 2.227**  
**Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap Per Kecamatan Tahun 2015**

<b>No</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Jumlah Kelompok (RTP)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1	Lunyuk	212
2	Alas	258
3	Alas Barat	315
4	Buer	263
5	Utan	412
6	Rhee	187
7	Sumbawa	20
8	Labuhan Badas	1175
9	Moyo Hilir	333
10	Moyo Utara	132
11	Moyo Hulu	193
12	Lape	352
13	Lopok	103
14	Plampang	484
15	Labangka	51
16	Maronge	298
17	Empang	106
18	Tarano	573
<b>Jumlah</b>		<b>5.467</b>

*Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Sumbawa, 2015*

### **2.3.2.2 Urusan Pilihan Pariwisata**

#### **a. Jumlah kunjungan wisatawan**

Perkembangan kondisi pariwisata di Kabupaten Sumbawa menunjukkan gejala positif yang ditandai dengan meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan dari tahun ke tahun, terutama wisatawan lokal. Pada tahun 2015 terdapat kunjungan sebanyak 71.682 wisatawan yang terdiri dari WNI 69.944 wisatawan dan WNA 1.738 wisatawan. Perkembangan kondisi kunjungan wisata selengkapnya sebagai berikut.

**Tabel 2.228**  
**Jumlah Kunjungan Wisatawan Tahun 2011-2015**  
**Di Kabupaten Sumbawa**

<b>No</b>	<b>Uraian</b>	<b>Jumlah Wisatawan (Orang)</b>				
		<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1.	Wisatawan WNI	38.691	40.130	81.763	42.816	69.944
2.	Wisatawan WNA	3.062	3.233	3.340	2.447	1.738
3.	Jumlah kunjungan wisatawan	41.753	43.363	85.103	45.263	71.682

*Sumber: Disporabudpar Kab. Sumbawa*

#### **b. Tingkat hunian hotel**

Data fasilitas hotel di Kabupaten Sumbawa sampai dengan tahun 2015 disajikan pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.229**  
**Fasilitas Hotel Sampai Dengan Tahun 2015 Di Kabupaten Sumbawa**

<b>No</b>	<b>Nama Hotel</b>	<b>Type</b>	<b>Lokasi/Alamat</b>	<b>Jumlah Kamar</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1	Amanwana Resort	Bintang 4	Pulau Moyo Kec. Lab. Badas	20
2	Laguna Biru	Bintang 2	Kecamatan Lab. Badas	9
3	Kencana Beach	Bintang 1	Kecamatan Lab. Badas	19
4	Tambora	Melati 3	Sumbawa Besar	30
5	Samawa SeaSide Cottage	Bintang 1	Kecamatan Moyo Utara	11
6	Transit Hotel	Melati 3	Kecamatan Sumbawa	37
7	Cendrawasih	Melati 3	Kecamatan Sumbawa	23
8	Tirta sari	Melati 3	Kecamatan Lab. Badas	21
9	Parahiyangan	Melati 2	Kecamatan Sumbawa	34
10	Sutan Hotel	Melati 2	Kecamatan Sumbawa	24
11	Garuda Hotel	Melati 3	Kecamatan Sumbawa	25
12	Sernu Raya	Melati 2	Kecamatan Sumbawa	35
13	Dewi	Melati 2	Kecamatan Sumbawa	31
14	Harapan	Melati 2	Kecamatan Sumbawa	23
15	Suci	Melati 2	Kecamatan Sumbawa	30
16	Jayanni	Melati 2	Kecamatan Sumbawa	27
17	Cirebon	Melati 2	Kecamatan Sumbawa	42
18	Samawa Rea	Melati 2	Kecamatan Sumbawa	12
19	Dian	Melati 2	Kecamatan Sumbawa	25
20	Eksekutif	Melati 2	Kecamatan Unter Iwes	7
21	Anda	Melati 2	Kecamatan Alas	11
22	Garoto	Melati 1	Kecamatan Sumbawa	20
23	Baru	Melati 1	Kecamatan Sumbawa	10
24	Mekar Sari	Melati 1	Kecamatan Sumbawa	13
25	Sumbawa	Melati 1	Kecamatan Sumbawa	10
26	Tunas	Melati 1	Kecamatan Sumbawa	12
27	Bala Kembar	Melati 1	Kecamatan Empang	12
28	Lina	-	Kecamatan Plampang	6
29	Telaga	Melati 1	Kecamatan Alas	11
30	Saudara	Melati 1	Kecamatan Sumbawa	10
31	Selamat	Melati 1	Kecamatan Alas	6
32	Tarano Jaya	-	Kecamatan Tarano	9
33	Pesanggerahan Empang	Melati 1	Kecamatan Empang	6
			Total Jumlah Kamar	621

*Sumber: Disporabudpar Kab. Sumbawa*

Tingkat hunian hotel di Kabupaten Sumbawa disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 2.230**  
**Tingkat hunian hotel Tahun 2011-2015 Di Kabupaten Sumbawa**

No	Uraian	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
1.	Jumlah Kamar Hotel	544	558	585	573	621
2.	Jumlah tamu hotel	56.313	58.272	48.992	55.394	
3.	Tingkat hunian hotel	18,25	16,09	19,23	18,64	

*Sumber: BPS (Sumbawa Dalam Angka, beberapa tahun terbitan)*

### 2.3.2.3 Urusan Pilihan Pertanian

#### a. Pertanian Tanaman Pangan

##### 1. Produksi

Tanaman padi yang merupakan bahan makanan pokok masyarakat merupakan komoditas strategis. Kabupaten Sumbawa merupakan daerah lumbung padi secara regional bahkan nasional. Dalam kurun waktu 2011-2015 terjadi peningkatan luas panen dari 79.270 Ha menjadi 96.479 Ha atau meningkat 21,71%, sedangkan produksinya meningkat 27,22% dari 390.940 ton menjadi 497.351 ton. Demikian pula produktivitasnya naik 4,53% dari 4,93 ton/ha menjadi 5,16 ton/ha. Peningkatan semua indikator tersebut berada diatas rata-rata NTB.

**Tabel 2.231**  
**Perbandingan Luas Panen, Produksi Dan Produktivitas Padi**

Tahun	Kab. Sumbawa			Prov. NTB		
	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Ton/Ha)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Ton/Ha)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
2011	79.270	390.940	4,93	418.062	2.067.137	4,94
2012	86.024	418.489	4,86	425.448	2.114.231	4,97
2013	90.745	477.777	5,27	438.057	2.193.698	5,01
2014	87.531	449.223	5,13	433.712	2.116.637	4,88
2015	96.479	497.351	5,16	n/a	n/a	n/a
Rata-2 Growth	5,17%	6,49%	1,20%	1,25%	0,84%	-0,42%

*Sumber: Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Sumbawa*

Selain padi, jagung merupakan salah satu produk unggulan di Kabupaten Sumbawa. Pertumbuhan luas areal panen dalam 5 tahun terakhir meningkat sangat signifikan yaitu 91,06%, dengan pertumbuhan produksi sebesar 150,74%, dan produktivitasnya tumbuh 31,24%. Perbandingan luas panen, produksi dan produktivitas jagung di Kabupaten Sumbawa disajikan sebagai berikut.

**Tabel 2.232**  
**Perbandingan Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Jagung**

Tahun	Kab. Sumbawa			Prov. NTB		
	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Ton/Ha)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Ton/Ha)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
2011	26.065	132.554	5,09	89.307	456.915	5,12
2012	35.324	192.391	5,45	117.030	642.674	5,49
2013	38.174	218.466	5,72	110.273	633.773	5,75
2014	43.043	287.258	6,67	126.577	785.864	6,21
2015	49.800	332.366	6,67	n/a	n/a	n/a
Rata-2 Growth	18,01%	26,47%	7,20%	13,35%	21,09%	6,67%

*Sumber: Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Sumbawa*

Selain padi dan jagung, kedelai dan ubi kayu juga termasuk produk unggulan di Kabupaten Sumbawa. Pertumbuhan produktivitas kedelai dan ubi kayu dalam kurun waktu tahun 2011-2015 meningkat cukup signifikan dengan rincian: pertumbuhan produktivitas kedelai tumbuh sebesar 4,46%, dari 1,50 Ton/Ha di tahun 2011 menjadi 1,57 Ton/Ha pada tahun 2015; sedangkan ubi kayu mengalami pertumbuhan produktivitas sebesar 8,55%, dari 14,61 Ton/Ha di tahun 2011 menjadi 15,86 Ton/Ha pada tahun 2015.

**Tabel 2.233**  
**Luas Panen, Produksi Dan Produktivitas Kedelai Dan Ubi Kayu Tahun 2011-2015 Di Kabupaten Sumbawa**

No	Tahun	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Ton/Ha)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	<b>Kedelai</b>			
	2011	4.357	6.549	1,50
	2012	3.128	3.128	1,00
	2013	4.763	5.594	1,17
	2014	8.483	13.319	1,57
	2015	7.455	11.705	1,57
	Rata-2 Growth	22,51%	38,14%	4,42%
2	<b>Ubi Kayu</b>			
	2011	339	4.952	14,61
	2012	321	4.326	13,48
	2013	712	10.500	14,75
	2014	384	6.089	15,86
	2015	238	3.774	15,86
	Rata-2 Growth	8,10%	12,51%	2,30%

*Sumber: BPS (Sumbawa dalam angka, 2015) dan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Sumbawa*

## **2. Pencetakan sawah baru**

Dalam rangka mewujudkan Kabupaten Sumbawa sebagai daerah agribisnis, maka ekstensifikasi seperti pencetakan sawah baru, perluasan areal tanam, serta usaha intensifikasi pertanian mutlak perlu dilakukan.

**Tabel 2.234**  
**Percetakan Sawah Baru Tahun 2011-2015 (Ha) Di Kabupaten**  
**Sumbawa**

NO	Lokasi/Kecamatan	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1	Sumbawa	-	15,09	10	-	-
2	Rhee	10	42,20	159	-	-
3	Buer	10	25,76	55	-	-
4	Alas Barat	15	45,15	100	-	-
5	Moyohilir	20	286,83	285	-	-
6	Moyo Utara	15	23,95	70	-	-
7	Moyo Hulu	105	283,39	430	-	-
8	Lenangguar	110	145	30	-	-
9	Lunyuk	110	87,97	110	-	-
10	Orong Telu	10	-	15	-	-
11	Lape	15	62,44	218	-	-
12	Lopok	20	156,07	302	-	-
13	Plampang	50	252,27	405	-	-
14	Maronge	40	73,52	135	-	-
15	Empang	40	298,3	383	-	-
16	Tarano	30	143,34	60	-	-
17	Unter Iwes	-	83	30	-	-
18	Batulanteh	-	30	-	-	-
19	Alas	-	46,11	70	-	-
20	Labangka	-	-	35	-	-
21	Lantung	-	-	110	-	-
22	Utang	-	-	137	-	-
23	Lab. Badas	-	-	30	-	-
24	Ropang	-	-	-	-	-
	<b>Total</b>	<b>600</b>	<b>2.000</b>	<b>3.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*Sumber: Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Sumbawa, 2015*

## 2. Kelompok Tani Binaan

Kelompok tani dan gabungan kelompok tani yang dibina di Kabupaten Sumbawa disajikan sebagai berikut.

**Tabel 2.235**  
**Jumlah Kelompok Tani Dan Gapoktan Kabupaten Sumbawa**  
**Per Kecamatan Tahun 2015**

No	Kecamatan	Jumlah Pok Tani	Jumlah Gapoktan	Kelas			
				Pemula	Lanjut	Madya	Utama
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
1	Alas Barat	106	8	23	71	12	0
2	Alas	58	6	7	33	14	4
3	Buer	79	6	18	52	9	0
4	Utang	154	15	22	115	15	2
5	Rhee	64	5	22	41	1	0
6	Lab. Badas	41	3	16	24	1	0



No	Kecamatan	Jumlah Pok Tani	Jumlah Gapoktan	Kelas			
				Pemula	Lanjut	Madya	Utama
1	2	3	4	5	6	7	8
7	Batulanteh	109	4	94	14	0	1
8	Sumbawa	52	7	25	24	3	0
9	Unter Iwes	93	7	41	44	7	1
10	Moyo Hilir	258	12	103	152	3	0
11	Moyo Utara	114	6	67	46	1	0
12	Moyo Hulu	257	14	91	166	0	0
13	Ropang	83	2	47	34	2	0
14	Lenangguar	90	5	1	88	1	0
15	Lantung	58	4	34	22	2	0
16	Lunyuk	225	10	109	114	2	0
17	Orong Telu	53	4	1	52	0	0
18	Lape	155	5	52	100	3	0
19	Lopok	184	6	85	85	13	1
20	Plampang	390	11	87	292	11	0
21	Labangka	83	5	31	48	4	0
22	Maronge	132	2	71	53	8	0
23	Empang	251	10	123	121	7	0
24	Tarano	141	8	59	71	11	0
	<b>Jumlah</b>	<b>3.230</b>	<b>165</b>	<b>1.229</b>	<b>1.862</b>	<b>130</b>	<b>9</b>

Sumber: Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Sumbawa, 2015

## b. Peternakan

### 1. Peningkatan populasi

Populasi ternak besar di Kabupaten Sumbawa, hasil registrasi tahun 2011-2015 menunjukkan statistik sebagai berikut.

**Tabel 2.236**  
**Populasi Ternak Tahun 2011-2015 Di Kabupaten Sumbawa**

No	Jenis Ternak	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1.	Sapi Bali	164.505	193.907	206.923	211.677	222.153
2.	Sapi Sumbawa	2.830	3.234	4.046	4.490	6.673
3.	Kerbau Sumbawa	55.706	54.022	50.857	49.752	45.595
4.	Kuda Sumbawa	38.505	39.660	38.282	36.441	32.452
5.	Kambing	39.396	38.368	35.002	36.589	34.570
6.	Domba	1.363	1.617	1.840	1.612	1.412
7.	Babi	6.159	7.764	7.972	10.106	8.794

No	Jenis Ternak	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
8.	Ayam Ras Pedaging	287.346	332.800	328.450	1.049.152	1.037.612
9.	Ayam Buras	652.733	678.451	691.578	668.437	629.969
10.	Itik	10.203	11.693	10.805	11.779	12.022
11.	Entok	6.687	6.241	6.392	6.458	5.317
	<b>Jumlah</b>	<b>1.265.433</b>	<b>1.367.757</b>	<b>1.382.147</b>	<b>2.086.493</b>	<b>2.036.569</b>

Sumber: Laporan Tahunan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Sumbawa

Populasi Sapi Bali tahun 2011 sampai tahun 2015 meningkat rata-rata sebesar 7,96% per tahun, Sapi Sumbawa meningkat rata-rata 24,74%, Kerbau Sumbawa menurun rata-rata 4,85%, Kuda Sumbawa menurun rata-rata 4,06%.

Selanjutnya potensi pengembangan kawasan peternakan sampai tahun 2015, tersebar di beberapa kecamatan, dan untuk saat ini sebaran populasi terbesar berada pada: (1) Sapi Bali (Kecamatan Moyo Hulu dan Moyo Hilir); (2) Sapi Sumbawa (Kecamatan Moyo Utara dan Lopok); (3) Kerbau Sumbawa (Kecamatan Empang, Moyo Hilir, Moyo Hulu, dan Lape); dan (4) Kuda Sumbawa (Kecamatan Empang dan Ropang).

**Tabel 2.237**  
**Sebaran Wilayah Ternak Per Kecamatan Tahun 2015**  
**Di Kabupaten Sumbawa**

No.	Kecamatan	Sapi Bali	Sapi Sumbawa	Kerbau Sumbawa	Kuda Sumbawa
1	2	3	4	5	6
1	Sumbawa	5.639	150	70	124
2	Unter Iwes	12.860	878	123	104
3	Lab. Badas	8.716	134	164	180
4	Utan	16.352	26	124	205
5	Rhee	5.479	2	60	78
6	Alas	3.271	-	362	662
7	Buer	3.605	-	173	299
8	Alas Barat	4.423	-	420	910
9	Batulanteh	5.059	75	267	1.585
10	Moyo Hulu	21.901	177	4.912	1.635
11	Ropang	5.556	19	291	4.175
12	Lenangguar	5.315	5	1.946	1.985
13	Lantung	2.845	32	245	1.543
14	Lunyuk	12.820	17	968	775
15	Orong Telu	4.700	26	1.079	1.653
16	Moyo Hilir	21.580	744	6.799	1.745
17	Moyo Utara	10.037	2.224	1.651	615
18	Lape	7.788	249	4.314	601

No.	Kecamatan	Sapi Bali	Sapi Sumbawa	Kerbau Sumbawa	Kuda Sumbawa
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
19	Lopok	15.501	1.305	2.674	2.354
20	Plampang	16.952	246	1.969	1.334
21	Maronge	6.032	248	2.884	251
22	Labangka	10.262	50	142	60
23	Empang	7.511	27	10.309	7.084
24	Tarano	7.949	39	3.649	2.495
<b>J U M L A H</b>		<b>222.153</b>	<b>6.673</b>	<b>45.595</b>	<b>32.452</b>

Sumber: Laporan Tahunan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Sumbawa, 2015

Adapun rata-rata pertumbuhan ternak di Kabupaten Sumbawa disajikan pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.238**  
**Pertumbuhan Ternak Di Kabupaten Sumbawa**

No	Ternak	Pertumbuhan				Rata-rata Pertumbuhan
		2012	2013	2014	2015	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1	Kuda	3,00%	-3,47%	-4,81%	10,95%	-4,06%
2	Sapi	17,81%	7,01%	2,46%	5,86%	8,29%
3	Kerbau	-3,02%	-5,86%	-2,17%	-8,36%	-4,85%
4	Kambing	-2,61%	-8,77%	4,53%	-5,52%	-3,09%
5	Domba	18,64%	13,79%	-12,39%	12,41%	1,91%
6	Babi	26,06%	2,68%	26,77%	12,98%	10,63%

Sumber: Laporan Tahunan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Sumbawa

## 2. Cakupan bina kelompok peternak

Gambaran umum mengenai kelompok tani binaan dalam bidang peternakan di Kabupaten Sumbawa disajikan sebagai berikut.

**Tabel 2.239**  
**Jumlah Kelompok Petani Ternak Berdasarkan Kelas Kelompok Tahun 2015 Di Kabupaten Sumbawa**

No	Kecamatan	Kelas				Jumlah
		Pemula	Lanjut	Madya	Utama	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1	Empang	41	22	-	-	63
2	Tarano	15	13	-	-	28
3	Plampang	31	20	-	-	51
4	Labangka	16	3	-	-	19
5	Maronge	25	9	-	-	34
6	Lape	29	5	-	-	34
7	Lopok	25	12	-	-	37
8	Moyo Hilir	66	31	-	-	97
9	Moyo Utara	36	13	-	-	49
10	Moyo Hulu	34	25	2	-	61

No	Kecamatan	Kelas				Jumlah
		Pemula	Lanjut	Madya	Utama	
1	2	3	4	5	6	7
11	Lenangguar	9	2	-	-	11
12	Ropang	15	1	-	-	16
13	Lantung	5	3	-	-	8
14	Orong Telu	7	2	-	-	9
15	Lunyuk	94	18	-	-	112
16	Sumbawa	51	8	1	-	60
17	Unter Iwes	36	5	5	-	46
18	Lab. Badas	43	15	-	-	58
19	Batulanteh	14	2	-	-	16
20	Utah	46	14	3	-	63
21	Rhee	11	2	-	-	13
22	Alas	87	15	2	-	104
23	Alas Barat	42	14	3	-	59
24	Buer	22	6	-	-	28
<b>Jumlah</b>		<b>800</b>	<b>260</b>	<b>16</b>		<b>1.076</b>

Sumber: Laporan Tahunan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Sumbawa 2015

### 3. Ketersediaan Lar Ternak

Ketersediaan lar (padang penggembalaan) ternak di Kabupaten Sumbawa disajikan sebagai berikut.

**Tabel 2.240**

#### **Jumlah dan Luas Lar (Padang Penggembalaan) Ternak Tahun 2015 Di Kabupaten Sumbawa**

No	Kecamatan / Desa	Nama Lar	Luas (Ha)	Keterangan
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>Plampang</b>			
	1. Sejari	<b>Sejari</b>	500	<b>Lab. Peternakan</b>
	2. Plampang	<b>Ai Ampuk</b>	400	<b>SK. Bupati No. 700 Th. 2000</b>
		( Dusun Pamunga )		
	3. M u e r	Padak Liyin	300	
		( Dusun Lb. Ala )		
		<b>Lutuk Kele</b>	200	<b>SK. Bupati No. 830 Th. 2000</b>
		( Dusun Br. Kolong )		
		Bukit Barisan	200	Permohonan Masy
		( 6 Mei 2002 )		
	4. Simu & Muer	Ponto	1.000	
		Biara	200	

<b>No</b>	<b>Kecamatan / Desa</b>	<b>Nama Lar</b>	<b>Luas (Ha)</b>	<b>Keterangan</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
	5. Teluk Santong	<b>Dusun Lab. Ala</b>	100	<b>SK. BUPATI</b>
<b>2</b>	<b>Maronge</b>			
	1. Maronge	<b>Tanak Dewa</b>	400	<b>SK. Bupati</b>
		( Dusun Maronge )		<b>No. 832 Th. 2000</b>
	2. Lab. Sangoro	Sampar Gurin	450	
		( Dusun Lb. Sangoro )		
<b>3</b>	<b>Empang</b>			
	1. Pers. Gapit	Lar Padak Nyarinying	200	
	2. Boal	<b>Kukit</b>	200	Permohonan Masy
		Lar Tiu Batang	300	
		Ai Pusai	500	
	3. Lamenta	Ai Nyir	500	
	4. Jotang	Melung	100	
		Somang	200	
	5. Ongko	Semangi	300	
<b>4</b>	<b>Tarano</b>			
	1. Batu Lanteh	Prapat	500	
	2. Lb. Aji/ Lb. Jambu	Gili Rakit	1.500	<b>SK. Bupati</b>
				<b>No. 1520 Th. 2000</b>
<b>5</b>	<b>Utan</b>			
	1. Motong	<b>Kuang Bira</b>	256	<b>SK. Bupati</b>
		Sepakat	300	<b>No. 1766 Th. 2010</b>
		( 1 Sept. 2003 )		Permohonan Masy
	2. Tengah	Lemak Segolong	351	
	3. Stowe Brang	Jorok Jati	197	
	4. Sabedo	Sampar Sabedo	175	
<b>6</b>	<b>Rhee</b>			

<b>No</b>	<b>Kecamatan / Desa</b>	<b>Nama Lar</b>	<b>Luas (Ha)</b>	<b>Keterangan</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
	1. L u k	Sampar Kuang Rea	358	
	2. R h e e	Sampar Bulu	411	
<b>7</b>	<b>Moyo Hilir</b>			
	1. Kakiang, Ngeru	B a d i	200	
	Berare, Moyo			
	2. Tanjung Bele	Lar Tanah Rentung	50	
	3. Ngeru, Kakiang	Lar P u n a	500	
<b>8</b>	<b>Moyo Utara</b>			
	1. Pungkit / Sebewe & Kukin	Olat Cabe	1.000	
		Pusuk Pepar		<b>SK. Bupati No. 650 Th. 2010</b>
		<b>Limung</b>	1.007	
	2. Penyaring	Lenang N A P	100	Permohonan Masy
<b>9</b>	<b>Lape</b>			
	1. Lab. Kuris	Pulau Ngali	600	
		Pulau Liang	400	
		Badi	300	
		Maja	300	
<b>10</b>	<b>Lopok</b>			
	1. L o p o k	Badi, Batuapi, Lenanggoal	800	
		Mate Jaran, Jeruk Bang,		
		Liang Bungir, Liang Layar		
	2. M a m a	Serara	260	
		Ponto	370	
<b>10</b>	<b>Lunyuk</b>			
	1. Jelapang	Jelapang	8	
	2. P l a r a	Sampar Rau	10	

<b>No</b>	<b>Kecamatan / Desa</b>	<b>Nama Lar</b>	<b>Luas (Ha)</b>	<b>Keterangan</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
	3. K r i d a	Lenang Kaliang	50	
	4. Mekar Sari	Lapan Jontal	75	
<b>1 1</b>	<b>Moyo Hulu</b>			
	1. Semamung	Kuang Ai Suir	100	
	2. L i t o	P e n u a	50	
		Labakung	100	
	3. Batu Tering	Sangka Bulan	30	
		Ragan Goa	100	
		Seberak	100	
<b>1 2</b>	<b>R o p a n g</b>			
	1. Ropang / Lebin	Kake, Sampar Selam, Sebunga	3.000	
		Sampar Pola, Telamir, Popok, Penak	2.000	
<b>1 3</b>	<b>Lenangguar</b>			
	1. Lenangguar	Sedado, Sering	1.000	
		Uma Ramung	500	
	2. Tatebal	Sampar Bukal	1.500	
		Buin Balit, Temutung	500	
<b>1 4</b>	<b>Lantung</b>			
	1. L a n t u n g	Sampar Klisu	1.000	
		Sampar Liang Jonge	1.000	
<b>1 5</b>	<b>Alas Barat</b>			
	1. Mapin Kebak	Bara Mayung (Dsn. Ai Jati )	75	
		Ai Selayar		

No	Kecamatan / Desa	Nama Lar	Luas (Ha)	Keterangan
1	2	3	4	5
			100	
<b>Total Seluruh Luas</b>			<b>27.283</b>	

Sumber: Laporan Tahunan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Sumbawa 2015

#### 4. Jumlah pengeluaran ternak

Jumlah pengeluaran ternak ke luar daerah yang tercatat di Kabupaten Sumbawa disajikan sebagai berikut.

**Tabel 2.241**  
**Pengeluaran Ternak Ke Luar Daerah Tahun 2015**  
**Di Kabupaten Sumbawa**

No	Tahun	Sapi			Kerbau			Kuda Potong	Kuda Poni
		Potong	Hissar	Bibit	Potong	Betina NP	Bibit		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Tahun 2015	14.827	-	4.595	1.500	-	-	2.499	-
2	Tahun 2014	18.046	-	4.101	2.160	-	-	3.820	-
3	Tahun 2013	17.731	-	5.445	3.936	-	-	2.975	-
4	Tahun 2012	13.582	187	1.770	2.594	-	-	2.946	-
5	Tahun 2011	10.205	119	1.070	2.730	-	-	1.835	-

Sumber: Laporan Tahunan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Sumbawa 2015

#### 5. Jumlah pemotongan ternak

Jumlah pemotongan ternak di Kabupaten Sumbawa yang tercatat melalui Rumah Potong Hewan (RPH) disajikan sebagai berikut.

**Tabel 2.242**  
**Pemotongan Ternak Dan Jumlah Pejagal Tiap RPH**  
**Tahun 2015 Di Kabupaten Sumbawa**

No	RPH	Jenis Ternak (Ekor)				Jumlah Pejagal (Orang)
		Sapi	Kerbau	Kuda	Kambing	
1	2	3	4	5	6	7
1	RPH Bangkong	2.784	173	287	323	11
2	RPH Sabang	469	53	-	-	6
3	TPH Moyo Hulu	5	-	-	-	2
4	TPH Lenangguar	-	-	-	-	-
5	TPH Lunyuk	113	-	-	-	6
6	RPH Langam	253	188	-	-	6
7	RPH Plampang	294	204	6	-	7
8	RPH Empang	204	126	18	-	4
9	RPH Utan	217	120	-	-	4



No	RPH	Jenis Ternak (Ekor)				Jumlah Pejagal (Orang)
		Sapi	Kerbau	Kuda	Kambing	
1	2	3	4	5	6	7
10	RPH Alas	76	1.471	-	-	7
	<b>Jumlah</b>	<b>4.415</b>	<b>2.335</b>	<b>311</b>	<b>323</b>	<b>53</b>

Sumber: Laporan Tahunan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Sumbawa

## 6. Kasus kematian ternak

Salah satu masalah peternakan adalah adanya penyakit ternak yang pada akhirnya mengakibatkan kematian ternak. Kasus kematian ternak yang ditangani di Kabupaten Sumbawa sebagai berikut.

**Tabel 2.243**  
**Kasus Penyakit Ternak Yang Di Tangani Tahun 2015**  
**Di Kabupaten Sumbawa**

No	Jenis Penyakit	Jumlah Kasus
1	2	3
1	SC = Scabies	58
2	BEF = Bovine Epiferal Fever	301
3	HEL = Helminsiasis	383
4	AT = Anthrax	2
5	COC = Coccidiosis	46
6	PE = Pink Eye	7
7	SE = Septicaemi Epizootica	35
8	MCF = Malignant Cataral Fever	11
9	STR = Strangles	47
10	ORF	2
11	SA = Surra	25
12	TEL = Teleziasis	154
13	BZ = Baliziekte	81
14	SNOT	1
15	SAL = Salmonella	-
16	FA = Facsiliosis	14
17	Tym = Tympani	3
18	DEM = Demodex	1
	<b>Jumlah</b>	<b>1.171</b>

Sumber: Laporan Tahunan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Sumbawa, 2015

## c. Perkebunan

### 1. Produktivitas lahan perkebunan

Komoditas perkebunan di Kabupaten Sumbawa terdiri dari kelapa, kopi, jambu mente, kakao, kemiri, asam, kapuk, pinang, vanili, lontar dan jarak pagar. Adapun luasan areal perkebunan serta produksinya berdasarkan jenis komoditasnya disajikan secara berturut-turut sebagai berikut.

**Tabel 2.244**  
**Luas Areal (Ha) Komoditas Perkebunan Di Kabupaten Sumbawa**

Komoditas	Luas Areal (Ha)				Rata-rata pertumbuhan
	2012	2013	2014	2015	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
Kelapa	5.193,25	5.205,56	5.210,05	5.210,05	0,11%
Kopi	4.561,34	4.555,49	4.568,34	4.568,99	0,06%
Jambu Mente	6.509,43	6.503,72	6.341,93	6.337,13	-0,88%
Kakao	117,13	117,13	109,13	159,13	13,00%
Kemiri	969,47	977,98	969,37	969,47	0,00%
Asam	714,95	692,4	717,95	717,95	0,18%
Kapuk	441	422,68	439,55	439,55	-0,05%
Pinang	106,17	104,67	106,17	106,17	0,01%
Lontar	43,25	40,91	43,25	43,25	0,10%
Jarak Pagar	1.106,00	1.106	1.107,05	1.107,05	0,03%
Wijen	-	-	-	10	
Tembakau	125	-	-	110,3	
<b>Jumlah</b>	<b>19.886,99</b>	<b>19.726,54</b>	<b>19.612,79</b>	<b>19.779,04</b>	<b>-0,18%</b>

*Sumber: Laporan Tahunan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Sumbawa 2015*

Selanjutnya mengenai produksi masing-masing komoditas perkebunan di Kabupaten Sumbawa disajikan sebagai berikut.

**Tabel 2.245**  
**Produksi Komoditas Perkebunan Di Kabupaten Sumbawa**

Komoditas	Produksi (Ton)				Rata-rata pertumbuhan
	2012	2013	2014	2015	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
Kelapa	2.190,76	4.024,30	4.024,08	4.027,10	27,92%
Kopi	2.206,01	2.804,50	2.804,60	2.806,18	9,06%
Jambu mete	1.692,78	2.105,06	2.102,44	2.103,72	8,10%
Kakao		-	-	-	-
Kemiri	293,54	451,1	451,07	452,03	17,96%
Asam	569,17	517,7	515,5	515,83	-3,13%
Kapuk	123,14	161,52	160,76	161,02	10,29%
Pinang	25,26	-	-	46,52	
Lontar	-		29,49	29,19	-1,02%
Jarak Pagar	486,80		454,05	453,34	-0,16%
Tembakau	141,64	-	-	48,17	
Wijen	-	-	-	4,33	
<b>Jumlah</b>	<b>7.242,30</b>	<b>10.064,18</b>	<b>10.541,99</b>	<b>10.647,43</b>	<b>14,90%</b>

*Sumber: Laporan Tahunan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Sumbawa 2015*

Dengan memperbandingkan jumlah produksi dengan luasan areal setiap komoditas perkebunan diperoleh tingkat profuktivitas areal perkebunan sebagai berikut.

**Tabel 2.246**  
**Produktivitas Areal Perkebunan Di Kabupaten Sumbawa**

Komoditas	Produktivitas (Ton/Ha)				Rata-rata pertumbuhan
	2012	2013	2014	2015	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
Kelapa	0,422	0,773	0,772	0,773	27,75%
Kopi	0,484	0,616	0,614	0,614	9,02%
Jambu mete	0,260	0,324	0,332	0,332	9,01%
Kakao	-	-	-	-	-
Kemiri	0,303	0,461	0,465	0,466	17,81%
Asam	0,796	0,748	0,718	0,718	-3,33%
Kapuk	0,279	0,382	0,366	0,366	10,91%
Pinang	0,238	-	-	0,438	-
Vanili	-	-	0,682	0,675	-1,02%
Lontar	-	-	0,410	0,410	-0,16%
Jarak Pagar	1,133	-	-	0,437	-
Tembakau	-	-	-	0,433	-
Wijen	0,422	0,773	0,772	0,773	27,75%

Sumber: Laporan Tahunan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Sumbawa 2015

Memperhatikan tabel diatas, jika dilakukan perbandingan atau menghitung produktivitas tiap-tiap komoditas, menunjukkan bahwa produktivitasnya sangat kecil, hal ini disebabkan karena di dalam angka luas areal tanaman tersebut terdapat Tanaman Menghasilkan (TM) dan tanaman yang belum menghasilkan (TBM).

#### 2.3.2.4 Urusan Pilihan Kehutanan

Gambaran umum kondisi daerah terkait urusan kehutanan dilihat dari beberapa indikator, seperti luasan kawasan hutan, persentase hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi, serta kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB.

##### a. Luas kawasan Hutan

Kawasan hutan di Kabupaten Sumbawa terdiri atas kawasan hutan lindung (43,17%), kawasan hutan konservasi (7,19%), dan kawasan hutan produksi (49,64), dengan luas kawasan hutan seluruhnya sebesar 398,108.35 Ha. Bila dibandingkan dengan luas wilayah daratan Kabupaten Sumbawa sebesar 6.643,98 km<sup>2</sup>, maka luas kawasan hutan di Kabupaten Sumbawa mencapai 59.92%. Selengkapnya disajikan sebagai berikut.

**Tabel 2.247**  
**Luas Kawasan Hutan Tahun 2015 Berdasarkan Tata Guna Hutan Di Kabupaten Sumbawa**

No.	Tata Guna Hutan	Luas (Ha)				
		2011	2012	2013	2014	2015
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
A	<b>Hutan Lindung</b>	<b>167.130,68</b>	<b>167.130,68</b>	<b>171.853,62</b>	<b>171.853,62</b>	<b>171.853,62</b>
B	<b>Kawasan Konservasi</b>	<b>28.638,40</b>	<b>28.638,40</b>	<b>28.638,40</b>	<b>28.638,40</b>	<b>28.638,40</b>
1	Taman Buru	22.537,90	22.537,90	22.537,90	22.537,90	22.537,90
2	Taman Wisata Alam	6.100,50	6.100,50	6.100,50	6.100,50	6.100,50

No.	Tata Guna Hutan	Luas (Ha)				
		2011	2012	2013	2014	2015
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
C	<b>Hutan Produksi</b>	<b>192.264,32</b>	<b>192.264,32</b>	<b>189.183,33</b>	<b>189.183,33</b>	<b>189.183,33</b>
1	Hutan Produksi Tetap	53.691,88	53.691,88	53.691,88	53.691,88	53.691,88
2	Hutan Produksi Terbatas	138.572,44	138.572,44	135.491,45	135.491,45	135.491,45
	<b>Total</b>	<b>388.033,40</b>	<b>388.033,40</b>	<b>389.675,35</b>	<b>389.675,35</b>	<b>389.675,35</b>

Sumber: BPS (Sumbawa dalam angka, beberapa tahun terbitan); Dishutbun Kab. Sumbawa, 2015

#### b. Rehabilitasi hutan dan lahan kritis

Hutan merupakan sumber daya alam yang juga merupakan sumber kehidupan bagi masyarakat di sekitarnya yang perlu dijaga kelestariannya. Sejalan dengan usaha konservasi, upaya reboisasi dan rehabilitasi lahan juga ditingkatkan. Tujuan upaya reboisasi dan rehabilitasi adalah untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan produktivitas sumber daya hutan, tanah dan air. Pelaksanaan reboisasi di Kabupaten Sumbawa dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.248**  
**Luas Tanaman Reboisasi Tahun 2013-2014 Di Kabupaten Sumbawa**

No	Uraian	Luas Tanaman Reboisasi	
		Di dalam kawasan hutan (Ha)	Di luar kawasan hutan (Ha)
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Tahun 2014	536	550
2	Tahun 2013	223	10.695

Sumber: BPS (Sumbawa dalam angka, 2015)

#### c. Kerusakan kawasan hutan

Luas kerusakan hutan di Kabupaten Sumbawa ditandai dengan luas lahan kritis seperti digambarkan pada tabel berikut.

**Tabel 2.249**  
**Luas Lahan Kritis Tahun 2012-2013 Di Kabupaten Sumbawa**

No.	Keterangan	Luas Lahan Kritis		Jumlah (Ha)
		Dalam Kawasan Hutan (Ha)	Luar Kawasan Hutan (Ha)	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
	Tahun 2013	92.051,95	37.223,62	129.275,57
	Tahun 2012	92.051,95	37.223,62	129.275,57

Sumber: BPS (NTB dalam angka, 2014)

#### 2.3.2.5 Urusan Pilihan Energi dan Sumber Daya Mineral Pemanfaatan Sumberdaya Mineral

Berdasarkan keadaan geologi, wilayah Kabupaten Sumbawa memiliki keanekaragaman sumberdaya dan cadangan mineral tambang baik untuk mineral logam, mineral bukan logam dan mineral batuan. Untuk potensi emas di lokasi Dodo dan sekitarnya secara terukur sebesar 1.671 ton dengan areal 200 Ha, dan potensi pasir besi di sepanjang pantai selatan. Potensi mineral di Kabupaten Sumbawa merupakan salah satu keunggulan komparatif wilayah. Jenis mineral logam dan bukan logam yang diidentifikasi meliputi sirtu, batu

bangunan, tanah urug, batu lempung/tanah liat, kaolin, gipsum, batu gamping, marmer, krisopras, batuan silika, kalsedon, emas (Au), perak (Ag), tembaga (Cu), dan pasir besi.

Banyaknya pemanfaatan mineral bukan logam dan batuan selama tahun 2014 di Kabupaten Sumbawa tersaji pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.250**  
**Banyaknya Pemanfaatan Mineral Bukan Logam dan Batuan**  
**Tahun 2014 Di Kabupaten Sumbawa**

<b>No</b>	<b>Jenis Bahan Galian</b>	<b>Pemanfaatan (m<sup>3</sup>)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1	Batu Kali/Gunung	79.381,05
2	Kerikil	86.314,35
3	Pasir Pasang	63.052,40
4	Pasir Urug	10.326,04
5	Sirtu	73.579,98
6	Tanah Urug	112.210,95
7	Tanah Liat	7.185,79

*Sumber: Dinas Pertambangan dan Energi Kab Sumbawa*

### 2.3.2.6 Urusan Pilihan Perdagangan

#### a. Jumlah usaha perdagangan

Dalam rangka pengembangan usaha perdagangan dalam negeri, maka layanan pembinaan dan layanan fasilitasi perizinan dilaksanakan terhadap unit-unit usaha. Sebagai gambaran kinerja dalam pertumbuhan usaha perdagangan di Kabupaten Sumbawa disajikan sebagai berikut.

**Tabel 2.251**  
**Jumlah Usaha Perdagangan Tahun 2011-2015 Di Kabupaten Sumbawa**

<b>No</b>	<b>Uraian</b>	<b>Unit</b>	<b>Tahun</b>				
			<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
1	Jumlah usaha mikro perdagangan	Unit	6.511	6.674	6.840	10.580	10.802
2	Jumlah usaha kecil perdagangan	Unit	5.108	5.174	5.231	6.527	6.664
3	Jumlah usaha kecil perdagangan yg dibina	Unit	458	458	458	458	458
4	Jumlah usaha menengah perdagangan	Unit	271	311	315	355	362
5	Jumlah usaha besar	Unit	19	19	19	19	19

*Sumber: Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa*

#### b. Sarana dan prasarana perdagangan

Ketersediaan sarana dan prasarana yang dapat menunjang tumbuhkembangnya usaha perdagangan di Kabupaten Sumbawa.

**Tabel 2.252**  
**Ketersediaan Prasarana Pasar Tahun 2011-2015 Di Kabupaten Sumbawa**

<b>No</b>	<b>Jenis Pasar</b>	<b>Tahun</b>				
		<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1.	Pasar Induk	-	-	-	-	-
2	Pasar Tradisional	14	14	15	16	16

*Sumber: Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa*

Ketersediaan prasarana pasar induk hingga saat ini belum ada di Kabupaten Sumbawa, dan pasar tradisional belum merata ada di setiap

kecamatan. Sebaran ketersediaan prasarana pasar di kecamatan disajikan sebagai berikut.

**Tabel 2.253**  
**Prasarana Pasar Tahun 2015 Di Kabupaten Sumbawa**

No	Kecamatan	Pasar		Jumlah
		Induk	Tradisional	
1	2	3	4	5
1	Lunyuk	-	1	1
2	Orong Telu	-	-	-
3	Alas	-	1	1
4	Alas Barat	-	-	-
5	Buer	-	1	1
6	Utan	-	1	1
7	Rhee	-	-	-
8	Batulanteh	-	-	-
9	Sumbawa	-	3	3
10	Labuhan Badas	-	1	1
11	Unter Iwes	-	-	-
12	Moyo Hilir	-	2	2
13	Moyo Utara	-	-	-
14	Moyu Hulu	-	-	-
15	Ropang	-	-	-
16	Lenangguar	-	1	1
17	Lantung	-	-	-
18	Lape	-	-	-
19	Lopok	-	1	1
20	Plampang	-	1	1
21	Labangka	-	-	-
22	Maronge	-	1	1
23	Empang	-	2	2
24	Tarano	-	-	-
	Jumlah	-	16	16

*Sumber: Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sumbawa, 2015*

Selanjutnya gambaran tera/tera ulang dalam beberapa tahun terakhir disajikan sebagai berikut.

**Tabel 2.254**  
**Persentase Tera/Tera Ulang Tahun 2011-2015 Di Kabupaten Sumbawa**

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Jumlah alat kemetrolgian (UTTP) yang ada	Unit	2.647	3.942	3.119	3.119	5.084
2	Jumlah alat kemetrolgian yang diuji/ Tera	Unit	1.743	1.178	2.183	1.356	920
3	<b>Persentase</b>	<b>%</b>	<b>66,85</b>	<b>29,88</b>	<b>69,66</b>	<b>43,48</b>	<b>18,10</b>

*Sumber: Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sumbawa, 2015*

### 2.3.2.7 Urusan Pilihan Perindustrian

Gambaran umum jumlah usaha industri di Kabupaten Sumbawa dalam beberapa tahun terakhir ini disajikan sebagai berikut.

**Tabel 2.255**  
**Jumlah Usaha Perindustrian Tahun 2011-2015 Di Kabupaten Sumbawa**

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2011	2012	2013	2014	2015
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
1	Jumlah IKM	Unit	3.546	3.568	3.623	3.746	3.746
2	Sentra IKM :						
	- Jumlah sentra	Sentra	143	143	217	218	168
	- Jumlah unit usaha sentra	Unit	2.639	2.681	3.583	3.598	2.619

*Sumber: Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sumbawa, 2015*

### 2.3.2.8 Urusan Pilihan Transmigrasi

Transmigrasi pada dasarnya merupakan strategi pembangunan wilayah dalam rangka peningkatan taraf hidup dan pemanfaatan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia secara terintegrasi dan lintas sektoral, dalam rangka pemerataan penyebaran penduduk dan tenaga kerja serta pembukaan dan pengembangan daerah produksi baru sebagai wujud pelaksanaan pembangunan daerah yang dapat menjamin peningkatan taraf hidup transmigran dan masyarakat sekitarnya. Gambaran umum daerah terkait urusan transmigrasi diantaranya dapat dilihat dari beberapa aspek, seperti perkembangan transmigran, perkembangan jumlah lokasi (UPT), dan peningkatan KTM.

#### a. Perkembangan UPT dan transmigran

Jumlah KK transmigran yang sudah ditempatkan sejak pertama kalinya pada tahun 1989 di Kabupaten Sumbawa hingga tahun 2014 sebanyak 4.599 KK (16.882 Jiwa). Perkembangan jumlah Unit Permukiman Transmigrasi di Kabupaten Sumbawa disajikan sebagai berikut.

**Tabel 2.256**  
**UPT dan Perkembangan Transmigran Di Kabupaten Sumbawa**

No	Desa UPT	Tahun Penempatan	Saat Penempatan		Sekarang (2014)	
			KK	Jiwa	KK	Jiwa
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1	Labangka I	1989-1996	355	1.709	532	1.826
2	Labangka 2	1989-1996	250	1.160	499	1.757
3	Labangka 3	1989-1996	270	1.268	837	2.883
4	Labangka 4	1989-1996	275	1.344	715	2.585
5	Labangka 5	1989-1996	300	1.164	440	1.568
6	Tolo Oi	1997/1998	240	1.017	245	986
7	Prode SP I	1998/1999	100	399	143	544
8	Prode SP II	1998/1999	150	652	231	887
9	Prode SP III	1999/2000	283	1.373	336	1.299
10	Sampar Goal SP I	2003	200	842	205	811
11	Sampar Goal SP II	2004	100	408	103	398
12	UPT Buin Batu	2006	200	800	213	930

No	Desa UPT	Tahun Penempatan	Saat Penempatan		Sekarang (2014)	
			KK	Jiwa	KK	Jiwa
1	2	3	4	5	6	7
13	UPT Brang Lamar	2013	100	403	100	408
	<b>Jumlah</b>		<b>2.823</b>	<b>12.539</b>	<b>4.599</b>	<b>16.882</b>

Sumber: BPS Kab. Sumbawa (Sumbawa Dalam Angka, 2015)

Pemerintah daerah telah ikut melaksanakan program nasional melalui penempatan transmigran di UPT, dengan pola integrasi penduduk dari luar Kabupaten Sumbawa dengan 20% penduduk setempat.

## b. Perkembangan KTM Labangka

Menyangkut pembangunan dan pengembangan KTM di kawasan transmigrasi Labangka dan sekitarnya yang telah dilaksanakan pada tahun 2011 berupa pembangunan infrastruktur jalan boulevard, perencanaan taman kota tahap I (pertama), perencanaan trotoar dan saluran jalan boulevard (1,1 km), perencanaan jalan penghubung pusat KTM Labangka.

### 2.4 Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah. Suatu daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

#### 2.4.1 Kemampuan Ekonomi Daerah

Kemampuan ekonomi daerah dalam kaitannya dengan daya saing daerah adalah bahwa kapasitas ekonomi daerah harus memiliki daya tarik (*attractiveness*) bagi pelaku ekonomi yang telah berada dan akan masuk ke suatu daerah untuk menciptakan *multiflier effect* bagi peningkatan daya saing daerah. Kemampuan ekonomi daerah memicu daya saing daerah dalam beberapa tolok ukur, sebagai berikut.

##### 2.4.1.1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita (Angka Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita)

Angka konsumsi rumah tangga merupakan salah satu indikator kesejahteraan rumah tangga/keluarga, yang menggambarkan jumlah pengeluaran rumah tangga terhadap seluruh rumah tangga di suatu daerah dalam kurun waktu yang sama. Pada umumnya, pengeluaran konsumsi rumah tangga terdiri atas pengeluaran untuk konsumsi pangan dan pengeluaran untuk konsumsi non pangan. Rumah tangga/keluarga akan semakin sejahtera bila persentase pengeluaran untuk konsumsi pangan jauh lebih kecil dibandingkan persentase pengeluaran untuk non pangan. Angka rata-rata pengeluaran rumah tangga dapat digunakan untuk melihat indeks pengeluaran rumah tangga per kapita dan tingkat kesejahteraan dari rumah tangga yang bersangkutan.

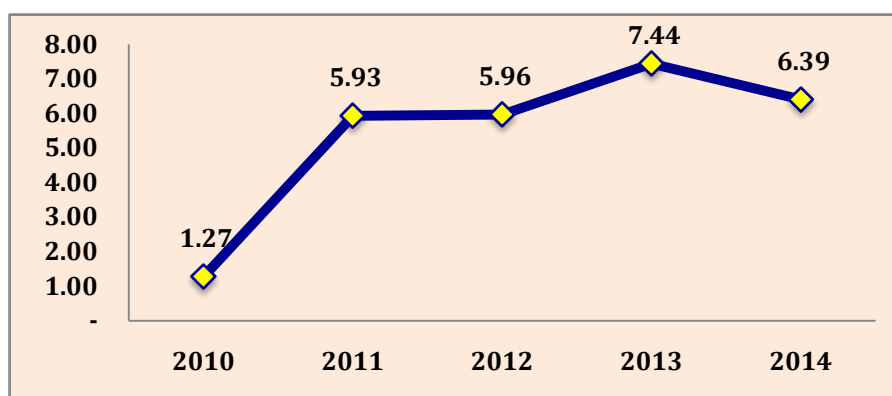


**Tabel 2.257**  
**Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Per Bulan**  
**Tahun 2010-2014 Di Kabupaten Sumbawa**

No	Uraian	Tahun				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
1	Pengeluaran Konsumsi Makanan	96.366	308.173	355.595	419.033	393.221
2	Pengeluaran Konsumsi Non Makanan	41.682	343.914	308.323	418.041	334.389
3	Total Pengeluaran Konsumsi RT Per Kapita Per Bulan	138.048	652.087	663.918	837.074	727.610
4	Jumlah RT	108.700	110.030	111.314	112.567	113.784
5	<b>Rasio</b>	<b>1,27</b>	<b>5,93</b>	<b>5,96</b>	<b>7,44</b>	<b>6,39</b>
6	<b>Persentase Konsumsi Non Makanan</b>	<b>30,19</b>	<b>52,74</b>	<b>46,44</b>	<b>49,94</b>	<b>45,96</b>

*Sumber: Sumbawa Dalam Angka. BPS Kab. Sumbawa, 2015 (Data diolah)*

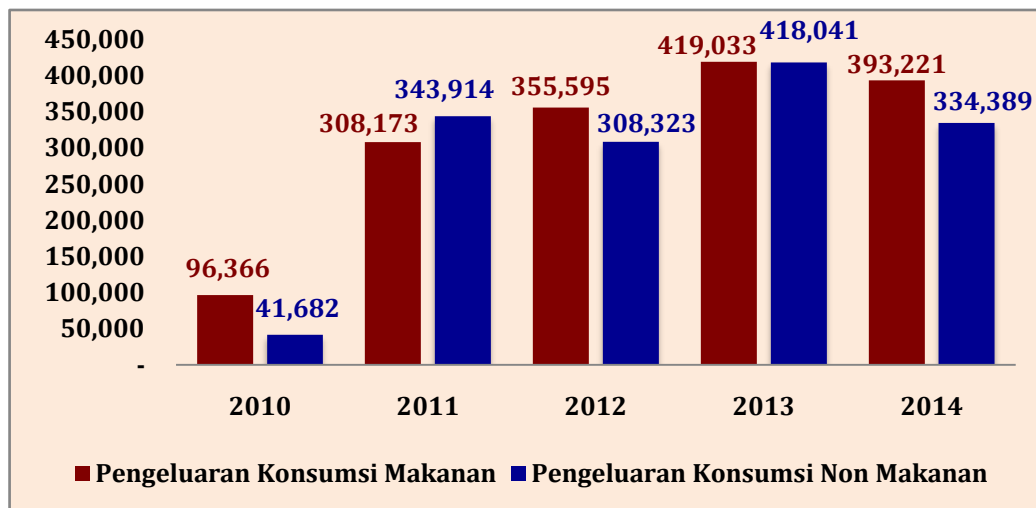
Memperhatikan tabel tersebut di atas, jumlah pengeluaran rumah tangga di Kabupaten Sumbawa mengalami peningkatan dari tahun 2011 dengan rasio rata-rata sebesar 5,40. Total pengeluaran konsumsi rumah tangga terbesar terjadi pada tahun 2013 sebesar Rp837.074 per kapita per bulan, yang merupakan pengeluaran untuk konsumsi pangan dan konsumsi non pangan. Rasio pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap jumlah rumah tangga juga menunjukkan kecenderungan peningkatan sebagaimana tergambar sebagai berikut.



**Gambar 2.43**  
**Rasio Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Tahun 2010-2014**  
**Di Kabupaten Sumbawa**

Pengeluaran konsumsi rumah tangga di Kabupaten Sumbawa rata-rata masih lebih besar dibelanjakan untuk konsumsi makanan. Rata-rata pengeluaran untuk konsumsi non makanan selama tahun 2010-2014 sebesar 45,05 persen, artinya 54,95 persen dari total pengeluaran konsumsi rumah tangga dibelanjakan untuk konsumsi makanan, sementara 45,05 persen dari total pengeluaran konsumsi rumah tangga dipergunakan untuk pengeluaran non pangan seperti biaya pendidikan, kebutuhan sandang dan papan (perumahan) dan lain-lain. Kenyataan tersebut sekaligus mengindikasikan bahwa proporsi pendapatan yang dibelanjakan untuk konsumsi pangan lebih besar dari konsumsi non pangan.

Pengeluaran konsumsi pangan dan non pangan rumah tangga di Kabupaten Sumbawa tergambar sebagai berikut.



**Gambar 2.44**  
**Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Makanan dan Non Makanan Tahun 2010-2014 Di Kabupaten Sumbawa**

Pada tahun 2011, pengeluaran untuk konsumsi non pangan sempat lebih tinggi dari pengeluaran untuk konsumsi pangan. Namun tahun 2012 sampai dengan tahun 2014, pengeluaran konsumsi pangan kembali lebih tinggi dari pengeluaran konsumsi non pangan sebagaimana yang terjadi di tahun 2010.

Apabila dikaitkan dengan kondisi PDRB Kabupaten Sumbawa yang menunjukkan peningkatan setiap tahun dengan proporsi lebih besar dari pertumbuhan penduduk, yang berarti pendapatan masyarakat perkapita juga meningkat, maka kondisi ini sesungguhnya sangat berlawanan dengan Hukum Engel yang menyatakan bahwa dengan asumsi selera seseorang adalah tetap, proporsi pengeluaran rumah tangga untuk pangan akan semakin kecil seiring dengan semakin meningkatnya pendapatan.

#### 2.4.1.2 Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator yang berguna untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani dengan mengukur kemampuan tukar produk (komoditas) yang dihasilkan/dijual petani dibandingkan dengan produk yang dibutuhkan petani baik untuk proses produksi (usaha) maupun untuk konsumsi rumah tangga. Jika NTP lebih besar dari 100 maka periode tersebut relatif lebih baik dibandingkan dengan periode tahun dasar, sebaliknya jika NTP lebih kecil dari 100 berarti terjadi penurunan daya beli petani. Nilai Tukar Petani dihitung dengan membandingkan produksi dengan faktor produksi, yaitu perbandingan antara indeks yang diterima (It) petani dan yang dibayar (Ib) petani. Gambaran nilai tukar petani di Kabupaten Sumbawa, disajikan pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.258**  
**Nilai Tukar Petani Tahun 2012-2015 Di Kabupaten Sumbawa**

No	Uraian	Tahun			
		2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6
1	Indeks Yang Diterima Petani (It)	131,6	122,10	114,05	125,78
2	Indeks Yang Dibayar Petani (Ib)	138	126,17	113,59	118,18
<b>3</b>	<b>Nilai Tukar Petani</b>	<b>95,36</b>	<b>96,77</b>	<b>100,40</b>	<b>106,43</b>

Sumber: BPS NTB, 2015

Berdasarkan tabel di atas, NTP di Kabupaten Sumbawa mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2012 dan 2013, NTP di Kabupaten Sumbawa masih lebih rendah dari 100, sedangkan di tahun 2014 dan 2015, NTP sudah berada di atas 100, artinya pada tahun tersebut terjadi peningkatan daya beli petani disamping mampu untuk memenuhi kebutuhan produksi, petani juga mampu mengalokasikan sebagian pendapatan yang diterima untuk kebutuhan konsumsi rumah tangga.

## 2.4.2 Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

### 2.4.2.1 Aksesibilitas Daerah

#### a. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan merupakan salah satu indikator penting untuk melihat aksesibilitas daerah, yaitu memberikan gambaran akan ketersediaan prasarana jalan untuk menampung sejumlah kendaraan di daerah dalam rangka memberikan kemudahan akses bagi masyarakat dalam melakukan aktivitasnya.

**Tabel 2.259**

#### **Rasio Panjang Jalan Terhadap Jumlah Kendaraan Umum Tahun 2008-2014 Di Kabupaten Sumbawa**

No	Sarana Angkutan Darat	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Angkutan Kota Antar Provinsi (AKAP)	29	29	4	4	4	4	4
2	Angkutan Kota	138	135	76	60	55	58	42
3	Angkutan Pedesaan	215	210	228	186	164	181	161
4	Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP)	98	98	68	66	66	34	34
5	Jumlah angkutan umum Roda 4	480	472	376	316	289	277	241
6	Panjang Jalan (Pusat, Prov, dan Kab.)	1.541	1.541	1.541	1.541	1.541	1.541	1.541
7	Rasio pjg jalan thdp ketersediaan sarana angkutan	3,21	3,26	4,10	4,88	5,33	5,56	6,39

*Sumber: Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Sumbawa, 2015*

Dari tabel di atas terlihat bahwa meskipun rasio panjang jalan meningkat setiap tahunnya, namun peningkatan tersebut bukan disebabkan oleh bertambahnya panjang jalan, namun jumlah angkutan umum roda empat dari tahun ke tahun semakin berkurang.

#### b. Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan jumlah arus penumpang dan arus barang di Kabupaten Sumbawa disajikan sebagai berikut.

**Tabel 2.260**  
**Jumlah Arus Penumpang Dan Arus Barang Tahun 2011-2015**  
**Di Kabupaten Sumbawa**

No	Uraian	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1	Jumlah arus penumpang	676.680	518.400	630.720	700.570	492.948
2	Jumlah arus barang (darat, laut, udara)	323.625. 438	362.422. 832	391.343 .212	434.255 .221	1.172.24 9.960

*Sumber: Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Sumbawa, 2015*

#### 2.4.2.2 Fasilitas bank dan non bank

Pelayanan perbankan kepada masyarakat semakin luas dengan bertambahnya jumlah kantor bank. Semakin berkembangnya perekonomian daerah dan tingginya persaingan untuk menarik nasabah mendorong bank untuk lebih meningkatkan dan melengkapi pelayanannya kepada masyarakat. Salah satu cara yang ditempuh adalah dengan meningkatkan jumlah jaringan kantor pelayanan sehingga dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Data sampai Desember 2015 jumlah bank (bank umum dan BPR) yang beroperasi di Kabupaten Sumbawa sebanyak 23 bank dengan jumlah kantor yang tersebar di wilayah Kabupaten Sumbawa sebanyak 46 kantor dengan status kantor terdiri dari kantor cabang, kantor cabang pembantu, kantor kas dan kantor unit.

**Tabel 2.261**  
**Perkembangan Jumlah Bank Dan Kantor Bank Tahun 2010-2015**  
**Di Kabupaten Sumbawa**

No	Uraian	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Bank Umum</b>						
	Jumlah Bank	9	9	9	9	9	9
	Jumlah Kantor	22	22	25	25	25	25
	<b>BPR</b>						
	Jumlah Bank	14	14	14	14	14	14
	Jumlah Kantor	21	21	21	21	21	21

*Sumber: Bank Indonesia, Mataram (Beberapa tahun terbitan)*

Bank-bank yang beroperasi di Kabupaten Sumbawa terdiri dari bank umum dan bank BPR baik pemerintah, swasta maupun Pemda, selengkapnya disajikan berikut ini.

**Tabel 2.262**  
**Bank Umum Dan Bank Perkreditan Rakyat Sampai Tahun 2015**  
**Di Kabupaten Sumbawa**

No	Bank	KP	KC	KCP	KK	KU	Total
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A</b>	<b>Bank Umum</b>						
	1. Pemerintah						
	- PT. BNI 46 (Persero)	-	1	1	-	-	2
	- PT. BRI (persero)	-	1	-	-	9	10

No	Bank	KP	KC	KCP	KK	KU	Total
1	2	3	4	5	6	7	8
	- PT. BPD NTB	-	1	3	-	-	4
	- PT. BTN (Persero)	-	-	-	1	-	1
	- PT BANK MANDIRI (Persero), Tbk	-	-	1	-	-	1
	2. Swasta						
	- PT. Bank Danamon Indonesia	-	-	3	-	-	3
	- PT. Bank Mega	-	1	-	-	-	1
	- PT. Bank Syariah Mandiri	-	-	1	-	-	1
	- PT. Bank Tabungan Pensiunan Negara	-	-	1	-	-	1
<b>B</b>	<b>BPR</b>						
	1. Pemda						
	- PD. BPR NTB Sumbawa Kantor Pusat	1	-	-	-	-	1
	- PD. BPR NTB Sumbawa Cab. Empang	-	1	-	-	-	1
	- PD. BPR NTB Sumbawa Cab. Labuhan	-	1	-	-	-	1
	- PD. BPR NTB Sumbawa Cab. Lenangguar	-	1	-	-	-	1
	- PD. BPR NTB Sumbawa Cab. Lopok	-	1	-	-	-	1
	- PD. BPR NTB Sumbawa Cab. Utan	-	1	-	-	-	1
	- PD. BPR NTB Sumbawa Cab. Moyo	-	1	-	-	-	1
	- PD. BPR NTB Sumbawa Cab. Plampang	-	1	-	-	-	1
	- PD. BPR NTB Sumbawa Cab. Alas	-	1	-	-	-	1
	2. Swasta						
	- PT. BPR Kabalong Abdi Swadaya	1	-	-	-	-	1
	- PT. BPR Lopok Ganda	1	-	-	1	-	2
	- PT. BPR Samawa Kencana	1	2	-	6	-	9

Sumber: Statistik Ekonomi Keuangan Nusa Tenggara Barat - Bank Indonesia Mataram, 2015

Ket: **KP** = Kantor Pusat; **KC** = Kantor Cabang; **KCP** = Kantor cabang Pembantu; **KK** = Kantor Kas; **KU** = Kantor Unit.

#### 2.4.2.3 Ketersediaan Restoran/rumah makan

Ketersediaan restoran/rumah makan di suatu daerah dapat menunjukkan indikator tingkat daya tarik investasi suatu daerah. Perkembangan ketersediaan restoran/rumah makan di Kabupaten Sumbawa disajikan sebagai berikut.

**Tabel 2.263**  
**Jumlah Restoran/Rumah Makan Kabupaten Sumbawa**

No	Uraian	Tahun 2011		Tahun 2015	
		Jumlah Usaha	Jumlah Kursi	Jumlah Usaha	Jumlah Kursi
1	2	3	4	5	6
1.	Restoran	8	236	9	408
2.	Rumah makan/Café/Depot	233	2.228	281	2.671

Sumber: Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kab. Sumbawa

#### 2.4.2.4 Jumlah penginapan/hotel

Ketersediaan hotel/penginapan sangat menunjang dalam pelaksanaan pembangunan perekonomian suatu daerah termasuk peluang-peluang yang ditimbulkannya. Gambaran ketersediaan hotel/penginapan di Kabupaten Sumbawa disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 2.264**  
**Jenis, Kelas dan Jumlah Penginapan/Hotel Kabupaten Sumbawa**

No	Jenis Penginapan/Hotel	Tahun 2011		Tahun 2015	
		Jumlah Hotel	Jumlah Kamar	Jumlah Hotel	Jumlah Kamar
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>A</b>	<b>Hotel Berbintang:</b>				
1	Hotel Bintang 5	-	-	-	-
2	Hotel Bintang 4	1	19	1	19
3	Hotel Bintang 3	-	-	-	-
4	Hotel Bintang 2	1	7	1	9
5	Hotel Bintang 1	1	20	1	19
<b>b.</b>	<b>Hotel Non Bintang:</b>				
1	Hotel Melati	36	653	38	763
<b>Total jumlah penginapan/ Hotel</b>		<b>39</b>	<b>699</b>	<b>41</b>	<b>810</b>

*Sumber: Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kab. Sumbawa, 2015*

Dari data tabel diatas diketahui bahwa jumlah hotel di Kabupaten Sumbawa dalam lima tahun terakhir hanya bertambah dua buah hotel melati dengan penambahan jumlah kamar sebanyak 111 kamar.

#### **2.4.2.5 Fasilitas listrik**

Faktor pendukung keberhasilan pembangunan banyak ditentukan oleh keberadaan listrik. Listrik memiliki fungsi yang sangat strategis dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa yang mempunyai listrik mempunyai tingkat kesejahteraan yang lebih baik tentunya dibandingkan desa yang belum memiliki listrik. Setiap tahun jumlah pelanggan listrik terus bertambah baik untuk keperluan rumah tangga, kebutuhan industri maupun kebutuhan lainnya. Berikut ini adalah gambaran layanan listrik PLN sampai dengan tahun 2015.

##### **a. Ketersediaan Listrik**

Penyediaan tenaga listrik bertujuan untuk meningkatkan perekonomian dan memajukan kesejahteraan masyarakat. Penyedia utama layanan listrik di Kabupaten Sumbawa selama ini adalah PT. PLN, yang kapasitas layanannya disajikan sebagai berikut.

**Tabel 2.265**  
**Ketersediaan Listrik PLN Tahun 2011-2015 Di Kabupaten Sumbawa**

No	Uraian	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1.	Daya tersambung (kVA)	86.675.900	95.320.686	94.180.900	43.968.590	134.135.050
2.	KWH Jual (kWh)	127.608.464	143.509.737	11.823.440	15.470.601	17.243.973
3.	JTM (kms)	454	792	823,08	840.303	869,6
4.	JTR (kms)	37.697	816	671,12	679,29	704,09
5.	Gardu (buah)	-	-	-	-	-
6.	Trafo (buah)	700.644	1.500	565	585	594
7.	Kapasitas Trafo (kVA)	633.264	2.317	51.930	54.321	57.071

No	Uraian	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
8.	kWH Jaringan	145.547. 758	152.976. 785	1.022.82 7	178.023. 534	
9.	kWH pemakaian	127.595. 884	126.586. 415	136.833. 791	1.291.69 0	
10	Jumlah Desa Terlayani . Listrik PLN	123	127	-	-	157
11	Jumlah Pelanggan PLN (Sambungn)	87.808	96.771	101.727	116.863	124.923

Sumber: PLN Cabang Sumbawa (2015)

#### b. Banyak VA Tersambung

Ketersediaan daya listrik yang memadai menunjukkan kapasitas kemampuan layanan listrik yang diberikan kepada masyarakat konsumen. Jumlah VA daya listrik tersambung di Kabupaten Sumbawa disajikan sebagai berikut.

**Tabel 2.266**  
**Jumlah VA Tersambung Pada Layanan PLN Tahun 2011-2015**  
**Di Kabupaten Sumbawa**

No	Klasifikasi Pelanggan	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1	Sosial (VA)	1.989.100	3.372.550	3.679.650	3.941.300	4.155.400
2	Rumah Tangga (VA)	48.674.000	69.940.700	81.326.850	90.409.400	97.051.500
3	Usaha (VA)	7.903.400	9.581.350	11.886.300	16.353.750	17.607.200
4	Industri (VA)	5.900.800	8.082.700	8.444.900	9.628.200	9.698.200
5	Gedung & Jasa (VA)	2.530.350	4.316.450	4.752.300	4.959.400	5.623.550

Sumber: Daerah Dalam Angka. BPS Kab. Sumbawa (beberapa tahun terbitan)

Berdasarkan data tersebut, konsumen terbesar yang memanfaatkan daya listrik di Kabupaten Sumbawa adalah rumah tangga, sedangkan dari klasifikasi sosial merupakan konsumen terendah.

#### c. Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik

Hingga tahun 2015, dari 124.922 pelanggan PLN pada semua klasifikasi, terdapat 118.378 pelanggan rumah tangga (94,76%). Perkembangan jumlah pelanggan listrik PLN di Kabupaten Sumbawa pada periode tahun 2011-2015 disajikan sebagai berikut.

**Tabel 2.267**  
**Jumlah Pelanggan Dan Persentase Rumah Tangga Teraliri Listrik PLN**  
**Terhadap Jumlah Pelanggan Tahun 2011-2015**

No	Klasifikasi Pelanggan	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1	Sosial	1.729	1.852	1.959	2.058	2.126
2	Rumah Tangga	82.651	90.261	100.638	110.533	118.378
3	Usaha	2.547	2.625	2.902	3.317	3.439

4	Industri	62	71	74	80	82
5	Gedung dan Jasa	-	753	826	871	897
6	Jumlah Pelanggan PLN	86.989	95.562	106.399	116.859	124.922
7	% RT terlayani listrik thd Jlh Pelanggan PLN	95,01	94,45	94,59	94,59	94,76

Sumber: BPS Kab. Sumbawa (beberapa tahun terbitan)

Jumlah pelanggan listrik di Kabupaten Sumbawa menunjukkan peningkatan setiap tahunnya untuk semua klasifikasi pelanggan. Dari total pelanggan yang ada, sekitar 95% adalah rumah tangga. Selanjutnya gambaran rasio elektrifikasi pada setiap tahun disajikan sebagai berikut.

**Tabel 2.268**  
**Rasio Elektrifikasi Tahun 2011-2015 Di Kabupaten Sumbawa**

No	Uraian	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1	Rumah Tangga Seluruhnya	110.030	111.314	112.567	113.784	116.079
2	Rumah Tangga Berlistrik	82.651	90.261	100.638	110.533	118.378
3	Rasio elektrifikasi (%)	75,12	81,09	89,40	97,14	101,98

Sumber: BPS Kab. Sumbawa (beberapa tahun terbitan)

Gambaran data pada tabel tersebut menunjukkan bahwa proporsi rumah tangga masyarakat berlistrik di seluruh wilayah Kabupaten Sumbawa lebih dari 100% dari total rumah tangga yang ada. Hal ini terjadi karena data jumlah rumah tangga yang teraliri listrik oleh PLN dihitung berdasarkan jumlah pemasangan meteran listrik yang terjual, sementara terdapat rumah tangga yang memiliki meteran listrik lebih dari satu, dan data tersebut belum terpilah di PLN.

Selain pasokan energi listrik dari PLN, di Kabupaten Sumbawa juga terdapat layanan pasokan energi listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH).

### 2.4.3 Iklim Berinvestasi

#### 2.4.3.1 Keamanan dan ketertiban

##### a. Angka kriminalitas yang tertangani

Angka kriminalitas di Kabupaten Sumbawa selama lima tahun terakhir menunjukkan kecenderungan meningkat dengan rata-rata peningkatan 13,17 persen per tahun. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, rata-rata angka kriminalitas di Kabupaten Sumbawa sebesar 17,50 per 10.000 jumlah penduduk. Ini berarti bahwa di Kabupaten Sumbawa terjadi 17-18 kasus kriminalitas per 10.000 jumlah penduduk per tahun.

Jumlah kasus kriminalitas tertinggi terjadi pada kasus pencurian dengan rata-rata 429 kasus per tahun, diikuti oleh kasus penganiyaan dengan rata-rata 240 kasus per tahun. Jumlah kasus dan angka kriminalitas selama tahun 2011-2015 di Kabupaten Sumbawa selengkapnya terlihat pada tabel berikut ini.

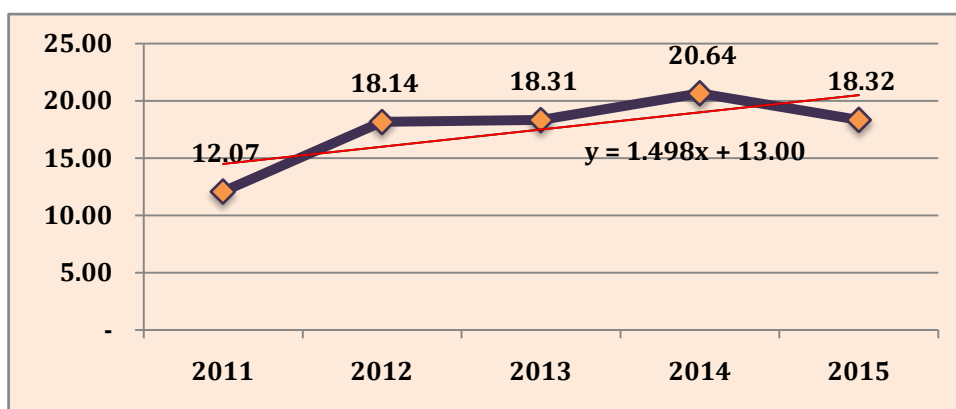


**Tabel 2.269**  
**Jumlah Kasus Dan Angka Kriminalitas Tahun 2011-2015**  
**Di Kabupaten Sumbawa**

No	Jenis Kriminal	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
1.	Jumlah kasus narkoba	10	9	12	19	14
2.	Jumlah kasus pembunuhan	0	5	3	6	4
3.	Jumlah kejahatan seksual	8	31	28	25	34
4.	Jumlah kasus penganiayaan	211	224	233	285	247
5.	Jumlah kasus pencurian	243	461	478	519	446
6.	Jumlah kasus penipuan	34	44	36	47	63
7.	Jumlah kasus pemalsuan uang	1	1	1	0	0
8.	Jumlah tindak kriminal selama 1 tahun	507	775	791	901	808
9.	Jumlah penduduk	419.989	427.119	431.924	436.599	441.102
<b>10</b>	<b>Angka kriminalitas</b>	<b>12,07</b>	<b>18,14</b>	<b>18,31</b>	<b>20,64</b>	<b>18,32</b>

*Sumber: Kepolisian Resort Sumbawa, 2015*

Gambaran kecenderungan peningkatan angka kriminalitas di Kabupaten Sumbawa terlihat pada gambar berikut ini.



**Gambar 2.45**  
**Tren Angka Kriminalitas Tahun 2011-2015 Di Kabupaten Sumbawa**

Meskipun angka kriminalitas menunjukkan kecenderungan yang meningkat, namun secara umum kondisi keamanan dan ketertiban umum di Kabupaten Sumbawa relatif kondusif dan baik.

#### **b. Jumlah Demonstrasi**

Aksi demonstrasi atau unjuk rasa yang dewasa ini cenderung menjadi media penyampaian aspirasi, kritik ataupun aksi solidaritas dan tuntutan lainnya, meskipun frekuensinya tidak terlalu tinggi dengan volume gerakan yang relatif kecil, namun tidak dapat dipungkiri bahwa aksi-aksi tersebut tetap muncul setiap tahun di Kabupaten Sumbawa. Jumlah unjuk rasa yang terjadi pada tahun 2012 sebanyak 12 kali, meningkat menjadi 43 kali pada tahun 2015 dengan mengangkat isu-isu bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan. Meskipun demikian, aksi-aksi tersebut merupakan aksi damai dan

tidak sampai melebar menjadi anarkhis ataupun berubah fokus sehingga menimbulkan korban baik barang/aset maupun orang, sehingga dapat dikatakan bahwa keberadaan aksi-aksi massa yang ada selama ini tidak menimbulkan inkondusifitas daerah.

**Tabel 2.270**  
**Jumlah Demonstrasi Di Kabupaten Sumbawa**

No	Uraian	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1	Jumlah unjuk rasa	NA	12	NA	30	43

*Sumber: Badan Kesbangpoldagri Kab. Sumbawa*

#### 2.4.3.2 Kemudahan Perijinan

Iklm investasi di suatu daerah, selain ditentukan oleh factor tinggi rendahnya potensi dan peluang pengembangan potensi sumberdaya yang dimiliki, serta orientasi penanaman modal para investor pada daerah tersebut juga dipengaruhi oleh kepastian hukum serta kepastian waktu layanan perijinan yang diberikan. Dalam hal waktu layanan perijinan di Kabupaten Sumbawa, melalui tabel berikut disajikan berbagai jenis dan lama proses perijinan sebagaimana sudah ditetapkan dalam ketentuan peraturan yang berlaku.

**Tabel 2.271**  
**Jenis Dan Lama Proses Pengurusan Ijin Di Kabupaten Sumbawa**

No	Jenis Izin	Masa Berlaku	Pemberi Pertimbangan	Dasar Hukum	Waktu Maksimal (Hari) SOP
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1	Izin Perubahan Penggunaan Lahan Tanah	Masa berlaku selamanya selama tidak ada perubahan peruntukan dan luas	Badan Pertanahan dan Bagian Adm Pemerintahn Setda	Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Dibidang Perizinan Kepada Kepala KPPT	10
2	Izin Usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras	3 tahun	Dinas pertanian Tanaman pangan dan hortikultura	Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Dibidang Perizinan Kepada Kepala KPPT	10
				Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1971	

<b>No</b>	<b>Jenis Izin</b>	<b>Masa Berlaku</b>	<b>Pemberi Pertimbangan</b>	<b>Dasar Hukum</b>	<b>Waktu Maksimal (Hari) SOP</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
				Tentang Perusahaan Penggilingan Padi, Huller Dan Penyosohan Beras	
3	Izin Tempat Usaha (SITU)/Izin Gangguan (HO)	Masa berlaku selamanya	Satpol PP	Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Dibidang Perizinan Kepada Kepala KPPT	10
4	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	Masa berlaku selamanya	Dinas Pekerjaan Umum, Dishubkom info dan Sat Pol PP	Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Dibidang Perizinan Kepada Kepala KPPT	10
5	Izin Reklame	1 tahun	Dinas Pekerjaan Umum, Dishubkom info, BPM LH dan Sat Pol PP	Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu	10
				Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Dibidang Perizinan Kepada Kepala KPPT Kabupaten	

<b>No</b>	<b>Jenis Izin</b>	<b>Masa Berlaku</b>	<b>Pemberi Pertimbangan</b>	<b>Dasar Hukum</b>	<b>Waktu Maksimal (Hari) SOP</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
				Sumbawa	
6	Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	5 tahun	Diskoperindag	Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Dibidang Perizinan Kepada Kepala KPPT Kabupaten Sumbawa	3
				Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M-Dag/Per/9/2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan 36 Tahun 2007 Tentang Penerbitan Siup	
7	Izin Usaha Industri	Masa berlaku selamanya	Diskoperindag	Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Dibidang Perizinan Kepada Kepala KPPT Kabupaten Sumbawa	10

<b>No</b>	<b>Jenis Izin</b>	<b>Masa Berlaku</b>	<b>Pemberi Pertimbangan</b>	<b>Dasar Hukum</b>	<b>Waktu Maksimal (Hari) SOP</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
				Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-Ind/Per/6/2008 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan Dan Tanda Daftar Industri	
8	Tanda Daftar Perusahaan (TDF)	5 tahun	Diskoperindag	Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Dibidang Perizinan Kepada Kepala KPPT Kabupaten Sumbawa	3
				Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 37/M-Dag/Per/9/2007 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan	
9	Izin Pemanfaatan Kayu Tanah Milik (IPKTM)	Masa berlaku selamanya	Dinas Kehutanan dan perkebunan	Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2006 Tentang Ipktm	10
				Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 5 Tahun	

<b>No</b>	<b>Jenis Izin</b>	<b>Masa Berlaku</b>	<b>Pemberi Pertimbangan</b>	<b>Dasar Hukum</b>	<b>Waktu Maksimal (Hari) SOP</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
				2014 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Dibidang Perizinan Kepada Kepala KPPT Kabupaten Sumbawa	
10	Izin Menimbun dan Mengecer Kayu	1 tahun	Dinas Kehutanan dan perkebunan	Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Pengendalian Peredaran Hasil Hutan Kayu Dari Luar Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat	10
				Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Dibidang Perizinan Kepada Kepala KPPT Kabupaten Sumbawa	
11	Izin Usaha Pembudidayaan Ikan	3 tahun	Dinas Kelautan dan perikanan	Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2012 Retribusi Perizinan Tertentu	10
				Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 Tentang Usaha Perikanan	

<b>No</b>	<b>Jenis Izin</b>	<b>Masa Berlaku</b>	<b>Pemberi Pertimbangan</b>	<b>Dasar Hukum</b>	<b>Waktu Maksimal (Hari) SOP</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
				Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Dibidang Perizinan Kepada Kepala KPPT Kabupaten Sumbawa	
12	Izin Usaha daya tarik Wisata	1 tahun	Disporabud par dan Sat PolPP	Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor Pm 90/Hk.501/Mkp/2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Daya Tarik Wisata	10
				Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2012 Retribusi Perizinan Tertentu	
				Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Dibidang Perizinan Kepada Kepala KPPT Kabupaten Sumbawa	

<b>No</b>	<b>Jenis Izin</b>	<b>Masa Berlaku</b>	<b>Pemberi Pertimbangan</b>	<b>Dasar Hukum</b>	<b>Waktu Maksimal (Hari) SOP</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
13	Izin Usaha Kawasan pariwisata	1 tahun	Disporabud par dan Sat PolPP	Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Dibidang Perizinan Kepada Kepala KPPT Kabupaten Sumbawa	10
				Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2012 Retribusi Perizinan Tertentu	
				Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor Pm 90/Hk.501/Mkp/2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Daya Tarik Wisata	
14	Izin usaha Jasa Transportasi Wisata	1 tahun	Disporabud par dan Sat PolPP	Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2012 Retribusi Perizinan Tertentu	10
				Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pelimpahan Sebagian	



<b>No</b>	<b>Jenis Izin</b>	<b>Masa Berlaku</b>	<b>Pemberi Pertimbangan</b>	<b>Dasar Hukum</b>	<b>Waktu Maksimal (Hari) SOP</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
				Kewenangan Dibidang Perizinan Kepada Kepala KPPT Kabupaten Sumbawa	
				Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor Pm 90/Hk.501/Mkp/2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Daya Tarik Wisata	
15	Izin Usaha Jasa Perjalanan Wisata	1 tahun	Disporabudpar dan Sat PolPP	Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2012 Retribusi Perizinan Tertentu	10
				Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Dibidang Perizinan Kepada Kepala KPPT Kabupaten Sumbawa	
				Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor Pm 90/Hk.501/Mkp/2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Daya Tarik	

<b>No</b>	<b>Jenis Izin</b>	<b>Masa Berlaku</b>	<b>Pemberi Pertimbangan</b>	<b>Dasar Hukum</b>	<b>Waktu Maksimal (Hari) SOP</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
				Wisata	
16	Izin Usaha Jasa Makanan dan Minuman	1 tahun	Disporabudpar dan Sat PolPP	Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2012 Retribusi Perizinan Tertentu	10
				Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Dibidang Perizinan Kepada Kepala KPPT Kabupaten Sumbawa	
				Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor Pm 90/Hk.501/Mkp/2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Daya Tarik Wisata	
17	Izin Usaha Penyediaan Akomodasi	1 tahun	Disporabudpar dan Sat PolPP	Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2012 Retribusi Perizinan Tertentu	10

<b>No</b>	<b>Jenis Izin</b>	<b>Masa Berlaku</b>	<b>Pemberi Pertimbangan</b>	<b>Dasar Hukum</b>	<b>Waktu Maksimal (Hari) SOP</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
				Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Dibidang Perizinan Kepada Kepala KPPT Kabupaten Sumbawa	
				Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor Pm 90/Hk.501/Mkp/2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Daya Tarik Wisata	
18	Izin Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi	1 tahun	Disporabudpar dan Sat PolPP	Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2012 Retribusi Perizinan Tertentu	10
				Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Dibidang Perizinan Kepada Kepala KPPT Kabupaten Sumbawa	

<b>No</b>	<b>Jenis Izin</b>	<b>Masa Berlaku</b>	<b>Pemberi Pertimbangan</b>	<b>Dasar Hukum</b>	<b>Waktu Maksimal (Hari) SOP</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
				Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor Pm 90/Hk.501/Mkp/2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Daya Tarik Wisata	
19	Izin Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan pameran	1 tahun	Disporabudpar dan Sat PolPP	Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2012 Retribusi Perizinan Tertentu	10
				Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Dibidang Perizinan Kepada Kepala KPPT Kabupaten Sumbawa	
				Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor Pm 90/Hk.501/Mkp/2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Daya Tarik Wisata	

<b>No</b>	<b>Jenis Izin</b>	<b>Masa Berlaku</b>	<b>Pemberi Pertimbangan</b>	<b>Dasar Hukum</b>	<b>Waktu Maksimal (Hari) SOP</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
20	Izin Usaha Jasa Informasi Pariwisata	1 tahun	Disporabudpar dan Sat PolPP	Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Dibidang Perizinan Kepada Kepala KPPT Kabupaten Sumbawa	10
				Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor Pm 90/Hk.501/Mkp/2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Daya Tarik Wisata	
21	Izin Usaha jasa Konsultan Pariwisata	1 tahun	Disporabudpar dan Sat PolPP	Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Dibidang Perizinan Kepada Kepala KPPT Kabupaten Sumbawa	10
				Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor Pm 90/Hk.501/Mkp/2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran	

<b>No</b>	<b>Jenis Izin</b>	<b>Masa Berlaku</b>	<b>Pemberi Pertimbangan</b>	<b>Dasar Hukum</b>	<b>Waktu Maksimal (Hari) SOP</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
				Usaha Daya Tarik Wisata	
22	Izin Usaha Jasa Pramuwisata	1 tahun	Disporabudpar dan Sat PolPP	Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Dibidang Perizinan Kepada Kepala KPPT Kabupaten Sumbawa	10
				Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor Pm 90/Hk.501/Mkp/2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Daya Tarik Wisata	
23	Izin Usaha jasa Tirta	1 tahun	Disporabudpar dan Sat PolPP	Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Dibidang Perizinan Kepada Kepala KPPT Kabupaten Sumbawa	10

<b>No</b>	<b>Jenis Izin</b>	<b>Masa Berlaku</b>	<b>Pemberi Pertimbangan</b>	<b>Dasar Hukum</b>	<b>Waktu Maksimal (Hari) SOP</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
				Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor Pm 90/Hk.501/Mkp/2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Daya Tarik Wisata	
24	Izin Usaha SPA	1 tahun	Disporabud par dan Sat PolPP	Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Dibidang Perizinan Kepada Kepala KPPT Kabupaten Sumbawa	10
				Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor Pm 90/Hk.501/Mkp/2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Daya Tarik Wisata	
25	Izin Usaha Peternakan Unggas	1 tahun	Dinas Peternakan dan Kesehatan hewan	Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Dibidang Perizinan Kepada Kepala KPPT	10

<b>No</b>	<b>Jenis Izin</b>	<b>Masa Berlaku</b>	<b>Pemberi Pertimbangan</b>	<b>Dasar Hukum</b>	<b>Waktu Maksimal (Hari) SOP</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
26	Izin Usaha Peternakan Kambing	1 tahun	Dinas Peternakan dan Kesehatan hewan	Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Dibidang Perizinan Kepada Kepala KPPT	10
27	Izin Usaha Peternakan Sapi, Kerbau, dan Kuda Perah	1 tahun	Dinas Peternakan dan Kesehatan hewan	Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Perbup Sumbawa Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Dibidang Perizinan Kepada Kepala KPPT Kabupaten Sumbawa	10
28	Izin Usaha Peternakan Kuda	1 tahun	Dinas Peternakan dan Kesehatan hewan	Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Perbup Sumbawa Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Dibidang Perizinan Kepada Kepala KPPT Kabupaten Sumbawa	10



<b>No</b>	<b>Jenis Izin</b>	<b>Masa Berlaku</b>	<b>Pemberi Pertimbangan</b>	<b>Dasar Hukum</b>	<b>Waktu Maksimal (Hari) SOP</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
29	Izin Usaha Peternakan Sapi, Kerbau, dan Kuda bibit	1 tahun	Dinas Peternakan dan Kesehatan hewan	Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Dibidang Perizinan Kepada Kepala KPPT Kabupaten Sumbawa	10
30	Izin Usaha Pengiriman Ternak atau bahan ternak asal pulau	1 tahun	Dinas Peternakan dan Kesehatan hewan	Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pengaturan Lalulintas Ternak Dan Atau Bahan Asal Ternak	
				Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Dibidang Perizinan Kepada Kepala KPPT Kabupaten Sumbawa	
31	Izin Usaha Pemotongan Hewan	1 tahun	Dinas Peternakan dan Kesehatan hewan	Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 5 Tahun	10

<b>No</b>	<b>Jenis Izin</b>	<b>Masa Berlaku</b>	<b>Pemberi Pertimbangan</b>	<b>Dasar Hukum</b>	<b>Waktu Maksimal (Hari) SOP</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
				2014 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Dibidang Perizinan Kepada Kepala KPPT Kabupaten Sumbawa	
32	Izin Usaha Toko Obat Hewan	1 tahun	Dinas Peternakan dan Kesehatan hewan	Peraturan Pemerintah Nomor 74/Permentan/Ot.1 40/12 / 2007 Tentang Pengawasan Obat Hewan	
				Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Dibidang Perizinan Kepada Kepala KPPT	
				Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/Permentan/Ot.1 40/4/2009 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Obat Hewan	
33	Izin Usaha Praktek Berkelompok Dokter dan Dokter Gigi	5 tahun	Dinas Kesehatan	Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Dibidang Perizinan Kepada Kepala KPPT	10

<b>No</b>	<b>Jenis Izin</b>	<b>Masa Berlaku</b>	<b>Pemberi Pertimbangan</b>	<b>Dasar Hukum</b>	<b>Waktu Maksimal (Hari) SOP</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
				Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512/Menkes/Iv/2007 Tentang Izin Praktik Dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran	
34	Izin Usaha Praktek Dokter	5 tahun	Dinas Kesehatan	Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Dibidang Perizinan Kepada Kepala KPPT	10
				Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1419 /Menkes/Per/X/2005 Tentang Penyelenggaraan Praktek Dokter Dan Dokter Gigi	
				Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512/Menkes/Iv/2007 Tentang Izin Praktik Dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran	
35	Izin Usaha Praktek Dokter Gigi	5 tahun	Dinas Kesehatan	Keputusan Kepala KPPT Tentang Izin Usaha Praktek Dokter Gigi	10
				Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512/Menkes/Iv/2007 Tentang Izin Praktik Dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran	

<b>No</b>	<b>Jenis Izin</b>	<b>Masa Berlaku</b>	<b>Pemberi Pertimbangan</b>	<b>Dasar Hukum</b>	<b>Waktu Maksimal (Hari) SOP</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
				Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1419 /Menkes/Per/X/2005 Tentang Penyelenggaraan Praktek Dokter Dan Dokter Gigi	
				Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Dibidang Perizinan Kepada Kepala KPPT	
36	Izin Usaha Praktek Bidan	5 tahun	Dinas Kesehatan	Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Dibidang Perizinan Kepada Kepala KPPT	10
				Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1464/Menkes/Per/X/2010 Tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Bidan	
37	Izin Usaha Praktek Perawat	5 tahun	Dinas Kesehatan	Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Dibidang Perizinan Kepada Kepala KPPT	10

<b>No</b>	<b>Jenis Izin</b>	<b>Masa Berlaku</b>	<b>Pemberi Pertimbangan</b>	<b>Dasar Hukum</b>	<b>Waktu Maksimal (Hari) SOP</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
				Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1239/Menkes/Sk/Xi/2001 Tentang Registrasi Dan Praktik Perawat	
38	Izin Usaha Klinik	5 tahun	Dinas Kesehatan	Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Dibidang Perizinan Kepada Kepala KPPT	10
				Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 411/Menkes/Per/Iii/2010 Tentang Laboratorium Klinik	
39	Izin Rumah Sakit Umum	5 tahun		Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Dibidang Perizinan Kepada Kepala KPPT	10
				Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 147/Menkes/Per/1/2010 Tentang Perizinan Rumah Sakit	
				Peraturan Bupati Nomor 1321 Tahun 2013 Tentang Izin Operasional Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa	

<b>No</b>	<b>Jenis Izin</b>	<b>Masa Berlaku</b>	<b>Pemberi Pertimbangan</b>	<b>Dasar Hukum</b>	<b>Waktu Maksimal (Hari) SOP</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
40	Izin Klinik Kecantikan	5 tahun	Dinas Kesehatan	Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Dibidang Perizinan Kepada Kepala KPPT	10
41	Izin Usaha Apotek	5 tahun	Dinas Kesehatan	Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Dibidang Perizinan Kepada Kepala KPPT	9
				Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1332/Menkes/Sk/X/2002 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek	
42	Izin Penyelenggaraan Lab Medis	5 tahun	Dinas Kesehatan	Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Dibidang Perizinan Kepada Kepala KPPT	10
				Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 411/Menkes/Per/Iii/2010 Tentang Laboratorium Klinik	

<b>No</b>	<b>Jenis Izin</b>	<b>Masa Berlaku</b>	<b>Pemberi Pertimbangan</b>	<b>Dasar Hukum</b>	<b>Waktu Maksimal (Hari) SOP</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
43	Izin Penyelenggaraan Optikal	5 tahun	Dinas Kesehatan	Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Dibidang Perizinan Kepada Kepala KPPT	10
				Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1424/Menkes/Sk/Xi/2002 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Optikal	
44	Izin Usaha Toko Obat	5 tahun	Dinas Kesehatan	Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Dibidang Perizinan Kepada Kepala KPPT	10
45	Izin Penyelenggaraan Lab Gigi	5 tahun	Dinas Kesehatan	Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Dibidang Perizinan Kepada Kepala KPPT	10
46	Izin Usaha Pengobatan Tradisional	5 tahun	Dinas Kesehatan	Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Dibidang Perizinan Kepada Kepala	10

<b>No</b>	<b>Jenis Izin</b>	<b>Masa Berlaku</b>	<b>Pemberi Pertimbangan</b>	<b>Dasar Hukum</b>	<b>Waktu Maksimal (Hari) SOP</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
				KPPT	

Sumber: KPPT Kabupaten Sumbawa, 2015

### 2.4.3.3 Pengenaan Pajak Daerah (Jumlah dan macam pajak daerah dan retribusi daerah)

Sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Kabupaten Sumbawa telah menyesuaikan dan menetapkan beberapa Peraturan Daerah yang terkait dengan macam dan jenis pajak daerah dan retribusi daerah sebagai berikut.

**Tabel 2.272**  
**Jumlah Dan Macam Pajak Dan Retribusi Daerah Di Kabupaten Sumbawa**

<b>No.</b>	<b>Jenis Pajak dan Retribusi Daerah</b>
<b>1</b>	<b>2</b>
I	<b>Pajak Daerah</b>
1	Pajak Hotel
2	Pajak Restoran
3	Pajak Hiburan
4	Pajak Reklame
5	Pajak Penerangan Jalan
6	Pajak Parkir
7	Pajak Air Tanah
8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
9	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
II	<b>Retibusi Daerah</b>
A	<b>Retribusi Jasa Umum</b>
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
4	Retribusi Pelayanan Pasar
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
6	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
7	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
B	<b>Retribusi Jasa Usaha</b>
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
2	Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan
3	Retribusi Tempat Pelelangan
4	Retribusi Terminal
5	Retribusi Tempat Khusus Parkir
6	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggarahan/Villa



<b>No.</b>	<b>Jenis Pajak dan Retribusi Daerah</b>
<b>1</b>	<b>2</b>
7	Retribusi Rumah Potong Hewan
8	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan
9	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
10	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
<b>C</b>	<b>Retribusi Perizinan Tertentu</b>
1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
2	Retribusi Izin Gangguan
3	Retribusi Izin Trayek
4	Retribusi Izin Usaha Perikanan
5	Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing

*Sumber: Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kab. Sumbawa*

#### **2.4.3.4 Peraturan Daerah (Perda) Yang Mendukung Iklim Usaha**

Pemerintah Kabupaten Sumbawa dalam mendorong Investasi, telah menetapkan Perda yang mendukung iklim investasi, sebagai berikut.

- 1) Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kab. Daerah Tk II Sumbawa Nomor 6 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Trayek;
- 2) Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Usaha Perikanan
- 3) Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 34 tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan;
- 4) Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
- 5) Peraturan Daerah Nomo 33 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
- 6) Peraturan Daerah Nomor 34 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.
- 7) Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2011 tentang Izin Pertambangan Rakyat;
- 8) Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- 9) Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi;
- 10) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Lalu Lintas Ternak Dan/Atau Bahan Asal Ternak;
- 11) Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
- 12) Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan;
- 13) Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Air Tanah;
- 14) Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
- 15) Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
- 16) Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

#### **2.4.4 Sumber Daya Manusia**

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan kunci keberhasilan pembangunan nasional dan daerah. Hal ini dapat disadari oleh

karena manusia merupakan subyek sekaligus obyek dalam pembangunan. Mengingat hal tersebut, maka pembangunan SDM diarahkan agar benar-benar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin dan profesional.

Kualitas sumberdaya manusia juga memiliki peranan penting dalam meningkatkan daya saing daerah dan perkembangan investasi di daerah. Indikator kualitas sumberdaya manusia dalam rangka peningkatan daya saing daerah dapat dilihat dari kualitas tenaga kerja dan tingkat ketergantungan penduduk untuk melihat sejauhmana beban ketergantungan penduduk. Kualitas manusia yang memajukan peradaban tersebut pada umumnya berada pada usia produktif 15-64 tahun. Oleh karena itu ada-tidaknya, besar-kecilnya kelompok usia tersebut menjadi "bonus demografis" yang dapat menjadi pendorong kemajuan.

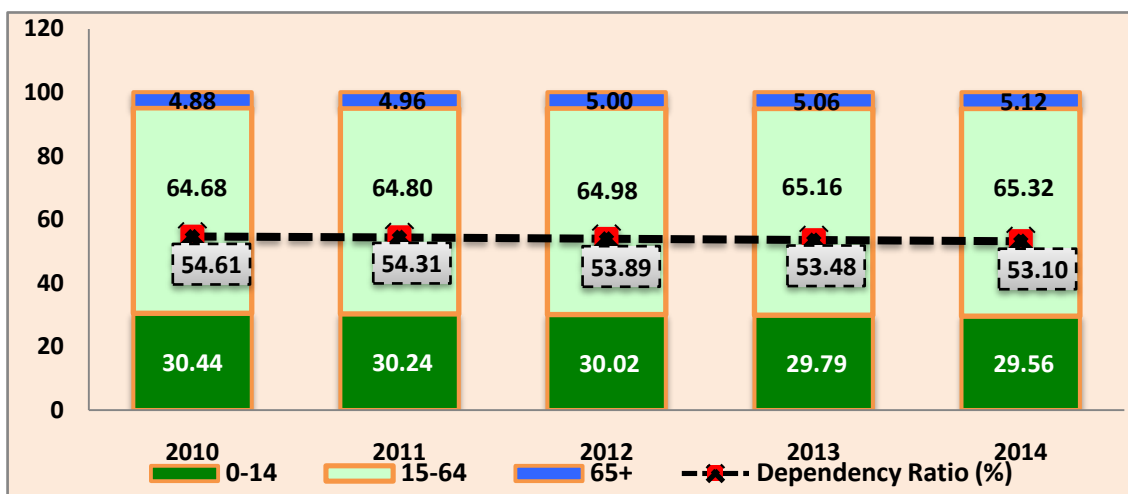
Struktur penduduk Kabupaten Sumbawa dari tahun 2010 s/d 2014 menunjukkan trend positif, dengan menurunnya rasio ketergantungan penduduk usia non produktif terhadap penduduk usia produktif sebesar 1,51 poin, yakni dari 54,61% pada tahun 2010 menjadi 53,10% pada tahun 2014. Komposisi penduduk seperti terlihat pada tabel berikut, menunjukkan bahwa ada bonus demografi dalam 8-10 tahun mendatang di Kabupaten Sumbawa.

**Tabel 2.273**  
**Komposisi Penduduk Dan Rasio Ketergantungan Tahun 2010-2014**  
**Kabupaten Sumbawa**

Tahun	0-14 tahun (%)	15-64 tahun (%)	> 64 tahun (%)	RK (%)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
2010	30,44	64,68	4,88	54,61
2011	30,24	64,80	4,96	54,31
2012	30,02	64,98	5,00	53,89
2013	29,79	65,16	5,06	53,48
2014	29,56	65,32	5,12	53,10

*Sumber: BPS Kab. Sumbawa (Data diolah)*

Berdasarkan komposisi penduduk tersebut diatas, tergambar rasio ketergantungan (*dependency ratio*), yakni perbandingan antara penduduk kelompok usia tidak produktif (penduduk usia muda 0-14 tahun dan usia tua di atas 65 tahun) terhadap kelompok usia produktif (penduduk usia antara 15-64 tahun), sebagaimana gambar berikut ini.



**Gambar 2.46**  
**Komposisi Penduduk Dan Dependensi Ratio Tahun 2010-2014**  
**Di Kabupaten Sumbawa**

Secara keseluruhan komponen indeks pembangunan manusia di Kabupaten Sumbawa tahun 2014 terlihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.274**  
**Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2014 Di Kabupaten Sumbawa**

<b>No</b>	<b>Provinsi/Kabupaten</b>	<b>UHH</b>	<b>HLS</b>	<b>RLS</b>	<b>PPP</b>	<b>IPM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1	Lombok Barat	64,50	12,09	5,63	10.470	63,52
2	Lombok Tengah	64,45	12,36	5,52	8.652	61,88
3	Lombok Timur	64,04	13,10	6,06	7.750	62,07
<b>4</b>	<b>Sumbawa</b>	<b>65,72</b>	<b>11,94</b>	<b>7,31</b>	<b>7.519</b>	<b>62,88</b>
5	Dompu	65,06	13,16	7,45	7.239	63,53
6	Bima	64,56	12,70	7,29	7.198	62,61
7	Sumbawa Barat	65,85	13,21	7,44	9.922	67,19
8	Lombok Utara	65,19	12,31	4,97	7.594	60,17
9	Kota Mataram	70,18	15,27	9,04	13.021	75,93
10	Kota Bima	69,03	14,92	9,58	9.352	72,23
<b>11</b>	<b>Nusa Tenggara Barat</b>	<b>64,90</b>	<b>12,73</b>	<b>6,67</b>	<b>8.987</b>	<b>64,31</b>

*Sumber: BPS Kab. Sumbawa, 2015*

Disamping indikator sosial ekonomi tersebut, kultur budaya masyarakat Sumbawa yang egaliter, terbuka dan memiliki etos "sate to" dan "kangila" menjadi modal sosial keberhasilannya dalam bidang-bidang tertentu. Hal ini terbukti dengan banyak tokoh-tokoh berpengaruh di tingkat provinsi dan nasional yang berasal dari Sumbawa. Disamping itu, perkembangan yang menggembirakan adalah mulai maraknya perguruan tinggi dari berbagai disiplin ilmu.

**BAB III**  
**GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**  
**SERTA KERANGKA PENDANAAN**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Termasuk dalam lingkup pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Dalam rangka memantapkan perencanaan pengelolaan keuangan daerah, maka perlu menggambarkan kondisi historis sebagai bahan kajian dalam memperhitungkan proyeksi kemampuan keuangan masa depan dalam mendukung pelaksanaan program-program pembangunan yang direncanakan selama kurun waktu tahun 2016-2020.

**3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu**

**3.1.1. Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**

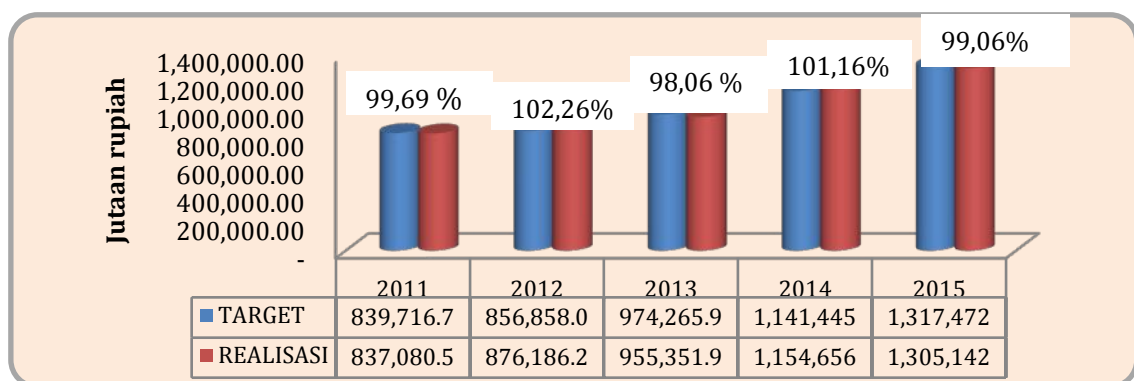
Bagian ini menguraikan tentang pendapatan dan belanja daerah. Uraian pendapatan daerah disajikan terkait dengan target dan realisasi pendapatan, perkembangan pendapatan dan proporsi sumber pendapatan, dan pencapaian kinerja pendapatan. Sedangkan mengenai belanja daerah akan disajikan mengenai proporsi belanja, belanja tidak langsung, dan gambaran realisasi belanja daerah.

**3.1.1.1. Pendapatan Daerah**

**a. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah**

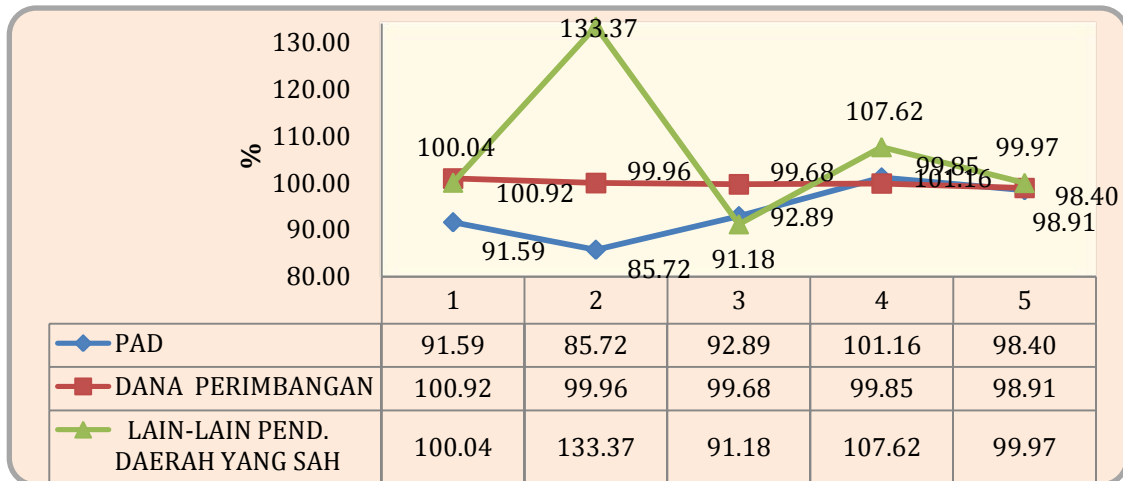
Pendapatan daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Realisasi pendapatan daerah Kabupaten Sumbawa dalam lima tahun terakhir menunjukkan kinerja sebagaimana ditetapkan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa setiap tahun.

Gambaran target dan realisasi kinerja pendapatan daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2011-2015 disajikan sebagai berikut.



**Gambar 3.1**  
**Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa**  
**(2011-2015) (Dalam Juta Rupiah)**

Realisasi pendapatan daerah Kabupaten Sumbawa pada tahun 2011 mencapai 99,69%, tahun 2012 sebesar 102,26%, tahun 2013 mencapai 98,06%, tahun 2014 sebesar 101,16% dan tahun 2015 sebesar 99,06%. Selanjutnya realisasi pendapatan daerah menurut kelompok pendapatan disajikan sebagai berikut.



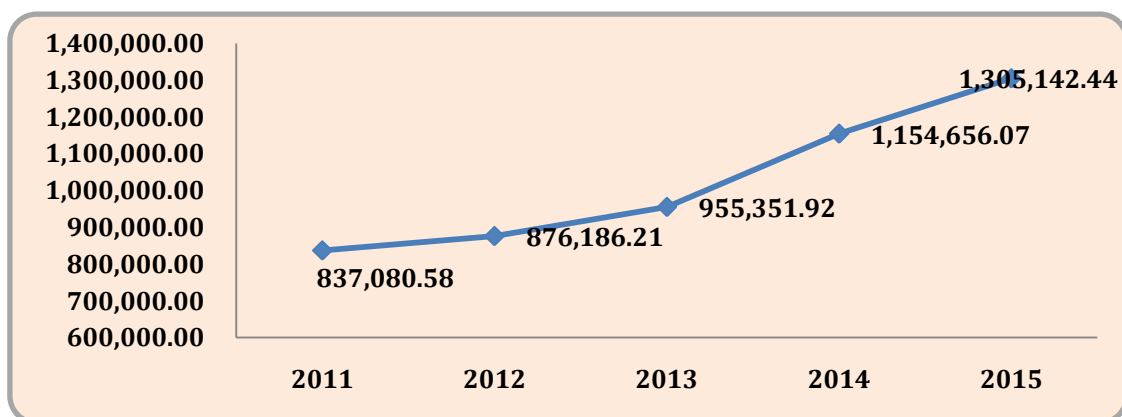
**Gambar 3.2**  
**Persentase (%) Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa Menurut Kelompok Pendapatan (2011-2015)**

Sepanjang periode tahun 2011-2015, secara rata-rata realisasi PAD berada pada posisi terendah sebesar 93,95%, Dana Perimbangan sebesar 99,87%, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar 106,44%.

**b. Perkembangan Pendapatan Daerah**

Perkembangan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Sumbawa meningkat dari tahun ke tahun sepanjang periode tahun 2011-2015. Pada tahun 2011 sebesar Rp.837.080.583.562,25,- pada tahun 2012 sebesar Rp.876.186.211.355,64,- pada tahun 2013 mencapai Rp. 955.351.921.410,97,- pada tahun 2014 sebesar Rp.1.154.656.071.636,99,- dan pada tahun 2015 sebesar Rp.1.305.142.444.242,40,- sebagaimana disajikan pada Tabel 3.1, dengan rata-rata pertumbuhan realisasi sebesar 14,87% per tahun.

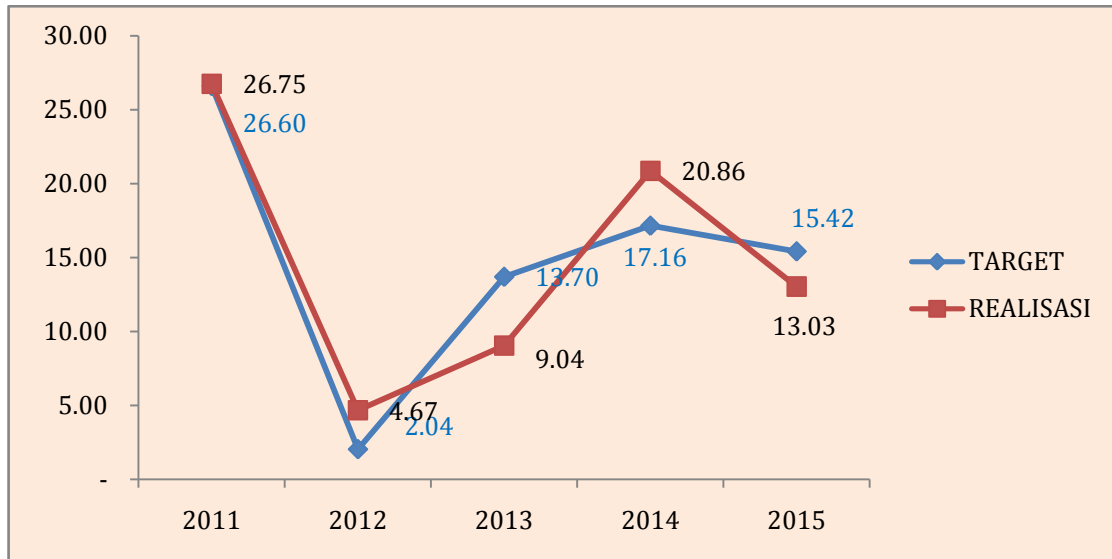
Gambaran grafis realisasi pendapatan daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2011-2015 disajikan pada gambar berikut.



**Gambar 3.3**  
**Realisasi (Rp) Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa (2011-2015)**

**(Dalam Juta Rupiah)**

Pertumbuhan target dan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2011-2015 disajikan pada gambar berikut.



**Gambar 3.4**  
**Pertumbuhan Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa (2011-2015)**

Selanjutnya secara lebih rinci mengenai gambaran rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah dalam periode tahun 2011-2015, disajikan sebagai berikut.

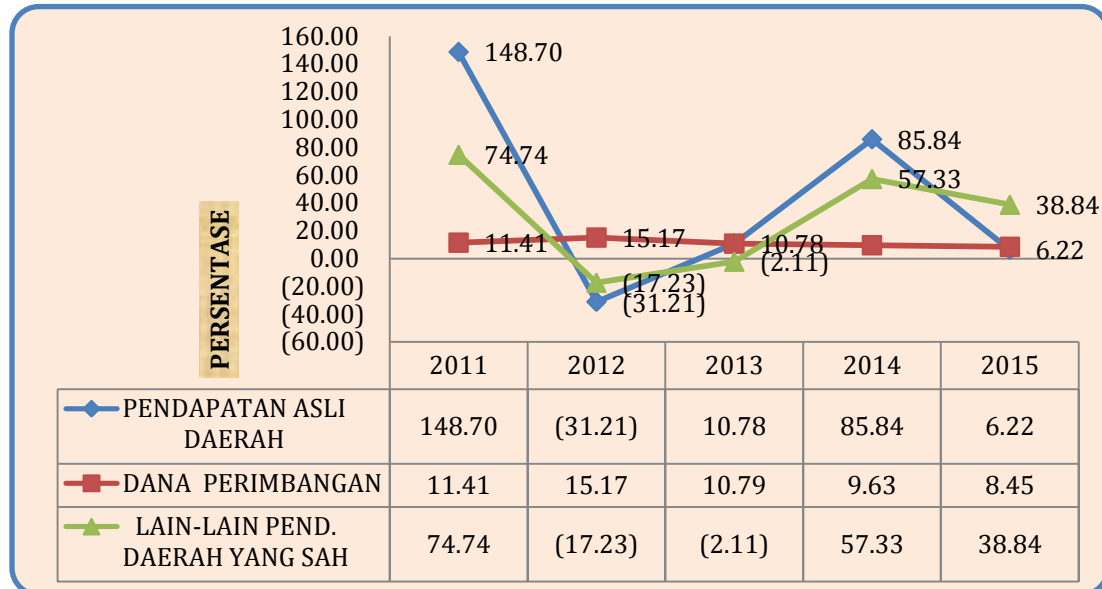
**Tabel 3.1**  
**Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2011 – 2015**

URAIAN	Tahun Anggaran					rata-rata
	2011	2012	2013	2014	2015	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>26,75</b>	<b>4,67</b>	<b>9,04</b>	<b>20,86</b>	<b>13,03</b>	<b>14,87</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>149</b>	<b>(31,21)</b>	<b>10,78</b>	<b>85,84</b>	<b>6,22</b>	<b>44,07</b>
Hasil Pajak Daerah	80	14,43	16,21	41,44	4,75	31,28
Hasil Retribusi Daerah	40	86,53	7,46	112,18	(75,76)	34,17
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yg dipisahkan	320	(80,62)	24,69	22,73	17,44	60,80
Lain-lain PAD yg sah	23	47,82	(0,54)	150,04	180,40	80,17
<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>11,41</b>	<b>15,17</b>	<b>10,79</b>	<b>9,63</b>	<b>8,45</b>	<b>11,09</b>
Bagi Hsl Pjk/Bagi Hsl Bukan Pajak	0,44	(6,32)	(6,50)	(10,37)	(0,95)	(4,74)
Dana Alokasi Umum	13,64	18,21	10,49	11,94	4,49	11,75
Dana Alokasi Khusus	3,82	7,69	26,25	1,76	48,28	17,56
<b>LAIN-LAIN PEND. DAERAH YANG SAH</b>	<b>74,74</b>	<b>(17,23)</b>	<b>(2,11)</b>	<b>57,33</b>	<b>38,84</b>	<b>30,32</b>
Dana Hibah	-	100,00	(94,94)	51,23	7,07	12,67
Dana Bg Hsl Pjk dr Prop. & Pemda lainnya	(23,23)	20,02	2,00	124,28	(4,99)	23,61
Dana Penyes. & Otonomi Khusus	110,84	(42,95)	33,64	44,62	52,49	39,73
Bant. Keu. dr Propinsi / Pem. Daerah Lainnya	(11,78)	(91,00)	(50,00)	(100,00)	-	(50,56)
Pendapatan Lainnya	-	-	-	-	100,00	20,00

Sumber: DPPK Kab. Sumbawa (2015)

Tabel 3.1 menunjukkan bahwa rata-rata per tahun pertumbuhan pendapatan daerah Kabupaten Sumbawa dalam lima tahun terakhir adalah 14,87%, dimana pertumbuhan PAD mencapai 44,07%, Dana Perimbangan bertumbuh 11,09% dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar 30,32% per tahun. Tingginya rata-rata laju pertumbuhan realisasi PAD lebih disebabkan karena tingginya laju pertumbuhan tersebut pada tahun 2011, akan tetapi pada tahun 2015 kinerja realisasi PAD menunjukkan pertumbuhan yang sangat rendah (6,22%), artinya walaupun secara nominal mengalami peningkatan tetapi dari sisi pertumbuhan mengalami penurunan.

Sebagai gambaran pertumbuhan realisasi pendapatan daerah berdasarkan kelompok pendapatan disajikan pada gambar berikut.



**Gambar 3.5**  
**Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa Berdasarkan Kelompok Pendapatan (2011-2015)**

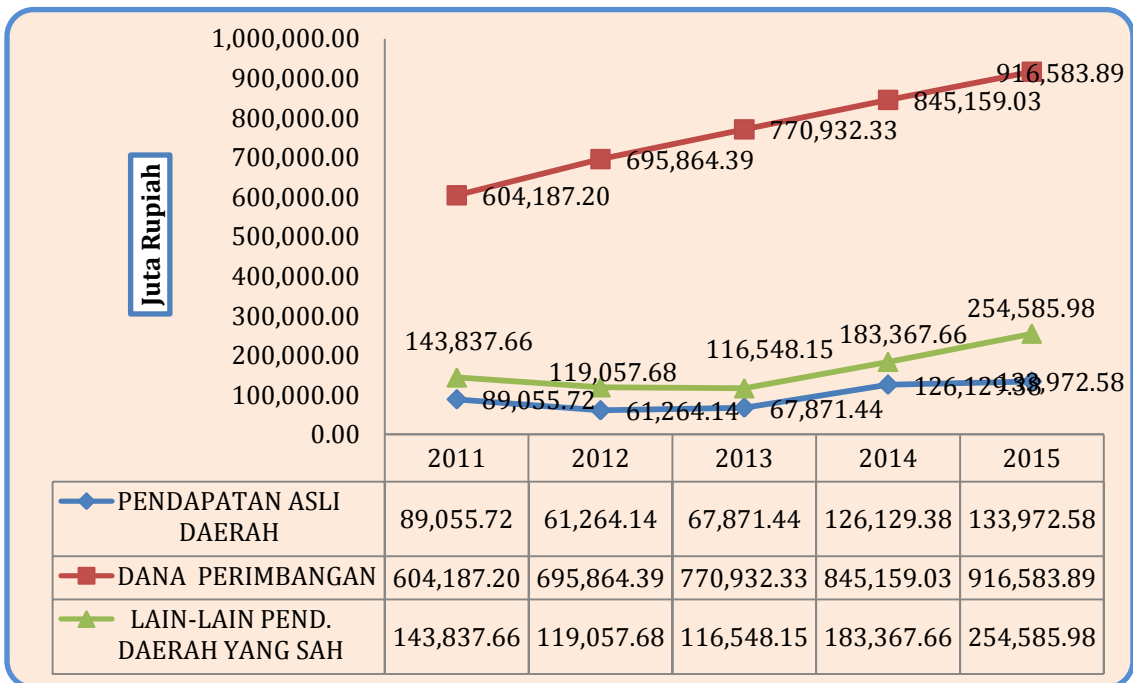
Gambar 3.5 menunjukkan fluktuasi pertumbuhan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Sumbawa dalam lima tahun terakhir. Penurunan signifikan laju pertumbuhan realisasi pendapatan daerah terjadi pada tahun 2012 terutama PAD, dari laju pertumbuhan 148,70% pada tahun 2011 menjadi negatif 31,21%. Demikian pula dengan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, pertumbuhannya menurun dari 74,74% menjadi negatif 17,23%. Penurunan laju pertumbuhan PAD dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah juga terjadi pada tahun 2015, dimana laju pertumbuhan realisasi PAD menurun dari 85,84% pada tahun 2014 menjadi 6,22% pada tahun 2015, dan laju pertumbuhan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah menurun dari 57,33% pada tahun 2014 menjadi 38,84% pada tahun 2015.

Memperhatikan kondisi pertumbuhan pendapatan daerah, khususnya PAD seperti ditunjukkan pada Gambar 3.4, maka diperlukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik dalam sistem dan pola serta strategi optimalisasinya. Adanya kecenderungan pertumbuhan PAD yang negatif yang berarti bahwa meskipun PAD tetap bertambah setiap tahun, namun semakin lama pertumbuhannya semakin kecil. Kondisi tersebut tidak sejalan dengan semangat untuk mewujudkan kemandirian daerah. Oleh karena itu, penting untuk dilakukan langkah-langkah perubahan yang strategis agar dapat

merubah trend negatif menjadi trend positif melalui optimalisasi PAD dalam periode lima tahun perencanaan ini.

**c. Proporsi Sumber Pendapatan Daerah**

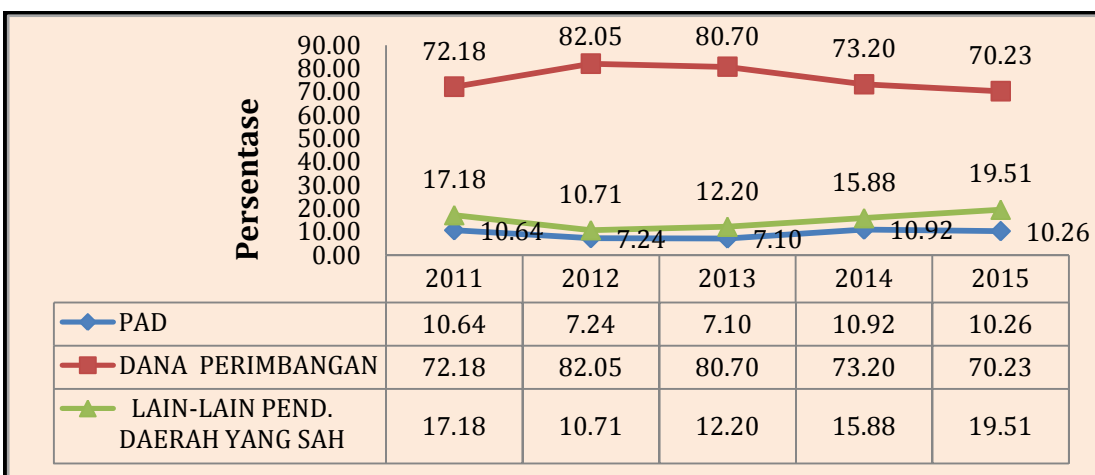
Pendapatan Daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Besarnya realisasi pendapatan daerah masing-masing sumber pendapatan daerah tersebut,



disajikan pada gambar berikut.

**Gambar 3.6**  
**Realisasi (Rp) Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa Menurut Sumber Pendapatan (2011-2015)**

Gambar 3.6. menunjukkan bahwa pendapatan daerah Kabupaten Sumbawa mengalami peningkatan setiap tahun, dengan proporsi sumber pendapatan terbesar masih didominasi oleh dana perimbangan. Gambaran proporsi sumber pendapatan terhadap pendapatan daerah Kabupaten Sumbawa sejak tahun 2011 sampai tahun 2015 disajikan sebagai berikut.

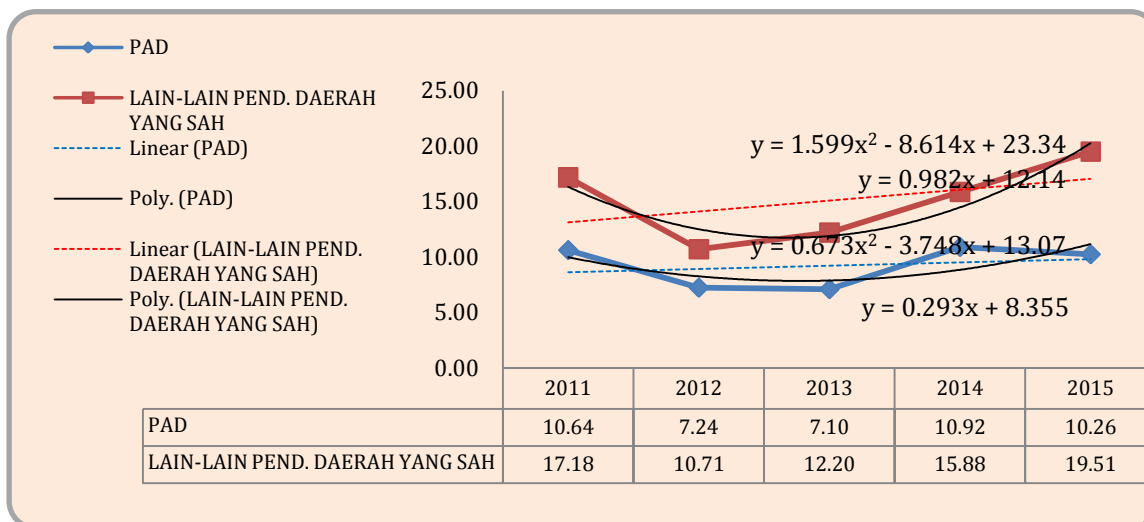


**Gambar 3.7**



### Proporsi (%) Sumber Pendapatan Daerah Terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa (2011-2015)

Gambar 3.7 menunjukkan bahwa selama lima tahun terakhir pendapatan daerah masih bergantung kepada dana perimbangan, sementara PAD dan Lain-Lain pendapatan daerah yang sah masih di bawah 20%. Secara grafis kecenderungan proporsi PAD dan lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah dimaksud disajikan pada gambar berikut.



**Gambar 3.8**  
**Trend Proporsi (%) Realisasi PAD dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa (2011-2015)**

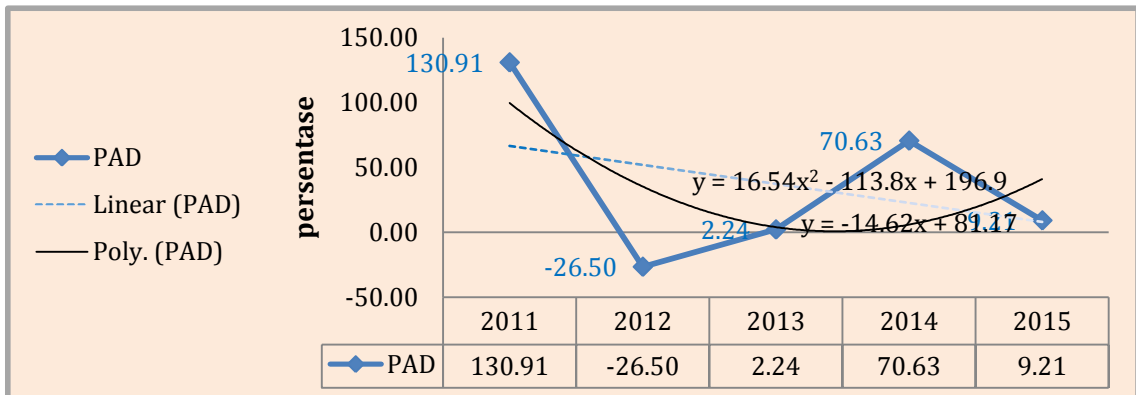
Gambar 3.8 menunjukkan bahwa meskipun dalam jangka panjang pendapatan daerah yang bersumber dari PAD dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah akan semakin meningkat, namun apabila tidak dilakukan perubahan-perubahan yang signifikan dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah terutama PAD dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, maka kontribusi keduanya terhadap realisasi pendapatan daerah tidak akan memberikan dampak yang besar dalam mewujudkan kemandirian daerah.

Struktur pendapatan daerah Kabupaten Sumbawa dalam periode tahun 2011-2015 menunjukkan bahwa sumber pendapatan dominan berasal dari Pemerintah (APBN), atau secara umum APBD Kabupaten Sumbawa masih belum mandiri. Meskipun secara umum struktur pendapatan daerah Kabupaten Sumbawa menunjukkan peningkatan, dimana proporsi dana perimbangan menunjukkan penurunan dari tahun ke tahun dan proporsi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah menunjukkan peningkatan, namun kontribusi PAD terhadap total pendapatan masih menempati posisi terendah. Salah satu kelemahan dari struktur pendapatan seperti ini adalah relatif tingginya ketidakpastian pendapatan dalam rangka perencanaan anggaran.

Isu penting untuk menjadi perhatian dalam perencanaan dan penganggaran Kabupaten Sumbawa pada periode perencanaan tahun 2016-2020 adalah mengenai rendahnya proporsi realisasi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah, dengan kecenderungan pertumbuhannya yang semakin menurun secara linear. Kondisi realisasi pendapatan asli daerah tersebut cenderung menimbulkan ketidakpastian di dalam perencanaan

penganggaran, terutama bila memperhatikan kecenderungan target PAD yang ditetapkan sebelumnya.

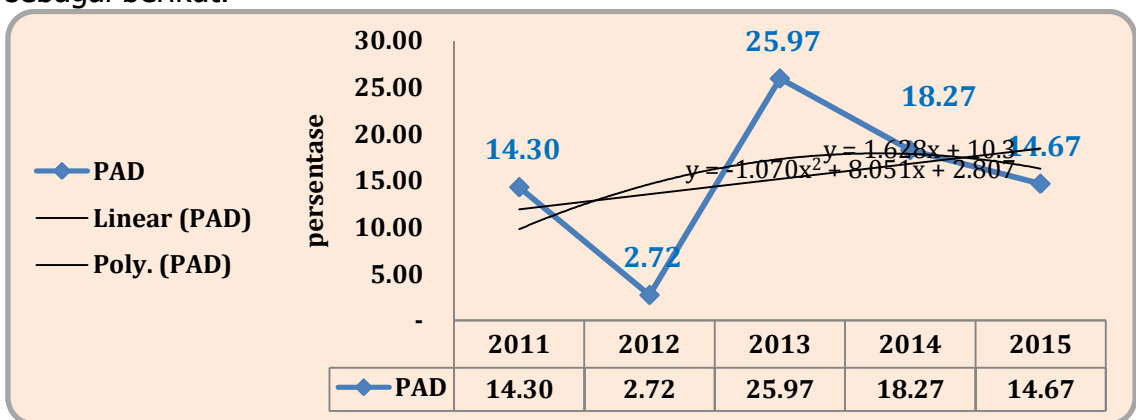
Dalam lima tahun terakhir kecenderungan target PAD Kabupaten Sumbawa menunjukkan penurunan secara linear, namun secara polynomial menunjukkan kecenderungan yang positif, seperti ditunjukkan pada gambar berikut.



**Gambar 3.9**  
**Pertumbuhan Target PAD Kabupaten Sumbawa (2011-2015)**

Pada gambar tersebut, terlihat bahwa target PAD pada tahun 2014 bertumbuh sangat tinggi mencapai 70,63% dibandingkan dengan tahun 2013 dan kemudian menurun menjadi 9,21% pada tahun 2015 dibanding tahun 2014. Pertumbuhan paling tinggi terjadi pada tahun 2011 mencapai 130,91%. Apabila pertumbuhan tersebut direrata, maka diperoleh rata-rata optimis pertumbuhan PAD selama tahun 2011-2015 sangat tinggi yaitu mencapai 37,30%.

Apabila analisis dilakukan dengan mengeluarkan beberapa komponen PAD yaitu 1) deviden PT. DMB karena tingginya kontribusinya hanya pada tahun 2011, 2) PBB-P2 karena baru menjadi kewenangan dan masuk menjadi komponen PAD pada tahun 2014, 3) dana kapitasi JKN pada FKTP karena baru dianggarkan dalam tahun 2014, dan 4) pendapatan kerjasama BLUD (BPJS) yang dianggarkan mulai tahun 2014, maka gambarannya menunjukkan kondisi sebagai berikut.



**Gambar 3.10**  
**Pertumbuhan Target PAD Kabupaten Sumbawa (2011-2015)**

Secara linear pertumbuhan target PAD Kabupaten Sumbawa memang semakin naik, namun secara polynomial menunjukkan kecenderungan sebaliknya. Rata-rata pertumbuhan PAD diluar deviden PT. DMB, PBB-P2, dana

kapitasi JKN pada FKTP dan Pendapatan kerjasama BLUD (BPJS) sebesar 15,19%. Secara keseluruhan target dan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2011-2015 sebagai berikut.

**Tabel 3.2**  
**Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa (2011-2015)**

URAIAN	TA. 2011		TA. 2012		TA. 2013		TA. 2014		TA. 2015	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>839.716.704,06</b>	<b>837.080.583,56</b>	<b>856.858.021,20</b>	<b>876.186.211,36</b>	<b>974.265.950,88</b>	<b>955.351.921,41</b>	<b>1.141.445.044,84</b>	<b>1.154.656.071,64</b>	<b>1.317.472.855,92</b>	<b>1.305.142.444,24</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>97.236.896,92</b>	<b>89.055.715,57</b>	<b>71.468.220,44</b>	<b>61.264.144,57</b>	<b>73.069.463,00</b>	<b>67.871.443,32</b>	<b>124.678.209,11</b>	<b>126.129.383,07</b>	<b>136.157.191,78</b>	<b>133.972.578,37</b>
Hasil Pajak Daerah	9.883.518,13	10.560.918,50	10.872.866,64	12.084.983,30	12.522.961,00	14.043.467,32	19.383.250,00	19.863.145,38	22.518.250,00	20.807.198,74
Hasil Retribusi Daerah	24.554.048,80	14.460.845,23	28.991.666,67	26.973.263,59	31.490.621,10	28.984.657,59	58.530.315,56	61.500.525,70	18.701.624,41	14.906.068,34
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yg dipisahkan	56.406.774,47	56.407.147,26	25.346.955,26	10.932.219,82	18.987.199,77	13.630.990,07	23.032.194,94	16.729.894,04	19.492.958,34	19.646.877,26
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yg sah	6.392.555,51	7.626.804,59	6.256.731,86	11.273.677,87	10.068.681,13	11.212.328,35	23.732.448,60	28.035.817,94	75.444.359,03	78.612.434,04
<b>DANA PERIMBANGAN</b>										
Bagi Hsl Pjk/Bagi Hsl Bukan Pajak	<b>598.697.724,02</b>	<b>604.187.204,87</b>	<b>696.119.081,60</b>	<b>695.864.391,40</b>	<b>773.377.009,94</b>	<b>770.932.327,33</b>	<b>846.387.180,31</b>	<b>845.159.025,57</b>	<b>926.664.159,83</b>	<b>916.583.889,18</b>
Dana Alokasi Umum	44.124.548,02	49.614.028,87	46.732.174,60	46.477.484,40	45.899.716,94	43.455.034,33	40.178.731,31	38.950.576,57	48.662.329,83	38.582.059,18
Dana Alokasi Khusus	495.852.276,00	495.852.276,00	586.148.017,00	586.148.017,00	647.640.513,00	647.640.513,00	724.963.659,00	724.963.659,00	757.530.420,00	757.530.420,00
<b>LAIN-LAIN PEND. DAERAH YANG SAH</b>	<b>58.720.900,00</b>	<b>58.720.900,00</b>	<b>63.238.890,00</b>	<b>63.238.890,00</b>	<b>79.836.780,00</b>	<b>79.836.780,00</b>	<b>81.244.790,00</b>	<b>81.244.790,00</b>	<b>120.471.410,00</b>	<b>120.471.410,00</b>
Dana Hibah										
Dana Bg Hsl Pjk dr Prop. & Pemda lainnya	<b>143.782.083,12</b>	<b>143.837.663,12</b>	<b>89.270.719,16</b>	<b>119.057.675,39</b>	<b>127.819.477,95</b>	<b>116.548.150,76</b>	<b>170.379.655,43</b>	<b>183.367.663,00</b>	<b>254.651.504,31</b>	<b>254.585.976,69</b>
Dana Penyes. & Otonomi Khusus	0,00	0,00	698.396,00	28.465.568,90	1.516.789,90	1.441.664,99	2.307.551,00	2.180.254,10	3.557.551,00	2.334.444,06
Bant. Keu. dr Propinsi / Pem. Daerah Lainnya	15.246.874,44	15.246.874,44	16.279.136,16	18.298.919,49	28.860.427,05	18.664.224,76	28.744.178,43	41.859.482,90	38.637.105,31	39.771.884,62
Pendapatan Lainnya	126.314.128,68	126.369.708,68	72.093.187,00	72.093.187,00	96.342.261,00	96.342.261,00	139.327.926,00	139.327.926,00	212.456.848,00	212.456.848,00

Sumber: DPPK Kab. Sumbawa (2015)

### **3.1.1.2. Neraca Daerah**

Neraca Daerah menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Daerah yang meliputi aset, kewajiban dan ekuitas dana pada suatu saat tertentu. Analisis neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan pemerintah daerah melalui perhitungan rasio likuiditas, solvabilitas dan rasio aktivitas serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Hal tersebut akan memberikan informasi penting kepada manajemen Pemerintah Daerah, DPRD maupun para kreditur/pemberi pinjaman kepada daerah serta masyarakat luas lainnya tentang posisi atau keadaan kekayaan atau aset daerah dan kewajibannya serta ekuitas dana pada batas waktu tertentu.

Elemen utama neraca Pemerintah Daerah meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Setiap elemen utama neraca tersebut diturunkan dalam sub-sub rekening yang lebih terinci. Perkembangan Neraca Pemerintah Kabupaten Sumbawa tahun 2011-2015 dan rata-rata pertumbuhannya dapat dilihat pada Tabel 3.3.

#### **a. Aset Daerah**

Aset memberikan informasi tentang sumber daya yang dimiliki dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi Pemerintah Daerah maupun masyarakat di masa datang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam satuan moneter. Aset terdiri dari (1) aset lancar, (2) investasi jangka panjang, (3) aset tetap, (4) dana cadangan, dan (5) aset lainnya. Tahun 2011, Kabupaten Sumbawa memiliki aset senilai Rp.1.905.251.552.046,52,- dan tahun 2015 sebesar Rp.2.695.792.686.071,75,- dengan rata-rata tingkat pertumbuhan 9,16% per tahun. Jumlah aset terbesar adalah berupa aset tetap, yang pada tahun 2015 mencapai Rp.2.348.675.183.930.68,- dan rata-rata tumbuh 8,37% pertahun. Aset tetap ini meliputi 87,12% dari seluruh aset Pemerintah Kabupaten Sumbawa.

**Tabel 3.3**  
**Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Sumbawa (2011-2014)**

No	URAIAN	Tahun					Rata2 Pertum buhan (%)
		2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I</b>	<b>ASET</b>						
	<b>A. ASET LANCAR</b>						
	<b>1. Kas</b>						
	1 Kas di Kas Daerah	81.201.159.301,36	71.397.843.450,63	68.142.554.865,19	149.133.956.059,18	101.812.768.570,07	17,62
	2 Kas di Kas Bendahara Penerimaan	-	31.122.416,32	370.973.796,00	14.332.315,00	33.832.504,00	282,98
	3 Kas di Kas Bendahara Pengeluaran	438.293.889,00	97.282.581,00	48.239.680,00	3.960.398,00	30.457.759,00	131,71
	4 Kas di Kas Dana Kapitasi JKN FKTP	-	-	-	2.367.788.525,00	3.419.104.252,00	36,10
	5 Kas di Kas Bendahara BLUD	-	-	-	-	5.452.187.251,00	25,00
	<b>2. Piutang</b>						
	1 Piutang Pajak	2.661.146.923,00	2.660.707.404,00	1.035.979.942,00	2.997.624.258,00	10.289.607.753,18	92,88
	2 Piutang Retribusi	-	36.875.000,00	1.939.806.075,23	4.883.891.808,40	112.740.917,55	1.328,64
	3 Piutang Dana Bagi Hasil	5.788.049.741,00	8.174.778.650,59	13.912.579.927,12	8.567.487.305,50	12.102.092.726,77	28,57
	4 Bag. Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	89.691.363,00	-	-	70.344.823,00	-	(25,00)
	5 Bag. Lancar Tuntutan Ganti Kerugian daerah	-	138.010.879,00	128.710.879,00	46.673.879,00	-	(17,62)

No	URAIAN	Tahun					Rata2 Pertum buan (%)
		2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8
	6 Piutang Lainnya	76.850.000,00	13.910.676.313,96	14.053.904.082,76	35.439.943.920,02	37.908.292.934,00	4.540,31
	7 Biaya Dibayar Dimuka	-	-	-	-	137.929.376,61	-
	<b>3. Persediaan</b>	<b>7.118.521.095,71</b>	<b>13.605.071.415,13</b>	<b>9.182.961.593,63</b>	<b>16.641.575.808,80</b>	<b>18.968.191.251,75</b>	<b>38,46</b>
	<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>	<b>97.373.712.313,07</b>	<b>110.052.368.110,63</b>	<b>108.815.710.840,93</b>	<b>220.167.579.099,90</b>	<b>190.267.205.295,93</b>	<b>25,16</b>
	<b>B. INVESTASI JANGKA PANJANG</b>						
	<b>1. Investasi Non Permanen</b>						
	1 Investasi Dana Bergulir	11.967.207.214,00	9.144.440.664,00	3.693.863.000,00	-	-	(45,80)
	2 Investasi Non Permanen Lainnya	-	-	-	-	-	-
	<b>2. Investasi Permanen</b>						
	1 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	66.402.967.006,47	75.635.794.920,46	91.014.902.000,55	96.489.500.795,49	103.864.230.589,14	11,97
	2 Penyertaan Modal dlm Proyek Pambang.	-	-	-	-	-	-
	3 Penyertaan Modal Perusahaan Patungan	-	-	-	-	-	-
	4 Investasi Permanen Lainnya	-	-	-	-	-	-
	<b>JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG</b>	<b>78.370.174.220,47</b>	<b>84.780.235.584,46</b>	<b>94.708.765.000,55</b>	<b>96.489.500.795,49</b>	<b>103.864.230.589,14</b>	<b>7,35</b>

No	URAIAN	Tahun					Rata2 Pertum buan (%)
		2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>C. ASET TETAP</b>						
	1 Tanah	333.419.620.209,00	348.459.579.349,00	348.465.121.965,00	370.868.988.367,00	683.512.732.829,00	23,81
	2 Peralatan dan Mesin	209.183.626.378,00	242.676.426.129,00	260.129.890.951,00	286.700.682.791,00	317.509.374.204,00	11,04
	3 Gedung dan Bangunan	415.460.374.894,90	515.819.692.000,90	567.515.497.615,90	622.795.310.296,90	694.515.012.174,90	13,86
	4 Jalan, Instalasi, Jaringan dan Jembatan	701.608.781.910,00	775.648.790.548,00	836.820.058.451,00	954.934.347.109,00	1.084.949.729.886,00	11,54
	5 Aktiva Tetap Lainnya	25.359.478.066,00	25.832.440.726,00	26.834.972.426,00	28.149.549.943,00	27.527.200.143,00	2,11
	6 Konstruksi dalam Pekerjaan	21.696.760.309,00	1.975.306.682,00	3.193.427.466,00	12.914.594.504,00	30.776.472.326,00	103,37
	7 Akumulasi Penyusutan	-	-	-	-	(490.115.337.632,22)	(25,00)
	<b>JUMLAH ASET TETAP</b>	<b>1.706.728.641.766,90</b>	<b>1.910.412.235.434,90</b>	<b>2.042.958.968.874,90</b>	<b>2.276.363.473.010,90</b>	<b>2.348.675.183.930,68</b>	<b>8,37</b>
	<b>D. ASET LAINNYA</b>						
	1 Dana Bergulir	-	-	-	-	-	-
	2 Tagihan Penjualan Angsuran	5.200.000,00	80.498.823,00	75.694.823,00	-	-	335,52
	3 Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	3.483.239.376,08	3.807.670.423,44	-	-	-	(22,67)
	4 Kemitraan dgn Pihak Ke-3	-	-	-	-	-	-
	5 Aset Tak Berwujud	59.075.500,00	59.075.500,00	59.075.500,00	59.075.500,00	126.406.000,00	28,49
	6 Aset Lain-lain	19.231.508.870,00	18.242.752.369,00	30.618.455.713,00	28.283.824.611,00	52.920.730.131,00	35,54



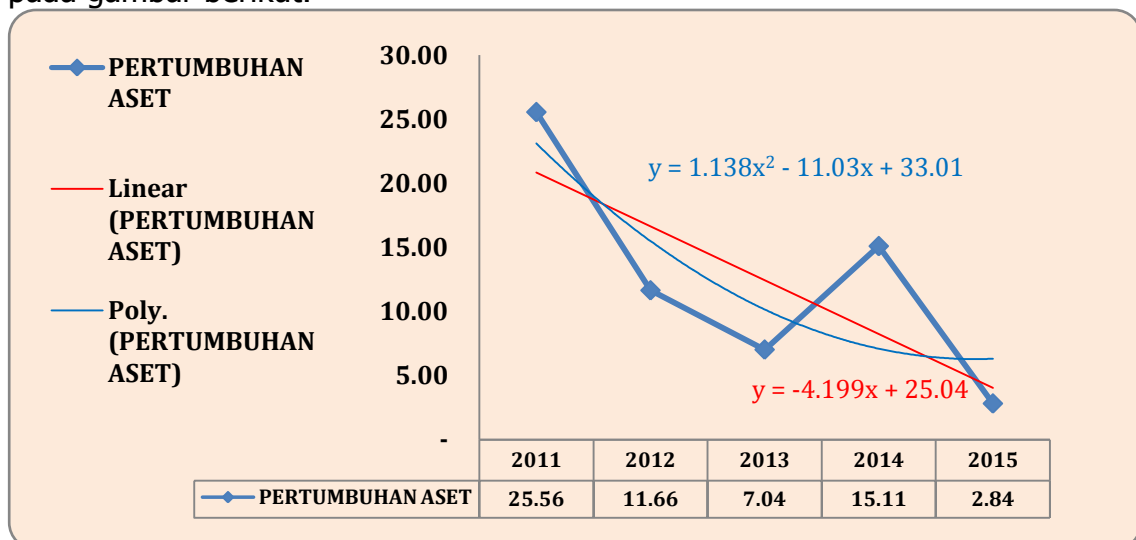
No	URAIAN	Tahun					Rata2 Pertum bahan (%)
		2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8
	7 Amortisasi Aset Tak Berwujud	-	-	-	-	(61.069.875,00)	-
	<b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>	<b>22.779.023.746,08</b>	<b>22.189.997.115,44</b>	<b>30.753.226.036,00</b>	<b>28.342.900.111,00</b>	<b>52.986.066.256,00</b>	<b>28,78</b>
	<b>JUMLAH ASET</b>	<b>1.905.251.552.046,52</b>	<b>2.127.434.836.245,43</b>	<b>2.277.236.670.752,38</b>	<b>2.621.363.453.017,29</b>	<b>2.695.792.686.071,75</b>	<b>9,16</b>
<b>I</b>	<b>KEWAJIBAN</b>						
	<b>A. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>						
	1 Hutang Usaha	-	-	-	-	1.725.346.503,00	25,00
	2 Hutang Perhitungan Fihak Ke Tiga (PFK)	-	-	-	-	735.572,00	25,00
	3 Utang Bunga	-	-	-	-	-	-
	4 Utang Pajak	-	-	-	-	-	-
	5 Bag. Lancar Utang Jk. Pendek Dlm Negeri	-	-	-	-	-	-
	6 Beban Yang Masih Harus Dibayar	-	-	-	-	1.499.270.077,00	25,00
	7 Pendapatan Diterima Dimuka	-	-	-	-	184.147.852,26	25,00
	8 Utang Jangka Pendek Lainnya	90.540.000,00	1.616.533.834,00	1.818.352.590,00	1.875.209.288,65	35.170.224,00	400,73
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>90.540.000,00</b>	<b>1.616.533.834,00</b>	<b>1.818.352.590,00</b>	<b>1.875.209.288,65</b>	<b>3.444.670.228,26</b>	<b>446,19</b>

No	URAIAN	Tahun					Rata2 Pertum bahan (%)
		2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>B. KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>						
	1 Utang Dalam Negeri	-	-	-	-	-	-
	2 Utang Luar Negeri	-	-	-	-	-	-
	3 Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-	-	-	-	-
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>	-	-	-	-	-	-
<b>I I I</b>	<b>EKUITAS DANA</b>						
	<b>A. EKUITAS DANA LANCAR</b>						
	1 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	81.639.453.190,36	71.495.126.031,63	68.190.794.545,19	151.503.314.984,18	110.714.517.832,07	19,55
	2 Cadangan Piutang	8.615.738.027,00	24.921.048.247,55	31.070.980.906,11	52.005.965.993,92	60.550.663.708,11	74,43
	3 Cadangan Persediaan	7.118.521.095,71	13.605.071.415,13	9.182.961.593,63	16.641.575.808,80	18.968.191.251,75	38,46
	4 Dana yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	(90.540.000,00)	(1.616.533.834,00)	(1.818.352.590,00)	(1.875.209.288,65)	(3.444.670.228,26)	446,19
	5 Pendapatan Yang Ditangguhkan	-	31.122.416,32	370.973.796,00	16.722.313,00	33.832.504,00	299,70
	<b>JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR</b>	<b>97.283.172.313,07</b>	<b>108.435.834.276,6 3</b>	<b>106.997.358.250,9 3</b>	<b>218.292.369.811,2 5</b>	<b>186.822.535.067,6 7</b>	<b>24,93</b>

No	URAIAN	Tahun					Rata2 Pertum buhan (%)
		2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>B. EKUITAS DANA INVESTASI</b>						
1	Diinvestasikan dlm Investasi Jk. Panjang	78.370.174.220,47	84.780.235.584,46	94.708.765.000,55	96.489.500.795,49	103.864.230.589,14	7,35
2	Diinvestasikan dalam Aset Tetap	1.706.728.641.766,90	1.910.412.235.434,90	2.042.958.968.874,90	2.276.363.473.010,90	2.348.675.183.930,68	8,37
3	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	22.779.023.746,08	22.189.997.115,44	30.753.226.036,00	28.342.900.111,00	52.986.066.256,00	28,78
4	Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang	-	-	-	-	-	-
	<b>JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI</b>	<b>1.807.877.839.733,45</b>	<b>2.017.382.468.134,80</b>	<b>2.168.420.959.911,45</b>	<b>2.401.195.873.917,39</b>	<b>2.505.525.480.775,82</b>	<b>8,54</b>
	<b>C. EKUITAS DANA CADANGAN</b>						
1	Diinvestasikan Dalam Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
	<b>JUMLAH EKUITAS DANA CADANGAN</b>	-	-	-	-	-	-
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA</b>	<b>1.905.251.552.046,52</b>	<b>2.127.434.836.245,43</b>	<b>2.277.236.670.752,38</b>	<b>2.621.363.453.017,29</b>	<b>2.695.792.686.071,75</b>	<b>9,16</b>

Sumber: DPPK Kab. Sumbawa (2015)

Pertumbuhan jumlah nilai aset dalam periode tahun 2012-2015 disajikan pada gambar berikut.



**Gambar 3.11**  
**Pertumbuhan (%) Nilai Aset Pemerintah Kab. Sumbawa**  
**(2012-2015)**

### b. Kewajiban

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Kewajiban memberikan informasi tentang hutang Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah daerah. Kewajiban dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. Dalam periode tahun 2011-2015, Pemerintah Kabupaten Sumbawa tidak memiliki kewajiban jangka panjang. Jumlah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa pada tahun 2014 adalah sebesar Rp.1.875.209.288,65,- dan pada tahun 2015 sebesar Rp.3.444.670.228,26,- sementara kewajiban pada tahun 2011 sebesar Rp.90.540.000,00,-. Dari tahun 2011 hingga 2015, jumlah kewajiban relatif fluktuatif, yaitu terendah tahun 2011 dan tertinggi tahun 2015. Karena itu nilai pertumbuhan tidak merefleksikan kecenderungannya.

### c. Ekuitas Dana

Ekuitas Dana merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah daerah. Ekuitas Dana meliputi (1) Ekuitas Dana Lancar, (2) Ekuitas Dana Investasi, dan (3) Ekuitas Dana Cadangan. Ekuitas Dana Lancar adalah selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek. Ekuitas dana investasi merupakan selisih antara jumlah nilai investasi permanen, aset tetap dan aset lainnya (tidak termasuk dana cadangan) dengan jumlah nilai utang jangka panjang.

Ekuitas dana merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang diinvestasikan dalam dana cadangan untuk tujuan tertentu di masa mendatang. Nilai ekuitas dana Kabupaten Sumbawa Tahun 2011 sebesar Rp.1.905.161.012.046,52 dan pada tahun 2015 sebesar Rp.2.692.348.015.843,49 berarti mengalami pertumbuhan dari 2011-2015 rata-rata 9,47 persen, termasuk rasio total hutang (kewajiban) terhadap aset juga sangat kecil, rata-rata dalam lima tahun terakhir sebesar 0,07%.

#### d. Rasio Keuangan

##### 1) Rasio Likuiditas

Rasio lancar (*current ratio*) dan rasio cepat (*quick ratio*) merupakan jenis rasio likuiditas yang digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio lancar (*current ratio*) digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aktiva lancar yang dimilikinya, rumusnya yaitu aktiva lancar dibagi kewajiban jangka pendek, sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 3.4**  
**Rasio Lancar Keuangan (*Current Ratio*)**  
**Pemerintah Kabupaten Sumbawa (2011-2015)**

Tahun	Total Kewajiban Jangka Pendek	Total Aset Lancar	Rasio
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
2011	90.540.000,00	97.373.712.313,07	1.075,48
2012	1.616.533.834,00	110.052.368.110,63	68,08
2013	1.818.352.590,00	108.815.710.840,93	59,84
2014	1.875.209.288,65	220.167.579.099,90	117,41
2015	3.444.670.228,26	190.267.205.295,93	55,24
Rata-rata per tahun			275,21

Sumber: DPPK Kab. Sumbawa (2015)

Memperhatikan Tabel tersebut, secara rata-rata dalam tahun 2011-2015 *Current ratio* atas keuangan Pemerintah Kabupaten Sumbawa sebesar 275,21, artinya setiap Rp.1 kewajiban jangka pendek/hutang lancar Pemerintah Kabupaten Sumbawa dijamin oleh aktiva lancarnya sebesar Rp.275,21. *Current ratio* menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membayar kewajiban finansial jangka pendek dengan titik berat pada aktiva lancar. Nilai ideal adalah minimum sebesar 1, dan semakin besar *Current ratio* semakin baik. Berarti bahwa kemampuan Pemerintah Kabupaten Sumbawa sesungguhnya tergolong kuat.

Bila melihat fluktuasi *current ratio* yang dinamis tersebut dan tingginya nilai tersebut lebih disebabkan oleh *current ratio* di tahun 2011, maka kemampuan tersebut belum dapat dikatakan stabil. Hal tersebut terlihat dari angka rasio rata-rata untuk tahun 2012-2015 sebesar 75,14, yang menunjukkan bahwa terjadi penurunan kemampuan dibandingkan dengan tahun 2011. Meskipun demikian, memperhatikan kecenderungan rasio lancar sejak tahun 2012 hingga 2015 yang cenderung meningkat berarti kemampuan tersebut semakin baik.

Selanjutnya mengenai gambaran *quick ratio* sebagai indikator dalam mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membayar kewajiban finansial jangka pendek dengan menggunakan aktiva lancar yang lebih likuid (*Liquid Assets*), rumusnya yaitu aktiva lancar dikurangi persediaan, hasilnya dibagi kewajiban jangka pendek, sebagaimana disajikan sebagai berikut.

**Tabel 3.5**  
**Quick Rasio Keuangan Pemerintah Kabupaten Sumbawa**  
**(2011-2015)**

<b>Tahun</b>	<b>Total Kewajiban Jangka Pendek</b>	<b>Total (Aset Lancar-Persediaan)</b>	<b>Rasio</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
2011	90.540.000,00	90.255.191.217,36	996,85
2012	1.616.533.834,00	96.447.296.695,50	59,66
2013	1.818.352.590,00	99.632.749.247,30	54,79
2014	1.875.209.288,65	203.526.003.291,10	108,54
2015	3.444.670.228,26	171.299.014.044,18	49,73
Rata-rata per tahun			253,91

Sumber: DPPK Kab. Sumbawa (2015)

*Quick Ratio* lebih akurat dibandingkan dengan rasio lancar karena telah mempertimbangkan persediaan sebagai pengurang dalam perhitungannya. Nilai ideal quick rasio adalah minimum sebesar 1, semakin besar adalah semakin baik dan keuangan dalam kondisi sehat. *Quick ratio* atas keuangan Pemerintah Kabupaten Sumbawa secara rata-rata dalam tahun 2011-2015 sebesar 253,91. Angka tersebut sesungguhnya menunjukkan bahwa *Liquid Assets* pemerintah Kabupaten Sumbawa tergolong kuat. Namun tingginya angka rata-rata tersebut lebih disebabkan karena sangat tingginya nilai pada tahun 2011 dan sangat fluktuatif maka kemampuan tersebut belum dapat dikatakan stabil. Hal tersebut terlihat dari angka rasio rata-rata untuk tahun 2012-2015 sebesar 68,18, yang menunjukkan penurunan dibandingkan tahun 2011. Namun sejak tahun 2012 hingga tahun 2015 rasio ini semakin baik.

## 2) Rasio Solvabilitas

Rasio solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Dari perspektif kemampuan membayar kewajiban jangka panjang, semakin rendah rasio akan semakin baik kemampuan pemerintah daerah dalam membayar kewajiban jangka panjang. Jenis rasio solvabilitas yang digunakan pemerintah daerah antara lain rasio total hutang (kewajiban) terhadap total aset (*total debt to total asset ratio*) dan rasio hutang terhadap ekuitas (*total debt to equity ratio*). Kedua rasio tersebut disajikan sebagai berikut.

**Tabel 3.6**  
**Rasio Total Kewajiban Terhadap Aset**  
**Pemerintah Kabupaten Sumbawa (2011-2015)**

<b>Tahun</b>	<b>Total Kewajiban</b>	<b>Total Aset</b>	<b>Rasio (%)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
2011	90.540.000,00	1.905.251.552.046,52	0,005
2012	1.616.533.834,00	2.127.434.836.245,43	0,076
2013	1.818.352.590,00	2.277.236.670.752,38	0,080
2014	1.875.209.288,65	2.621.363.453.017,29	0,072
2015	35.170.224,00	2.695.792.686.071,75	0,001
Rata-rata per tahun			0.047

Sumber: DPPK Kab. Sumbawa (2015)

Rasio total hutang (kewajiban) terhadap total aset, mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam menjamin hutangnya dengan aktiva/aset yang dimilikinya, rumusnya total hutang dibagi total aset. Tabel 3.7 menunjukkan bahwa rasio total kewajiban terhadap aset pemerintah Kabupaten Sumbawa dalam lima tahun terakhir relatif kecil ( $<1$ ), sehingga kapabilitas keuangan Pemerintah Kabupaten Sumbawa relatif kuat dalam pelunasan kewajiban-kewajibannya, atau dengan perkataan lain bahwa sebenarnya kapasitas keuangannya masih relatif besar bila akan melakukan peminjaman dana untuk pembangunan, terlebih yang bersifat jangka panjang, karena semakin tinggi nilai persentase rasio solvabilitas ini berarti semakin buruk kemampuan pemerintah daerah untuk membayar kewajiban jangka panjangnya. Nilai maksimal nilainya rasio tersebut adalah 2.

Dalam lima tahun terakhir, rata-rata rasio total kewajiban terhadap total aset Pemerintah Kabupaten Sumbawa sebesar 0,047 artinya sebesar Rp.0,047 dari setiap Rp.1,00 total aktiva merupakan pendanaan dari hutang, atau aktiva Pemerintah Kabupaten Sumbawa yang didanai oleh hutang sebesar 0,047%, sisanya dari modal sendiri (ekuitas). Hal ini merupakan peluang baik yang dapat dimanfaatkan dalam rangka pelayanan kepada publik. Meskipun demikian, oleh karena kemampuan PAD sebagaimana diuraikan sebelumnya masih tergolong rendah, maka sebelum menempuh kebijakan peminjaman dipandang perlu penguatan pendapatan daerah dari sektor PAD terlebih dahulu.

Demikian pula dengan rasio total kewajiban terhadap ekuitas dana pemerintah Kabupaten Sumbawa, yang menunjukkan seberapa besar keuangan pemerintah daerah dibiayai oleh para kreditur dan modal sendiri (ekuitas), rumusnya adalah total hutang dibagi total ekuitas. Semakin kecil rasio ini berarti semakin kecil dana yang diambil dari luar dan sebaliknya. Analisis rasio total kewajiban terhadap ekuitas dana ditunjukkan pada tabel berikut.

**Tabel 3.7**  
**Rasio Total Kewajiban Terhadap Ekuitas dana**  
**Pemerintah Kabupaten Sumbawa (2011-2015)**

<b>Tahun</b>	<b>Total Kewajiban</b>	<b>Total Ekuitas Dana</b>	<b>Rasio (%)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
2011	90.540.000,00	1.905.161.012.046,52	0,005
2012	1.616.533.834,00	2.125.818.302.411,43	0,076
2013	1.818.352.590,00	2.275.418.318.162,38	0,080
2014	1.875.209.288,65	2.619.488.243.728,64	0,072
2015	35.170.224,00	2.692.348.015.843,49	0,001
Rata-rata per tahun			0.047

*Sumber: DPPK Kab. Sumbawa (2015)*

Tabel 3.7 menunjukkan bahwa rasio total kewajiban terhadap ekuitas dana pemerintah Kabupaten Sumbawa yang mengindikasikan angka yang relatif kecil. Dalam lima tahun terakhir, rasio hutang (kewajiban) terhadap modal (ekuitas dana) sebesar 0,047 menunjukkan bahwa Rp.0,047 dari setiap Rp.1,00 modal sendiri menjadi jaminan hutang, dengan kata lain menunjukkan tingginya modal sendiri dari Pemerintah Kabupaten Sumbawa (dibelanjahi pihak sendiri) untuk pelaksanaan pembangunan daerah.

Hal tersebut menggambarkan bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya relatif kuat. Kondisi tersebut bisa terjadi karena pemerintah Kabupaten Sumbawa dalam lima tahun terakhir ini memang tidak memiliki kewajiban jangka panjang.

### 3) Rasio Aktivitas

Rasio aktivitas merupakan rasio yang mengukur seberapa efektif dan efisien pemerintah daerah dalam pendayagunaan aktiva yang dimiliki dan dalam pengelolaan sumber-sumber dananya. Jenis rasio aktivitas yang digunakan untuk pemerintah daerah antara lain rata-rata umur piutang, yaitu rasio untuk melihat berapa lama, hari yang diperlukan untuk melunasi piutang (merubah piutang menjadi kas). Semakin besar periode rata-rata, semakin besar risiko kemungkinan tidak tertagihnya piutang dan sebaliknya. Cara perhitungan rata-rata umur piutang adalah 365 dibagi perputaran piutang, dimana perputaran piutang sendiri adalah pendapatan daerah dibagi rata-rata piutang pendapatan daerah. Sedangkan, rata-rata piutang pendapatan daerah adalah saldo awal piutang ditambah saldo akhir piutang kemudian dibagi 2.



**Tabel 3.8**  
**Rata-Rata Umur Piutang Pemerintah Kabupaten Sumbawa**  
**(2011-2015)**

No	Uraian	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
1	Periode Waktu	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00
2	Perputaran Piutang	115,57	52,25	34,12	27,80	23,19
a	Pendapatan Daerah	837.080.583.562,25	876.186.211.355,64	955.351.921.410,97	1.154.656.071.636,99	1.305.142.444.242,40
b	Piutang Pendapatan Daerah	7.243.274.980,53	16.768.393.137,28	27.996.014.576,83	41.538.473.450,02	56.278.314.851,02
	- Saldo awal piutang	5.870.811.934,06	8.615.738.027,00	24.921.048.247,55	31.070.980.906,11	52.005.965.993,92
	- Saldo akhir piutang	8.615.738.027,00	24.921.048.247,55	31.070.980.906,11	52.005.965.993,92	60.550.663.708,11
3	Umur Piutang	3,16	6,99	10,70	13,13	15,74

Sumber: DPPK Kab. Sumbawa (2015)

Berdasarkan tabel 3.8, dapat dikatakan bahwa dalam periode tahun 2011-2015, rata-rata umur piutang Pemerintah Kabupaten Sumbawa sebesar 9,94. Angka tersebut menunjukkan bahwa untuk merubah piutang menjadi kas diperlukan waktu rata-rata selama 9,94 hari (10 hari), artinya bahwa Pemerintah kabupaten Sumbawa memiliki kemampuan yang sangat baik dalam menagih piutang atau merubah piutang menjadi kas, yaitu dalam tempo hanya 3,16 dan 6,99 hari pada tahun 2011 dan 2012, kemudian 10,70 dan 13,13 hari pada tahun 2013 dan 2014, serta 15,74 hari pada tahun 2015.

Meskipun hal tersebut masih dipandang cukup singkat, namun memperhatikan umur piutang dari tahun ke tahun menunjukkan kecenderungan yang meningkat. Kondisi seperti ini patut menjadi perhatian di masa mendatang, dan perlu diupayakan agar rasio tersebut semakin kecil.

Selanjutnya analisis dilakukan untuk melihat rata-rata umur persediaan pada neraca pemerintah Kabupaten Sumbawa tahun 2011-2015. Rata-rata umur persediaan, yaitu rasio untuk melihat berapa lama dana tertanam dalam bentuk persediaan (menggunakan persediaan untuk memberi pelayanan publik). Semakin besar periode rata-rata, semakin besar risiko kemungkinan persediaan berada di gudang dan sebaliknya. Cara menghitung rata-rata umur persediaan adalah 365 dibagi perputaran persediaan, dimana perputaran persediaan adalah nilai persediaan yang digunakan dalam satu tahun dibagi rata-rata nilai persediaan. Sedangkan, rata-rata nilai persediaan adalah saldo awal persediaan ditambah saldo akhir persediaan lalu hasilnya dibagi 2.

**Tabel 3.9**  
**Rata-Rata Umur Persediaan Pemerintah Kabupaten Sumbawa**  
**(2011-2015)**

<b>No</b>	<b>Uraian</b>	<b>Tahun</b>				
		<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1	Periode Waktu	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00
2	Perputaran Persediaan	8,03	5,39	6,79	7,58	6,47
a	Nilai Persediaan	57.337.667.475,00	55.859.827.476,00	77.347.328.636,00	97.850.972.030,00	115.271.055.835,00
b	Rata-rata Nilai Persediaan	7.142.091.836,86	10.361.796.255,42	11.394.016.504,38	12.912.268.701,22	17.804.883.530,28
	- Saldo awal persediaan	7.165.662.578,00	7.118.521.095,71	13.605.071.415,13	9.182.961.593,63	16.641.575.808,80
	- Saldo akhir persediaan	7.118.521.095,71	13.605.071.415,13	9.182.961.593,63	16.641.575.808,80	18.968.191.251,75
3	Umur Persediaan	45,47	67,71	53,77	48,16	56,38

*Sumber: DPPK Kab. Sumbawa (2015)*

Berdasar Tabel 3.9 bahwa rata-rata umur persediaan Pemerintah Kabupaten Sumbawa dalam lima tahun terakhir sebesar 54,30 hari. Data tersebut bermakna bahwa dana tertanam dalam bentuk persediaan hanya bertahan sekitar 54,30 hari.

Secara umum mengenai analisis rasio keuangan pemerintah Kabupaten Sumbawa dalam periode tahun 2011-2015, disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 3.10**  
**Analisis Rasio Keuangan Pemerintah Kab. Sumbawa (2011-2015)**

No	Uraian	Tahun					Rata-Rata
		2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A</b>	<b>Rasio Likuiditas</b>						
1	Rasio lancar (current ratio)	1.075,48	68,08	59,84	117,41	55,24	275,21
2	Rasio quick (quick ratio)	996,85	59,66	54,79	108,54	49,73	253,91
<b>B.</b>	<b>Rasio Solvabilitas</b>						
1	Rasio total hutang terhadap total aset	0,00	0,08	0,08	0,07	0,00	0,05
2	Rasio hutang terhadap modal	0,00	0,08	0,08	0,07	0,00	0,05
<b>C.</b>	<b>Rasio Aktivitas</b>						
1	Rata-Rata Umur Piutang	3,16	7,22	10,70	13,13	15,74	9,94
2	Rata-Rata Umur Persediaan	45,47	67,71	53,77	48,16	56,38	54,30

Sumber: DPPK Kab. Sumbawa (2015)

Berdasarkan analisis rasio keuangan pemerintah Kabupaten Sumbawa pada tabel-tabel tersebut, maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

**Tabel 3.11**  
**Pencapaian Indikator Rasio Keuangan Pemerintah Kabupaten Sumbawa**

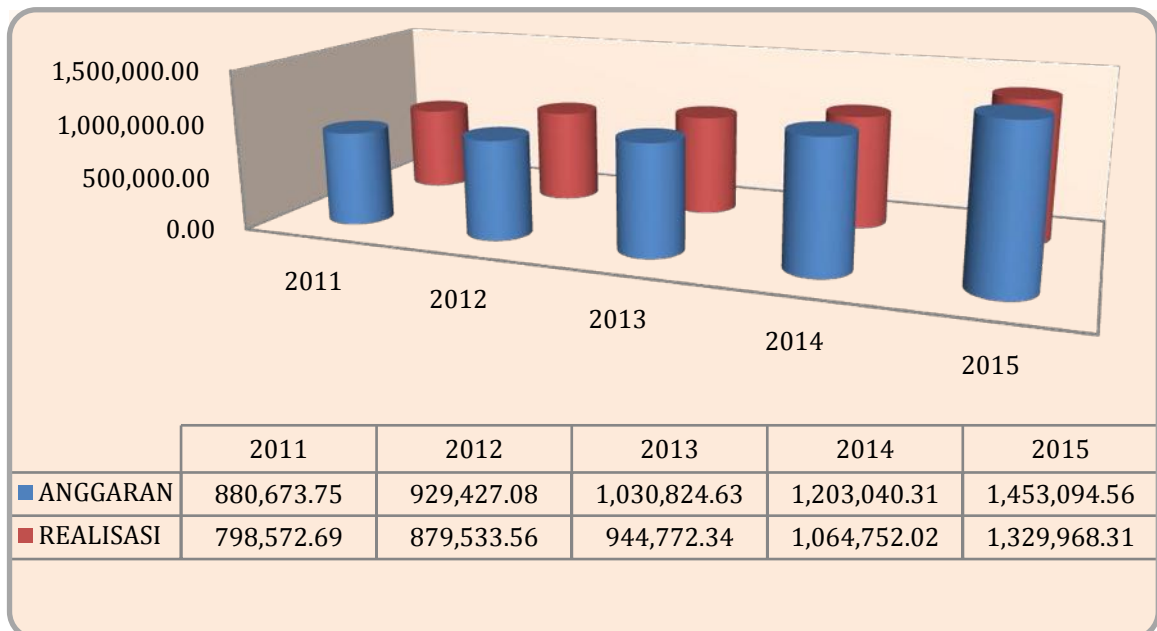
No	Indikator	Nilai	Keterangan
1	2	3	4
<b>A</b>	<b>Rasio Likuiditas</b>		
1	Rasio lancar (current ratio)	275,21	>1, sangat mampu memenuhi kewajiban jangka pendek
2	Rasio quick (quick ratio)	253,91	>1, sangat mampu memenuhi kewajiban jangka pendek secara cepat
<b>B.</b>	<b>Rasio Solvabilitas</b>		
1	Rasio total hutang terhadap total aset	0,050	<1, mampu melunasi hutang dengan aset yang tersedia
2	Rasio hutang terhadap	0,050	<1, mampu melunasi hutang

No	Indikator	Nilai	Keterangan
1	2	3	4
	modal		dengan modal yang tersedia
<b>C.</b>	<b>Rasio Aktivitas</b>		
1	Rata-Rata Umur Piutang	9,94	Dibutuhkan waktu 9,94 hari (10 hari) untuk merubah piutang menjadi kas
2	Rata-Rata Umur Persediaan	54,30	Dana tertanam dalam bentuk persediaan hanya bertahan sekitar 54,30 hari

Sumber: DPPK Kab. Sumbawa (2015)

### 3.1.1.3. Target dan Realisasi Belanja

Selama periode Tahun Anggaran 2011-2015, dari rata-rata target belanja daerah sebesar Rp.1.099.412.064.511,58,- terealisasi rata-rata sebesar Rp.1.003.519.783.428,07 atau mencapai 91,28%. Secara lebih rinci disajikan pada gambar berikut.



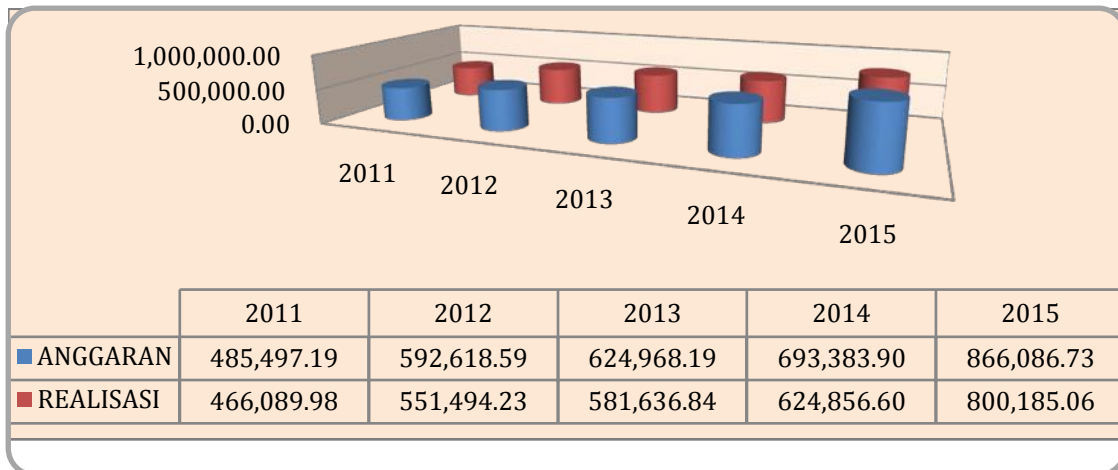
**Gambar 3.12**  
**Target dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa (2011-2015) (Juta Rupiah)**

Target belanja pemerintah Kabupaten Sumbawa menunjukkan peningkatan dari tahun 2011-2015, demikian pula dengan realisasinya selalu meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun demikian, serapan anggaran pemerintah daerah belum tercapai secara maksimal sesuai target yang ditetapkan. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa masih ada potensi anggaran yang tersisa dan tidak dimanfaatkan dalam rangka mengoptimalkan proses dan hasil-hasil pembangunan di Kabupaten Sumbawa.

#### a. Target dan Realisasi Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung sebagai bagian dari belanja pemerintah daerah yang merupakan belanja wajib tetapi tidak terkait secara langsung dengan program dan kegiatan pembangunan daerah juga menunjukkan peningkatan

selama lima tahun terakhir, baik target maupun realisasinya sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut.

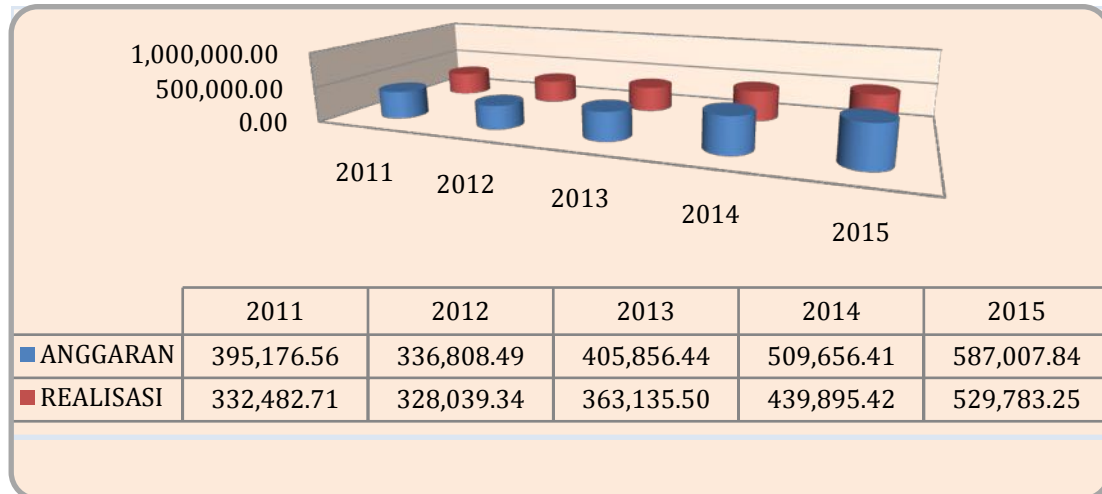


**Gambar 3.13**  
**Target dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Kabupaten Sumbawa (2011-2015) (Juta Rupiah)**

**b. Target dan Realisasi Belanja Langsung**

Keadaan pada belanja tidak langsung juga terjadi pada belanja langsung sebagai bagian belanja yang terkait langsung dengan program dan kegiatan pembangunan daerah, menunjukkan peningkatan dari tahun 2011-2015. Gambaran pada tabel 3.12 dan tabel 3.13, keduanya tetap menunjukkan bahwa realisasi belanja masih belum terwujud secara maksimal, sehingga selalu terjadinya adanya sisa lebih perhitungan anggaran setiap tahunnya.

Tabel berikut menunjukkan gambaran target dan realisasi belanja langsung pemerintah Kabupaten Sumbawa dalam periode tahun 2011-2015.

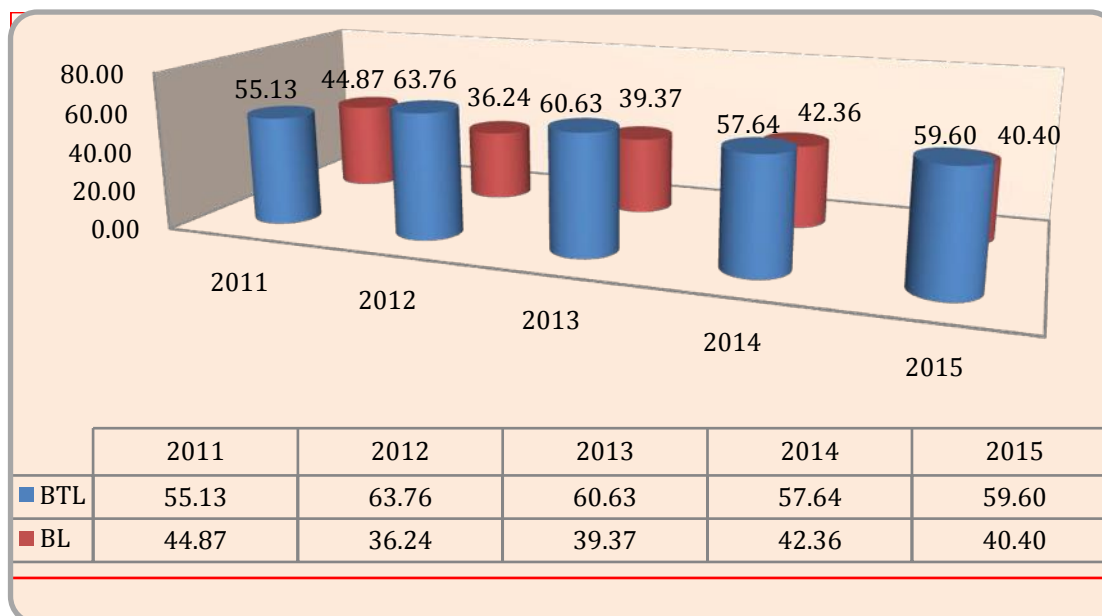


**Gambar 3.14**  
**Target dan Realisasi Belanja Langsung Kabupaten Sumbawa (2011-2015) (Juta Rupiah)**

**c. Proporsi Belanja Daerah**

1) Proporsi Target Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung

Dalam APBD Kabupaten Sumbawa sejak tahun 2011 sampai tahun 2015, proporsi target belanja tidak langsung selalu lebih besar dibanding proporsi belanja langsung.



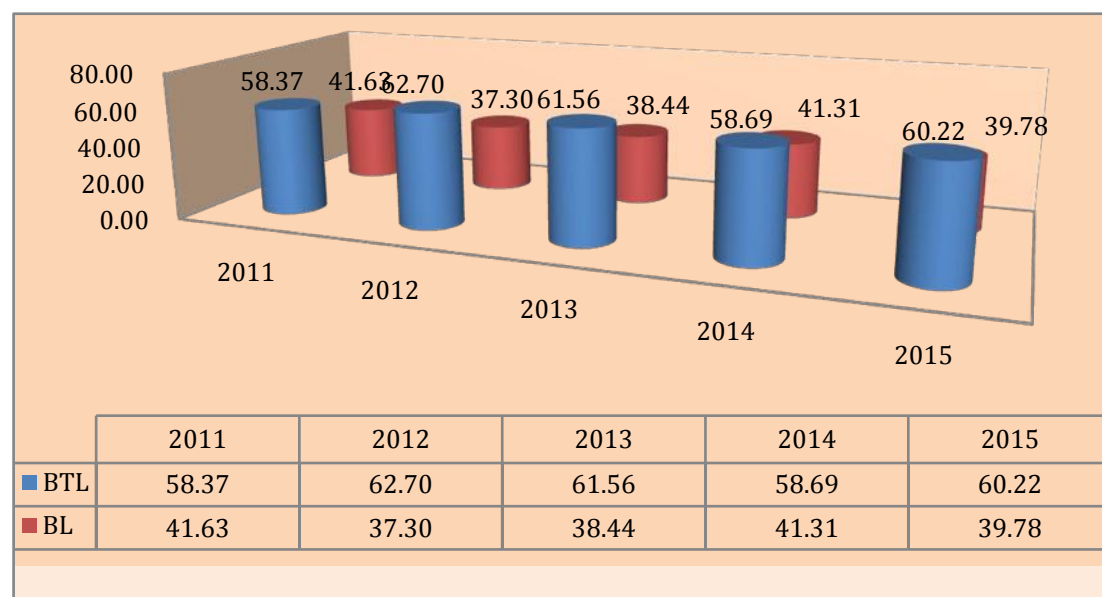
**Gambar 3.15**

**Proporsi Target Belanja Tidak langsung dan Belanja Langsung (%) Kabupaten Sumbawa (2011-2015)**

Berdasarkan fakta yang ditunjukkan tabel 3.15, proporsi tertinggi yang pernah dicapai pada target belanja tidak langsung adalah 63,76% pada tahun 2012, dan proporsi terendah pada tahun 2011 yaitu sebesar 55,13%.

2) Proporsi Realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung

Seperti kondisi yang ditunjukkan oleh proporsi target belanja tidak langsung dan belanja langsung, proporsi realisasi belanjapun menunjukkan kecenderungan yang sama, bahwa proporsi realisasi belanja tidak langsung tertinggi dalam lima tahun terakhir ini terjadi pada tahun 2012 dan proporsi realisasi belanja tidak langsung terendah terjadi pada tahun 2011. Sementara proporsi realisasi belanja langsung tertinggi terjadi pada tahun 2011 dan terendah pada tahun 2012, seperti ditunjukkan pada gambar berikut.



**Gambar 3.16**

**Proporsi Realisasi Belanja Tidak langsung dan Belanja Langsung (%) Kabupaten Sumbawa (2011-2015)**

Gambaran yang disajikan pada tabel-tabel tersebut, menunjukkan bahwa target dan realisasi belanja tidak langsung masih lebih tinggi dibandingkan belanja langsung. Selanjutnya mengenai proporsi realisasi objek belanja tidak langsung disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 3.12**  
**Proporsi Realisasi Objek Belanja Tidak Langsung (%)**  
**Tahun (2011-2015)**

No	Uraian Objek Belanja	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Belanja Pegawai	88,15	85,88	88,29	91,09	76,35
2	Belanja Hibah	2,08	7,23	4,73	2,04	4,48
3	Belanja Bantuan Sosial	2,56	1,16	1,22	1,04	1,48
4	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kab./Kota dan Pem. Desa	0,07	0,06	0,06	0,05	0,50
5	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kab./Kota dan Pem. Desa	7,05	5,63	5,54	5,77	17,17
6	Belanja Tidak Terduga	0,09	0,04	0,17	0,01	0,03
	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>

Sumber: DPPK Kab. Sumbawa (2015)

Pada realisasi belanja tidak langsung, obyek belanja yang menunjukkan proporsi realisasi tertinggi pada lima tahun terakhir adalah pada belanja pegawai dan belanja bantuan keuangan kepada pemerintahan desa. Proporsi realisasi belanja pegawai secara rata-rata sebesar 85,95% dan belanja bantuan keuangan kepada pemerintahan desa sebesar 8,23% terhadap total realisasi belanja tidak langsung.

Belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Proporsi realisasi belanja langsung Pemerintah Kabupaten Sumbawa Tahun 2011-2015 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 3.13**  
**Proporsi Realisasi Objek Belanja Langsung (%) Tahun (2011-2015)**

No	Uraian Belanja	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Belanja Pegawai	11,98	8,65	6,81	8,15	9,55
2	Belanja Barang dan Jasa	36,40	43,66	52,08	45,50	41,19
3	Belanja Modal	51,62	47,69	41,11	46,35	49,26
	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>

Sumber: DPPK Kab. Sumbawa, 2015 (Data diolah)

Selama periode tahun 2011-2015, objek belanja modal memiliki proporsi realisasi tertinggi pada kelompok belanja langsung pemerintah Kabupaten Sumbawa, yang realisasinya mencapai rata-rata 47,21% per tahun. Sedangkan



objek belanja barang dan jasa mencapai rata-rata 43,77% per tahun dan belanja pegawai mencapai rata-rata 9,03 % per tahun.

Mencermati data-data yang disajikan mengenai pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sumbawa pada tahun 2011-2015, tergambar bahwa masih lemahnya kemampuan daerah yang tergambar dari rendahnya proporsi PAD dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah dalam memberikan sumbangannya terhadap pendapatan daerah secara keseluruhan merupakan kendala utama. Demikian pula dengan anggaran untuk memaksimalkan lompatan-lompatan kinerja pembangunan yang masih juga terkendala dengan tingginya proporsi belanja tidak langsung dalam APBD dibandingkan proporsi belanja langsung.

Secara umum gambaran target dan realisasi belanja daerah Kabupaten Sumbawa baik belanja tidak langsung maupun belanja langsung pada tahun 2011-2015 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 3.14**  
**Target dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa (2011-2015)**

No	Uraian	Tahun (Rp)									
		2011		2012		2013		2014		2015	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>BELANJA</b>	<b>880,673,749,37</b>	<b>798,572,686,42</b>	<b>929,427,076,8</b>	<b>879,533,564,77</b>	<b>1,030,824,626</b>	<b>944,772,342,09</b>	<b>1,203,040,306,</b>	<b>1,064,752,018</b>	<b>1,453,094,56</b>	<b>1.329.968.30</b>
		<b>9.36</b>	<b>4.55</b>	<b>37.05</b>	<b>5.87</b>	<b>,109.47</b>	<b>7.41</b>	<b>863.04</b>	<b>,739.00</b>	<b>3,369.00</b>	<b>5.103,51</b>
<b>A</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>485,497,187,05</b>	<b>466,089,979,48</b>	<b>592,618,590,9</b>	<b>551,494,227,33</b>	<b>624,968,189,5</b>	<b>581,636,840,96</b>	<b>693,383,897,3</b>	<b>624,856,596,5</b>	<b>866,086,728,</b>	<b>800.906.737.</b>
		<b>6.55</b>	<b>2.55</b>	<b>54.66</b>	<b>4.57</b>	<b>30.50</b>	<b>5.28</b>	<b>34.40</b>	<b>42.00</b>	<b>212.22</b>	<b>187,51</b>
1	Belanja Pegawai	426,925,468,344.0	410,857,363,185.8	505,470,813,51	473,643,086,994.0	547,512,641,88	513,519,613,132.	612,105,234,079	569,186,715,03	670,523,007,0	611.455.279.8
		8	3	9.69	0	1.20	00	.36	8.00	95.28	98,00
2	Belanja Subsidi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
3	Belanja Hibah	10,053,839,000.00	9,671,929,900.00	43,375,318,538.00	39,861,205,850.00	29,286,028,468.00	27,505,666,316.00	24,598,050,000.00	12,763,665,088.00	37,069,824,000.00	35.850.558.56
				00		00	0	00	00	0.00	5,00
4	Belanja Bantuan Sosial	13,119,803,462.97	11,955,063,066.72	7,026,568,430.00	6,399,794,462.00	8,811,126,600.00	7,097,665,811.00	13,284,603,088.74	6,496,643,764.00	15,037,123,000.00	11.854.229.48
				0		0		0	0	0.00	6,00
5	BBH kepada Provinsi/ Kab./Kota dan Pem.Des	329,700,000.00	329,600,000.00	354,900,000.00	329,700,000.00	354,900,000.00	329,700,000.00	354,900,000.00	328,700,000.00	4,037,572,460.50	4.037.572.460.48
6	BBK kepada Prov. / Kab./ Kota, Pem. Desa dan Parpol	33,545,088,562.00	32,856,114,430.00	34,890,990,466.97	31,037,204,028.57	36,005,747,467.00	32,215,976,206.28	41,541,110,166.30	36,043,852,652.00	138,284,201,656.41	137.497.608.278,03
7	Belanja Tidak Terduga	1,523,287,687.50	419,908,900.00	1,500,000,000.00	223,236,000.00	2,997,745,114.30	968,219,500.00	1,500,000,000.00	37,020,000.00	1,135,000,000.03	211.488.500.00
<b>B</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>395,176,562,32</b>	<b>332,482,706,94</b>	<b>336,808,485,8</b>	<b>328,039,337,44</b>	<b>405,856,436,5</b>	<b>363,135,501,13</b>	<b>509,656,409,5</b>	<b>439,895,422,1</b>	<b>587,007,835,</b>	<b>529.061.567.</b>
		<b>2.81</b>	<b>2.00</b>	<b>82.39</b>	<b>1.30</b>	<b>78.97</b>	<b>2.13</b>	<b>28.64</b>	<b>97.00</b>	<b>156.78</b>	<b>916,00</b>
1	Belanja Pegawai	45,749,187,167.00	39,835,929,103.00	31,400,778,507.00	28,381,363,176.00	27,332,425,440.00	24,712,821,014.00	38,275,110,495.00	35,830,968,802.00	57,459,154,026.00	50.519.157.969,00
2	Belanja Barang dan Jasa	140,632,729,464.01	121,019,285,558.00	163,006,581,896.04	143,222,380,597.30	214,202,920,406.50	189,132,830,375.13	241,540,490,099.00	200,163,032,440.00	248,080,304,363.00	217.942.033.553,00
3	Belanja Modal	208,794,645,691.80	171,627,492,281.00	142,401,125,479.35	156,435,593,668.00	164,321,090,732.47	149,289,849,743.00	229,840,808,934.64	203,901,420,955.00	281,468,376,767.78	260.600.376.394,00

Sumber: DPPK Kab. Sumbawa, 2015 (Data diolah)

### **3.1.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu**

Mengacu pada prinsip-prinsip penganggaran, kebijakan belanja daerah Tahun Anggaran 2011-2015, disusun menggunakan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari *input* yang direncanakan, dengan memperhatikan prestasi kerja setiap SKPD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, APBD mempunyai fungsi; Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, APBD mempunyai fungsi; (a) fungsi otorisasi, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan; (b) fungsi perencanaan, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan; (c) fungsi pengawasan, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kesesuaian kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan ketentuan yang telah ditetapkan; (d) fungsi alokasi, mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian; (e) fungsi distribusi, mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, dan (f) fungsi stabilisasi, mengandung arti bahwa anggaran Pemerintah Daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan melalui suatu sistem yang terintegrasi dalam rangkaian siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang pelaksanaannya mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pemeriksaan sampai pada pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, Pemerintah Daerah telah menyampaikan pertanggungjawaban yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK).

#### **3.1.2.1. Kebijakan Umum Pendapatan Daerah**

Berdasarkan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Sumbawa dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa

yang disepakati setiap tahunnya dalam periode tahun 2011-2015, maka secara garis besar kebijakan umum Pendapatan daerah Kabupaten Sumbawa adalah sebagai berikut.

- 1) Menyediakan regulasi daerah terkait dengan penetapan pajak daerah dan retribusi daerah terkait dengan perubahan dari *open-list system* menjadi *closed-list system* dalam rangka menyesuaikan kebijakan keuangan daerah dengan kebijakan keuangan pemerintah. Dalam kaitan ini regulasi daerah terkait dengan 10 dari 11 jenis pajak daerah dan 30 jenis retribusi daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten perlu dilakukan penyesuaian sehingga semua regulasi yang dibutuhkan telah disesuaikan dan lengkap pada akhir tahun 2012. Khusus regulasi daerah terkait Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) akan diselesaikan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku;
- 2) Mengoptimalkan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Daerah di bidang perpajakan dan retribusi daerah melalui penguatan dan perluasan basis data potensi pajak daerah dan retribusi daerah, optimalisasi pemungutan dan penatausahaan, pencegahan kebocoran penerimaan daerah dan peningkatan sistem informasi pengelolaan pajak dan retribusi daerah dalam rangka peningkatan pendapatan daerah;
- 3) Menjaga keseimbangan antara upaya peningkatan penerimaan daerah dan pencegahan timbulnya ekonomi biaya tinggi dalam rangka optimalisasi kewenangan yang dimiliki daerah;
- 4) Memperbaiki sistem penerimaan dan pengalokasian anggaran yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah melalui penerapan kebijakan *earmarking* yakni sebagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah dialokasikan untuk membiayai kegiatan yang dapat dirasakan secara langsung oleh pembayar pajak tersebut. Kebijakan ini dimaksudkan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada pembayar pajak;
- 5) Penerimaan dari pendapatan hasil pengelolaan aset daerah yang dipisahkan dialokasikan untuk upaya-upaya peningkatan kapasitas pengembalian investasi bagi daerah;
- 6) Penerimaan dana alokasi umum diprioritaskan bagi belanja umum pegawai dan operasional rutin pemerintahan daerah;
- 7) Penerimaan dari dana alokasi khusus dialokasikan sesuai dengan tujuan tertentu sesuai dengan ketentuan berlaku;
- 8) Penerimaan dana bagi hasil agar dialokasikan secara memadai untuk perbaikan layanan atau perbaikan lingkungan sesuai jenis dana bagi hasil yang didapat;

- 9) Menerapkan Prinsip-prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundangan-undangan, efisien, ekonomi, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan melalui penetapan peraturan daerah mengenai pengelolaan keuangan dan aset daerah, pelaksanaan penyusunan anggaran sesuai jadwal yang ditetapkan peraturan perundang-undangan, pemantapan implementasi *money follow function* dalam menyusun anggaran;
- 10) Mengoptimalkan upaya peningkatan Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah melalui pemenuhan berbagai persyaratan/ketentuan yang dapat mendorong diberikannya insentif dan penambahan alokasi anggaran pemerintah;
- 11) Meningkatkan efektivitas pengawasan pungutan dengan mengubah mekanisme pengawasan dari sistem represif menjadi sistem preventif dan korektif termasuk penegakan hukum;
- 12) Meningkatkan pengelolaan aset daerah melalui pemetaan dan membenahan administrasi pembukuan aset dan validasi data aset daerah, sertifikasi seluruh tanah pemerintah daerah, penertiban pemanfaatan aset daerah dan menetapkan peraturan mengenai pengelolaan aset daerah;
- 13) Melaksanakan kewajiban daerah terkait dengan pelepasan aset masyarakat kepada Pemerintah daerah sebagai akibat pelaksanaan program/kegiatan pembangunan.

Indikator kinerja utama dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah adalah:

- 1) Tersedianya regulasi daerah terkait dengan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai ketentuan berlaku.
- 2) Tersedianya basis data dan potensi pajak daerah dan retribusi daerah.
- 3) Terlaksananya evaluasi ketentuan tarif pajak daerah dan retribusi daerah serta tindak lanjut dalam implementasinya.
- 4) Terimplementasinya prinsip *earmarking* dalam penganggaran daerah.
- 5) Meningkatnya penerimaan daerah dari investasi atas pengelolaan aset daerah yang dipisahkan sesuai ketentuan berlaku.
- 6) Terpenuhinya kebutuhan belanja umum pegawai dan operasional rutin pemerintahan daerah dari dana alokasi umum.
- 7) Terlaksananya pengalokasian dana alokasi khusus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 8) Terlaksananya pengalokasian dana bagi hasil untuk perbaikan layanan atau perbaikan lingkungan.

- 9) Penyusunan APBD tepat waktu dan tersedianya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tepat waktu, terwujudnya tingkat realisasi belanja daerah, tingkat realisasi pajak daerah, tingkat realisasi retribusi daerah, tingkat realisasi penerimaan daerah yang efisien, efektif dan ekonomis, serta Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada tahun 2015 telah memperoleh Opini BPK : predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
- 10) Meningkatnya Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.
- 11) Terlaksananya sistem pengawasan yang preventif dan korektif serta penegakan hukum.
- 12) Tersedianya peta aset daerah dan kelengkapan administrasinya, serta berfungsinya Sistem Informasi Barang Daerah (SIMBADA).
- 13) Terlaksananya kewajiban daerah terkait dengan pelepasan aset masyarakat kepada pemerintah daerah.

Untuk periode tahun 2016-2020, kebijakan umum pendapatan daerah akan tetap diarahkan kepada hal-hal berikut: (1) Mengoptimalkan peningkatan penerimaan daerah yang berasal dari sumber-sumber PAD dan Dana Perimbangan; (2) Meningkatkan efisiensi pengelolaan APBD dari sisi belanja; (3) Meningkatkan sumber penerimaan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi PAD dan Bagi Hasil Pajak yang lebih rasional dan proporsional; (4) Meningkatkan peran serta masyarakat dan sektor swasta, baik dalam pembiayaan maupun pelaksanaan pembangunan.

Cara yang terakhir ini misalnya dilakukan melalui kerjasama melalui model kerjasama masyarakat, swasta, dan pemerintah (*public-private partnership*). Cara yang terakhir ini perlu dilakukan mengingat kemampuan pemerintah daerah di dalam menggerakkan kegiatan-kegiatan ekonomi dan pembangunan lainnya masih sangat terbatas. Untuk itu, pelibatan masyarakat dan kelompok bisnis menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan.

### **3.1.2.2. Kebijakan Umum Belanja Daerah**

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah Tahun Anggaran 2011-2015 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari *input* yang direncanakan, dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Penentuan besaran belanja yang dianggarkan mengacu pada prioritas utama pembangunan daerah serta prinsip efisiensi dan efektivitas anggaran

yang mengarahkan bahwa penyediaan anggaran dan penghematan sesuai dengan skala prioritas. Adapun Kebijakan belanja daerah Tahun Anggaran 2011-2015 dilakukan melalui pengaturan pola pembelanjaan, antara lain:

1. Peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial;
2. Dalam rangka peningkatan daya beli masyarakat serta pengendalian inflasi daerah melalui kebijakan ketahanan pangan dan ketersediaan pasokan pangan;
3. Anggaran belanja diarahkan pada sektor pemberdayaan KUKM, perdagangan dan perindustrian yang menopang laju pertumbuhan ekonomi dengan didukung pembangunan infrastruktur;
4. Untuk menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan, Pemerintah Daerah mengarahkan anggaran pada kegiatan-kegiatan pengurangan pencemaran lingkungan, pencapaian target kawasan lindung, mitigasi bencana, pengendalian alih fungsi lahan dan pengendalian eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya alam;
5. Kegiatan yang orientasinya terhadap pemenuhan anggaran belanja tetap (*fixed cost*) dan pemenuhan program/kegiatan yang berorientasi kepada standar pelayanan minimal (SPM);
6. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan, serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD;
7. Kebijakan untuk belanja tidak langsung meliputi hal-hal sebagai berikut :
  - a. Mengalokasikan belanja pegawai yang merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta pemberian insentif kepada Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. Mengalokasikan belanja bantuan sosial yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
  - c. Mengalokasikan belanja hibah yang digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada Pemerintah Daerah, dan kelompok masyarakat perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya;
  - d. Mengalokasikan belanja tidak terduga yang merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial

yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

Pada periode tahun 2016-2020, terdapat tiga elemen penting dalam menentukan belanja daerah, yaitu masyarakat sebagai pemberi amanat, Pemerintah Daerah, dan DPRD dengan peran dan fungsinya masing-masing sebagai pelayan masyarakat, sehingga hakekat anggaran belanja daerah sebagai perwujudan dari amanat rakyat kepada Pemerintah Daerah dan DPRD dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Rencana belanja disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja (berorientasi pada hasil). Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan alokasi anggaran.

Kebijakan belanja daerah dalam lima tahun ke depan diprioritaskan untuk efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Peningkatan alokasi belanja yang direncanakan oleh setiap pengguna anggaran harus diikuti dengan peningkatan prestasi kerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Belanja Daerah diarahkan pada peningkatan proporsi belanja untuk memihak kepentingan publik, disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam penggunaannya, belanja daerah harus tetap mengedepankan efisiensi dan efektivitas sesuai dengan prioritas, yang diharapkan dapat memberikan dukungan program-program strategis daerah. Penggunaan anggaran untuk belanja barang dan jasa, berdasarkan pada patokan harga dasar yang telah ditetapkan dalam HSPK (Harga Satuan Pokok Kegiatan).

### **3.1.2.3. Kebijakan Pembiayaan Daerah**

Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah dalam sistem penganggaran diperlukan untuk menyalurkan surplus anggaran ataupun menutup defisit.

Dalam struktur APBD Kabupaten Sumbawa, pembiayaan daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayarkan kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Sedangkan pengeluaran pembiayaan adalah semua



pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

a. Penerimaan pembiayaan, mencakup:

- 1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran sebelumnya yang dianggarkan berdasarkan estimasi pada APBD dan pada perubahan APBD sesuai dengan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- 2) Pencairan dana cadangan yang disesuaikan dengan rencana penggunaan dana cadangan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan;
- 3) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dapat berupa hasil penjualan perusahaan milik daerah/BUMD, penjualan aset milik pemerintah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, atau hasil divestasi penyertaan modal pemerintah daerah;
- 4) Penerimaan pinjaman yang dianggarkan sesuai dengan rencana penarikan pinjaman dalam tahun anggaran sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui, termasuk penerimaan dari penerbitan obligasi daerah yang akan direalisasikan pada tahun anggaran berkenaan.
- 5) Penerimaan kembali pemberian pinjaman merupakan penerimaan pokok dari pemberian pinjaman termasuk penerimaan pokok dari pemberian dana bergulir.

b. Pengeluaran Pembiayaan:

- 1) Pembentukan dana cadangan yang dianggarkan melalui sejumlah dana cadangan yang harus disisihkan dalam tahun anggaran sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah pada dasarnya dapat membentuk dana cadangan guna membiayai kebutuhan yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran. Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang sekurang-kurangnya mengatur persyaratan pembentukan dana cadangan, pengelolaan dan pertanggungjawabannya;
- 2) Penyertaan modal Pemerintah Daerah yang dianggarkan melalui sejumlah penyertaan modal yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang penyertaan modal;
- 3) Pembayaran pokok utang yang dianggarkan sejumlah pokok pinjaman dan harus dibayarkan dalam tahun anggaran sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui antara Pemerintah Daerah dengan pemberi pinjaman;

- 4) Pemberian pinjaman kepada pihak ketiga termasuk dalam bentuk dana bergulir dilakukan untuk meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat.

Kebijakan Umum pembiayaan Pemerintah Kabupaten Sumbawa dalam lima tahun ke depan sebagai berikut :

- 1) Peningkatan Manajemen Pembiayaan Daerah dalam rangka akurasi, efisiensi, efektivitas dan profitabilitas;
- 2) Apabila APBD dalam keadaan surplus, kebijakan yang diambil berupa Penyertaan Modal Pemerintah Daerah, dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial dalam bentuk program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang dianggarkan pada SKPD yang secara fungsional terkait dengan tugasnya melaksanakan program dan kegiatan tersebut;
- 3) Apabila APBD dalam keadaan defisit, kebijakan yang diambil adalah memanfaatkan anggaran yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, rasionalisasi belanja, pinjaman daerah, atau memperluas kemitraan.

### 3.2. Efektivitas Penggunaan Anggaran

Selama periode Tahun Anggaran 2011-2015, rata-rata realisasi belanja daerah sebesar 91,13% dari target anggaran yang ditetapkan dalam APBD setiap tahunnya. Rata-rata realisasi belanja tidak langsung mencapai 92,93% dari target belanja tidak langsung dan rata-rata realisasi belanja langsung sebesar 88.85% dari target belanja langsung. Selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

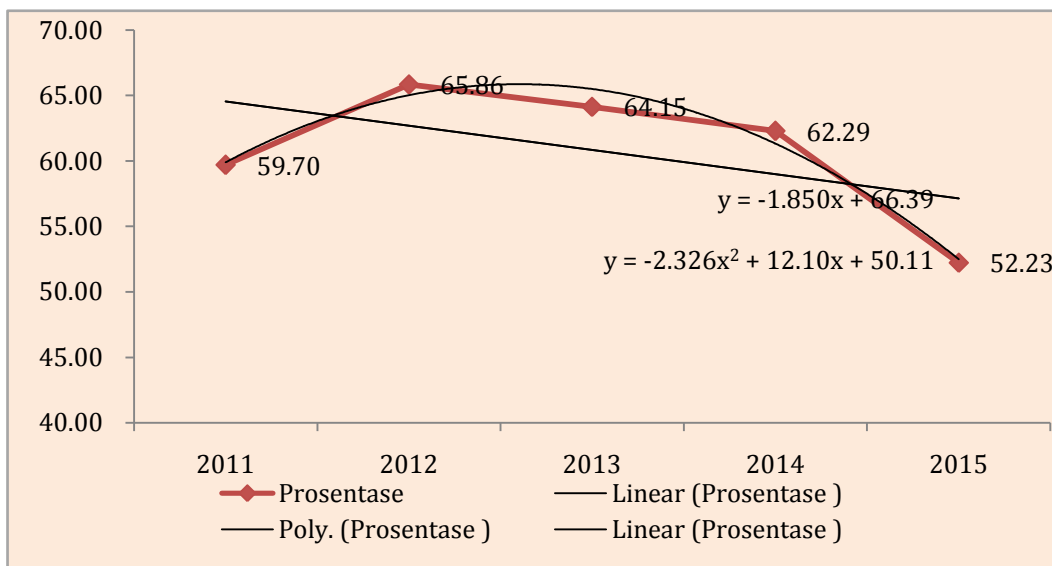
**Tabel 3.15**  
**Efektivitas Belanja Terhadap Anggaran Belanja**  
**Kabupaten Sumbawa (%) Tahun 2011-2015**

No.	Uraian	Tahun					Rata-Rata
		2011	2012	2013	2014	2015	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
<b>1</b>	<b>BELANJA</b>	<b>90,68</b>	<b>94,63</b>	<b>91,65</b>	<b>88,51</b>	<b>91,53</b>	<b>91,40</b>
<b>1 . 1</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>96,00</b>	<b>93,06</b>	<b>93,07</b>	<b>90,12</b>	<b>92,47</b>	<b>92,94</b>
1 . 1 . 1	Belanja Pegawai	96,24	93,70	93,79	92,99	91,19	93,58
1 . 1 . 4	Belanja Hibah	96,20	91,90	93,92	51,89	96,71	86,12
1 . 1 .	Belanja Bant. Sosial	91,12	91,08	80,55	48,90	78,83	78,10

No.	Uraian	Tahun					Rata-Rata
		2011	2012	2013	2014	2015	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
5							
1 . 1 . 6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kab. /Kota dan Pem. Desa	99,97	92,90	92,90	92,62	100,00	95,68
1 . 1 . 7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kab. /Kota dan Pem. Desa	97,95	88,95	89,47	86,77	99,43	92,51
1 . 1 . 8	Belanja Tdk Terduga	27,57	14,88	32,30	2,47	18,63	19,17
<b>2 . 2</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>84,14</b>	<b>97,40</b>	<b>89,47</b>	<b>86,31</b>	<b>90,13</b>	<b>89,49</b>
2 . 2 . 1	Belanja Pegawai	87,07	90,38	90,42	93,61	87,92	89,88
2 . 2 . 2	Belanja Barang/Jasa	86,05	87,86	88,30	82,87	87,85	86,59
2 . 2 . 3	Belanja Modal	82,20	109,86	90,85	88,71	92,59	92,84

Sumber: DPPK Kab. Sumbawa (2015)

Sebagai bagian dari realisasi belanja daerah, pada gambar berikut terlihat proporsi realisasi belanja kebutuhan aparatur di Kabupaten Sumbawa menunjukkan kecenderungan yang menurun. Tahun 2011, proporsi realisasi belanja kebutuhan aparatur terhadap total pengeluaran mencapai 59,70 persen, meningkat di tahun 2012 menjadi 65,06%, kemudian pada tahun 2013 turun menjadi 64,15% hingga pada tahun 2015 menurun menjadi 52,23%. Dalam lima tahun terakhir, secara rata-rata proporsi realisasi belanja kebutuhan aparatur mencapai 60,85% dari total anggaran belanja daerah.



**Gambar 3.17**  
**Efektivitas Belanja Kebutuhan Aparatur Dalam Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa (2011-2015)**

Belanja kebutuhan aparatur di dalam APBD Kabupaten Sumbawa teralokasi melalui belanja tidak langsung dan juga belanja langsung. Proporsi realisasi belanja kebutuhan aparatur pada belanja tidak langsung selama tahun 2011-2015 rata-rata mencapai 51,37% dari total pengeluaran, sedangkan proporsi realisasi yang teralokasi melalui belanja langsung sebesar 8,89%. Kebutuhan belanja aparatur pada belanja tidak langsung sebagian besar diperuntukkan bagi belanja gaji dan tunjangan serta belanja tambahan penghasilan, yang sebagian besarnya termasuk kebutuhan aparatur di bidang pendidikan dan bidang kesehatan.

Gambaran rinci mengenai realisasi belanja kebutuhan aparatur pemerintah Kabupaten Sumbawa tahun 2011-2015 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 3.16**  
**Realisasi Belanja (Rp) Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Sumbawa (2011-2015)**

No.	Uraian	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>A</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>410.556.955.117,83</b>	<b>472.202.626.522,00</b>	<b>513.519.613.132,00</b>	<b>569.186.715.038,00</b>	<b>611.457.396.263,00</b>
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	377.054.740.527,00	442.046.204.985,00	484.262.865.623,00	535.489.121.249,00	577.740.502.669,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan**)	29.183.828.000,00	26.680.750.000,00	25.520.370.000,00	29.830.555.651,00	29.529.343.289,00
3	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH	2.611.250.000,00	2.584.751.000,00	2.407.596.000,00	2.499.996.000,00	2.651.196.000,00
4	Belanja pemungutan Pajak Daerah**)	1.707.136.590,83	462.348.673,00	843.872.163,00	850.255.519,00	1.064.382.748,00
5	Belanja pemungutan Retribusi Daerah**)	-	428.571.864,00	484.909.346,00	516.786.619,00	471.971.557,00
<b>B</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>67.769.178.802,00</b>	<b>110.274.567.323,30</b>	<b>94.601.829.839,13</b>	<b>96.819.139.362,00</b>	<b>76.155.429.682,00</b>
1	Belanja Honorarium PNS**)	9.775.942.315,00	11.188.119.540,00	11.345.533.960,00	12.205.868.760,00	14.786.985.410,00
2	Belanja Uang Lembur**)	148.770.000,00	132.480.000,00	135.525.000,00	154.755.000,00	274.800.000,00
3	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	2.200.512.500,00	2.176.620.000,00	2.702.645.000,00	2.181.500.000,00	1.232.800.000,00
4	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi & PNS**)	990.015.520,00	1.281.197.646,00	2.269.541.050,00	2.035.541.650,00	1.528.978.533,00
5	Belanja premi asuransi kesehatan	865.914.493,00	924.774.964,00	988.285.387,00	329.899.001,00	312.626.083,00
6	Belanja makanan dan minuman pegawai***)	775.283.650,00	250.820.000,00	311.476.500,00	380.724.000,00	212.573.500,00
7	Belanja pakaian dinas dan atributnya**)	206.378.000,00	245.961.000,00	254.840.000,00	457.365.400,00	309.225.000,00
8	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu*)	211.645.000,00	556.007.000,00	640.640.700,00	1.015.011.000,00	1.133.785.300,00
9	Belanja perjalanan dinas**)	30.324.966.340,00	33.356.502.923,30	35.188.765.636,13	32.415.888.051,00	33.449.485.136,00
10	Belanja perjalanan pindah tugas	-	250.000,00	-	-	-
11	Belanja Pemulangan Pegawai	-	-	-	-	-
12	Belanja Modal (Kantor, Mobil Dinas, Meubelair, peralatan dan perlengkapan dll)	22.269.750.984	60.161.834.250	40.764.576.606	45.642.586.500	22.914.170.720
	<b>TOTAL BELANJA KEBUTUHAN APARATUR</b>	<b>478.326.133.919,83</b>	<b>582.477.193.845,30</b>	<b>608.121.442.971,13</b>	<b>666.005.854.400,00</b>	<b>687.612.825.945,00</b>

Sumber: DPPK Kab. Sumbawa (2015)

Berdasarkan Tabel 3.16, kemudian dilakukan analisis mengenai proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur, diperoleh gambaran sebagai berikut.

**Tabel 3.17**  
**Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur**  
**Kabupaten Sumbawa**

No	Tahun	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (Rp)	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)	Prosentase
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	2011	478.326.133.919,83	808.556.409.298,55	59,70
2	2012	582.477.193.845,30	886.158.312.325,37	65,86
3	2013	608.121.442.971,13	958.742.945.397,41	64,15
4	2014	666.005.854.400,00	1.071.357.125.698,00	62,29
5	2015	687.612.825.945,00	1.345.781.674.466,51	52,23
			<b>Rata-Rata</b>	<b>60,85</b>

Sumber: DPPK Kab. Sumbawa, 2015 (Data diolah)

Tabel 3.17 menunjukkan bahwa rata-rata dalam lima tahun terakhir proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur pemerintah Kabupaten Sumbawa masih lebih besar, yaitu mencapai proporsi 60,85% dari total pengeluaran pemerintah daerah.

### 3.3. Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan memberikan gambaran mengenai pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan dimasa datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Analisis pembiayaan daerah meliputi analisis sumber penutup defisit riil, analisis realisasi sisa lebih perhitungan anggaran, analisis sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan, dan analisis proyeksi pembiayaan daerah.

**Tabel 3.18**  
**Defisit Riil Anggaran (Rp) Kabupaten Sumbawa (2011-2015)**

No	Tahun	Realisasi Pendapatan Daerah	Realisasi Belanja Daerah	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Defisit Riil
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1	2011	837.080.583.562,25	798.572.686.424,55	9.983.722.874,00	28.524.174.263,70
2	2012	876.186.211.355,64	879.533.564.775,87	6.624.747.549,50	(9.972.100.969,73)
3	2013	955.351.921.410,97	944.772.342.097,41	13.970.603.300,00	(3.391.023.986,44)
4	2014	1.154.656.071.636,99	1.064.752.018.739,00	6.605.106.959,00	83.298.945.938,99
5	2015	1.305.142.444.242,40	1.329.968.305.103,51	15.813.369.363,00	(40.639.230.224,11)

Sumber: DPPK Kab. Sumbawa (2015)

Pada tabel tersebut terlihat bahwa realisasi pendapatan dan realisasi belanja daerah tetap mengalami peningkatan setiap tahun. Pada tahun 2012, 2013 dan tahun 2015, realisasi belanja lebih besar dari realisasi pendapatan. Dengan demikian maka dalam lima tahun terakhir, yaitu pada tahun 2011 dan 2014 Pemerintah Kabupaten Sumbawa mengalami surplus, sementara pada tahun 2012, 2013 dan 2015 mengalami defisit.

Untuk menutup defisit yang terjadi pada tahun 2012, 2013 dan 2015, sesuai ketentuan yang berlaku, maka diperlukan anggaran penutup defisit pada tahun tersebut dengan menggunakan penerimaan pembiayaan berupa SiLPA dan

penerimaan kembali pemberian pinjaman tahun sebelumnya, yaitu tahun 2011, 2012 dan 2014. Sedangkan pada tahun 2011 dan 2014 dimana realisasi belanja dan pengeluaran pembiayaan lebih rendah dari realisasi pendapatan, sehingga tidak diperlukan anggaran penutup defisit riil. Secara lebih rinci disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 3.19**  
**Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Sumbawa**

No	Uraian	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
A	Defisit Riil	28.524.174.263,70	(9.972.100.969,73)	(3.391.023.986,44)	83.298.945.938,99	(40.639.230.224,11)
	Ditutup oleh realisasi Penerimaan Pembiayaan :					
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	53.078.174.426,66	81.442.708.501,36	71.495.126.031,63	68.190.794.545,19	151.503.314.984,18
2	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	37.104.500,00	24.518.500,00	86.692.500,00	13.574.500,00	6.432.500,00
3	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
4	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	-	-	-	-	-
B	Total realisasi Penerimaan Pembiayaan	53.115.278.926,66	81.467.227.001,36	71.581.818.531,63	68.204.369.045,19	151.509.747.484,18
A-B	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	81.639.453.190,36	71.495.126.031,63	68.190.794.545,19	151.503.314.984,18	110.870.517.260,07

Sumber: DPPK Kab. Sumbawa (2015)



Selanjutnya disajikan komposisi penutup defisit riil anggaran Pemerintah Kabupaten Sumbawa pada tabel berikut.

**Tabel 3.20**  
**Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran**  
**Kabupaten Sumbawa (%)**

<b>No</b>	<b>Uraian</b>	<b>Tahun</b>				
		<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015*)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	186,08	(816,71)	(2.108,36)	81,86	(372,80)
2	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,13	(0,25)	(2,56)	0,02	(0,02)

*Sumber: DPPK Kab. Sumbawa (2015)*

Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) dalam APBD Kabupaten Sumbawa dalam lima tahun terakhir lebih dominan disebabkan oleh sisa penghematan belanja, dan sedikit bersumber dari ralisasi belanja yang tertunda dan dilanjutkan ke tahun berikutnya. Demikian pula dengan sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) tahun berkenaan merupakan selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

Gambaran masa lalu terkait komposisi realisasi anggaran SiLPA dan SILPA Pemerintah Daerah disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 3.21**  
**Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)**  
**Kabupaten Sumbawa**

No	Uraian	2011		2012		2013		2014		2015		RATA-RATA PERTUMBUHAN (%)
		Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	
1	Jumlah SiLPA	53.146.566.02 6,66	100,00	83.165.447.02 4,36	100,00	71.696.944.78 7,63	100,00	68.247.651.24 3,84	100,00	151.503.314.9 84,18	100,00	31,97
2	Pelampauan penerimaan PAD	(6.301.971.60 8,00)	(11,86)	(8.181.181.34 8,45)	(9,84)	(10.204.075.86 6,55)	(14,23)	(5.198.019.676 ,36)	(6,25)	1.451.173.961, 51	0,96	(24,49)
3	Pelampauan penerimaan dana perimbangan	7.747.074.146 ,00	14,58	5.489.480.851 ,00	6,60	(254.690.198,0 0)	(0,36)	(2.444.682.602 ,00)	(2,94)	(1.228.154.74 0,00)	(0,81)	135,26
4	Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah	(4.288.336.46 6,70)	(8,07)	55.580.000,00	0,07	29.786.956.22 4,00	41,55	(11.271.327.18 8,51)	(13,55)	12.988.007.57 3,29	8,57	10.607,71
5	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya	55.899.259.95 5,36	105,18	78.004.426.71 9,81	93,79	50.550.402.03 8,18	70,51	85.286.471.42 2,06	124,97	138.108.109.8 37,12	91,16	27,00
6	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	90.540.000,00	0,11	1.616.533.834 ,00	1,94	1.818.352.590, 00	2,19	1.875.209.288, 65	2,25	184.178.352,2 6	0,12	322,17
7	Kegiatan lanjutan	-	-	6.180.606.968 ,00	7,43	-	-	-	-	-	-	-

Sumber: DPPK Kab. Sumbawa (2015)

**Tabel 3.22**  
**Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)**  
**Kabupaten Sumbawa**

<b>No</b>	<b>Uraian</b>	<b>Tahun</b>					<b>RATA-RATA PERTUMBUHAN</b>
		<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
1	Saldo Kas Neraca Daerah	81.639.453.190,36	71.526.248.447,95	68.561.768.341,19	151.520.037.297,18	110.885.585.147,07	19,41
	Dikurangi :						
2	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	90.540.000,00	1.616.533.834,00	1.818.352.590,00	1.875.209.289	1.875.944.860,65	425,27
3	Kegiatan Lanjutan	-	6.180.606.968,00	-	-	-	(25,00)
	Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran	81.548.913.190,36	63.729.107.645,95	66.743.415.751,19	149.644.828.008,18	109.009.640.286,42	19,98

*Sumber: DPPK Kab. Sumbawa, 2015 (Data diolah)*

### **3.3. Kerangka Pendanaan**

Kebijakan anggaran merupakan acuan umum dari rencana kerja pembangunan dan bagian dari perencanaan operasional anggaran dan alokasi sumberdaya, sementara kebijakan keuangan daerah diarahkan pada kebijakan penyusunan dan program dan indikasi kegiatan pada pengelolaan pendapatan dan belanja daerah secara efektif dan efisien. Dalam kerangka pendanaan keuangan daerah ini akan sangat terkait dengan pengelolaan penerimaan atau pendapatan daerah, pengeluaran daerah atau belanja daerah dan pembiayaan daerah.

#### **3.3.1. Analisis pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama**

Analisis terhadap terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat ditujukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam satu tahun anggaran. Pengeluaran wajib dimaksud teralokasi melalui belanja tidak langsung, belanja langsung dan pembiayaan pengeluaran.

**Tabel 3.23**  
**Pengeluaran Periodik, Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama**  
**Kabupaten Sumbawa (2011-2015)**

No	Uraian	Tahun					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2011	2012	2013	2014	2015	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
A	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>442.803.983.119,72</b>	<b>503.447.061.056,14</b>	<b>544.736.507.829,28</b>	<b>606.251.087.236,00</b>	<b>751.454.106.331,51</b>	14,29
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	385.267.240.527,00	447.600.067.485,00	488.616.865.623,00	538.634.371.249,00	580.219.386.304,00	10,82
2	Tambahan Penghasilan PNSD	20.971.328.000,00	21.126.887.500,00	21.166.370.000,00	26.685.305.651,00	27.048.343.289,00	
3	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH	2.611.250.000,00	2.584.751.000,00	2.407.596.000,00	2.499.996.000,00	2.651.196.000,00	0,50
4	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-
5	Belanja bagi hasil	329.600.000,00	329.700.000,00	329.700.000,00	328.700.000,00	4.037.572.460,48	282,02
6	Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa	32.856.114.430,00	31.037.204.028,57	31.492.987.449,00	37.263.852.652,00	136.557.047.900,03	70,18
7	Belanja Bantuan kepada Partai Politik	768.450.162,72	768.451.042,57	722.988.757,28	838.861.684,00	940.560.378,00	5,56
B	<b>Belanja Langsung</b>	<b>15.014.361.765</b>	<b>15.883.870.234</b>	<b>17.398.143.346</b>	<b>19.071.944.702</b>	<b>18.338.527.858</b>	23,98
1	Belanja honorarium PNS khusus untuk guru dan tenaga medis	1.682.688.600	1.889.182.500	1.424.268.000,00	1.896.677.500,00	0,00	(19,79)
2	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	2.200.512.500	2.176.620.000	2.702.645.000,00	2.181.500.000,00	1.232.800.000,00	(9,92)
3	Belanja telepon	447.317.697	393.206.112	375.113.450,00	408.583.376,00	484.405.543,00	2,70
4	Belanja air	248.580.675	258.948.071	275.049.736,00	442.767.560,00	517.024.715,00	22,03
5	Belanja listrik	3.652.399.827	3.763.040.309	4.439.737.591,00	5.878.198.154,00	8.510.092.416,00	24,55
6	Belanja kawat/faksimili/internet	243.937.624	196.745.613	280.046.371,00	355.721.446,00	482.137.900,00	21,39

No	Uraian	Tahun					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2011	2012	2013	2014	2015	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
7	Belanja Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	3.667.054	16.844.109	7.312.776,00	12.670.332,00	1.950.634,00	72,85
8	Belanja Premi Asuransi	865.914.493	924.774.964	988.285.387,00	329.899.001,00	312.626.083,00	(14,55)
9	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.669.343.295	6.264.508.556	6.905.685.035,00	7.565.927.333,00	6.797.490.567,00	5,03
10	Belanja Pemeliharaan	675.474.395	1.835.525.270	20.959.172.465,00	6.318.667.340,00	6.167.421.932,00	285,34
<b>C</b>	<b>Pembiayaan Pengeluaran</b>	<b>22.148.400,00</b>	<b>106.240.000,00</b>	<b>58.503.300,00</b>	-	-	-
1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
2	Pembayaran pokok utang	22.148.400,00	106.240.000,00	58.503.300,00	-	-	-
	<b>JUMLAH A + B + C</b>	<b>457.840.493.284,72</b>	<b>519.437.171.290,14</b>	<b>562.193.154.475,28</b>	<b>625.323.031.938,00</b>	<b>769.792.634.189,51</b>	<b>14,00</b>

Sumber: DPPK Kab. Sumbawa, 2015 (Data diolah)

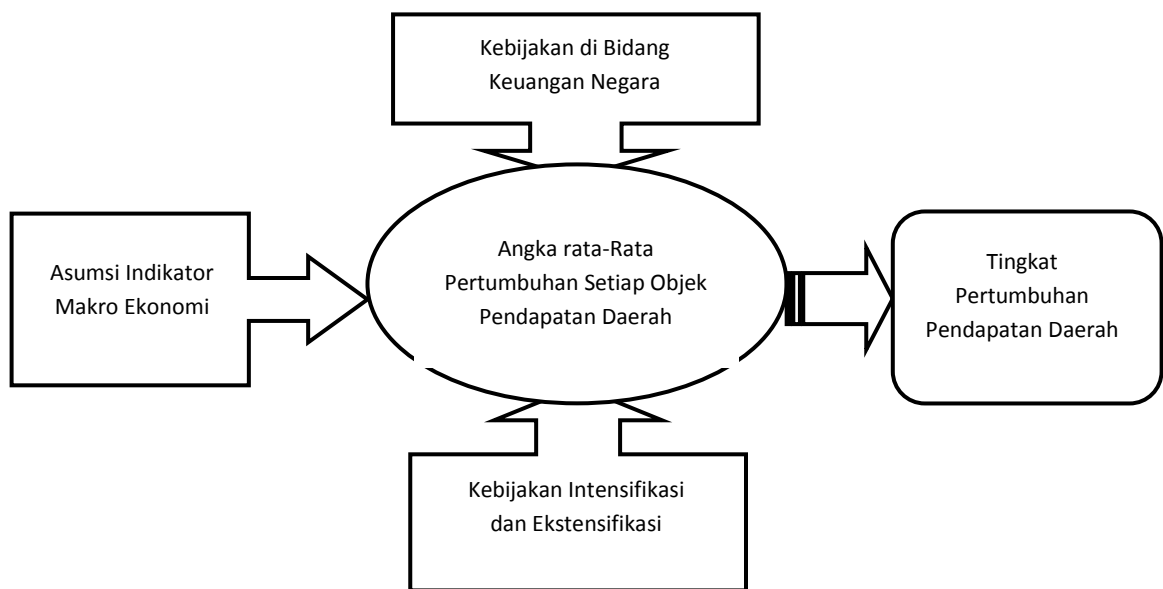
Pertumbuhan tertinggi pengeluaran periodik, wajib dan mengikat serta prioritas utama untuk belanja tidak langsung pada APBD Kabupaten Sumbawa selama tahun 2011-2015 adalah pada belanja bantuan keuangan kepada pemerintahan desa sebesar rata-rata 70,18% per tahun. Sedangkan pada belanja langsung, belanja pemeliharaan, belanja kawat/faximili/internet, belanja air dan belanja listrik menunjukkan pertumbuhan tertinggi. Pertumbuhan belanja pemeliharaan yang sangat signifikan terjadi pada tahun 2013.

### 3.3.2. Proyeksi Data Masa Lalu

#### 3.3.2.1. Proyeksi Pendapatan

Dalam mengukur kemampuan anggaran daerah maka pendapatan daerah merupakan variabel utama yang harus diperhatikan, karena sangat terkait dengan kapasitas pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan pembangunan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kapasitas keuangan daerah pada dasarnya ditempatkan sejauh mana daerah mampu mengoptimalkan penerimaan dari pendapatan daerah. Berbagai objek penerimaan daerah akan dianalisis untuk memahami perilaku atau karakteristik penerimaan selama ini.

Analisis ini dilakukan untuk memperoleh gambaran kapasitas pendapatan daerah dengan proyeksi 5 (lima) tahun kedepan, untuk penghitungan kerangka pendanaan pembangunan daerah, berdasarkan pada data dan informasi yang dapat mempengaruhi pertumbuhan pendapatan daerah, antara lain; a) angka rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah masa lalu; b) asumsi indikator makro ekonomi (PDRB/laju pertumbuhan ekonomi, inflasi dan lain-lain); c) kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah, dan d) kebijakan di bidang keuangan negara. Analisis dilakukan dengan kerangka pemikiran sebagaimana disajikan dalam gambar di bawah ini.



**Gambar 3.18**  
**Kerangka Analisis Proyeksi Pendapatan Daerah**

Sebagaimana gambar di atas, pendapatan daerah pada dasarnya ditunjang oleh 3 (tiga) faktor utama, yaitu Indikator Makro Ekonomi, Kebijakan Keuangan Negara dan Kebijakan Ekstensifikasi dan Intensifikasi. Hasil dari faktor

pembangun ini adalah didapat Pertumbuhan Pendapatan Daerah. Selanjutnya, untuk melihat perkembangan pendapatan daerah selama lima tahun kedepan diperlukan proyeksi dengan menggunakan asumsi-asumsi yang sesuai.

**Tabel 3.24**  
**Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa (2016-2020)**

Tahun	PAD	Dana Perimbangan	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Total Pendapatan Daerah
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
2016	140.392.165.151,50	1.201.486.474.380,00	181.470.010.310,93	1.523.348.649.842,43
2017	147.028.507.944,98	1.273.636.386.757,81	164.045.228.076,19	1.584.710.122.778,99
2018	165.451.179.990,49	1.433.223.026.018,57	183.383.905.902,64	1.782.058.111.911,69
2019	186.182.212.843,30	1.612.805.871.178,69	205.074.898.381,63	2.004.062.982.403,62
2020	209.510.844.112,56	1.814.890.446.837,39	229.404.444.855,47	2.253.805.735.805,42
Rata-rata pertumbuhan (%)	10,58	10,90	6,47	10,35

Sumber: DPPK Kab. Sumbawa, 2015 (Data diolah)

Asumsi-asumsi yang mendasari proyeksi pendapatan selama 5 (lima) tahun ke depan sebagaimana disajikan pada Tabel 3.24 sebagai berikut.

1. Pendapatan Asli Daerah mengalami kenaikan setiap tahun antara lain disebabkan:
  - a. Penerapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  - b. Bertambahnya objek dan wajib pajak dan retribusi, serta upaya optimalisasi pendapatan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi, termasuk terhadap objek retribusi yang selama lima tahun lalu belum menunjukkan peningkatan;
  - c. Adanya perubahan nilai jual objek pajak (NJOP) pada subjek PBB-P2 dan BPHTB.
2. Sepanjang tidak ada perubahan kebijakan mendasar dari pemerintah pusat, terjadi kecenderungan kenaikan dana perimbangan setiap tahun, dengan uraian sebagai berikut:
  - a. DAU cenderung meningkat setiap tahun seiring kebijakan kenaikan gaji pegawai;
  - b. DAK cenderung meningkat setiap tahun;
  - c. Pemerataan dana bagi hasil pajak/bukan pajak mengalami kenaikan setiap tahun;
  - d. Pengurangan alokasi gaji pegawai dan guru yang tidak lagi ditransfer ke daerah sebab karena peralihan kewenangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 masih dapat tertutupi dengan asumsi peningkatan proporsi DAU.
3. Sesuai peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah dapat menganggarkan defisit.
4. Sepanjang tidak ada perubahan kebijakan mendasar dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami kenaikan setiap tahun.



### 3.3.2.2. Proyeksi Belanja Daerah

Dalam rangka menentukan pagu indikatif maka dibutuhkan proyeksi atas belanja daerah yang akan dilakukan dalam 5 (lima) tahun mendatang. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 11, pagu indikatif adalah jumlah dana yang tersedia untuk mendanai program dan kegiatan tahunan yang penghitungannya berdasarkan standar satuan harga yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Tabel 3.25**  
**Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa (2016-2020)**

<b>Tahun</b>	<b>Belanja Tidak Langsung (Rp)</b>	<b>Belanja Langsung (Rp)</b>	<b>Jumlah (Rp)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
2016	990.432.828.678,58	537.418.929.923,27	1.527.851.758.601,85
2017	999.604.748.308,92	593.928.172.353,54	1.593.532.920.662,47
2018	1.085.520.496.273,09	704.478.133.733,73	1.789.998.630.006,82
2019	1.180.568.292.352,71	830.641.156.336,54	2.011.209.448.689,24
2020	1.285.540.559.469,73	974.696.995.992,76	2.260.237.555.462,48
Rata-rata pertumbuhan (%)	7,45	14,19	9,86

Sumber: DPPK Kab. Sumbawa, 2016 (Data diolah)

Proyeksi belanja daerah tersebut di atas dianalisis dengan memperhatikan asumsi-asumsi sebagai berikut:

1. Kebutuhan belanja pegawai selalu meningkat setiap tahun sebagai akibat dari kenaikan gaji dan penambahan jumlah pegawai;
2. Kebutuhan belanja langsung yang semakin meningkat sebagai upaya pencapaian visi misi Pemerintah Kabupaten Sumbawa tahun 2016-2020, terutama pada alokasi belanja modal serta belanja barang dan jasa.
3. Penyesuaian terhadap kenaikan harga (inflasi) dengan kebutuhan belanja.
4. Peningkatan pada belanja tidak langsung lebih dominan disebabkan karena peningkatan belanja bantuan keuangan kepada pemerintahan desa dan atau belanja bantuan keuangan yang bersifat khusus.

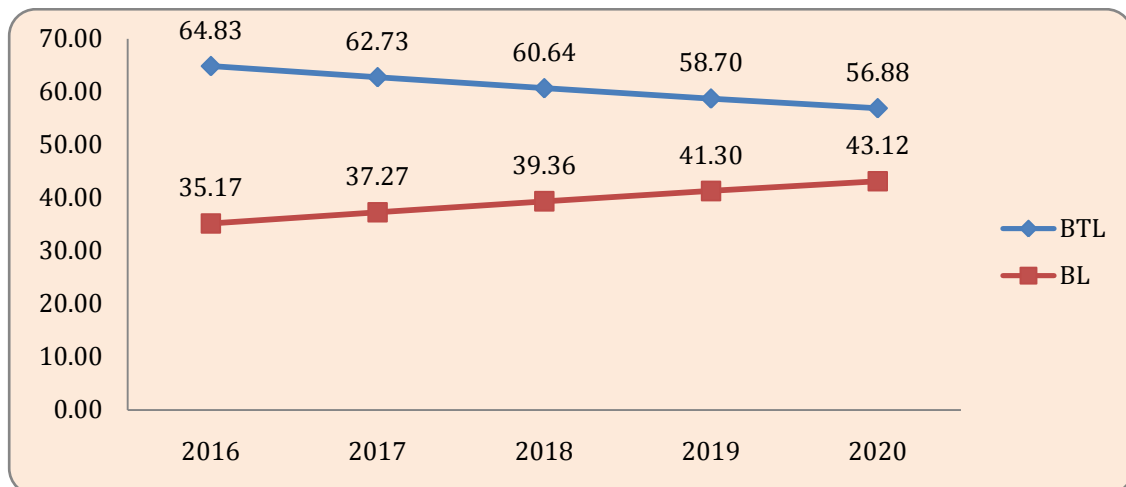
Selanjutnya lebih rinci disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 3.26**  
**Proyeksi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Pemerintah Kabupaten Sumbawa Tahun 2016-2020**

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Proyeksi Total Pendapatan</b>	<b>1.523.348.649.842,43</b>	<b>1.584.710.122.778,99</b>	<b>1.782.058.111.911,69</b>	<b>2.004.062.982.403,62</b>	<b>2.253.805.735.805,42</b>
	<b>Proyeksi Total Belanja Daerah</b>	<b>1.527.851.758.601,85</b>	<b>1.593.532.920.662,47</b>	<b>1.789.998.630.006,82</b>	<b>2.011.209.448.689,24</b>	<b>2.260.237.555.462,48</b>
<b>A</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>990.432.828.678,58</b>	<b>999.604.748.308,92</b>	<b>1.085.520.496.273,09</b>	<b>1.180.568.292.352,71</b>	<b>1.285.540.559.469,73</b>
1	Belanja Pegawai	748.892.545.072,14	755.705.766.784,51	816.806.384.082,31	883.346.956.308,02	956.013.282.031,64
2	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-
3	Belanja Hibah	6.446.900.000,00	6.769.245.000,00	7.107.707.250,00	7.463.092.612,50	7.836.247.243,13
4	Belanja Bantuan Sosial	6.842.373.000,00	7.184.491.650,00	7.543.716.232,50	7.920.902.044,13	8.316.947.146,33
5	BBH kepada Provinsi/ Kab./Kota dan Pem.Des	4.142.393.400,00	4.640.958.362,07	5.222.470.444,84	5.876.845.991,58	6.613.214.794,32
6	BBK kepada Prov. / Kab./ Kota, Pem. Desa dan Parpol	222.275.357.876,40	222.304.286.512,34	245.340.218.263,44	272.210.495.396,49	302.760.868.254,30
7	Belanja Tidak Terduga	1.833.259.330,04	3.000.000.000,00	3.500.000.000,00	3.750.000.000,00	4.000.000.000,00
<b>B</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>537.418.929.923,27</b>	<b>593.928.172.353,54</b>	<b>704.478.133.733,73</b>	<b>830.641.156.336,54</b>	<b>974.696.995.992,76</b>
1	Belanja Pegawai	34.914.199.606,00	36.659.909.586,30	38.492.905.065,62	42.342.195.572,18	46.576.415.129,39
2	Belanja Barang dan Jasa	263.848.250.608,00	158.885.032.601,63	182.685.598.566,28	205.048.220.644,48	250.049.314.224,62
3	Belanja Modal	238.656.479.709,27	398.383.230.165,62	483.299.630.101,84	583.250.740.119,88	678.071.266.638,75
<b>C</b>	<b>Surplus (Defisit)</b>	<b>(4.503.108.759,42)</b>	<b>(8.822.797.883,48)</b>	<b>(7.940.518.095,13)</b>	<b>(7.146.466.285,62)</b>	<b>(6.431.819.657,06)</b>
	%	(0,30)	(0,56)	(0,45)	(0,36)	(0,29)

Sumber: DPPK Kab. Sumbawa (2015)

Memperhatikan hasil analisis proyeksi belanja daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2016-2020 pada tabel 3.25, dapat digambarkan proporsi belanja tidak langsung dan belanja langsung terhadap total belanja daerah sebagai berikut.



**Gambar 3.19**

**Proporsi Proyeksi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Terhadap Total Belanja Pemerintah Kabupaten Sumbawa Tahun 2016-2020**

### 3.3.2.3. Proyeksi Pembiayaan Daerah

Dalam memperkirakan penyaluran surplus dan menutup defisit yang diperkirakan akan terjadi maka perlu dibuat proyeksi pembiayaan daerah Kabupaten Sumbawa.

**Tabel 3.27**

**Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Sumbawa (2016-2020)**

Tahun	Penerimaan Pembiayaan	Pengeluaran Pembiayaan	Pembiayaan Netto
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
2016	9.803.108.759,42	5.300.000.000	4.503.108.759
2017	8.822.797.883,48	0,00	8.822.797.883
2018	7.940.518.095,13	0,00	7.940.518.095
2019	7.146.466.285,62	0,00	7.146.466.286
2020	6.431.819.657,06	0,00	6.431.819.657

Proyeksi pembiayaan daerah tersebut di atas memperhatikan asumsi-asumsi sebagai berikut:

1. Kewajiban penyertaan modal dalam bentuk modal disetor kepada PT. Bank NTB serta BUMD;
2. Proyeksi penerimaan pembiayaan didasarkan pada perkiraan SiLPA dan pencairan dana cadangan.

Selanjutnya untuk melihat kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk periode 2016 sampai dengan tahun 2020, dari total keseluruhan proyeksi belanja daerah, maka dilakukan proyeksi terhadap belanja daerah yang secara periodik serta bersifat wajib dan mengikat sekaligus menjadi belanja prioritas yang disebabkan karena telah diamanatkan di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, maka akan terukurlah kapasitas riil kemampuan keuangan daerah yang nantinya akan dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan daerah.

Adapun proyeksi belanja yang bersifat periodik, wajib dan mengikat serta prioritas utama pemerintah Kabupaten Sumbawa (2016-2020), serta kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama lima tahun kedepan, disajikan pada Tabel berikut ini.

**Tabel 3.28**  
**Proyeksi Belanja Yang Bersifat Periodik, Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama**  
**Pemerintah Kabupaten Sumbawa (2016-2020)**

No	Uraian	Tahun					Rata2 Pertmb. (%)
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A.</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>975.310.296.348,54</b>	<b>982.651.011.658,92</b>	<b>1.067.369.072.790,59</b>	<b>1.161.434.297.696,08</b>	<b>1.265.387.365.080,27</b>	<b>6,78</b>
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	671.145.249.759,34	657.081.393.109,02	715.989.105.799,28	780.407.928.655,20	850.878.801.681,79	
2	Tambahan Penghasilan PNSD	72.013.800.000,00	92.656.380.000,00	94.445.403.600,00	96.270.207.672,00	98.131.507.825,44	
3	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH	3.862.000.000,00	3.862.000.000,00	4.002.000.000,00	4.002.000.000,00	4.002.000.000,00	
4	Insentif Pajak dan Retribusi Daerah	1.871.495.312,80	2.105.993.675,49	2.369.874.683,03	2.666.819.980,82	3.000.972.524,41	
5	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	
6	Belanja bagi hasil	4.142.393.400,00	4.640.958.362,07	5.222.470.444,84	5.876.845.991,58	6.613.214.794,32	
7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa	221.204.746.120,00	221.363.726.134,34	244.399.657.885,44	271.269.935.018,49	301.820.307.876,30	
8	Belanja Bantuan kepada Partai Politik	1.070.611.756,40	940.560.378,00	940.560.378,00	940.560.378,00	940.560.378,00	
<b>B</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>22.852.683.232,84</b>	<b>24.152.618.039,49</b>	<b>25.543.682.859,65</b>	<b>27.018.553.795,68</b>	<b>28.582.560.104,67</b>	<b>5,75</b>
1	Belanja honorarium PNS khusus untuk guru dan tenaga medis	-	-	-	-	-	
2	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	1.114.000.000,00	1.169.700.000,00	1.228.185.000,00	1.289.594.250,00	1.354.073.962,50	
3	Belanja telepon	416.755.043,52	458.430.547,87	504.273.602,66	554.700.962,93	610.171.059,22	
4	Belanja air	451.622.911,20	483.236.514,98	531.560.166,48	584.716.183,13	643.187.801,44	
5	Belanja listrik	5.995.762.117,08	6.415.465.465,28	6.864.548.047,84	7.345.066.411,19	7.859.221.059,98	
6	Belanja kawat/faksimili/internet	362.835.874,92	388.234.386,16	415.410.793,20	444.489.548,72	475.603.817,13	
7	Belanja Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	12.923.738,64	13.828.400,34	14.796.388,37	15.832.135,55	16.940.385,04	
8	Belanja Premi Asuransi	336.496.981,02	353.321.830,07	370.987.921,57	389.537.317,65	409.014.183,54	
9	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	7.717.245.879,66	8.103.108.173,64	8.508.263.582,33	8.933.676.761,44	9.380.360.599,51	
10	Belanja Pemeliharaan	6.445.040.686,80	6.767.292.721,14	7.105.657.357,20	7.460.940.225,06	7.833.987.236,31	
<b>C</b>	<b>Pembiayaan Pengeluaran</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	
2	Pembayaran pokok utang	-	-	-	-	-	
	<b>JUMLAH A + B + C</b>	<b>998.162.979.581,38</b>	<b>1.006.803.629.698,42</b>	<b>1.092.912.755.650,24</b>	<b>1.188.452.851.491,76</b>	<b>1.293.969.925.184,94</b>	<b>6,76</b>

Sumber: DPPK Kab. Sumbawa (2015)

**Tabel 3.29**  
**Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah**  
**Untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2016-2020**

<b>No</b>	<b>Tahun</b>	<b>Proyeksi Pendapatan</b>	<b>Pencairan Dana Cadangan (Sesuai Perda)</b>	<b>Proyeksi Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran</b>	<b>Proyeksi Total Penerimaan</b>	<b>Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama</b>	<b>Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6 = (3 + 4 + 5)</b>	<b>7</b>	<b>8 = (6 - 7)</b>
1	2016	1.523.348.649.842,43	-	9.803.108.759,42	1.533.151.758.601,85	998.162.979.581,38	534.988.779.020,47
2	2017	1.584.710.122.778,99	-	8.822.797.883,48	1.593.532.920.662,46	1.006.803.629.698,42	586.729.290.964,05
3	2018	1.782.058.111.911,69	-	7.940.518.095,13	1.789.998.630.006,82	1.092.912.755.650,24	697.085.874.356,59
4	2019	2.004.062.982.403,62	-	7.146.466.285,62	2.011.209.448.689,24	1.188.452.851.491,76	822.756.597.197,48
5	2020	2.253.805.735.805,42	-	6.431.819.657,06	2.260.237.555.462,48	1.293.969.925.184,94	966.267.630.277,54

Sumber: DPPK Kab. Sumbawa (2015)

Berdasarkan data tersebut, diperoleh rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk memenuhi kebutuhan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung dalam rangka pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun kedepan, dengan menggunakan tabel berikut.

**Tabel 3.30**  
**Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah**

No	Uraian	Proyeksi (Rp)				
		2016	2017	2018	2019	2020
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
I.	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah	534.988.779.020,47	586.729.290.964,05	697.085.874.356,59	822.756.597.197,48	966.267.630.277,54
II	Rencana alokasi pengeluaran prioritas I					
IIa	Belanja Langsung	537.418.929.923,27	593.928.172.353,54	704.478.133.733,73	830.641.156.336,54	974.696.995.992,76
IIb	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
IIc	Penyertaan Modal Pemda	5.300.000.000	-	-	-	-
	Dikurangi :					
II d	Belanja Langsung yang wajib dan mengikat serta prioritas utama	22.852.683.232,84	24.152.618.039,49	25.543.682.859,65	27.018.553.795,68	28.582.560.104,67
II e	Pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama	-	-	-	-	-
SII	Total Rencana Pengeluaran Prioritas I (II.a+II.b-II.c-II.d)	519.866.246.690,43	569.775.554.314,05	678.934.450.874,09	803.622.602.540,86	946.114.435.888,09
	Sisa kapasitas riil kemampuan keuangan daerah setelah menghitung alokasi pengeluaran prioritas I (I-II)	15.122.532.330,04	16.953.736.650,00	18.151.423.482,50	19.133.994.656,62	20.153.194.389,45
III	Rencana alokasi pengeluaran prioritas II					
IIIa	Belanja Tidak Langsung	990.432.828.678,58	999.604.748.308,92	1.085.520.496.273,09	1.180.568.292.352,71	1.285.540.559.469,73
	Dikurangi :					
III b	Belanja tidak langsung yang wajib dan mengikat serta prioritas utama	975.310.296.348,54	982.651.011.658,92	1.067.369.072.790,59	1.161.434.297.696,08	1.265.387.365.080,27
SIII	Total rencana pengeluaran prioritas II (III.a-III.b)	15.122.532.330,04	16.953.736.650,00	18.151.423.482,50	19.133.994.656,63	20.153.194.389,46
	Surplus anggaran riil atau Berimbang (I-II-III)*	(0,00)	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,01)

Sumber: DPPK Kab. Sumbawa (2015)



Dari total dana alokasi pagu indikatif yang tersedia, kemudian dialokasikan ke berbagai program/kegiatan sesuai urutan prioritas. Prioritas program/kegiatan dipisahkan menjadi prioritas I, prioritas II dan prioritas III, dimana prioritas I mendapatkan prioritas pertama sebelum prioritas II. Prioritas III mendapatkan alokasi anggaran setelah prioritas I dan II terpenuhi kebutuhan dananya.

**Prioritas I**

Prioritas I merupakan program pembangunan daerah dengan tema atau program unggulan (*dedicated*) Kepala daerah yang harus dilaksanakan oleh daerah pada tahun pertama rencana pembangunan, diantaranya program yang berkaitan dengan prasarana dan sarana transportasi, pelayanan dasar bidang pendidikan dan kesehatan.

**Prioritas II**

Prioritas II merupakan program prioritas ditingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang merupakan penjabaran dari analisis per urusan. Program Prioritas II ini berhubungan dengan program/kegiatan unggulan SKPD yang paling berdampak luas pada masing-masing segmentasi masyarakat yang dilayani sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi, berhubungan dengan layanan dasar serta tugas dan fungsi SKPD. Termasuk peningkatan kapasitas kelembagaan yang berhubungan dengan itu.

**Prioritas III**

Prioritas III merupakan prioritas yang dimaksudkan untuk alokasi belanja-belanja tidak langsung seperti: tambahan penghasilan PNS, belanja hibah, belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan, belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan hingga pemerintahan desa, serta belanja tidak terduga. Pengalokasian dana pada prioritas III ini harus memperhatikan/mendahulukan pemenuhan dana pada prioritas I dan II terlebih dahulu untuk menunjukkan urutan prioritas yang benar.

Dengan demikian, kapasitas riil keuangan daerah dapat dialokasikan seperti pada tabel berikut.

**Tabel 3.31**  
**Kerangka Pendanaan Alokasi Kapasitas Riil Keuangan Daerah**

Tahun	Alokasi (Rp)			Jumlah (Rp)
	Prioritas I	Prioritas II	Prioritas III	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
2016	163.607.495.659,28	360.522.161.263,99	13.289.273.000,00	537.418.929.923,27
2017	236.077.948.223,96	343.896.487.479,58	13.953.736.650,00	593.928.172.353,54
2018	293.387.410.543,07	396.439.299.708,16	14.651.423.482,50	704.478.133.733,73
2019	364.187.022.988,42	451.070.138.691,48	15.383.994.656,63	830.641.156.336,54
2020	391.792.590.407,21	566.751.211.196,08	16.153.194.389,46	974.696.995.992,76

Sumber: DPPK Kab. Sumbawa (2015)

## BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

### 4.1. Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat ini. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan serta ancaman yang tidak diantisipasi.

#### 4.1.1. Identifikasi permasalahan untuk penentuan program pembangunan

Berdasarkan pengertian permasalahan pembangunan sebagaimana diuraikan pada poin 4.1, maka diidentifikasi beberapa permasalahan berdasarkan evaluasi pembangunan, target yang direncanakan dalam RPJM periode sebelumnya yang memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Untuk itu, maka identifikasi permasalahan sesuai dengan sasaran pokok RPJPD, sebagai berikut.

**Tabel 4.1**  
**Identifikasi Permasalahan Untuk Penentuan Program Pembangunan Kabupaten Sumbawa**

No	Sasaran Pokok RPJPD 2005-2025	Indikator RPJPD	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>Mewujudkan masyarakat beriman, berbudaya, rukun dan berkesadaran hukum</b>			
1.	Meningkatnya ketaatan masyarakat dalam menjalankan ajaran agama sehingga terbentuk karakter masyarakat yang tangguh, kompetitif, dan bermoral tinggi sebagai watak dan perilaku manusia yang beriman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.	Meningkatnya toleransi dan kerukunan hidup antar umat beragama	Belum mantapnya toleransi dan kerukunan hidup antar umat beragama	Peran tokoh agama, budaya dan tokoh formal lainnya
2	Tumbuh dan berkembangnya apresiasi dan peranan nilai-nilai	Meningkatnya partisipasi masyarakat dan budaya	Semangat/budaya gotong royong cenderung memudar	Komitmen pemerintah dan masyarakat

<b>No</b>	<b>Sasaran Pokok RPJPD 2005-2025</b>	<b>Indikator RPJPD</b>	<b>Permasalahan</b>	<b>Faktor Penentu Keberhasilan</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
	luhur Tau Samawa dan terjalinnya interaksi antarbudaya dalam menunjang pembangunan daerah	kegotong-royongan		untuk gerakan gotong royong
				Optimalisasi Peran Pemdes dengan anggaran desa
		Meningkatnya kualitas dan kuantitas event-event seni dan budaya daerah dan sarana prasarana penunjangnya	Masih minimnya sarana prasarana pementasan kesenian berbasis budaya lokal	Mendorong kegiatan seni budaya berbasis komunitas
				Optimalisasi Peran Pemdes dengan anggaran desa
		Meningkatnya kualitas dan kuantitas event-event olahraga prestasi dan sarana prasarana penunjangnya	Belum tersedianya sarana prasarana olahraga prestasi yang memenuhi standar	Penyediaan Sarana prasarana olahraga yang memenuhi standar
3	Meningkatnya kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum	Menurunnya kasus pelanggaran hukum dan terciptanya ketentraman dan kerukunan dalam masyarakat	Angka kriminalitas cenderung meningkat	Peningkatan Kesadaran hukum dan penegakannya
<b>II Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan</b>				
1	Meningkatnya pemerataan pembangunan	Meningkatnya kualitas dan kuantitas ketersediaan sarana prasarana wilayah	Ratio panjang jaringan irigasi dengan luasan kawasan yang dialiri masih rendah	Peningkatan jaringan irigasi
			Minimnya infrastruktur perekonomian (Rasio luasan bangunan pasar permanen dengan jumlah pedagang)	Pembangunan sentra-sentra industri dan perdagangan
			Cakupan layanan	Peningkatan

<b>No</b>	<b>Sasaran Pokok RPJPD 2005-2025</b>	<b>Indikator RPJPD</b>	<b>Permasalahan</b>	<b>Faktor Penentu Keberhasilan</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
			air bersih masih rendah (Rasio jaringan air bersih terhadap luasan permukiman)	layanan penyediaan air bersih
			Masih adanya dusun yang belum terlayani listrik	Peningkatan pemanfaatan Energi alternatif
			Sarana prasarana persampahan masih kurang/belum merata di semua wilayah	Penyediaan sarana prasarana persampahan
			Belum semua wilayah terlayani akses jaringan komunikasi dan Telk.	Penyediaan jaringan komunikasi dan telekomunikasi
		Meningkatnya aksesibilitas perhubungan kawasan potensial terisolir	Masih adanya kawasan kawasan terisolir (rasio panjang jalan dengan luasan daerah)	Peningkatan jaringan jalan dan jembatan Tersedianya tatanan transportasi lokal (Tatralok) dan Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan (RUJTJ)
2	Terwujudnya pembangunan kawasan perkotaan dan perdesaan	Meningkatnya kualitas penataan, pemanfaatan dan pengendalian ruang kawasan perkotaan dan perdesaan	Belum tersusunnya RTBL pedesaan; Ketaatan dan pengendalian ruang masih belum optimal	Dokumen turunan RTRW, RDTRK dan penegakannya
3	Terwujudnya pengentasan kemiskinan	Menurunnya angka kemiskinan perkotaan dan perdesaan	Penurunan angka kemiskinan rata-rata pertahun belum mencapai 2% Belum fokusnya sasaran program	Prioritas pada program yang sesuai dengan indikator pengentasan kemiskinan; Optimalisasi

No	Sasaran Pokok RPJPD 2005-2025	Indikator RPJPD	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
1	2	3	4	5
			pengentasan kemiskinan	peran TKPKD (Tim Koordinasi Pengentasan Kemiskinan Daerah)
4	Terwujudnya pembangunan yang berwawasan gender	Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan	Belum optimalnya partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan publik	Penguatan peran tokoh dan organisasi wanita
<b>III Mewujudkan daerah yang berdaya saing</b>				
1	Terwujudnya daerah agribisnis unggulan sebagai basis pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah	Laju pertumbuhan PDRB dari kategori industri pengolahan hanya mampu menyumbang sebesar 2,07% terhadap perekonomian Kabupaten Sumbawa;	Mendorong pertumbuhan usaha industri kecil menengah Pengembangan jiwa kewirausahaan (perlu penegasan aturan lokal/perlu insentif bagi pelaku yang menjadi motor penggerak mis: disentif ijin Optimalisasi pengembangan TTG (Teknologi Tepat Guna)
		Meningkatnya jumlah wirausahawan baru	Wirausahawan baru bidang industri agribisnis belum tumbuh optimal Peningkatan nilai tambah dari produk yang dihasilkan wirausahawan baru masih belum optimal	Berperannya inkubator bisnis Sumbawa Techno Park dan SIKIM
		Meningkatnya partisipasi	Belum optimalnya peran serta	Penyediaan akses

<b>No</b>	<b>Sasaran Pokok RPJPD 2005-2025</b>	<b>Indikator RPJPD</b>	<b>Permasalahan</b>	<b>Faktor Penentu Keberhasilan</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
		masyarakat dalam pembangunan daerah	masyarakat dalam pembangunan daerah	partisipasi masyarakat
2	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Meningkatnya IPM Kabupaten Sumbawa	Masih rendahnya capaian indikator IPM	Peningkatan pembangunan pendidikan, perekonomian dan kesehatan Penumbuhan industri yang mampu menyerap tenaga kerja terdidik
		Meningkatnya penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna	Pengembangan pemanfaatan TTG belum optimal	Berperannya inkubator bisnis Sumbawa Techno Park
3	Meningkatnya profesionalisme aparatur daerah untuk mewujudkan tata pemerintahan lokal yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab, serta profesional yang mampu mendukung pembangunan nasional.	Meningkatnya kapasitas SDM aparatur	Kurangnya kesempatan aparatur mengikuti diklat fungsional maupun diklat struktural	Pengalokasian anggaran untuk mengikuti diklat dan tugas belajar
		Terlaksananya agenda reformasi birokrasi, peningkatan kapasitas kelembagaan dan pencegahan korupsi	Masih rendahnya kualitas pelayanan publik	Implementasi 8 area perubahan
		Meningkatkan kualitas sarana, prasarana dan sistem pendukung manajemen pembangunan	Belum semua sistem layanan berbasis elektronik	Mendorong sistem layanan berbasis elektronik
		Meningkatnya pelayanan administrasi	Masih adanya keluhan masyarakat terkait	Implementasi Standar pelayanan

No	Sasaran Pokok RPJPD 2005-2025	Indikator RPJPD	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
1	2	3	4	5
		publik di bidang pertanahan, kependudukan dan catatan sipil, dan kearsipan daerah	pelayanan administrasi publik	(SP) dan standar operasional prosedur (SOP)
4	Meningkatnya pengelo-laan sumberdaya keuangan daerah yang efisien, akuntabel dan transparan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pengelolaan keuangan, aset dan penerimaan daerah	Masih adanya aset-aset tanah pemerintah daerah yang belum bersertifikat	Manajemen pengelolaan aset; Efisiensi anggaran daerah
		Meningkatnya sumber-sumber penerimaan daerah	Pertumbuhan realisasi PAD belum optimal	Efektifitas strategi intensifikasi dan eksensifikasi PAD
		Meningkatnya efisiensi dan efektivitas belanja daerah dan optimalisasi pembiayaan pemba-ngunan daerah	Masih rendahnya belanja modal untuk pembangunan.	Peningkatan alokasi belanja modal yang akan memberikan dampak bagi pendapatan
5	Terbangunnya jaringan infrastruktur perhubungan dan komunikasi untuk mengintegrasikan pembangunan pusat pertumbuhan, sentra produksi dan pasar	Meningkatnya kualitas dan kuantitas jaringan infrastruktur perhubungan dan komunikasi antara pusat-pusat pertumbuhan, sentra produksi dan pasar	Masih adanya wilayah yang rendah aksesibilitas pada sentra perdagangan	Pembangunan akses infrastruktur perekonomian yang mudah diakses oleh masyarakat Trayek, terminal, pelabuhan, dermaga
<b>IV Mewujudkan Kabupaten Sumbawa yang asri dan lestari</b>				
1	Meningkatnya pe-ngelolaan dan pen-dayagunaan sumberdaya alam dengan memperhatikan karakteristiknya	Menurunnya angka kerusakan lingkungan (biotik dan abiotik)	Maraknya illegal logging, illegal fishing dan illegal mining	Penegakan hukum Rehabilitasi dan Reklamasi
		Meningkatnya rasio	Minimnya luasan RTH	Peningkatan luas RTH

No	Sasaran Pokok RPJPD 2005-2025	Indikator RPJPD	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
1	2	3	4	5
	dan pelestarian fungsi lingkungan hidup	ketersediaan ruang terbuka hijau		publik; mendorong penyediaan RTH privat
2	Terpeliharanya kekayaan keragaman jenis dan kekhasan sumber daya hayati ( <i>biodiversity</i> )	Terjaganya keberlangsungan sumberdaya hayati sebagai modal pembangunan dalam peningkatan nilai tambah dan daya saing	Masih tingginya <i>illegal logging</i> , <i>illegal mining</i> dan <i>illegal fishing</i>	Kesadaran dan partisipasi masyarakat dan penegakan hukum
3	Terkendalikannya pencemaran, kerusakan lingkungan dan potensi bencana alam	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengendalian pencemaran dan peningkatan kualitas lingkungan hidup.	Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelestarian lingkungan hidup	Sosialisasi dan penegakan hukum
		Meningkatnya instrumen mitigasi dan penanggulangan bencana;	Masih kurangnya sarana prasarana mitigasi bencana;	Peningkatan sarana dan prasarana Instrumen mitigasi bencana
<b>V</b>	<b>Mewujudkan masyarakat yang maju dan sejahtera</b>			
1	Terwujudnya ketahanan pangan.	Terpenuhi kecukupan pangan terutama beras bagi penduduk dari hasil produksi sendiri (swasembada beras)	Masih rentannya bahaya kekeringan; Keragaman pangan masih rendah; Masih munculnya kasus gizi buruk	Pengaturan pengelolaan sumber daya air Diversifikasi pangan gizi
2	Terpenuhinya kebutuhan sandang yang murah, hunian sehat dan lingkungan permukiman yang layak	Meningkatnya kuantitas dan kualitas permukiman layak huni	Belum tertatanya kawasan permukiman	Penataan kawasan permukiman
		Meningkatnya kuantitas rumah layak huni	Masih adanya rumah tidak layak huni	Peningkatan pelaksanaan bedah rumah



<b>No</b>	<b>Sasaran Pokok RPJPD 2005-2025</b>	<b>Indikator RPJPD</b>	<b>Permasalahan</b>	<b>Faktor Penentu Keberhasilan</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
3	Tersedianya lapangan kerja yang semakin luas	Menurunnya angka pengangguran terbuka;	Serapan dunia usaha terhadap tenaga kerja masih rendah	Fasilitasi mitra kerja untuk Wirausahawan baru
		Meningkatnya kualitas dan kuantitas penyelenggaraan latihan ketrampilan kerja	Intensitas dan ragam pelatihan tenaga kerja masih kurang	Mendorong peran inkubator bisnis dan LLK
4	Terwujudnya keluarga berkualitas melalui program kependudukan dan pembinaan keluarga yang terencana	Terkendalinya pertumbuhan penduduk	Masih tingginya <i>unmeet need</i> (cakupan pasangan usia subur yang ingin berKB tidak terpenuhi)	Peningkatan layanan kontrasepsi dan kampung KB
		Meningkatnya kepesertaan KB	Rasio akseptor KB masih sekitar 77,4%	Partisipasi masyarakat
5	Meningkatnya kualitas pendidikan penduduk	Menurunnya angka buta aksara;	Masih terdapat penduduk usia 10 tahun keatas yang buta aksara	Keaksaraan usaha mandiri
		Meningkatnya angka rata-rata lama sekolah;	Ketersediaan sekolah terutama jenjang SMP, menengah dan tinggi belum memadai	Membuka lapangan pekerjaan
6	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Menurunnya angka kesakitan;	Kesadaran perilaku hidup sehat yang masih kurang Sanitasi lingkungan masih belum optimal	Kampanye sadar hidup sehat Peningkatan upaya preventif dan promotif
		Meningkatnya akses layanan kesehatan masyarakat;	Masih adanya wilayah yang sulit mendapatkan akses layanan kesehatan	Pemerataan layanan kesehatan masyarakat
		Menurunnya angka kematian bayi dan angka kematian ibu melahirkan;	Masih tingginya persentase penolong kelahiran pertama oleh dukun bersalin	Pemerataan layanan kesehatan masyarakat Sarana prasarana

No	Sasaran Pokok RPJPD 2005-2025	Indikator RPJPD	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
1	2	3	4	5
			Kualitas pelayanan pada BUMIL belum optimal	kesehatan dan SDM petugas
		Menurunnya prevalensi gizi kurang pada anak dan balita;	Masih adanya kasus gizi buruk	Diversifikasi pangan dan gizi
7	Meningkatnya upaya-upaya perlindungan dan peningkatan kesejahteraan sosial	Menurunnya angka kekerasan dalam rumah tangga;	Masih terdapat kasus KDRT terlapor setiap tahun;	Kesadaran masyarakat;
		PMKS tertangani	Masih rendahnya cakupan penanganan PMKS	Peningkatan penanganan PMKS melalui optimalisasi peran pemerintahan desa Sinergi program lintas SKPD

Identifikasi permasalahan tersebut kemudian diuraikan menurut penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang memiliki keterkaitan dan pengaruh yang kuat terhadap urusan lain untuk memetakan berbagai permasalahan yang terkait dalam rangka menentukan isu-isu strategis pembangunan jangka menengah daerah.

#### 4.1.2. Identifikasi Permasalahan Untuk Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Dengan keterbatasan kapasitas dan kemampuan keuangan daerah dan karakteristik alokasi belanja daerah, maka tidak semua penyelenggaraan urusan dapat diprioritaskan atau terkait dengan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Sumbawa Tahun 2005-2025 dalam periode lima tahunan ke dua, namun tidak berarti bahwa urusan dimaksud tidak diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa dalam periode RPJMD Tahun 2016-2021 ini. Secara operasional, penyelenggaraan urusan-urusan tersebut harus dilaksanakan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja yang sudah dicapai di masa-masa lalu serta untuk memenuhi standar layanan bagi masyarakat.

Identifikasi permasalahan penyelenggaraan seluruh urusan pemerintahan diluar permasalahan program pembangunan daerah ini, dilakukan untuk mendapatkan gambaran awal serta faktor-faktor penentu keberhasilannya dimasa datang. Faktor-faktor penentu keberhasilan adalah faktor kritis, hasil kinerja, dan faktor-faktor lainnya yang memiliki daya ungkit yang tinggi dalam memecahkan permasalahan pembangunan atau dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

Identifikasi permasalahan pada tiap urusan dilakukan dengan memperhatikan capaian indikator kinerja pembangunan tiap urusan untuk mendapatkan rumusan permasalahan yang akan dipecahkan, Adapun identifikasi permasalahan menurut penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di Kabupaten Sumbawa disajikan sebagai berikut.

**Tabel 4.2**  
**Identifikasi Permasalahan Untuk Penentuan Program Prioritas**  
**Pembangunan Di Kabupaten Sumbawa**

<b>No</b>	<b>Bidang Urusan Dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah</b>	<b>Interpretasi Belum Tercapai (&lt;) Sesuai (=) Melampaui (&gt;)</b>	<b>Permasalahan</b>	<b>Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1.	<b>Pendidikan</b>		-Sebagian warga yang sudah dibelajarkan kembali buta huruf -APS pendidikan menengah turun dari 752 Tahun 2013 menjadi 672 Tahun 2014 -Jangkauan layanan pendidikan jenjang SMP/MTs	-Keaksaraan usaha mandiri -Pembangunan USB/Satap/Filial dan penambahan RKB (SMP) -Redistribusi guru secara proporsional (SD/SMP) -Penyelenggaraan pendidikan khusus/pendi
1.1.	Angka melek huruf	<		
1.2.	Angka rata-rata lama sekolah	<		
1.3.	Angka harapan lama sekolah	<		
1.4.1.	Angka partisipasi sekolah Pendidikan dasar dan menengah	<		
1.4.2.	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah Pendidikan dasar dan menengah	<		
1.4.3.	Rasio guru/murid pendidikan dasar dan menengah	<		

No	Bidang Urusan Dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan
1	2	3	4	5
1.4.4.	Kualifikasi guru pendidikan dasar dan menengah	<	<p>masih rendah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Distribusi guru jenjang pendidikan dasar yang belum proporsional , ratio ketersediaan guru terhadap murid Tahun 2013 turun dari 994 menjadi 886 Tahun 2014, sedangkan SMP Tahun 2013 sebesar 776 turun menjadi 755 Tahun 2014</li> <li>-Belum semua kecamatan memiliki SMA/MA/ SMK</li> <li>-Penambahan guru SMA/MA/ SMK tidak sebanding dengan penambahan jumlah murid</li> </ul>	<p>dikan layanan khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Pembangunan USB dan penambahan RKB (Menengah)</li> <li>-Penambahan jumlah guru sesuai kompetensi (menengah)</li> </ul>
2.	<b>Kesehatan</b>		-Masih terjadinya kematian neonatal yang disebabkan oleh Berat Bayi Lahir Rendah	-Peningkatan status gizi keluarga -Perencanaan kehamilan -Pengangkatan dokter dan
2.1.	Angka kelangsungan hidup bayi	>		
2.2.	Angka usia harapan hidup	>		
2.3.	Persentase balita gizi buruk	>		
2.4.	Rasio posyandu per satuan balita	>		

No	Bidang Urusan Dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan
1	2	3	4	5
2.5.	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	>	-Ketersediaan dokter dan paramedis belum sebanding dengan jumlah penduduk	paramedis
2.6.	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	<		
2.7.	Rasio dokter/satuan penduduk	<		
2.8.	Rasio tenaga medis/satuan penddk	<		
3.	<b>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>		-Belum meratanya distribusi jaringan jalan dalam kondisi mantap antar-wilayah dan antar-kecamatan -Tingginya laju sedimentasi bendungan di saluran irigasi	-Regulasi tentang koefisien lantai dan dasar
3.1.	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	>		
3.2.	Rasio jaringan irigasi	<		
3.3.	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	>		
3.4.	Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB	<		
3.5.	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan	<		
4.	<b>Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman</b>		-Prasarana air bersih dan sanitasi (sampah, air limbah dan drainase) belum memadai	-Peningkatan kualitas perumahan masyarakat berpenghasilan rendah
4.1.	Rumah layak huni	>		
4.2.	Rumah tangga pengguna air bersih	>		
4.3.	Rumah tinggal bersanitasi	<		
5.	<b>Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>		-Penegakan perda belum maksimal	-Kesadaran masyarakat
5.1.	Rasio Pol-PP/10.000 penduduk	<		
5.2.	Rasio Linmas/10.000 penduduk	<		
5.3.	Angka kriminalitas	<		

No	Bidang Urusan Dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan
1	2	3	4	5
5.4.	Jumlah demonstrasi	<		
6.	<b>Sosial</b>		-Belum optimalnya penanganan PMKS	-Peningkatan peran pemerintah desa
5.1.	PMKS tertangani	<		
5.2.	Tingkat kemiskinan	<		
7.	<b>Tenaga Kerja</b>		-Masih rendahnya serapan tenaga kerja karena peluang kerja yang terbatas -Belum semua perusahaan menerapkan Upah Minimum	-Peningkatan peluang kerja -Peningkatan peran Serikat Pekerja -Penerapan sanksi
5.1.	Tingkat partisipasi angkatan kerja	<		
5.2.	Tingkat Pengangguran Terbuka	<		
8.	<b>Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>		-Pengarusutamaan gender masih rendah	-Pelibatan perempuan dalam pembangunan
5.1.	Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	<		
5.2.	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	<		
5.3.	Kekerasan Dalam Rumah Tangga	<		
9.	<b>Pangan</b>		-Masih tingginya konsumsi beras dibanding konsumsi protein hewani dan nabati	-Penganekaragaman konsumsi pangan, gemar makan ikan, <i>One day no rice</i>
5.1.	Pola Pangan Harapan	<		
5.2.	Kecukupan energi/kapita/tahun	>		
10.	<b>Pertanahan</b>		- Masih tingginya konflik pertanahan antar warga - Terbatasnya	
10.1	Rasio penerbitan sertifikat terhadap pengajuan sertifikat	<		
10.2	Jumlah tanah pemda yang bersertifikat (lembar)	<		

No	Bidang Urusan Dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan
1	2	3	4	5
10.3	Penyelesaian batas wilayah kabupaten	<	kemampuan BPN menerbitkan sertipikat pertahun	
10.4	Batas desa yang sudah di Perdakan	<		
11.	<b>Lingkungan Hidup</b>		-Sarana TPA masih kurang, yang beroperasi hanya TPA Raberas -Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah masih sangat kurang	-Penambahan TPA dan sarana prasarana penanganan sampah
11.1	Daya tampung TPS	<		
11.2	Rasio tempat pembuangan sampah	<		
11.3	Persentase penanganan sampah	>		
12.	<b>Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>		-Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan (KTP dan akta kematian)	-Pendekatan pelayanan kependudukan hingga ke tingkat desa
12.1	Jumlah KTP yang diterbitkan per tahun	<		
12.2	Rasio kepemilikan KTP	>		
12.3	Rasio kepemilikan akte perkawinan	=		
12.4	Rasio kepemilikan akte kelahiran	=		
12.5	Rasio kepemilikan akte kematian	<		
13.	<b>Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>		-Masih rendahnya keterlibatan pemerintah desa	-Kemandirian dan kelembagaan yang kuat
13.1	Kelompok binaan LPM	=		
13.2	LSM aktif	=		
14.	<b>Pengendalian Penduduk dan KB</b>		-Belum optimal keterlibatan	-Peran pemerintah

No	Bidang Urusan Dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan
1	2	3	4	5
14.1	Rasio akseptor KB	>	masyarakat -kepadatan penduduk antar kecamatan belum berimbang	desa
15.	<b>Perhubungan</b>		-Belum tersedianya dokumen perencanaan sektor perhubungan	Sumberdaya manusia
15.1	Rasio ijin trayek	<		
15.2	Jumlah uji Kir	<		
15.3	Ketersediaan terminal dan selter	<		
16.	<b>Komunikasi dan Informatika</b>		-Masih terdapat dua kecamatan yang belum terjangkau jaringan telekomunikasi	-Penyediaan infrastruktur telekomunikasi -Dukungan KPU/USO dari Kemenkominfo
16.1	Jumlah surat kabar nasional	<		
16.2	Jumlah penyiaran radio	>		
16.3	Jumlah penyiaran TV lokal	<		
16.4	Persentase wilayah berakses internet	<		
17.	<b>Koperasi Usaha Kecil dan Menengah</b>		-cakupan layanan BPR masih terbatas -Pembinaan kelembagaan perkoperasian belum maksimal -Modal LKM yang terbatas -Tingkat kesehatan sebagian besar LKM masih rendah	-Peningkatan kapasitas dan kelembagaan koperasi, UKM, dan LKM -Peningkatan aktifitas ekonomi masyarakat -Peningkatan akses permodalan LKM
17.1	Persentase Koperasi aktif	<		
17.2	Jumlah UKM non BPR/LKM	=		
17.3	Jumlah BPR	<		
17.4	Jumlah LKM	>		
18.	<b>Penanaman Modal</b>		-Daya listrik tersedia belum	-Ketersediaan daya listrik
18.1	Realisasi investasi	=		



No	Bidang Urusan Dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan
1	2	3	4	5
18.2	Rasio daya serap tenaga kerja	<	memadai	-Ketaatan terhadap RTRW
18.3	Rata-rata lama proses perijinan (hari kerja)	=	-Masih terjadi konflik ruang dan sengketa kepemilikan lahan	
18.4	Jumlah perijinan pendukung investasi	=	-Masih rendahnya investasi pada industri sekunder	
18.5	Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha	<		
19.	<b>Kepemudaan dan olahraga</b>		-Masih rendahnya sarana prasarana, dan <i>event</i> kesenian dan olahraga	
19.1	Rasio Grup Kesenian Per 10.000 Penduduk	<		
19.2	Rasio Gedung Kesenian Per 10.000 Penduduk	<		
19.3	Rasio Klub Olahraga Per 10.000 Penduduk	<		
19.4	Rasio Gedung Olahraga Per 10.000 Penduduk	<		
20.	<b>Statistik</b>		-Masih terdapat beberapa data SKPD yang tidak sinkron dengan data BPS	-Sinkronisasi data
20.1	Daerah Dalam Angka (DDA)	=		
20.2	Kecamatan Dalam Angka	=		
20.3	PDRB Kabupaten Sumbawa	=		
20.4	PDRB Kecamatan			
20.5	Profil Daerah	=		
20.6	Indeks Pembangunan Manusia	=		
20.7	Indeks Gini Rasio			
20.8	Indeks Williamson			
20.9	Indeks Harga Konsumen	=		
20.1	Indeks Kepuasan Masyarakat			
20.1	Indeks Pelayanan Minimum			
20.1	Indeks Pelayanan Publik			

No	Bidang Urusan Dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan
1	2	3	4	5
20.1	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	=		
20.1	Indeks pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	=		
20.1	Pengeluaran konsumsi rumah tangga non pangan	=		
20.1	sumberdaya Alam Spasial Kabupaten Sumbawa	=		
21.	<b>Persandian</b>			
21.1	Jumlah tenaga fungsional persandian	<	-Kurangnya tenaga fungsional persandian	-Peningkatan jumlah dan kapasitas tenaga fungsional persandian
22.	<b>Kebudayaan</b>			
22.1	Jumlah cagar budaya yang ditangani	<	-Tenaga pemelihara cagar budaya terbatas	-Optimalisasi peran pemerintah desa
22.2	Prasarana pertunjukan seni budaya	<	-Prasarana seni budaya masih kurang	
22.3	Jumlah even seni budaya daerah	<	-Masih minimnya <i>event</i> seni budaya	
23.	<b>Perpustakaan</b>			
23.1	Jumlah perpustakaan daerah	=	-Sarana pendukung perpustakaan belum memadai	-Peningkatan fasilitas perpustakaan
23.2	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	<	-Koleksi buku terbatas	-Penambahan koleksi buku
23.3	Jumlah pengunjung perpustakaan daerah	<	-Minat baca masyarakat masih rendah	-Optimalisasi perpustakaan keliling
24.	<b>Kearsipan</b>			
24.1	Persentase SKPD yang menerapkan arsip secara baku	<	-Masih kurangnya arsiparis di SKPD	-Pelatihan pengelolaan arsip -Pemanfaatan

No	Bidang Urusan Dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan
1	2	3	4	5
24.2	Persentase pengelola arsip terpadu terlatih	<	-Teknologi pengarsipan masih rendah	IT
25.	<b>Kelautan dan Perikanan</b>		-Pemanfaatan potensi lahan untuk pengembangan usaha perikanan masih rendah	-Ekstensifikasi wilayah tangkapan dan budidaya
25.1.	Pemanfaatan sumberdaya lahan perikanan	<	-nilai tambah produk olahan bahan asal ikan masih rendah	-Penerapan teknologi tangkap dan budidaya
25.2.	Jumlah produksi perikanan	>	-Penerapan teknologi perikanan masih rendah	
25.3.	Luas potensi sumberdaya lahan perikanan	=		
25.4.	Cakupan bina kelompok budidaya rumput laut	=		
25.5.	Cakupan bina kelompok nelayan perikanan tangkap	=		
25.6.	Nilai Tukar Petani Perikanan		-Penerapan teknologi perikanan masih rendah	
26.	<b>Pariwisata</b>		-Belum tersedianya RIPPDA dan turunannya	-Perda RIPPDA
26.1	Obyek wisata yang ditangani	<	-Penanganan obyek wisata belum optimal	-Kerjasama dengan swasta/ pihak ketiga
26.2	Jumlah kunjungan wisatawan	<		-Sinergi Pusat-Daerah
26.3	Tingkat hunian hotel	<		
27.	<b>Pertanian</b>			
27.1	<b><i>Pertanian tanaman pangan</i></b>		-Produktivitas masih rendah	-Penerapan teknologi pertanian
27.1	Produktivitas padi	>	-Sarana prasarana belum memadai	-Penyediaan sarana prasarana pertanian
27.1	Produksi Padi	>	-penambahan luasan lahan budidaya tidak diimbangi dengan penambahan	
27.1	Produktivitas jagung	>		
27.1	Produksi jagung	>		
27.1	Pencetakan sawah baru	>		
27.1	Jumlah kelompok tani binaan	=		
27.1	Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan			

No	Bidang Urusan Dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan
1	2	3	4	5
27.1	Nilai Tukar Petani Hortikultura		<ul style="list-style-type: none"> <li>- jaringan irigasi</li> <li>- biaya produksi untuk sektor pertanian masih tinggi</li> <li>- nilai tambah dari hasil olahan produk masih rendah</li> <li>- kapasitas SDM masih rendah</li> </ul>	
27.2	<b>Peternakan</b>		- Menurunnya mutu genetik ternak kerbau	- Optimalisasi laboratorium kerbau bersinergi
27.2	Populasi kerbau Sumbawa	<	- masih adanya pengeluaran dan pemotongan ternak ilegal	- Penegakan hukum
27.2	Populasi sapi Sumbawa	>	- pengelolaan LAR belum optimal	- Penerapan teknologi peternakan
27.2	Populasi sapi bali	>	- Animal unit masih rendah	- Sistem pemeliharaan semi intensif
27.2	Populasi kuda Sumbawa	<		- Pemeliharaan
27.2	Cakupan bina kelompok peternak	=		
27.2	Ketersediaan Lar ternak	<		
27.2	Jumlah pengeluaran ternak ke luar daerah	>		
27.2	Penyakit ternak yang ditangani	=		

No	Bidang Urusan Dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan
1	2	3	4	5
27.2	Nilai Tukar Peternak		<ul style="list-style-type: none"> <li>-Masih terdapat kasus kematian ternak akibat penyakit</li> <li>-Masih rendahnya pemanfaatan teknologi pengolahan bahan asal ternak, sehingga nilai tambah produk hasil ternak rendah</li> <li>-umumnya sistem pemeliharaan masih ekstensif</li> <li>-manajemen tata niaga peternakan masih rendah</li> </ul>	kesehatan ternak
27.3	<b>Perkebunan</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>-Rendahnya produksi perkebunan</li> <li>-minimnya produk olahan hasil perkebunan</li> </ul>	-Intensifikasi dan ekstensifikasi
27.3	Luas areal komoditas perkebunan	<		
27.3	produksi komoditas perkebunan	<		
27.3	Produktivitas areal perkebunan	<		
27.3	Nilai Tukar Petani Perkebunan			
28.	<b>Kehutanan</b>		-Masih terdapat kawasan hutan yang	-Kesadaran dan peran masyarakat
28.1.	Luas kawasan hutan	=		
28.2.	Luas lahan kritis	<		

No	Bidang Urusan Dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan
1	2	3	4	5
28.3.	Rehabilitasi hutan dan lahan	<	<ul style="list-style-type: none"> <li>- dimanfaatkan tidak sesuai peruntukan</li> <li>- Masih banyak <i>illegal logging</i></li> <li>- Belum optimal rehabilitasi hutan dan lahan kritis</li> <li>- Belum optimal tataniaga Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- sekitar hutan</li> <li>- Penegakan hukum</li> <li>-</li> </ul>
29.	<b>Energi dan Sumber Daya Mineral</b>		- Belum tersedianya data potensi sektor EBT	- Pendataan potensi sektor EBT secara menyeluruh
29.1.	Rasio elektrifikasi PLN	>	secara lengkap	- Menyediakan akses listrik bagi masyarakat di desa/dusun terpencil melalui EBT
29.2.	Rasio elektrifikasi EBT	<	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Masih terdapat desa/dusun yang belum terjangkau listrik</li> </ul>	
30.	<b>Perdagangan</b>		- Sebagian besar usaha perdagangan masih bersifat non formal	- Fasilitasi formalisasi badan usaha
30.1	Jumlah usaha mikro perdagangan yang dibina	<	Keterampilan manajerial pelaku usaha masih rendah	- Peningkatan kapasitas pelaku usaha
30.2	Jumlah usaha kecil perdagangan yang dibina	<	Rendahnya akses permodalan	- Peningkatan sarana prasarana pasar tradisional
30.3	Jumlah usaha menengah perdagangan yang dibina	<	Fasilitas pasar	- Perda kelembagaan
30.4	Jumlah usaha besar perdagangan yang dibina	<		
30.5	Wajib Daftar Perusahaan			
30.6	Ketersediaan sarana pasar tradisional	<		

No	Bidang Urusan Dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan
1	2	3	4	5
30.7	Persentase tera/tera ulang	<	tradisional belum memadai -Kelembagaan UPT kemetrologian belum terbentuk	UPT Kemetrologian
31.	<b>Perindustrian</b>		-Belum tersedia database IKM	-Penyediaan database IKM
31.1	Jumlah IKM yang dibina	<	-Sentra industri belum berbasis produk unggulan daerah	-Dokumen Rencana Induk Pembangunan Industri Kabupaten
31.2	Jumlah unit usaha sentra industri	<	-Belum tersedianya inkubasi bisnis	-Kapasitas SDM dan sarana prasarana IKM
32.	<b>Transmigrasi</b>		-SDM rendah	-Peningkatan SDM
32.1	UPT yang dibina	=	-Sarana prasarana belum memadai -Belum ada investor yang beminat di KTM	-Sinergi program dengan pemerintah provinsi dan pusat

#### 4.2. Penelaahan RPJMN dan PRJMD Daerah Lain

##### 4.2.1. Penelaahan RPJMN dan RPJMD Provinsi

Keterkaitan rencana pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Sumbawa dengan RPJMN dan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat, adalah sebagai berikut.

**Tabel 4.3**  
**Keterkaitan Prioritas RPJMN, RPJMD Provinsi NTB dan RPJMD Kabupaten Sumbawa**

<b>No</b>	<b>RPJMN</b>	<b>RPJMD Provinsi NTB</b>	<b>RPJMD Kab. Sumbawa</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>I</b>	<b>Visi (2014-2019)</b>	<b>Visi (2013-2018)</b>	<b>Visi (2016-2021)</b>
	Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong	Mewujudkan Masyarakat Nusa Tenggara Barat Yang Beriman, Berbudaya, Berdayasaing dan Sejahtera	Terwujudnya Masyarakat Sumbawa Yang Berdaya Saing, Mandiri, Dan Berkepribadian Berlandaskan Semangat Gotong Royong
<b>II</b>	<b>Misi</b>	<b>Misi</b>	<b>Misi</b>
1.	Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan	Mempercepat perwujudan masyarakat yang berkarakter	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat
2.	Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan, dan demokratis berlandaskan negara hukum	Mengembangkan budaya dan kearifan lokal	Mewujudkan birokrasi yang bersih, handal dan profesional sehingga mampu menjalankan pemerintahan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik ( <i>good governance</i> )
3.	Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim	Melanjutkan ikhtiar reformasi birokrasi yang bersih dan melayani, penegakan hukum yang berkeadilan, dan memantapkan stabilitas keamanan.	Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur dengan membangun sinergi yang kuat dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi
4.	Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera	Meningkatkan mutu sumberdaya manusia yang berdayasaing	Mengembangkan potensi unggulan daerah dan meningkatkan produktivitas usaha masyarakat demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat, penurunan angka kemiskinan dan perluasan lapangan kerja



<b>No</b>	<b>RPJMN</b>	<b>RPJMD Provinsi NTB</b>	<b>RPJMD Kab. Sumbawa</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
5.	Mewujudkan bangsa yang berdaya saing	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempercepat penurunan kemiskinan, dan mengembangkan keunggulan daerah	Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan
6.	Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional	Melanjutkan percepatan pembangunan infrastruktur dan konektivitas wilayah berbasis tata ruang.	Mewujudkan masyarakat yang religius dan memelihara toleransi antar umat beragama
7.	Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan	Memantapkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Memelihara dan mengembangkan potensi budaya dan kearifan lokal.
<b>II</b>	<b>Prioritas :</b>	<b>Prioritas :</b>	<b>Prioritas :</b>
<b>I</b>			<b>Agenda peningkatan daya saing:</b>
1.	Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh warga negara <b>(10;11;12)</b>	1. Budipekerti Luhur <b>(11;12)</b>	1. Peningkatan kualitas pendidikan
2.	Membangun tata kelola Pemerintahan yg bersih, efektif, demokratis dan terpercaya <b>(3)</b>	2. Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan, Penegakan Hukum dan Stabilitas Keamanan <b>(3)</b>	2. Peningkatan derajat kesehatan
3.	Membangun Indonesia dari pinggiran dg memperkuat daerah-daerah dan desa dlm kerangka Negara Kesatuan <b>(4)</b>	3. Kesehatan <b>(2)</b>	3. Pemantapan pelaksanaan reformasi birokrasi

<b>No</b>	<b>RPJMN</b>	<b>RPJMD Provinsi NTB</b>	<b>RPJMD Kab. Sumbawa</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
4.	Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya. <b>(3)</b>	4. Pendidikan <b>(1)</b>	4. Percepatan pembangunan infrastruktur
			<b>Agenda peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat:</b>
5.	Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia <b>(1;2)</b>	5. Kesejahteraan Sosial <b>(6;7;9)</b>	5. Peningkatan nilai tambah komoditi unggulan daerah
6.	Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional <b>(6;7;8)</b>	6. Agroindustri dan Ketahanan Pangan <b>(5;6)</b>	6. Meningkatkan produktivitas petani, peternak dan nelayan
7.	Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik <b>(5,6,7,8,9)</b>	7. Wirausaha dan Iklim Investasi <b>(5;7;8)</b>	7. Mendorong tumbuhnya aktivitas usaha masyarakat
8.	Melakukan revolusi karakter bangsa <b>(11;12;13)</b>	8. Pariwisata dan Ekonomi Kreatif <b>(7;9;13)</b>	8. Mendorong realisasi investasi
9.	Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial <b>(12;13)</b>	9. Infrastruktur dan Konektivitas Wilayah <b>(4)</b>	9. Optimalisasi pemanfaatan SDA berkelanjutan
10.		10. Lingkungan Hidup, Perubahan iklim dan Bencana Alam <b>(9,10)</b>	10. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam melestarikan LH
			<b>Agenda penguatan karakter kepribadian masyarakat:</b>
11.			11. Peningkatan kualitas IMTAQ
12.			12. Meningkatkan toleransi dan keharmonisan dalam masyarakat.
13.			13. Mengembangkan

<b>No</b>	<b>RPJMN</b>	<b>RPJMD Provinsi NTB</b>	<b>RPJMD Kab. Sumbawa</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
3.			potensi budaya dan kearifan lokal.

Berdasarkan sandingan prioritas RPJMN, RPJMD Provinsi NTB dan RPJMD Kabupaten Sumbawa sebagai tersebut pada table 4.3, maka hasil telaahan disajikan sebagai berikut.

1. Peningkatan kualitas pendidikan yang menjadi salah satu prioritas pembangunan pada RPJMD Kabupaten Sumbawa, selaras dengan prioritas pendidikan pada RPJMD Provinsi NTB, serta prioritas meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia pada RPJMN.
2. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang menjadi salah satu prioritas pembangunan pada RPJMD Kabupaten Sumbawa, selaras dengan prioritas kesehatan pada RPJMD Provinsi NTB, serta prioritas meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia pada RPJMN.
3. Memantapkan pelaksanaan agenda reformasi birokrasi yang menjadi salah satu prioritas RPJMD Kabupaten Sumbawa, selaras dengan prioritas reformasi birokrasi, tata kelola, penegakan hukum dan stabilitas keamanan pada RPJMD Provinsi NTB, dan prioritas membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya, serta prioritas memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya pada RPJMN.
4. Percepatan pembangunan infrastruktur yang menjadi salah satu prioritas pembangunan pada RPJMD Kabupaten Sumbawa, selaras dengan prioritas infrastruktur dan konektifitas wilayah pada RPJMD Provinsi NTB, dan prioritas membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan pada RPJMD.
5. Peningkatan nilai tambah komoditi unggulan daerah yang menjadi salah satu prioritas pada RPJMD Kabupaten Sumbawa, selaras dengan prioritas wirausaha dan iklim investasi dan Wirausaha dan Iklim Investasi pada RPJMD Provinsi NTB, serta prioritas Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik pada RPJMN.
6. Meningkatkan produktifitas petani, peternak dan nelayan yang menjadi salah satu prioritas pembangunan pada RPJMD Kabupaten Sumbawa, selaras dengan Kesejahteraan Sosial dan Agroindustri dan Ketahanan Pangan pada RPJMD Provinsi NTB, serta prioritas meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional pada RPJMN.
7. Mendorong tumbuhnya aktivitas usaha masyarakat yang menjadi salah satu prioritas pada RPJMD Kabupaten Sumbawa, selaras dengan prioritas kesejahteraan sosial, Wirausaha dan Iklim Investasi dan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada RPJMD Provinsi NTB, serta prioritas Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional dan Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik pada RPJMN.
8. Mendorong realisasi investasi yang menjadi salah satu prioritas pembangunan pada RPJMD Kabupaten Sumbawa, selaras dengan prioritas wirausaha dan iklim investasi pada RPJMD Provinsi NTB, serta prioritas

- Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik
9. Optimalisasi pemanfaatan sumberdaya alam berkelanjutan yang menjadi salah satu prioritas pada RPJMD Kabupaten Sumbawa, selaras dengan prioritas lingkungan hidup, perubahan iklim dan bencana alam pada RPJMD Provinsi NTB, serta prioritas mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik pada RPJMN.
  10. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam melestarikan lingkungan hidup yang menjadi salah satu prioritas RPJMD Kabupaten Sumbawa, selaras dengan prioritas kesejahteraan sosial, pariwisata dan ekonomi kreatif dan prioritas lingkungan hidup, perubahan iklim dan bencana alam pada RPJMD Provinsi NTB, serta prioritas Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh warga negara dan mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik pada RPJMN.
  11. Peningkatan kualitas iman dan taqwa yang menjadi salah satu prioritas pada RPJMD Kabupaten Sumbawa, selaras dengan prioritas budi pekerti luhur pada RPJMD Provinsi NTB, serta prioritas Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh warga negara dan melakukan revolusi karakter bangsa pada RPJMN.
  12. Meningkatkan toleransi dan keharmonisan dalam masyarakat yang menjadi salah satu prioritas pada RPJMD Kabupaten Sumbawa, selaras dengan prioritas budi pekerti luhur pada prioritas RPJMD Provinsi NTB, serta Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh warga negara dan melakukan revolusi karakter bangsa dan Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial pada RPJMN.
  13. Mengembangkan potensi budaya dan kearifan lokal yang menjadi salah satu prioritas pada RPJMD Kabupaten Sumbawa, selaras dengan prioritas budi pekerti luhur dan pariwisata dan ekonomi kreatif pada prioritas RPJMD Provinsi NTB, serta prioritas melakukan revolusi karakter bangsa dan prioritas memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial pada RPJMN.

#### 4.2.2. Penelaahan RPJMD Daerah Lain

Penyusunan RPJMD juga memperhatikan RPJMD daerah lain agar tercipta keterpaduan pembangunan jangka menengah daerah dengan daerah sekitarnya, atau dengan daerah lain yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Penelaahan terhadap RPJMD daerah lain dipandang perlu untuk mendapatkan gambaran kondisi, keterkaitan dan keselarasan antarkebijakan terutama dengan daerah dalam satu provinsi.

Keterkaitan prioritas pembangunan antara Kabupaten Sumbawa dengan Kabupaten Sumbawa Barat dan Kabupaten Dompu, disajikan sebagai berikut.

**Tabel 4.4**  
**Identifikasi Keterkaitan Prioritas Pembangunan Jangka Menengah Daerah Antara Kabupaten Sumbawa, Sumbawa Barat dan Dompu**

No	Prioritas Pembangunan Jangka Menengah		
	Kabupaten Sumbawa	Kab. Sumbawa Barat	Kab. Dompu
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>

No	Prioritas Pembangunan Jangka Menengah		
	Kabupaten Sumbawa	Kab. Sumbawa Barat	Kab. Dompu
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kualitas pendidikan;</li> <li>2. Peningkatan derajat kesehatan;</li> <li>3. Pemantapan pelaksanaan reformasi birokrasi;</li> <li>4. Percepatan pembangunan infrastruktur;</li> <li>5. Peningkatan nilai tambah komoditi unggulan daerah;</li> <li>6. Meningkatkan produktivitas petani, peternak dan nelayan;</li> <li>7. Mendorong tumbuhnya aktivitas usaha masyarakat;</li> <li>8. Mendorong realisasi investasi;</li> <li>9. Optimalisasi pemanfaatan sumberdaya alam berkelanjutan;</li> <li>10. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam melestarikan lingkungan hidup;</li> <li>11. Peningkatan kualitas iman dan taqwa;</li> <li>12. Meningkatkan toleransi dan keharmonisan dalam masyarakat;</li> <li>13. Mengembangkan potensi budaya dan kearifan lokal</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menempatkan musyawarah untuk mufakat dengan semangat gotong-royong sebagai instrumen utama dalam pembangunan; <b>(11; 12; 13)</b></li> <li>2. Membangun kualitas hidup manusia Sumbawa Barat yang tinggi dan maju; <b>(1; 2)</b></li> <li>3. Membangun infrastruktur yang memadai bagi peningkatan daya saing; <b>(4;5)</b></li> <li>4. Menghadirkan pelayanan publik yang bermanfaat dan berkualitas; <b>(3)</b></li> <li>5. Menghadirkan pemerintahan yang punya sensitivitas yang tinggi dan responsif terhadap keluhan publik; <b>(3)</b></li> <li>6. Memberikan perlindungan, pemberdayaan dan pembinaan yang layak; <b>(3; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12;13)</b></li> <li>7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor basis ekonomi masyarakat; <b>(5; 6; 7; 8)</b></li> <li>8. Membangkitkan keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif daerah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan dan pemantapan produktivitas komoditi unggulan untuk meningkatkan daya saing daerah; <b>(5; 6; 7; 8)</b></li> <li>2. Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat; <b>(1; 2)</b></li> <li>3. Peningkatan pengamalan dan aktualisasi kehidupan beragama; <b>(11; 12; 13)</b></li> <li>4. Peningkatan transportasi melalui peningkatan aksesibilitas barang/orang; <b>(4)</b></li> <li>5. Revitalisasi dan modernisasi sarana dan prasarana pemerintahan; <b>(3)</b></li> <li>6. Revitalisasi dan modernisasi sistem pengembangan sektor kelautan dan perikanan; <b>(4; 5; 6; 7; 8; 9)</b></li> <li>7. Revitalisasi dan modernisasi sistem peternakan; <b>(4; 5; 6; 7; 8; 9)</b></li> <li>8. Fasilitasi industri-industri kecil skala rumah tangga. <b>(5; 7; 8)</b></li> </ol>

No	Prioritas Pembangunan Jangka Menengah		
	Kabupaten Sumbawa	Kab. Sumbawa Barat	Kab. Dompu
1	2	3	4
		dalam format industrialisasi; <b>(5; 6; 7; 8)</b> 9. Memperkuat struktur dan meningkatkan kemampuan keuangan daerah dengan memaksimalkan aktualisasi seluruh potensi sumberdaya serta kekhasan daerah berbasis daya dukung lingkungan. <b>(3; 9; 10)</b>	

*Ket: Tanda ( ) yang sama berarti memiliki keterkaitan isu*

#### 4.3. Analisis Isu-Isu Strategis Pembangunan Jangka Menengah

Isu strategis dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah merupakan kondisi aktual yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena penting, mendasar, mendesak dan berdampak jangka panjang bagi keberlanjutan pembangunan serta signifikan bagi daerah sesuai dengan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.

Isu-isu strategis RPJMD Kabupaten Sumbawa tahun 2016-2021 disusun dengan melihat dari fakta-fakta permasalahan pembangunan maupun permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipandang mendasar saat ini dikaitkan dengan tantangan yang akan dihadapi pada tahun 2016-2021, sebagai berikut.

**Tabel 4.5**  
**Identifikasi Isu-Isu Strategis Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sumbawa**

No	Bidang Urusan Pemerintah Daerah	Permasalahan	Isu
1	2	3	4
<b>A. Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar</b>			
1.	Pendidikan	-Masih adanya masyarakat yang buta huruf -Ratio ketersediaan Sekolah jenjang pendidikan dasar masih rendah, demikian pula dengan jenjang pendidikan menengah dimana belum semua kecamatan memiliki SMA/MA/SMK	-Aksesibilitas dan kualitas pendidikan

No	Bidang Urusan Pemerintah Daerah	Permasalahan	Isu
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
		<p>-Masih rendahnya angka partisipasi sekolah baik di jenjang pendidikan dasar maupun jenjang pendidikan menengah</p> <p>-Masih kurangnya sarana prasarana laboratorium di SMP dan jenjang pendidikan menengah, laboratorium/ bengkel di jenjang sekolah menengah</p> <p>-Masih kurangnya sarana prasarana penunjang perpustakaan dijenjang pendidikan dasar maupun jenjang pendidikan menengah</p> <p>-Masih rendahnya relevansi program studi kejuruan dengan kebutuhan pasar kerja</p> <p>-Angka harapan lama sekolah di Kabupaten Sumbawa hanya mencapai 11,94 (12 tahun) yang mencerminkan bahwa harapan bersekolah hanya sampai menamatkan pendidikan SMA, salah satu variabel yang menjadi penyebab adalah tidak adanya perguruan tinggi negeri di Kabupaten Sumbawa demikian pula dengan ketersediaan perguruan tinggi swasta yang juga masih sangat terbatas</p> <p>-Masih kurangnya guru-guru pada jenjang pendidikan dasar yang berkualifikasi pendidikan SI demikian pula dengan guru pada jenjang pendidikan menengah</p> <p>-Masih kurangnya guru-guru pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang belum bersertifikasi</p> <p>-Masih kurangnya tenaga kerja (khususnya lulusan SMK) yang memiliki sertifikat keahlian</p>	

<b>No</b>	<b>Bidang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Permasalahan</b>	<b>Isu</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
2.	Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Masih rendahnya sarana mobilitas pelayanan kesehatan di kecamatan dan kawasan-kawasan terisolir</li> <li>-Ratio ketersediaan dokter dan paramedis masih rendah</li> <li>-Masih relatif tinggi kasus kematian bayi dan kasus kematian ibu</li> <li>-Masih kurangnya Alkes medis baik di RSUD maupun puskesmas</li> </ul>	-Derajat kesehatan masyarakat
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Masih ada jalan dalam kondisi tidak mantap sebesar 11.01% dan dalam kondisi kritis 28.28%</li> <li>-Masih rendahnya cakupan layanan air bersih</li> <li>-Konektivitas antar wilayah yang belum merata</li> <li>-Sumber daya air yang semakin terdegradasi</li> <li>-Pemanfaatan ruang yang belum sepenuhnya terkendali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Prasarana dasar</li> <li>-Pengendalian pemanfaatan ruang</li> </ul>
4.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Prasarana air bersih dan sanitasi (sampah, air limbah dan drainase) belum memadai</li> </ul>	-Infrastruktur permukiman
5.	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Penegakan perda belum maksimal</li> <li>-Masih adanya kasus-kasus kriminalitas</li> <li>-Ratio personil Satpol PP masih rendah</li> <li>-Ketersediaan sarana prasarana mitigasi/penanganan bencana belum optimal</li> </ul>	-Kondusifitas daerah
6.	Sosial	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Belum optimalnya penanganan PMKS</li> <li>-Masih tingginya angka kemiskinan</li> <li>-Intensitas komunikasi dan dialog antar umat beragama masih kurang</li> </ul>	-Kemiskinan



No	Bidang Urusan Pemerintah Daerah	Permasalahan	Isu
1	2	3	4
<b>B. Urusan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar</b>			
7.	Tenaga Kerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Masih rendahnya serapan tenaga kerja karena peluang kerja yang terbatas</li> <li>-Lemahnya posisi tawar pekerja</li> <li>-Penanganan kasus TKI di luar negeri belum maksimal karena keterbatasan kewenangan pemda</li> <li>-Calon TKI masih didominasi oleh tenaga kerja non formal</li> <li>-BLK berstandar Internasional belum terbentuk</li> </ul>	-Peluang kerja dan kompetensi tenaga kerja
8.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Pengarutamaan gender masih rendah</li> <li>-Belum optimalnya partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan publik</li> <li>-Belum ada ruang publik yang bersahabat bagi anak-anak</li> </ul>	-Pengarutamaan gender
9.	Pangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Masih tingginya konsumsi beras dibanding konsumsi protein hewani dan nabati</li> <li>-Pengendalian harga pangan masih belum maksimal</li> <li>-Tingkat Kemandirian Rumah Tangga untuk memenuhi pangan masih rendah</li> <li>-Masih adanya wilayah yang dinyatakan daerah rawan pangan</li> </ul>	-Diversifikasi pangan
10.	Pertanahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Masih tingginya konflik pertanahan</li> <li>-Masih rendahnya legalitas kepemilikan lahan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Duplikasi sertifikat pertanahan</li> <li>-Kewenangan pusat</li> </ul>
11.	Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Kuantitas tutupan vegetasi permanen yang cenderung semakin menurun.</li> <li>-Masih lemahnya penegakan hukum dibidang lingkungan hidup.</li> </ul>	-Penanganan persampahan

No	Bidang Urusan Pemerintah Daerah	Permasalahan	Isu
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>-Terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM dalam pengamanan lingkungan</li> <li>-Tidak adanya regulasi ditingkat daerah yang mengatur tata kelola hutan/kawasan lindung diluar kawasan hutan.</li> <li>-Peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan relatif masih rendah.</li> <li>-Masih rendahnya cakupan layanan persampahan.</li> <li>-Sampai saat ini baru 7 kecamatan (dari 24 kecamatan) yang terlayani layanan persampahan.</li> <li>-Sarana TPA masih kurang (yang beroperasi sampai saat ini hanya TPA Raberas). Sesuai dengan arahan RTRW, Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dengan sistem sanitory landfill direncanakan 7 (tujuh) lokasi yaitu Kecamatan Sumbawa, Kecamatan Empang, Kecamatan Labangka, Kecamatan Lenangguar, Kecamatan Alas, Kecamatan Lape dan Kecamatan Plampang;</li> <li>-Jumlah sarana dan prasarana yang masih sangat kurang (dump truk, amroll truk, TPS, excavator, bulldozer.</li> <li>-Jumlah tenaga /pekerja dipersampahan masih kurang.</li> <li>-Data dan informasi bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup belum tersedia dengan lengkap dan akurat (data mata air, lahan kritis, tutupan lahan/vegetasi permanen).</li> <li>- Data base daerah rawan bencana belum tersedia.</li> </ul>	

<b>No</b>	<b>Bidang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Permasalahan</b>	<b>Isu</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
		-Masyarakat tanggap bencana belum terbentuk dengan optimal. -Pengurangan resiko bencana belum terintegrasi ke dalam dokumen perencanaan pembangunan.	
12.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan (KTP, akta kelahiran dan akta kematian)	-Kesadaran masyarakat dalam tertib administrasi kependudukan
13.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-Masih rendahnya kapasitas aparat pemerintah desa -Belum semua Desa memiliki bumdes -Peran bumdes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat belum optimal	-Kapasitas Pemerintahan Desa
14.	Pengendalian Penduduk dan KB	-Belum optimal keterlibatan masyarakat -Kepadatan penduduk antarkecamatan belum berimbang	-Peran pemerintah desa -Revitalisasi program KB
15.	Perhubungan	-Belum adanya manajemen transportasi -Sarana prasarana transportasi darat dan laut masih kurang	-Manajemen transportasi
16.	Komunikasi dan Informatika	-Masih terdapat dua kecamatan yang belum terjangkau jaringan telekomunikasi	-Keterjangkauan layanan telekomunikasi
17.	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	-Cakupan layanan BPR masih terbatas -Pembinaan kelembagaan perkoperasian belum maksimal -Akses dan modal LKM yang terbatas -Tingkat kesehatan sebagian besar LKM masih rendah	-Revitalisasi koperasi -Akses permodalan
18.	Penanaman Modal	-Daya listrik tersedia belum memadai -Masih terjadi konflik ruang dan sengketa kepemilikan lahan	-Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung

<b>No</b>	<b>Bidang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Permasalahan</b>	<b>Isu</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
		-Masih rendahnya investasi pada industri sekunder -Masih belum dilakukan kajian komprehensif untuk menetapkan fokus komoditi dan produk unggulan daerah	investasi
19.	Kepemudaan dan olahraga	-Masih terbatasnya sarana prasarana, dan penyelenggaraan even olahraga -Masih rendahnya partisipasi pemuda dalam pembangunan -Belum maksimalnya pembinaan olah raga prestasi (reward)	-Sarana dan prasarana kegiatan kesenian dan olahraga -Ruang partisipasi pemuda
20.	Statistik	-Masih terdapat beberapa data SKPD yang tidak sinkron dengan data BPS	-Integrasi dan sinkronisasi data
21.	Persandian	-Kurangunya tenaga fungsional persandian	-Pemenuhan tenaga fungsional persandian
22.	Kebudayaan	-Partisipasi masyarakat dalam pelestarian adat istiadat budaya yang belum optimal -Masih minimnya even seni dan budaya tingkat regional dan nasional -Prasarana seni budaya masih kurang -Masih adanya situs budaya yang belum terpelihara dengan optimal	-Penguatan kearifan lokal -Peran pemerintah desa
23.	Perpustakaan	-Sarana pendukung perpustakaan belum memadai -Koleksi buku terbatas -Minat baca masyarakat masih rendah	-Sarana prasarana dan koleksi perpustakaan -Pengembangan perpustakaan berbasis IT
24.	Kearsipan	-Masih kurangnya arsiparis di SKPD -Teknologi pengarsipan masih rendah	-Tenaga dan teknologi kearsipan
<b>C. Urusan pilihan</b>			

<b>No</b>	<b>Bidang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Permasalahan</b>	<b>Isu</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
25.	Kelautan dan Perikanan	-Pemanfaatan potensi lahan untuk pengembangan usaha perikanan masih rendah -Nilai tambah produk olahan bahan asal ikan masih rendah -Penerapan teknologi perikanan masih rendah	-Optimalisasi pemanfaatan potensi
26.	Pariwisata	-Masih kurangnya even-even wisata -Belum optimalnya pengelolaan obyek-obyek wisata -Masih terbatasnya prasarana dan sarana obyek wisata	-Pencana pengembangan obyek dan destinasi wisata
27.	Pertanian		
28.1.	<i>Pertanian tanaman pangan</i>	-Sarana prasarana belum memadai -Penambahan luasan lahan budidaya tidak diimbangi dengan penambahan jaringan irigasi -Biaya produksi untuk sektor pertanian masih tinggi -Nilai tambah dari hasil olahan produk masih rendah -Kapasitas SDM masih rendah	-Sarana prasarana pendukung peningkatan produksi
28.2.	<i>Peternakan</i>	-Menurunnya mutu genetik ternak kerbau -Masih adanya pengeluaran dan pemotongan ternak ilegal -Pengelolaan LAR belum optimal -Animal unit masih rendah -Masih terdapat kasus kematian ternak akibat penyakit -Masih rendahnya pemanfaatan teknologi pengolahan bahan asal ternak, sehingga nilai tambah produk hasil ternak rendah -Umumnya sistem pemeliharaan masih ekstensif -Manajemen tata niaga peternakan masih rendah	-Produktivitas dan daya saing komoditi peternakan
28.3.	<i>Perkebunan</i>	-Rendahnya produksi perkebunan	-Produktivitas

No	Bidang Urusan Pemerintah Daerah	Permasalahan	Isu
1	2	3	4
		-Minimnya produk olahan hasil perkebunan	dan daya saing komoditi perkebunan
28.	Kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Masih terdapat kawasan hutan yang dimanfaatkan tidak sesuai peruntukan</li> <li>-Masih banyak <i>illegal logging</i></li> <li>-Belum optimal rehabilitasi hutan dan lahan kritis</li> <li>-Belum optimal tataniaga Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu</li> <li>-Masih ada kawasan hutan yang dimanfaatkan untuk kegiatan yang tidak sesuai dengan peruntukan.</li> <li>-Masih banyak terjadi pembalakan liar.</li> <li>-Upaya rehabilitasi hutan dan lahan kritis belum optimal.</li> <li>-Tata niaga hasil hutan kayu dan bukan kayu belum optimal.</li> <li>-Jumlah tenaga pengaman hutan masih sangat kurang bila dibandingkan dengan luas kawasan hutan yang harus dipantau/diamankan.</li> <li>-Pelibatan masyarakat dalam upaya untuk menjaga kelestarian hutan belum optimal.</li> <li>-Perilaku membuka lahan dan pengelolaan lahan yang tidak ramah lingkungan.</li> <li>-Terbitnya UU 23 tahun 2014 yang tidak lagi memberikan kewenangan pengelolaan sektor kehutanan kepada pemerintah Kabupaten.</li> <li>-Luas tutupan vegetasi permanen cenderung mengalami penurunan setiap tahun.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Lahan kritis</li> <li>-Illegal logging</li> <li>-Degradasi lahan</li> <li>-Kewenangan daerah</li> </ul>

No	Bidang Urusan Pemerintah Daerah	Permasalahan	Isu
1	2	3	4
29.	Energi dan Sumber Daya Mineral	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Belum tersedianya data potensi sektor pertambangan dan energi secara lengkap untuk seluruh wilayah Kabupaten Sumbawa (mineral, batuan dan energi).</li> <li>-Masih ada desa/dusun yang belum terjangkau jaringan listrik.</li> <li>-Masih ada kegiatan-kegiatan pertambangan yang berpotensi merusak lingkungan (penambangan liar mineral maupun batuan).</li> <li>-Terbitnya UU 23 tahun 2014 yang tidak lagi memberikan kewenangan pengelolaan sektor kehutanan kepada pemerintah Kabupaten</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Rasio elektrifikasi EBT</li> <li>-Neraca energi</li> </ul>
30.	Perdagangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Belum adanya sentra perdagangan</li> <li>-Fasilitas pasar tradisional belum memadai</li> <li>-Kondisi dan manajemen pasar tradisional masih belum tertata rapi</li> <li>-Masih adanya praktek ijon</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Pasar rakyat</li> <li>-Fasilitas UMKM</li> <li>-Kapasitas SDM perdagangan</li> <li>-Fasilitas perdagangan</li> </ul>
31.	Perindustrian	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Kuranginya akses permodalan</li> <li>-Kemampuan produksi masih rendah</li> <li>-Pemanfaatan teknologi belum optimal</li> <li>-Sentra industri belum berbasis produk unggulan daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Daya saing produk IKM</li> </ul>
32.	Transmigrasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>-SDM rendah</li> <li>-Sarana prasarana belum memadai</li> <li>-Belum ada investor yang beminat di KTM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Sarana prasarana transmigrasi</li> </ul>
<b>D. Fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah</b>			
1.	Perencanaan Pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Masih rendahnya efektivitas proses pelaksanaan musrenbang</li> <li>-Kualitas partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan belum optimal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Reformasi birokrasi</li> </ul>

<b>No</b>	<b>Bidang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Permasalahan</b>	<b>Isu</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
		-Ketersedian data base untuk bahan perencanaan belum real time	
2.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah dan Kepegawaian	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Sistem informasi asset daerah belum terintegrasi</li> <li>-Pengelolaan informasi publik belum terintegrasi</li> <li>-Sistem perencanaan kebutuhan asset belum terintegrasi</li> <li>-Penataan OPD berdasarkan UU 23 tahun 2014 belum tuntas</li> <li>-Nilai akuntabilitas kinerja pemerintahan belum meningkat</li> <li>-Jumlah produk hukum daerah yang dihasilkan masih rendah</li> <li>-Dukungan fasilitasi kegiatan kegiatan dewan belum optimal</li> <li>-Proporsi PAD dalam pendapatan daerah masih rendah</li> <li>-Penerapan sistem ASB yang belum optimal</li> <li>-Masih adanya temuan-temuan yang berindikasi merugikan negara</li> <li>-Hasil audit kinerja dan perencanaan belum terintegrasi</li> <li>-Masih kurangnya tenaga auditor</li> <li>-Masih kurangnya diklat aparatur,</li> <li>-Masih belum terisinya jabatan fungsional perencana,</li> <li>-Belum adanya pelayanan terpadu satu pintu</li> <li>-Belum optimalnya pembinaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan desa</li> </ul>	-Reformasi birokrasi

Memperhatikan permasalahan-permasalahan pada tabel 4.1 yang menggambarkan beberapa isu antara lain kehidupan beragama dan bermasyarakat, infrastruktur wilayah, pelayanan publik, ketenagakerjaan, pendidikan dan kesehatan, serta memperhatikan hasil identifikasi isu-isu pada tabel 4.5, maka dirumuskan isu-isu strategis pembangunan daerah Kabupaten Sumbawa (2016-2021), sebagai berikut.

1. Kualitas sumberdaya manusia



2. Tata kelola pemerintahan
3. Infrastruktur wilayah
4. Potensi unggulan daerah dan produktivitas masyarakat
5. Pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup berkelanjutan
6. Kehidupan beragama dan bermasyarakat
7. Budaya dan kearifan lokal

Tujuh isu strategis tersebut secara umum dapat dijabarkan sebagai berikut.

1. Kualitas sumberdaya manusia dipandang penting untuk tetap ditingkatkan melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, karena selain bersifat mendasar dan diyakini memberikan dampak signifikan terhadap keberlanjutan pembangunan yang menentukan masa depan Kabupaten Sumbawa, juga karena kondisi aktual daya dukung baik sarana maupun prasarananya saat ini masih belum dapat memberikan akses dan layanan yang optimal;
2. Tata kelola pemerintahan tetap menjadi perhatian terutama terhadap restrukturisasi kelembagaan sesuai kewenangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pelaksanaan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan peningkatan pelayanan publik melalui penerapan standar pelayanan dan standar operasional prosedur yang efektif dan efisien, serta peningkatan kualitas sumberdaya/kompetensi ASN;
3. Peningkatan Infrastruktur wilayah memiliki peran penting dalam pembangunan daerah terutama dalam mendukung pembangunan sektor lainnya seperti pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, penataan ruang dan permukiman, pengentasan kemiskinan, serta pelestarian lingkungan hidup dan mitigasi bencana. Pentingnya meningkatkan daya dukung infrastruktur di Kabupaten Sumbawa juga terkait dengan topografi daratan Sumbawa yang berbukit dan bergunung, serta untuk membuka akses transportasi bagi kawasan potensial terisolir;
4. Potensi unggulan daerah dan produktivitas masyarakat menjadi penting dalam rangka meningkatkan nilai tambah dan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan produk unggulan daerah, mendorong tumbuhnya aktivitas usaha masyarakat dan realisasi investasi;
5. Pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup berkelanjutan menjadi penting terutama terkait dengan kecenderungan eksploitasi terhadap sumberdaya alam, pengrusakan lingkungan hutan dan lahan, kebersihan dan kesehatan, serta bahaya bencana yang senantiasa terkait langsung dengan ketidakseimbangan lingkungan hidup;
6. Kehidupan beragama dan bermasyarakat menjadi perhatian dalam upaya menjaga kehidupan sosial kemasyarakatan yang tenteram dan damai sebagai prasyarat utama dalam menciptakan kondusifitas penyelenggaraan pembangunan daerah. Hal tersebut perlu didukung oleh kehidupan keberagaman yang semakin baik, serta kesadaran akan pentingnya penegakan aturan main.
7. Budaya dan kearifan lokal perlu menjadi perhatian melalui pelestarian kebudayaan dan kepariwisataan daerah yang dapat memperkuat jati diri masyarakat, mengingat dampak negatif dari era globalisasi saat ini semakin tidak terkendalinya budaya-budaya luar yang dapat mengancam lemahnya jati diri masyarakat.

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk

melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral dan etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk melihat keterkaitan isu strategis RPJMN, RPJMD Provinsi NTB dan RPJMD Kabupaten Sumbawa, disajikan sebagai berikut.

**Tabel 4.6**  
**Keterkaitan Hubungan Isu Strategis**

No	Isu Strategis Daerah		
	RPJMN (2015-2019)	RPJMD NTB (2013-2018)	RPJMD Sumbawa (2016-2021)
1	2	3	4
1	Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh WN <b>(6; 7)</b>	1. Kualitas pendidikan, kesehatan dan masalah kesejahteraan sosial <b>(1)</b>	1. Kualitas sumberdaya manusia
2	Membangun tata kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya <b>(2)</b>	2. Partisipasi politik dan kamtibmas <b>(2; 6)</b>	2. Tata kelola pemerintahan
3	Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan <b>(3; 4; 5)</b>	3. Pelayanan publik dan kepastian hukum <b>(2)</b>	3. Infrastruktur wilayah
4	Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya. <b>(2; 6; 7)</b>	4. Jati diri daerah <b>(6; 7)</b>	4. Potensi unggulan daerah dan produktivitas masyarakat
5	Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia <b>(1)</b>	5. Iklim dan bencana alam <b>(5)</b>	5. Pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup berkelanjutan
6	Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional <b>(3; 4)</b>	6. Kerja sama dan konektivitas antar wilayah <b>(3)</b>	6. Kehidupan beragama dan bermasyarakat
7	Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik <b>(4;</b>	7. Daya saing produk lokal dan pengangguran <b>(4)</b>	7. Budaya dan kearifan lokal

No	Isu Strategis Daerah		
	RPJMN (2015-2019)	RPJMD NTB (2013-2018)	RPJMD Sumbawa (2016-2021)
1	2	3	4
	<b>5)</b>		
8	Melakukan revolusi karakter bangsa <b>(6; 7)</b>		
9	Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial <b>(6;7)</b>		

*Ket: Tanda ( ) yang sama berarti memiliki keterkaitan isu*

#### 4.4. Penelaahan RPJPD Kabupaten Sumbawa (2005-2025)

Visi RPJMD Kabupaten Sumbawa tidak terlepas dari koridor visi RPJPD Kabupaten Sumbawa (2005-2025) sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2010, yaitu **"Terwujudnya Kabupaten Sumbawa Sebagai Daerah Agribisnis Berdaya Saing Menuju Masyarakat Sejahtera"**, akan dilaksanakan melalui misi sebagai berikut.

1. Mewujudkan masyarakat beriman, berbudaya, rukun dan berkesadaran hukum.
2. Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan.
3. Mewujudkan daerah yang berdaya saing.
4. Mewujudkan daerah yang asri dan lestari.
5. Mewujudkan masyarakat yang maju dan sejahtera.

Pada dokumen RPJPD Tahun 2005-2025 telah ditentukan arah pembangunan pada tiap misi pembangunan sebagai berikut.

##### **1. Mewujudkan masyarakat beriman, berbudaya, rukun dan berkesadaran hukum.**

Melalui misi ini, diarahkan untuk pembangunan sosial keagamaan melalui, pembangunan kebudayaan, pembangunan kerukunan hidup masyarakat, dan pembangunan kesadaran hukum.

##### **2. Mewujudkan masyarakat yang maju dan sejahtera**

Melalui misi ini, diarahkan untuk pembangunan ketahanan pangan, pembangunan sandang dan perumahan, pembangunan ketenagakerjaan, pembangunan keluarga berencana dan kependudukan, pembangunan pendidikan, kesehatan, dan pembangunan kesejahteraan sosial.

##### **3. Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan**

Melalui misi ini, diarahkan untuk pembangunan wilayah, pembangunan kota dan desa, penanggulangan kemiskinan, dan pembangunan kesetaraan gender.

##### **4. Mewujudkan daerah yang berdaya-saing**

Melalui misi ini, diarahkan untuk pembangunan sumberdaya manusia, pembangunan perekonomian, profesionalisme aparatur, pengelolaan keuangan daerah, perhubungan dan komunikasi, pembangunan energi dan kelistrikan.

##### **5. Mewujudkan daerah yang asri dan lestari**

Melalui misi ini diarahkan untuk pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam terbarukan, pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam tidak terbarukan, pengelolaan keragaman sumberdaya hayati, mitigasi bencana, dan pembangunan kesadaran lingkungan.

Menelaah terhadap RPJPD Kabupaten Sumbawa Tahun 2005-2025, maka keterkaitan antara Misi RPJPD dengan Misi RPJMD Tahun 2016-2021 disajikan sebagaimana tabel berikut ini.

**Tabel 4.7.**  
**Keterkaitan antara Misi RPJPD Tahun 2005-2025 dan Misi RPJMD Tahun 2016-2021**

<b>No</b>	<b>RPJMD (2016-2021)</b>	<b>RPJPD Sumbawa</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat <b>(3)</b>	1. Mewujudkan masyarakat beriman, berbudaya, rukun dan berkesadaran hukum.
2	Mewujudkan birokrasi yang bersih, handal dan profesional sehingga mampu menjalankan pemerintahan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik ( <i>good governance</i> ) <b>(3)</b>	2. Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan.
3	Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur dengan membangun sinergi yang kuat dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi <b>(2;3)</b>	3. Mewujudkan daerah yang berdaya saing.
4	Mengembangkan potensi unggulan daerah dan meningkatkan produktivitas usaha masyarakat demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat, penurunan angka kemiskinan dan perluasan lapangan kerja <b>(3;5)</b>	4. Mewujudkan daerah yang asri dan lestari.
5	Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan <b>(3;4)</b>	5. Mewujudkan masyarakat yang maju dan sejahtera.
6	Mewujudkan masyarakat yang religius dan memelihara toleransi antar umat beragama <b>(1)</b>	
7	Memelihara dan mengembangkan potensi budaya dan kearifan lokal. <b>(1)</b>	

Mencermati keterkaitan Misi RPJPD Tahun 2005-2025 dengan Misi RPJMD Tahun 2016-2021, tergambar bahwa penekanan RPJMD Tahun 2016-2021 ini adalah pada upaya mewujudkan daerah yang berdaya saing yang ditandai dengan keterkaitan misi ke 3 RPJPD dengan lima misi yang ada pada RPJMD Tahun 2016-2021 yaitu misi ke-1 sampai dengan misi ke-5.

Arahan Prioritas Pembangunan Jangka Menengah Tahap ke-3 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2010 tentang RPJP Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2005-2025 ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan daerah secara menyeluruh dengan penekanan pada pengembangan proses produksi di sektor sekunder dan tersier yang didukung oleh basis-basis sektor primer daerah agribisnis yang semakin kokoh. Pada tahap ini mulai berkembangnya kawasan industri dan sektor jasa yang meningkatkan nilai tambah bagi perekonomian daerah. Pengembangan potensi agribisnis daerah telah memasuki fase kematangan yang ditandai

semakin berkembangnya proses produksi di sektor sekunder dan tersier yang didukung oleh basis-basis sektor primer yang semakin kokoh. Kawasan industri telah berkembang pesat dan semakin berkembang pada penciptaan nilai tambah melalui sektor perdagangan dan jasa-jasa lainnya. Produk-produk agribisnis Kabupaten Sumbawa telah memasuki pasar ekspor regional Asia Tenggara dan Timur Tengah. Pesatnya perkembangan kegiatan agribisnis telah ditunjang oleh ketersediaan infrastruktur pendukung terutama dalam hal komunikasi, informasi, perdagangan dan kelistrikan.

Mencermati arahan prioritas tersebut, maka Visi pembangunan Kabupaten Sumbawa tahun 2016-2021 yang tertuang dalam dokumen RPJMD ini telah sesuai (selaras) dengan arahan prioritas pembangunan tahap ketiga dalam RPJPD Kabupaten Sumbawa tahun 2005-2025. Keselarasan ini tergambar pada pokok visi "Daya Saing" yang dijabarkan lebih lanjut kedalam Misi ke-1 sampai dengan Misi ke-3 yaitu: 1) Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat; 2) Mewujudkan birokrasi yang bersih, handal dan profesional sehingga mampu menjalankan pemerintahan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*); dan 3) Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur dengan membangun sinergi yang kuat dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Keselarasan ini juga tergambar pada pokok visi "Mandiri" dengan penjabaran lebih lanjut pada misi ke-4 yaitu: Mengembangkan potensi unggulan daerah dan meningkatkan produktivitas usaha masyarakat demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat, penurunan angka kemiskinan dan perluasan lapangan kerja; dan misi ke-5 Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Kelima misi RPJMD ini menjadi pijakan penekanan pembangunan lima tahun kedepan sesuai dengan arahan prioritas pembangunan pada RPJPD Tahun 2005-2025.

#### 4.5. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa

Rencana struktur ruang Kabupaten Sumbawa sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa disajikan pada tabel berikut ini.

**Tabel 4.8**  
**Hasil Telaahan Struktur Ruang Kabupaten Sumbawa**

No	Rencana Struktur Ruang	Rencana Pentahapan Pemanfaatan Struktur Ruang sesuai RTRW					
		Arah pemanfaatan Ruang/Indikasi Program	Lokasi	Waktu pelaksanaan			
				Lima tahun ke-I	Lima tahun ke-II	Lima tahun ke-III	Lima tahun ke-IV
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Rencana pusat permukiman						
I.1	PKW Sumbawa Besar	§ Pengembangan pusat kegiatan perdagangan	Kec. Sumbawa, Unter iwes, Lab. Badas, Moyo Utara,	√	√	√	

No	Rencana Struktur Ruang	Rencana Pentahapan Pemanfaatan Struktur Ruang sesuai RTRW					
		Arah pemanfaatan Ruang/Indikasi Program	Lokasi	Waktu pelaksanaan			
				Lima tahun ke-I	Lima tahun ke-II	Lima tahun ke-III	Lima tahun ke-IV
1	2	3	4	5	6	7	8
		dan jasa skala grosir dan eceran / mall	Moyo Hilir				
		§ Pengembangan pusat pelayanan pemerintah tingkat kabupaten dan perwakilan provinsi/pusat		√	√	√	
		§ Pengembangan perkantoran swasta, BUMN dan BUMD serta perbankan		√	√	√	
		§ Pengembangan rumah sakit umum rujukan tipe B		√	√	√	
		§ Pengembangan fasilitas pendidikan lanjutan dan perguruan tinggi		√	√	√	
		§ Pengembangan kegiatan industri yang berorientasi pasar baik itu industri kecil, industri sedang dan industri besar (pengelohan hasil pertanian,		√	√	√	

No	Rencana Struktur Ruang	Rencana Pentahapan Pemanfaatan Struktur Ruang sesuai RTRW					
		Arah pemanfaatan Ruang/Indikasi Program	Lokasi	Waktu pelaksanaan			
				Lima tahun ke-I	Lima tahun ke-II	Lima tahun ke-III	Lima tahun ke-IV
1	2	3	4	5	6	7	8
		kerajinan rakyat)					
		§ Pengembangan sentra peternakan		√	√	√	
		§ Pengembangan perbankan nasional dan regional		√	√	√	
		§ Pengembangan kegiatan pariwisata dan sarana / prasarana penunjang-nya (seperti hotel, travel, penginapan dan restoran)		√	√	√	
		§ Pengembangan kegiatan pelabuhan pengumpan		√	√	√	
		§ Pengembangan kegiatan terminal tipe B		√			
		§ Pengembangan Bandar udara pengumpan Brang Biji			√		
I.2	PKL Alas	§ Pusat pengembangan pertanian (tanaman pangan, hortikultura,	Kec. Alas	√	√		

No	Rencana Struktur Ruang	Rencana Pentahapan Pemanfaatan Struktur Ruang sesuai RTRW					
		Arah pemanfaatan Ruang/Indikasi Program	Lokasi	Waktu pelaksanaan			
				Lima tahun ke-I	Lima tahun ke-II	Lima tahun ke-III	Lima tahun ke-IV
1	2	3	4	5	6	7	8
		perkebunan).					
		§ Pengembangan kawasan peternakan (mitra usaha)		√	√		
		§ Pengembangan budidaya perikanan darat dan laut.		√	√		
		§ Pengembangan pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam dan Batuan;		√	√		
		§ Pengembangan kegiatan industri (kerajinan rakyat, industri pengolahan hasil pertanian, hasil perkebunan, hasil tambang).		√	√		
		§ Pengembangan pariwisata		√	√		
		§ Pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa.		√			
I.3	PKL Empang	§ Pengembangan	Kec. Empang	√	√		



No	Rencana Struktur Ruang	Rencana Pentahapan Pemanfaatan Struktur Ruang sesuai RTRW					
		Arah pemanfaatan Ruang/Indikasi Program	Lokasi	Waktu pelaksanaan			
				Lima tahun ke-I	Lima tahun ke-II	Lima tahun ke-III	Lima tahun ke-IV
1	2	3	4	5	6	7	8
		n budidaya peternakan					
		§ Pengembangan pusat perikanan tangkap dan kegiatan nelayan.		√	√		
		§ Pengembangan kegiatan pasar induk regional dan lokal.		√	√		
		§ Pengembangan pariwisata		√	√		
		§ Pengembangan pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam dan Batuan;		√	√		
		§ Pengembangan kegiatan industri (kerajinan rakyat, industri pengolahan hasil ternak susu sapi, kerbau, kuda, home industry, pengolahan hasil pertanian dan industri pengolahan hasil perikanan).		√	√		

No	Rencana Struktur Ruang	Rencana Pentahapan Pemanfaatan Struktur Ruang sesuai RTRW					
		Arah pemanfaatan Ruang/Indikasi Program	Lokasi	Waktu pelaksanaan			
				Lima tahun ke-I	Lima tahun ke-II	Lima tahun ke-III	Lima tahun ke-IV
1	2	3	4	5	6	7	8
I.4	PKL Lenangguar	§ Pengembangan kegiatan pertanian (tanaman pangan, sayuran, hortikultura, dan perkebunan).	Kec. Lenangguar	√	√	√	√
		§ Pengembangan peternakan.		√	√	√	√
		§ Pengembangan kegiatan industri (kerajinan rakyat, industri pengolahan hasil ternak, industri pengolahan hasil pertanian, tambang dan hutan).		√	√	√	√
		§ Pengembangan Perbankan Nasional		√	√	√	√
		§ Pengembangan prasarana sumber daya air.		√	√	√	√
		§ Pengembangan prasarana sumber daya energi.		√	√	√	√
		§ Pembangunan Puskesmas			√		

No	Rencana Struktur Ruang	Rencana Pentahapan Pemanfaatan Struktur Ruang sesuai RTRW					
		Arah pemanfaatan Ruang/Indikasi Program	Lokasi	Waktu pelaksanaan			
				Lima tahun ke-I	Lima tahun ke-II	Lima tahun ke-III	Lima tahun ke-IV
1	2	3	4	5	6	7	8
		Rawat Inap/RSU Type C.					
		§ Pengembangan sarana olahraga skala Kabupaten.		√	√	√	√
		§ Pengembangan pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam dan Batuan;		√	√	√	
		§ Pengembangan terminal pengumpan agribisnis		√	√	√	√
I.5	PKL Labangka	§ Pengembangan kegiatan pertanian (tanaman pangan, sayuran, hortikultura, dan perkebunan).	Kec. Labangka	√	√	√	√
		§ Pusat pembangunan pelabuhan pendaratan ikan (TPI) di Pantai Labangka		√	√	√	√
		§ Pengembangan Perbankan Nasional		√	√	√	√

No	Rencana Struktur Ruang	Rencana Pentahapan Pemanfaatan Struktur Ruang sesuai RTRW					
		Arah pemanfaatan Ruang/Indikasi Program	Lokasi	Waktu pelaksanaan			
				Lima tahun ke-I	Lima tahun ke-II	Lima tahun ke-III	Lima tahun ke-IV
1	2	3	4	5	6	7	8
		§ Pengembangan kegiatan industri (home industri, pengolahan hasil pertanian, perikanan hasil laut, hasil perkebunan, hasil pertambangan mineral logam, mineral bukan logam dan batuan, serta kerajinan rakyat).		√	√	√	√
		§ Pengembangan prasarana sumber daya air.		√	√	√	√
		§ Pengembangan prasarana sumber daya energi.		√	√	√	√
		§ Pengembangan Kehutanan.		√	√	√	√
		§ Pusat Kesehatan Regional (Rumah Sakit Type C		√			
II.	Rencana jaringan transportasi						
II.1	Jaringan Jalan Kewenangan Kabupaten	§ penetapan jalan arteri primer meliputi jalan poros utama dari Alas Barat -	Kabupaten Sumbawa	√	√	√	√

No	Rencana Struktur Ruang	Rencana Pentahapan Pemanfaatan Struktur Ruang sesuai RTRW					
		Arah pemanfaatan Ruang/Indikasi Program	Lokasi	Waktu pelaksanaan			
				Lima tahun ke-I	Lima tahun ke-II	Lima tahun ke-III	Lima tahun ke-IV
1	2	3	4	5	6	7	8
		Alas - Buer - Utan - Rhee - Labuhan Badas - Sumbawa - Unter Iwes - Moyo Hilir - Lopok - Lape - Maronge - Plampang - Empang - Tarano.					
		§ penetapan jalan kolektor primer meliputi:	Kabupaten Sumbawa	√	√	√	√
		1. jaringan jalan yang melalui Kota Sumbawa - Kecamatan Moyo Utara - Kecamatan Moyo Hilir, dan jaringan jalan yang menghubungkan antara Kota Sumbawa - Kecamatan Moyo Hilir;					
		2. jaringan jalan yang menghubungkan antara Lunyuk - Ropang - Labangka - Plampang - Empang - Tarano;					
		3. jaringan jalan yang menghubungkan antara Lenangguar -					

No	Rencana Struktur Ruang	Rencana Pentahapan Pemanfaatan Struktur Ruang sesuai RTRW					
		Arah pemanfaatan Ruang/Indikasi Program	Lokasi	Waktu pelaksanaan			
				Lima tahun ke-I	Lima tahun ke-II	Lima tahun ke-III	Lima tahun ke-IV
1	2	3	4	5	6	7	8
		Orong Telu - Batu Lanteh - Sumbawa;					
		4. jaringan jalan yang menghubungkan antara Langam - Pungkit - Lantung - Ropang - Ranan; dan					
		5. jaringan jalan yang menghubungkan antara Jotang - Tero.					
		§ rencana pengembangan jalan lokal primer meliputi :	Kabupaten Sumbawa	√	√	√	√
		1. jaringan jalan yang menghubungkan Simpang Jalan Negara - jalan Labuan Teluk pada Kecamatan Utan;					
		2. jalan yang menghubungkan jalan Marenteh - jalan Trupa - jalan Mate Mega pada Kecamatan Alas;					
		3. jalan yang menghubungkan jalan Propok pada					

No	Rencana Struktur Ruang	Rencana Pentahapan Pemanfaatan Struktur Ruang sesuai RTRW					
		Arah pemanfaatan Ruang/Indikasi Program	Lokasi	Waktu pelaksanaan			
				Lima tahun ke-I	Lima tahun ke-II	Lima tahun ke-III	Lima tahun ke-IV
1	2	3	4	5	6	7	8
		<p>Kecamatan Buer - jalan Batu Soan pada Kecamatan Alas;</p> <p>4. jalan yang menghubungkan jalan Olat Rawa - jalan Tanjung Bele pada Kecamatan Moyo Hilir;</p> <p>5. jalan yang menghubungkan Jalan Sengkal - jalan Malili - jalan Lengas - jalan Sameri pada Kecamatan Moyo Hilir;</p> <p>6. jalan yang menghubungkan jalan Ai Beling - jalan Kuang Amo pada Kecamatan Moyo Hulu;</p> <p>7. jalan yang menghubungkan jalan Lito - jalan Bage Loka pada Kecamatan Moyo Hulu;</p> <p>8. jalan yang menghubungkan Simpang Jalan Negara - jalan Labuan Ala pada</p>					

No	Rencana Struktur Ruang	Rencana Pentahapan Pemanfaatan Struktur Ruang sesuai RTRW					
		Arah pemanfaatan Ruang/Indikasi Program	Lokasi	Waktu pelaksanaan			
				Lima tahun ke-I	Lima tahun ke-II	Lima tahun ke-III	Lima tahun ke-IV
1	2	3	4	5	6	7	8
		<p>Kecamatan Plampang;</p> <p>9. jalan yang menghubungkan jalan Sepayung Dalam - jalan Buin Rare pada Kecamatan Plampang;</p> <p>10. jalan yang menghubungkan jalan Ropang - jalan Lebin pada Kecamatan Ropang;</p> <p>11. jalan yang menghubungkan jalan Ropang - jalan Lawin pada Kecamatan Ropang;</p> <p>12. jalan yang menghubungkan jalan Klawis - jalan Koppo pada Kecamatan Orong Telu;</p> <p>13. jalan yang menghubungkan jalan Koppo - jalan Jamu - jalan Krida - Talonang pada Kecamatan Lunyuk;</p> <p>14. jalan yang menghubungkan jalan Suka Maju - jalan Suka Jaya</p>					



No	Rencana Struktur Ruang	Rencana Pentahapan Pemanfaatan Struktur Ruang sesuai RTRW					
		Arah pemanfaatan Ruang/Indikasi Program	Lokasi	Waktu pelaksanaan			
				Lima tahun ke-I	Lima tahun ke-II	Lima tahun ke-III	Lima tahun ke-IV
1	2	3	4	5	6	7	8
		pada Kecamatan Lunyuk; dan					
		15. jalan yang menghubungkan jalan Kaduk - jalan Batu Rotok pada Kecamatan Batu Lanteh.					
		§ penetapan jalan arteri sekunder meliputi jalan Lingkar Selatan dan Lingkar Utara Sumbawa Besar, jalan pantai yang menghubungkan Sumbawa Besar dengan Moyo Utara	Kabupaten Sumbawa	√	√	√	√
		§ rencana pengembangan jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembangkan di Sumbawa Besar, Moyo Utara, Moyo Hilir, Unter Iwes, Alas, Empang, Labangka, Lenangguar, dan Labuhan Badas	Kabupaten Sumbawa	√	√	√	√
		§ penetapan jalan lokal	Kabupaten	√	√	√	√

No	Rencana Struktur Ruang	Rencana Pentahapan Pemanfaatan Struktur Ruang sesuai RTRW					
		Arah pemanfaatan Ruang/Indikasi Program	Lokasi	Waktu pelaksanaan			
				Lima tahun ke-I	Lima tahun ke-II	Lima tahun ke-III	Lima tahun ke-IV
1	2	3	4	5	6	7	8
		sekunder meliputi jalan di seluruh permukiman di wilayah kabupaten	Sumbawa				
II.2	Jaringan prasarana lalu lintas	§ Terminal Sumer Payung sebagai Terminal Tipe B yang berada pada jalur transportasi nasional	Kec. Lab. Badas	√	√	√	√
		§ relokasi dan pengembangan Terminal Alas sebagai Terminal Tipe C yang berada pada jalur transportasi nasional dan simpul kawasan agropolitan, relokasi terminal Brang Bara untuk melayani kecamatan Batu Lanteh, dan relokasi Terminal Empang dan Plampang sebagai Terminal Tipe C yang berada pada jalur transportasi nasional dan merupakan Simpul Kawasan	Kec. Sumbawa, Kec. Empang, Kec. Plampang	√	√	√	√

No	Rencana Struktur Ruang	Rencana Pentahapan Pemanfaatan Struktur Ruang sesuai RTRW					
		Arah pemanfaatan Ruang/Indikasi Program	Lokasi	Waktu pelaksanaan			
				Lima tahun ke-I	Lima tahun ke-II	Lima tahun ke-III	Lima tahun ke-IV
1	2	3	4	5	6	7	8
		Emparano					
		§ pembangunan Terminal Tipe C, yaitu Terminal Lenangguar, Terminal Lunyuk, Terminal Langam, Terminal Utan, Terminal Moyo yang melayani Kecamatan Moyo Utara, Kecamatan Moyo Hilir, Kecamatan Moyo Hulu dan sekitarnya, Terminal Maci dan Terminal Labangka yang melayani simpul kawasan Kota Terpadu Mandiri Labangka	Kec. Lenangguar < lunyuk, Utan, Moyo Utara, Moyo Hilir, Moyo Hulu, Labangka	√	√	√	√
		§ peningkatan infrastruktur pendukung dan pelayanan terminal yang memadai pada terminal yang sudah ada	Kec. Alas, Sumbawa, Empang, Plampang	√	√	√	√
II.3	Jaringan layanan lalu lintas	§ pengembangan angkutan umum yang	Kab. Sumbawa	√	√	√	√

No	Rencana Struktur Ruang	Rencana Pentahapan Pemanfaatan Struktur Ruang sesuai RTRW					
		Arah pemanfaatan Ruang/Indikasi Program	Lokasi	Waktu pelaksanaan			
				Lima tahun ke-I	Lima tahun ke-II	Lima tahun ke-III	Lima tahun ke-IV
1	2	3	4	5	6	7	8
		<p>dapat menjangkau daerah-daerah:</p> <p>a. jalur angkutan dengan rute melalui Kecamatan Alas Barat - Alas - Buer - Utan - Rhee - Labuhan Badas - Sumbawa;</p> <p>b. jalur angkutan dengan rute melalui Kecamatan Tarano - Empang - Plampang - Meronge - Lape - Lopok - Unter Iwes - Sumbawa;</p> <p>c. jalur angkutan dengan rute melalui Kecamatan Sumbawa - Moyo Hilir - Moyo Utara</p> <p>d. jalur angkutan dengan rute melalui Kecamatan Labangka - Plampang - Sumbawa;</p> <p>e. jalur angkutan</p>					

No	Rencana Struktur Ruang	Rencana Pentahapan Pemanfaatan Struktur Ruang sesuai RTRW					
		Arah pemanfaatan Ruang/Indikasi Program	Lokasi	Waktu pelaksanaan			
				Lima tahun ke-I	Lima tahun ke-II	Lima tahun ke-III	Lima tahun ke-IV
1	2	3	4	5	6	7	8
		dengan rute melalui Kecamatan Sumbawa - Moyo Hulu - Lenangguar - Lunyuk;					
		f. jalur angkutan dengan rute melalui Kecamatan Labangka - Ropang - Lunyuk - Sumbawa;					
		g. jalur angkutan dengan rute melalui Kecamatan Sumbawa - Unter Iwes - Batu Lanteh - Orong Telu - Lunyuk; dan					
		h. jalur angkutan dengan rute melalui Kecamatan Sumbawa - Jotang - Maci.					
III.	Rencana jaringan energi						
III. 1	pengembangan sistem jaringan energi listrik	§ gardu induk di Labuhan Badas;	Kabupaten Sumbawa	√			
		§ gardu pembagi di Alas, Sumbawa Besar, Empang, dan Labangka;	Kec, empang, Kec. Alas, Sumbawa, empang,, labngja		√	√	√

No	Rencana Struktur Ruang	Rencana Pentahapan Pemanfaatan Struktur Ruang sesuai RTRW					
		Arah pemanfaatan Ruang/Indikasi Program	Lokasi	Waktu pelaksanaan			
				Lima tahun ke-I	Lima tahun ke-II	Lima tahun ke-III	Lima tahun ke-IV
1	2	3	4	5	6	7	8
		§ Jaringan transmisi tegangan tinggi di SUTT Badas - PLTD Labuhan Sumbawa, SUTT Maronge - PLTD Labuhan Sumbawa, SUTT Brang Beh - PLTD Labuhan Sumbawa dan SUTT PLTD Labuhan Sumbawa - Tano; dan	Kec. Lab. Badas, Maronge	√	√	√	√
		§ Jaringan distribusi tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Sumbawa.	Kab. Sumbawa	√	√	√	√
III. 2	pengembangan energi alternatif	§ energi listrik tenaga air di Sungai Brang Beh, Sungai Brang Ode Alas (Marenteh), Bendungan Batu Bulan Moyo Hulu, Bendungan Mamak Lopok, Bendungan Tiu Kulit Plampang, dan Bendungan Gapit Empang	Kec. Lunyuk, alas, moyo hulu, lopok, plampang, empang	√	√	√	√

No	Rencana Struktur Ruang	Rencana Pentahapan Pemanfaatan Struktur Ruang sesuai RTRW					
		Arah pemanfaatan Ruang/Indikasi Program	Lokasi	Waktu pelaksanaan			
				Lima tahun ke-I	Lima tahun ke-II	Lima tahun ke-III	Lima tahun ke-IV
1	2	3	4	5	6	7	8
		§ energi tenaga bayu di Kecamatan Labuhan Badas, Kecamatan Labangka, Kecamatan Lunyuk, Kecamatan Alas Barat, Kecamatan Empang, Kecamatan Plampang, Kecamatan Lape dan Kecamatan Lopok	Kec. Lab. Badas, labangka, lunyuk empangm plampang, lape, lopok	√	√	√	√
		§ energi panas bumi di Kecamatan Maronge	Kec. Maronge	√	√	√	√
		§ energi tenaga mikrohidro di Desa Batu Rotok dan Desa Tepal Kecamatan Batu Lanteh, dan di Desa Marente Kecamatan Alas	Kec. Batulanteh,,Alas	√	√	√	√
		§ energi tenaga surya diprioritaskan pada daerah terisolir	Kec. Batulanteh, orong telu, Tarano	√	√	√	√
		§ energi biogas diprioritaskan pada daerah unggulan	Kec. Moyo Hilir	√	√	√	√

No	Rencana Struktur Ruang	Rencana Pentahapan Pemanfaatan Struktur Ruang sesuai RTRW					
		Arah pemanfaatan Ruang/Indikasi Program	Lokasi	Waktu pelaksanaan			
				Lima tahun ke-I	Lima tahun ke-II	Lima tahun ke-III	Lima tahun ke-IV
1	2	3	4	5	6	7	8
		pertanian dan peternakan					
IV.	Rencana jaringan telekomunikasi						
IV.1	Sistem jaringan telekomunikasi	§ pengembangan prasarana telekomunikasi meliputi telepon residen, telepon umum dengan penggunaan serat optik di Kabupaten	Kabupaten Sumbawa	√	√	√	√
		§ pengembangan teresterial serta Stasiun Transmisi Otomatis di setiap kecamatan	Kabupaten Sumbawa	√	√	√	√
		§ penyediaan tower Base Transceiver Station (BTS) bersama untuk menjangkau ke pelosok perdesaan sebagai prasarana pendukung	Kabupaten Sumbawa	√	√	√	√
V.	Rencana sistem jaringan sumber daya air						
V.1	Wilayah Sungai	Pengembangan sistem jaringan sumber daya air di Wilayah Sungai Sumbawa dengan prioritas pada DAS Prioritas/DAS Strategis	Kabupaten Sumbawa	√	√	√	√



No	Rencana Struktur Ruang	Rencana Pentahapan Pemanfaatan Struktur Ruang sesuai RTRW					
		Arah pemanfaatan Ruang/Indikasi Program	Lokasi	Waktu pelaksanaan			
				Lima tahun ke-I	Lima tahun ke-II	Lima tahun ke-III	Lima tahun ke-IV
1	2	3	4	5	6	7	8
	Cekungan Air Tanah	Pengembangan sistem jaringan sumber daya air di CAT Sumbawa dan CAT Empang	Kec. Sumbawa, empang	√	√	√	√
	Jaringan Irigasi	Revitalisasi dan Pengembangan Jaringan irigasi kewenangan kabupaten	Kab. Sumbawa	√	√	√	√
	Jaringan Air Baku	Pengembangan jaringan air baku untuk air bersih/minum dengan memanfaatkan bending/embung	Kab. Sumbawa				

*Sumber:RTRW Kabupaten Sumbawa Tahun 2011-2031*

Rencana pola ruang wilayah kabupaten merupakan rencana distribusi peruntukan ruang dalam wilayah kabupaten yang meliputi rencana peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan rencana peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. Di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2012, Hasil Telaahan Pola Ruang Kabupaten Sumbawa disajikan pada tabel berikut ini.

**Tabel 4.9**  
**Hasil Telaahan Pola Ruang Kabupaten Sumbawa**

No	Rencana Pola Ruang	Rencana Pentahapan Pemanfaatan Pola Ruang sesuai RTRW					
		Arah pemanfaatan Ruang/Indikasi Program	lokasi	Waktu pelaksanaan			
				lima tahun ke-I	lima tahun ke-II	lima tahun ke-III	lima tahun ke-IV
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Rencana kawasan lindung						
I.1	Kawasan Hutan Lindung	Mempertahankan luas kawasan	Kec. Empang, Plampang, Tarano, Ropang, Lenaguar, Maronge, Labangka, Orong Telu, Batu lanteh, Alas, Buer, Utan, Rhe,, Moyo Hulu, Lape, Lopok, Lab. Badas	√	√		
I.2	Kawasan Perlindungan Setempat	Mempertahankan luas kawasan	Kec. Utan, Rhee, Batu Lanteh, Ropang, Lenanguar, Lunyuk, Orong telu, Lape, Lopok, Mooyo Hulu, Maronge, Lab. Badas, Moyo Hilir, tarano,, empang, labangka, plampang, unte r iwes, buer, Alas, Alas barat	√	√	√	√
I.3	kawasan suaka alam, pelestarian alam, taman buru, perlindungan esensial ekosistem	Mempertahankan luas kawasan	Kec. Lab. Badas, Batu lanteh, Lunyuk, Lape, Plampang	√	√ (khusus cagar budaya)	√ (khusus cagar budaya)	√ (khusus cagar budaya)

No	Rencana Pola Ruang	Rencana Pentahapan Pemanfaatan Pola Ruang sesuai RTRW					
		Arah pemanfaatan Ruang/Indikasi Program	lokasi	Waktu pelaksanaan			
				lima tahun ke-I	lima tahun ke-II	lima tahun ke-III	lima tahun ke-IV
1	2	3	4	5	6	7	8
	dan cagar budaya						
I.4	Kawasan Lindung Geologi	Mempertahankan luas kawasan	Kec. Sumbawa, Kec. Moyo Hilir, Kec. Moyo Utara, Kec. Lunyuk, Rhee, Alas barat, Buer, Lab. Badas, unter iwes, plampang, ropang, lape, lopok, alas, empang	√	√	√	√
II.	Rencana kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis						
II. 1	KSK Kota Samawa Rea	Pengembangan sektor unggulan perdagangan, jasa dan industry	Kec. Sumbawa, lab. Badas, unter iwes, moyo utara, mooyo hilir	√	√	√	√
II. 2	KSK KTM Labangka	Pengembangan sektor unggulan pertanian, peternakan dan industry	Kec. Plampang, maronge	√	√	√	√
II. 3	KSK Agropolitan Emparano	Pengembangan sektor unggulan pertanian, peternakan, kelautan dan perikanan serta pariwisata	Kec. Empang, tarano	√	√	√	√
II. 4	KSK Agropolitan Sumbawa Selatan	Pengembangan sektor unggulan perdagangan dan jasa, industri, pertanian, perkebunan, peternakan,	Kec. Batulanteh, lenanguar, moyo hulu	√	√	√	√

No	Rencana Pola Ruang	Rencana Pentahapan Pemanfaatan Pola Ruang sesuai RTRW					
		Arah pemanfaatan Ruang/Indikasi Program	lokasi	Waktu pelaksanaan			
				lima tahun ke-I	lima tahun ke-II	lima tahun ke-III	lima tahun ke-IV
1	2	3	4	5	6	7	8
		kelautan dan perikanan, pertambangan dan pariwisata					
II. 5	KSK Sili Maci Panubu	Pengembangan sektor unggulan pariwisata	Kec. Tarano	√	√	√	√

Sumber: RTRW Kabupaten Sumbawa Tahun 2011-2031

Rancangan Implementasi RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2016-2021 terhadap Arahan RTRW Kabupaten Sumbawa Tahun 2011-2031 disajikan pada tabel berikut ini.

**Tabel 4.10**  
**Rancangan Implementasi RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2016-2021 terhadap Arahan RTRW Kabupaten Sumbawa Tahun 2011-2031**

RTRW KABUPATEN SUMBAWA 2011-2031		RANCANGAN RPJMD KABUPATEN SUMBAWA	
A	INDIKASI PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG TAHAP KEDUA (2016-2021)	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN
a	peningkatan fungsi pusat-pusat kegiatan pertanian, perikanan, perdagangan dan jasa, pariwisata, transportasi, industri dan pemerintahan	Terbangunnya ekowisata berbasis komunitas sesuai potensi kawasan	Pokdarwis dan Pemerintah desa
		Tersedianya Prasarana perdagangan yang memadai	Pasar Induk dan Pasar tradisional
		Tersedianya sarana dan prasarana UMKM yang memadai	Lapak/outlet pemasaran PKL
		Tersalurnya pangan secara merata	Desa Rawan pangan
		Tercegah semakin banyaknya sertifikat ganda dan yang tidak memiliki sertifikat	Kawasan potensial
		Terwujudnya masyarakat yang	Masyarakat perkotaan

<b>RTRW KABUPATEN SUMBAWA 2011-2031</b>		<b>RANCANGAN RPJMD KABUPATEN SUMBAWA</b>	
		sadar tata ruang	
		Terkendalinya pemanfaatan ruang sesuai peraturan	Wilayah perkotaan
		Tersedianya sarana dan prasarana kesehatan yang memadai sesuai standar	Rumah sakit umum daerah, Puskesmas dan Jaringannya
b	pengembangan dan pemantapan jaringan transportasi meliputi jalan arteri sekunder, kolektor primer, kolektor sekunder, lokal primer dan lokal sekunder, terminal, pelabuhan ikan, TPI, pelabuhan pengumpan orang dan barang dan bandar udara	Tersedianya sarana dan prasarana perhubungan yang sesuai standar keselamatan	Sarana prasarana perhubungan darat
		Tersedianya infrastruktur jalan yang mantap	Wilayah potensial terisolir ruas yang belum mantap dan kritis
		Tersedianya Sarana produksi perikanan yang tepat (waktu, jenis, jumlah, kualitas, dosis)	Perikanan Budidaya dan Perikanan Tangkap
c	pengembangan jaringan telekomunikasi meliputi jaringan tetap dan bergerak	Terfasilitasinya penyediaan sarana dan prasarana komunikasi yang memadai	Dana Universal Service Obligation (USO) Kemenkominfo
d	pengembangan jaringan energi listrik meliputi pembangkit tenaga listrik, gardu Induk, dan jaringan transmisi.	-	-
e	pengembangan jaringan sumber daya air, dan jaringan sungai	Tersedianya infrastruktur air baku yang sesuai kebutuhan	Bendung, bendungan, embung, di wilayah kritis
		Tercegah semakin meluasnya abrasi pesisir pantai	Pesisir pantai dengan komoditas tanaman bakau, Tanggul Pengaman Pantai
f	pengembangan jaringan air minum perpipaan dan/atau bukan jaringan perpipaan	Tersedianya sistem layanan air minum yang memadai	Daerah rawan air
g	pengembangan dan pemantapan jaringan drainase makro dan mikro	Tersedianya sarana prasarana lingkungan yang memadai	Pemukiman kumuh

<b>RTRW KABUPATEN SUMBAWA 2011-2031</b>		<b>RANCANGAN RPJMD KABUPATEN SUMBAWA</b>	
	h pemantapan persampahan TPS, TPST dan TPA	Tersedianya sarana dan prasarana penyehatan lingkungan yang memadai	sarana persampahan, TPS, TPA
		Tersedianya tenaga kebersihan lingkungan yang terampil	Tenaga Persampahan
<b>B INDIKASI PERWUJUDAN POLA RUANG TAHAP KEDUA (2016-2021)</b>			
a	pengembangan kawasan peruntukan bandar udara, pusat pemerintahan, industri, pertanian, pariwisata, perdagangan dan jasa, dan perumahan	Tersedianya lahan transmigrasi yang layak huni	Wilayah yang jarang penduduk dan potensial
		Tersusunnya rencana pembangunan kawasan pedesaan yang sesuai potensi	Kawasan pertanian, perikanan, wisata
		Tersedianya sarana prasarana pedesaan yang memadai	Sarpras perekonomian, sosial dasar dan pemerintahan
		Tersedianya Sarana produksi pertanian yang tepat (waktu, jenis, jumlah, kualitas, dosis)	Sarana produksi untuk Komoditas Tanaman Pangan, Hortikultura, Peternakan dan Perkebunan
		Tersedianya Prasarana Pertanian yang memadai	Prasarana penunjang usaha tani
		Tersedianya Prasarana perdagangan yang memadai	Pasar Induk dan Pasar tradisional
		Tersedianya sarana prasarana pendukung pariwisata yang memadai	Kawasan wisata alam dan budaya
b	pemantapan fungsi-fungsi lindung pada kawasan lindung yang terdiri dari: kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, perlindungan setempat, cagar budaya, rawan bencana alam, lindung geologi, dan lindung lainnya	Tersedianya rencana pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkualitas	Kawasan konservasi

<b>RTRW KABUPATEN SUMBAWA 2011-2031</b>		<b>RANCANGAN RPJMD KABUPATEN SUMBAWA</b>	
c	penyusunan rencana rinci dan pengembangan kawasan strategis dengan fungsi ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan	Tersedianya dokumen tata ruang sesuai peraturan	Kawasan strategis kabupaten

#### **4.6. Telaahan RTRW Kabupaten Sumbawa Barat dan Kabupaten Dompu**

Dalam rangka terwujudnya keselarasan implementasi pemanfaatan ruang antara Pemerintah Kabupaten Sumbawa dengan kabupaten yang berbatasan yaitu Kabupaten Sumbawa Barat dan Kabupaten Dompu perlu dilakukan penelaahan dan harmonisasi kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang yang termuat dalam dokumen RTRW Kabupaten Sumbawa Barat dan Kabupaten Dompu.

Dalam dokumen RTRW Kabupaten Sumbawa Barat, kawasan yang relevan dalam kaitannya dengan arahan pemanfaatan ruang Kabupaten Sumbawa adalah kawasan puncak ngengas seluas 8.062,52 hektar yang merupakan kawasan hutan lindung dalam Pola Ruang Kabupaten Sumbawa Barat. Kawasan tersebut berintegrasi dengan kawasan puncak ngengas selalu legini di wilayah Kabupaten Sumbawa yang merupakan kawasan cagar alam geologi dalam Pola Ruang Kabupaten Sumbawa. Adapun terkait struktur ruang, PKWp Taliwang akan berinteraksi dengan PKW Sumbawa Besar dengan sistem jaringan prasarana utama berupa jaringan jalan nasional yang menghubungkan Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat. Pelabuhan penyeberangan Poto Tano di Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat mempunyai arti strategis bagi Kabupaten Sumbawa dalam kaitannya dengan konektivitas PKW Sumbawa Besar dengan PKN Mataram sebagai ibukota Provinsi NTB. Adapun terkait dengan Kabupaten Dompu, KSK Sili Maci Panubu yang berada di Kabupaten Sumbawa punya keterkaitan erat dengan kawasan pantai Lakey yang merupakan Kawasan Peruntukan Pariwisata di dalam RTRW Kabupaten Dompu.

## **BAB V**

### **VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN**

#### **5.1 Visi**

Visi merupakan pernyataan cita-cita atau impian mengenai kondisi yang ingin dicapai di masa depan. Kondisi yang dicita-citakan atau diimpikan tersebut adalah kondisi yang melalui berbagai usaha pembangunan di akhir periode 2016-2021 dapat diukur capaiannya. Usaha-usaha pembangunan yang dilaksanakan, umumnya berorientasi untuk memperbaiki taraf hidup masyarakat. Hal ini dapat terefleksi pada perubahan paradigma dan kondisi pembangunan yang diharapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

##### **5.1.1 Visi Nasional**

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2014-2019 telah ditetapkan bahwa visi pembangunan nasional 2014-2019 yaitu **“Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”**. Upaya untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan misi pembangunan nasional, yaitu:

1. *Mewujudkan* keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. *Mewujudkan* masyarakat maju, berkeadilan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. *Mewujudkan* politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. *Mewujudkan* kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5. *Mewujudkan* bangsa yang berdayasaing.
6. *Mewujudkan* Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. *Mewujudkan* masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas dalam pemerintahan ke depan. Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWA CITA.

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
2. Membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.



6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhinneka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

### 5.1.2 Visi Provinsi Nusa Tenggara Barat

Visi pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2018, adalah: "**Mewujudkan Masyarakat Nusa Tenggara Barat Yang Beriman, Berbudaya, Berdayasaing dan Sejahtera**". Misi yang diusung dalam rangka mewujudkan visi tersebut adalah:

1. Mempercepat perwujudan masyarakat yang berkarakter.
2. Mengembangkan budaya dan kearifan lokal.
3. Melanjutkan ikhtiar reformasi birokrasi yang bersih dan melayani, penegakan hukum yang berkeadilan, dan memantapkan stabilitas keamanan.
4. Meningkatkan mutu sumberdaya manusia yang berdayasaing.
5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempercepat penurunan kemiskinan, dan mengembangkan keunggulan daerah.
6. Melanjutkan percepatan pembangunan infrastruktur dan konektivitas wilayah berbasis tata ruang.
7. Memantapkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

### 5.1.3 Visi Kabupaten Sumbawa 2016-2021

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan, peluang dan keterbatasan yang ada di Kabupaten Sumbawa serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat dan dengan Ridho Allah SWT, maka visi Bupati **H. M. Husni Djibril, B.Sc.** dan **Wakil Bupati Drs. H. Mahmud Abdullah** dalam tahapan ketiga Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumbawa yang kemudian menjadi visi pembangunan Kabupaten Sumbawa Tahun 2016-2021, adalah:

**"Terwujudnya Masyarakat Sumbawa Yang Berdaya Saing, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Semangat Gotong Royong".**

Dalam rumusan visi Kabupaten Sumbawa 2016-2021 tersebut terdapat lima kalimat kunci (*Key Word*) sebagai pokok-pokok visi yang menjiwai seluruh rumusan visi tersebut, yaitu **Masyarakat Sumbawa, Berdaya Saing, Mandiri, Berkepribadian, dan Gotong Royong**. Penjelasan masing-masing pokok visi dapat disajikan pada tabel berikut.

Makna yang terkandung di dalam pernyataan Visi tersebut, adalah sebagai berikut.

1. **Berdaya Saing**, ditandai dengan adanya sumberdaya manusia yang berkualitas, birokrasi yang bersih, handal dan profesional serta dukungan infrastruktur yang memadai. Berdaya Saing adalah kondisi yang menjadi syarat terwujudnya kedaulatan suatu bangsa sesuai dengan semangat Tri Sakti yang menjadi rujukan utama penyusunan visi dan misi pembangunan nasional. Di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Nusa Tenggara Barat 2013-2018 telah

- disebutkan bahwa masyarakat berdaya saing adalah masyarakat yang sehat, cerdas, produktif, inovatif, kreatif agar mampu bersaing secara global. Selanjutnya, visi masyarakat berdaya saing di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sumbawa 2011-2016 diartikan sebagai Kemampuan pengelolaan sumberdaya daerah secara bermutu, ekonomis, efektif dan efisien, sehingga lebih unggul dari daerah lainnya. Berdaya saing juga mengandung makna kemampuan untuk berprestasi dalam bidang kerja masing- masing, dengan kualifikasi atau kualitas tertentu, sehingga dapat sejajar atau bahkan lebih tinggi dengan daerah lain.
2. **Mandiri**, artinya masyarakat Kabupaten Sumbawa yang mampu memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi, sosial dan berkeadilan. Di samping itu, mandiri juga diartikan sebagai kondisi dimana Pemerintah Daerah mampu mengelola potensi sumberdaya alam dan meningkatkan pendapatan daerah yang dipergunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.
  3. **Berkepribadian**, artinya masyarakat Kabupaten Sumbawa benar-benar memahami dan melaksanakan prinsip hidup (*parenti*) *Tau Samawa* yakni *takit ke nene kangila boat lenge*. Prinsip hidup ini ditandai dengan terwujudnya masyarakat yang religius, patuh kepada hukum dan penuh toleransi terhadap keberagaman.

**Tabel 5.1**  
**Perumusan Penjelasan Visi**

<b>Visi</b>	<b>Pokok Visi</b>		<b>Penjelasan Visi</b>
<b>1</b>	<b>2</b>		<b>3</b>
Terwujudnya Masyarakat Sumbawa Yang Berdaya Saing, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Semangat Gotong Royong	1	Masyarakat Sumbawa	Masyarakat Sumbawa secara sosiologis memiliki pengertian kumpulan orang per orang dengan beragam latar belakang suku, ras dan agama yang bertempat tinggal pada wilayah administrasi Kabupaten Sumbawa Provinsi NTB
	2	Berdaya Saing	Berdaya saing, ditandai dengan adanya sumberdaya manusia yang berkualitas, birokrasi yang bersih, handal dan profesional serta dukungan infrastruktur yang memadai. Berdaya Saing adalah kondisi yang menjadi syarat terwujudnya kedaulatan suatu bangsa sesuai dengan semangat Tri Sakti yang menjadi rujukan utama penyusunan visi dan misi pembangunan nasional. Di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Nusa Tenggara Barat 2013-2018 disebutkan bahwa masyarakat berdaya saing adalah masyarakat yang sehat, cerdas,

<b>Visi</b>	<b>Pokok Visi</b>	<b>Penjelasan Visi</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
		produktif, inovatif, kreatif agar mampu bersaing secara global. Selanjutnya, visi masyarakat berdaya saing di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sumbawa 2011-2016 diartikan sebagai Kemampuan pengelolaan Sumberdaya Daerah secara bermutu, ekonomis, efektif dan efisien, sehingga lebih unggul dari daerah lainnya. Berdaya saing juga mengandung makna kemampuan untuk berprestasi dalam bidang kerja masing-masing, dengan kualifikasi atau kualitas tertentu, sehingga dapat sejajar atau bahkan lebih tinggi dengan daerah lain.
	3 Mandiri	Mandiri, artinya masyarakat Kabupaten Sumbawa yang mampu memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi, sosial dan berkeadilan. Mandiri juga diartikan sebagai kondisi dimana Pemerintah Daerah mampu mengelola potensi sumberdaya alam dan meningkatkan pendapatan daerah yang dipergunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.
	4 Berpkribadian	Berkepribadian, artinya masyarakat Kabupaten Sumbawa benar-benar memahami dan melaksanakan prinsip hidup ( <i>parenti</i> ) <i>Tau Samawa</i> yakni <i>takit ke nene kangila boat lenge</i> . Prinsip hidup ini ditandai dengan terwujudnya masyarakat yang religius, patuh kepada hukum dan penuh toleransi terhadap keberagaman.
	5 Semangat Gotong Royong	Semangat gotong royong merupakan landasan dalam rangka mewujudkan masyarakat sumbawa yang berdaya Saing, mandiri dan berkepribadian.

## 5.2 Misi

Misi dalam RPJMD ini dirumuskan dengan pernyataan kongkrit sebagai upaya yang hendak dikerjakan dalam mewujudkan Visi. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan pembangunan yang hendak dicapai. Oleh karena itu, untuk mewujudkan visi Kabupaten Sumbawa Tahun 2016-2021, akan ditempuh melalui tujuh misi pembangunan daerah, sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
2. Mewujudkan birokrasi yang bersih, handal dan profesional sehingga mampu menjalankan pemerintahan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*).
3. Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur dengan membangun sinergi yang kuat dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.
4. Mengembangkan potensi unggulan daerah dan meningkatkan produktivitas usaha masyarakat demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat, penurunan angka kemiskinan dan perluasan lapangan kerja.
5. Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
6. Mewujudkan masyarakat yang religius dan memelihara toleransi antar umat beragama.
7. Memelihara dan mengembangkan potensi budaya dan kearifan lokal.

Misi pembangunan tersebut harus dapat di transformasikan menjadi upaya-upaya operasional dan teknis oleh seluruh komponen baik pemerintah, swasta dan masyarakat. Oleh karena itu perlu dibangun pemahaman yang sama dan batasan-batasan yang jelas dari misi tersebut, sehingga dibutuhkan suatu penjelasan sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.2**  
**Penjelasan Misi Kabupaten Sumbawa Tahun 2016-2021**

<b>No</b>	<b>Misi</b>	<b>Rumusan Penjelasan Misi</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat.	Misi ini menekankan pada pembangunan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang ditandai dengan membaiknya taraf pendidikan dan derajat kesehatan penduduk, yang didukung oleh meningkatnya kualitas pelayanan publik, sosial dasar bagi masyarakat serta mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab serta berdaya saing untuk mencapai kehidupan yang lebih makmur dan sejahtera; Aspek pendidikan dan kesehatan merupakan aspek dasar yang menjadi tanggungjawab pemerintah daerah. Pendidikan dan kesehatan yang diselenggarakan adalah yang berkeadilan

No	Misi	Rumusan Penjelasan Misi
1	2	3
		dan merata, dalam arti semua warga masyarakat memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan dan kesehatan yang layak, terjangkau dan berkualitas.
2.	Mewujudkan birokrasi yang bersih, handal dan profesional sehingga mampu menjalankan pemerintahan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik ( <i>good governance</i> ).	Dimaknai sebagai misi yang di emban untuk mengupayakan pengelolaan pemerintahan yang baik dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, terbentuknya birokrasi pemerintahan yang profesional dan berkinerja tinggi serta meningkatnya pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Misi ini menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik secara konsisten dan berkelanjutan yang tercermin dari berkurangnya tingkat korupsi, makin banyaknya keberhasilan pembangunan di berbagai bidang, dan terbentuknya birokrasi pemerintahan yang professional dan berkinerja tinggi, menjamin kepastian hukum, melindungi segenap masyarakat serta memberikan akses dan kesempatan bagi penduduk agar memperoleh manfaat dari pembangunan yang adil dan merata. Inti dari misi ini adalah berlangsungnya pelayanan publik yang dapat diartikan sebagai pemberian layanan oleh instansi, lembaga atau organisasi yang memberikan layanan kepada publik atau masyarakat sebagai pelanggan, dengan memperhatikan aturan atau prosedur yang ditetapkan serta memenuhi standar minimal layanannya, guna menciptakan kepuasan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk dapat memberikan pelayanan publik yang prima dan memuaskan masyarakat diperlukan tata kelola pemerintahan yang baik. Penerapan prinsip <i>good governance</i> dan <i>clean government</i> diharapkan mampu memberikan dan meningkatkan kualitas pelayanan sehingga dapat memenuhi harapan masyarakat.
3.	Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur dengan membangun sinergi yang kuat dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.	Dimaknai sebagai misi yang di emban sebagai upaya meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur dasar dan wilayah untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat, memacu peningkatan perekonomian daerah dan mengurangi disparitas pembangunan antar kecamatan/desa/kelurahan serta

<b>No</b>	<b>Misi</b>	<b>Rumusan Penjelasan Misi</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
		<p>mengoptimalkan penataan ruang pembangunan wilayah yang partisipatif dan berkelanjutan.</p> <p>Misi ini diarahkan untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan umum yang memiliki daya dukung dan daya gerak terhadap pertumbuhan ekonomi dan sosial yang berkeadilan dan mengutamakan kepentingan masyarakat umum untuk menunjang produktifitas dan mobilitas publik. Sangat diyakini bahwa upaya pemenuhan pelayanan yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat serta pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan akan berjalan dengan baik jika didukung oleh infrastruktur yang memadai. Ketersediaan sarana dan prasarana wilayah yang memadai merupakan hal penting yang harus diupayakan oleh pemerintah daerah. Pembangunan infrastruktur yang memadai di segala bidang pada akhirnya akan meningkatkan daya saing daerah. Untuk mewujudkan semua harapan besar tersebut, pemerintah daerah akan berupaya semaksimal mungkin untuk membangun sinergi yang kuat dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.</p>
4.	<p>Mengembangkan potensi unggulan daerah dan meningkatkan produktivitas usaha masyarakat demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat, penurunan angka kemiskinan dan perluasan lapangan kerja</p>	<p>Dimaknai sebagai misi yang diemban untuk meningkatkan perekonomian daerah dengan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya daerah secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, menciptakan iklim investasi yang kondusif serta meningkatkan ekonomi kerakyatan. Semangat dari misi ini adalah mengembangkan perekonomian daerah yang berlandaskan ekonomi kerakyatan dengan memberdayakan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi daerah, yang bertumpu pada pengembangan potensi lokal berbasis agribisnis dan agroindustri sehingga mendorong penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat.</p> <p>Misi ini juga diarahkan untuk memperkuat perekonomian daerah berbasis keunggulan wilayah menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem produksi, industri pengolahan, dan</p>

<b>No</b>	<b>Misi</b>	<b>Rumusan Penjelasan Misi</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
		<p>pelayanan masyarakat; mengedepankan pembangunan SDM berkualitas dan berdaya saing; meningkatkan penguasaan, pemanfaatan dan penciptaan iptek, serta mewujudkan daerah yang maju dalam berinvestasi.</p>
5.	<p>Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan</p>	<p>Misi ini mengemban amanat untuk melaksanakan pembangunan yang memanfaatkan ekonomi Sumberdaya Alam dengan tetap menjaga keseimbangan antara pemanfaatan serta keberlanjutan SDA dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan.</p> <p>Prinsip dari pembangunan berkelanjutan merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang dengan pemanfaatan Sumber Daya Alam yang tersedia tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan.</p> <p>Kondisi masyarakat Kabupaten Sumbawa memiliki pengertian dan kepedulian yang tinggi terhadap keseimbangan alam dan kelestarian lingkungan yang didasari oleh kesadaran akan fungsi strategis lingkungan terhadap keberlangsungan hidup manusia. Daya dukung dan kualitas lingkungan, harus menjadi acuan utama segala aktivitas pembangunan, agar tercipta tatanan kehidupan yang seimbang, nyaman dan berkelanjutan.</p>
6.	<p>Mewujudkan masyarakat yang religius dan memelihara toleransi antar umat beragama</p>	<p>Dimaknai sebagai misi yang diemban dalam menciptakan kondisi masyarakat yang memiliki nilai-nilai, norma, semangat dan kaidah agama, khususnya Islam yang diyakini dan dianut serta menjadi karakter dan identitas mayoritas Kabupaten Sumbawa, yang harus menjiwai, mewarnai dan menjadi ruh atau pedoman bagi seluruh aktivitas kehidupan, termasuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan, dengan tetap menjunjung tinggi toleransi dan kerukunan hidup beragama.</p>
7.	<p>Memelihara dan mengembangkan potensi budaya dan kearifan lokal</p>	<p>Misi ini mengemban amanat untuk menciptakan kehidupan sosial kemasyarakatan yang kokoh dan berbudaya yang bercirikan tingginya pemanfaatan modal sosial dalam pembangunan,</p>

No	Misi	Rumusan Penjelasan Misi
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
		<p>meningkatkan ketahanan keluarga, menurunnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), tingginya peran pemuda dalam pembangunan, meningkatnya prestasi olah raga, terpeliharanya seni dan warisan budaya dan industri pariwisata yang berdaya saing dalam bingkai kearifan lokal.</p> <p>Kondisi masyarakat Kabupaten Sumbawa yang memiliki nilai-nilai budaya yang baik, melekat dan menjadi jati diri, yang harus terus tumbuh dan berkembang seiring dengan laju pembangunan, serta menjadi perekat bagi keselarasan dan kestabilan sosial. Pengembangan budaya tersebut dilakukan dengan tetap menghargai pluralitas kehidupan masyarakat secara proporsional.</p>

Dari gambaran tersebut, maka keterkaitan pokok-pokok visi dan misi pembangunan Kabupaten Sumbawa disajikan sebagai berikut.

**Tabel 5.3**  
**Pokok-Pokok Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Sumbawa**  
**Tahun 2016-2021**

<b>Visi :</b> <b>TERWUJUDNYA MASYARAKAT SUMBAWA YANG BERDAYA SAING, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN SEMANGAT GOTONG ROYONG"</b>	
<b>Pokok-Pokok Visi</b>	<b>Misi</b>
<b>1</b>	<b>2</b>
1. Berdaya saing	<p>Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat.</p> <p>Mewujudkan birokrasi yang bersih, handal dan profesional sehingga mampu menjalankan pemerintahan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>).</p> <p>Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur dengan membangun sinergi yang kuat dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.</p>
2. Mandiri	<p>Mengembangkan potensi unggulan daerah dan meningkatkan produktivitas usaha masyarakat demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat, penurunan angka kemiskinan dan perluasan lapangan kerja</p> <p>Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan</p>
3. Berkepribadian	Mewujudkan masyarakat yang religius dan



<b>Visi :</b> <b>TERWUJUDNYA MASYARAKAT SUMBAWA YANG BERDAYA SAING, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN SEMANGAT GOTONG ROYONG"</b>	
<b>Pokok-Pokok Visi</b>	<b>Misi</b>
<b>1</b>	<b>2</b>
	memelihara toleransi antar umat beragama
	Memelihara dan mengembangkan potensi budaya dan kearifan lokal

### 5.3 Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan rumusan Visi dan Misi dan mengacu serta selaras dengan arahan teknis operasional dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2014 – 2019, Rencana pembangunan Jangka Menengah Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2014-2019 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Sumbawa Tahun 2005 - 2025, maka tujuan dan sasaran pembangunan daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan adalah sebagai berikut.

**Tabel 5.4**  
**Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2016-2021**

<b>Visi : Terwujudnya Masyarakat Sumbawa Yang Berdaya Saing, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Semangat Gotong Royong</b>				
<b>MISI</b>	<b>TUJUAN</b>		<b>SASARAN</b>	
<b>1</b>	<b>2</b>		<b>3</b>	
<b>1. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat.</b>	1	Meningkatnya kualitas layanan pendidikan	1	Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan yang memadai
			2	Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan dasar yang memadai sesuai dengan SPM
			3	Tersedianya sumberdaya pendidik/tenaga kependidikan yang berkualitas dan profesional
			4	Tersedianya kurikulum di satuan pendidikan dan lembaga kursus sesuai standar
	2	Meningkatnya kualitas layanan kesehatan	1	Tersedianya sarana dan prasarana kesehatan yang memadai sesuai standar
			2	Tersedianya sumberdaya tenaga kesehatan yang berkualitas dan profesional
			3	Tersedianya bahan dan peralatan kesehatan sesuai kebutuhan

**Visi : Terwujudnya Masyarakat Sumbawa Yang Berdaya Saing, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Semangat Gotong Royong**

<b>MISI</b>	<b>TUJUAN</b>		<b>SASARAN</b>		
<b>1</b>	<b>2</b>		<b>3</b>		
	3	Meningkatnya efektivitas layanan kesejahteraan sosial	1	Tersedianya sarana prasarana pelayanan sosial dasar yang memadai	
			2	termanfaatkannya data basis kemiskinan terpadu yang menyeluruh	
			3	Tersedianya tenaga sosial yang terampil dan profesional	
			4	Tersedianya bantuan sosial yang memadai	
	4	Meningkatnya intensitas kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan	1	Tersedianya tenaga pendamping yang memadai	
			2	Tersedianya sarana pendukung perempuan yang memadai	
			3	Tersedianya skema permodalan usaha yang memadai	
	5	Meningkatnya efektivitas perlindungan anak	1	Tersedianya tenaga pendamping perlindungan anak yang memadai	
			2	Tersedianya P2TP2A yang merata	
			3	tersedianya informasi hak perempuan dan anak yang memadai	
		6	Meningkatnya akses layanan keluarga berencana dan keluarga sejahtera	1	Tersedianya sumberdaya sarana dan prasarana keluarga berencana yang memadai
				2	Tersedianya tenaga pendamping/kader yang berkualitas dan profesional
3				Tersedianya layanan keluarga berencana dan keluarga sejahtera yang merata dan berkualitas	
4				Tersedianya skema permodalan usaha yang memadai	
7		Meningkatnya kualitas layanan perpustakaan	1	Tersedianya sarana dan prasarana perpustakaan yang sesuai kebutuhan	
			2	Tersedianya pengelola perpustakaan yang memadai dan profesional	
<b>2:.. Mewujudkan birokrasi yang bersih, handal dan</b>		1	Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan	1	Tersedianya sarana dan prasarana Pemerintahan Umum yang representatif

**Visi : Terwujudnya Masyarakat Sumbawa Yang Berdaya Saing, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Semangat Gotong Royong**

<b>MISI</b>	<b>TUJUAN</b>		<b>SASARAN</b>	
<b>1</b>	<b>2</b>		<b>3</b>	
<b>profesional sehingga mampu menjalankan pemerintahan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance)</b>		pemerintahan umum	2	Tersedianya sumber daya aparatur yang profesional
			3	Tersedianya data asset daerah yang akurat
			4	Tersedianya Dokumen Perencanaan keuangan daerah yang akuntabel
			5	Tersedianya laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang akuntabel
			6	Terkelolanya sumber-sumber PAD dan sumber pendapatan daerah yang optimal
			7	Tersedianya produk hukum daerah yang sesuai dengan kebutuhan
			8	Tersedianya struktur dan tata laksana perangkat daerah yang sesuai dengan kebutuhan
			9	Terlayaninya keperluan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara prima
			10	Tersedianya hasil evaluasi pembangunan daerah yang valid
			11	Terwujudnya sistem pengadaan barang dan jasa yang sesuai peraturan
			12	Tersedianya rekomendasi usaha yang sesuai dengan lapangan usaha
				2
2	Tersedianya tenaga pengelola yang trampil			
3	Meningkatnya efektivitas penegakan Perda	1		Tersedianya sarana penunjang yang memadai
		2		Tersedianya sumber daya penunjang yang profesional
4	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	1		Tersedianya tenaga pengawas yang profesional
		2		Tersedianya sarana dan prasarana Pemerintahan Umum yang representatif
		3		Tersedianya sistem pengendalian intern organisasi perangkat daerah yang terintegrasi

**Visi : Terwujudnya Masyarakat Sumbawa Yang Berdaya Saing, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Semangat Gotong Royong**

<b>MISI</b>	<b>TUJUAN</b>		<b>SASARAN</b>	
<b>1</b>	<b>2</b>		<b>3</b>	
	5	Meningkatnya stabilitas kamtibmas	1	Tersedianya sarana yang memadai
			2	Tersedianya sumberdaya aparatur yang profesional
			3	Terwujudnya kondisi sosial politik yang kondusif
	6	Meningkatnya efektivitas pelayanan kependudukan dan catatan sipil	1	Tersedianya sarana yang memadai
			2	Tersedianya sumberdaya manusia yang profesional
			3	Termanfaatkannya sistem administrasi kependudukan secara optimal
	7	Meningkatnya efektivitas perencanaan pembangunan daerah	1	Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai
			2	Tersedianya sumberdaya manusia yang profesional
			3	Termanfaatkannya sistem perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi
	8	Meningkatnya efektifitas layanan kearsipan	1	Tersedianya sarana dan prasarana kearsipan yang memadai
			2	Tersedianya sumberdaya manusia yang profesional
			3	Tersedianya sistem kearsipan yang akuntabel
9	Meningkatnya sekuritas informasi strategis daerah	1	Tersedianya sarana persandian yang memadai	
		2	Tersedianya sumberdaya manusia yang terampil	
<b>3. Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur dengan membangun sinergi yang kuat dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi</b>	1	Meningkatnya aksesibilitas wilayah dan konektivitas antar wilayah	1	Tersedianya infrastruktur jalan yang mantap
	2	Meningkatnya kapasitas penyediaan air baku	1	Tersedianya infrastruktur air baku yang sesuai kebutuhan
			2	Tersedianya sumber daya pengelola yang kompeten
			3	Tersedianya sistem pengelolaan irigasi secara partisipatif
4	Tersedianya sistem layanan air minum yang memadai			
3	Meningkatnya efektivitas	1	Tersedianya dokumen tata ruang sesuai peraturan	

**Visi : Terwujudnya Masyarakat Sumbawa Yang Berdaya Saing, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Semangat Gotong Royong**

<b>MISI</b>	<b>TUJUAN</b>		<b>SASARAN</b>	
<b>1</b>	<b>2</b>		<b>3</b>	
		penataan ruang wilayah	2	Terwujudnya masyarakat yang sadar tata ruang
			3	Terkendalinya pemanfaatan ruang sesuai peraturan
	4	Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman	1	Tersedianya sarana prasarana lingkungan yang memadai
	5	Meningkatnya amenities pengguna jalan	1	Tersedianya sarana dan prasarana perhubungan yang sesuai standar keselamatan
	6	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	1	Terfasilitasinya penyediaan sarana dan prasarana komunikasi yang memadai
	7	Menurunnya disparitas penyebaran penduduk	1	Tersedianya lahan transmigrasi yang layak huni
			2	Tersedianya sarana prasarana wilayah transmigrasi yang sesuai kebutuhan
			3	Terwujudnya transmigran yang mandiri
	8	Meningkatnya kapasitas masyarakat dan pemerintahan desa	1	Tersedianya sarana prasarana perdesaan yang memadai
			2	Tersedianya sumberdaya manusia yang terampil
			3	Tersedianya regulasi desa yang sesuai kebutuhan dan sejalan dengan peraturan perundang-undangan
			4	Tersusunnya rencana pembangunan kawasan pedesaan yang sesuai potensi
			5	Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan desa yang sesuai kebutuhan
			6	Terbentuknya lembaga ekonomi pedesaan yang mandiri
7			Terpeliharanya situasi trantib secara berkesinambungan	
	9	Mencegah semakin meningkatnya konflik pertanahan	1	Tercegah semakin banyaknya sertifikat ganda dan yang tidak memiliki sertifikat
<b>4. Mengembangkan potensi unggulan</b>	1	Meningkatnya produktivitas	1	Tersedianya Sarana produksi pertanian yang tepat (waktu,

**Visi : Terwujudnya Masyarakat Sumbawa Yang Berdaya Saing, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Semangat Gotong Royong**

<b>MISI</b>	<b>TUJUAN</b>		<b>SASARAN</b>	
<b>1</b>	<b>2</b>		<b>3</b>	
<b>daerah dan meningkatkan produktivitas usaha masyarakat demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat, penurunan angka kemiskinan dan perluasan lapangan kerja</b>		hasil pertanian		jenis, jumlah, kualitas,dosis)
			2	Tersedianya Prasarana Pertanian yang memadai
			3	Termanfaatkannya Teknologi Pertanian sesuai kebutuhan
			4	Tersedianya SDM Pertanian yang profesional
	2	Meningkatnya produktivitas hasil perikanan	1	Tersedianya Sarana produksi perikanan yang tepat (waktu,jenis, jumlah, kualitas , dosis)
			2	Tersedianya Prasarana Perikanan yang memadai
			3	Tercegah dan distraktif dan illegal fishing secara baik
	3	Meningkatnya produktivitas industri	1	Tersedianya sarana industri yang memadai
			2	Terbinanya pelaku industri yang terampil
	4	Meningkatnya stabilitas ketahanan pangan	1	Tersalurnya pangan secara merata
			2	Terwujudnya harga pangan yang stabil
			3	Terwujudnya masyarakat yang sadar pola konsumsi pangan, beragam, bergizi,seimbang dan aman
	5	Meningkatnya kapasitas kelembagaan koperasi dan UMKM	1	Terbinanya koperasi yang mandiri
			2	Tersedianya SDM koperasi dan UMKM yang profesional
			3	Tersedianya sarana dan prasarana UMKM yang memadai
	6	Meningkatnya aksesibilitas distribusi hasil usaha masyarakat	1	Tersedianya Prasarana perdagangan yang memadai
			2	Tersedianya sarana kemetrolagian yang memadai
			3	Tersedianya SDM kemetrolagian yang profesional
	7	Meningkatnya <i>responsibilitas</i> investasi di daerah	1	Terjalannya kerjasama investasi yang berkelanjutan
			2	Tersedianya pelayanan investasi yang mudah dan cepat

**Visi : Terwujudnya Masyarakat Sumbawa Yang Berdaya Saing, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Semangat Gotong Royong**

<b>MISI</b>	<b>TUJUAN</b>		<b>SASARAN</b>	
<b>1</b>	<b>2</b>		<b>3</b>	
			3	Tersedianya sumber daya manusia yang profesional
	8	Meningkatnya produktivitas kerja	1	Terrwujudnya Angkatan Kerja yang terampil
			2	Tersedianya sarana dan prasarana ketenagakerjaan yang sesuai standar
			3	Tersedianya Pelatih yang profesional
	9	Meningkatnya efektivitas perlindungan tenaga kerja	1	Tersedianya perjanjian kerja yang sesuai dengan aturan
			2	Tersedianya sarana pendukung ketenagakerjaan yang memadai
			3	Terawasinya perusahaan dalam menerapkan aturan ketenagakerjaan secara berkesinambungan
			4	Tersedianya calon TKI yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja
	10	Menurunnya ketimpangan dan kemiskinan	1	Tersalurnya bantuan layanan sosial yang memadai
	11	Meningkatnya Kualitas destinasi wisata	1	Tersedianya sarana prasarana pendukung pariwisata yang memadai
			2	Terbentuknya pelaku usaha wisata yang terampil dan profesional
			3	Terbangunnya ekowisata berbasis komunitas sesuai potensi kawasan
	12	Meningkatnya intensitas pemasaran pariwisata	1	Tersedianya data dan informasi pariwisata yang valid
			2	Terwujudnya lembaga promosi pariwisata yang profesional
<b>5. Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan</b>	1	Meningkatnya efektifitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	1	Tersedianya data dan informasi berbasis spasial yang sesuai potensi
			2	Tersedianya SDM pengelola data dan informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang kompeten
	2	Mencegah semakin	1	Terwujudnya masyarakat yang sadar lingkungan

**Visi : Terwujudnya Masyarakat Sumbawa Yang Berdaya Saing, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Semangat Gotong Royong**

<b>MISI</b>	<b>TUJUAN</b>		<b>SASARAN</b>	
<b>1</b>	<b>2</b>		<b>3</b>	
		menurunnya kualitas lingkungan hidup	2	Tersedianya rencana pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkualitas
			3	Terpantaunya parameter kualitas lingkungan secara berkala
			4	Terwujudnya pemeliharaan dan pemanfaatan mata air yang optimal
	3	Meningkatnya efektifitas penegakan hukum lingkungan hidup	1	Terwujudnya pemahaman regulasi lingkungan secara menyeluruh
			2	Tersedianya pengawas lingkungan yang kompeten
			3	Tersusunnya regulasi daerah bidang LH yang sesuai kondisi
	4	Meningkatnya efektifitas dan kapasitas layanan persampahan	1	Tersedianya sarana dan prasarana penyehatan lingkungan yang memadai
			2	Tersedianya tenaga kebersihan lingkungan yang terampil
	5	Meningkatnya kapasitas penanganan dan penanggulangan bencana	1	Tersedianya data dan informasi kebencanaan yang memadai
			2	Tersusunnya alur penanganan kondisi bencana yang sesuai standar kebutuhan
			3	Tersedianya sarana dan prasarana penanganan bencana yang optimal
			4	Terlatihnya sumberdaya kesiagaan bencana yang terampil
	6	Mencegah semakin meluasnya dampak negatif pemanasan global	1	Tecegah semakin berkurangnya debit air
			2	Tercegah semakin meluasnya kerusakan kawasan hutan
			3	Tercegah semakin meluasnya abrasi pesisir pantai
	7	Meningkatnya kuantitas dan kualitas informasi pembangunan	1	Tersedianya sumber daya yang profesional
			2	Tersedianya sistem yang terintegrasi
			3	Tersedianya sarana pendukung yang memadai



**Visi : Terwujudnya Masyarakat Sumbawa Yang Berdaya Saing, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Semangat Gotong Royong**

<b>MISI</b>	<b>TUJUAN</b>		<b>SASARAN</b>	
<b>1</b>	<b>2</b>		<b>3</b>	
			4	Tersedianya data yang akurat dan mutakhir
<b>6. Mewujudkan masyarakat yang religius dan memelihara toleransi antar umat beragama</b>	1	Mencegah semakin meluasnya pergeseran nilai-nilai kehidupan beragama	1	Tecegah semakin meluasnya dekadensi Akhlak masyarakat
	2	Mencegah semakin meluasnya pergeseran nilai-nilai kehidupan berbangsa	1	Tercegah semakin menurunnya wawasan kebangsaan
			2	Tercegah semakin merebaknya intoleransi dan krisis kepribadian bangsa
	3	Mencegah semakin meluasnya pergeseran nilai-nilai kehidupan bermasyarakat	1	Tercegah semakin meluasnya konflik sosial
<b>7. Memelihara dan mengembangkan potensi budaya dan kearifan lokal</b>	1	Meningkatnya intensitas pelestarian budaya	1	Tersedianya sarana prasarana budaya yang memadai
			2	Tersedianya budayawan dan seniman yang profesional
			3	Terselenggaranya event budaya yang berkesinambungan
	2	Meningkatnya internalitas nilai budaya lokal	1	Terpeliharanya nilai-nilai budaya dalam masyarakat yang selaras
	3	Meningkatnya kredibilitas daerah	1	Tersedianya sarana prasarana penunjang aktivitas olahraga yang memadai
			3	Terselenggaranya event olahraga yang berkesinambungan
			4	Terselenggaranya event kepemudaan yang berkesinambungan
			5	Terwujudnya pemuda yang terampil
			6	Terwujudnya olahragawan yang profesional



## **BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Sumbawa di era desentralisasi, demokrasi dan globalisasi ini, strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah perlu diterapkan secara berkelanjutan dengan mengedepankan tahapan identifikasi terhadap berbagai faktor dengan harapan mampu memberikan solusi akan berbagai permasalahan, tantangan dan peluang pembangunan dalam lima tahun kedepan.

Dari analisis terhadap lingkungan strategis Kabupaten Sumbawa, maka ditentukan strategi pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Sumbawa tahun 2016-2021. Strategi merupakan rumusan berupa pernyataan yang menjelaskan langkah-langkah yang ditempuh pemerintah daerah melalui program-program indikatif untuk mewujudkan sasaran visi dan misi pembangunan serta menjadi salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed-management*). Sedangkan arah kebijakan adalah pedoman untuk melaksanakan strategi yang dipilih agar lebih terarah pada pencapaian tujuan dan sasaran dari kurun waktu selama lima tahun.

Adapun strategi dan arah kebijakan yang ditempuh dalam RPJMD Kabupaten Sumbawa tahun 2016-2021, sebagai berikut.

**Tabel 6.1**  
**Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2016-2021**

<b>Visi : Terwujudnya Masyarakat Sumbawa Yang Berdaya Saing, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Semangat Gotong Royong</b>						
<b>MISI</b>	<b>TUJUAN</b>		<b>SASARAN</b>		<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>
1	2		3		4	5
<b>1. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat.</b>	1	Meningkatnya kualitas layanan pendidikan	1	Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan yang memadai	Fasilitasi	PAUD perdesaan dan perkotaan
			2	Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan dasar yang memadai sesuai dengan SPM	Konstruksi dan rehabilitasi	Gedung SD dan penunjang
						Gedung SMP dan penunjang
			3	Tersedianya sumberdaya pendidik/tenaga kependidikan yang berkualitas dan profesional	Edukasi dan koordinasi	Pendidik PAUD, Guru SD dan SMP
					Tenaga kependidikan SD, SMP	
			4	Tersedianya kurikulum di satuan pendidikan dan lembaga kursus sesuai standar	Sosialisasi	Workshop oleh mentor
	2	Meningkatnya kualitas layanan kesehatan	1	Tersedianya sarana dan prasarana kesehatan yang memadai sesuai standar	Konstruksi dan rehabilitasi	Rumah sakit umum daerah
					Akreditasi	Puskesmas dan jaringannya
						Rumah sakit dan puskesmas
			2	Tersedianya sumberdaya tenaga kesehatan yang berkualitas dan profesional	Edukasi dan koordinasi	Tenaga medis/paramedis di rumah sakit umum dan puskesmas/jaringannya

**Visi : Terwujudnya Masyarakat Sumbawa Yang Berdaya Saing, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Semangat Gotong Royong**

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN		
1	2	3	4	5		
		3	Tersedianya bahan dan peralatan kesehatan sesuai kebutuhan	Transaksi	Obat, perbekalan dan peralatan kesehatan	
	3	Meningkatnya efektivitas layanan kesejahteraan sosial	1	Tersedianya sarana prasarana pelayanan sosial dasar yang memadai	Konstruksi dan rehabilitasi	Rumah singgah, panti dan loka bina karya (LBK)
					Transaksi dan distribusi	sarana penunjang LBK
			2	termanfaatkannya data basis kemiskinan terpadu yang menyeluruh	Koordinasi, sinergi dan integrasi	Perangkat daerah
			3	Tersedianya tenaga sosial yang terampil dan profesional	Edukasi dan fasilitasi	Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
			4	Tersedianya bantuan sosial yang memadai	Distribusi dan fasilitasi	PMKS
	4	Meningkatnya intensitas kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan	1	Tersedianya tenaga pendamping yang memadai	Edukasi dan fasilitasi	Perempuan pelaku usaha
			2	Tersedianya sarana pendukung perempuan yang memadai	Revitalisasi	Perempuan yang bergerak dibidang usaha dan korban kekerasan
			3	Tersedianya skema permodalan usaha yang memadai	Distribusi dan fasilitasi	Perempuan yang bergerak dibidang usaha dan korban kekerasan

**Visi : Terwujudnya Masyarakat Sumbawa Yang Berdaya Saing, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Semangat Gotong Royong**

<b>MISI</b>	<b>TUJUAN</b>		<b>SASARAN</b>		<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>
1	2		3		4	5
	5	Meningkatnya efektivitas perlindungan anak	1	Tersedianya tenaga pendamping perlindungan anak yang memadai	Edukasi dan fasilitasi	Anak korban tindak kekerasan
			2	Tersedianya P2TP2A yang merata	Revitalisasi, fasilitasi dan koordinasi	P2TP2A tingkat kabupaten dan kecamatan
			3	tersedianya informasi hak perempuan dan anak yang memadai	Komunikasi, edukasi dan fasilitasi	Masyarakat
	6	Meningkatnya akses layanan keluarga berencana dan keluarga sejahtera	1	Tersedianya sumberdaya sarana dan prasarana keluarga berencana yang memadai	Konstruksi dan rehabilitasi	UPT Keluarga berencana Kecamatan
			2	Tersedianya tenaga pendamping/kader yang berkualitas dan profesional	Edukasi dan Fasilitasi	kader
			3	Tersedianya layanan keluarga berencana dan keluarga sejahtera yang merata dan berkualitas	Komunikasi, informasi dan edukasi	Pasangan usia subur
			4	Tersedianya skema permodalan usaha yang memadai	Distribusi dan fasilitasi	Keluarga Pra sejahtera

<b>Visi : Terwujudnya Masyarakat Sumbawa Yang Berdaya Saing, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Semangat Gotong Royong</b>						
<b>MISI</b>	<b>TUJUAN</b>		<b>SASARAN</b>		<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>
1	2		3		4	5
	7	Meningkatnya kualitas layanan perpustakaan	1	Tersedianya sarana dan prasarana perpustakaan yang sesuai kebutuhan	Konstruksi	Perpustakaan daerah, perpustakaan desa, perpustakaan sekolah
					distribusi	Buku bacaan
			2	Tersedianya pengelola perpustakaan yang memadai dan profesional	Fasilitasi dan edukasi	Pustakawan
						Operator digitasi
<b>2: Mewujudkan birokrasi yang bersih, handal dan profesional sehingga mampu menjalankan pemerintahan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance)</b>	1	Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pemerintahan umum	1	Tersedianya sarana dan prasarana Pemerintahan Umum yang representatif	Konstruksi, rehabilitasi	Kantor Perangkat Daerah
					Akuisisi	Tanah milik masyarakat
			2	Tersedianya sumber daya aparatur yang profesional	Edukasi dan Fasilitasi	Aparatur Sipil Negara
			3	Tersedianya data asset daerah yang akurat	Inventarisasi	gedung dan tanah
			4	Tersedianya Dokumen Perencanaan keuangan daerah yang akuntabel	Inventarisasi dan formulasi	APBD
5	Tersedianya laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang akuntabel	Inventarisasi, reportasi,	Laporan pertanggung jawaban APBD			

**Visi : Terwujudnya Masyarakat Sumbawa Yang Berdaya Saing, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Semangat Gotong Royong**

<b>MISI</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>	
1	2	3	4	5	
		6	Terkelolanya sumber-sumber PAD dan sumber pendapatan daerah yang optimal	Intensifikasi dan ekstensifikasi	Kinerja PAD
		7	Tersedianya produk hukum daerah yang sesuai dengan kebutuhan	Inventarisasi, formulasi	Jumlah produk hukum daerah
		8	Tersedianya struktur dan tata laksana perangkat daerah yang sesuai dengan kebutuhan	Investigasi, formulasi	OPD
		9	Terlayaninya keperluan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara prima	Fasilitasi	Kepala/Wakil Kepala Daerah
		10	Tersedianya hasil evaluasi pembangunan daerah yang valid	Inventarisasi, rekapitulasi, verifikasi dan formulasi	Laporan pelaksanaan pembangunan
		11	Terwujudnya sistem pengadaan barang dan jasa yang sesuai peraturan	Implementasi	SOP Pengadaan
		12	Tersedianya rekomendasi usaha yang sesuai dengan lapangan usaha	Verifikasi, inventarisasi, visitasi	Dokumen perijinan



**Visi : Terwujudnya Masyarakat Sumbawa Yang Berdaya Saing, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Semangat Gotong Royong**

<b>MISI</b>	<b>TUJUAN</b>		<b>SASARAN</b>		<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>
1	2		3		4	5
	2	Meningkatnya obyektivitas dan efektivitas penataan kepegawaian	1	Tersedianya sistem Teknologi informasi kepegawaian yang terintegrasi	Koordinasi, konsultasi dan Konsolidasi	SIMPEG
			2	Tersedianya tenaga pengelola yang trampil	Edukasi	Operator SIMPEG
	3	Meningkatnya efektivitas penegakan Perda	1	Tersedianya sarana penunjang yang memadai	Transaksi dan distribusi	sarana mobilitas
			2	Tersedianya sumber daya penunjang yang profesional	Edukasi	Polisi Pamong Praja
	4	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	1	Tersedianya tenaga pengawas yang profesional	Edukasi dan fasilitasi	Auditor/ APIP
			2	Tersedianya sarana dan prasarana Pemerintahan Umum yang representatif	Konstruksi dan rehabilitasi	Kantor Perangkat Daerah
			3	Tersedianya sistem pengendalian intern organisasi perangkat daerah yang terintegrasi	Implementasi	Sistem pengendalian intern Pemerintah (SPIP)
	5	Meningkatnya stabilitas kamtibmas	1	Tersedianya sarana yang memadai	Transaksi dan distribusi	Kendaraan operasional
			2	Tersedianya sumberdaya aparatur yang profesional	Edukasi dan fasilitasi	Polisi Pamong Praja dan petugas Linmas

**Visi : Terwujudnya Masyarakat Sumbawa Yang Berdaya Saing, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Semangat Gotong Royong**

<b>MISI</b>	<b>TUJUAN</b>		<b>SASARAN</b>		<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>
1	2		3		4	5
			3	Terwujudnya kondisi sosial politik yang kondusif	Koordinasi	Forum Koordinasi Pimpinan Daerah
	6	Meningkatnya efektivitas pelayanan kependudukan dan catatan sipil	1	Tersedianya sarana yang memadai	Transaksi dan distribusi	alat perekaman data kependudukan
			2	Tersedianya sumberdaya manusia yang profesional	Edukasi	operator
			3	Termanfaatkannya sistem administrasi kependudukan secara optimal	Sinkronisasi dan integrasi	Lingkup pelayanan
	7	Meningkatnya efektivitas perencanaan pembangunan daerah	1	Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai	Rehabilitasi	Gedung Bappeda
					Transaksi	Alat penunjang perencanaan
			2	Tersedianya sumberdaya manusia yang profesional	Edukasi	Perencana
			3	Termanfaatkannya sistem perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi	Sinkronisasi dan koordinasi	SOP Perencanaan
	8	Meningkatnya efektifitas layanan kearsipan	1	Tersedianya sarana dan prasarana kearsipan yang memadai	Konstruksi	Depo Arsip
			2	Tersedianya sumberdaya manusia yang profesional	Edukasi	Arsiparis

<b>Visi : Terwujudnya Masyarakat Sumbawa Yang Berdaya Saing, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Semangat Gotong Royong</b>						
<b>MISI</b>	<b>TUJUAN</b>		<b>SASARAN</b>		<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>
1	2		3		4	5
			3	Tersedianya sistem kearsipan yang akuntabel	Formulasi	SOP Kerarsipan
	9	Meningkatnya sekuritas informasi strategis daerah	1	Tersedianya sarana persandian yang memadai	Transaksi	Alat persandian
			2	Tersedianya sumberdaya manusia yang terampil	Edukasi	Fungsional persandian
<b>3. Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur dengan membangun sinergi yang kuat dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi</b>	1	Meningkatnya aksesibilitas wilayah dan konektivitas antar wilayah	1	Tersedianya infrastruktur jalan yang mantap	Konstruksi dan rehabilitasi	Wilayah potensial terisolir ruas yang belum mantap dan kritis
					Koordinasi dan konsultasi	Jalan Nasional dan Propinsi
	2	Meningkatnya kapasitas penyediaan air baku	1	Tersedianya infrastruktur air baku yang sesuai kebutuhan	Konstruksi, rehabilitasi	Bendung, bendungan, embung, di wilayah kritis
					Koordinasi dan konsultasi	Insfrastruktur SDA kewenangan Pusat dan Propinsi
			2	Tersedianya sumber daya pengelola yang kompeten	Fasilitasi dan Edukasi	Petani pemakai air
			3	Tersedianya sistem pengelolaan irigasi secara partisipatif	Formulasi	Perbup, Perkada, SK, SE,
			4	Tersedianya sistem layanan air minum yang memadai	Konstruksi, rehabilitasi dan optimalisasi	Daerah rawan air
	3	Meningkatnya efektivitas	1	Tersedianya dokumen tata ruang sesuai peraturan	Formulasi	Kawasan strategis kabupaten

**Visi : Terwujudnya Masyarakat Sumbawa Yang Berdaya Saing, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Semangat Gotong Royong**

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN		
1	2	3	4	5		
	penataan ruang wilayah	2	Terwujudnya masyarakat yang sadar tata ruang	Sosialisasi	Masyarakat perkotaan	
		3	Terkendalinya pemanfaatan ruang sesuai peraturan	Rekomendasi	Wilayah perkotaan	
	4	Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman	1	Tersedianya sarana prasarana lingkungan yang memadai	Konstruksi, revitalisasi, rehabilitasi	Pemukiman kumuh
	5	Meningkatnya amenities pengguna jalan	1	Tersedianya sarana dan prasarana perhubungan yang sesuai standar keselamatan	Konstruksi, revitalisasi, rehabilitasi, koordinasi dan konsultasi	Sarana prasarana perhubungan darat
	6	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	1	Terfasilitasinya penyediaan sarana dan prasarana komunikasi yang memadai	Koordinasi dan konsultasi	Dana Universal Service Obligation (USO) Kemenkominfo
	7	Menurunnya disparitas penyebaran penduduk	1	Tersedianya lahan transmigrasi yang layak huni	Alokasi	Wilayah yang jarang penduduk dan potensial
			2	Tersedianya sarana prasarana wilayah transmigrasi yang sesuai kebutuhan	Konstruksi	Fasilitas umum
			3	Terwujudnya transmigran yang mandiri	Edukasi dan fasilitasi	Kewirausahaan

**Visi : Terwujudnya Masyarakat Sumbawa Yang Berdaya Saing, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Semangat Gotong Royong**

<b>MISI</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>	
1	2	3	4	5	
	8	Meningkatnya kapasitas masyarakat dan pemerintahan desa	1 Tersedianya sarana prasarana perdesaan yang memadai	Konstruksi dan rehabilitasi	Sarpras perekonomian, sosial dasar dan pemerintahan
			2 Tersedianya sumberdaya manusia yang terampil	Edukasi dan sosialisasi	Perangkat desa dan BPD
					Masyarakat desa
			3 Tersedianya regulasi desa yang sesuai kebutuhan dan sejalan dengan peraturan perundang-undangan	Fasilitasi, formulasi dan sinkronisasi	Perdes
			4 Tersusunnya rencana pembangunan kawasan pedesaan yang sesuai potensi	Formulasi	Kawasan pertanian, perikanan, wisata
			5 Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan desa yang sesuai kebutuhan	Fasilitasi dan sinkronisasi	RPJM Desa dan RKP Desa
			6 Terbentuknya lembaga ekonomi pedesaan yang mandiri	Fasilitasi, edukasi	Badan usaha milik desa
			7 Terpeliharanya situasi trantib secara berkesinambungan	Koordinasi, sosialisasi dan mediasi	Rakor, dakwah/khotbah

<b>Visi : Terwujudnya Masyarakat Sumbawa Yang Berdaya Saing, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Semangat Gotong Royong</b>						
<b>MISI</b>	<b>TUJUAN</b>		<b>SASARAN</b>		<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>
1	2		3		4	5
	9	Mencegah semakin meningkatnya konflik pertanahan	1	Tercegah semakin banyaknya sertifikat ganda dan yang tidak memiliki sertifikat	Fasilitasi	Kawasan potensial
<b>4. Mengembangkan potensi unggulan daerah dan meningkatkan produktivitas usaha masyarakat demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat, penurunan angka kemiskinan dan perluasan lapangan kerja</b>	1	Meningkatnya produktivitas hasil pertanian	1	Tersedianya Sarana produksi pertanian yang tepat (waktu, jenis, jumlah, kualitas,dosis)	Transaksi dan distribusi	Sarana produksi untuk Komoditas Tanaman Pangan, Hortikultura, Peternakan dan Perkebunan
			2	Tersedianya Prasarana Pertanian yang memadai	Konstruksi, Rehabilitasi	Prasarana penunjang usaha tani
			3	Termanfaatkannya Teknologi Pertanian sesuai kebutuhan	Edukasi sosialisasi	Pelaku usaha tani
			4	Tersedianya SDM Pertanian yang profesional	Edukasi, fasilitasi	Tenaga fungsional pertanian
	2	Meningkatnya produktivitas hasil perikanan	1	Tersedianya Sarana produksi perikanan yang tepat (waktu,jenis, jumlah, kualitas , dosis)	Transaksi dan distribusi	Perikanan Budidaya dan Perikanan Tangkap
			2	Tersedianya Prasarana Perikanan yang memadai	Konstruksi, Rehabilitasi	Prasarana penunjang usaha perikanan
			3	Tercegah dan distraktif dan illegal fishing secara baik	Sosialisasi, konsolidasi dan konsultasi	Nelayan, pembudidaya dan masyarakat pesisir

**Visi : Terwujudnya Masyarakat Sumbawa Yang Berdaya Saing, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Semangat Gotong Royong**

<b>MISI</b>	<b>TUJUAN</b>		<b>SASARAN</b>		<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>
1	2		3		4	5
	3	Meningkatnya produktivitas industri	1	Tersedianya sarana industri yang memadai	distribusi, fasilitasi dan transaksi	sarana pengolahan hasil pertanian, perikanan, kehutanan
			2	Terbinanya pelaku industri yang terampil	edukasi	Pelaku IKM
	4	Meningkatnya stabilitas ketahanan pangan	1	Tersalurnya pangan secara merata	distribusi	Desa Rawan pangan
			2	Terwujudnya harga pangan yang stabil	koordinasi, intervensi	pelaku usaha pangan
			3	Terwujudnya masyarakat yang sadar pola konsumsi pangan, beragam, bergizi, seimbang dan aman	Sosialisasi	Masyarakat desa
	5	Meningkatnya kapasitas kelembagaan koperasi dan UMKM	1	Terbinanya koperasi yang mandiri	Fasilitasi	Koperasi
			2	Tersedianya SDM koperasi dan UMKM yang profesional	Edukasi, visitasi	Pengelola Koperasi dan pelaku UMKM
			3	Tersedianya sarana dan prasarana UMKM yang memadai	Konstruksi	Lapak/outlet pemasaran PKL
	6	Meningkatnya aksesibilitas distribusi hasil	1	Tersedianya Prasarana perdagangan yang memadai	Konstruksi, rehabilitasi, revitalisasi	Pasar Induk dan Pasar tradisional

**Visi : Terwujudnya Masyarakat Sumbawa Yang Berdaya Saing, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Semangat Gotong Royong**

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4	5
	usaha masyarakat	2 Tersedianya sarana kemetrollogian yang memadai	Peningkatan akurasi	Alat UTTP
7	Meningkatnya <i>responsibilitas</i> investasi di daerah	1 Terjalinnnya kerjasama investasi yang berkelanjutan	Promosi	Pameran, iklan tentang Produk unggulan daerah di dalam maupun di luar daerah
		2 Tersedianya pelayanan investasi yang mudah dan cepat	regulasi	Sistem pelayanan dan informasi investasi satu pintu
		3 Tersedianya sumber daya manusia yang profesional	Edukasi	Operator SPIPISE
8	Meningkatnya produktivitas kerja	1 Terrwujudnya Angkatan Kerja yang terampil	Edukasi	Bidang ketrampilan sesuai Kebutuhan pasar kerja
		2 Tersedianya sarana dan prasarana ketenagakerjaan yang sesuai standar	Akreditasi	BLK
		3 Tersedianya Pelatih yang profesional	Edukasi	Instruktur
9	Meningkatnya efektivitas perlindungan tenaga kerja	1 Tersedianya perjanjian kerja yang sesuai dengan aturan	Mediasi	Tenaga kerja dan Perusahaan
		2 Tersedianya sarana pendukung ketenagakerjaan yang memadai	Fasilitasi	Dewan Pengupahan Daerah



**Visi : Terwujudnya Masyarakat Sumbawa Yang Berdaya Saing, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Semangat Gotong Royong**

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN		
1	2	3	4	5		
		3	Terawasinya perusahaan dalam menerapkan aturan ketenagakerjaan secara berkesinambungan	intervensi	K3 (Keamanan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja)	
		4	Tersedianya calon TKI yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja	Edukasi dan seleksi	Masyarakat pencari kerja	
	10	Menurunnya ketimpangan dan kemiskinan	1	Tersalurnya bantuan layanan sosial yang memadai	Distribusi	PMKS yang tertangani
	11	Meningkatnya Kualitas destinasi wisata	1	Tersedianya sarana prasarana pendukung pariwisata yang memadai	Konstruksi dan rehabilitasi	Kawasan wisata alam dan budaya
			2	Terbentuknya pelaku usaha wisata yang terampil dan profesional	Sosialisasi dan fasilitasi	Kelompok profesi pariwisata
			3	Terbangunnya ekowisata berbasis komunitas sesuai potensi kawasan	Fasilitasi	Pokdarwis dan Pemerintah desa
	12	Meningkatnya intensitas pemasaran	1	Tersedianya data dan informasi pariwisata yang valid	Inventarisasi	Data kawasan dan pelaku usaha pariwisata

<b>Visi : Terwujudnya Masyarakat Sumbawa Yang Berdaya Saing, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Semangat Gotong Royong</b>						
<b>MISI</b>	<b>TUJUAN</b>		<b>SASARAN</b>		<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>
1	2		3		4	5
		pariwisata	2	Terwujudnya lembaga promosi pariwisata yang profesional	fasilitasi dan koordinasi	pelaku usaha pariwisata
<b>5. Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan</b>	1	Meningkatnya efektifitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	1	Tersedianya data dan informasi berbasis spasial yang sesuai potensi	Formulasi, inventarisasi, dokumentasi	SDA dan Lingkungan hidup
			2	Tersedianya SDM pengelola data dan informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang kompeten	Edukasi dan fasilitasi	Peningkatan kapasitas SDM dalam bidang GIS dan Remote sensing
	2	Mencegah semakin menurunnya kualitas lingkungan hidup	1	Terwujudnya masyarakat yang sadar lingkungan	Sosialisasi	Kelompok masyarakat
			2	Tersedianya rencana pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkualitas	Formulasi	Kawasan konservasi
			3	Terpantaunya parameter kualitas lingkungan secara berkala	inventarisasi dan dokumentasi	Wilayah kecamatan
			4	Terwujudnya pemeliharaan dan pemanfaatan mata air yang optimal	inventarisasi dan rehabilitasi	Wilayah hutan

**Visi : Terwujudnya Masyarakat Sumbawa Yang Berdaya Saing, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Semangat Gotong Royong**

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
1	2	3	4	5	
	3	Meningkatnya efektifitas penegakan hukum lingkungan hidup	1	Terwujudnya pemahaman regulasi lingkungan secara menyeluruh	Sosialisasi Masyarakat
			2	Tersedianya pengawas lingkungan yang kompeten	Edukasi ASN
			3	Tersusunnya regulasi daerah bidang LH yang sesuai kondisi	Formulasi Pemerintah daerah
	4	Meningkatnya efektifitas dan kapasitas layanan persampahan	1	Tersedianya sarana dan prasarana penyehatan lingkungan yang memadai	Transaksi sarana persampahan
				Konstruksi TPS, TPA	
	2	Tersedianya tenaga kebersihan lingkungan yang terampil	Fasilitasi, Mobilisasi Tenaga Persampahan		
	5	Meningkatnya kapasitas penanganan dan penanggulangan bencana	1	Tersedianya data dan informasi kebencanaan yang memadai	Formulasi dan inventarisasi Peta dan data rawan bencana
				Inventarisasi, verifikasi dan kompilasi data kejadian bencana	aplikasi Data dan informasi bencana Inonesia (DIBI)

**Visi : Terwujudnya Masyarakat Sumbawa Yang Berdaya Saing, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Semangat Gotong Royong**

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN		
1	2	3	4	5		
		2	Tersusunnya alur penanganan kondisi bencana yang sesuai standar kebutuhan	Formulasi, koordinasi, dan simulasi	SOP penanganan bencana	
		3	Tersedianya sarana dan prasarana penanganan bencana yang optimal	Konstruksi, rehabilitasi	Fasilitas evakuasi dan tanggap darurat	
				Normalisasi	Bantaran sungai	
		4	Terlatihnya sumberdaya kesiagaan bencana yang terampil	Edukasi dan simulasi	TRC dan Tagana	
	6	Mencegah semakin meluasnya dampak negatif pemanasan global	1	Tecega semakin berkurangnya debit air	Reboisasi dan rehabilitasi	Kawasan hutan kritis
			2	Tercega semakin meluasnya kerusakan kawasan hutan	Reboisasi dan rehabilitasi	Kawasan hutan kritis
			3	Tercega semakin meluasnya abrasi pesisir pantai	Reklamasi	Pesisir pantai dengan komoditas tanaman bakau
					Konstruksi	Tanggul pengamananan pantai
	7	Meningkatnya kuantitas dan kualitas informasi pembangunan	1	Tersedianya sumber daya yang profesional	Edukasi	Analisis dan operator
			2	Tersedianya sistem yang terintegrasi	Formulasi, implementasi	SOP

<b>Visi : Terwujudnya Masyarakat Sumbawa Yang Berdaya Saing, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Semangat Gotong Royong</b>						
<b>MISI</b>	<b>TUJUAN</b>		<b>SASARAN</b>		<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>
1	2		3		4	5
			3	Tersedianya sarana pendukung yang memadai	Transaksi, integrasi	Perangkat keras dan perangkat lunak
			4	Tersedianya data yang akurat dan mutakhir	Inventarisasi, formulasi	Basis data
<b>6. Mewujudkan masyarakat yang religius dan memelihara toleransi antar umat beragama</b>	1	Mencegah semakin meluasnya pergeseran nilai-nilai kehidupan beragama	1	Tecegah semakin meluasnya dekadensi Akhlak masyarakat	Revolusi mental	Masyarakat
	2	Mencegah semakin meluasnya pergeseran nilai-nilai kehidupan berbangsa	1	Tercegah semakin menurunnya wawasan kebangsaan	Reformasi hukum	Aparat penegak hukum
			2	Tercegah semakin merebaknya intoleransi dan krisis kepribadian bangsa	Revolusi mental	Masyarakat
	3	Mencegah semakin meluasnya pergeseran nilai-nilai kehidupan bermasyarakat	1	Tercegah semakin meluasnya konflik sosial	Restorasi sosial	Masyarakat

**Visi : Terwujudnya Masyarakat Sumbawa Yang Berdaya Saing, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Semangat Gotong Royong**

<b>MISI</b>	<b>TUJUAN</b>		<b>SASARAN</b>		<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>
1	2		3		4	5
<b>7. Memelihara dan mengembangkan potensi budaya dan kearifan lokal</b>	1	Meningkatnya intensitas pelestarian budaya	1	Tersedianya sarana prasarana budaya yang memadai	Konstruksi, rehabilitasi, revitalisasi	Gedung kesenian
			2	Tersedianya budayawan dan seniman yang profesional	Fasilitasi, mediasi	Masyarakat
			3	Terselenggaranya event budaya yang berkesinambungan	Aktualisasi	Seni budaya
	2	Meningkatnya internalitas nilai budaya lokal	1	Terpeliharanya nilai-nilai budaya dalam masyarakat yang selaras	Internalisasi dan revitalisasi	Masyarakat perkotaan
	3	Meningkatnya kredibilitas daerah	1	Tersedianya sarana prasarana penunjang aktivitas olahraga yang memadai	Konstruksi	GOR
					Rehabilitasi dan revitalisasi	Cabor potensial
			3	Terselenggaranya event olahraga yang berkesinambungan	Aktualisasi	Kompetisi
			4	Terselenggaranya event kepemudaan yang berkesinambungan	Aktualisasi	Kompetisi

<b>Visi : Terwujudnya Masyarakat Sumbawa Yang Berdaya Saing, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Semangat Gotong Royong</b>						
<b>MISI</b>	<b>TUJUAN</b>		<b>SASARAN</b>		<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>
1	2		3		4	5
			5	Terwujudnya pemuda yang terampil	Edukasi	Motivator
			6	Terwujudnya olahragawan yang profesional	Edukasi	Atlet berprestasi

## **BAB VII**

### **KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH**

Kebijakan umum pada hakekatnya merupakan arah kebijakan pembangunan yang secara umum memberikan arahan konkrit bagi penentuan program-program pembangunan yang berdaya ungkit dalam menterjemahkan strategi yang telah ditetapkan, kemudian dijabarkan dengan target indikator kinerja beserta program-program prioritas sesuai dengan kewenangan menurut urusan pemerintahan yang harus dilaksanakan dengan mengedepankan penguatan sinergitas dengan program pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, baik dalam rangka penyelesaian berbagai permasalahan yang ada, menjalankan program yang bersifat mengikat seperti halnya dukungan pencapaian target pembangunan nasional dan pengentasan kemiskinan (*Pro Poor, Pro Job, Pro Growth, Pro Environment*), pemenuhan ketentuan perundang-undangan, program-program penunjang pertumbuhan ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja, peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan mutu pelayanan publik dan peningkatan infrastruktur untuk mendukung daya saing, maupun program yang bersifat pemenuhan Standar Pelayanan Minimal dan operasional pada masing-masing urusan pemerintahan dan pembangunan.

#### **7.1 Kebijakan Umum Pembangunan Daerah**

Kebijakan umum pembangunan Kabupaten Sumbawa Tahun 2016-2021 diarahkan untuk mewujudkan visi pembangunan yang akan diimplementasikan melalui 7 (tujuh) misi, dengan pendekatan pada 3 (tiga) agenda prioritas, yaitu; (1) agenda peningkatan daya saing, (2) agenda peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat, dan (3) agenda penguatan karakter kepribadian masyarakat.

##### **7.1.1 Kebijakan Umum Peningkatan Daya Saing.**

Dalam rangka meningkatkan daya saing, kebijakan pembangunan Kabupaten Sumbawa diarahkan untuk:

1. Peningkatan kualitas pendidikan dengan penekanan pada penajaman aksi wajib belajar 12 tahun untuk membangun infrastruktur pendidikan termasuk bersinergi dengan pemerintah provinsi dan pusat untuk membangun SMA/SMK di setiap kecamatan. Selain itu, juga akan disusun regulasi pelaksanaan pendidikan gratis di tingkat SMA/SMK, peningkatan kompetensi guru, penyediaan fasilitas penunjang mutu seperti laboratorium dan perpustakaan pada setiap sekolah serta menjamin ketersediaan buku mata pelajaran, pengalokasian Biaya Operasional Sekolah (BOSDA) PAUD, sinergi dengan pemerintah pusat dan/atau lembaga nirlaba lainnya dalam mengatasi kekurangan guru, serta pro aktif memfasilitasi usaha penegerian UNSA, serta menggalang kerjasama dalam berbagai program dengan Perguruan Tinggi yang ada di Kabupaten Sumbawa;
2. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat dengan penekanan pada upaya peningkatan Angka Harapan Hidup (AHH) serta memantapkan program desa siaga, menyelesaikan target satu desa satu Polindes, memberikan perhatian besar bagi desa bermasalah kesehatan (DBK) serta daerah terpencil dan pulau, penyelenggaraan pelayanan prima di Puskesmas dan mempercepat transformasi Puskesmas menjadi Badan Layanan Usaha



- Daerah (BLUD), meningkatkan kapasitas Puskesmas agar betul-betul bisa berfungsi menjadi puskesmas rawat inap, memantapkan pelayanan RSUD dan pembangunan RSUD yang baru, serta bersinergi dengan BPJS dalam meningkatkan kualitas dan mempermudah layanannya kepada masyarakat;
3. Memantapkan pelaksanaan berbagai agenda reformasi birokrasi dengan penekanan pada restrukturisasi kelembagaan (organisasi perangkat daerah) dengan mempertimbangkan adanya perubahan kewenangan daerah seiring dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, peningkatan mutu pelayanan publik dengan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai acuan kerja Perangkat Daerah, memastikan kredibilitas sistem pengisian jabatan melalui lelang terbuka dengan terlebih dahulu merampungkan Analisis Jabatan (Anjab), Standar Kompetensi Jabatan dan mengangkat panitia seleksi yang kredibel dan profesional, Peyerderhanaan sistem dan prosedur pelayanan perizinan dengan melaksanakan seutuhnya sistem pelayanan satu pintu, penerapan sistem pelayanan yang tertandarisasi pada perangkat daerah yang secara langsung melayani masyarakat, peningkatan pendapatan daerah, peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan dan akuntabilitas penyelenggaraan pembangunan daerah, peningkatan kesejahteraan aparatur melalui realokasi dan efisiensi belanja, peningkatan kapasitas POL-PP dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil agar mampu berperan dalam penegakan Peraturan Daerah, mewujudkan keterbukaan informasi publik melalui *website* resmi perangkat daerah yang terintegrasi dengan *website* pemerintah daerah, dimana Daftar Informasi Publik pada masing-masing perangkat daerah harus tersosialisasi kepada masyarakat luas, serta melakukan survey indeks kepuasan masyarakat dan mengoptimalkan sistem pengaduan masyarakat;
  4. Percepatan pembangunan infrastruktur dengan penekanan pada penuntaskan penyusunan rencana detail tata ruang kota sebagai acuan dalam pemanfaatan ruang; meningkatkan kondisi jalan Kabupaten dalam kondisi mantap 10 persen pertahun sehingga pada tahun 2021 sudah mencapai angka 100 persen; bersinergi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat dalam rangka mempertahankan status mantap pada jalan provinsi dan jalan negara, mengatasi ancaman banjir, revitalisasi jaringan irigasi pada seluruh Daerah Irigasi yang ada di Kabupaten Sumbawa, meningkatkan kapasitas Pelabuhan Badas dan bandara, merealisasikan pembangunan Pusat Listrik Tenaga Uap sehingga bisa mengatasi masalah kekuarangan daya listrik, melanjutkan program peningkatan kualitas perumahan dan permukiman melalui program bedah rumah dan penataan lingkungan permukiman; meningkatkan cakupan pelayanan air bersih baik yang dilayani oleh PDAM maupun yang dikelola sendiri oleh masyarakat, mengembangkan sistem *quality control* yang ketat agar kualitas bangunan pemerintah dapat meningkat kualitasnya hingga memenuhi umur teknis, serta mengembangkan sistem informasi berbasis spasial guna menunjang efektivitas perencanaan dan pengawasan pembangunan daerah.

#### **7.1.2 Kebijakan Umum Peningkatan Kemandirian Ekonomi Masyarakat.**

Dalam rangka meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat, kebijakan pembangunan Kabupaten Sumbawa diarahkan untuk:

1. Peningkatan nilai tambah komoditi unggulan daerah melalui pengembangan kegiatan industri berbasis pertanian dengan penekanan pada upaya mendorong pengembangan kegiatan industri berskala rumah tangga (*home industry*), kemudahan perizinan, keringanan pajak dan retribusi bagi investor yang membuka usaha di bidang agro industri, menjadikan desa sebagai basis pengembangan industri pertanian dengan konsep 'satu desa satu produk' (*one village one product*);
2. Peningkatkan produktivitas petani, peternak dan nelayan melalui peningkatan kuantitas, kualitas dan kontinuitas produk unggulan daerah dengan penekanan pada menjaga ketersediaan pupuk, bibit unggul, saprodi, dan membenahi sistem distribusinya tepat waktu dan tepat sasaran; peningkatan kompetensi penyuluh pertanian dan perikanan dalam meningkatkan kapasitas petani dan nelayan; pengembangan peternakan modern dengan sistem lar (*mini ranch*) untuk komoditi kerbau, sapi lokal maupun sapi hasil persilangan; serta bersinergi dengan pemerintah provinsi dalam rangka mensukseskan program pengembangan produk unggulan daerah;
3. Mendorong tumbuhnya aktivitas usaha masyarakat melalui pengembangan fasilitas perekonomian, dengan penekanan pada pembangunan pasar induk dan melaksanakan kegiatan revitalisasi pasar yang ada di kecamatan dan desa, membangun sentra-sentra perdagangan bagi pengembangan kegiatan UMKM, pengintegrasian pemanfaatan ruang publik dengan kegiatan penataan tempat usaha bagi UMKM, mengupayakan "desa bebas rentenir" melalui akses permodalan dan/atau skema kredit, serta memfasilitasi tumbuhnya wirausahawan baru melalui upaya pelatihan wira usaha, kemudahan akses permodalan dan insentif berupa sarana usaha;
4. Mendorong realisasi investasi agar bisa mendorong laju pertumbuhan perekonomian daerah dan penyerapan tenaga kerja, dengan penekanan pada kegiatan promosi daerah secara terpadu dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi maupun promosi langsung melalui berbagai even pameran berskala nasional maupun internasional, menciptakan image Kabupaten Sumbawa sebagai daerah ramah investasi, pencadangan kawasan untuk mendukung kegiatan investasi dalam berbagai bidang usaha melalui penetapan fungsi kawasan yang diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah;
5. Optimalisasi pemanfaatan sumberdaya alam secara berkelanjutan, dengan penekanan pada sinergi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat untuk pengembangan partisipasi masyarakat dalam mengelola sumberdaya hutan secara berkelanjutan melalui pengelolaan hutan kemasyarakatan, pemenuhan hak masyarakat atas kepemilikan lahan melalui program transmigrasi, pemenuhan hak dan akses masyarakat atas sumberdaya air yang cukup untuk berbagai kepentingan, seperti pertanian, perikanan ataupun kebutuhan domestik, penyediaan data informasi potensi sumberdaya alam berbasis spasial, serta pengembangan wisata berbasis lingkungan;
6. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup, dengan penekanan pada peningkatan peran kelompok masyarakat sadar lingkungan, desa siaga bencana, sarana dan prasarana penunjang evakuasi penanggulangan bencana, pelibatan masyarakat dalam pengembangan sistem peringatan dini terhadap adanya bencana alam, penyediaan sarana dan prasarana penunjang kebersihan lingkungan, penyediaan data dan informasi lingkungan hidup daerah, serta peningkatan

kepatuhan masyarakat dan dunia usaha terhadap berbagai regulasi di bidang lingkungan hidup;

### **7.1.3 Kebijakan Umum Penguatan Karakter Kepribadian Masyarakat.**

Dalam rangka penguatan karakter kepribadian masyarakat, kebijakan pembangunan Kabupaten Sumbawa diarahkan untuk:

1. Peningkatan kualitas Keimanan dan Ketaqwaan (IMTAQ) masyarakat, dengan penekanan pada keterlibatan pemerintah daerah dalam pembangunan dan peningkatan kapasitas tempat beribadah, peningkatkan kapasitas pemuka agama melalui berbagai pelatihan dan pembinaan, memfasilitasi pengembangan syiar keagamaan melalui berbagai kegiatan di rumah ibadah dan masyarakat secara langsung, serta meningkatkan ketersediaan sarana informasi yang edukatif;
2. Meningkatkan toleransi dan keharmonisan dalam masyarakat, dengan penekanan pada peningkatan peran pemuka agama dan pemuka masyarakat untuk mewujudkan toleransi antar umat bergama dan suku bangsa melalui Forum Komunikasi Umat Beragama dan Forum Lintas Etnis, serta peningkatan peran masyarakat dalam mendeteksi adanya paham radikal yang bisa mengancam harmoni kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara.
3. Melestarikan potensi budaya dan kearifan lokal, dengan penekanan pada peningkatan peran dan apresiasi masyarakat serta kelembagaannya untuk mengaktualisasikan nilai-nilai budaya, adat istiadat dan kearifan lokal yang menjadi jati diri masyarakat Sumbawa sehingga tetap lestari, pemeliharaan situs-situs budaya dan purbakala, bahasa, sastra, seni budaya dan sejarah daerah, peningkatan kapasitas pelaku seni budaya dan industri kreatif, kapasitas museum daerah dan pembentukan pusat kajian budaya, pengembangan potensi budaya baik melalui peningkatan daya saing kepariwisataan maupun kemanfaatannya bagi kesejahteraan masyarakat, serta peningkatan peran dan prestasi pemuda dan olahraga.

Kebijakan umum yang disajikan ini hanya yang bersifat prioritas, sedangkan untuk kebijakan umum dan program yang terkait penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimum (SPM) maupun operasional pemerintahan dijabarkan lebih detail dan lengkap dalam Rencana Strategis (Renstra) masing-masing Perangkat Daerah.

## **7.2 Program Pembangunan Daerah**

Program-program pembangunan daerah di dalam RPJMD ini menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun program dan kegiatan operasionalnya yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD), serta acuan dalam menyusun dan menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang dilakukan setiap tahun. Penetapan program pembangunan daerah untuk 5 (lima) tahun kedepan dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang berpedoman kepada strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya, termasuk program-program terkait penterjemahan janji-janji politik Bupati dan Wakil Bupati pada saat kampanye.

Program Pembangunan daerah menurut misi dan urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dikaitkan dengan sasaran, strategi dan arah kebijakan serta perangkat daerah penanggung jawab, disajikan sebagai berikut.

**Tabel 7.1**  
**Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah**

No	Sasaran	Strategi dan arah kebijakan	Kebijakan Umum	Indikator Kinerja ( <i>outcome</i> )	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang/ Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
1	2	3		4	5	6	7	8	9
<b>Misi 1: Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat</b>									
1	Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan yang memadai	Fasilitasi yang diarahkan pada PAUD perdesaan dan perkotaan yang memadai	Kerjasama dengan Pemerintah Desa dan Masyarakat	Cakupan PAUD yang difasilitasi biaya operasionalnya	71%	100%	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Pendidikan	Dinas Diknas, BPM-PD dan Pemerintah Desa
2	Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan dasar yang memadai sesuai dengan SPM	Konstruksi dan rehabilitasi yang diarahkan pada Gedung SD dan penunjang yang memadai sesuai dengan SPM	Kerjasama dengan Pihak Ketiga	Rasio RK/Rombel SD	1 RK : 1,06 Rombel	1 RK : 1 Rombel	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun	Pendidikan	Dinas Diknas
				Persentase SD/MI yang memenuhi SPM	0	100%	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Pendidikan	Dinas Diknas
		Konstruksi dan rehabilitasi yang diarahkan pada Gedung SD dan penunjang yang memadai sesuai	Kerjasama dengan Pihak Ketiga	Rasio RK/Rombel SMP	1 RK : 1,01 Rombel	1 RK : 1 Rombel	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun	Pendidikan	Dinas Diknas
				Persentase SMP/MTs yang	0	100%	Program Manajemen	Pendidikan	Dinas Diknas

No	Sasaran	Strategi dan arah kebijakan	Kebijakan Umum	Indikator Kinerja ( <i>outcome</i> )	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang/ Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
1	2	3		4	5	6	7	8	9
		dengan SPM		memenuhi SPM			Pelayanan Pendidikan		
3	Tersedianya sumberdaya pendidik/tenaga kependidikan yang berkualitas dan profesional	Edukasi dan koordinasi yang diarahkan pada Pendidik PAUD, Guru SD dan SMP yang berkualitas dan profesional	Kerjasama dengan Lembaga pendidikan	Rasio pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional	20%	70%	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pendidikan	Dinas Diknas
4	Tersedianya kurikulum di satuan pendidikan dan lembaga kursus sesuai standar	Sosialisasi yang diarahkan pada Workshop oleh mentor yang sesuai standar	Kerjasama dengan Lembaga pendidikan	Daya serap peserta didik terhadap muatan kurikulum	N/A	100%	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun	Pendidikan	Dinas Diknas
5	Tersedianya sarana dan prasarana kesehatan yang memadai sesuai standar	Konstruksi dan rehabilitasi yang diarahkan pada Rumah sakit umum daerah yang memadai sesuai standar	Kerjasama dengan Pihak Ketiga	Bed Occupancy ratio (BOR)	104%	80%	Program Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana Rumah sakit	Kesehatan	RSUD

No	Sasaran	Strategi dan arah kebijakan	Kebijakan Umum	Indikator Kinerja ( <i>outcome</i> )	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang/ Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
1	2	3		4	5	6	7	8	9
		Konstruksi dan rehabilitasi yang diarahkan pada Rumah sakit umum daerah yang memadai sesuai standar	Kerjasama dengan Pihak Ketiga	Cakupan rawat jalan di puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	62.40%	65%	Program Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	Kesehatan	Dinas Kesehatan
6	Tersedianya sumberdaya tenaga kesehatan yang berkualitas dan profesional	Edukasi dan koordinasi yang diarahkan pada Tenaga medis/paramedis di rumah sakit umum dan puskesmas/jaringannya yang berkualitas dan profesional	Kerjasama dengan Pihak Ketiga	Rasio dokter per satuan penduduk	100%	100%	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Kesehatan	Dinas Kesehatan
7	Tersedianya bahan dan peralatan kesehatan sesuai kebutuhan	Transaksi yang diarahkan pada Obat, perbekalan dan peralatan kesehatan yang sesuai kebutuhan	Kerjasama dengan Pihak Ketiga	Cakupan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan bagi masyarakat yang tersedia	100%	100%	Program obat dan pembekalan kesehatan	Kesehatan	Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Strategi dan arah kebijakan	Kebijakan Umum	Indikator Kinerja ( <i>outcome</i> )	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang/ Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
1	2	3		4	5	6	7	8	9
8	Tersedianya sarana prasarana pelayanan sosial dasar yang memadai	Konstruksi dan rehabilitasi yang diarahkan pada Rumah singgah, panti dan loka bina karya (LBK) yang memadai	Kerjasama dengan Pihak Ketiga	Cakupan rumah singgah, panti dan LBK yang ditangani	100%	100%	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Sosial	Dinas Sosial
		Konstruksi dan rehabilitasi yang diarahkan pada Rumah singgah, panti dan loka bina karya (LBK) yang memadai	Kerjasama dengan Pihak Ketiga	cakupan sarana penunjang LBK	0%	100%	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Sosial	Dinas Sosial
	termanfaatkannya data basis kemiskinan terpadu yang menyeluruh	Koordinasi, sinergi dan integrasi yang diarahkan pada Perangkat daerah yang memadai	Kerjasama dengan lembaga pendampingan untuk perempuan pelaku usaha	Persentase penduduk miskin dalam basis data terpadu yang tertangani	0%	70%	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Sosial	Dinas Sosial
9	Tersedianya tenaga sosial yang terampil dan profesional	Edukasi dan fasilitasi yang diarahkan pada Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terampil dan profesional	Penataan infrastruktur pendukung	Rasio PSKS terhadap jumlah penduduk	150	990	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Sosial	Dinas Sosial

No	Sasaran	Strategi dan arah kebijakan	Kebijakan Umum	Indikator Kinerja ( <i>outcome</i> )	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang/ Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
1	2	3		4	5	6	7	8	9
10	Tersedianya bantuan sosial yang memadai	Distribusi dan fasilitasi yang diarahkan pada PMKS yang memadai	kerjasama dengan lembaga donor	Cakupan PMKS yang mendapatkan bantuan layanan sosial	26.61	50.00	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Sosial	Dinas Sosial
11	Tersedianya tenaga pendamping yang memadai	Edukasi dan fasilitasi yang diarahkan pada Perempuan pelaku usaha yang memadai	kerjasama dengan lembaga donor	Persentase Tenaga pendamping per satuan penduduk	5%	50%	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak	BKBPP
12	Tersedianya sarana pendukung perempuan yang memadai	Revitalisasi yang diarahkan pada Perempuan yang bergerak dibidang usaha dan korban kekerasan yang memadai	kerjasama dengan lembaga donor	cakupan perempuan korban kekerasan yang difasilitasi	N/A	50%	Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak	BKBPP
12	Tersedianya skema permodalan usaha yang memadai	Distribusi dan fasilitasi yang diarahkan pada Perempuan yang bergerak dibidang usaha dan korban kekerasan yang	kerjasama dengan lembaga donor	Cakupan perempuan korban kekerasan yang difasilitasi	N/A	50%	Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak	BKBPP



No	Sasaran	Strategi dan arah kebijakan	Kebijakan Umum	Indikator Kinerja ( <i>outcome</i> )	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang/ Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
1	2	3		4	5	6	7	8	9
		memadai							
13	Tersedianya tenaga pendamping perlindungan anak yang memadai	Edukasi dan fasilitasi yang diarahkan pada Anak korban tindak kekerasan yang memadai	kerjasama dengan lembaga perlindungan untuk anak	Tingkat penyelesaian kasus kekerasan terhadap anak	N/A	100%	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak	BKBPP
14	Tersedianya P2TP2A yang merata	Revitalisasi, fasilitasi dan koordinasi yang diarahkan pada P2TP2A tingkat kabupaten dan kecamatan yang merata	Penataan infrastruktur pendukung	Jumlah P2TP2A yang dibentuk	24%	100%	Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak	BKBPP
15	tersedianya informasi hak perempuan dan anak yang memadai	Komunikasi, edukasi dan fasilitasi yang diarahkan pada Masyarakat yang memadai	Kerjasama dengan lembaga pendidikan	Jumlah media publikasi	3 Media	3 Media	Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak	BKBPP

No	Sasaran	Strategi dan arah kebijakan	Kebijakan Umum	Indikator Kinerja ( <i>outcome</i> )	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang/ Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
1	2	3		4	5	6	7	8	9
16	Tersedianya sumberdaya sarana dan prasarana keluarga berencana yang memadai	Konstruksi dan rehabilitasi yang diarahkan pada UPT Keluarga berencana Kecamatan yang memadai	Kerjasama dengan Pihak Ketiga	Persentase UPT yang memadai	N/A	100%	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	BKBPP
17	Tersedianya tenaga pendamping/kader yang berkualitas dan profesional	Edukasi dan Fasilitasi yang diarahkan pada kader yang berkualitas dan profesional	Kerjasama dengan lembaga pendidikan	cakupan layanan penyuluh terhadap jumlah PUS	24kec (100%)	24kec (100%)	Program Keluarga berencana	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	BKBPP
18	Tersedianya layanan keluarga berencana dan keluarga sejahtera yang merata dan berkualitas	Komunikasi, informasi dan edukasi yang diarahkan pada Pasangan usia subur yang merata dan berkualitas	Kerjasama dengan lembaga pendidikan	Cakupan pemakaian kontrasepsi (CPR)	77.43%	65%	Program Keluarga berencana	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	BKBPP
19	Tersedianya skema permodalan usaha yang memadai	Distribusi dan fasilitasi yang diarahkan pada Keluarga Pra sejahtera yang memadai	Kerjasama dengan lembaga donor	persentase keluarga pra sejahtera yang terfasilitasi	N/A	100%	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	BKBPP

No	Sasaran	Strategi dan arah kebijakan	Kebijakan Umum	Indikator Kinerja ( <i>outcome</i> )	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang/ Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
1	2	3		4	5	6	7	8	9
20	Tersedianya sarana dan prasarana perpustakaan yang sesuai kebutuhan	Konstruksi yang diarahkan pada Perpustakaan daerah, perpustakaan desa, perpustakaan sekolah yang sesuai kebutuhan	Kerjasama dengan Pihak Ketiga	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	42,917	48,000	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Perpustakaan	Arpusda
		distribusi yang diarahkan pada Buku bacaan yang sesuai kebutuhan	Kerjasama dengan lembaga pendidikan	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah (eksp)	2,400	7500	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Perpustakaan	Arpusda
20	Tersedianya pengelola perpustakaan yang memadai dan profesional	Fasilitasi dan edukasi yang diarahkan pada Pustakawan yang memadai dan profesional	Kerjasama dengan lembaga pendidikan	Rasio pustakawan terhadap jumlah perpustakaan	N/A	100%	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Perpustakaan	Arpusda
		Fasilitasi dan edukasi yang diarahkan pada Operator digitasi yang memadai dan profesional	Kerjasama dengan lembaga pendidikan	Rasio jumlah operator terhadap koleksi	N/A	100%	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Perpustakaan	Arpusda
<b>Misi 2: Mewujudkan birokrasi yang bersih, handal dan profesional sehingga mampu menjalankan pemerintahan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>)</b>									

No	Sasaran	Strategi dan arah kebijakan	Kebijakan Umum	Indikator Kinerja ( <i>outcome</i> )	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang/ Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
1	2	3		4	5	6	7	8	9
1	Tersedianya sarana dan prasarana Pemerintahan Umum yang representatif	Konstruksi, rehabilitasi yang diarahkan pada Kantor Perangkat Daerah yang representatif	Kerjasama dengan Pihak Ketiga	Persentase Perangkat daerah	50.00%	100%	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Setda
		Akuisisi yang diarahkan pada Tanah milik masyarakat yang representatif	Kerjasama dengan masyarakat dan BPN	Cakupan realisasi pengadaan lahan oleh pemerintah daerah	95.00%	100.00%	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah	Pertanahan	Setda
2	Tersedianya sumber daya aparatur yang profesional	Edukasi dan Fasilitasi yang diarahkan pada Aparatur Sipil Negara yang profesional	Kerjasama dengan lembaga pendidikan	Kinerja aparatur	100.00%	100.00%	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	BKPP
3	Tersedianya data aset daerah yang akurat	Inventarisasi yang diarahkan pada gedung dan tanah yang akurat	Penetapan aset milik Pemda	Cakupan aset tanah milik pemerintah daerah yang dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kec/Kel	98.28%	98.66%	Program penataan penguasaan, pemilikan, pengguna dan pemanfaatan	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Setda

No	Sasaran	Strategi dan arah kebijakan	Kebijakan Umum	Indikator Kinerja ( <i>outcome</i> )	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang/ Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
1	2	3		4	5	6	7	8	9
				/desa'/pihak ketiga			tanah		
4	Tersedianya Dokumen Perencanaan keuangan daerah yang akuntabel	Inventarisasi dan formulasi yang diarahkan pada APBD yang akuntabel	Penyusunan dan penetapan APBD	Dokumen Perda APBD dan Perubahan APBD tepat waktu	2 Perda	10 Perda (Kumulatif)	Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	
5	Tersedianya laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang akuntabel	Inventarisasi, reportasi, yang diarahkan pada Laporan pertanggung jawaban APBD yang akuntabel	Kerjasama dengan lembaga audit dan pengawas keuangan	Dokumen perda pertanggung jawaban APBD	1 Perda	5 Perda (Kumulatif)	Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	DPPK
				Opini BPK	WTP	WTP	Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	DPPK

No	Sasaran	Strategi dan arah kebijakan	Kebijakan Umum	Indikator Kinerja ( <i>outcome</i> )	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang/ Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
1	2	3		4	5	6	7	8	9
6	Terkelolanya sumber-sumber PAD dan sumber pendapatan daerah yang optimal	Intensifikasi dan ekstensifikasi yang diarahkan pada Kinerja PAD yang optimal	Kerjasama dengan dunia usaha dan pihak ketiga	Cakupan Ketersediaan regulasi pengembangan sumber PAD yang akuntabel	N/A	100%	Program Peningkatan Dan Pengendalian Penerimaan Daerah	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	DPPK
				Cakupan Ketersediaan sistem layanan pungutan dan pelaporan realisasi PAD yang efektif dan terimplementasikan	Tersedia	Terimplementasikan (100%)	Program Peningkatan Dan Pengendalian Penerimaan Daerah	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	DPPK
				Pertumbuhan target dan realisasi PAD	Target= 9,21% Realisasi= 6,22%	Target= 10,07% Realisasi= 10,07%	Program Peningkatan Dan Pengendalian Penerimaan Daerah	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	DPPK

No	Sasaran	Strategi dan arah kebijakan	Kebijakan Umum	Indikator Kinerja ( <i>outcome</i> )	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang/ Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
1	2	3		4	5	6	7	8	9
7	<b>Tersedianya produk hukum daerah yang sesuai dengan kebutuhan</b>	Inventarisasi, formulasi yang diarahkan pada Jumlah produk hukum daerah yang sesuai kebutuhan	Penyusunan dan penetapan produk hukum daerah	Jumlah produk hukum daerah yang diterbitkan	15 Perda, 30 Perbup, 500 SK Bupati	75 Perda, 150 Perbup, 2500 SK Bupati	Program penataan peraturan perundang-undangan	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Setda
8	Tersedianya struktur dan tata laksana perangkat daerah yang sesuai dengan kebutuhan	Investigasi, formulasi yang diarahkan pada OPD yang sesuai kebutuhan	Penyusunan dan penetapan OPD sesuai peraturan perundang-undangan	Jumlah OPD	15 OPD	15 OPD	Program peningkatan kelembagaan dan ketataaksanaan	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Setda
9	Terlayannya keperluan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara prima	Fasilitasi yang diarahkan pada Kepala/Wakil Kepala Daerah secara prima	Penyusunan dan penetapan SOP fasilitas Bupati dan wakil bupati	Daya tanggap	100%	100%	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Setda
10	Tersedianya hasil evaluasi pembangunan daerah yang valid	Inventarisasi, rekapitulasi, verifikasi dan formulasi yang diarahkan pada Laporan pelaksanaan pembangunan yang valid	Penyusunan dan penetapan laporan pelaksanaan pembangunan yang valid	Daya serap anggaran	N/A	100%	Program pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Setda

No	Sasaran	Strategi dan arah kebijakan	Kebijakan Umum	Indikator Kinerja ( <i>outcome</i> )	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang/ Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
1	2	3		4	5	6	7	8	9
11	Terwujudnya sistem pengadaan barang dan jasa yang sesuai peraturan	Implementasi yang diarahkan pada SOP Pengadaan yang sesuai kebutuhan	Penyusunan dan penetapan SOP pengadaan	cakupan pengadaan barang/jasa	N/A	100%	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Pembangunan	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Setda
12	Tersedianya rekomendasi usaha yang sesuai dengan lapangan usaha	Verifikasi, inventarisasi, visitasi yang diarahkan pada Dokumen perijinan yang sesuai dengan lapangan	Penyusunan dan penetapan Dokumen perijinan	daya saing daerah	100%	100%	Program Peningkatan Pelayanan Izin Usaha	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	KPPT
13	Tersedianya sistem Teknologi informasi kepegawaian yang terintegrasi	Koordinasi, konsultasi dan Konsolidasi yang diarahkan pada SIMPEG yang terintegrasi	Penerapan SIMPEG yang terintegrasi	Kecepatan layanan informasi kepegawaian	8.453 Pegawai (100%)	8.053 Pegawai (100%)	Program penataan sistem administratif arsip kepegawaian	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	BKPP
14	Tersedianya tenaga pengelola yang trampil	Edukasi yang diarahkan pada Operator SIMPEG yang trampil	Kerjasama dengan badan diklat	rasio jumlah operator terhadap jumlah dokumen kepegawaian	100%	100%	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	BKPP



No	Sasaran	Strategi dan arah kebijakan	Kebijakan Umum	Indikator Kinerja ( <i>outcome</i> )	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang/ Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
1	2	3		4	5	6	7	8	9
15	Tersedianya sarana penunjang yang memadai	Transaksi dan distribusi yang diarahkan pada sarana mobilitas yang memadai	Kerjasama dengan pihak ketiga	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100%	100%	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	Satpol PP
16	Tersedianya sumber daya penunjang yang profesional	Edukasi yang diarahkan pada Polisi Pamong Praja yang profesional	Kerjasama dengan badan diklat	Cakupan kasus kriminalitas yang tertangani	100%	100%	Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	Satpol PP
17	Tersedianya tenaga pengawas yang profesional	Edukasi dan fasilitasi yang diarahkan pada Auditor/ APIP yang profesional	Kerjasama dengan lembaga diklat	Tingkat kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) pada level 3	N/A	85%	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Inspektorat
18	Tersedianya sarana dan prasarana Pemerintahan Umum yang representatif	Konstruksi dan rehabilitasi yang diarahkan pada Kantor Perangkat Daerah yang presentatif	Kerjasama dengan pihak ketiga	daya tampung	50%	100%	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Inspektorat

No	Sasaran	Strategi dan arah kebijakan	Kebijakan Umum	Indikator Kinerja ( <i>outcome</i> )	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang/ Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
1	2	3		4	5	6	7	8	9
19	Tersedianya sistem pengendalian intern organisasi perangkat daerah yang terintegrasi	Implementasi yang diarahkan pada Sistem pengendalian intern Pemerintah (SPIP) yang terintegrasi	Penyusunan dan penetapan SPIP yang terintegrasi	Tingkat maturitas SPIP level 3	N/A	85%	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Inspektorat
20	Tersedianya sarana yang memadai	Transaksi dan distribusi yang diarahkan pada Kendaraan operasional yang memadai	Kerjasama dengan lembaga diklat	daya tampung	50%	100%	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Inspektorat
21	Tersedianya sumberdaya aparatur yang profesional	Edukasi dan fasilitasi yang diarahkan pada Polisi Pamong Praja dan petugas Linmas yang profesional	Kerjasama dengan lembaga diklat	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja terfasilitasi per 10.000 penduduk	3.49	3,56	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	Satpol PP
				Rasio jumlah Linmas yang terfasilitasi per Jumlah 10.000 Penduduk	54.27	55.36	Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	Satpol PP

No	Sasaran	Strategi dan arah kebijakan	Kebijakan Umum	Indikator Kinerja ( <i>outcome</i> )	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang/ Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
1	2	3		4	5	6	7	8	9
22	Terwujudnya kondisi sosial politik yang kondusif	Koordinasi yang diarahkan pada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yang kondusif		Tingkat pemahaman rasa persatuan & kesatuan bangsa dan 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara (Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika)	100%	100%	Program kemitraan pengembangan dan kebangsaan	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	Kesbangpolda gri
23	Tersedianya sarana yang memadai	Transaksi dan distribusi yang diarahkan pada alat perekaman data kependudukan yang memadai	Kerjasama dengan pihak ketiga	Persentase dokumen kependudukan	58.16	100%	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Dinas Dukcapil
24	Tersedianya sumberdaya manusia yang profesional	Edukasi yang diarahkan pada operator yang profesional	Kerjasama dengan lembaga diklat	Cakupan sumber daya manusia yang profesional	100%	100%	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Dinas Dukcapil

No	Sasaran	Strategi dan arah kebijakan	Kebijakan Umum	Indikator Kinerja ( <i>outcome</i> )	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang/ Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
1	2	3		4	5	6	7	8	9
25	Termanfaatkannya sistem administrasi kependudukan secara optimal	Sinkronisasi dan integrasi yang diarahkan pada Lingkup pelayanan yang optimal	Penerapan SIAK	Cakupan Perangkat Daerah yang terintegrasi dalam SIAK	N/a	100%	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Dinas Dukcapil
26	Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai	Rehabilitasi yang diarahkan pada Gedung Bappeda yang memadai	Kerjasama dengan pihak ketiga	Daya tampung	50%	100%	Program peningkatan sarana dan prasara aparatur	Penunjang urusan pemerintah daerah	Bappeda
27	Tersedianya sumberdaya manusia yang profesional	Edukasi yang diarahkan pada Perencana yang memadai	Kerjasama dengan badan diklat	Cakupan tenaga perencana yang ditingkatkan kapasitasnya	N/A	100%	Program Peningkatan kualitas sumber daya aparatur	Penunjang urusan pemerintah daerah	Bappeda
28		Sinkronisasi dan koordinasi yang diarahkan pada SOP Perencanaan yang terintegrasi	Penyusunan dan penetapan SOP perencanaan yang terintegrasi	Ketersediaan data/dokumen perencanaan daerah	100%	100%	Program perencanaan pengembangan kota kota besar	Penunjang urusan pemerintah daerah	Bappeda
							Program perencanaan pembangunan daerah	Penunjang urusan pemerintah daerah	Bappeda

No	Sasaran	Strategi dan arah kebijakan	Kebijakan Umum	Indikator Kinerja ( <i>outcome</i> )	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang/ Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
1	2	3		4	5	6	7	8	9
							Program perencanaan pembangunan ekonomi	Penunjang urusan pemerintah daerah	Bappeda
							Program perencanaan sosial budaya	Penunjang urusan pemerintah daerah	Bappeda
							Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	Penunjang urusan pemerintah daerah	Bappeda
29	Tersedianya sarana dan prasarana kearsipan yang memadai	Konstruksi yang diarahkan pada Depo Arsip yang memadai	Kerjasama dengan pihak ketiga	Penerapan pengelolaan arsip secara baku (%)	8.9	100%	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	Kearsipan	Kantor Arpusda
30	Tersedianya sumberdaya manusia yang profesional	Edukasi yang diarahkan pada Arsiparis yang profesional	Kerjasama dengan badan diklat	Persentase pengelola arsip terpadu	100%	100%	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	Kearsipan	Kantor Arpusda

No	Sasaran	Strategi dan arah kebijakan	Kebijakan Umum	Indikator Kinerja ( <i>outcome</i> )	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang/ Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
1	2	3		4	5	6	7	8	9
31	Tersedianya sistem kearsipan yang akuntabel	Formulasi yang diarahkan pada SOP Kearsipan yang akuntabel	Penyusunan dan penetapan SOP kearsipan yang akuntabel	Cakupan Sistem pengelolaan kearsipan berbasis IT ( E-Archive)	0%	100%	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	Kearsipan	Kantor Arpusda
				Cakupan arsip daerah yang terpelihara	24.396	40.64	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	Kearsipan	Kantor Arpusda
32	Tersedianya sarana persandian yang memadai	Transaksi yang diarahkan pada Alat persandian yang memadai	Kerjasama dengan pihak ketiga	Cakupan ketersediaan sarana prasarana persandian	20%	100%	Program Penataan dan Pengembangan Kesandian Daerah	Persandian	Setda
33	Tersedianya sumberdaya manusia yang terampil	Edukasi yang diarahkan pada Fungsional persandian yang terampil	Kerjasama dengan badan diklat	Cakupan fungsional persandian yang profesional	20%	100%	Program Penataan dan Pengembangan Kesandian Daerah	Persandian	Setda
34									

**Misi 3: Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur dengan membangun sinergi yang kuat dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi**

No	Sasaran	Strategi dan arah kebijakan	Kebijakan Umum	Indikator Kinerja ( <i>outcome</i> )	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang/ Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
1	2	3		4	5	6	7	8	9
1	Tersedianya infrastruktur jalan yang mantap	Konstruksi dan rehabilitasi yang diarahkan pada Wilayah potensial terisolir ruas yang belum mantap dan kritis yang mantap	Kerjasama dengan pihak ketiga	Persentase penambahan panjang jalan/jembatan baru	N/A	10%	Program rehabilitasi /pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Pekerjaan umum dan Penataan Ruang	Dinas PU
		Koordinasi dan konsultasi yang diarahkan pada Jalan Nasional dan Propinsi yang mantap	Kerjasama dengan Pemerintah Pusat dan Propinsi dalam rangka mendorong penguatan infrastruktur jalan di daerah	Proporsi panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap	60.72%	100%	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Pekerjaan umum dan Penataan Ruang	Dinas PU
							Program inspeksi kondisi Jalan dan Jembatan	Pekerjaan umum dan Penataan Ruang	Dinas PU
2	Tersedianya infrastruktur air baku yang sesuai kebutuhan	Konstruksi, rehabilitasi yang diarahkan pada Bendung, bendungan, embung, di wilayah kritis yang sesuai kebutuhan	Kerjasama dengan pihak ketiga	Proporsi jaringan irigasi kewenangan kabupaten dalam kondisi baik	53.3	100%	Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air	Pekerjaan umum dan Penataan Ruang	Dinas PU

No	Sasaran	Strategi dan arah kebijakan	Kebijakan Umum	Indikator Kinerja ( <i>outcome</i> )	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang/ Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
1	2	3		4	5	6	7	8	9
		Koordinasi dan konsultasi yang diarahkan pada Infrastruktur SDA kewenangan Pusat dan Propinsi yang sesuai kebutuhan	Kerjasama dengan Pemerintah Pusat dan Propinsi dalam rangka mendorong penguatan infrastruktur sumber daya air di daerah				lainnya		
4	Tersedianya sumber daya pengelola yang kompeten	Fasilitasi dan Edukasi yang diarahkan pada Petani pemakai air yang kompeten	Kerjasama dengan masyarakat / petani pemakai air	Persentase P3A/GP3A yang dibina	35%	49%	Program penyediaan dan pengelolaan air baku	Pekerjaan Umum	Dinas PU
							Program Peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Pertanian	Dinas Pertanian
5	Tersedianya sistem pengelolaan irigasi secara partisipatif	Formulasi yang diarahkan pada Perbup, Perkada, SK, SE, secara partisipatif	Penyusunan dan penetapan produk hukum daerah	Persentase P3A/GP3A yang dibentuk	35%	49%	Program penyediaan dan pengelolaan air baku	Pekerjaan Umum	Dinas PU



No	Sasaran	Strategi dan arah kebijakan	Kebijakan Umum	Indikator Kinerja ( <i>outcome</i> )	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang/ Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
1	2	3		4	5	6	7	8	9
							Program Peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Pertanian	Dinas Pertanian
6	Tersedianya dokumen tata ruang sesuai peraturan	Formulasi yang diarahkan pada Kawasan strategis kabupaten yang sesuai peraturan	Penetapan dan legislasi kawasan strategis kabupaten	Jumlah dokumen Peraturan Daerah tentang rencana tata ruang (RTRW, RDTR dan RTR KSK)	1	5	Program Perencanaan Tata Ruang	Pekerjaan umum dan Penataan Ruang	Dinas PU
7	Terwujudnya masyarakat yang sadar tata ruang	Sosialisasi yang diarahkan pada Masyarakat perkotaan yang sadar tata ruang	Distribusi dokumen tata ruang ke seluruh stakeholders	Cakupan kecamatan yang tersosialisasi pemanfaatan ruang	N/A	100%	Program Pemanfaatan Ruang	Pekerjaan umum dan Penataan Ruang	Dinas PU
8	Terkendalinya pemanfaatan ruang sesuai peraturan	Rekomendasi yang diarahkan pada Wilayah perkotaan yang sesuai peraturan	Arahan penggunaan lahan yang sesuai dengan arahan/peruntukannya	Cakupan rekomendasi kesesuaian pemanfaatan ruang yang diterbitkan	N/A	100 Rekomendasi	Program Perencanaan Tata Ruang	Pekerjaan umum dan Penataan Ruang	Dinas PU

No	Sasaran	Strategi dan arah kebijakan	Kebijakan Umum	Indikator Kinerja ( <i>outcome</i> )	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang/ Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
1	2	3		4	5	6	7	8	9
9	Tersedianya sarana prasarana lingkungan yang memadai	Konstruksi, revitalisasi, rehabilitasi yang diarahkan pada Pemukiman kumuh yang memadai	Kerjasama dengan pihak ketiga	Jumlah kawasan permukiman kumuh yang ditangani	40 kws	100 kws	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Dinas PU
10	Tersedianya sarana dan prasarana perhubungan yang sesuai standar keselamatan	Konstruksi, revitalisasi, rehabilitasi, koordinasi dan konsultasi yang diarahkan pada Sarana prasarana perhubungan darat yang sesuai standar keselamatan	Kerjasama dengan pihak ketiga	Cakupan arus penumpang (multi-moda) yang terlayani	527,634	1,000,000	Program peningkatan pelayanan angkutan	Urusan Perhubungan	Dishubkominfo
				Jumlah arus barang (multi-moda) yang terlayani	1,172,250	2,000,000	Program peningkatan pelayanan angkutan	Urusan Perhubungan	Dishubkominfo
11	Terfasilitasinya penyediaan sarana dan prasarana komunikasi yang memadai	Koordinasi dan konsultasi yang diarahkan pada Dana Universal Service Obligation (USO) Kemenkominfo yang memadai	Sinergitas program dengan pemerintah pusat	rasio wilayah kecamatan yang terjangkau akses telekomunikasi	83%	100%	Program Pengembangan Teknologi Informatika	Urusan Komunikasi dan informatika	Dishubkominfo

No	Sasaran	Strategi dan arah kebijakan	Kebijakan Umum	Indikator Kinerja ( <i>outcome</i> )	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang/ Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
1	2	3		4	5	6	7	8	9
12	Tersedianya lahan transmigrasi yang layak huni	Alokasi yang diarahkan pada Wilayah yang jarang penduduk dan potensial yang layak huni	Distribusi dan optimalisasi ruang kawasan	Cakupan wilayah transmigrasi yang terfasilitasi dan dikembangkan	100%	100%	Program pengembangan wilayah transmigrasi	Transmigrasi	Disnakertrans
13	Tersedianya sarana prasarana wilayah transmigrasi yang sesuai kebutuhan	Konstruksi yang diarahkan pada Fasilitas umum yang sesuai kebutuhan	Kerjasama dengan pihak ketiga	Cakupan ketersediaan sarana prasarana di wilayah transmigrasi	7 unit	14 Unit	Program pengembangan wilayah transmigrasi	Transmigrasi	Disnakertrans
14	Terwujudnya transmigran yang mandiri	Edukasi dan fasilitasi yang diarahkan pada Kewirausahaan yang mandiri	Kerjasama dengan lembaga pelatihan	Cakupan Transmigrasn yang dibina	100 KK	200 KK	Program pengembangan wilayah transmigrasi	Transmigrasi	Disnakertrans
15	Tersedianya sarana prasarana perdesaan yang memadai	Konstruksi dan rehabilitasi yang diarahkan pada Sarpras perekonomian, sosial dasar dan pemerintahan yang memadai	Kerjasama dengan pihak ketiga	Cakupan masyarakat yang berkapasitas dalam membangun desa	100 KK	200 KK	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Pemberdayaan masyarakat dan Desa	BPM-PD

No	Sasaran	Strategi dan arah kebijakan	Kebijakan Umum	Indikator Kinerja ( <i>outcome</i> )	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang/ Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
1	2	3		4	5	6	7	8	9
16	Tersedianya sumberdaya manusia yang terampil	Edukasi dan sosialisasi yang diarahkan pada Perangkat desa dan BPD yang terampil	Kerjasama dengan lembaga pelatihan	Cakupan aparatur pemerintahan desa yang berkualitas	100%	100%	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Pemberdayaan masyarakat dan Desa	BPM-PD
17	Tersedianya regulasi desa yang sesuai kebutuhan dan sejalan dengan peraturan perundang-undangan	Fasilitasi, formulasi dan sinkronisasi yang diarahkan pada Perdes yang sesuai kebutuhan dan sejalan dengan peraturan perundang-undangan	Kerjasama dengan Pemerintah Desa	Persentase peraturan desa yang dihasilkan	99%	100%	Program Pengembangan dan Penataan Desa dan Kelurahan	Pemberdayaan masyarakat dan Desa	BPM-PD
18	Tersusunnya rencana pembangunan kawasan pedesaan yang sesuai potensi	Formulasi yang diarahkan pada Kawasan pertanian, perikanan, wisata yang sesuai potensi	Penyusunan dan penetapan kawasan pertanian, perikanan dan wisata sesuai potensi	Cakupan penerapan sistem pengembangan tata masyarakat	100%	100%	Program Pengembangan dan Penataan Desa dan Kelurahan	Pemberdayaan masyarakat dan Desa	BPM-PD
19	Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan desa yang sesuai kebutuhan	Fasilitasi dan sinkronisasi yang diarahkan pada RPJM Desa dan RKP Desa yang sesuai kebutuhan	Kerjasama dengan Pemerintah Desa	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa secara mandiri dan berkelanjutan	100%	100%	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun	Pemberdayaan masyarakat dan Desa	BPM-PD

No	Sasaran	Strategi dan arah kebijakan	Kebijakan Umum	Indikator Kinerja ( <i>outcome</i> )	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang/ Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
1	2	3		4	5	6	7	8	9
							desa		
20	Terbentuknya lembaga ekonomi pedesaan yang mandiri	Fasilitasi, edukasi yang diarahkan pada Badan usaha milik desa yang mandiri	Kerjasama dengan Pemerintah Desa	Cakupan lembaga ekonomi pedesaan yang berkualitas	100%	100%	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Pemberdayaan masyarakat dan Desa	BPM-PD
21	Terpeliharanya situasi trantib secara berkesinambungan	Koordinasi, sosialisasi dan mediasi yang diarahkan pada Rakor, dakwah/khotbah secara berkesinambungan	Kerjasama dengan Pemerintah Desa	Cakupan operasi gabungan yang terlaksana	100%	100%	Program Pemeliharaan Ketrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Pemberdayaan masyarakat dan Desa	BPM-PD,
				Cakupan kasus kriminalitas yang tertangani	100%	100%			
22	Tercegah semakin banyaknya sertifikat ganda dan yang tidak memiliki sertifikat	Fasilitasi yang diarahkan pada Kawasan potensial yang tidak memiliki setifikat	Kerjasama dengan BPN	Rasio penerbitan sertifikat terhadap pengajuan sertifikat	45.05		Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah	Urusan Pertanahan	Sekretariat Daerah

No	Sasaran	Strategi dan arah kebijakan	Kebijakan Umum	Indikator Kinerja ( <i>outcome</i> )	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang/ Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
1	2	3		4	5	6	7	8	9
<b>Misi 4: Mengembangkan potensi unggulan daerah dan meningkatkan produktivitas usaha masyarakat demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat, penurunan angka kemiskinan dan perluasan lapangan kerja</b>									
1	Tersedianya Sarana produksi pertanian yang tepat (waktu, jenis, jumlah, kualitas,dosis)	Transaksi dan distribusi yang diarahkan pada Sarana produksi untuk Komoditas Tanaman Pangan, Hortikultura, Peternakan dan Perkebunan yang tepat	Kerjasama dengan pihak ketiga	Produktivitas padi (Kw/ha)	51.78	54.82	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan	Urusan Pertanian	Dinas Pertanian tanaman Pangan dan TPH
				Produktivitas Jagung (Kw/ha)	6.67	7			Dinas Pertanian tanaman Pangan dan TPH
				Produksi Bawang Merah (ton)	14.387	14.677	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Hortikultura	Pertanian	Dinas Pertanian tanaman Pangan dan TPH
				Produksi Cabai (Ton)	942	988			Dinas Pertanian tanaman Pangan dan TPH
				Produksi kopi (ton)	2,806.18	14,086.20			Program Peningkatan

No	Sasaran	Strategi dan arah kebijakan	Kebijakan Umum	Indikator Kinerja ( <i>outcome</i> )	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang/ Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
1	2	3		4	5	6	7	8	9
				Produksi tembakau (ton)	48.17	257.71	Produksi Tanaman perkebunan		Dishutbun
				Populasi Sapi Sumbawa (ekor)	6,673	8,880	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Pertanian	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
				Populasi Sapi Bali (ekor)	222,153	264,588			
				Populasi Kerbau Sumbawa (ekor)	45,595	46,510			
				Populasi Kuda Sumbawa (ekor)	32,452	33,103			
				Cakupan penanganan penyakit ternak yang dilaporkan	100%	100%	Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Pertanian	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2	Tersedianya Prasarana Pertanian yang memadai	Konstruksi, Rehabilitasi yang diarahkan pada Prasarana penunjang usaha tani yang	Kerjasama dengan pihak ketiga	laju pertumbuhan panjang jalan usaha tani	24.53%	7.73%	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	Urusan Pertanian	Dinas Pertanian tanaman Pangan dan TPH

No	Sasaran	Strategi dan arah kebijakan	Kebijakan Umum	Indikator Kinerja ( <i>outcome</i> )	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang/ Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
1	2	3		4	5	6	7	8	9
		memadai		Cakupan areal pertanian yang terakses sumber air	54.94%	60%	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	Urusan Pertanian	Dinas Pertanian tanaman Pangan dan TPH
				Cakupan kawasan produksi peternakan yang terfasilitasi prasarana peternakan	10.00%	20%	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Urusan Pertanian	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3	Termanfaatkannya Teknologi Pertanian sesuai kebutuhan	Edukasi sosialisasi yang diarahkan pada Pelaku usaha tani yang sesuai kebutuhan	Kerjasama dengan masyarakat dan lembaga penelitian	Cakupan kelompok tani yang dilatih	20%	50%	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	Urusan Pertanian	Dinas Pertanian tanaman Pangan dan TPH
					100%	100%	Program Peningkatan kapasitas kelembagaan petani	Urusan Pertanian	BP4K



No	Sasaran	Strategi dan arah kebijakan	Kebijakan Umum	Indikator Kinerja ( <i>outcome</i> )	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang/ Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir									
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>		<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>						
4	Tersedianya SDM Pertanian yang profesional	Edukasi, fasilitasi yang diarahkan pada Tenaga fungsional pertanian yang profesional	Kerjasama dengan lembaga diklat fungsional pertanian	Cakupan tenaga fungsional pertanian yang dilatih	50%	100%	Program peningkatan kapasitas ketenaga penyuluhan	Urusan Pertanian	Dinas kehutanan dan Perkebunan /BP4k						
							Program peningkatan produksi perkebunan			Urusan Pertanian	Dinas kehutanan dan Perkebunan /BP4k				
							Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan					Urusan Pertanian	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan		
							Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Ternak							Urusan Pertanian	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
							Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan								

No	Sasaran	Strategi dan arah kebijakan	Kebijakan Umum	Indikator Kinerja ( <i>outcome</i> )	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang/ Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
1	2	3		4	5	6	7	8	9
							Sarana Pertanian		Hewan
5	Tersedianya Sarana produksi perikanan yang tepat (waktu, jenis, jumlah, kualitas, dosis)	Transaksi dan distribusi yang diarahkan pada Perikanan Budidaya dan Perikanan Tangkap yang tepat	Kerjasama dengan pihak ketiga	Produksi perikanan tangkap (ton)	52,234.29	60,429.81	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Urusan kelautan dan perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
Produksi perikanan budidaya (ton)				683,892.96	725,345.93	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Urusan kelautan dan perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	
Produksi garam (ton)				3,306.35	8,000	Program Pengembangan dan Pengelolaan wilyah pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Urusan kelautan dan perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	
6	Tersedianya Prasarana Perikanan yang memadai	Konstruksi, Rehabilitasi yang diarahkan pada Prasarana penunjang usaha perikanan yang	Kerjasama dengan pihak ketiga	Cakupan pulau-pulau kecil yang tertangani	9	14	Program Pengembangan dan Pengelolaan wilyah pesisir dan Pulau-Pulau	Urusan kelautan dan perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan

No	Sasaran	Strategi dan arah kebijakan	Kebijakan Umum	Indikator Kinerja ( <i>outcome</i> )	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang/ Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
1	2	3		4	5	6	7	8	9
		memadai					Kecil		
7	Tercegah dan distraktif dan illegal fishing secara baik	Sosialisasi, konsolidasi dan konsultasi yang diarahkan pada Nelayan, pembudidaya dan masyarakat pesisir secara baik	Kerjasama dengan masyarakat nelayan /pesisir	Persentase desa pesisir yang memiliki Pokmaswas	54%	94%	Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan	Urusan kelautan dan perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
				cakupan desa sadar hukum terhadap pengelolaan sumber daya alam kelautan dan perikanan	0	16%	Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Urusan kelautan dan perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan

No	Sasaran	Strategi dan arah kebijakan	Kebijakan Umum	Indikator Kinerja ( <i>outcome</i> )	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang/ Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
1	2	3		4	5	6	7	8	9
8	Tersedianya sarana industri yang memadai	distribusi, fasilitasi dan transaksi yang diarahkan pada sarana pengolahan hasil pertanian, perikanan, kehutanan yang memadai	Kerjasama dengan lembaga donor (lembaga yang memberikan bantuan sarana industri)	Persentase IKM yang difasilitasi dengan sarana industri	10%	20%	Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produk perikanan	Urusan kelautan dan perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
							Program pengembangan industri kecil dan menengah	Urusan Perindustrian	Dinas Koperindag
							Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan	Urusan pertanian	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

No	Sasaran	Strategi dan arah kebijakan	Kebijakan Umum	Indikator Kinerja ( <i>outcome</i> )	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang/ Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
1	2	3		4	5	6	7	8	9
							Program pemasaran hasil produksi perkebunan	Urusan pertanian	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
							Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	Urusan Pertanian	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
9	Terbinanya pelaku industri yang terampil	edukasi yang diarahkan pada Pelaku IKM yang terampil	Kerja sama dengan pelaku IKM	Cakupan Unit Usaha IKM yang dibina	3%	5,7%	Program Peningkatan Pengembangan Kelembagaan IKM	Urusan Perindustrian	Dinas Kopperindag
10	Tersalurnya pangan secara merata	distribusi yang diarahkan pada Desa Rawan pangan secara merata	Kerjasama dengan masyarakat dan lembaga pemerintah Desa	Jumlah Desa rawan pangan	66	28	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	Pangan	Kantor Ketahanan Pangan

No	Sasaran	Strategi dan arah kebijakan	Kebijakan Umum	Indikator Kinerja ( <i>outcome</i> )	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang/ Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
1	2	3		4	5	6	7	8	9
11	Terwujudnya harga pangan yang stabil	koordinasi, intervensi yang diarahkan pada pelaku usaha pangan secara stabil	Kerjasama antar kembaga pemerintah (Bulog)	Harga Gabah Kering Panen (GKP) di Tingkat Produsen (Rp/kg)	3,500	3,900	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	Pangan	Kantor Ketahanan Pangan
12	Terwujudnya masyarakat yang sadar pola konsumsi pangan, beragam, bergizi,seimbang dan aman	Sosialisasi yang diarahkan pada Masyarakat desa yang sadar pola konsumsi pangan	Kerjasama dengan masyarakat	Pola Pangan Harapan (skor)	81,7	90	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	Pangan	Kantor Ketahanan Pangan
13	Terbinanya koperasi yang mandiri	Fasilitasi yang diarahkan pada Koperasi yang mandiri	Kerjasama dengan lembaga perkoperasian	Persentase koperasi aktif	50%	75%	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Koperasi dan UMKM	Dinas Kopperindag
14	Tersedianya SDM koperasi dan UMKM yang profesional	Edukasi, visitasi yang diarahkan pada Pengelola Koperasi dan pelaku UMKM yang profesional	Kerjasama dengan lembaga perkoperasian	Persentase UMKM formal	35%	50%	Program Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Koperasi dan UMKM	Dinas Kopperindag

No	Sasaran	Strategi dan arah kebijakan	Kebijakan Umum	Indikator Kinerja ( <i>outcome</i> )	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang/ Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
1	2	3		4	5	6	7	8	9
15	Tersedianya sarana dan prasarana UMKM yang memadai	Konstruksi yang diarahkan pada Lapak/outlet pemasaran PKL yang memadai	Kerjasama dengan pihak ketiga	Persentase Usaha Mikro dan Kecil yang difasilitasi dengan lapak/outlet pemasaran	1%	1%	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Koperasi dan UMKM	Dinas Kopperindag
16	Tersedianya Prasarana perdagangan yang memadai	Konstruksi, rehabilitasi, revitalisasi yang diarahkan pada Pasar Induk dan Pasar tradisional yang memadai	Kerjasama dengan pihak ketiga	Jumlah pasar yang dibangun dan direhabilitasi (unit)	19	23	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perdagangan	Perdagangan	Dinas Kopperindag
17	Tersedianya sarana kemetrolgian yang memadai	Peningkatan akurasi alat ukur, takar, timbang, peralatan perdagangan	Kerjasama dengan lembaga lain dan masyarakat pemilik UTTP	Cakupan alat UTTP yang ditera	29,5%	31,42%	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perdagangan	Perdagangan	Dinas Kopperindag

No	Sasaran	Strategi dan arah kebijakan	Kebijakan Umum	Indikator Kinerja ( <i>outcome</i> )	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang/ Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
1	2	3		4	5	6	7	8	9
18	Terjalinya kerjasama investasi yang berkelanjutan	Promosi yang diarahkan pada Pameran, iklan tentang Produk unggulan daerah di dalam maupun di luar daerah yang berkelanjutan	Kerjasama dengan masyarakat dunia usaha dan pelaksana event	Jumlah event promosi yang diikuti	6	8	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Penanaman Modal	BPM-LH, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, BP4K, Dinas Kopperindag, KKP, Dislutkan, Dislutkan. Disporabudpa r
19	Tersedianya pelayanan investasi yang mudah dan cepat	Sistem pelayanan dan informasi investasi satu pintu yang mudah dan cepat	Penetapan sistem pelayanan perijinan satu pintu	Jumlah layanan perizinan /investasi berbasis Teknologi Informatika	2	5	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Penanaman Modal	BPM-LH, KPPT
20	Tersedianya sumber daya manusia yang profesional	Edukasi yang diarahkan pada Operator SPIPISE yang profesional	Kerjasama dengan lembaga BKPN	Cakupan operator SPIPISE yang memenuhi kualifikasi	17%	100%	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Penanaman Modal	BPM-LH, KPPT



No	Sasaran	Strategi dan arah kebijakan	Kebijakan Umum	Indikator Kinerja ( <i>outcome</i> )	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang/ Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>		<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
21	Terrwujudnya Angkatan Kerja yang terampil	Edukasi yang diarahkan pada Bidang ketrampilan sesuai Kebutuhan pasar kerja yang terampil	Kerjasama dengan lembaga pelatihan	Tingkat partisipasi angkatan kerja (%)	71.09		Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Tenaga Kerja	Dinas Nakertrans
22	Tersedianya sarana dan prasarana ketenagakerjaan yang sesuai standar	Akreditasi yang diarahkan pada BLK yang sesuai standar	Kerjasama dengan lembaga akreditasi	Rasio Produktivitas kerja	38.17		Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tenaga Kerja	Dinas Nakertrans
				Jumlah angkatan kerja dilatih di LLK (orang)	114	1,280	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tenaga Kerja	Dinas Nakertrans
23	Tersedianya perjanjian kerja yang sesuai dengan aturan	Mediasi yang diarahkan pada Tenaga kerja dan Perusahaan yang sesuai dengan aturan	Kerjasama dengan lembaga bipartit	Jumlah perselisihan hubungan industrial yang tertangani (kasus)	29	185	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Tenaga Kerja	Dinas Nakertrans

No	Sasaran	Strategi dan arah kebijakan	Kebijakan Umum	Indikator Kinerja ( <i>outcome</i> )	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang/ Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
1	2	3		4	5	6	7	8	9
24	Tersedianya sarana pendukung ketenagakerjaan yang memadai	Fasilitasi yang diarahkan pada Dewan Pengupahan Daerah yang memadai	Kerjasama dengan lembaga bipartit	jumlah lembaga kerjasama bipartit	0	150	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Tenaga Kerja	Dinas Nakertrans
26	Terawasinya perusahaan dalam menerapkan aturan ketenagakerjaan secara berkesinambungan	intervensi yang diarahkan pada K3 (Keamanan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja) secara berkesinambungan	Penyusunan dan penetapan K3	Prosentase Jumlah karyawan yang mendapat layanan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan	70	100	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Tenaga Kerja	Dinas Nakertrans
27	Tersedianya calon TKI yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja	Edukasi dan seleksi yang diarahkan pada Masyarakat pencari kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja	Kerjasama dengan LLK	Jumlah Perusahaan penempatan tenaga kerja indonesia swasta (PPTKIS) yang dibina	50	50	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Tenaga Kerja	Dinas Nakertrans
28	Tersaluranya bantuan layanan sosial yang memadai	Distribusi yang diarahkan pada PMKS yang tertangani yang memadai	Kerjasama dengan lembaga sosial	PMKS yang memperoleh bantuan layanan sosial (%)	15%	60%	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Sosial	Dinsos

No	Sasaran	Strategi dan arah kebijakan	Kebijakan Umum	Indikator Kinerja ( <i>outcome</i> )	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang/ Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
1	2	3		4	5	6	7	8	9
							Program pembedayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan PMKS lainnya	Sosial	Dinsos
29	Tersedianya sarana prasarana pendukung pariwisata yang memadai	Konstruksi dan rehabilitasi yang diarahkan pada Kawasan wisata alam dan budaya yang memadai	Kerjasama dengan pihak ketiga	Jumlah kunjungan wisatawan	71,682		Program pengembangan destinasi pariwisata	Pariwisata	Disporabudpa r
30	Terbentuknya pelaku usaha wisata yang terampil dan profesional	Sosialisasi dan fasilitasi yang diarahkan pada Kelompok profesi pariwisata yang terampil dan profesional	Kerjasama dengan pelaku usaha pariwisata	Tingkat hunian hotel (%)	18.64		Program pengembangan destinasi pariwisata	Pariwisata	Disporabudpa r
31	Terbangunnya ekowisata berbasis komunitas sesuai potensi kawasan	Fasilitasi yang diarahkan pada Pokdarwis dan Pemerintah desa yang	Kerjasama dengan lembaga pariwisata dan pemerintah desa	Jumlah destinasi wisata unggulan berbasis lingkungan	30	85	Program pengembangan destinasi pariwisata	Pariwisata	Disporabudpa r

No	Sasaran	Strategi dan arah kebijakan	Kebijakan Umum	Indikator Kinerja ( <i>outcome</i> )	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang/ Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
1	2	3		4	5	6	7	8	9
		sesuai dengan potensi kawasan		Jumlah destinasi unggulan berbasis budaya	19	32	Program pengembangan destinasi pariwisata	Pariwisata	Disporabudpa r
32	Tersedianya data dan informasi pariwisata yang valid	Inventarisasi yang diarahkan pada Data kawasan dan pelaku usaha pariwisata yang valid	Penyusunan dan penetapan data kawasan dan pelaku usaha pariwisata	Jumlah publikasi potensi pariwisata	49	117	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Pariwisata	Disporabudpa r
33	Terwujudnya lembaga promosi pariwisata yang profesional	fasilitasi dan koordinasi yang diarahkan pada pelaku usaha pariwisata yang profesional	Kerjasama dengan pelaku usaha pariwisata yang profesional	Jumlah publikasi agenda even wisata	83	166	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Pariwisata	Disporabudpa r
<b>Misi 5: Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan</b>									
1	Tersedianya data dan informasi berbasis spasial yang sesuai potensi	Formulasi, inventarisasi, dokumentasi yang diarahkan pada SDA dan Lingkungan hidup yang sesuai potensi	Penyusunan pedoman umum, juknis dan SOP	Dokumen Data dan informasi SDALH yang tersedia	6	16	Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan	Urusan Statistik	Bappeda, BPMLH

No	Sasaran	Strategi dan arah kebijakan	Kebijakan Umum	Indikator Kinerja ( <i>outcome</i> )	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang/ Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
1	2	3		4	5	6	7	8	9
2	Tersedianya SDM pengelola data dan informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang kompeten	Edukasi dan fasilitasi yang diarahkan pada Peningkatan kapasitas SDM dalam bidang GIS dan Remote sensing yang kompeten	Kerjasama dengan pemerintah pusat dan lembaga lain yang terkait.	SDM pengelola data dan informasi berbasis spasial	5	15	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Urusan Statistik	Bappeda, BPMLH
3	Terwujudnya masyarakat yang sadar lingkungan	Sosialisasi yang diarahkan pada Kelompok masyarakat yang sadar lingkungan	Kerjasama dengan pemerintah pusat, lembaga pendidikan dan organisasi non pemerintah.	Kelompok masyarakat sadar lingkungan	42	57	Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	Urusan Lingkungan Hidup	Bappeda, BPMLH
4	Tersedianya rencana pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkualitas	Formulasi yang diarahkan pada Kawasan konservasi yang berkualitas	Kerjasama dengan pemerintah pusat dan pihak ketiga.	Dokumen perencanaan pembangunan SDA dan LH	4	6	Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam	Urusan Lingkungan Hidup	Bappeda, BPMLH
5	Terpantaunya parameter kualitas lingkungan secara berkala	inventarisasi dan dokumentasi yang diarahkan pada Wilayah kecamatan	Penerapan standar pemantauan kualitas lingkungan.	Cakupan titik pantau kualitas tanah, air dan udara di	100%	100%	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Urusan Lingkungan Hidup	BPMLH

No	Sasaran	Strategi dan arah kebijakan	Kebijakan Umum	Indikator Kinerja ( <i>outcome</i> )	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang/ Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
1	2	3		4	5	6	7	8	9
		secara berkala		kecamatan yang terpantau secara berkala					
6	Terwujudnya pemeliharaan dan pemanfaatan mata air yang optimal	inventarisasi dan rehabilitasi yang diarahkan pada Wilayah hutan yang optimal	Kerjasama dengan pemerintah pusat, provinsi, masyarakat dan pihak ketiga.	Persentase penduduk berakses air bersih	75.94	100%	Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam	Urusan Lingkungan Hidup	BPMLH
7	Terwujudnya pemahaman regulasi lingkungan secara menyeluruh	Sosialisasi yang diarahkan pada Masyarakat secara menyeluruh	Kerjasama dengan pihak ketiga, masyarakat dan dunia usaha.	Cakupan regulasi bidang LH yang terinformasi dan tersosialisasi secara masif kepada masyarakat	100%	100%	Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Urusan Lingkungan Hidup	BPMLH
8	Tersedianya pengawas lingkungan yang kompeten	Edukasi yang diarahkan pada ASN yang kompeten	Kerjasama dengan pemerintah pusat, provinsi dan pihak ketiga.	umlah Pejabat pengawas lingkungan	2	4	Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Urusan Lingkungan Hidup	BPMLH

No	Sasaran	Strategi dan arah kebijakan	Kebijakan Umum	Indikator Kinerja ( <i>outcome</i> )	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang/ Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
1	2	3		4	5	6	7	8	9
9	Tersusunnya regulasi daerah bidang LH yang sesuai kondisi	Formulasi yang diarahkan pada Pemerintah daerah yang sesuai kondisi	Kerjasama dengan pihak ketiga.	<i>Regulasi LH di Kabupaten Sumbawa</i>	4	14	Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Urusan Lingkungan Hidup	BPMLH (idem)
10	Tersedianya sarana dan prasarana penyehatan lingkungan yang memadai	Transaksi yang diarahkan pada sarana persampahan yang memadai	Kerjasama dengan pemerintah pusat, provinsi, perguruan tinggi, sekolah dan pihak ketiga.	<i>Cakupan ketersediaan sarana prasarana persampahan yang memadai</i>	168 Unit	223Unit	Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	Urusan Lingkungan Hidup	BPMLH
11	Tersedianya tenaga kebersihan lingkungan yang terampil	Fasilitasi, Mobilisasi yang diarahkan pada Tenaga Persampahan yang terampil	Kerjasama dengan pemerintah pusat, provinsi, perguruan tinggi, sekolah dan pihak ketiga.	cakupan ketersediaan tenaga persampahan	80%	100%	Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	Urusan Lingkungan Hidup	BPMLH
12	Tersedianya data dan informasi kebencanaan yang memadai	Formulasi dan inventarisasi yang diarahkan pada Peta dan data rawan bencana yang memadai	Kerjasama dengan pemerintah pusat, provinsi, perguruan tinggi, sekolah dan pihak ketiga.	Cakupan penanganan pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	100%	100%	Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	BPBD

No	Sasaran	Strategi dan arah kebijakan	Kebijakan Umum	Indikator Kinerja ( <i>outcome</i> )	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang/ Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
1	2	3		4	5	6	7	8	9
		Inventarisasi, verifikasi dan kompilasi data kejadian bencana yang diarahkan pada aplikasi Data dan informasi bencana Indonesia (DIBI) yang memadai	Kerjasama dengan pemerintah pusat, provinsi, perguruan tinggi, sekolah dan pihak ketiga.	Daya sebar informasi kejadian bencana	N/A	100%	Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	BPBD
13	Tersusunnya alur penanganan kondisi bencana yang sesuai standar kebutuhan	Formulasi, koordinasi, dan simulasi yang diarahkan pada SOP penanganan bencana yang sesuai standar kebutuhan	Perumusan SOP penanganan bencana	Daya tanggap waktu respon penanganan darurat bencana	N/A	<= 6 jam	Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	BPBD
14	Tersedianya sarana dan prasarana penanganan bencana yang optimal	Konstruksi, rehabilitasi yang diarahkan pada Fasilitas evakuasi dan tanggap darurat yang optimal	Kerjasama dengan pihak ketiga dan Pemerintah pusat dan propinsi	daya tampung fasilitas tanggap darurat	100%	100%	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	BPBD



No	Sasaran	Strategi dan arah kebijakan	Kebijakan Umum	Indikator Kinerja ( <i>outcome</i> )	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang/ Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
1	2	3		4	5	6	7	8	9
15	Terlatihnya sumberdaya kesiagaan bencana yang terampil	Edukasi dan simulasi yang diarahkan pada TRC dan Tagana yang terampil	Kerjasama dengan Pemerintah Pusat dan propinsi	Persentase TRC dan Tagana yang memiliki sertifikat pelatihan teknis kebencanaan	100%	100%	Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	BPBD
16	Tecegah semakin berkurangnya debit air	Reboisasi dan rehabilitasi yang diarahkan pada Kawasan hutan kritis	Kerjasama dengan Pemerintah Pusat dan propinsi	Cakupan kawasan hutan yang direboisasi	1086	1321	<i>Program rehabilitasi hutan dan lahan</i>	Kehutanan	Dishutbun
17	Tercegah semakin meluasnya kerusakan kawasan hutan	Reboisasi dan rehabilitasi yang diarahkan pada Kawasan hutan kritis	Kerjasama dengan pihak ketiga	Cakupan pengamanan dan perlindungan hutan yang dilaksanakan	100%	100%	<i>Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan</i>	Kehutanan	Dishutbun
18	Tercegah semakin meluasnya abrasi pesisir pantai	Reklamasi yang diarahkan pada Pesisir pantai dengan komoditas tanaman bakau	Kerjasama dengan pihak ketiga	cakupan kawasan pesisir pantai yang ditanami bakau	100%	100%	<i>Program rehabilitasi hutan dan lahan</i>	Kehutanan	Dishutbun
		Konstruksi yang diarahkan pada Tanggul pengamanan pantai dan Tercegah semakin meluasnya	Kerjasama dengan pihak ketiga	Cakupan panjang garis pantai yang terlindungi	N/A	5000 M	<i>Program Pengendalian Banjir</i>	Pekerjaan umum	DPU

No	Sasaran	Strategi dan arah kebijakan	Kebijakan Umum	Indikator Kinerja ( <i>outcome</i> )	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang/ Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
1	2	3		4	5	6	7	8	9
		abrasi pesisir pantai							
19	Tersedianya sumber daya yang profesional	Edukasi yang diarahkan pada Analis dan operator yang profesional	Kerjasama dengan pihak ketiga.	Persentase jumlah analis dan operator yang mendapatkan pelatihan teknis	N/A	100%	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Iptek	Bappeda, DPPK, Dukcapil, Setda, KPPT, Dishubkominfo
20	Tersedianya sistem yang terintegrasi	Formulasi, implementasi yang diarahkan pada SOP yang terintegrasi	Penyusunan pedoman umum dan SOP	Persentase sistem yang terintegrasi	N/A	100%	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Iptek	Bappeda
21	Tersedianya sarana pendukung yang memadai	Transaksi, integrasi yang diarahkan pada Perangkat keras dan perangkat lunak yang memadai	Kerjasama dengan pihak ketiga	Persentase sarpras pendukung Iptek	N/A	100%	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Iptek	Bappeda, DPPK, Dukcapil, Setda, KPPT, Dishubkominfo

No	Sasaran	Strategi dan arah kebijakan	Kebijakan Umum	Indikator Kinerja ( <i>outcome</i> )	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang/ Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>		<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
22	Tersedianya data yang akurat dan mutakhir	Inventarisasi, formulasikan yang diarahkan pada Basis data yang akurat dan mutakhir	Kerjasama dengan lembaga peneliti	cakupan jumlah publikasi pembangunan yang tersedia	N/A	100%	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Iptek	Bappeda, DPPK, Dukcapil, Setda, KPPT, Dishubkominfo
<b>Misi 6: Mewujudkan masyarakat yang religius dan memelihara toleransi antar umat beragama</b>									
1	Tecegah semakin meluasnya dekadensi Akhlak masyarakat	Revolusi mental yang diarahkan pada Masyarakat akibat dekadensi moral masyarakat	Kerjasama dengan lembaga keagamaan	Cakupan kegiatan keagamaan masyarakat yang terfasilitasi	100%	100%	Program peningkatan pelayanan kehidupan beragama	Pemerintahan umum	Setda
2	Tercegah semakin menurunnya wawasan kebangsaan	Reformasi hukum yang diarahkan pada Aparat penegak hukum akibat semakin menurunnya wawasan kebangsaan	Kerjasama dengan lembaga hukum	Cakupan penyuluhan hukum pada masyarakat yang dilaksanakan	100%	100%	<i>Program peningkatan kesadaran hukum dan HAM</i>	Pemerintahan umum	Setda

No	Sasaran	Strategi dan arah kebijakan	Kebijakan Umum	Indikator Kinerja ( <i>outcome</i> )	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang/ Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
1	2	3		4	5	6	7	8	9
3	Tercegah semakin merebaknya intoleransi dan krisis kepribadian bangsa	Revolusi mental yang diarahkan pada Masyarakat akibat merebaknya intoleransi dan krisis kepribadian bangsa	Penerapan pola pikir dan cara pandang masyarakat	Tingkat Pemahaman terhadap Wawasan Kebangsaan, Ideologi Negara, Toleransi Antar Umat Beragama dan Antar Etnis di daerah	100%	100%	<i>Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan</i>	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	Kesbangpolda gri
4	Tercegah semakin meluasnya konflik sosial	Restorasi sosial yang diarahkan pada Masyarakat akibat konflik sosial	Penerapan pola pikir masyarakat	cakupan masyarakat rawan konflik yang mendapat penguatan kearifan lokal	1 Sosialisasi	1 Sosialisasi	Pengembangan wawasan keagamaan	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	Kesbangpolda gri, Dinsos
<b>Misi 7: Memelihara dan mengembangkan potensi budaya dan kearifan lokal</b>									
1	Tersedianya sarana prasarana budaya yang memadai	Konstruksi, rehabilitasi, revitalisasi yang diarahkan pada Gedung kesenian yang memadai	Kerjasama dengan pihak ketiga	Cakupan Pusat Kajian Seni Budaya yang dibentuk dan difasilitasi	N/A	1	Program Pengembangan Nilai Budaya	Urusan kebudayaan	Disporabudpa r

No	Sasaran	Strategi dan arah kebijakan	Kebijakan Umum	Indikator Kinerja ( <i>outcome</i> )	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang/ Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
1	2	3		4	5	6	7	8	9
2	Tersedianya budayawan dan seniman yang profesional	Fasilitasi, mediasi yang diarahkan pada Masyarakat yang profesiona	Kerjasama dengan lembaga budaya	Cakupan budayawan dan seniman yang difasilitasi	7,000	10,000	Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya	Urusan kebudayaan	Disporabudpa r
3	Terselenggaranya event budaya yang berkesinambungan	Aktualisasi yang diarahkan pada Seni budaya yang berkesinambungan	Kerjasama dengan pihak ketiga	Cakupan publikasi bernuansa nilai-nilai budaya yang diterbitkan	5	15	Program Pengembangan Nilai Budaya	Urusan kebudayaan	Disporabudpa r
4	Terpeliharanya nilai-nilai budaya dalam masyarakat yang selaras	Internalisasi dan revitalisasi yang diarahkan pada Masyarakat perkotaan yang selaras	Penerapan persepsi dan pola pikir masyarakat tentang nilai budaya	Jumlah even budaya yang terselenggara	3	5	Program Pengembangan Nilai Budaya	Urusan kebudayaan	Disporabudpa r
5	Tersedianya sarana prasarana penunjang aktivitas olahraga yang memadai	Konstruksi yang diarahkan pada GOR yang memadai	Kerjasama dengan pihak ketiga	Cakupan ketersediaan sarana prasarana olahraga refresentatif	1	1	Program Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga	Urusan kebudayaan	Disporabudpa r
6	Terselenggaranya event olahraga yang berkesinambungan	Aktualisasi yang diarahkan pada Kompetisi yang berkesinambungan	Kerjasama dengan lembaga keolahragaan	Jumlah even olah raga terjadwal yang terselenggara	240	400	Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan	Urusan kebudayaan	Disporabudpa r

No	Sasaran	Strategi dan arah kebijakan	Kebijakan Umum	Indikator Kinerja ( <i>outcome</i> )	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang/ Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
1	2	3		4	5	6	7	8	9
							Kekayaan Budaya		
7	Terselenggaranya event kepemudaan yang berkesinambungan	Aktualisasi yang diarahkan pada Kompetisi yang berkesinambungan	Kerjasama dengan pihak penyelenggara event dan lembaga keolahragaan	Jumlah even Pemuda yang terselenggara	3	3	Program Pengembangan Nilai Budaya	Urusan pendidikan	Dinas Diknas
8	Terwujudnya pemuda yang terampil	Edukasi yang diarahkan pada Motivator yang terampil	Kerjasama dengan lembaga pendidikan	Cakupan pemuda berprestasi minimal tk. Provinsi/Regional	14	120	Program Pengembangan dan Kereserian Kebijakan Pemuda	Urusan pendidikan	Dinas Diknas
9	Terwujudnya olahragawan yang profesional	Edukasi yang diarahkan pada Atlet berprestasi yang profesional	Kerjasama dengan lembaga keolahragaan	Cakupan atlet/club yang berprestasi minimal tingkat provinsi/regional	15 Penghargaan	123 Penghargaan	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	Urusan kebudayaan	Disporabudpa r, Dinas Diknas, kantor Arsip dan Perpustakaan daerah

## **BAB VIII**

### **INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN**

Indikasi rencana program prioritas, berisi program-program prioritas baik untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah maupun untuk pemenuhan layanan perangkat daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Adapun pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program prioritas kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Hal tersebut juga akan menjadi rujukan utama dalam perencanaan tahunan untuk dituangkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sumbawa.

Sejalan amanat Konstitusi dan Undang-Undang, dalam RPJMD 2016-2021 telah dipenuhi minimal 20% alokasi anggaran untuk urusan pendidikan dan 10% urusan kesehatan, serta instruksi Bupati Sumbawa untuk mengalokasikan belanja modal sebesar 25% dari belanja langsung. Selanjutnya pada bagian ini disajikan program prioritas utama dan program prioritas kedua untuk mencapai visi dan misi pembangunan Kabupaten Sumbawa tahun 2016-2021. Masing-masing program dilengkapi dengan target indikator kinerja untuk menunjukkan sejauhmana capaian rencana pembangunan akan dicapai. Program-program prioritas dimaksud disajikan secara lengkap pada Tabel 8.1 tentang Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan.

**Tabel 8.1**  
**Program Prioritas dan Kerangka Pendanaan**

No	Program Prioritas Pembangunan Menurut Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program ( <i>Outcome</i> )		Capaian Kinerja Awal RPJMD (Tahun ke 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Pelaksana
					2016	2017	2018	2019	2020		
					Target	Target	Target	Target	Target	Target	
					Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>A.</b>	<b>Urusan Wajib Terkait Pelayanan Dasar</b>										
<b>1</b>	<b>Pendidikan</b>										
1	<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran yang terselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	100	Diknas
			Rp.000	1.310.256	1.440.031	1.483.232	1.527.729	1.573.561	1.620.768	7.645.321	
2	<i>Program Peningkatan Sarana &amp; Prasarana Aparatur</i>	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang memadai	%	100	100	100	100	100	100	100	Diknas
			Rp.000	1.117.364	1.255.690	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	6.255.690	
3	<i>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</i>	Persentase Tingkat disiplin pegawai	%	90	100	-	-	-	-	-	Diknas
			Rp.000	78.168	113.088	-	-	-	-	113.088	
4	<i>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja &amp; Keuangan</i>	Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan oleh Inspektorat/BPK yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	100	100	Diknas



No	Program Prioritas Pembangunan Menurut Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program ( <i>Outcome</i> )		Capaian Kinerja Awal RPJMD (Tahun ke 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Pelaksana
					2016	2017	2018	2019	2020		
					Target	Target	Target	Target	Target	Target	
					Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		Persentase tertib administrasi barang/aset Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	Diknas
		Penilaian Lakip Perangkat Daerah oleh Inspektorat	Klasifikasi	CC	B	B	B	B	B	B	Diknas
			Rp.000	32.055	32.055	32	32	32	32	160.055	
5	Program Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang selaras dan tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100	Diknas
			Rp.000	1.666.198	1.733.508	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	8.133.508	
6	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah lembaga PAUD yang memiliki NPSN	PAUD	570	627	690	750	830	900	900	Diknas
		Persentase Desa/Kelurahan yang menyelenggarakan PAUD terpadu (Holistik Integratif)	%	20	27.27	48.5	57.75	67.88	100	100	Diknas
		Cakupan PAUD yang difasilitasi biaya operasionalnya	%	71.1	77.98	85.78	94.36	100	100	100	Diknas
		APK PAUD (4-6 tahun)	%	95,43	96,00	96,50	96,75	97,00	97,25	97,25	Diknas
			Rp.000	1.898.409	9.109.651	10.141.170	11.789.491	13.124.458	14.610.587	58.775.356	
7	Program Wajib Belajar	APK SD/MI	%	99,16	99	99,25	99,3	99,4	99,5	99,5	Diknas

No	Program Prioritas Pembangunan Menurut Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program ( <i>Outcome</i> )		Capaian Kinerja Awal RPJMD (Tahun ke 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Pelaksana
					2016	2017	2018	2019	2020		
					Target	Target	Target	Target	Target	Target	
					Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
1	Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	APM SD/MI	%	94,92	95	95,5	96	96,5	97	97	Diknas
		Angka kelulusan SD/MI	%	100	100	100	100	100	100	100	Diknas
		APK SMP/MTs	%	87,22	88	89,32	90,32	91,42	93	90	Diknas
		APM SMP/MTs	%	87,22	88	88,5	89,0	89,5	90	90	Diknas
		Angka Kelulusan SMP/MTs	%	100	100	100	100	100	100	100	Diknas
		Rasio RK/Rombel SD	<i>RK:Rombel</i>	1:1,06	1;1,05	1;1,04	1;1,03	1;1,02	1:1	1:1	Diknas
		Rasio RK/Rombel SMP	<i>RK:Rombel</i>	1:1,01	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	Diknas
		Cakupan ruang perpustakaan SD dan SMP	%	62,84	63,90	64,96	66,02	66,87	67,72	67,72	Diknas
		Cakupan ketersediaan ruang laboratorium SMP	%	54	59	64	69	74	79	79	Diknas
		Cakupan SD yang menyelenggarakan kegiatan rutin keagamaan	%	100	100	100	100	100	100	100	Diknas
		Cakupan SMP yang menyelenggarakan kegiatan rutin keagamaan	%	100	100	100	100	100	100	100	Diknas
				<i>Rp.000</i>	35.536.189	22.682.625	24.661.456	25.725.680	26.835.828	121.170.560	22.682.625

No	Program Prioritas Pembangunan Menurut Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program ( <i>Outcome</i> )		Capaian Kinerja Awal RPJMD (Tahun ke 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Pelaksana
					2016	2017	2018	2019	2020		
					Target	Target	Target	Target	Target	Target	
				Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
8	Program Pendidikan Menengah	Cakupan pendidikan menengah yang terfasilitasi	%	100	100	-	-	-	-	-	Diknas
			Rp.000	16.767.200	6.066.563	-	-	-	-	6.066.563	
9	Program Pendidikan Non Formal	Cakupan warga belajar Paket A, B dan C yang ditangani	%	1.05	1.01	1.157	1.215	1.276	1.34	1.34	Diknas
			Rp.000	484.124	694.642	690	1.190.000	1.190.000	1.190.000	4.954.642	
10	Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Rasio pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional	%	20	30	40	50	60	70	70	Diknas
			Rp.000	3.535.490	2.856.441	3.356.441	3.356.441	3.356.441	3.356.441	16.282.206	
11	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase SD/MI terakreditasi minimal B	%	14,31	18,47	25,81	28,53	31,25	33,96	33,96	Diknas
		Persentase SMP/MTs terakreditasi minimal B	%	18,80	24,75	37,62	50,49	63,36	76,23	76,23	Diknas
		Persentase SD yang telah memenuhi SPM	%	0	13,04	27,17	50,27	74,73	100	100	Diknas
		Persentase SMP yang telah memenuhi SPM	%	0	20	40	60	80	100	100	Diknas
			Rp.000	947.062	1.224.116	1.225.000	1.725.000	1.725.000	1.725.000	1.725.000	7.624.116
<b>2</b>	<b>Kesehatan</b>										
1	Program Pelayanan Administrasi	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran yang terselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	100	Dikes

No	Program Prioritas Pembangunan Menurut Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program ( <i>Outcome</i> )		Capaian Kinerja Awal RPJMD (Tahun ke 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Pelaksana
					2016	2017	2018	2019	2020		
					Target	Target	Target	Target	Target	Target	
					Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	Perkantoran		Rp.000	1.364.704	1.676.561	1.726.858	1.778.664	1.832.024	1.886.984	8.901.090	
2	Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang memadai	%	100	100	100	100	100	100	100	Dikes
			Rp.000	766.163	1.057.971	1.057.971	1.057.971	1.177.971	4.267.971	8.619.853	
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Tingkat disiplin pegawai	%	90	100	-	-	-	-	-	Dikes
			Rp.000	146.629	112.333	-	-	-	-	112.333	
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	%	100	100	100	100	100	100	100	Dikes
			Rp.000	435.971	327.671	327.671	327.671	327.671	327.671	1.638.357	
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan oleh Inspektorat/BPK yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	100	100	Dikes
		Persentase tertib administrasi barang/aset Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	Dikes
		Penilaian Lakip Perangkat Daerah oleh Inspektorat	Klasifikasi	CC	B	B	B	B	B	B	Dikes
			Rp.000	164.543	304.651	304.651	304.651	304.651	304.651	1.523.255	

No	Program Prioritas Pembangunan Menurut Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program ( <i>Outcome</i> )		Capaian Kinerja Awal RPJMD (Tahun ke 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Pelaksana	
					2016	2017	2018	2019	2020			
					Target Anggaran (Rp.000)	Target Anggaran (Rp.000)	Target Anggaran (Rp.000)	Target Anggaran (Rp.000)	Target Anggaran (Rp.000)	Target Anggaran (Rp.000)		
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>		<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	
6	<i>Program Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah</i>	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang selaras dan tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Dikes
			<i>Rp.000</i>	892.178	985.836	985.836	985.836	985.836	985.836	4.929.180		
7	<i>Program Obat Dan Perbekalan Kesehatan</i>	Cakupan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan bagi masyarakat yang tersedia	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Dikes
			<i>Rp.000</i>	2.287.161	8.604.588	9.682.742	10.895.990	12.261.257	13.797.593	55.242.170		
8	<i>Program Upaya Kesehatan Masyarakat</i>	Cakupan layanan kesehatan dasar masyarakat yang berkualitas	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Dikes
			<i>Rp.000</i>	960.404	1.074.786	1.074.786	1.074.786	1.074.786	1.074.786	5.373.929		
9	<i>Program Pengawasan Obat Dan Makanan</i>	Cakupan pencegahan peredaran obat dan makanan ilegal dan berbahaya	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Dikes
			<i>Rp.000</i>	98.711	122.566	122.566	122.566	122.566	122.566	612.83		
10	<i>Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat</i>	Cakupan desa siaga yang berperan serta dalam membangun kesehatan mandiri	<i>Desa (%)</i>	17 (10,3%)	23 (13,94%)	38 (23,03%)	48 (29,09%)	53 (32,12%)	55 (33,33%)	55 (33,33%)	55 (33,33%)	Dikes
			<i>Rp.000</i>	246.58	496.655	496.655	496.655	496.655	496.655	2.483.277		

No	Program Prioritas Pembangunan Menurut Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program ( <i>Outcome</i> )		Capaian Kinerja Awal RPJMD (Tahun ke 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Pelaksana
					2016	2017	2018	2019	2020		
					Target	Target	Target	Target	Target	Target	
				Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)		
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>		<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
11	<i>Program Perbaikan Gizi Masyarakat</i>	Persentase balita dengan berat badan di Bawah Garis Merah (BGM)	%	85	80	77	73	70	65	65	Dikes
			<i>Rp.000</i>	212.55	303.053	303.053	303.053	303.053	303.053	1.515.264	
12	<i>Program Pengembangan Lingkungan Sehat</i>	Persentase rumah PHBS	%	27	28	32	35	35	40	40	Dikes
		Persentase penduduk dengan sanitasi layak	%	78,26	79,00	80,00	81,50	82,50	85,00	85,00%	Dikes
			<i>Rp.000</i>	237.209	971.641	1.020.224	1.071.235	1.124.796	1.181.036	5.368.932	
13	<i>Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular</i>	Cakupan penderita penyakit menular yang tertangani	%	100	100	100	100	100	100	100	Dikes
			<i>Rp.000</i>	545.913	506.266	506.266	506.266	506.266	506.266	2.531.331	
14	<i>Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan</i>	Cakupan Puskesmas yang tersertifikasi akreditasi	%	0	20	36	52	76	100	100	Dikes
			<i>Rp.000</i>	133.29	219.593	219.593	219.593	219.593	219.593	1.097.963	
15	<i>Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin</i>	Cakupan penduduk miskin yang mendapat layanan kesehatan	%	100	100	100	100	100	100	100	Dikes
			<i>Rp.000</i>	23.395.261	29.212.302	29.212.302	29.212.302	29.212.302	29.212.302	146.061.509	

No	Program Prioritas Pembangunan Menurut Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program ( <i>Outcome</i> )		Capaian Kinerja Awal RPJMD (Tahun ke 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Pelaksana
					2016	2017	2018	2019	2020		
					Target	Target	Target	Target	Target	Target	
					Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
16	Program Pengadaan, Peningkatan Dan Perbaikan Sarana Dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu Dan Jaringannya	Cakupan rawat jalan di puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	%	62,4	62,5	63%	63,5	64	65	65	Dikes
			Rp.000	7.639.064	25.263.730	26.462.436	29.860.381	32.566.238	57.247.194	171.399.979	
17	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Cakupan kemitraan dalam pengendalian kualitas layanan kesehatan oleh masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	100	Dikes
			Rp.000	26.21	17.755	17.755	17.755	17.755	17.755	88.775	
18	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Cakupan pelayanan kesehatan lansia	%	78,88	80,00	81,50	81,75	82,00	82,50	82,50	Dikes
			Rp.000	74.3	48.672	48.672	48.672	48.672	48.672	243.36	
19	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Dan Anak	Cakupan pelayanan persalinan di fasilitas kesehatan	%	91,02	92,82	94,62	96,41	98,21	100	100	Dikes

No	Program Prioritas Pembangunan Menurut Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program ( <i>Outcome</i> )		Capaian Kinerja Awal RPJMD (Tahun ke 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Pelaksana
					2016	2017	2018	2019	2020		
					Target	Target	Target	Target	Target		
					Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			Rp.000	942.177	516.716	516.716	516.716	516.716	516.716	2.583.580	
20	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	Persentase penduduk terdiagnosa penyakit tidak menular	%	2,6%	< 5,0%	< 5,0%	< 5,0%	< 5,0%	< 5,0%	< 5,0%	Dikes
			Rp.000	175.848	196.304	196.304	196.304	196.304	196.304	981.522	
21	Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	Cakupan Puskesmas yang terfasilitasi biaya operasional penyelenggaraan layanan Puskesmas	%	100	100	100	100	100	100	100	Dikes
			Rp.000	-	6.950.000	7.820.835	8.800.786	9.903.524	11.144.436	44.619.580	
22	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	Cakupan imunisasi universal (UCI)	%	66,06%	72,73%	80,0%	87,27%	94,55%	100%	100%	Dikes
			Rp.000	-	423.038	423.038	423.038	423.038	423.038	2.115.190	
23	Program Pelayanan Ibu Hamil	Cakupan kunjungan antenatal K4	%	95,33	96	97	98	99	100	100	Dikes
			Rp.000	-	3.102.415	3.491.148	3.928.589	4.420.841	4.974.772	19.917.766	
24	Program Pelayanan Administrasi	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	100	100	100	100	100	100	RSUD



No	Program Prioritas Pembangunan Menurut Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program ( <i>Outcome</i> )		Capaian Kinerja Awal RPJMD (Tahun ke 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Pelaksana
					2016	2017	2018	2019	2020		
					Target Anggaran (Rp.000)	Target Anggaran (Rp.000)	Target Anggaran (Rp.000)	Target Anggaran (Rp.000)	Target Anggaran (Rp.000)	Target Anggaran (Rp.000)	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	Perkantoran		Rp.000	11.049.402	4.251.848	4.379.403	4.510.785	4.646.109	4.785.492	22.573.638	
25	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang memadai	%	100	100	100	100	100	100	100	RSUD
			Rp.000	4.250.037	1.319.373	1.319.373	1.319.373	1.319.373	1.319.373	6.596.865	
26	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan oleh Inspektorat/BPK yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	100	100	RSUD
		Persentase tertib administrasi barang/aset Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	RSUD
		Penilaian Lakip Perangkat Daerah oleh Inspektorat	Klasifikasi	CC	B	B	B	B	B	B	RSUD
			Rp.000	-	3.325	3.325	3.325	3.325	3.325	16.625	
27	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit	Tingkat pelayanan rumah sakit yang berkualitas	%	60	65	70	75	85	90	90	RSUD
			Rp.000	18.759.324	15.988.643	17.628.807	21.837.225	85.248.130	145.248.130	285.950.935	

No	Program Prioritas Pembangunan Menurut Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program ( <i>Outcome</i> )		Capaian Kinerja Awal RPJMD (Tahun ke 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Pelaksana
					2016	2017	2018	2019	2020		
					Target	Target	Target	Target	Target		
					Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)		
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>		<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
28	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit	Rasio penurunan tingkat BOR (Bed Occupancy Ratio)	1.04	1.04	96,5	93,29	90,28	87,46	80	80	RSUD
			Rp.000	40.076.727	44.826.666	50.443.447	56.764.011	63.876.542	71.880.272	287.790.937	
29	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Cakupan pemenuhan standar akreditasi nasional rumah sakit tingkat dasar	%	0	62,5	75	85	100	100	100	RSUD
			Rp.000	-	472.24	531.412	597.998	672.927	757.244	3.031.820	
<b>3</b>	<b>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>										
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran yang terselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	100	Dinas PU
			Rp.000	366.867	1.429.165	1.472.040	1.516.201	1.561.687	1.608.537	7.587.629	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang memadai	%	100	100	100	100	100	100	100	Dinas PU
			Rp.000	1.635.228	840.035	1.040.035	6.190.035	840.035	840.035	9.750.176	
3	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan oleh Inspektorat/BPK yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	100	100	Dinas PU
		Persentase tertib administrasi barang/aset Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	Dinas PU

No	Program Prioritas Pembangunan Menurut Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program ( <i>Outcome</i> )		Capaian Kinerja Awal RPJMD (Tahun ke 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Pelaksana
					2016	2017	2018	2019	2020		
					Target	Target	Target	Target	Target	Target	
				Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)		
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>		<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
		Penilaian Lakip Perangkat Daerah oleh Inspektorat	<i>Klasifikasi</i>	CC	B	B	B	B	B	B	Dinas PU
			<i>Rp.000</i>	35.067	24.4	24.4	24.4	24.4	24.4	121.999	
4	<i>Program Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah</i>	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang selaras dan tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100	Dinas PU
			<i>Rp.000</i>	22.531	18.221	18.221	18.221	18.221	18.221	91.105	
5	<i>Program pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong</i>	Persentase penambahan panjang drainase permukiman perkotaan yang dibangun	%	N/A	28,11	13,80	12,18	12	10,71	10,28	Dinas PU
			<i>Rp.000</i>	1.585.494	1.826.232	1.148.775	1.153.875	1.275.000	1.275.000	6.678.882	
6	<i>Program pembangunan turap/talud/ bronjong</i>	Panjang perkuatan tebing/bronjong yang dibangun	<i>Meter</i>	N/A	1640	1360	1000	1000	1000	6000	Dinas PU
			<i>Rp.000</i>	3.455.340	4.265.875	3.536.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	15.601.875	
7	<i>Program rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan</i>	Rasio panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap	%	60,72	68,58	75,58	82,58	89,58	100	100	Dinas PU
			<i>Rp.000</i>	66.041.121	57.779.224	89.700.751	89.700.751	89.700.751	121.622.278	448.503.754	
8	<i>Program Pembangunan jalan dan jembatan</i>	Tingkat penambahan panjang jalan kabupaten yang dibangun	<i>Km</i>	0	0	12	29	30	29	100	Dinas PU

No	Program Prioritas Pembangunan Menurut Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program ( <i>Outcome</i> )		Capaian Kinerja Awal RPJMD (Tahun ke 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Pelaksana
					2016	2017	2018	2019	2020		
					Target	Target	Target	Target	Target		
					Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			Rp.000	0	0	14.400.000	34.800.000	36.000.000	34.800.000	120.000.000	
9	Program Inspeksi kondisi jalan dan jembatan	Cakupan hasil inspeksi jalan dan jembatan yang didokumentasikan	%	100	100	100	100	100	100	100	Dinas PU
			Rp.000	92.234	92.234	100	100	100	100	492.234	
10	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Cakupan sarana prasarana kebinamargaan yang dipelihara	%	100	100	100	100	100	100	100	Dinas PU
			Rp.000	108.232	109.59	109.59	109.59	109.59	109.59	547.952	
11	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Rasio jaringan irigasi kewenangan kabupaten dalam kondisi baik	%	53,95	62,16	71,37	81,58	90,79	100	100	Dinas PU
			Rp.000	10.090.143	18.576.239	20.903.842	23.523.093	26.470.536	29.787.295	119.261.004	
12	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Jumlah embung, bendung, sumber air tanah yang dibangun	Unit	36	1	1	1	1	1	41	Dinas PU
			Rp.000	6.269.707	7.003.589	7.003.589	7.003.589	7.003.589	7.003.589	35.017.944	
13	Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai,	Cakupan GP3A yang berperan	%	35,21	47,89	60,56	73,24	85,92	100	100,00%	Dinas PU
			Rp.000	238.024	238.024	238.024	238.024	238.024	238.024	1.190.120	

No	Program Prioritas Pembangunan Menurut Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program ( <i>Outcome</i> )		Capaian Kinerja Awal RPJMD (Tahun ke 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Pelaksana
					2016	2017	2018	2019	2020		
					Target	Target	Target	Target	Target	Target	
					Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>Danau dan Sumber Daya Air Lainnya</i>										
14	<i>Program Pengendalian Banjir</i>	panjang bangunan pengaman pantai yang dibangun	<i>Meter</i>	N/A	73,56	1000	1000	1000	1926	5000	Dinas PU
			<i>Rp.000</i>	4.518.627	404.575	5.500.000	5.500.000	5.500.000	10.593.000	27.497.575	
15	<i>Program Perencanaan Tata Ruang</i>	Jumlah peraturan daerah tentang rencana tata ruang yang ditetapkan	<i>Perda</i>	1	1	1	2	2	2	9	Dinas PU
			<i>Rp.000</i>	712.707	515.684	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	4.515.684	
16	<i>Program Pemanfaatan Ruang</i>	Cakupan kecamatan yang tersosialisasi pemanfaatan ruang	<i>%</i>	N/A	20,83	41,67	62,50	83,33	100	100	Dinas PU
			<i>Rp.000</i>	74.32	40.638	40.638	40.638	40.638	40.638	203.19	
17	<i>Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang</i>	Jumlah rekomendasi kesesuaian pemanfaatan ruang yang diterbitkan	<i>Rekomendasi</i>	N/A	20	20	20	20	20	100	Dinas PU
			<i>Rp.000</i>	32.714	185.77	185.77	185.77	185.77	185.77	928.848	
<b>4</b>	<b>Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman</b>										
1	<i>Program Pengembangan Perumahan</i>	Cakupan rumah tidak layak huni yang tertangani	<i>Unit</i>	N/A	500	500	500	500	500	500	Dinas PU
			<i>Rp.000</i>	29.124	24.402	24.402	24.402	24.402	24.402	122.008	

No	Program Prioritas Pembangunan Menurut Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program ( <i>Outcome</i> )		Capaian Kinerja Awal RPJMD (Tahun ke 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Pelaksana
					2016	2017	2018	2019	2020		
					Target	Target	Target	Target	Target	Target	
					Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>		<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
2	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Jumlah kawasan permukiman kumuh yang ditangani	Kawasan	40	12	12	12	12	12	100	Dinas PU
		Cakupan layanan air bersih perkotaan	%	98,13	98,50	98,88	99,25	99,63	100	100	Dinas PU
		Cakupan layanan air bersih perdesaan	%	73,57	76,86	80,14	83,43	86,71	90	90	Dinas PU
		Cakupan rumah tangga bersanitasi	%	64,09	67,27	70,45	73,64	76,82	80	80	Dinas PU
			Rp.000	8.923.302	11.084.364	12.394.902	13.860.390	15.499.147	17.331.658	70.170.462	
3	Program pengelolaan areal pemakaman	Jumlah pemakaman yang ditangani	Unit	N/A	2	2	2	2	2	10	Dinas PU
			Rp.000	644.571	170.635	170.635	170.635	170.635	170.635	853.175	
4	Program Pembangunan Infrastruktur Permukiman/Perdesaan	infrastruktur permukiman pedesaan yang terbangun	Desa	N/A	2	-	-	-	-	2	Dinas PU
			Rp.000	4.003.439	3.911.084	-	-	-	-	3.911.084	
<b>5</b>	<b>Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat</b>										
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran yang terselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	100	Satpol PP
			Rp.000	286.266	145.95	150.329	154.838	159.484	164.268	774.869	

No	Program Prioritas Pembangunan Menurut Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program ( <i>Outcome</i> )		Capaian Kinerja Awal RPJMD (Tahun ke 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Pelaksana		
					2016	2017	2018	2019	2020				
					Target	Target	Target	Target	Target	Target			
					Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11		
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang memadai	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Satpol PP	
			Rp.000	137.175	197.605	197.605	197.605	197.605	197.605	988.025			
3	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan oleh Inspektorat/BPK yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Satpol PP	
		Persentase tertib administrasi barang/aset Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Satpol PP	
		Penilaian Lakip Perangkat Daerah oleh Inspektorat	Klasifikasi	CC	B	B	B	B	B	B	B	B	Satpol PP
			Rp.000	38.177	34.028	34.028	34.028	34.028	34.028	34.028	170.139		
4	Program Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang selaras dan tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Satpol PP	
			Rp.000	4.655	6.455	6.455	6.455	6.455	6.455	6.455	32.276		
5	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	Tingkat pemahaman masyarakat terhadap penyakit masyarakat (Pekat) yang disosialisasi	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Satpol PP	

No	Program Prioritas Pembangunan Menurut Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program ( <i>Outcome</i> )		Capaian Kinerja Awal RPJMD (Tahun ke 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Pelaksana
					2016	2017	2018	2019	2020		
					Target	Target	Target	Target	Target	Target	
					Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			Rp.000	17.526	12.408	12.408	12.408	12.408	12.408	62.04	
6	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Cakupan Linmas yang aktif	%	100	100	100	100	100	100	100	Satpol PP
			Rp.000	15.946	50.03	50.03	50.03	50.03	50.03	250.15	
7	Program Pemeliharaan Ketrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Cakupan operasi gabungan yang terlaksana	%	100	100	100	100	100	100	100	Satpol PP
		Cakupan kasus kriminalitas yang tertangani	%	100	100	100	100	100	100	100	Satpol PP
			Rp.000	1.927.396	1.919.965	1.919.965	1.919.965	1.919.965	1.919.965	9.599.824	
8	Program Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Umum	Cakupan pengamanan perlengkapan pemilukada Bupati dan wakil Bupati	%	100	-	-	-	-	100	100	Satpol PP
			Rp.000	345.104	-	-	-	-	400	400	
9	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran yang terselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	100	Kesbangpol-dagri
			Rp.000	251.07	267.131	275.145	283.4	291.902	300.659	1.418.237	
10	Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang memadai	%	100	100	100	100	100	100	100	Kesbangpol-dagri
			Rp.000	40.215	173.123	173.123	173.123	173.123	173.123	865.613	



No	Program Prioritas Pembangunan Menurut Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program ( <i>Outcome</i> )		Capaian Kinerja Awal RPJMD (Tahun ke 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Pelaksana	
					2016	2017	2018	2019	2020			
					Target	Target	Target	Target	Target	Target		
					Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	
11	<i>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja &amp; Keuangan</i>	Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan oleh Inspektorat/BPK yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	100	100	Kesbangpol-dagri	
		Persentase tertib administrasi barang/aset Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	Kesbangpol-dagri	
		Penilaian Lakip Perangkat Daerah oleh Inspektorat	<i>Klasifikasi</i>	CC	B	B	B	B	B	B	B	Kesbangpol-dagri
			<i>Rp.000</i>	18.081	38.23	38.23	38.23	38.23	38.23	38.23	191.148	
12	<i>Program Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah</i>	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang selaras dan tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100	Kesbangpol-dagri	
			<i>Rp.000</i>	18.084	28.195	28.195	28.195	28.195	28.195	28.195	140.976	
13	<i>Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan</i>	Tingkat Pemahaman terhadap Wawasan Kebangsaan, Ideologi Negara, Toleransi Antar Umat Beragama dan Antar Etnis di daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	Kesbangpol-dagri	
			<i>Rp.000</i>	211.19	284.388	284.388	284.388	284.388	284.388	284.388	1.421.942	

No	Program Prioritas Pembangunan Menurut Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program ( <i>Outcome</i> )		Capaian Kinerja Awal RPJMD (Tahun ke 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Pelaksana
					2016	2017	2018	2019	2020		
					Target	Target	Target	Target	Target	Target	
					Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
14	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Tingkat pemahaman rasa persatuan & kesatuan bangsa dan 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara (Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika)	%	100	100	100	100	100	100	100	Kesbangpol-dagri
			Rp.000	1.012.738	494.038	494.038	494.038	494.038	494.038	2.470.192	
15	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	100	Kesbangpol-dagri
			Rp.000	92.762	96.431	96.431	96.431	96.431	96.431	482.155	
16	Program Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Umum	Cakupan monitoring penyelenggaraan pemilu/pemilukada	%	100	100	100	100	100	100	100	Kesbangpol-dagri
			Rp.000	86.123	0	0	0	0	100	100	
17	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran yang terselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	100	BPBD
			Rp.000	292.973	536.658	552.758	569.341	586.421	604.014	2.849.191	
18	Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang memadai	%	100	100	100	100	100	100	100	BPBD

No	Program Prioritas Pembangunan Menurut Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program ( <i>Outcome</i> )		Capaian Kinerja Awal RPJMD (Tahun ke 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Pelaksana	
					2016	2017	2018	2019	2020			
					Target	Target	Target	Target	Target	Target		
					Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	
			Rp.000	472.431	213.842	213.842	213.842	213.842	213.842	1.069.209		
19	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan	Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan oleh Inspektorat/BPK yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	100	100	BPBD	
		Persentase tertib administrasi barang/aset Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	BPBD	
		Penilaian Lakip Perangkat Daerah oleh Inspektorat	Klasifikasi	CC	B	B	B	B	B	B	B	BPBD
			Rp.000	38.944	64.028	64.028	64.028	64.028	64.028	64.028	320.139	
20	Program Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang selaras dan tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100	BPBD	
			Rp.000	6.576	25.946	25.946	25.946	25.946	25.946	25.946	129.728	
21	Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Cakupan penanganan pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	%	100	100	100	100	100	100	100	BPBD	
			Rp.000	1.622.980	1.899.213	1.899.213	1.899.213	1.899.213	1.899.213	1.899.213	9.496.067	

No	Program Prioritas Pembangunan Menurut Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program ( <i>Outcome</i> )		Capaian Kinerja Awal RPJMD (Tahun ke 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Pelaksana
					2016	2017	2018	2019	2020		
					Target	Target	Target	Target	Target	Target	
					Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
22	Program Sarana dan Prasarana Logistik Bencana	Cakupan penanganan sarana dan prasarana bencana serta ketersediaan logistik dan obat-obatan pasca bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	BPBD
			Rp.000	296.326	415.813	415.813	415.813	415.813	415.813	2.079.064	
23	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Cakupan penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	BPBD
			Rp.000	191.502	78.396	78.396	78.396	78.396	78.396	391.978	
24	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Cakupan layanan sarana dan prasarana pemadam kebakaran	%	100	100	100	100	100	100	100	BPBD
			Rp.000	425.827	768.269	768.269	768.269	768.269	768.269	3.841.346	
25	Program Peningkatan Partisipasi dan Kapasitas Masyarakat dalam PRB	Cakupan Desa/Kelurahan yang telah memiliki kelompok masyarakat sadar bencana/Desa siaga bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	BPBD
			Rp.000	-	33.938	33.938	50	75	75	267.876	
<b>6</b>	<b>Sosial</b>										
1	Program Pelayanan Administrasi	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran yang terselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial

No	Program Prioritas Pembangunan Menurut Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program ( <i>Outcome</i> )		Capaian Kinerja Awal RPJMD (Tahun ke 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Pelaksana
					2016	2017	2018	2019	2020		
					Target	Target	Target	Target	Target		
					Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	Perkantoran		Rp.000	470.485	506.679	521.88	537.536	553.662	570.272	2.690.030	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang memadai	%	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial
			Rp.000	227.38	336.764	336.764	336.764	336.764	336.764	1.683.820	
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan oleh Inspektorat/BPK yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial
		Persentase tertib administrasi barang/aset Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial
		Penilaian Lakip Perangkat Daerah oleh Inspektorat	Target	CC	B	B	B	B	B	B	Dinas Sosial
			Rp.000	20.068	16.203	16.203	16.203	16.203	16.203	81.014	
4	Program Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang selaras dan tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial
			Rp.000	3.291	12.283	12.283	12.283	12.283	12.283	61.416	
5	Program Pemberdayaan Fakir	Jumlah KAT yang mendapatkan penanganan	KAT	118	120	122	124	128	130	130	Dinas Sosial

No	Program Prioritas Pembangunan Menurut Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program ( <i>Outcome</i> )		Capaian Kinerja Awal RPJMD (Tahun ke 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Pelaksana
					2016	2017	2018	2019	2020		
					Target	Target	Target	Target	Target		
					Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya</i>	Jumlah KTK-PM dan Fakir Miskin yang mendapatkan penanganan	<i>Orang</i>	12.274	12.46	12.6	12.75	12.85	13	13	Dinas Sosial
			<i>Rp.000</i>	937.931	404.927	404.927	404.927	404.927	404.927	2.024.637	
6	<i>Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial</i>	Jumlah PMKS yang mendapatkan bantuan layanan sosial	<i>Target</i>	26,61	30	35	40	45	50	50	Dinas Sosial
		Jumlah masyarakat korban bencana / yang mendapatkan bantuan tanggap darurat dan layanan sosial	<i>Orang</i>	2.321	2.457	2.593	2.728	2.864	3	3	Dinas Sosial
			<i>Rp.000</i>	324.231	410.034	410.034	410.034	410.034	410.034	2.050.171	
7	<i>Program Pembinaan para penyandang cacat dan trauma</i>	Jumlah penyandang difabel yang mendapatkan bantuan sosial	<i>Orang</i>	163	170	180	190	195	200	200	Dinas Sosial
			<i>Rp.000</i>	125.424	164.146	164.146	164.146	164.146	164.146	820.728	
8	<i>Program Pembinaan anak terlantar</i>	Cakupan anak terlantar yang dibina	<i>%</i>	N/A	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial
			<i>Rp.000</i>	92.197	125.72	125.72	125.72	125.72	125.72	628.598	
9	<i>Program pembinaan eks penyandang</i>	Jumlah Eks Penyandang Penyakit sosial yang terlatih	<i>PSKS</i>	150	170	190	200	210	220	990	Dinas Sosial

No	Program Prioritas Pembangunan Menurut Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program ( <i>Outcome</i> )		Capaian Kinerja Awal RPJMD (Tahun ke 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Pelaksana
					2016	2017	2018	2019	2020		
					Target	Target	Target	Target	Target	Target	
					Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)</i>		<i>Rp.000</i>	104.15	81.193	81.193	81.193	81.193	81.193	405.967	
10	<i>Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial</i>	Cakupan rumah singgah yang ditangani	%	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial
		Cakupan Panti Asuhan yang difasilitasi	%	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial
			<i>Rp.000</i>	427.317	356.724	356.724	356.724	356.724	356.724	1.783.619	
11	<i>Program Keluarga Harapan</i>	Jumlah pelayanan PKH bagi Keluarga Sangat Miskin (KSM)	<i>KSM</i>	30	31	32	33	34	35	35	Dinas Sosial
		Jumlah anak yang dikembalikan ke dunia pendidikan	<i>Anak</i>	210	90	120	120	150	180	660	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Jumlah penerima bantuan siswa miskin	<i>Siswa</i>	17.988	18.108	18.128	18.148	18.168	18.188	18.188	Dinas Sosial
		Jumlah penduduk miskin yang mendapat layanan JKN	<i>Orang</i>	25.112	25.112	25.362	25.612	25.862	26.112	26.112	Dinas Sosial, Dikes
			<i>Rp.000</i>	-	219.108	500	1.000.000	1.000.000	1.000.000	3.719.108	

No	Program Prioritas Pembangunan Menurut Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program ( <i>Outcome</i> )	Capaian Kinerja Awal RPJMD (Tahun ke 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Pelaksana	
				2016	2017	2018	2019	2020			
				Target	Target	Target	Target	Target	Target		
				Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	
<b>B.</b>	<b>Urusan Wajib Tidak Terkait Pelayanan Dasar</b>										
<b>1</b>	<b>Tenaga Kerja</b>										
1	<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran yang terselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	100	Disnakertrans
			<i>Rp.000</i>	337.036	366.205	377.192	388.507	400.163	412.167	1.944.234	
2	<i>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</i>	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang memadai	%	100	100	100	100	100	100	100	Disnakertrans
			<i>Rp.000</i>	1.592.720	468.783	468.783	468.783	468.783	468.783	2.343.917	
3	<i>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</i>	Persentase Tingkat disiplin pegawai	%	90	100	-	-	-	-	-	Disnakertrans
			<i>Rp.000</i>	8.858	9.92	-	-	-	-	9.92	
4	<i>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</i>	Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan oleh Inspektorat/BPK yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	100	100	Disnakertrans
		Persentase tertib administrasi barang/aset Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	Disnakertrans
		Penilaian Lakip Perangkat Daerah oleh Inspektorat	<i>Klasifikasi</i>	CC	B	B	B	B	B	B	Disnakertrans



No	Program Prioritas Pembangunan Menurut Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program ( <i>Outcome</i> )		Capaian Kinerja Awal RPJMD (Tahun ke 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Pelaksana
					2016	2017	2018	2019	2020		
					Target	Target	Target	Target	Target	Target	
					Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>		<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
			<i>Rp.000</i>	31.858	21.967	21.967	21.967	21.967	21.967	109.833	
5	<i>Program Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah</i>	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang selaras dan tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100	Disnakertrans
			<i>Rp.000</i>	7.5	10	10	10	10	10	50	
6	<i>Program Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja</i>	Jumlah tenaga kerja yang dilatih melalui pelatihan berbasis masyarakat	<i>Orang</i>	48	96	144	160	192	240	832	Disnakertrans
		Jumlah tenaga kerja yang dilatih melalui pelatihan berbasis kompetensi (LLK)	<i>Orang</i>	144	272	240	240	256	272	1.28	Disnakertrans
		Kegiatan diklat pengembangan instruktur dan tenaga kepelatihan/ upgrading yang dilaksanakan	<i>Keg</i>	1	2	4	6	6	8	8	Disnakertrans
		Ketersediaan peralatan latihan kerja (sesuai jenis kegiatan latihan) yang tersedia	<i>Unit</i>	10	10	10	10	10	10	10	Disnakertrans

No	Program Prioritas Pembangunan Menurut Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program ( <i>Outcome</i> )		Capaian Kinerja Awal RPJMD (Tahun ke 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Pelaksana
					2016	2017	2018	2019	2020		
					Target	Target	Target	Target	Target	Target	
					Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>		<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
		Jumlah wirausaha baru, wirausaha pemula, usaha mandiri produktif dan inovatif yang diciptakan dan dilatih	<i>Target</i>	20	40	60	80	100	120	400	Disnakertrans
		Jumlah angkatan kerja muda yang mengikuti seleksi program magang	<i>Orang</i>	30	50	60	70	80	100	360	Disnakertrans
		Lembaga Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) yang berbasis kompetensi dan terakreditasi	<i>LPKS</i>	1	2	4	5	6	8	8	Disnakertrans
			<i>Rp.000</i>	229.817	1.347.783	1.449.900	1.559.754	1.677.932	1.805.063	7.840.432	
7	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Kasus perselisihan hubungan industrial yang tertangani	<i>kasus</i>	29	27	32	37	42	47	185	Disnakertrans
		Jumlah lembaga kerjasama bipartit dan tripartit yang terbentuk dan tercatat	<i>Lembag</i>	0	20	25	30	35	40	150	Disnakertrans
		Jumlah Serikat Pekerja/Buruh yang difasilitasi pembentukannya	<i>Serikat</i>	20	25	27	29	31	33	145	Disnakertrans

No	Program Prioritas Pembangunan Menurut Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program ( <i>Outcome</i> )		Capaian Kinerja Awal RPJMD (Tahun ke 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Pelaksana
					2016	2017	2018	2019	2020		
					Target	Target	Target	Target	Target	Target	
					Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>		<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
		Jumlah perusahaan yang menerapkan perjanjian kerja bersama, peraturan perusahaan, perjanjian kerja waktu tertentu dan perjanjian kerja waktu tidak tertentu	<i>Perusahaan</i>	15	15	15	20	25	30	90	Disnakertrans
		Jumlah perusahaan yang mendaftarkan Perjanjian kerja	<i>Perusahaan</i>	20	35	40	45	50	55	225	Disnakertrans
		jumlah perusahaan pemborongan/penyedia jasa tenaga kerja yang terdaftar/tercatat	<i>Perusahaan</i>	12	15	17	20	22	24	98	Disnakertrans
		Jumlah anak yang dikembalikan ke dunia pendidikan	<i>Anak</i>	210	90	120	120	150	180	660	Disnakertrans
		Jumlah perusahaan yang menerapkan UMK	<i>Perusahaan</i>	N/A	280	290	310	325	400	400	Disnakertrans
		Perusahaan yang mendaftarkan JKN Ketenagakerjaan dan kesehatan	<i>Perusahaan</i>	0	45,00	48,00	66,67	71,43	100	100	Disnakertrans
			<i>Rp.000</i>	243.352	440.842	440.842	440.842	440.842	440.842	2.204.211	

No	Program Prioritas Pembangunan Menurut Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program ( <i>Outcome</i> )		Capaian Kinerja Awal RPJMD (Tahun ke 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Pelaksana	
					2016	2017	2018	2019	2020			
					Target	Target	Target	Target	Target	Target		
					Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	
8	<i>Program Peningkatan Kesempatan Kerja</i>	Jumlah pencari kerja yang telah ditempatkan didalam dan diluar negeri	<i>Orang</i>	3.172	2.6	2.8	3	3.2	3.5	15.1	Disnakertrans	
		Jumlah angkatan kerja yang terserap didalam maupun diluar negeri	<i>Orang</i>	3.172	2.6	2.8	3	3.2	3.5	15.1	Disnakertrans	
		Jumlah sarana media informasi yang tersedia dan dipublikasikan	<i>Media</i>	4	4	4	4	4	4	4	4	Disnakertrans
		Jumlah perusahaan yang melaporkan lowongan dan penempatan tenaga kerja	<i>Perusahaan</i>	3	3	3	4	4	4	4	18	Disnakertrans
		Jumlah TKI Purna dan keluarganya yang dilatih	<i>Orang</i>	55	45	60	60	60	60	60	285	Disnakertrans
		Jumlah kelompok usaha TKI purna dan keluarganya yang difasilitasi	<i>Kelompok</i>	7	6	6	6	7	7	7	32	Disnakertrans
		Jumlah perusahaan penempatan tenaga kerja Indonesia swasta (PPTKIS) yang dibina	<i>Perusahaan</i>	50	50	50	50	50	50	50	50	Disnakertrans

No	Program Prioritas Pembangunan Menurut Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program ( <i>Outcome</i> )		Capaian Kinerja Awal RPJMD (Tahun ke 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Pelaksana	
					2016	2017	2018	2019	2020			
					Target	Target	Target	Target	Target	Target		
				Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)			
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>		<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	
		Jumlah SOP rekrutmen calon TKI yang tersusun dan diimplementasikan	<i>SOP</i>	1	1	1	1	1	1	1	1	Disnakertrans
		Jumlah kasus TKI yang tertangani	<i>kasus</i>	40	40	40	45	50	60	60	60	Disnakertrans
			<i>Rp.000</i>	335.141	443.72	443.72	443.72	443.72	443.72	2.218.600		
<b>2</b>	<b>Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>											
1	<i>Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak Dan Perempuan</i>	Rasio partisipasi perempuan di lembaga legislatif	%	20	20	20	20	20	20	20	20	BKB-PP
		Rasio partisipasi Perempuan di lembaga pemerintahan	%	70	70	70	70	70	70	70	70	BKB-PP
		Indeks Pembangunan Gender	<i>Indeks</i>	> 0,2	> 0,4	> 0,5	> 0,6	> 0,7	> 0,8	> 0,8	> 0,8	BKB-PP
			<i>Rp.000</i>	26.946	34.584	34.584	34.584	34.584	34.584	34.584	172.922	
2	<i>Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak</i>	Cakupan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	%	100	100	100	100	100	100	100	100	BKB-PP

No	Program Prioritas Pembangunan Menurut Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program ( <i>Outcome</i> )		Capaian Kinerja Awal RPJMD (Tahun ke 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Pelaksana
					2016	2017	2018	2019	2020		
					Target	Target	Target	Target	Target	Target	
					Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			Rp.000	112.225	213.586	213.586	213.586	213.586	213.586	1.067.932	
3	Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan	Cakupan organisasi perempuan yang aktif	%	10	10	10	10	10	10	50	BKB-PP
			Rp.000	5.91	24.742	24.742	24.742	24.742	24.742	123.71	
<b>3</b>	<b>Pangan</b>										
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran yang terselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	100	KKP
			Rp.000	193.832	202.25	208.318	214.567	221.004	227.634	1.073.773	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang memadai	%	100	100	100	100	100	100	100	KKP
			Rp.000	1.104.550	303.093	303.093	303.093	303.093	303.093	1.515.463	
3	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan oleh Inspektorat/BPK yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	100	100	KKP

No	Program Prioritas Pembangunan Menurut Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program ( <i>Outcome</i> )		Capaian Kinerja Awal RPJMD (Tahun ke 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Pelaksana
					2016	2017	2018	2019	2020		
					Target	Target	Target	Target	Target	Target	
					Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		Persentase tertib administrasi barang/aset Perangkat Daerah	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	KKP
		Penilaian Lakip Perangkat Daerah oleh Inspektorat	Klasifikasi	CC	B	B	B	B	B	B	KKP
			Rp.000	22.594	21.407	21.407	21.407	21.407	21.407	107.033	
4	Program Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang selaras dan tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100%	KKP
			Rp.000	16.791	14.501	14.501	14.501	14.501	14.501	72.504	
5	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	Persentase penduduk rawan pangan	%	10,15	9,65	9,15	8,67	8,19	7,72	7,72	KKP
		Persentase desa rawan pangan	%	40,00	36,36	32,73	26,67	19,39	10,30	10,30	KKP
		Cakupan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) yang difasilitasi	%	33,33%	33,33	50,00	66,67	83,33	100	100	KKP
		Cakupan komoditas pangan yang diawasi	%	100	100	100	100	100	100	100	KKP
		Skor Pola Pangan Harapan	Skor	81,7	84	85,5	87	88,5	90	90	KKP
			Rp.000	-	2.407.054	2.482.234	2.559.762	2.639.712	2.722.158	12.810.920	

No	Program Prioritas Pembangunan Menurut Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program ( <i>Outcome</i> )	Capaian Kinerja Awal RPJMD (Tahun ke 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Pelaksana	
				2016	2017	2018	2019	2020			
				Target	Target	Target	Target	Target	Target		
				Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)		
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	
<b>4</b>	<b>Pertanahan</b>										
1	<i>Program penataan penguasaan, kepemilikan, pengguna dan pemanfaatan tanah</i>	Cakupan aset tanah milik pemerintah daerah yang dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kec/Kel/desa/pihak ketiga	%	98,28	98,62	98,97	99,31	99,66	100	100	Setda
		Jumlah Aset tanah pemerintah daerah yang tersertifikasi	<i>Sertifikat</i>	523	100	100	100	100	100	1023	Setda
		Cakupan realisasi pengadaan lahan oleh pemerintah daerah	%	95	100	100	100	100	100	100	Setda
			<i>Rp.000</i>	39.927.675	27.632.969	24.000.000	26.000.000	26.000.000	26.000.000	129.632.969	
2	Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	Cakupan fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan	%	100	100	100	100	100	100	100	Setda
			<i>Rp.000</i>	252.709	166.846	166.846	166.846	166.846	166.846	834.229	
<b>5</b>	<b>Lingkungan Hidup</b>										
1	<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran yang terselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	100	BPM-LH
			<i>Rp.000</i>	399.769	360.656	371.476	382.62	394.099	405.922	1.914.773	
2	<i>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</i>	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang memadai	%	100	100	100	100	100	100	100	BPM-LH



No	Program Prioritas Pembangunan Menurut Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program ( <i>Outcome</i> )		Capaian Kinerja Awal RPJMD (Tahun ke 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Pelaksana		
					2016	2017	2018	2019	2020				
					Target	Target	Target	Target	Target	Target			
					Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11		
			Rp.000	572.365	825.711	825.711	825.711	875.711	2.420.711	5.773.554			
3	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan oleh Inspektorat/BPK yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	100	100	100	BPM-LH	
		Persentase tertib administrasi barang/aset Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	BPM-LH	
		Penilaian Lakip Perangkat Daerah oleh Inspektorat	Klasifikasi	CC	B	B	B	B	B	B	B	B	BPM-LH
			Rp.000	90.313	73.768	73.768	73.768	73.768	73.768	73.768	368.838		
4	Program Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang selaras dan tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100	100	BPM-LH	
			Rp.000	42.6	48.094	48.094	48.094	48.094	48.094	48.094	240.47		
5	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Jumlah sarana prasarana persampahan yang memadai	Unit	168	5	5	5	5	5	5	193	BPM-LH	
		Rasio jumlah sampah terangkut terhadap jumlah timbunan sampah	%	41,67	45,83	50	54,17	58,33	62,50	62,50	62,50	BPM-LH	
			Rp.000	3.993.969	4.125.609	4.299.807	9.481.361	9.670.580	4.867.789	32.445.146			

No	Program Prioritas Pembangunan Menurut Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program ( <i>Outcome</i> )		Capaian Kinerja Awal RPJMD (Tahun ke 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Pelaksana
					2016	2017	2018	2019	2020		
					Target	Target	Target	Target	Target		
					Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
6	<i>Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup</i>	Cakupan kualitas lingkungan yang terpantau secara berkala dan terdokumentasi	%	50	60	70	80	90	100	100	BPM-LH
		Cakupan regulasi bidang LH yang terinformasi dan tersosialisasi secara masif kepada masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	100	BPM-LH
		Cakupan desa yang terbentuk kelompok sadar lingkungan	%	25,45	27,27	29,09	30,91	32,73	34,55	34,55	BPM-LH
			Rp.000	792.396	1.507.796	1.507.796	1.507.796	1.507.796	1.507.796	7.538.980	
7	<i>Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam</i>	Cakupan mata air yang terdata dan terpelihara	%	35,00	37,50	40,00	42,50	45,00	47,50	47,50	BPM-LH
			Rp.000	233.374	422.915	422.915	422.915	422.915	422.915	2.114.575	
8	<i>Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup</i>	Jumlah informasi lingkungan hidup yang terdokumentasi	Dok	6	2	2	2	2	2	10	BPM-LH
			Rp.000	180.951	208.202	208.202	208.202	208.202	208.202	1.041.009	
9	<i>Program Peningkatan Pengendalian Polusi</i>	Cakupan titik pantau kualitas tanah, air dan udara di kecamatan yang terpantau secara berkala	%	100	20,83	41,67	62,50	83,33	100,00	100,00	BPM-LH

No	Program Prioritas Pembangunan Menurut Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program ( <i>Outcome</i> )		Capaian Kinerja Awal RPJMD (Tahun ke 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Pelaksana
					2016	2017	2018	2019	2020		
					Target	Target	Target	Target	Target	Target	
				Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)		
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>		<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
			Rp.000	116.554	607.141	607.141	607.141	607.141	607.141	3.035.705	
10	Program pembangunan/ Penataan Taman dan Penerangan Jalan	Cakupan taman kota yang terbangun dan terpelihara	%	100	100	100	100	100	100	100	BPM-LH
			Rp.000	2.235.568	2.359.017	2.359.017	2.359.017	2.359.017	2.359.017	11.795.084	
<b>6</b>	<b>Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>										
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran yang terselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	100	Disdukcapi
			Rp.000	456.068	639.768	658.961	678.729	699.091	720.064	3.396.613	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang memadai	%	100	100	100	100	100	100	100	Disdukcapi
			Rp.000	17.638	224.458	224.458	224.458	224.458	224.458	1.122.290	
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Tingkat disiplin pegawai	%	90	100	-	-	-	-	-	Disdukcapi
			Rp.000	4.489	4.591	-	-	-	-	4.591	
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan oleh Inspektorat/BPK yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	100	100	Disdukcapi

No	Program Prioritas Pembangunan Menurut Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program ( <i>Outcome</i> )		Capaian Kinerja Awal RPJMD (Tahun ke 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Pelaksana
					2016	2017	2018	2019	2020		
					Target	Target	Target	Target	Target	Target	
				Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)		
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>		<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
		Persentase tertib administrasi barang/aset Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	Disdukcapil
		Penilaian Lakip Perangkat Daerah oleh Inspektorat	Klasifikasi	CC	B	B	B	B	B	B	Disdukcapil
			Rp.000	48.832	30.11	30.11	30.11	30.11	30.11	150.552	
5	Program Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang selaras dan tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100	Disdukcapil
			Rp.000	29.712	18.696	18.696	18.696	18.696	18.696	93.482	
6	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Cakupan Penerbitan dokumen kependudukan dan pemanfaatan data dan informasi	%	100	100	100	100	100	100	100	Disdukcapil
			Rp.000	1.042.895	718.906	750	750	750	750	3.718.906	
<b>7</b>	<b>Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>										
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran yang terselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	100	BPM-PD
			Rp.000	421.242	416.285	428.774	441.637	454.886	468.533	2.210.114	

No	Program Prioritas Pembangunan Menurut Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program ( <i>Outcome</i> )		Capaian Kinerja Awal RPJMD (Tahun ke 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Pelaksana	
					2016	2017	2018	2019	2020			
					Target	Target	Target	Target	Target	Target		
				Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)			
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>		<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang memadai	%	100	100	100	100	100	100	100	BPM-PD	
			Rp.000	6.799	86.051	86.051	86.051	86.051	86.051	430.255		
3	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan oleh Inspektorat/BPK yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	100	100	BPM-PD	
		Persentase tertib administrasi barang/aset Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	BPM-PD	
		Penilaian Lakip Perangkat Daerah oleh Inspektorat	Klasifikasi	CC	B	B	B	B	B	B	B	BPM-PD
			Rp.000	71.153	60.484	60.484	60.484	60.484	60.484	60.484	302.42	
4	Program penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang selaras dan tepat waktu	Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	BPM-PD	
			Rp.000	11.873	16.546	16.546	16.546	16.546	16.546	82.73		

No	Program Prioritas Pembangunan Menurut Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program ( <i>Outcome</i> )		Capaian Kinerja Awal RPJMD (Tahun ke 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Pelaksana
					2016	2017	2018	2019	2020		
					Target	Target	Target	Target	Target	Target	
					Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
5	<i>Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan</i>	Cakupan masyarakat perdesaan yang diberdayakan	%	100	100	100	100	100	100	100	BPM-PD
			<i>Rp.000</i>	1.286.661	896.211	896.211	896.211	896.211	896.211	4.481.056	
6	<i>Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan</i>	Cakupan lembaga ekonomi perdesaan yang berkualitas	%	100	100	100	100	100	100	100	BPM-PD
			<i>Rp.000</i>	169.372	147.198	147.198	147.198	147.198	147.198	735.992	
7	<i>Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa</i>	Cakupan masyarakat yang berkapasitas dalam membangun desa	%	100	100	100	100	100	100	100	BPM-PD
			<i>Rp.000</i>	928.634	472.065	472.065	472.065	472.065	472.065	2.360.325	
8	<i>Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa</i>	Cakupan aparatur pemerintahan desa yang berkualitas	%	100	100	100	100	100	100	100	BPM-PD
			<i>Rp.000</i>	154.014	216.497	216.497	216.497	216.497	216.497	1.082.484	

No	Program Prioritas Pembangunan Menurut Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program ( <i>Outcome</i> )		Capaian Kinerja Awal RPJMD (Tahun ke 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Pelaksana
					2016	2017	2018	2019	2020		
					Target	Target	Target	Target	Target	Target	
					Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
9	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	Cakupan pembinaan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan	%	100	100	100	100	100	100	100	BPM-PD
			Rp.000	-	214.878	214.878	214.878	214.878	214.878	1.074.392	
10	Program Pengembangan dan Penataan Desa dan Kelurahan	Cakupan penerapan sistem pengembangan tata masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	100	BPM-PD
			Rp.000	233.983	336.873	336.873	336.873	336.873	336.873	1.684.364	
11	Program Pemberdayaan Masyarakat Berpenghasilan Rendah	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa secara mandiri dan berkelanjutan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	BPM-PD
			Rp.000	-	359.097	359.097	359.097	359.097	359.097	1.795.483	
12	Program Pemberdayaan Pengelolaan Lingkungan	Cakupan partisipasi masyarakat dalam peningkatan kualitas lingkungan dan sanitasi	%	100	100	100	100	100	100	100	BPM-PD
			Rp.000	-	43.879	43.879	43.879	43.879	43.879	219.397	
13	Program Pemberdayaan Pemanfaatan	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan teknologi tepat guna	%	100	100	100	100	100	100	100	BPM-PD

No	Program Prioritas Pembangunan Menurut Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program ( <i>Outcome</i> )		Capaian Kinerja Awal RPJMD (Tahun ke 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Pelaksana
					2016	2017	2018	2019	2020		
					Target	Target	Target	Target	Target	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	<i>Tekhnologi</i>		<i>Rp.000</i>	-	14.583	14.583	14.583	14.583	14.583	72.913	
<b>8</b>	<b>Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>										
1	<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran yang terselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	100	BKB-PP
			<i>Rp.000</i>	243.525	278.298	286.647	295.246	304.104	313.227	1.477.522	
2	<i>Program Peningkatan Sarana dan prasarana aparatur</i>	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang memadai	%	100	100	100	100	100	100	100	BKB-PP
			<i>Rp.000</i>	1.999.706	1.716.876	1.909.714	2.124.211	2.362.800	2.628.187	10.741.789	
3	<i>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</i>	Persentase Tingkat disiplin pegawai	%	90	100	-	-	-	-	-	BKB-PP
			<i>Rp.000</i>	17.676	20.49	-	-	-	-	20.49	
4	<i>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja &amp; Keuangan</i>	Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan oleh Inspektorat/BPK yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	100	100	BKB-PP
			%	100	100	100	100	100	100	100	BKB-PP
			Penilaian Lakip Perangkat Daerah oleh Inspektorat	<i>Klasifikasi</i>	CC	B	B	B	B	B	B



No	Program Prioritas Pembangunan Menurut Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program ( <i>Outcome</i> )		Capaian Kinerja Awal RPJMD (Tahun ke 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Pelaksana
					2016	2017	2018	2019	2020		
					Target	Target	Target	Target	Target		
					Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			Rp.000	39.959	28.676	28.676	28.676	28.676	28.676	143.378	
5	Program Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang selaras dan tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100	BKB-PP
			Rp.000	36.574	36.994	36.994	36.994	36.994	36.994	184.97	
6	Program Keluarga Berencana	Cakupan Unmeet Need (kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi)	%	12,87	13	12	11	10	9	9	BKB-PP
			Rp.000	269.384	609.139	609.139	609.139	609.139	609.139	3.045.695	
7	Program Pelayanan Kontrasepsi	Cakupan pemakaian kontrasepsi (CPR)	%	77,43	62,50	63,00	63,00	64	65	65	BKB-PP
			Rp.000	225.057	1.436.646	1.600.295	1.675.529	1.754.300	1.836.774	8.303.545	
8	Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri	Cakupan pelayanan KB/KR yang mandiri	%	14	15	16	17	18	19	19	BKB-PP
		Cakupan peserta KB aktif mandiri	%	14	15	16	17	18	19	19	BKB-PP
			Rp.000	305.036	350.142	350.142	350.142	350.142	350.142	1.750.709	

No	Program Prioritas Pembangunan Menurut Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program ( <i>Outcome</i> )		Capaian Kinerja Awal RPJMD (Tahun ke 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Pelaksana
					2016	2017	2018	2019	2020		
					Target	Target	Target	Target	Target	Target	
					Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>		<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
9	<i>Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi Dan Konseling KRR</i>	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap Desa/ kelurahan dan penurunan angka kelahiran remaja usia 15-19 tahun (ASFR 15-19 th)	%	2	1,5	1,55	1,54	1,53	1,50	2	BKB-PP
			<i>Rp.000</i>	72.759	145.441	145.441	145.441	145.441	145.441	727.204	
10	<i>Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan Dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak</i>	Cakupan informasi (leaflet/ booklet) tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak yang tersedia	%	100	100	100	100	100	100	100	BKB-PP
			<i>Rp.000</i>	255.937	266.934	266.934	266.934	266.934	266.934	1.334.669	
11	<i>Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga</i>	Cakupan anggota kelompok bina keluarga yang melaksanakan fungsi keluarga	%	8,44	8,44	8,97	9,49	10,00	10,54	11,00	BKB-PP
			<i>Rp.000</i>	54.364	75.363	75.363	75.363	75.363	75.363	376.815	
<b>9</b>	<b>Perhubungan</b>										
1	<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran yang terselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	100	Dishubkominfo
			<i>Rp.000</i>	471.182	583.313	600.812	618.836	637.402	656.524	3.096.886	

No	Program Prioritas Pembangunan Menurut Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program ( <i>Outcome</i> )		Capaian Kinerja Awal RPJMD (Tahun ke 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Pelaksana	
					2016	2017	2018	2019	2020			
					Target	Target	Target	Target	Target	Target		
					Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dishubkominfo	
			Rp.000	142.733	118.433	118.433	118.433	118.433	118.433	592.166		
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan oleh Inspektorat/BPK yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	100	100	Dishubkominfo	
		Persentase tertib administrasi barang/aset Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	Dishubkominfo	
		Penilaian Lakip Perangkat Daerah oleh Inspektorat	Klasifikasi	CC	B	B	B	B	B	B	B	Dishubkominfo
			Rp.000	8.845	8.845	8.845	8.845	8.845	8.845	8.845	44.224	
4	Program Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang selaras dan tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100	Dishubkominfo	
			Rp.000	4.792	10.334	10.334	10.334	10.334	10.334	51.67		
5	Program Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan teknis transportasi	Dok	N/A	1	2	1	2	1	6	Dishubkominfo	
			Rp.000	30.081	171.739	171.739	171.739	171.739	171.739	858.693		

No	Program Prioritas Pembangunan Menurut Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program ( <i>Outcome</i> )		Capaian Kinerja Awal RPJMD (Tahun ke 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Pelaksana
					2016	2017	2018	2019	2020		
					Target	Target	Target	Target	Target	Target	
				Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)		
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>		<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
6	<i>Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ</i>	Cakupan fasilitas perhubungan yang dipelihara	%	100	100	100	100	100	100	100	Dishubkominfo
			<i>Rp.000</i>	1.499.291	1.640.086	1.640.086	1.640.086	1.640.086	1.640.086	8.200.430	
7	<i>Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan</i>	Jumlah terminal type C	<i>Unit</i>	N/A	-	0	1	1	1	3	Dishubkominfo
		Jumlah shelter yang terbangun	<i>Unit</i>	N/A	-	0	1	1	1	3	Dishubkominfo
		Jumlah halte yang terbangun	<i>Unit</i>	13	-	4	4	4	5	30	Dishubkominfo
		Jumlah pos jaga yang terbangun	<i>Unit</i>	5	-	0	1	1	0	7	Dishubkominfo
		Jumlah portal yang terbangun	<i>Unit</i>	N/A	-	2	2	2	2	8	Dishubkominfo
		Jumlah dermaga/tambatan perahu	<i>Unit</i>	5	-	1	1	1	1	4	Dishubkominfo
			<i>Rp.000</i>	698.176	794.374	794.374	794.374	794.374	794.374	3.971.871	
8	<i>Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas</i>	Jumlah marka jalan yang tersedia	<i>Meter</i>	2.712,50	900	1000	1000	1000	1000	5000	Dishubkominfo
		Jumlah rambu lalu lintas yang terpasang	<i>Unit</i>	363	-	100	100	100	100	563	Dishubkominfo

No	Program Prioritas Pembangunan Menurut Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program ( <i>Outcome</i> )		Capaian Kinerja Awal RPJMD (Tahun ke 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Pelaksana
					2016	2017	2018	2019	2020		
					Target	Target	Target	Target	Target	Target	
					Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		Jumlah pagar pengaman jalan yang terbangun	<i>Meter</i>	550	150 m	100	100	100	100	1100	Dishubkominfo
		Jumlah alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL) yang terpasang	<i>Unit</i>	4	1	1	1	1	1	9	Dishubkominfo
		Jumlah rambu penunjuk pendahulu jurusan (RPPJ) yang terpasang	<i>Unit</i>	4	-	10	10	10	20	50	Dishubkominfo
		Jumlah cermin tikungan yang terpasang	<i>Unit</i>	N/A	-	10	10	10	20	50	Dishubkominfo
		Jumlah Zona selamat sekolah (ZoSS) yang tersedia	<i>Lokasi</i>	2	-	3	3	3	3	14	Dishubkominfo
			<i>Rp.000</i>	664.538	-	664.538	664.538	664.538	664.538	2.658.152	
9	<i>Program peningkatan pelayanan angkutan</i>	Jumlah arus penumpang (multi-moda) yang terlayani	<i>Orang</i>	527.634	600	700	800	900	1.000.000	1.000.000	Dishubkominfo
		Jumlah arus barang (multi-moda) yang terlayani	<i>Barang</i>	1.172.250	1.200.000	1.350.000	1.500.000	1.750.000	2.000.000	2.000.000	Dishubkominfo
			<i>Rp.000</i>	914.944	813.131	813.131	813.131	813.131	813.131	4.065.656	
10	<i>Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor</i>	Jumlah alat pengujian kendaraan bermotor yang tersedia	<i>Unit</i>	N/A	-	1	1	1	1	4	Dishubkominfo
			<i>Rp.000</i>	-	-	500	500	500	500	2.000.000	

No	Program Prioritas Pembangunan Menurut Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program ( <i>Outcome</i> )	Capaian Kinerja Awal RPJMD (Tahun ke 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Pelaksana	
				2016	2017	2018	2019	2020	Target		
				Target	Target	Target	Target	Target	Target		
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	
<b>10</b>	<b>Komunikasi dan Informatika</b>										
1	<i>Program Pemanfaatan Potensi Sektor Pos dan Telekomunikasi</i>	Jumlah menara telekomunikasi yang diawasi	<i>Unit</i>	N/A	227	227	227	227	227	227	Dishubkominfo
			<i>Rp.000</i>	90.445	181.1	181.1	181.1	181.1	181.1	905.5	
2	<i>Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa</i>	Jumlah kecamatan yg mendapat layanan seluler/akses internet	<i>Kec.</i>	20	20	21	22	23	24	24	Dishubkominfo
			<i>Rp.000</i>	39.08	254.755	254.755	254.755	254.755	254.755	1.273.773	
3	<i>Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi</i>	Jumlah SDM yang tersosialisasi NSPK bidang kominfo	<i>Orang</i>	N/A	50	50	50	50	50	250	Dishubkominfo
			<i>Rp.000</i>	30.697	30.88	30.88	30.88	30.88	30.88	154.4	
4	<i>Program kerjasama informasi dengan mas media</i>	Jumlah event pameran pembangunan / ekspo yang terlaksana	<i>event</i>	1	1	1	1	1	1	5	Dishubkominfo
			<i>Rp.000</i>	310.69	271.541	271.541	271.541	271.541	271.541	1.357.704	

No	Program Prioritas Pembangunan Menurut Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program ( <i>Outcome</i> )		Capaian Kinerja Awal RPJMD (Tahun ke 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Pelaksana
					2016	2017	2018	2019	2020		
					Target	Target	Target	Target	Target		
						Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>		<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
5	<i>Program Pengembangan Teknologi Informatika</i>	Jumlah aplikasi online yang disediakan pemerintah daerah	<i>Aplikasi</i>	12	1	1	1	1	1	17	Dishubkominfo
			<i>Rp.000</i>	339.473	579.644	579.644	579.644	579.644	579.644	2.898.220	
<b>11</b>	<b>Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</b>										
1	<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran yang terselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	100	Diskoperindag
			<i>Rp.000</i>	326.042	286.954	295.563	304.43	313.563	322.969	1.523.479	
2	<i>Program Peningkatan Sarana &amp; Prasarana Aparatur</i>	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang memadai	%	100	100	100	100	100	100	100	Diskoperindag
			<i>Rp.000</i>	236.702	112.597	112.597	112.597	152.597	1.152.597	1.642.985	
3	<i>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</i>	Persentase sumberdaya aparatur memiliki kompetensi sesuai bidangnya	%	100	100	100	100	100	100	100	Diskoperindag
			<i>Rp.000</i>	384.802	393.518	393.518	393.518	393.518	393.518	1.967.588	
4	<i>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</i>	Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan oleh Inspektorat/BPK yang ditindaklanjuti	<i>Target</i>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Diskoperindag
		Persentase tertib administrasi barang/aset Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	Diskoperindag

No	Program Prioritas Pembangunan Menurut Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program ( <i>Outcome</i> )		Capaian Kinerja Awal RPJMD (Tahun ke 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Pelaksana
					2016	2017	2018	2019	2020		
					Target	Target	Target	Target	Target		
					Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		Penilaian Lakip Perangkat Daerah oleh Inspektorat	<i>Klasifikasi</i>	CC	B	B	B	B	B	B	Diskoperindag
			<i>Rp.000</i>	23.49	19.889	19.889	19.889	19.889	19.889	99.447	
5	<i>Program Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah</i>	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang selaras dan tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100	Diskoperindag
			<i>Rp.000</i>	13.805	49.266	49.266	49.266	49.266	49.266	246.332	
6	<i>Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif</i>	Cakupan UMKM formal	%	35	38	42	45	48	50	50	Diskoperindag
			<i>Rp.000</i>	36.713	93.003	93.003	93.003	93.003	93.003	465.013	
7	<i>Program Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah</i>	Cakupan wirausaha baru yang tercipta	%	12,03	25	40	55	70	85	100	Diskoperindag
			<i>Rp.000</i>	384.814	167.008	167.008	167.008	167.008	167.008	835.042	
8	<i>Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi</i>	Cakupan koperasi aktif	%	50	55	60	65	70	75	75	Diskoperindag
		Cakupan koperasi berkualitas	%	78	79	80	81	82	83	83	Diskoperindag
			<i>Rp.000</i>	149.046	126.336	126.336	126.336	126.336	126.336	631.68	



No	Program Prioritas Pembangunan Menurut Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program ( <i>Outcome</i> )		Capaian Kinerja Awal RPJMD (Tahun ke 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Pelaksana
					2016	2017	2018	2019	2020		
					Target	Target	Target	Target	Target		
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>		<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	
9	Program pengembangan KSP/USP Koperasi dan LKM	Cakupan KSP/USP sehat	%	61	63	65	67	69	71	71	Diskoperindag
			Rp.000	90.594	9.591	99.591	99.591	99.591	99.591	407.956	
10	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Persentase usaha mikro dan kecil yang difasilitasi dengan lapak/ outlet pemasaran	%	1	1	1	1	1	1	1	Diskoperindag
			Rp.000	3.752.251	720.66	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	4.720.660	
<b>12</b>	<b>Penanaman Modal</b>										
1	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah event promosi tingkat provinsi/regional/nasional yang diikuti	event	6	6	6	6	6	6	6	BPM-LH
		Jumlah dokumen data/informasi potensi dan peluang investasi	Dok	1	1	1	1	1	1	1	BPM-LH
		Jumlah kemitraan UMKM dengan usaha besar yang terjalin	UMKM	0	4	10	15	25	30	35	BPM-LH
			Rp.000	260.521	345.459	345.459	345.459	345.459	345.459	1.727.297	

No	Program Prioritas Pembangunan Menurut Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program ( <i>Outcome</i> )		Capaian Kinerja Awal RPJMD (Tahun ke 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Pelaksana
					2016	2017	2018	2019	2020		
					Target	Target	Target	Target	Target	Target	
				Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)		
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>		<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
2	<i>Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi</i>	ketersediaan layanan perizinan/investasi berbasis Teknologi Informatika	<i>Sistem</i>	2	3	4	5	5	5	5	BPM-LH
		Cakupan realisasi terhadap target investasi	%	100	100	100	100	100	100	100	BPM-LH
		Cakupan SDM yang memenuhi kualifikasi PTSP yang dilatih	%	17	17	28	44	61	83	100	BPM-LH
			<i>Rp.000</i>	96.087	133.614	133.614	133.614	133.614	133.614	668.069	
<b>13</b>	<b>Kepemudaan dan Olah Raga</b>										
1	<i>Program peningkatan peran serta kepemudaan</i>	Jumlah kelompok pemuda yang terfasilitasi sarana olahraga	<i>Kelompok</i>	298	298	298	298	298	298	298	Disporabudpar
			<i>Rp.000</i>	220.606	335.794	335.794	335.794	335.794	335.794	1.678.970	
2	<i>Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda</i>	Cakupan pelatihan kewirausahaan pemuda yang dilaksanakan	%	100	100	100	100	100	100	100	Disporabudpar
			<i>Rp.000</i>	63.259	59	59	59	59	59	294.999	
3	<i>Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga</i>	Cakupan atlet/club yang berprestasi minimal tingkat provinsi/regional	<i>Penghargaan</i>	15	15	18	20	25	30	123	Disporabudpar
			<i>Rp.000</i>	423.713	1.047.338	1.047.338	1.047.338	1.047.338	1.047.338	5.236.688	

No	Program Prioritas Pembangunan Menurut Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program ( <i>Outcome</i> )		Capaian Kinerja Awal RPJMD (Tahun ke 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Pelaksana
					2016	2017	2018	2019	2020		
					Target	Target	Target	Target	Target		
						Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>		<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
4	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	Jumlah pemuda berprestasi minimal tk. Provinsi/Regional	Orang	14	14	17	22	25	28	120	Disporabudpar
			Rp.000	289.455	209.73	209.73	209.73	209.73	209.73	1.048.649	
5	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga	Cakupan kebijakan dan manajemen bidang olahraga	%	100	100	100	100	100	100	100	Disporabudpar
			Rp.000	375.765	163.655	163.655	163.655	163.655	163.655	818.273	
6	Program Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga	Ketersediaan sarana prasarana olahraga representatif	Unit	1	1	1	1	1	1	1	Disporabudpar
			Rp.000	729.976	1.301.493	750	2.350.000	20.600.000	21.200.000	46.201.493	
<b>14</b>	<b>Statistik</b>										
1	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	Cakupan ketersediaan data dasar sesuai potensi daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	Bappeda
		Cakupan survey data sektoral yang direkomendasikan BPS	%		100	100	100	100	100	100	Bappeda

No	Program Prioritas Pembangunan Menurut Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program ( <i>Outcome</i> )		Capaian Kinerja Awal RPJMD (Tahun ke 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Pelaksana
					2016	2017	2018	2019	2020		
					Target	Target	Target	Target	Target	Target	
				Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)		
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>		<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
		Cakupan ketersediaan data kebutuhan perencanaan pembangunan daerah hasil analisis	%	100	100	100	100	100	100	100	Bappeda
			Rp.000	221.21	362.513	1.362.513	1.362.513	1.362.513	1.362.513	5.812.563	
<b>15</b>	<b>Persandian</b>										
1	<i>Program Penataan dan Pengembangan Kesandian Daerah</i>	Cakupan ketersediaan sarana prasarana persandian	%	20	35	45	70	90	100	100	Setda
		Cakupan fungsional persandian yang profesional	%	20	35	45	70	90	100	100	Setda
			Rp.000	36.35	-	200	200	200	200	800	
<b>16</b>	<b>Kebudayaan</b>										
1	<i>Program Pengembangan Nilai Budaya</i>	Apresiasi Pemerintah Daerah kepada Budayawan/seniman	Orang	240	240	240	240	240	240	240	Disporabudpar
		Jumlah Lembaga Adat dan Dewan Kesenian Daerah yang difasilitasi	Kelompok	26	6	6	6	6	6	56	Disporabudpar
		publikasi bernuansa nilai-nilai budaya yang diterbitkan	Keg	5	2	2	2	2	2	15	Disporabudpar

No	Program Prioritas Pembangunan Menurut Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program ( <i>Outcome</i> )		Capaian Kinerja Awal RPJMD (Tahun ke 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Pelaksana
					2016	2017	2018	2019	2020		
					Target	Target	Target	Target	Target	Target	
					Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		Jumlah Pusat Kajian Seni Budaya yang dibentuk dan difasilitasi	<i>Unit</i>	-	-	-	1	1	1	1	Disporabudpar
			<i>Rp.000</i>	1.426.049	872.334	872.334	872.334	872.334	872.334	4.361.670	
2	<i>Program Pengelolaan Kekayaan Budaya</i>	Jumlah bangunan/situs cagar budaya yang dikelola dan dikembangkan	<i>Unit</i>	43	3	3	3	4	4	60	Disporabudpar
		Jumlah juru pelihara situs cagar budaya yang dibina	<i>Orang</i>	25	10	10	10	10	10	75	Disporabudpar
		Jumlah Museum daerah yang difasilitasi/dikembangkan	<i>Unit</i>	4	5	6	8	10	10	10	Disporabudpar
			<i>Rp.000</i>	304.951	402.876	402.876	402.876	402.876	402.876	2.014.382	
3	<i>Program Pengelolaan Keragaman Budaya</i>	Cakupan pagelaran dan festival seni budaya yang menjadi event tetap dan dipublikasikan melalui media	<i>%</i>	46	55	64	73	82	92	92	Disporabudpar
		Jumlah event festival seni budaya regional dan nasional yang diikuti	<i>event</i>	12	12	12	12	12	12	12	Disporabudpar
		Jumlah sanggar seni yang terlibat aktif	<i>Unit</i>	84	97	110	123	136	150	150	Disporabudpar

No	Program Prioritas Pembangunan Menurut Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program ( <i>Outcome</i> )		Capaian Kinerja Awal RPJMD (Tahun ke 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Pelaksana
					2016	2017	2018	2019	2020		
					Target	Target	Target	Target	Target		
					Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>		<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
			Rp.000	815.705	1.032.371	1.032.371	1.032.371	1.032.371	1.032.371	5.161.856	
4	Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya	Kegiatan misi seni budaya untuk promosi yang difasilitasi	Keg	-	2	2	2	2	4	4	Disporabudpar
			Rp.000	-	424.503	424.503	424.503	424.503	424.503	2.122.513	
<b>17</b>	<b>Perpustakaan</b>										
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran yang terselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	100	Arpusda
			Rp.000	305.968	444.199	457.525	471.251	485.388	499.95	2.358.313	
2	Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang memadai	%	100	100	100	100	100	100	100	Arpusda
			Rp.000	311.942	503.392	5.000.000	1.303.392	1.013.392	1.303.392	9.123.567	
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan	Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan oleh Inspektorat/BPK yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	100	100	Arpusda
		Persentase tertib administrasi barang/aset Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	Arpusda
		Penilaian Lakip Perangkat Daerah oleh Inspektorat	Klasifikasi	CC	B	B	B	B	B	B	Arpusda

No	Program Prioritas Pembangunan Menurut Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program ( <i>Outcome</i> )		Capaian Kinerja Awal RPJMD (Tahun ke 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Pelaksana
					2016	2017	2018	2019	2020		
					Target	Target	Target	Target	Target	Target	
				Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)		
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>		<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
			Rp.000	18.164	15.001	15.1	15.1	15.1	15.1	75.401	
4	Program Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang selaras dan tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100	Arpusda
			Rp.000	3.481	8.272	8.3	8.3	8.3	8.3	41.472	
5	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Jumlah pengunjung perpustakaan daerah	Orang	42.917	43.5	45	46.5	47.5	48.8	48.8	Arpusda
		Cakupan ketersediaan buku/referensi	%	2.4	3	3	5	5	7.5	7.5	Arpusda
			Rp.000	719.038	992.035	992.035	992.035	1.000.000	1.000.000	4.976.104	
<b>18</b>	<b>Kearsipan</b>										
1	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	Cakupan Sistem pengelolaan kearsipan berbasis IT ( E-Archive)	%	0	20	40	60	90	100	100	Arpusda
		Jumlah arsip daerah yang terpelihara	Arsip	24.396	27.6	31	34.25	37.4	40.64	40.64	Arpusda
			Rp.000	-	26.932	26.932	26.932	26.932	26.932	134.661	
2	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menerapkan Arsip Secara Baku	Perangkat daerah	6	15	25	35	45	55	55	Arpusda

No	Program Prioritas Pembangunan Menurut Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program ( <i>Outcome</i> )		Capaian Kinerja Awal RPJMD (Tahun ke 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Pelaksana
					2016	2017	2018	2019	2020		
					Target Anggaran (Rp.000)	Target Anggaran (Rp.000)	Target Anggaran (Rp.000)	Target Anggaran (Rp.000)	Target Anggaran (Rp.000)	Target Anggaran (Rp.000)	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			Rp.000	246.757	207.518	207.518	207.518	207.518	207.518	1.037.588	
3	Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan	Cakupan pemeliharaan sarana dan prasarana Kearsipan	%	0	20	40	60	90	100	100	Arpusda
			Rp.000	42.978	41.882	41.882	41.882	41.882	41.882	209.409	
4	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	Cakupan Perangkat Daerah yang tersosialisasi tentang Kearsipan	PD	6	9	10	10	10	10	55	Arpusda
			Rp.000	41.241	296.486	296.486	296.486	296.486	296.486	1.482.430	
<b>C.</b>	<b>Urusan Pilihan</b>										
<b>1</b>	<b>Kelautan dan Perikanan</b>										
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran yang terselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	100	Dislutkan
			Rp.000	576.798	469.176	483.252	497.749	512.682	528.062	2.490.922	
2	Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang memadai	%	100	100	100	100	100	100	100	Dislutkan



No	Program Prioritas Pembangunan Menurut Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program ( <i>Outcome</i> )		Capaian Kinerja Awal RPJMD (Tahun ke 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Pelaksana	
					2016	2017	2018	2019	2020			
					Target	Target	Target	Target	Target			
					Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	
			Rp.000	466.955	2.043.909	450	450	450	450	3.843.909		
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan oleh Inspektorat/BPK yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Dislutkan
		Persentase tertib administrasi barang/aset Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Dislutkan
		Penilaian Lakip Perangkat Daerah oleh Inspektorat	Klasifikasi	CC	B	B	B	B	B	B	B	Dislutkan
			Rp.000	21.049	21.234	21.234	21.234	21.234	21.234	21.234	106.172	
4	Program Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang selaras dan tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Dislutkan
			Rp.000	13.145	19.22	19.22	19.22	19.22	19.22	19.22	96.098	
5	Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan Dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan	Persentase desa pesisir yang memiliki pokmaswas	%	53,97	61,90	69,84	77,78	85,71	93,65	93,65	93,65	Dislutkan
			Rp.000	233.871	22.65	22.65	22.65	22.65	22.65	22.65	113.248	

No	Program Prioritas Pembangunan Menurut Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program ( <i>Outcome</i> )		Capaian Kinerja Awal RPJMD (Tahun ke 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Pelaksana
					2016	2017	2018	2019	2020		
					Target	Target	Target	Target	Target	Target	
					Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
6	Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Jumlah desa sadar hukum terhadap pengelolaan SDA kelautan dan perikanan yang ditangani	Desa	2	4	6	8	10	12	12	Dislutkan
			Rp.000	562.248	277.57	277.57	277.57	277.57	277.57	1.387.851	
7	Program Peningkatan Budaya Kelautan dan Wawasan Maritim Kepada Masyarakat	Cakupan budaya kelautan pengawasan maritim yang disosialisasikan	%	100	100	100	100	100	100	100	Dislutkan
			Rp.000	159.364	158.319	158.319	158.319	158.319	158.319	791.594	
8	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Pertumbuhan produksi perikanan budidaya	%	N/A	0,37	1,36	1,38	1,40	1,42	6,06	Dislutkan
		Pertumbuhan produksi garam	Target	N/A	13,42	20,00	28,89	29,31	33,33	202,45	
			%	3.356.629	1.304.313	1.304.313	1.304.313	1.304.313	1.304.313	6.521.567	
9	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Pertumbuhan produksi perikanan tangkap	%	N/A	3,04	2,96	2,96	2,88	2,96	15,69	Dislutkan
			Rp.000	5.105.055	4.940.722	5.559.794	6.256.436	7.040.368	7.922.526	31.719.846	
10	Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan	Jumlah kelompok pembudidaya perikanan yang disuluh	Kelompok	183	203	223	243	263	283	283	Dislutkan
			Rp.000	390.515	220.97	220.97	220.97	220.97	220.97	1.104.852	

No	Program Prioritas Pembangunan Menurut Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program ( <i>Outcome</i> )		Capaian Kinerja Awal RPJMD (Tahun ke 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Pelaksana
					2016	2017	2018	2019	2020		
					Target	Target	Target	Target	Target	Target	
					Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
11	<i>Program Optimalisasi Pengelolaan Dan Pemasaran Produksi Perikanan</i>	Pertumbuhan produksi olahan hasil perikanan	%	N/A	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	50,00	Dislutkan
		Pemasaran hasil perikanan keluar daerah (ton)	Ton	24.467	26.2	28	29.8	31.6	33.4	33.4	Dislutkan
		Konsumsi ikan perkapita (Kg/kapita/tahun)	Kg/kapita/tahun	44,95	45,90	46,90	47,90	48,90	49,00	49,00	Dislutkan
			Rp.000	1.089.104	1.059.868	750	750	750	750	4.059.868	
12	<i>Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar</i>	Cakupan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar yang diberdayakan	%	100	100	100	100	100	100	100	Dislutkan
			Rp.000	413.914	234.778	234.778	234.778	234.778	234.778	1.173.891	
13	<i>Program Pengembangan Perencanaan, Pengendalian Pembangunan dan Data Statistik Perikanan</i>	Cakupan data kelautan perikanan yang tersedia	%	100	100	100	100	100	100	100	Dislutkan
			Rp.000	225.551	146.452	146.452	146.452	146.452	146.452	732.26	
14	<i>Program Pengembangan dan Pengelolaan pada Pulau-Pulau Kecil</i>	Jumlah pulau-pulau kecil yang tertangani (buah)	Pulau	9	10	11	12	13	14	14	Dislutkan
		Pertumbuhan produksi garam	%	N/A	13,42	20,00	28,89	29,31	33,33	202,45	Dislutkan
			Rp.000	665.154	390.529	390.529	390.529	390.529	390.529	1.952.643	

No	Program Prioritas Pembangunan Menurut Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program ( <i>Outcome</i> )		Capaian Kinerja Awal RPJMD (Tahun ke 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Pelaksana	
					2016	2017	2018	2019	2020			
					Target	Target	Target	Target	Target	Target		
					Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	
2	<b>Pariwisata</b>											
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran yang terselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Disporabudpar
			Rp.000	580.483	691.82	712.575	733.952	755.971	778.65	3.672.968		
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang memadai	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Disporabudpar
			Rp.000	7.133	120	120	120	520	10.520.000	11.400.000		
3	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan oleh Inspektorat/BPK yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Disporabudpar
		Persentase tertib administrasi barang/aset Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Disporabudpar
		Penilaian Lakip Perangkat Daerah oleh Inspektorat	Klasifikasi	CC	B	B	B	B	B	B	B	Disporabudpar
				Rp.000	22.484	32.051	32.051	32.051	32.051	32.051	160.253	
4	Program Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang selaras dan tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Disporabudpar

No	Program Prioritas Pembangunan Menurut Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program ( <i>Outcome</i> )		Capaian Kinerja Awal RPJMD (Tahun ke 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Pelaksana
					2016	2017	2018	2019	2020		
					Target	Target	Target	Target	Target		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>		<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
			<i>Rp.000</i>	42.273	54.518	54.518	54.518	54.518	54.518	272.59	
5	Program pengembangan pemasaran pariwisata	Cakupan event promosi pariwisata yang dilaksanakan dan diikuti	%	100	100	100	100	100	100	100	Disporabudpar
			<i>Rp.000</i>	619.694	574.179	750	750	750	750	3.574.179	
6	Program pengembangan destinasi pariwisata	Jumlah destinasi wisata yang dikelola	<i>Unit</i>	49	49	63	77	91	117	117	Disporabudpar
			<i>Rp.000</i>	303.945	500.512	1.000.000	1.500.000	2.000.000	2.000.000	7.000.512	
7	Program pengembangan Kemitraan	Jumlah destinasi wisata yang dikerjasamakan	<i>Dok</i>	1	1	1	1	1	1	1	Disporabudpar
			<i>Rp.000</i>	64.389	42.944	75	100	150	200	567.944	
<b>3</b>	<b>Pertanian</b>										
1	<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran yang terselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	100	Distan Pangan dan Hortikultura
			<i>Rp.000</i>	873.505	755.786	778.46	801.814	825.868	850.644	4.012.573	

No	Program Prioritas Pembangunan Menurut Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program ( <i>Outcome</i> )		Capaian Kinerja Awal RPJMD (Tahun ke 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Pelaksana
					2016	2017	2018	2019	2020		
					Target	Target	Target	Target	Target		
					Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
2	<i>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</i>	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang memadai	%	100	100	100	100	100	100	100	Distan Pangan dan Hortikultura
			Rp.000	666.652	177.602	177.602	177.602	177.602	177.602	888.008	
3	<i>Program peningkatan disiplin aparatur</i>	Persentase Tingkat disiplin pegawai	Target	90	100	-	-	-	-	-	Distan Pangan dan Hortikultura
			Rp.000	22.996	13.827	-	-	-	-	13.827	
4	<i>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</i>	Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan oleh Inspektorat/BPK yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	100	100	Distan Pangan dan Hortikultura
		Persentase tertib administrasi barang/aset Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	Distan Pangan dan Hortikultura

No	Program Prioritas Pembangunan Menurut Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program ( <i>Outcome</i> )		Capaian Kinerja Awal RPJMD (Tahun ke 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Pelaksana
					2016	2017	2018	2019	2020		
					Target	Target	Target	Target	Target	Target	
					Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		Penilaian Lakip Perangkat Daerah oleh Inspektorat	<i>Klasifikasi</i>	CC	B	B	B	B	B	B	Distan Pangan dan Hortikultura
			<i>Rp.000</i>	40.532	95.367	95.367	95.367	95.367	95.367	476.835	
5	<i>Program Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah</i>	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang selaras dan tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100	Distan Pangan dan Hortikultura
			<i>Rp.000</i>	521.877	573.525	500	500	500	500	2.573.525	
6	<i>Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)</i>	Cakupan Produksi Beras (ton)	<i>Ton</i>	315.744	323.638	-	-	-	-	323.638	Distan Pangan dan Hortikultura
			<i>Rp.000</i>	7.260.529	2.330.830	-	-	-	-	2.330.830	

No	Program Prioritas Pembangunan Menurut Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program ( <i>Outcome</i> )		Capaian Kinerja Awal RPJMD (Tahun ke 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Pelaksana
					2016	2017	2018	2019	2020		
					Target	Target	Target	Target	Target	Target	
				Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)		
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>		<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
7	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	Cakupan Evet Promosi produk Tanaman Pangan yang diikuti	<i>event</i>	5	1	1	1	1	1	5	Distan Pangan dan Hortikultura
			<i>Rp.000</i>	117.177	98.93	98.93	98.93	98.93	98.93	494.648	
8	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/ perkebunan	Cakupan penerapan teknologi pertanian	<i>Keg</i>	733	1	1	1	1	1	5	Distan Pangan dan Hortikultura
			<i>Rp.000</i>	17.330.623	43.747	43.747	43.747	43.747	43.747	218.735	
9	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Cakupan ketersediaan bibit unggul di BBU yang tersalurkan	<i>%</i>	100	100	100	100	100	100	100	Distan Pangan dan Hortikultura
			<i>Rp.000</i>	314.764	324.039	324.039	324.039	324.039	324.039	1.620.193	



No	Program Prioritas Pembangunan Menurut Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program ( <i>Outcome</i> )		Capaian Kinerja Awal RPJMD (Tahun ke 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Pelaksana
					2016	2017	2018	2019	2020		
					Target	Target	Target	Target	Target	Target	
					Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
10	<i>Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan untuk mencapai Swasembada dan Swasembada berkelanjutan</i>	Produktivitas Padi (Kw/Ha)	<i>Kw/ha</i>	50,62	51,66	51,66	52,69	53,74	54,82	54,82	Distan Pangan dan Hortikultura
		Produktivitas Jagung (Kw/Ha)	<i>Kw/ha</i>	65,53	66,87	66,87	68,21	69,57	70,96	70,96	Distan Pangan dan Hortikultura
			<i>Rp.000</i>	921.583	381.283	381.283	381.283	381.283	381.283	1.906.413	
11	<i>Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian</i>	Jumlah benih padi yang tersedia dan tersalurkan	<i>Ton</i>	2	2.346	2.393	2.441	2.49	2.539	2.539	Distan Pangan dan Hortikultura
		Panjang Jalan Usaha Tani yang terbangun (meter)	<i>Meter</i>	122.998	124.843	126.716	128.617	130.546	132.504	132.504	Distan Pangan dan Hortikultura

No	Program Prioritas Pembangunan Menurut Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program ( <i>Outcome</i> )		Capaian Kinerja Awal RPJMD (Tahun ke 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Pelaksana
					2016	2017	2018	2019	2020		
					Target	Target	Target	Target	Target		
					Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		Panjang Jaringan Irigasi yang terbangun (meter)	<i>Meter</i>	44.602	669	679	689	700	710	48.049	Distan Pangan dan Hortikultura
		Jumlah Cekdam yang terbangun (unit)	<i>Unit</i>	235	10	10	10	10	10	285	Distan Pangan dan Hortikultura
		Jumlah Sumur Dangkal yang disediakan (unit)	<i>Unit</i>	174	20	20	20	20	20	274	Distan Pangan dan Hortikultura
		Panjang PIPANISASI yang terpasang (meter)	<i>Meter</i>	0	1	1	1	1	1	5	Distan Pangan dan Hortikultura

No	Program Prioritas Pembangunan Menurut Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program ( <i>Outcome</i> )		Capaian Kinerja Awal RPJMD (Tahun ke 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Pelaksana
					2016	2017	2018	2019	2020		
					Target	Target	Target	Target	Target		
					Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		Jumlah Mesin Pompa Air yang tersedia dan tersalurkan (unit)	Unit	493	20	20	20	20	20	593	Distan Pangan dan Hortikultura
			Rp.000	24.987.359	5.576.090	6.018.780	6.471.886	6.941.369	7.678.551	32.686.675	
12	Program Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Produk Hortikultura	Pertumbuhan produksi bawang merah (%)	%	N/A	0,50	0,40	0,30	0,20	0,60	2,02	Distan Pangan dan Hortikultura
		Pertumbuhan produksi cabe rawit (%)	%	N/A	1,38	0,84	0,83	0,82	0,92	4,88	Distan Pangan dan Hortikultura
		Pertumbuhan produksi pisang (%)	%	N/A	0,50	0,40	0,29	0,20	0,60	2,01	Distan Pangan dan Hortikultura

No	Program Prioritas Pembangunan Menurut Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program ( <i>Outcome</i> )		Capaian Kinerja Awal RPJMD (Tahun ke 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Pelaksana
					2016	2017	2018	2019	2020		
					Target	Target	Target	Target	Target		
					Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		Pertumbuhan produksi mangga (%)	%	N/A	1,40	0,80	0,90	0,80	0,90	4,89	Distan Pangan dan Hortikultura
		Pertumbuhan produksi sawo (%)	%	N/A	1,40	0,80	0,89	0,80	0,90	4,89	Distan Pangan dan Hortikultura
			Rp.000	525.871	445.876	450	450	450	450	2.245.876	
13	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran yang terselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	100	Disnak dan Keswan
			Rp.000	429.863	375.504	386.769	398.372	410.323	422.633	1.993.600	
14	Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang memadai	%	100	100	100	100	100	100	100	Disnak dan Keswan
			Rp.000	2.137.385	1.355.902	1.623.048	6.135.000	2.000.000	2.000.000	13.113.950	

No	Program Prioritas Pembangunan Menurut Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program ( <i>Outcome</i> )		Capaian Kinerja Awal RPJMD (Tahun ke 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Pelaksana
					2016	2017	2018	2019	2020		
					Target	Target	Target	Target	Target	Target	
				Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)		
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>		<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
15	<i>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</i>	Persentase Tingkat disiplin pegawai	<i>Target</i>	100	100	-	-	-	-	-	Disnak dan Keswan
			<i>Rp.000</i>	305.446	143.307	-	-	-	-	143.307	
16	<i>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja &amp; Keuangan</i>	Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan oleh Inspektorat/BPK yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	100	100	Disnak dan Keswan
		Persentase tertib administrasi barang/aset Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	Disnak dan Keswan
		Penilaian Lakip Perangkat Daerah oleh Inspektorat	<i>Klasifikasi</i>	CC	B	B	B	B	B	B	Disnak dan Keswan
			<i>Rp.000</i>	100.018	86.753	86.753	86.753	86.753	86.753	433.765	
17	<i>Program Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah</i>	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang selaras dan tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100	Disnak dan Keswan
			<i>Rp.000</i>	51.998	51.227	50	50	50	50	251.227	

No	Program Prioritas Pembangunan Menurut Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program ( <i>Outcome</i> )		Capaian Kinerja Awal RPJMD (Tahun ke 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Pelaksana	
					2016	2017	2018	2019	2020			
					Target	Target	Target	Target	Target	Target		
					Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	
18	<i>Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak</i>	Cakupan penanganan penyakit ternak yang dilaporkan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Disnak dan Keswan
			Rp.000	1.594.899	1.673.338	1.673.338	1.673.338	1.673.338	1.673.338	8.366.689		
19	<i>Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan</i>	Pertumbuhan ternak Sapi Sumbawa	%	24,74%	4,90	5,00	6,12	6,41	7,00	33,09	Disnak dan Keswan	
		Pertumbuhan ternak Sapi Bali	%	4,95%	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	27,63	Disnak dan Keswan	
		Pertumbuhan ternak Kerbau Sumbawa	%	Rata-rata - 4,85%	-2,50	0,00	2,00	2,50	3,00	5,00	Disnak dan Keswan	
		Pertumbuhan ternak Kuda Sumbawa	%	Rata-rata - 4,06%	-2,50	0,00	1,00	2,00	2,50	2,96	Disnak dan Keswan	
		Pertumbuhan ternak kambing	%	Rata-rata - 3,09%	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	21,61	Disnak dan Keswan	
		Pertumbuhan ternak ayam buras	%	Rata-rata - 0,81%	24,37	19,60	16,39	14,08	12,34	121,87	Disnak dan Keswan	

No	Program Prioritas Pembangunan Menurut Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program ( <i>Outcome</i> )		Capaian Kinerja Awal RPJMD (Tahun ke 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Pelaksana
					2016	2017	2018	2019	2020		
					Target	Target	Target	Target	Target	Target	
				Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)		
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>		<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
		Pertumbuhan ternak itik	%	Rata-rata 4,52%	19,93%	16,61%	14,25%	12,47%	11,09%	99,63	Disnak dan Keswan
			Rp.000	15.478.054	2.531.617	2.984.091	10.570.749	3.482.405	3.692.143	23.261.005	
20	<i>Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan</i>	Jumlah RPH yang dimanfaatkan (Unit)	Unit	7	7	7	7	7	8	8	Disnak dan Keswan
		Jumlah RPH yang direkomendasikan dan termanfaatkan (Unit)	Unit	3	3	3	3	4	4	4	Disnak dan Keswan
		Pertumbuhan produksi daging	%	N/A	7	7	7	7	7	40,26	Disnak dan Keswan
			Rp.000	317.715	650.967	500	220	500	7.710.000	9.580.967	
21	<i>Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan</i>	Jumlah SPR yang tersedia (Unit)	Unit	-	-	3	5	7	9	9	Disnak dan Keswan
		Jumlah peternak yang menerapkan TTG (orang)	Orang	240	-	240	240	240	240	240	Disnak dan Keswan

No	Program Prioritas Pembangunan Menurut Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program ( <i>Outcome</i> )		Capaian Kinerja Awal RPJMD (Tahun ke 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Pelaksana
					2016	2017	2018	2019	2020		
					Target	Target	Target	Target	Target	Target	
					Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		Luasan Padang Pengembalaan HMT yang diintervensi teknologi (Ha)	Ha	13	-	35	45	55	65	65	Disnak dan Keswan
		Jumlah Sertifikasi bibit yang dikeluarkan (ekor)	Ekor	0	-	1.5	2	2.5	3	3	Disnak dan Keswan
			Rp.000	376.432	-	396.375	1.415.250	734.125	453	2.998.750	
22	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran yang terselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	100	BP4K
			Rp.000	397.53	446.83	460.235	474.042	488.263	502.911	2.372.280	
23	Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang memadai	%	100	100	100	100	100	100	100	BP4K
			Rp.000	287.363	1.355.854	1.479.831	1.615.143	1.762.828	1.924.017	8.137.673	
24	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Tingkat disiplin pegawai	%	100	100	100	100	100	100	100	BP4K
			Rp.000	45.514	41.131	-	-	-	-	41.131	
25	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan	Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan oleh Inspektorat/BPK yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	100	100	BP4K



No	Program Prioritas Pembangunan Menurut Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program ( <i>Outcome</i> )		Capaian Kinerja Awal RPJMD (Tahun ke 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Pelaksana
					2016	2017	2018	2019	2020		
					Target	Target	Target	Target	Target		
					Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)		
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>		<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
		Persentase tertib administrasi barang/aset Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	BP4K
		Penilaian Lakip Perangkat Daerah oleh Inspektorat	Klasifikasi	CC	B	B	B	B	B	B	BP4K
			Rp.000	23.433	6.347	6.347	6.347	6.347	6.347	31.734	
26	Program Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang selaras dan tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100	BP4K
			Rp.000	17.204	31.046	31.046	31.046	31.046	31.046	155.231	
27	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Petani	Jumlah Pelaku Utama/Pelaku Usaha yang di tingkatkan kelasnya	Orang	20	68	200	68	68	68	472	BP4K
			Rp.000	-	404.816	1.404.816	404.816	404.816	404.816	3.024.078	
28	Program Peningkatan Kapasitas Ketenagaan Penyuluhan	Jumlah PPL yang dilatih	PPL	150	150	150	150	150	150	750	BP4K
			Rp.000	-	900.813	900	900	900	900	4.500.813	
<b>4</b>	<b>Kehutanan</b>										
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran yang terselesaikan	%	100	100	-	-	-	-	-	Dishutbun
			Rp.000	242.394	270.725	-	-	-	-	270.725,46	

No	Program Prioritas Pembangunan Menurut Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program ( <i>Outcome</i> )		Capaian Kinerja Awal RPJMD (Tahun ke 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Pelaksana
					2016	2017	2018	2019	2020		
					Target	Target	Target	Target	Target		
						Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>		<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang memadai	%	100	100	-	-	-	-	-	Dishutbun
			Rp.000	349.253	485.205	-	-	-	-	485.205	
3	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Tingkat disiplin pegawai	%	100	100	-	-	-	-	-	Dishutbun
			Rp.000	16.96	16.799	-	-	-	-	16.799,02	
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan oleh Inspektorat/BPK yang ditindaklanjuti	%	100	100	-	-	-	-	-	Dishutbun
		Persentase tertib administrasi barang/aset Perangkat Daerah	%	100	100	-	-	-	-	-	Dishutbun
		Penilaian Lakip Perangkat Daerah oleh Inspektorat	Klasifikasi	CC	B	-	-	-	-	-	Dishutbun
			Rp.000	29.119	36.838	-	-	-	-	36.838	
5	Program Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang selaras dan tepat waktu	%	100	100	-	-	-	-	-	Dishutbun
			Rp.000	76.025	46.165	-	-	-	-	46.165	

No	Program Prioritas Pembangunan Menurut Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program ( <i>Outcome</i> )		Capaian Kinerja Awal RPJMD (Tahun ke 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Pelaksana
					2016	2017	2018	2019	2020		
					Target	Target	Target	Target	Target		
					Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
6	<i>Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan</i>	Cakupan ketersediaan Dokumen Tahunan Perencanaan pengembangan hutan kemasyarakatan	%	100	100	-	-	-	-	-	Dishutbun
			<i>Rp.000</i>	140.519	128.159	-	-	-	-	128.159	
7	<i>Program rehabilitasi hutan dan lahan</i>	Luasan kawasan hutan yang direboisasi (Ha)	Ha	1.086	235	-	-	-	-	-	Dishutbun
			<i>Rp.000</i>	2.018.764	1.664.475	-	-	-	-	1.664.475	
8	<i>Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan</i>	Cakupan pengamanan dan perlindungan hutan yang dilaksanakan	%	100	1 tahun	-	-	-	-	-	Dishutbun
			<i>Rp.000</i>	1.249.065	1.447.133	-	-	-	-	1.447.133	
9	<i>Program pembinaan dan penerbitan industri hasil hutan</i>	Cakupan Pelayanan Perizinan hasil hutan yang difasilitasi	%	100	1 tahun	-	-	-	-	-	Dishutbun
			<i>Rp.000</i>	44.747	59.287	-	-	-	-	59.287	
10	<i>Program perencanaan dan pengembangan hutan</i>	Cakupan hutan hak yang diinventarisasi	KPH	7	7	-	-	-	-	-	Dishutbun
			<i>Rp.000</i>	185.61	256.497	-	-	-	-	256.497	
11	<i>Program Peningkatan Pemasaran Hasil</i>	Frekuensi penyebaran informasi harga komoditi perkebunan	Kali	24	24	24	24	24	24	24	Dishutbun

No	Program Prioritas Pembangunan Menurut Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program ( <i>Outcome</i> )		Capaian Kinerja Awal RPJMD (Tahun ke 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Pelaksana
					2016	2017	2018	2019	2020		
					Target	Target	Target	Target	Target		
					Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>Produksi Perkebunan</i>		<i>Rp.000</i>	43.273	59.216	59.216	59.216	59.216	59.216	296.081	
12	<i>Program Peningkatan Produksi Perkebunan</i>	Pertumbuhan produksi kelapa	%	N/A	80,22	44,51	30,80	23,55	19,06	401,12	Dishutbun
		Pertumbuhan produksi kopi	%	N/A	80.39	44.57	5,74	52.88	19.07	401,97	Dishutbun
		Pertumbuhan produksi jambu mete	%	N/A	80.43	44.58	30.83	23.57	19.07	402,13	Dishutbun
		Pertumbuhan produksi kemiri	%	N/A	81.49	44.9	30.99	23.66	19.13	407,43	Dishutbun
		Pertumbuhan produksi tembakau	%	N/A	87,00	46,53	31,74	24,10	19,42	435,00	Dishutbun
			<i>Rp.000</i>	1.179.927	671.287	1.138.416	1.212.258	1.293.483	1.382.832	5.698.276	
13	<i>Peningkatan Ketahanan Pangan Perkebunan</i>	Luas Pengembangan kebun Induk (Ha)	<i>Ha</i>	13	100	-	-	-	-	-	Dishutbun
			<i>Rp.000</i>	526.925	413.674	-	-	-	-	413.674	
14	<i>Program Peningkatan Kesejahteraan Petani</i>	Jumlah Lembaga tani yang di tingkatkan kemampuannya	<i>Kelompok</i>	4	5	-	-	-	-	-	Dishutbun
			<i>Rp.000</i>	342.357	284.313	-	-	-	-	284.313	
15	<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran yang terselesaikan	%	100	100	-	-	-	-	-	KPH Produksi Batulanteh

No	Program Prioritas Pembangunan Menurut Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program ( <i>Outcome</i> )		Capaian Kinerja Awal RPJMD (Tahun ke 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Pelaksana
					2016	2017	2018	2019	2020		
					Target	Target	Target	Target	Target		
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>		<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
			Rp.000	137.551	81.87	-	-	-	-	81.87	
16	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang memadai	%	100	100	-	-	-	-	-	KPH Produksi Batulanteh
			Rp.000	376.769	196.017	-	-	-	-	196.017	
17	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Tingkat disiplin pegawai	%	100	100	-	-	-	-	-	KPH Produksi Batulanteh
			Rp.000	9.501	8.186	-	-	-	-	8.186	
18	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan oleh Inspektorat/BPK yang ditindaklanjuti	%	100	100	-	-	-	-	-	KPH Produksi Batulanteh
		Persentase tertib administrasi barang/aset Perangkat Daerah	%	100	100	-	-	-	-	-	KPH Produksi Batulanteh

No	Program Prioritas Pembangunan Menurut Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program ( <i>Outcome</i> )		Capaian Kinerja Awal RPJMD (Tahun ke 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Pelaksana
					2016	2017	2018	2019	2020		
					Target	Target	Target	Target	Target		
					Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		Penilaian Lakip Perangkat Daerah oleh Inspektorat	<i>Klasifikasi</i>	CC	B	-	-	-	-	-	KPH Produksi Batulanteh
			<i>Rp.000</i>	-	4.945	-	-	-	-	4.945	
19	<i>Program Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah</i>	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang selaras dan tepat waktu	%	100	100	-	-	-	-	-	KPH Produksi Batulanteh
			<i>Rp.000</i>	8.653	6.599	-	-	-	-	6.599	
20	<i>Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan</i>	Cakupan Hutan tanaman yang berproduksi (Ha)	<i>Ha</i>	150	20	-	-	-	-	-	KPH Produksi Batulanteh
			<i>Rp.000</i>	279.207	197.802	-	-	-	-	197.802	
21	<i>Program rehabilitasi hutan dan lahan</i>	luas hutan produksi yang direhabilitasi (Ha)	<i>Ha</i>	250	100	-	-	-	-	-	KPH Produksi Batulanteh
			<i>Rp.000</i>	86.463	142.091	-	-	-	-	142.091	

No	Program Prioritas Pembangunan Menurut Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program ( <i>Outcome</i> )		Capaian Kinerja Awal RPJMD (Tahun ke 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Pelaksana
					2016	2017	2018	2019	2020		
					Target	Target	Target	Target	Target		
						Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>		<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
22	<i>Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan</i>	Luas hutan konservasi yang terlindungi dan terkonservasi (Ha)	Ha	32	32	-	-	-	-	-	KPH Produksi Batulanteh
			Rp.000	198.324	104.248	-	-	-	-	104.248	
<b>5</b>	<b>Energi dan Sumberdaya Mineral</b>										
1	<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran yang terselesaikan	%	100	100	-	-	-	-	-	Distamben
			Rp.000	410.294	223.131	-	-	-	-	223.131,25	
2	<i>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</i>	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang memadai	%	100	100	-	-	-	-	-	Distamben
			Rp.000	58.379	57.844	-	-	-	-	57.844	
3	<i>Program peningkatan disiplin aparatur</i>	Persentase Tingkat disiplin pegawai	%	100	100	-	-	-	-	-	Distamben
			Rp.000	-	6.432	-	-	-	-	6.432	
4	<i>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</i>	Persentase Sumberdaya aparatur memiliki kompetensi sesuai bidangnya	%	100	100	-	-	-	-	-	Distamben
			Rp.000	27.536	3.013	-	-	-	-	3.013	

No	Program Prioritas Pembangunan Menurut Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program ( <i>Outcome</i> )		Capaian Kinerja Awal RPJMD (Tahun ke 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Pelaksana	
					2016	2017	2018	2019	2020			
					Target	Target	Target	Target	Target			
					Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	
5	<i>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</i>	Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan oleh Inspektorat/BPK yang ditindaklanjuti	%	100	100	-	-	-	-	-	-	Distamben
		Persentase tertib administrasi barang/aset Perangkat Daerah	%	100	100	-	-	-	-	-	-	Distamben
		Penilaian Lakip Perangkat Daerah oleh Inspektorat	Klasifikasi	CC	B	-	-	-	-	-	-	Distamben
			Rp.000	70.811	24.567	-	-	-	-	24.567		
6	<i>Program Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah</i>	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang selaras dan tepat waktu	Target	100%	100%	-	-	-	-	-	-	Distamben
			Rp.000	11.222	7.976	-	-	-	-	7.976		
7	<i>Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan</i>	Cakupan pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan yang dilaksanakan	%	100	100	-	-	-	-	-	-	Distamben
			Rp.000	103.127	50.975	-	-	-	-	50.975		
8	<i>Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang</i>	Cakupan kegiatan pertambangan rakyat yang diawasi dan ditertibkan	%	100	100	-	-	-	-	-	-	Distamben



No	Program Prioritas Pembangunan Menurut Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program ( <i>Outcome</i> )		Capaian Kinerja Awal RPJMD (Tahun ke 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Pelaksana
					2016	2017	2018	2019	2020		
					Target	Target	Target	Target	Target		
		Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)		
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>		<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
	<i>berpotensi merusak lingkungan</i>		<i>Rp.000</i>	46.18	6.525	-	-	-	-	6.525	
9	<i>Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan</i>	Cakupan pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan yang dilaksanakan	%	100	100	-	-	-	-	-	Distamben
			<i>Rp.000</i>	4.420.088	379.093	-	-	-	-	379.093	
10	<i>Program Pengembangan Energi</i>	Jumlah kecamatan yang difasilitasi pengembangan PLTS	<i>Kec.</i>	1	1	-	-	-	-	-	Distamben
			<i>Rp.000</i>	15.806	3.02	-	-	-	-	3.02	
11	<i>Pengembangan Geologi Sumberdaya Mineral Dan Air Bawah Tanah</i>	Survey pengembangan geologi sumberdaya mineral dan air bawah tanah	<i>Dok</i>	1	1	-	-	-	-	-	Distamben
			<i>Rp.000</i>	91.191	80.886	-	-	-	-	80.886	
<b>6</b>	<b>Perdagangan</b>										
1	<i>Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Perdagangan</i>	Unit pasar tradisional/rakyat yang terbangun (unit)	<i>Unit</i>	19	-	-	-	1	5	25	Diskoperindag
		Cakupan UTTP yang ditera (unit)	%	29,5	29,82	30,14	30,46	30,78	31,42	32,06	Diskoperindag
		Pertumbuhan lapak yang dibangun	%	8	10	10	10	10	10	10	Diskoperindag

No	Program Prioritas Pembangunan Menurut Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program ( <i>Outcome</i> )		Capaian Kinerja Awal RPJMD (Tahun ke 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Pelaksana
					2016	2017	2018	2019	2020		
					Target	Target	Target	Target	Target		
					Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			Rp.000	0	0	750	26.500.000	53.650.000	36.800.000	117.700.000	
2	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Jumlah UKM yang mengikuti pasar lelang daerah (unit)	Unit	6	10	10	10	10	10	10	Diskoperindag
			Rp.000	1.842.786	47.654	47.654	47.654	47.654	47.654	238.27	Diskoperindag
3	Program Peningkatan dan Pengendalian Penerimaan PAD	Tingkat Realisasi PAD terhadap target (%)	%	65	100	100	100	100	100	100	Diskoperindag
				Rp.000	2.142.365	2.899.198	3.226.014	3.589.671	3.994.322	4.444.588	18.153.793
4	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Pertumbuhan Nilai Ekspor (Rupiah)	%	NA	12	13	15	15	15	15	Diskoperindag
				Rp.000	-	-	30	37	37	45	149
5	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Cakupan peredaran produk bahan makanan yang diawasi	%	100	100	100	100	100	100	100	Diskoperindag
				Rp.000	163.884	179.261	179.261	179.261	179.261	179.261	896.304
<b>7</b>	<b>Perindustrian</b>										
1	Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Industri	Cakupan IKM yang menerapkan TQC (Total Quality Control) (Unit)	%	NA	NA	2	2	3	4	5	Diskoperindag

No	Program Prioritas Pembangunan Menurut Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program ( <i>Outcome</i> )		Capaian Kinerja Awal RPJMD (Tahun ke 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Pelaksana	
					2016	2017	2018	2019	2020			
					Target	Target	Target	Target	Target			
					Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	
		ketersediaan dokumen Rencana Pengembangan Industri Daerah (Dokumen)	<i>Dok</i>	-	-	1	-	-	-	1	Diskoperindag	
		Cakupan IKM yang menerapkan teknologi dalam proses produksi	%	32	33	34	35	35	35	35	Diskoperindag	
			<i>Rp.000</i>	177.919	272.984	350	1.300.000	1.500.000	2.000.000	5.422.984		
2	<i>Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah</i>	Pertumbuhan unit usaha IKM yang terbentuk	%	0,5	0,5	0,5	0,5	1	1	1	Diskoperindag	
		Cakupan unit usaha IKM yang dibina (IKM)	%	3	3	3,6	4,2	4,7	5,2	5,7	Diskoperindag	
			<i>Rp.000</i>	2.468.471	1.455.810	1.676.235	2.034.106	2.266.199	2.524.774	9.957.124		
3	<i>Program Peningkatan Pengembangan Kelembagaan IKM</i>	Pertumbuhan sentra IKM yang terbentuk (unit)	%	1	1	1	1	1	1	1	Diskoperindag	
		Cakupan sentra IKM yang dibina	%	2	2	2	2	2	2	2	Diskoperindag	
			<i>Rp.000</i>	98.187	65.465	65.465	345.465	345.465	345.465	1.167.324		
<b>8</b>	<b>Transmigrasi</b>											
1	<i>Program pengembangan wilayah transmigrasi</i>	Cakupan wilayah transmigrasi yang terfasilitasi dan dikembangkan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Disnakertrans

No	Program Prioritas Pembangunan Menurut Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program ( <i>Outcome</i> )		Capaian Kinerja Awal RPJMD (Tahun ke 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Pelaksana
					2016	2017	2018	2019	2020		
					Target Anggaran (Rp.000)	Target Anggaran (Rp.000)	Target Anggaran (Rp.000)	Target Anggaran (Rp.000)	Target Anggaran (Rp.000)	Target Anggaran (Rp.000)	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			Rp.000	188.077	1.014.100	1.050.000	1.500.000	1.500.000	2.000.000	7.064.100	
<b>D.</b>	<b>Fungsi Penunjang urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah</b>										
1	<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran yang terselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	100	24 Kecamatan
			Rp.000	2.399.672	2.605.087	3.043.239	3.123.737	3.206.649	3.292.048	15.270.760	
2	<i>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</i>	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang memadai	%	100	100	100	100	100	100	100	24 Kecamatan
			Rp.000	2.605.232	4.365.258	4.365.258	4.365.258	4.365.258	14.365.258	31.826.292	
3	<i>Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja &amp; keuangan</i>	Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan oleh Inspektorat/BPK yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	100	100	24 Kecamatan
		Persentase tertib administrasi barang/aset Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	24 Kecamatan
		Penilaian Lakip Perangkat Daerah oleh Inspektorat	Klasifikasi	CC	B	B	B	B	B	B	24 Kecamatan
				Rp.000	200.36	237.565	237.565	237.565	237.565	237.565	1.187.827

No	Program Prioritas Pembangunan Menurut Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program ( <i>Outcome</i> )		Capaian Kinerja Awal RPJMD (Tahun ke 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Pelaksana
					2016	2017	2018	2019	2020		
					Target	Target	Target	Target	Target	Target	
					Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
4	<i>Program Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah</i>	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang selaras dan tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100	24 Kecamatan
			Rp.000	113.741	178.758	178.758	178.758	178.758	178.758	893.789	
5	<i>Program Peningkatan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial</i>	Cakupan pembinaan kesejahteraan keluarga	%	100	100	100	100	100	100	100	24 Kecamatan
			Rp.000	242.682	248.546	728.546	728.546	728.546	728.546	3.162.728	
6	<i>Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum</i>	Cakupan Penyelenggaraan pemerintahan Umum	%	100	100	100	100	100	100	100	24 Kecamatan
			Rp.000	4.817.485	5.162.517	5.645.717	5.645.717	5.645.717	5.645.717	27.748.586	
7	<i>Program Koordinasi Pembangunan Kecamatan</i>	Cakupan koordinasi pembangunan di Kecamatan	%	100	100	100	100	100	100	100	24 Kecamatan
			Rp.000	1.966.096	2.235.987	2.715.987	2.715.987	2.715.987	2.715.987	13.099.937	
8	<i>Program Peningkatan Kapasitas Kelurahan</i>	Cakupan pelayanan di Kelurahan	Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kec. Sumbawa
			Rp.000	855.337	834.67	1.074.670	1.074.670	1.074.670	1.074.670	5.133.349	

No	Program Prioritas Pembangunan Menurut Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program ( <i>Outcome</i> )		Capaian Kinerja Awal RPJMD (Tahun ke 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Pelaksana		
					2016	2017	2018	2019	2020				
					Target	Target	Target	Target	Target	Target			
					Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)			
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>		<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>		
9	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran yang terselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	KPPT	
			Rp.000	421.033	402.71	414.792	427.236	440.053	453.254	2.138.045			
10	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang memadai	%	100	100	100	100	100	100	100	100	KPPT	
			Rp.000	8.4	24.4	124.4	2.599.400	750	750	4.248.200			
11	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan oleh Inspektorat/BPK yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	100	100	100	KPPT	
		Persentase tertib administrasi barang/aset Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	KPPT	
		Penilaian Lakip Perangkat Daerah oleh Inspektorat	Klasifikasi	CC	B	B	B	B	B	B	B	B	KPPT
			Rp.000	6.169	4.542	4.542	4.542	4.542	4.542	4.542	22.712		
12	Program Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang selaras dan tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100	100	KPPT	
			Rp.000	2.913	2.317	2.317	2.317	2.317	2.317	2.317	11.586		



No	Program Prioritas Pembangunan Menurut Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program ( <i>Outcome</i> )		Capaian Kinerja Awal RPJMD (Tahun ke 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Pelaksana	
					2016	2017	2018	2019	2020			
					Target	Target	Target	Target	Target	Target		
					Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)		
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>		<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	
18	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang memadai	%	100	100	100	100	100	100	100	Bappeda	
			Rp.000	669.266	740.752	500	10.800.000	750	750	13.540.752		
19	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan oleh Inspektorat/BPK yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	100	100	Bappeda	
		Persentase tertib administrasi barang/aset Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	Bappeda	
		Penilaian Lakip Perangkat Daerah oleh Inspektorat	Klasifikasi	CC	B	B	B	B	B	B	B	Bappeda
			Rp.000	15.719	25.564	25.564	25.564	25.564	25.564	127.819		
20	Program Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang selaras dan tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100	Bappeda	
			Rp.000	33.32	52.929	52.929	52.929	52.929	52.929	264.647		
21	Program Kerjasama Pembangunan	Persentase rencana kerja sama antar daerah yang terealisasi	%	100	100	100	100	100	100	100	Bappeda	
			Rp.000	406.355	388.951	150	150	150	150	988.951		



No	Program Prioritas Pembangunan Menurut Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program ( <i>Outcome</i> )		Capaian Kinerja Awal RPJMD (Tahun ke 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Pelaksana
					2016	2017	2018	2019	2020		
					Target	Target	Target	Target	Target	Target	
					Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>		<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
22	Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar	Tingkat ketersediaan data/dokumen perencanaan wilayah perkotaan dalam upaya mendukung program pembangunan yang berkelanjutan	%	100	100	100	100	100	100	100	Bappeda
			Rp.000	116.503	203.109	203.109	203.109	203.109	203.109	1.015.544	
23	Program perencanaan pembangunan daerah	Tingkat penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100	Bappeda
		Tingkat Aspirasi masyarakat melalui Musrenbang yang tercakup dalam dokumen Anggaran	%	≥ 35	≥ 40	≥ 40	≥ 40	≥ 40	≥ 40	100	Bappeda
		Jumlah dokumen hasil pengkajian masalah-masalah strategis	Dok	3	5	5	5	5	5	25	Bappeda
			Rp.000	1.338.966	2.386.082	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	8.386.082
24	Program perencanaan pembangunan ekonomi	Cakupan koordinasi perencanaan pembangunan ekonomi yang terlaksana	%	100	100	100	100	100	100	100	Bappeda

No	Program Prioritas Pembangunan Menurut Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program ( <i>Outcome</i> )		Capaian Kinerja Awal RPJMD (Tahun ke 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Pelaksana	
					2016	2017	2018	2019	2020			
					Target	Target	Target	Target	Target	Target		
					Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>		<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	
		ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan ekonomi	<i>Dok</i>	1	3	2	1	1	1	1	1	Bappeda
		ketersediaan dokumen Data dan fakta capaian program pembangunan ekonomi	<i>Dok</i>	1	2	1	1	1	1	1	7	Bappeda
		Cakupan BUMDes sehat yang dibina	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Bappeda
			<i>Rp.000</i>	632.667	703.026	1.203.026	703.026	703.026	703.026	4.015.131		
25	Program perencanaan sosial dan budaya	Cakupan koordinasi perencanaan pembangunan sosial budaya yang terlaksana	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Bappeda
		ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan sosial budaya	<i>Dok</i>	1	1	1	1	1	1	1	5	Bappeda
		ketersediaan data base pembangunan sosial budaya	<i>Dok</i>	1	1	1	1	1	1	1	5	Bappeda
		Ketersediaan Dokumen analisis Indeks desa membangun (IDM)	<i>Dok</i>	0	1	1	1	1	1	1	5	Bappeda
			<i>Rp.000</i>	476.059	420.859	420.859	420.859	420.859	420.859	2.104.293		

No	Program Prioritas Pembangunan Menurut Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program ( <i>Outcome</i> )		Capaian Kinerja Awal RPJMD (Tahun ke 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Pelaksana
					2016	2017	2018	2019	2020		
					Target	Target	Target	Target	Target	Target	
					Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
26	Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	Persentase koordinasi perencanaan pembangunan prasarana wilayah dan sumberdaya alam yang terlaksana	%	100	100	100	100	100	100	100	Bappeda
		ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan bidang fisik dan tata ruang	Dok	1	1	1	1	1	1	5	Bappeda
		ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan bidang sumberdaya alam	Dok	1	1	1	1	1	1	5	Bappeda
		Ketersediaan dokumen sumberdaya alam spasial kabupaten	Dok	1	1	1	1	1	1	5	Bappeda
			Rp.000	590.641	601.828	601.828	601.828	601.828	601.828	3.009.139	
27	Program pengembangan STP	Cakupan Perguruan Tinggi Mitra Kerja STP	Target	1	1	1	2	3	3	3	Bappeda
			Rp.000	-	-	500	750	1.000.000	1.000.000	3.250.000	
28	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Tingkat ketersediaan dan pemanfaatan sistem perencanaan pembangunan berbasis web	%	100	100	100	100	100	100	100	Bappeda
			Rp.000	-	-	200	200	200	200	800	

No	Program Prioritas Pembangunan Menurut Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program ( <i>Outcome</i> )		Capaian Kinerja Awal RPJMD (Tahun ke 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Pelaksana
					2016	2017	2018	2019	2020		
					Target	Target	Target	Target	Target		
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>		<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
29	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran yang terselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	100	BKPP
			Rp.000	574.227	562.782	579.666	597.056	614.968	633.417	2.987.888	
30	Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang memadai	%	100	100	100	100	100	100	100	BKPP
			Rp.000	107.631	85.907	85.907	85.907	85.907	85.907	429.535	
31	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Tingkat disiplin pegawai	%		100	100	100	100	100	100	BKPP
		Ratio PNS yang mendapatkan penghargaan	Pegawai	60	60	60	60	60	60	300	BKPP
			Rp.000	-	437.126	437.126	437.126	437.126	437.126	2.185.629	
32	Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS	Jumlah Pegawai yang mendapatkan rekomendasi keluar masuk kabupaten/propinsi	Pegawai	92	94	90	97	98	98	100	BKPP
		Persentase Pegawai pensiun yang terfasilitasi	Pegawai	134	140	180	197	210	210	100	BKPP
			Rp.000	61.543	60.257	60.257	60.257	60.257	60.257	301.285	

No	Program Prioritas Pembangunan Menurut Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program ( <i>Outcome</i> )		Capaian Kinerja Awal RPJMD (Tahun ke 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Pelaksana	
					2016	2017	2018	2019	2020			
					Target	Target	Target	Target	Target	Target		
					Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	
33	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumberdaya aparatur memiliki kompetensi sesuai bidangnya	%	100	100	100	100	100	100	100	BKPP	
			Rp.000	1.848.198	3.619.903	3.619.903	3.619.903	3.619.903	3.619.903	18.099.517		
34	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan	Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan oleh Inspektorat/BPK yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	100	100	BKPP	
		Persentase tertib administrasi barang/aset Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	BKPP	
		Penilaian Lakip Perangkat Daerah oleh Inspektorat	Klasifikasi	CC	B	B	B	B	B	B	B	BKPP
			Rp.000	31.749	26.755	26.755	26.755	26.755	26.755	26.755	133.774	
35	Program Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang selaras dan tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100	BKPP	
			Rp.000	23.281	22.930	22.930	22.930	22.930	22.930	22.930	114.648	
36	Program Pendidikan Kedisiplinan	Ratio PNS yang akan naik pangkat melalui ujian	%	100	100	100	100	100	100	100	BKPP	
			Rp.000	41.012	50.174	50.174	50.174	50.174	50.174	50.174	250.87	

No	Program Prioritas Pembangunan Menurut Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program ( <i>Outcome</i> )		Capaian Kinerja Awal RPJMD (Tahun ke 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Pelaksana
					2016	2017	2018	2019	2020		
					Target	Target	Target	Target	Target	Target	
					Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
37	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Cakupan formasi kebutuhan aparatur yang dianalisis	%	100	100	100	100	100	100	100	BKPP
		Cakupan penempatan aparatur yang sesuai kompetensi jabatan	%	100	100	100	100	100	100	100	BKPP
		Cakupan aparatur yang meningkatkan jenjang pendidikan yang difasilitasi	%	100	100	100	100	100	100	100	BKPP
		Cakupan fasilitasi aparatur yang melaksanakan diklat penjenjangan/ fungsional	%	100	100	100	100	100	100	100	BKPP
			Rp.000	1.268.048	1.605.283	1.605.283	1.605.283	1.605.283	1.605.283	8.026.417	
38	Program Penataan Sistem Administrasi Arsip Kepegawaian	ketersediaan data pegawai yang akurat	Pegawai	8,453	8,353	8,253	8,153	8,053	8,053	8,053	BKPP
			Rp.000	36.87	31.081	31.081	31.081	31.081	31.081	155.404	
39	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran yang terselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	100	Inspektorat
			Rp.000	223.652	411.992	424.352	437.082	450.195	463.7	2.187.320	
40	Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang memadai	%	100	100	100	100	100	100	100	Inspektorat

No	Program Prioritas Pembangunan Menurut Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program ( <i>Outcome</i> )		Capaian Kinerja Awal RPJMD (Tahun ke 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Pelaksana	
					2016	2017	2018	2019	2020			
					Target	Target	Target	Target	Target			
					Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	
			Rp.000	63.77	228.912	2.728.912	228.912	228.912	228.912	3.644.558		
41	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan	Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan oleh Inspektorat/BPK yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	100	100	Inspektorat	
		Persentase tertib administrasi barang/aset Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	Inspektorat	
		Penilaian Lakip Perangkat Daerah oleh Inspektorat	Klasifikasi	CC	B	B	B	B	B	B	B	Inspektorat
			Rp.000	43.45	72.415	72.415	72.415	72.415	72.415	72.415	362.076	
42	Program Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang selaras dan tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100	Inspektorat	
			Rp.000	8.605	12.804	12.804	12.804	12.804	12.804	12.804	64.018	
43	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan	Cakupan Perangkat Daerah yang menindaklanjuti penanganan temuan berindikasi penyimpangan material/administrasi	%	100	100	100	100	100	100	100	Inspektorat	

No	Program Prioritas Pembangunan Menurut Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program ( <i>Outcome</i> )		Capaian Kinerja Awal RPJMD (Tahun ke 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Pelaksana
					2016	2017	2018	2019	2020		
					Target	Target	Target	Target	Target	Target	
					Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	KDH	Cakupan Perangkat Daerah yang menerapkan SPIP	%	100	100	100	100	100	100	100	Inspektorat
		Persentase Perangkat Daerah mendapat kategori B dalam Evaluasi AKIP	%	100	100	100	100	100	100	100	Inspektorat
		Tingkat pelayanan pengaduan masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	100	Inspektorat
			Rp.000	1.349.133	1.385.496	1.385.496	1.385.496	1.385.496	1.385.496	6.927.478	
44	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan	Tingkat tercapainya peningkatan capacity buliding SDm APIP yang difasilitasi	%	100	100	100	100	100	100	100	Inspektorat
			Rp.000	35.388	63.805	63.805	63.805	63.805	63.805	319.025	
45	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran yang terselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	100	Setda
			Rp.000	5.056.537	4.826.821	4.971.625	5.120.774	5.274.397	5.432.629	25.626.247	
46	Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang memadai	%	100	100	100	100	100	100	100	Setda
			Rp.000	8.129.470	12.312.037	8.000.000	8.600.000	27.922.499	14.000.000	70.834.537	
47	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Tingkat disiplin pegawai	%	NA	100						Setda



No	Program Prioritas Pembangunan Menurut Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program ( <i>Outcome</i> )		Capaian Kinerja Awal RPJMD (Tahun ke 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Pelaksana
					2016	2017	2018	2019	2020		
					Target	Target	Target	Target	Target		
					Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			Rp.000	51.344	139.919	-	-	-	-	139.919	
48	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan oleh Inspektorat/BPK yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	100	100	Setda
		Persentase tertib administrasi barang/aset Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	Setda
		Penilaian Lakip Perangkat Daerah oleh Inspektorat	Klasifikasi	CC	B	B	B	B	B	B	Setda
			Rp.000	427.601	845.121	650	650	650	650	3.445.121	
49	Program pembinaan dan pengembangan aparatur	Cakupan aparatur yang ditingkatkan kapasitas dan produktifitasnya	%	100	20	20	20	20	20	100	Setda
			Rp.000	31.414	52.348	52.348	52.348	52.348	52.348	261.738	
50	Program penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang selaras dan tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100	Setda
			Rp.000	11.529	86.983	86.983	86.983	86.983	86.983	434.916	

No	Program Prioritas Pembangunan Menurut Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program ( <i>Outcome</i> )		Capaian Kinerja Awal RPJMD (Tahun ke 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Pelaksana
					2016	2017	2018	2019	2020		
					Target	Target	Target	Target	Target	Target	
				Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)		
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>		<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
51	<i>Program peningkatan pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah</i>	Cakupan layanan pemenuhan kebutuhan internal kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	Setda
			<i>Rp.000</i>	2.489.240	2.527.571	2.527.571	2.527.571	2.527.571	2.527.571	12.637.855	
52	<i>Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</i>	Cakupan data barang milik daerah yang akuntabel	%	50	65	75	85	95	100	100	Setda
		SDM penyimpan/pengurus barang yang dilatih	<i>Orang</i>	75	100	110	120	130	140	140	Setda
		revaluasi/ appraisal aset/ barang daerah yang dilaksanakan	<i>Kali</i>	0	0	2	2	2	2	8	Setda
			<i>Rp.000</i>	1.306.286	1.181.448	1.181.448	1.181.448	1.181.448	1.181.448	5.907.240	Setda
53	<i>Program peningkatan sistem pengawasan internal pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH</i>	Cakupan kebijakan KDH yang sesuai dengan konsep-konsep pembangunan daerah dan berdasarkan ketentuan dan peraturan per-UU yang berlaku	%	100	100	100	100	100	100	100	Setda
			<i>Rp.000</i>	266.92	123.816	123.816	123.816	123.816	123.816	619.078	
54	<i>Program peningkatan kerjasama antar daerah</i>	Cakupan rencana kerjasama antar daerah yang terlaksana	%	100	100	100	100	100	100	100	Setda

No	Program Prioritas Pembangunan Menurut Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program ( <i>Outcome</i> )		Capaian Kinerja Awal RPJMD (Tahun ke 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Pelaksana
					2016	2017	2018	2019	2020		
					Target	Target	Target	Target	Target	Target	
					Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			Rp.000	-	83.893	83.893	83.893	83.893	83.893	419.463	
55	Program penataan peraturan perundang-undangan	Rancangan Perda yang ditetapkan menjadi Perda	Ranperda	15	15	15	15	15	15	75	Setda
		Jumlah Perbup yang diterbitkan	Dok	150	150	150	150	150	150	750	Setda
			Rp.000	1.148.224	1.352.118	1.352.118	1.352.118	1.352.118	1.352.118	6.760.591	
56	Program peningkatan kesadaran hukum dan HAM	penyuluhan hukum pada masyarakat yang dilaksanakan	Desa	24	6	6	6	6	6	30	Setda
			Rp.000	193.742	220.591	220.591	220.591	220.591	220.591	1.102.954	
57	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial	pelayanan Kesejahteraan Sosial yang difasilitasi	PKK	24	24	24	24	24	24	120	Setda
			Rp.000	453.726	530.401	530.401	530.401	530.401	530.401	2.652.003	
58	Program peningkatan kualitas pelayanan publik	Cakupan jenis pelayanan publik yang diberikan	%	100	100	100	100	100	100	100	Setda
		SOP yang disusun	Dok	1	1	1	1	1	1	5	Setda
		Survey IKM yang dilaksanakan	Dok	8	8	8	8	8	8	40	Setda
		Persentase aduan masyarakat yang ditanggapi	%	100	100	100	100	100	100	100	Setda
			Rp.000	269.599	381.099	381.099	381.099	381.099	381.099	1.905.493	

No	Program Prioritas Pembangunan Menurut Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program ( <i>Outcome</i> )		Capaian Kinerja Awal RPJMD (Tahun ke 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Pelaksana
					2016	2017	2018	2019	2020		
					Target	Target	Target	Target	Target		
					Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
59	<i>Program koordinasi kebijakan peningkatan pembangunan ekonomi daerah.</i>	Cakupan rapat koordinasi kebijakan pembangunan ekonomi nasional, regional, dan lokal	%	100	100	100	100	100	100	100	Setda
			Rp.000	445.432	649.554	400	400	400	400	2.249.554	
60	<i>Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi</i>	lingkungan setda yang terjangkau spot area	Spot	16	16	16	16	16	16	80	Setda
			Rp.000	1.041.661	838.86	838.86	838.86	838.86	838.86	4.194.300	
61	<i>Program peningkatan pelayanan kehidupan beragama</i>	Jumlah kegiatan keagamaan masyarakat yang terfasilitasi	Keg	7	7	7	7	7	7	35	Setda
			Rp.000	748.45	932.761	932.761	932.761	932.761	932.761	4.663.803	
62	<i>Program pembinaan usaha kesehatan sekolah (UKS)</i>	Cakupan fasilitasi mewujudkan lingkungan sekolah yang bersih, sehat dan nyaman	%	100	100	100	100	100	100	100	Setda
			Rp.000	247.05	325.98	325.98	325.98	325.98	325.98	1.629.899	
63	<i>Program peningkatan kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan</i>	Cakupan perangkat daerah yang melaksanakan reformasi birokrasi	%	100	100	100	100	100	100	100	Setda
			Rp.000	133.837	344.255	344.255	344.255	344.255	344.255	1.721.274	

No	Program Prioritas Pembangunan Menurut Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program ( <i>Outcome</i> )		Capaian Kinerja Awal RPJMD (Tahun ke 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Pelaksana
					2016	2017	2018	2019	2020		
					Target	Target	Target	Target	Target	Target	
					Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>		<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
64	Program pemberitaan dan penyebaran informasi	dokumentasi kegiatan pemerintah daerah dalam bentuk aneka media	Dok	157	157	157	157	157	157	785	Setda
			Rp.000	1.567.251	1.618.384	1.618.384	1.618.384	1.618.384	1.618.384	8.091.920	
65	Program analisis jabatan	Jumlah Perangkat Daerah sasaran analisis jabatan	Dok	6	6	6	6	6	6	30	Setda
		Jumlah Perangkat Daerah sasaran analisis beban kerja	Dok	18	18	18	18	18	18	90	
			Rp.000	78.645	191.652	191.652	191.652	191.652	191.652	958.258	
66	Program pengembangan nilai-nilai Al-Qur'an	Cakupan kegiatan STQ yang terlaksana dan terfasilitasi	%	100	100	100	100	100	100	100	Setda
			Rp.000	1.360.370	1.545.339	1.545.339	1.545.339	1.545.339	1.545.339	7.726.696	
67	Program peningkatan kapasitas sumber daya pembangunan	Cakupan proses pengadaan barang/jasa melalui ULP yang terealisasi	%	100	100	100	100	100	100	100	Setda
			Rp.000	1.505.447	1.988.239	1.988.239	1.988.239	1.988.239	1.988.239	9.941.197	
68	Program pengembangan dan penataan kecamatan	Frekuensi Rapat Koordinasi Rutin dengan Pemerintah Kecamatan	Kec/kali	24/2	24/2	24/2	24/2	24/2	24/2	24/10	Setda
			Rp.000	148.769	101.476	101.476	101.476	101.476	101.476	507.378	

No	Program Prioritas Pembangunan Menurut Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program ( <i>Outcome</i> )		Capaian Kinerja Awal RPJMD (Tahun ke 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Pelaksana
					2016	2017	2018	2019	2020		
					Target	Target	Target	Target	Target	Target	
					Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
69	<i>Program peningkatan keterampilan kelompok drumband dan kesehatan jasmani</i>	Intensitas keterlibatan kelompok drumband Pemda dalam event-event resmi	<i>Tahun</i>	1	1	1	1	1	1	5	Setda
		Intensitas Senam Keesehatan Jasmani yang bersifat rutin	<i>Tahun</i>	1	1	1	1	1	1	5	Setda
			<i>Rp.000</i>	235.955	209.297	209.297	209.297	209.297	209.297	1.046.483	
70	<i>Program penataan sistem administrasi kearsipan</i>	Cakupan layanan pengelolaan arsip Setda	%	100	100	100	100	100	100	100	Setda
			<i>Rp.000</i>	63.797	43.085	43.085	43.085	43.085	43.085	215.424	
71	<i>Program penataan daerah otonomi baru</i>	Tingkat capaian pengurusan pembentukan Kota Samawa Rea	<i>Dok</i>	1	1	1	1	1	1	1	Setda
			<i>Rp.000</i>	112.77	80.486	80.486	80.486	80.486	80.486	402.431	
72	<i>Program pengembangan wilayah perbatasan</i>	Tingkat ketersediaan peta batas desa yang telah ditetapkan	<i>Dok</i>	1	1	1	1	1	1	1	Setda
		Cakupan penyelesaian batas daerah	<i>Dok</i>	1	1	1	1	1	1	1	
			<i>Rp.000</i>	114.082	472.951	472.951	472.951	472.951	472.951	2.364.756	
73	<i>Program pembakuan nama rupa bumi</i>	Cakupan ketersediaan dokumen Pembakuan nama rupa bumi kecamatan	%	-	25	50	75	100	-	100	Setda

No	Program Prioritas Pembangunan Menurut Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program ( <i>Outcome</i> )		Capaian Kinerja Awal RPJMD (Tahun ke 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Pelaksana
					2016	2017	2018	2019	2020		
					Target	Target	Target	Target	Target		
					Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		Cakupan dokumen evaluasi pembakuan nama rupa bumi yang dilaksanakan	%	-	-	-	-	-	100	100	Setda
			Rp.000	40.833	167.28	167.28	167.28	167.28	167.28	836.398	
74	Program perencanaan pembangunan daerah	Penilaian LAKIP Daerah oleh BPK-RI	Klasifikasi	CC	B	B	B	B	B	B	Setda
			Rp.000	88.777	128.735	128.735	128.735	128.735	128.735	643.676	
75	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran yang terselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	100	Setwan
			Rp.000	12.120.999	8.711.460	8.972.803	9.241.987	9.519.247	9.804.824	46.250.322	
76	Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang memadai	%	100	100	100	100	100	100	100	Setwan
			Rp.000	1.784.452	1.557.207	1.557.207	1.557.207	1.557.207	1.557.207	7.786.037	
77	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan	Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan oleh Inspektorat/BPK yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	100	100	Setwan
		Persentase tertib administrasi barang/aset Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	Setwan

No	Program Prioritas Pembangunan Menurut Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program ( <i>Outcome</i> )		Capaian Kinerja Awal RPJMD (Tahun ke 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Pelaksana
					2016	2017	2018	2019	2020		
					Target	Target	Target	Target	Target		
					Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		Penilaian Lakip Perangkat Daerah oleh Inspektorat	<i>Klasifikasi</i>	CC	B	B	B	B	B	B	Setwan
			<i>Rp.000</i>	55.879	46.772	46.772	46.772	46.772	46.772	233.858	
78	<i>Program Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah</i>	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang selaras dan tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100	Setwan
			<i>Rp.000</i>	27.158	20.665	20.665	20.665	20.665	20.665	103.326	
79	<i>Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah</i>	Cakupan agenda kegiatan Dewan yang terlaksana sesuai rencana kerja Dewan	%	100	100	100	100	100	100	100	Setwan
			<i>Rp.000</i>	11.823.881	11.420.339	11.420.339	11.420.339	11.420.339	11.420.339	57.101.693	
80	<i>Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi</i>	Cakupan kegiatan Dewan yang terpublikasikan melalui media online	%	100	100	100	100	100	100	100	Setwan
			<i>Rp.000</i>	38.621	-	38.621	38.621	38.621	38.621	154.486	
81	<i>Program Pemberitaan dan Penyebaran Informasi</i>	Cakupan publikasi kegiatan dewan yang diterbitkan	%	100	100	100	100	100	100	100	Setwan
			<i>Rp.000</i>	1.053.022	1.015.819	1.015.819	1.015.819	1.015.819	1.015.819	5.079.094	
82	<i>Program Pelayanan Administrasi</i>	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran yang terselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	100	DPPK



No	Program Prioritas Pembangunan Menurut Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program ( <i>Outcome</i> )		Capaian Kinerja Awal RPJMD (Tahun ke 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Pelaksana
					2016	2017	2018	2019	2020		
					Target Anggaran (Rp.000)	Target Anggaran (Rp.000)	Target Anggaran (Rp.000)	Target Anggaran (Rp.000)	Target Anggaran (Rp.000)	Target Anggaran (Rp.000)	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>		<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
	Perkantoran		Rp.000	6.430.175	7.381.987	7.603.447	7.831.550	8.066.497	8.308.492	39.191.973	
83	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang memadai	%	100	100	100	100	100	100	100	DPPK
			Rp.000	2.341.735	228.912	228.912	228.912	228.912	228.912	1.144.558	
84	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Tingkat disiplin pegawai	%	100	100						DPPK
			Rp.000	42.139	45.906	-	-	-	-	45.906	
85	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatkan Kapasitas dan Produktifitas kerja Layanan	Kali	8	8	8	8	8	8	8	DPPK
			Rp.000	132.726	152.996	152.996	152.996	152.996	152.996	764.978	
86	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan oleh Inspektorat/BPK yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	100	100	DPPK
		Persentase tertib administrasi barang/aset Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	DPPK
		Penilaian Lakip Perangkat Daerah oleh Inspektorat	Klasifikasi	CC	B	B	B	B	B	B	DPPK
			Rp.000	392.31	370.512	370.512	370.512	370.512	370.512	1.852.560	

No	Program Prioritas Pembangunan Menurut Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program ( <i>Outcome</i> )		Capaian Kinerja Awal RPJMD (Tahun ke 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Pelaksana	
					2016	2017	2018	2019	2020			
					Target	Target	Target	Target	Target	Target		
					Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	
87	Program Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang selaras dan tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100	DPPK	
			Rp.000	134.661	168.128	168.128	168.128	168.128	168.128	840.642		
88	Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini audit BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	Klasifikasi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	DPPK	
		Cakupan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah yang dilaksanakan	Kebijakn PKD	7	7	7	7	7	7	7	DPPK	
		Cakupan pelayanan dokumen pencairan/transfer dana	Dok	4	4	4	4	4	4	4	DPPK	
		Cakupan optimalisasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang dimanfaatkan	Sistem informasi	2	2	2	2	2	2	2	DPPK	
		Cakupan peningkatan Realisasi TPTGR	%	57	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	DPPK
		Cakupan pembinaan/sosialisasi PKD yang dilaksanakan	Kali	4	1	1	1	1	1	1	5	DPPK
			Rp.000	3.246.708	3.745.284	3.745.284	3.745.284	3.745.284	3.745.284	3.745.284	18.726.420	

No	Program Prioritas Pembangunan Menurut Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program ( <i>Outcome</i> )		Capaian Kinerja Awal RPJMD (Tahun ke 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Pelaksana
					2016	2017	2018	2019	2020		
					Target	Target	Target	Target	Target		
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>		<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
					Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	
89	Program Peningkatan Dan Pengendalian Penerimaan Daerah	Jumlah kebijakan pendapatan daerah yang dilaksanakan	<i>Kebijakan</i>	8	2	2	2	2	2	10	DPPK
		pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah yang dilaksanakan	<i>Dok</i>	12	4	4	4	4	4	4	DPPK
		sosialisasi pajak daerah dan retribusi daerah	<i>Kali</i>	2	2	2	2	2	2	2	DPPK
		Koordinasi Pendapatan Transfer	<i>Kali</i>	40	40	40	40	40	40	40	DPPK
		Sistem Informasi Pendapatan Daerah yang dioptimalisasikan	<i>Sistem informasi</i>	1	1	1	1	1	1	1	DPPK
			<i>Rp.000</i>	3.095.828	3.601.990	3.674.030	4.247.511	4.332.461	4.419.110	20.275.103	

## **BAB IX**

### **PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH**

Penetapan indikator kinerja daerah dimaksudkan untuk mengukur tingkat pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan Kabupaten Sumbawa selama lima tahun ke depan. Dengan penetapan indikator kinerja daerah, dapat diketahui apakah harapan dan kenyataan yang ingin dicapai selama lima tahun ke depan telah berjalan sesuai dengan garis yang ditetapkan atau justru mengalami deviasi sehingga perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan.

Dalam perencanaan daerah, indikator kinerja daerah memiliki fungsi yang komprehensif antara lain sebagai alat deteksi dini untuk mengetahui permasalahan yang muncul yang mungkin menghambat kinerja selama implementasi dokumen perencanaan dilakukan. Selain itu, adanya indikator kinerja daerah juga dapat membantu pemerintah daerah untuk fokus pada tujuan dan target yang telah ditetapkan. Indikator kinerja daerah juga dapat memberikan masukan bagi daerah untuk memperbaiki kapasitas organisasionalnya berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan serta memberikan ruang lebih luas bagi peningkatan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi publik.

Indikator kinerja daerah Kabupaten Sumbawa terdiri dari tiga aspek utama yaitu ;

1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat; dengan 3 (tiga) fokus, yaitu fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, fokus kesejahteraan masyarakat, Fokus Seni, Budaya dan Olah Raga;
2. Aspek Pelayanan Umum; dengan 4 (empat) fokus, yaitu fokus layanan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, fokus layanan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan fokus layanan urusan pilihan, serta fokus layanan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; dan
3. Aspek Daya Saing Daerah; dengan 3 (tiga) fokus, yaitu fokus kemampuan ekonomi daerah, fokus fasilitas wilayah/infrastruktur, dan fokus iklim berinvestasi.

Secara keseluruhan indikator kinerja daerah dirumuskan dari beberapa sumber sistem evaluasi kinerja antara lain; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010; Evaluasi Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah (EKPOD); Standar Pelayanan Minimal (SPM); serta *Millennium Development Goals (MDGs)/Sustainable Development Goals (SDGs)*. Penetapan indikator kinerja dimaksud, secara rinci disajikan sebagai berikut.

**Tabel 9.1**  
**Penetapan Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2016-2021**

No	Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Kondisi Awal 2015	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Tahun Transisi 2021	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			2016	2017	2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>A.</b>	<b>Aspek Kesejahteraan Masyarakat</b>								
<b>A.1</b>	<b>Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi</b>								
<b>I</b>	<b>Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah</b>								
1	Petumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (2010) (%)	6,66	6,83	6,86	6,94	7,04	7,28	7,35	Bappeda
2	Petumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (%)	13,38	13,58	14,96	15,5	15,68	15,73	15,77	Bappeda
3	PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan (2010) (Rp.000)	18.326	≥ 19.378	≥ 20.503	≥ 21.722	≥ 23.040	≥ 24.509	≥ 26.093	Bappeda
4	PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (Rp.000)	20.910	≥ 23.507	≥ 26.756	≥ 30.616	≥ 35.096	≥ 40.273	≥ 46.238	Bappeda
<b>A.2</b>	<b>Fokus Kesejahteraan Masyarakat</b>								
<b>I</b>	<b>Urusan Pendidikan</b>								
1	Angka Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)	7,31	7,60	7,90	8,20	8,50	8,80	9,00	Dinas Pendidikan
2	Angka Harapan Lama Sekolah (tahun)	11,94	> 12,00	> 12,40	> 12,80	> 13,10	> 13,50	> 13,80	Dinas Pendidikan

No	Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Kondisi Awal 2015	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Tahun Transisi 2021	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			2016	2017	2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>II</b>	<b>Urusan Kesehatan</b>								
1	Angka Kematian Bayi (per 1.000 kelahiran hidup)	7	< 7	< 6	< 5	< 4	< 4	< 4	Dinas Kesehatan, RSUD
2	Angka Kematian Ibu Melahirkan (per 100.000 kelahiran hidup)	60	< 60	< 60	< 50	< 50	< 40	< 40	Dinas Kesehatan, RSUD
3	Balita Gizi Buruk (%)	24,00	< 20,00	< 17,00	< 14,00	< 11,00	< 8,00	< 5,00	Dinas Kesehatan, RSUD, Ketahanan Pangan
4	Angka Harapan Hidup (Tahun)	65,72	≥ 66,00	≥ 66,00	≥ 67,00	≥ 67,00	≥ 68,00	≥ 68,00	Dinas Kesehatan, RSUD
<b>III</b>	<b>Urusan Ketenagakerjaan</b>								
1	Tingkat pengangguran terbuka (%)	4,27	4,0 – 4,2	3,9 – 4,1	3,8 – 4,0	3,7 – 3,9	3,6 – 3,8	3,5 – 3,7	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
<b>A.3</b>	<b>Fokus Seni Budaya dan Olah Raga</b>								
<b>I</b>	<b>Urusan Kebudayaan</b>								
1	Jumlah Panggung Pertunjukan Kesenian (Unit)	1	1	1	2	2	2	2	Disporabudpar
<b>II</b>	<b>Urusan Kepemudaan dan Olah Raga</b>								

No	Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Kondisi Awal 2015	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Tahun Transisi 2021	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			2016	2017	2018	2019	2020		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
1	Jumlah gedung olah raga (Unit)	40	40	42	42	44	44	46	Disporabudpar
<b>B.</b>	<b>Aspek Pelayanan Umum</b>								
<b>B.1</b>	<b>Urusan Wajib Terkait Pelayanan Dasar</b>								
<b>I</b>	<b>Urusan Pendidikan</b>								
1	Cakupan SD/MI terakreditasi minimal B (%)	14,31	18,47	25,81	28,53	31,25	33,96	36,67	Diknas
2	Cakupan SMP/MTs terakreditasi minimal B (%)	18,80	24,75	37,62	50,49	63,36	76,23	89,10	Diknas
<b>II</b>	<b>Urusan Kesehatan</b>								
1	Cakupan Puskesmas yang terakreditasi (%)	0,00	20,00	36,00	52,00	76,00	100,00	100,00	Dikes
2	Cakupan pemenuhan standar akreditasi nasional rumah sakit tingkat dasar (%)	0,00	62,50	75,00	85,00	100,00	100,00	100,00	RSUD
<b>III</b>	<b>Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>								
1	Cakupan panjang jalan kabupaten yang terbangun (Km)	951,51	951,51	963,51	992,51	1.022,51	1.051,51	1.051,51	Dinas PU

No	Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Kondisi Awal 2015	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Tahun Transisi 2021	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			2016	2017	2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Rasio jaringan irigasi kewenangan kabupaten dalam kondisi baik (%)	53,95	62,16	71,37	81,58	90,79	100	100	Dinas PU
<b>IV</b>	<b>Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman</b>								
1	Cakupan layanan air bersih perkotaan (%)	98,13	98,50	98,88	99,25	99,63	100,00	100,00	Dinas PU
2	Cakupan layanan air bersih perdesaan (%)	73,57	76,86	80,14	83,43	86,71	90,00	93,00	Dinas PU
<b>V</b>	<b>Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat</b>								
1	Cakupan penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	BPBD
<b>VI</b>	<b>Urusan Sosial</b>								
1	Penduduk di bawah garis kemiskinan (%)	16,87 (thn 2014)	≤ 14,87	≤ 12,87	≤ 10,87	≤ 8,87	≤ 6,87	≤ 4,87	Dinas Sosial
<b>B.2.</b>	<b>Urusan Wajib Tidak Terkait Pelayanan Dasar</b>								
<b>I</b>	<b>Urusan Tenaga Kerja</b>								
1	Cakupan perusahaan yang mendaftarkan BPJS Ketenaga-	0	45,00	48,00	66,67	71,43	100,00	100,00	Disnakertrans



No	Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Kondisi Awal 2015	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Tahun Transisi 2021	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			2016	2017	2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	kerjaan dan kesehatan (%)								
<b>II</b>	<b>Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>								
1	Indeks Pembangunan Gender	> 0,2	> 0,4	> 0,5	> 0,6	> 0,7	> 0,8	> 0,8	BKB-PP
<b>III</b>	<b>Urusan Pangan</b>								
1	Desa rawan pangan (%)	40,00	36,36	32,73	26,67	19,39	10,30	5,00	KKP
<b>IV</b>	<b>Urusan Pertanahan</b>								
1	Cakupan aset tanah milik pemerintah daerah yang dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kec/Kel/desa/pihak ketiga (%)	98,28	98,62	98,97	99,31	99,66	100,00	100,00	Setda
<b>V</b>	<b>Urusan Lingkungan Hidup</b>								
1	Rasio jumlah sampah terangkut terhadap jumlah timbunan sampah (%)	41,67	45,83	50,00	54,17	58,33	62,50	66,67	BPM-LH
<b>VI</b>	<b>Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>								
1	Cakupan Penerbitan dokumen kependudukan dan pemanfaatan data dan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Disdukcapil

No	Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Kondisi Awal 2015	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Tahun Transisi 2021	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			2016	2017	2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	informasi (%)								
<b>VII</b>	<b>Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>								
1	Jumlah BUMDes terbentuk	23	33	64	95	126	157	157	BPM-PD
<b>VIII</b>	<b>Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>								
1	Cakupan Unmeet Need (kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi) (%)	12,87	13,00	12,00	11,00	10,00	9,00	8,00	BKB-PP
<b>IX</b>	<b>Urusan Perhubungan</b>								
1	Cakupan ketersediaan terminal type C (Unit)	1	0	0	1	1	1	3	Dishubkominfo
<b>X</b>	<b>Urusan Komunikasi dan Informatika</b>								
1	Cakupan aplikasi online yang disediakan pemerintah daerah	5	1	1	1	1	1	5	Dishubkominfo
<b>XI</b>	<b>Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</b>								
1	Cakupan wirausaha baru yang tercipta (%)	12,03	25,00	40,00	55,00	70,00	85,00	100,00	Diskoperindag
<b>XII</b>	<b>Urusan Penanaman Modal</b>								

No	Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Kondisi Awal 2015	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Tahun Transisi 2021	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			2016	2017	2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pertumbuhan investasi daerah (%)	8,1	≥ 9,0	≥ 9,5	≥ 10,0	≥ 10,5	≥ 11,0	≥ 11,5	BPM-LH
<b>XIII</b>	<b>Urusan Kepemudaan dan Olah Raga</b>								
1	Cakupan atlet/club yang berprestasi minimal tingkat provinsi/regional (Penghargaan)	15	15	18	20	25	30	> 30	Disporabudpar
2	Cakupan pemuda berprestasi minimal tk. Provinsi/Regional (Prestasi)	14	14	17	22	25	28	> 28	Disporabudpar
<b>XIV</b>	<b>Urusan Persandian</b>								
1	Cakupan ketersediaan sarana prasarana persandian (%)	20,00	35,00	45,00	70,00	90,00	100,00	100,00	Setda
2	Cakupan fungsional persandian yang profesional (%)	20,00	35,00	45,00	70,00	90,00	100,00	100,00	Setda
<b>XV</b>	<b>Urusan Kebudayaan</b>								
1	Cakupan bangunan/situs cagar budaya yang dikelola dan dikembangkan (Unit)	43	46	50	55	60	60	60	Disporabudpar
<b>XVI</b>	<b>Urusan Perpustakaan</b>								

No	Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Kondisi Awal 2015	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Tahun Transisi 2021	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			2016	2017	2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pertumbuhan pengunjung perpustakaan daerah (%)	Rata-rata 5,56	≥ 6,0	≥ 6,5	≥ 7,0	≥ 7,5	≥ 8,0	≥ 8,5	Arpusda
<b>XVII</b>	<b>Urusan Kearsipan</b>								
1	Cakupan Sistem pengelolaan kearsipan berbasis IT ( E-Archive) (%)	0,00	20,00	40,00	60,00	90,00	100,00	100,00	Arpusda
<b>B.3</b>	<b>Urusan Pilihan</b>								
<b>I</b>	<b>Urusan Kelautan dan Perikanan</b>								
1	Pertumbuhan produksi perikanan budidaya (%)	41,70	0,37	1,36	1,38	1,40	1,42	1,44	Dislutkan
2	Pertumbuhan produksi perikanan tangkap (%)	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	Dislutkan
3	Pertumbuhan produksi olahan hasil perikanan (%)	N/A	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	Dislutkan
<b>II</b>	<b>Urusan Pariwisata</b>								
1	Pertumbuhan kunjungan wisatawan (%)	Rata-rata 27,92	29,58	33,04	36,38	39,61	42,74	45,78	Disporabudpar
<b>III</b>	<b>Urusan Pertanian</b>								
1	Produktivitas Padi (Kw/Ha)	50,62	51,66	51,66	52,69	53,74	54,82	55,50	Distan Pangan dan

No	Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Kondisi Awal 2015	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Tahun Transisi 2021	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			2016	2017	2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									Hortikultura
2	Produktivitas Jagung (Kw/Ha)	65,53	66,87	66,87	68,21	69,57	70,96	71,86	Distan Pangan dan Hortikultura
3	Pertumbuhan ternak Sapi Sumbawa (%)	Rata-rata 24,74	4,90	5,00	6,12	6,41	7,00	7,50	Disnak dan Keswan
4	Pertumbuhan ternak Sapi Bali (%)	4,95	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	Disnak dan Keswan
5	Pertumbuhan ternak Kerbau Sumbawa (%)	Rata-rata -4,85	-2,50	0,00	2,00	2,50	3,00	3,50	Disnak dan Keswan
6	Pertumbuhan ternak Kuda Sumbawa (%)	Rata-rata -4,06	-2,50	0,00	1,00	2,00	2,50	3,00	Disnak dan Keswan
7	Pertumbuhan produksi kopi (%)	Rata-rata 9,06	10,47	11,29	11,59	12,99	14,94	15,00	Dishutbun
8	Pertumbuhan produksi tembakau (%)	N/A	87,00	46,53	31,74	24,10	19,42	20,00	Dishutbun
<b>IV</b>	<b>Urusan Perdagangan</b>								
1	Cakupan pasar rakyat yang terbangun (unit)	19	19	19	20	20	25	25	Diskoperindag

No	Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Kondisi Awal 2015	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Tahun Transisi 2021	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			2016	2017	2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Cakupan lapak yang dibangun (unit)	94	104	114	124	134	144	154	Diskoperindag
<b>V</b>	<b>Usuran Perindustrian</b>								
1	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB (%)	2,07	2,08	2,09	2,10	2,11	2,12	2,13	Diskoperindag
<b>B.4</b>	<b>Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah</b>								
1	Penilaian LAKIP Daerah oleh BPK-RI	CC	B	B	B	B	B	B	Setda
2	Opini audit BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	DPPK
<b>C.</b>	<b>Aspek Daya Saing</b>								
1	Nilai Tukar Petani	106,43	106,50	107,50	108,50	109,50	110,50	111,50	Distan Pangan dan Hortikultura
2	Rasio panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap (%)	60,72	68,58	75,58	82,58	89,58	100,00	100,00	Dinas PU
3	Stadion olah raga yang representatif	-	-	-	-	1	1	1	Disporabudpar, PU, Setda
4	Gedung Kesenian yang representatif	-	-	-	-	-	1	1	Disporabudpar, PU, Setda

No	Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Kondisi Awal 2015	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Tahun Transisi 2021	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			2016	2017	2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Rata-rata Lama Proses Perizinan tanpa verifikasi lapangan	5 Hari	1 jam	1 jam	1 jam	1 jam	1 jam	1 jam	KPPT
6	Rata-rata Lama Proses Perizinan yang memerlukan verifikasi lapangan	10 Hari	10 Hari	3 Hari	3 Hari	3 Hari	3 Hari	3 Hari	KPPT
7	Pasar Rakyat Tipe A (Pasar Induk) (Unit)	-	-	-	1	1	1	1	Diskoperindag, PU, Setda
8	Rumah Sakit Umum Daerah yang representatif (Unit)	-	-	-	-	1	1	1	RSUD, PU, Setda
9	Cakupan wilayah yang terjangkau akses internet (%)	91,67	91,67	92,00	92,50	93,00	93,50	93,50	Dishubkominfo
10	Rasio ketergantungan (%)	53,1	52,76	52,41	52,07	51,78	51,51	51,23	BKBPP, Disdukcapil

## **BAB X**

### **PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN**

#### **10.1. Pedoman Transisi**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumbawa Tahun 2016-2021 merupakan dokumen yang strategis bagi pembangunan Kabupaten Sumbawa lima tahun ke depan, yang menerjemahkan visi-misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Pedoman Transisi Dokumen RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2016-2021 menjadi panduan dalam merencanakan dan mewujudkan pembangunan yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk tahun 2016 hingga tahun 2021.

Setelah berakhirnya RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2016-2021, perlu disusun RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2025 sebagai acuan bagi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lima tahun berikutnya. Dengan demikian, maka rencana pembangunan untuk tahun 2021 harus sudah ditetapkan pada tahun 2020, sementara RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2025 akan ditetapkan pada tahun 2021. Pada masa transisi tersebut, diperlukan sebuah acuan bagi penyusunan perencanaan pembangunan tahun 2021. Acuan penyusunan perencanaan pembangunan tahun 2021 akan mendasarkan pada RPJPD Kabupaten Sumbawa Tahun 2005-2025, amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2024 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021, serta memperhitungkan keberlanjutan RPJMD Tahun 2016-2021 dan pedoman lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **10. 2. Kaidah Pelaksanaan**

RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2016-2021 ini merupakan panduan bagi Pemerintah Kabupaten Sumbawa serta pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan. Oleh karena itu konsistensi, kerjasama, transparansi dan inovasi serta rasa tanggung jawab tinggi diperlukan guna pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2016-2021 dengan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:



- a. Bupati Sumbawa berkewajiban menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2016-2021 kepada masyarakat;
- b. Penyusunan RKPD Kabupaten Sumbawa Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2016-2021;
- c. Seluruh Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Sumbawa dan seluruh pemangku kepentingan agar mendukung pencapaian target-target sebagaimana yang telah ditetapkan RPJMD Kabupaten Sumbawa tahun 2016-2021;
- d. Seluruh Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Sumbawa dan seluruh pemangku kepentingan agar melaksanakan program-program yang tercantum di dalam RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2016-2021 dengan sebaik-baiknya;
- e. Seluruh Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Sumbawa agar segera menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2016-2021 pasca penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2016-2021 ini;
- f. Penyusunan RPJMD ini telah dilakukan melalui berbagai tahapan dan pendekatan, termasuk melalui konsultasi publik, dengan harapan program-program yang tertuang dalam RPJMD sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Penjaringan aspirasi melalui konsultasi publik tersebut dapat meningkatkan peran serta para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2016-2021, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) selaku institusi yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam melakukan perencanaan pembangunan daerah, bertugas untuk melakukan fasilitasi, monitoring dan evaluasi terhadap Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Sumbawa;
- g. Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2016-2021;
- h. DPRD berkewajiban membahas KUA - PPAS yang diajukan oleh Bupati dalam rangka penyusunan RAPBD dan pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD untuk menjamin agar sesuai dengan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2016-2021. Hal

tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 3 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan bahwa "DPRD mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan APBD".

- i. Masyarakat dapat melaporkan program dan kegiatan yang dilaksanakan Perangkat Daerah yang dianggap tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan.
- j. Mengingat bahwa penyusunan RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2016-2021 ini dilakukan secara bersamaan dengan proses restrukturisasi perangkat daerah, maka Bappeda harus dapat berperan aktif memfasilitasi proses perumusan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah agar selaras dengan semangat dan arahan pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2016-2021 ini.

### **10. 3. Pengembangan Pembiayaan Pembangunan**

Terhadap program / kegiatan dalam prioritas, namun pemerintah tidak mampu mendanainya seperti penyediaan fasilitas / infrastruktur strategis yang dapat meningkatkan daya saing daerah dan penyediaan pelayanan dasar masyarakat, maka kebijakan pendanaan pembangunan diarahkan dengan melibatkan masyarakat dan dunia usaha melalui pelaksanaan kerjasama pembiayaan pembangunan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Swasta (*Public Private Partnership*) maupun melalui pelaksanaan *Corporate Social Responsibility (CSR)*, Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dari pelaku usaha daerah di Kabupaten Sumbawa, bersinergi dengan Pemerintah Provinsi NTB dan Pemerintah Pusat, serta kerjasama kemitraan dengan Lembaga Non Pemerintah Lainnya baik Lembaga Dalam Negeri maupun Lembaga Internasional.

- 1) Kerjasama Pemerintah dan Swasta (*public private partnership*) diarahkan pada pembiayaan pembangunan untuk program/kegiatan penyediaan infrastruktur dan pelayanan publik yang berpotensi menghasilkan pendapatan dan dalam jangka panjang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, meningkatkan daya saing daerah dan menurunkan disparitas wilayah serta meningkatkan perekonomian daerah.

